

Innovation & Technology for Connectivity



Laporan Tahunan **2023** Annual Report

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Innovation & Technology for Connectivity

Memanfaatkan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika pasar, Protelindo mampu menangkap peluang baru pada tahun 2023 untuk memperluas layanannya. Portofolio menara diperluas, baik melalui pembangunan menara baru dan akuisisi strategis menara yang sudah ada, sementara layanan VSAT dan *wireline* diperkuat melalui layanan Protelindo yang unggul. Dengan komitmen terhadap inovasi, Protelindo mampu menjawab kebutuhan pelanggan dan melampaui ekspektasi dengan memastikan konektivitas andal dan tanpa hambatan.

Saat ini, Protelindo memiliki dan mengoperasikan 30.558 menara telekomunikasi dan melayani 54.284 penyewa di Indonesia. Protelindo juga memiliki 97.994 km jaringan kabel serat optik dengan kehadiran di hampir semua pulau besar di Indonesia. Dengan fondasi keuangan yang kokoh pada tahun 2023, Perseroan memandangi 2024 dengan positif.

Innovation and Technology for Connectivity mewakili komitmen Protelindo untuk menjadi perusahaan inovatif dan berbasis teknologi dalam mewujudkan visi menjadi penyedia multi-layanan dan infrastruktur telekomunikasi terkemuka dan paling inovatif di Indonesia.

Leveraging its deep understanding of the evolving market dynamics, Protelindo was able to capture new opportunities in 2023 to expand its services. Tower portfolio was augmented both through the construction of new towers and strategic acquisitions of existing ones, while VSAT and wireline services were strengthened through Protelindo's service excellence. The pursuit of innovation has enabled Protelindo to meet customers' needs and exceed their expectation, ensuring seamless connectivity and reliability.

Today, Protelindo owns and operates 30,558 telecommunication towers and serves 54,284 tenants in Indonesia. Protelindo also owns 97,994 km of fibre optic cable networks and its presence encompasses nearly all of Indonesia's major islands. With solid financial foundation laid out in 2023, the Company looks ahead to 2024 with optimism.

Innovation and Technology for Connectivity signifies the Company's commitment to be an innovative and technology-driven company and realize a vision of becoming Indonesia's premier and most innovative telecommunications multi-service and infrastructure provider.

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini dapat dibaca secara bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang komitmen dan program keberlanjutan Perseroan. Dalam Laporan ini, setiap rujukan kepada "Perseroan", "Kami", "Grup SMN", atau "Grup", berarti merujuk pada SMN dan entitas anak Perusahaan.

This Annual Report can be read in conjunction with the Company's Sustainability Report to provide a holistic understanding of the Company's commitment and sustainability programs. In this Report, any reference to "the Company", "We", "SMN Group", or "Group", refers to SMN and its subsidiary entities.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

4 IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- 6 KINERJA 2023
KEY PERFORMANCE 2023
- 8 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS
- 10 IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS
- 10 IKHTISAR SAHAM
STOCK HIGHLIGHTS
- 12 PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS

18 LAPORAN MANAJEMEN

EVENT HIGHLIGHTS

- 20 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT
- 28 LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT
- 36 PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023
STATEMENTS OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE 2023 ANNUAL REPORT

38 PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

- 40 IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY
- 42 JEJAK LANGKAH
MILESTONES
- 46 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
COMPANY AT A GLANCE
- 50 VISI, MISI & NILAI-NILAI PERUSAHAAN
VISION, MISSION & CORPORATE VALUES

- 52 KEGIATAN USAHA
LINE OF BUSINESS
- 53 LAYANAN KAMI
OUR SERVICES
- 54 WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREAS
- 56 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE
- 58 KEANGGOTAAN ASOSIASI
ASSOCIATION MEMBERSHIP
- 59 PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILES
- 65 PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILES
- 72 DEMOGRAFI KARYAWAN
ASSOCIATION MEMBERSHIP
- 73 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION
- 74 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE
- 76 INFORMASI ENTITAS ANAK
INFORMATION ON SUBSIDIARIES
- 99 KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM
SHARES ISSUANCE CHRONOLOGY
- 99 KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER BONDS LISTING CHRONOLOGY
- 101 INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK
INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTANT & PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SERVICES
- 102 INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK
INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTANT & PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SERVICES
- 103 PERINGKAT
RATINGS
- 104 PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
AWARDS & CERTIFICATIONS
- 105 SERTIFIKASI SMN DAN ANAK PERUSAHAAN
CERTIFICATIONS OF SMN AND ITS SUBSIDIARIES

106 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

- 108 TINJAUAN PEREKONOMIAN
ECONOMIC OVERVIEW
- 111 TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY REVIEW
- 113 STRATEGI USAHA
BUSINESS STRATEGY
- 117 ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT
- 119 PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT
- 120 TINJAUAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA
OPERATIONAL SEGMENT REVIEW
- 121 TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW
- 148 SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES
- 174 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH
- 180 TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

190 TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

- 205 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- 222 DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
- 242 DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
- 259 ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS
- 260 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
- 271 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

- 278 KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER
WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE
- 279 SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
- 285 UNIT KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY UNIT
- 286 DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
- 292 AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT
- 294 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM
- 296 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT
- 306 PERMASALAHAN HUKUM
LITIGATION
- 307 AKSES INFORMASI DATA PERSEROAN
INFORMATION ACCESS & CORPORATE DATA
- 308 KEBIJAKAN PRIVASI DATA DAN INFORMASI
DATA AND INFORMATION PRIVACY POLICY
- 309 PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
- 311 PEDOMAN PERILAKU
CODE OF CONDUCT
- 321 KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR
COMPANY POLICY ON CREDITOR'S RIGHTS
- 322 KEBIJAKAN ANTIKORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY
- 324 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN
EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARES OPTION PROGRAMS
- 326 WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM
- 328 DAFTAR INDEKS SEOJK16/2021
SEOJK INDEX LIST 16/2021
- 371 KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
CONFORMITY OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION TO THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

326 LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT

IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Protelindo mampu membukukan pendapatan senilai Rp11,74 triliun di tahun 2023. Pendapatan yang berhasil tumbuh 6,39% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,04 triliun ini terutama didukung oleh kenaikan pendapatan fiber to the tower sebesar 49,1% menjadi Rp1,76 triliun di tahun 2023.

Protelindo was able to record a revenue of Rp11.74 trillion in 2023. This revenue, which grew by 6.39% yoy compared to the previous year's Rp11.04 trillion, was primarily supported by a 49.1% increase in fiber to the tower revenue to Rp1.76 trillion in 2023.

01



KINERJA 2023

KEY PERFORMANCE 2023

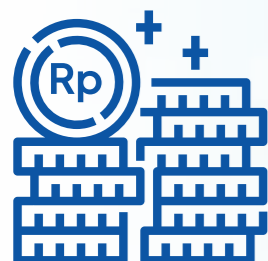


Perseroan mampu membukukan pendapatan senilai

Rp11,74
triliun

di tahun 2023, atau tumbuh 6,39% yoy.

The Company was able to record a revenue of Rp11.74 trillion in 2023, or grew by 6.39% yoy.



Laba usaha mencapai

Rp6,96
triliun

atau tumbuh 1,51% yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Operating income reached Rp6.96 trillion, or grew by 1.51% yoy compared to the previous year.

Laba tahun berjalan mencapai

Rp3,32 triliun

Capaian ini lebih rendah 5,76% yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Net income for the year reached Rp3.32 trillion. This achievement is 5.76% yoy lower compared to the previous year's

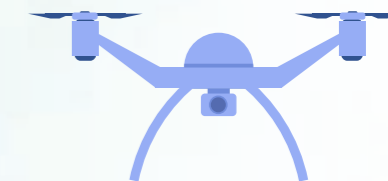


Laba bruto mencapai

Rp8,21
triliun

di tahun 2023, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Gross income reached Rp8.21 trillion in 2023, higher than the previous year.



Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 4,26% yoy menjadi

Rp68,39 triliun

di tahun 2023.

The Company achieved asset growth of 4.26% yoy to Rp68.39 trillion in 2023.

Ekuitas Perseroan tumbuh sebesar 14,38% yoy, meningkat menjadi

Rp16,51 triliun

The Company's equity increased to Rp16.51 trillion with a growth of 14.38% yoy.

Liabilitas Perseroan mencapai

Rp51,89
triliun

meningkat sebesar 1,40% yoy.

Liabilities reached Rp51.89 trillion, increased by 1.40% yoy.

Laba per saham dasar dan dilusian mampu dipertahankan di level

Rp985
per saham.

Basic and diluted earnings per share were maintained at the level of Rp985 per share.



IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Total Aset Lancar	4.401,3	3.627,3	7.366,6	Total Current Assets
Aset Tetap - Netto	40.385,1	37.152,1	32.951,5	Fixed Assets - Net
Total Aset Tidak Lancar	63.991,4	61.973,5	58.429,7	Total Non-Current Assets
Total Aset	68.392,7	65.600,8	65.796,4	Total Assets
Total Liabilitas Jangka Pendek	24.278,2	14.423,2	21.856,9	Total Current Liabilities
Utang Bank dan Utang Obligasi	44.467,7	42.994,6	44.439,2	Bank Loans and Bonds Payable
Total Liabilitas Jangka Panjang	27.608,3	36.746,7	31.886,4	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	51.886,6	51.169,9	53.743,3	Total Liabilities
Total Ekuitas	16.506,1	14.431,0	12.053,1	Total Equities
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	68.392,7	65.600,8	65.796,4	Total Liabilities and Equity

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Pendapatan	11.740,3	11.035,7	8.635,3	Revenues
Beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi	1.056,1	880,7	695,5	Selling and marketing expenses and General and administrative expenses
EBITDA	9.999,8	9.547,2	7.459,5	EBITDA
Laba Bruto	8.213,3	8.121,9	6.295,8	Gross Income
Laba Usaha	6.962,6	6.859,1	5.422,3	Operating Income
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	3.567,1	3.979,5	3.741,6	Profit Before Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	3.324,9	3.528,0	3.473,4	Income for the Year
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(22,8)	86,8	(30,4)	Total Other Comprehensive Income
Laba Penghasilan Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	3.274,3	3.473,4	3.452,9	Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	50,6	54,5	20,5	Non-controlling Interest
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.302,0	3.614,7	3.443,0	Total Comprehensive Income for the Year
Total Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	3.252,4	3.559,4	3.422,5	Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	49,6	55,3	20,5	Non-controlling Interest
Laba Tahun Berjalan per Saham (dalam angka penuh)	985	1.045,0	1.039,0	Earnings per Share (in full amount)

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	8.939,0	8.102,0	6.251,4	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.546,9)	(5.887,9)	(18.617,1)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(4.270,9)	(6.730,8)	15.686,5	Net Cash Flows Used in Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan setara kas	121,2	(4.516,7)	3.320,9	Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	285,2	4.717,0	1.397,8	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	404,9	285,2	4.717,0	Cash and Cash Equivalents at The End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING

KEY RATIOS

Uraian	2023	2022	2021	Description
Marjin EBITDA	85,2%	86,5%	86,4%	EBITDA Margin
Marjin Laba Usaha	59,3%	62,2%	62,8%	Operating Income Margin
Marjin Laba Tahun Berjalan	28,3%	32,0%	40,2%	Profit for the Year Margin
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas	20,1%	24,4%	28,8%	Return on Equity
Rasio Laba terhadap Total Aset	4,9%	5,4%	5,3%	Return on Assets
Rasio Lancar (X)	0,2	0,3	0,3	Current Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X)	2,7	2,9	3,3	Net Debt to Equity Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X)	0,6	0,6	0,6	Net Debt to Asset Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X)	4,3	4,1	4,4	Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)

*)EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan

*) The last quarter's annualized EBITDA

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Portofolio Aset Strategis Strategic Asset Portfolio	Satuan Unit	2021	2022*	2023
Jumlah Menara Total Tower	Unit	28.698	29.794	30.558
Sewa Lokasi Location Lease	Site	53.975	53.967	54.284
Pendapatan Revenues				
Penyewaan Menara Tower Tenancies	Rp Miliar Rp Billion	7.101,3	8.606,0	8.346,3
Jasa VSAT dan Wireline VSAT and Wireline Service	Rp Miliar Rp Billion	933,0	1.606,4	2.187,7
Jasa dan Lainnya Service and Others	Rp Miliar Rp Billion	601,0	823,3	1.206,3
Total Pendapatan Total Revenues	Rp Miliar Rp Billion	8.635,3	11.035,7	11.740,3
Pertumbuhan Growth	%	16,0%	27,8%	6,4%

IKHTISAR SAHAM

STOCK HIGHLIGHTS

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan informasi terkait perkembangan kinerja saham triwulanan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Suspensi Perdagangan Saham dan/ atau Delisting

Perusahaan juga tidak menyajikan informasi terkait suspensi perdagangan saham dan/ atau delisting karena informasi tersebut tidak relevan terhadap status Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik.

Until the period ending December 31, 2023, the Company is not a public company whose shares are not listed on the Indonesian Stock Exchange. As such, the Company does not provide information on the quarterly share price performance for the last 2 (two) years.

Stock Trading Suspension and/or Delisting

The Company also does not provide information on the suspension of the trading of its shares and/or the delisting of its shares as this information is not relevant to the status of the Company which is not a public company.

Ikhtisar Saham Stock Highlights

Aksi Korporasi

Selama tahun 2023 Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan efek bersifat ekuitas karena tidak merupakan perusahaan publik. Namun demikian, sebagai penerbit efek bersifat utang, aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan adalah pembayaran pokok dan kupon obligasi yang jatuh tempo di sepanjang tahun 2023 sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Corporate Actions

Throughout 2023, the Company did not conduct corporate actions such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, and changes in the nominal share value. However, as an issuer of debt securities, the Company's corporate action is the payment of principal and coupons on the bonds maturing in 2023 as shown in the table below.

Nama Obligasi Name of the Bond	Penerbit Issuer	Jumlah Pokok (Rp Miliar) Principal Amount (Rp Billion)	Tanggal Emisi Date of Issue	Jatuh Tempo Maturity	Kupon (Per Tahun) Coupon (Per Annum)	Peringkat Rating
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 seri C Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 series C	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	103	23 November 2016 November 23, 2016	23 November 2023 November 23, 2023	8,75%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AA+ (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 seri A Sustainable Bonds II Protelindo Phase I Year 2020 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	84	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	7,00%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 seri A Sustainable Bonds III Protelindo Phase I Year 2022 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	931	9 Agustus 2022 August 9, 2022	19 Agustus 2023 August 19, 2023	4,50%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023 seri A Sustainable Bonds III Protelindo Phase III Year 2023 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	797,50	8 Juni 2023 June 8, 2023	18 Juni 2024 June 18, 2024	6,15%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)

PERISTIWA PENTING

EVENT HIGHLIGHTS



21 Maret | March 2023

Protelindo menyelesaikan emisi obligasi sebanyak sekitar Rp2,9 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) III Tahap II Tahun 2023 ("Obligasi I 2023"). Obligasi I 2023 didistribusikan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan tenor 370 hari dan 3 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 6,35% dan 6,60% per tahun.

21 Maret 2023
21 March 2023

Protelindo concluded issuance of local bonds of approximately Rp2.9 trillion from Continuous Public Offering III Phase II Year 2023 ("Bonds I 2023"). Bonds I 2023 were distributed on March 21, 2023 under 370 days and 3-year tenor with annual fixed rate coupon of 6.35% and 6.60% respectively.



Protelindo, Iforte, KIN dan STP sebagai peminjam telah menandatangani Perjanjian Perubahan No. 298/AMD/MZH/0423 atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 9 Desember 2022 dengan PT Bank Mizuho Indonesia (Perjanjian Perubahan Mizuho). Sehubungan dengan Perjanjian Mizuho ini, para pihak telah sepakat untuk meningkatkan nilai fasilitas menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000. Protelindo dan STP masing-masing telah menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tanggal 9 Desember 2022 untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Perubahan Mizuho.

14 April 2023
14 April 2023

Protelindo, Iforte, KIN dan STP as borrower signed Amendment Agreement No. 298/AMD/MZH/0423 to the Facility Agreement dated December 9, 2022 with PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho Amendment Agreement). In connection with Mizuho Amendment Agreement, the parties have agreed to increase the facility limit to become Rp1,000,000,000,000. Protelindo and STP as guarantor, respectively has signed Amendment Agreement to the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated December 9, 2022 to guarantee all obligations under Mizuho Amendment Agreement.

Peristiwa Penting Event Highlights



Perseroan mengumumkan komposisi baru anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi efektif per tanggal 5 Mei 2023.

5 Mei 2023
5 May 2023

The Company announced the new composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors effectively as of May 5, 2023.



Iforte melakukan akuisisi atas 60% saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Varnion Technology Semesta (VTS).

23 Mei 2023
23 May 2023

Iforte completed the acquisition of 60% shares and become controlling shareholder in PT Varnion Technology Semesta (VTS).



STP sebagai peminjam telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 44, dibuat dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Perjanjian Kredit CIMB). Protelindo sebagai penjamin telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 45 dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban STP berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB.

29 Mei 2023
29 May 2023

STP as the borrower signed the Deed of Credit Agreement No. 44, drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Credit Agreement) in the amount of Rp1,000,000,000,000 (CIMB Credit Agreement). Protelindo as the guarantor signed the Deed of Corporate Guarantee Number 45 drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) to guarantee STP's obligation under CIMB Credit Agreement.



Iforte dan Protelindo mendirikan Perusahaan baru dengan nama PT Helios Energi Nusantara (HEN). Maksud dan tujuan HEN ialah berusaha dalam bidang Konstruksi Khusus; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Iforte memiliki 99,89% saham atas HEN dan Protelindo memiliki 0,11% saham atas HEN.

7 Juni 2023
7 June 2023

Iforte and Protelindo established a new company under the name of Helios Energi Nusantara (HEN). The purpose and objective of HEN is to conduct business in the field of Specialized Construction; Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air; Wholesale Trade, Not Cars and Motorbikes; Rental and Leasing Activities Without Option Rights. Iforte holds 99.89% of HEN shares and Protelindo holds 0.11% of HEN shares.



Peristiwa Penting Event Highlights



Protelindo menyelesaikan emisi obligasi sebanyak sekitar Rp1,1 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) III Tahap III Tahun 2023 ("Obligasi II 2023"). Obligasi II 2023 didistribusikan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tenor 370 hari dan 3 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 6,15% dan 6,50% per tahun.

Protelindo concluded issuance of local bonds of approximately Rp1.1 trillion from Continuous Public Offering III Phase III Year 2023 ("Bonds II 2023"). Bonds II 2023 were distributed on June 8, 2023 under 370 days and 3-year tenor with annual fixed rate coupon of 6.15% and 6.50% respectively.

8 Juni 2023
8 June 2023



Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR dan GIK telah menandatangani Perubahan Keempat belas atas Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Central Asia Tbk. Perjanjian Perubahan Keempat belas ini merupakan perubahan atas fasilitas kredit berdasarkan Rp500.000.000.000 Revolving Loan Facility Agreement tertanggal 21 Desember 2016 dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Perubahan Ketiga belas atas Perjanjian Fasilitas tanggal 9 November 2022. Sehubungan dengan Perubahan Keempat belas ini, para pihak telah sepakat untuk menambahkan fasilitas kredit investasi (Fasilitas K) sejumlah Rp3.400.000.000.000 dan penambahan nilai fasilitas *money market* yang keseluruhannya menjadi Rp1.500.000.000.000 untuk Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR dan GIK. Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR dan GIK bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban yang ada.

Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR and GIK have signed the Fourteenth Amendment Agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA). This Fourteenth Amendment Agreement is an amendment of facility credit based on Rp500,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement dated December 21, 2016 which is subsequently amended for several times as lastly amended by Thirteenth Amendment Agreement dated November 9, 2022. In connection with the Fourteenth Amendment Agreement, parties have agreed to provide additional investment facility (Facility K) in the amount of Rp3,400,000,000,000 and increment of money market facility in the amount of Rp1,500,000,000,000 for Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR and GIK. Protelindo, Iforte, KIN, STP, BIT, QTR and GIK are jointly and several liability to their obligations thereof.

12 Juni 2023
12 June 2023

Peristiwa Penting Event Highlights



Protelindo, Iforte dan STP telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 dan Akta Perjanjian Nomor 18, keduanya dibuat di hadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk pinjaman jangka pendek dan Rp1.000.000.000.000 untuk pinjaman jangka panjang (Perjanjian Kredit BNI). Protelindo sebagai penjamin telah menandatangani Perjanjian Penanggungungan Perusahaan No. 19 di hadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit BNI.

Protelindo, Iforte and STP signed the Deed of Credit Agreement No. 17 and Deed of Credit Agreement No. 18, both drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI Credit Agreement) in the amount of Rp1,000,000,000,000 for short term loan and Rp1,000,000,000,000 for long term loan (BNI Credit Agreement). Protelindo as the guarantor signed the Deed of Corporate Guarantee Number 19 drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (Business Law) to guarantee all obligation under BNI Credit Agreement.

13 Juni 2023
13 June 2023



Iforte dan PT Surya Sabang Smartpolitan menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No 347 tertanggal 27 Juni 2023 bernama Iforte Subang Smartpolitan,

Iforte and PT Surya Sabang Smartpolitan executed the Deed of Concession Agreements No. 347 dated 27 June 2023, titled Iforte Subang Smartpolitan.

27 Juni 2023
27 June 2023



Iforte melakukan akuisisi atas 98,212% saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Global Telekomunikasi Prima (GTP).

Iforte completed the acquisition of 98.212% shares and become controlling shareholder in PT Global Telekomunikasi Prima (GTP).

28 Juli 2023
7 July 2023

Peristiwa Penting
Event Highlights



GTP melakukan akuisisi atas 30% saham atas PT Bach Multi Global (BMG).

GTP completed the acquisition of 30% shares in PT Bach Multi Global (BMG).



2 Agustus 2023
2 August 2023



Protelindo dan Iforte sebagai peminjam dan STP sebagai penjamin telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 12 di hadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000.000 (Perjanjian Kredit dan Penanggungan). Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Penanggungan, maka STP akan menjamin kewajiban dari Protelindo dan Iforte sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan Penanggungan.

Protelindo and Iforte as borrowers and STP as a guarantor signed the Deed of Credit Agreement No. 12 drawn before Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, for the facility in the amount of Rp1,500,000,000,000 (Credit Agreement and Corporate Guarantee). Under the Credit Agreement and Corporate Guarantee, STP will guarantee Protelindo and Iforte's obligations in relation with the Credit Agreement and Corporate Guarantee.

28 Agustus 2023
28 August 2023



Iforte mengakuisisi saham milik PT Iforte Payment Infrastructure seri A sebesar 13,59%, Seri B 1,29%, dan seri C 47,49%.

Iforte completed the acquisition of 13,59% Series A, 1,29% Series B, and 47,49% Series C shares in PT Iforte Payment Infrastructure.



26 September 2023
26 September 2023

Peristiwa Penting
Event Highlights



Protelindo, Iforte dan STP sebagai para peminjam telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 dengan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (Perjanjian Fasilitas MUFG). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas MUFG ini, para pihak telah sepakat untuk meningkatkan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp1.350.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang. Protelindo, Iforte dan STP bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban yang ada.

4 Oktober 2023
4 October 2023

Protelindo, Iforte and STP as the borrowers has signed Amendment and Restatement Agreement dated February 28, 2017 with MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch (MUFG Facility Agreement). In connection with MUFG Facility Agreement, the parties have agreed to increase the credit facility to become IDR1,350,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency or Japanese Yen. Protelindo, Iforte and STP are jointly and several liability to their obligations thereof.



BIT dan PT Alita Praya Mitra menandatangani Akta perjanjian Jual Beli Aset berupa jaringan fisik serat optik No 95 tertanggal 14 November 2023.

14 November 2023
14 November 2023

BIT dan PT Alita Praya Mitra executed the Sale and Purchase Agreement of Assets in the form of Fiber Optic Physical Network No. 95 dated 14 November 2023.



23 November 2023
23 November 2023

Protelindo telah sepenuhnya membayar kembali Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016.

Protelindo has repaid Protelindo Sustainable Bonds I Phase I Year 2016.



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORTS

Perseroan dapat terus memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham sepanjang tahun 2023, serta mewujudkan kontribusinya terhadap akses informasi dan komunikasi digital yang merata di seluruh Indonesia.

The Company is able to continue providing value to all stakeholders and shareholders throughout 2023, as well as realising our contribution to equal access to digital information and communication across Indonesia.

02



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Ario Wibisono
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report



Kejelian Protelindo dalam menghadapi tantangan membuahkan hasil nyata, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan dan pengoperasian

30.558 menara telekomunikasi

Perusahaan, melayani 54.284 penyewa, dan pengoperasian jaringan kabel serat optik sepanjang 97.994 km.

The Company's effective response to business challenges yielded tangible results, evidenced by the Company's ownership and operation of 30,558 telecommunication towers, servicing 54,284 tenants, and maintaining 97,994 km of fiber optic cable networks.

Pemegang Saham yang terhormat,

Bergerak di bidang penyediaan digital infrastruktur, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo" atau "Perseroan") turut berperan dalam memberikan akses informasi dan komunikasi digital yang merata dan setara di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, Melalui layanannya yang inovatif, Perseroan mampu memberikan hasil yang baik.

Pencapaian Perseroan tidak lepas dari faktor perekonomian global yang fluktuatif dan situasi geopolitik yang kompleks. Perekonomian Indonesia sendiri masih melanjutkan kepulihan sepanjang tahun 2023. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang

Dear Distinguished Shareholders,

Engaging as a digital infrastructure provider, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo" or the "Company") is taking a role in creating equitable and equal access of digital information and communication throughout Indonesia. In 2023, through its innovative services, the Company successfully delivered good results.

The Company's achievements were inseparable from the backdrop of global economic fluctuations and geopolitical complexities. Indonesia's economic rebound persisted throughout 2023, showcasing steadfast growth, macroeconomic

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

kuat, kestabilan makroekonomi, dan ketahanan keuangan. Patut dicatat bahwa Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kumulatif pada kisaran 5.00%, yaitu sebesar 5,05% pada tahun 2023, dengan tingkat inflasi bertahan di 2,61% secara tahunan per Desember 2023.

Ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh berbagai sektor, terutama sektor informasi dan komunikasi, yang mencatatkan pertumbuhan yang kuat, yakni pada tingkat 7,59% atau melampaui pertumbuhan PDB. Sektor ini berkontribusi 4,23% terhadap PDB, menggarisbawahi signifikansinya yang meningkat di masyarakat, khususnya dalam komunikasi digital yang difasilitasi oleh konektivitas internet yang luas. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan penetrasi internet mencapai hampir 80% dengan akses yang cukup setara antar gender dan perkotaan-perdesaan. Selain itu, operator telekomunikasi Indonesia mencatat kenaikan pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU), yang mencerminkan peningkatan konsumsi layanan komunikasi dan informasi di samping daya beli konsumen yang kuat.

Protelindo bangga dapat berperan di tengah kemajuan ini sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penyediaan digital infrastruktur. Kami bersyukur atas keberhasilan menavigasi tahun 2023, sebagaimana diuraikan dalam laporan tahunan ini.

PANDANGAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Sejalan dengan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris, kami turut memastikan pengelolaan Perseroan secara bertanggungjawab sepanjang tahun 2023. Untuk itu, Dewan Komisaris melakukan pertemuan rutin untuk meninjau kemajuan pelaksanaan rencana bisnis, memberikan masukan tentang perkembangan industri, dan masukan relevan lainnya, seperti pengendalian biaya.

Dalam pengamatan kami, Direksi dengan cermat menganalisis kondisi industri, tantangan bisnis, dan peluang pada tahun 2023. Terdapat tantangan

stability, and financial resilience. Notably, Indonesia sustained a cumulative gross domestic product (GDP) growth in the range of 5.00%, namely at 5.05% in 2023, with the inflation rate holding at 2.61% year-on-year as of December 2023.

The nation's economic resilience found impetus in various sectors, notably the information and communication sector, which witnessed a robust 7.59% year-on-year growth, surpassing the GDP expansion. This sector contributed 4.23% to the GDP, underscoring its escalating significance in the society, particularly in digital communication facilitated by widespread internet connectivity. Recent data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) revealed nearly 80% internet penetration, demonstrating equitable access across gender and urban-rural settings. Additionally, Indonesian telecom operators recorded an uptick in average revenue per user (ARPU), reflecting heightened consumption of communication and information services alongside robust consumer purchasing power.

Protelindo is delighted of its role amid these advancements as a company specialising in digital infrastructure provision. We express gratitude for successfully navigating 2023, as outlined in this annual report.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Aligned with the Board of Commissioners' oversight and advisory responsibilities, we ensured responsible management of the Company throughout 2023. This involved regular meetings to review progress against business plans, offering insights on industry developments, and other relevant inputs such as cost control.

The Board of Directors diligently analysed industry conditions, business challenges, and opportunities in 2023. There were challenges, such as the elevated

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

seperti kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023. Namun, dengan pengelolaan liabilitas yang hati-hati dan pelaksanaan strategis belanja operasional dan modal, bisnis Perseroan dapat tetap bertumbuh dengan sehat.

Direksi juga tidak luput memperhitungkan dampak berkelanjutan dari merger operator telekomunikasi yang terjadi pada tahun 2022. Merger ini mendorong permintaan untuk infrastruktur telekomunikasi, sehingga menghadirkan peluang ekspansi baru bagi Protelindo.

Direksi dengan mahir menanggapi kondisi di atas dengan strategi operasional dan keuangan yang tepat, memfasilitasi ekspansi sambil menjunjung tinggi stabilitas keuangan dan memberikan pertumbuhan dalam lanskap yang kompetitif. Untuk itu, kami mengapresiasi Direksi yang melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022. Pada bulan Maret dan Juni 2023, Perseroan menyelesaikan emisi obligasi berkelanjutan dengan total nilai obligasi yang ditawarkan masing-masing sebesar Rp2,9 triliun dan Rp1,09 triliun. Langkah strategis ini memastikan Protelindo memiliki dana yang cukup untuk berkembang.

Strategi lain termasuk konstruksi menara selektif, akuisisi menara strategis, optimalisasi penyewa, dan pengiriman layanan berkualitas yang konsisten. Upaya diversifikasi pendapatan melampaui layanan menara untuk mencakup bisnis yang berdekatan, dicontohkan oleh ekspansi ke layanan *fiber to the home* (FTTH) di segmen non-menara.

Strategi tersebut membuahkan hasil nyata, dibuktikan dengan kepemilikan dan pengoperasian 30.558 menara telekomunikasi Perseroan, melayani 54.284 penyewa, dan pengoperasian jaringan kabel serat optik sepanjang 97.994 kilometer per 31 Desember 2023. Sewa menara sebagai segmen bisnis utama, menghasilkan laba kotor sebesar Rp6,17 triliun, yang merupakan 75,09% dari total pendapatan pada tahun 2023, meningkat 7,46% secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6,66 triliun.

benchmark interest rate in 2023. However, prudent management of liabilities and strategic execution of operational and capital expenditures ensured that the Company's business growth continued to be robust.

Furthermore, the Board of Directors did not fail to consider the ongoing impact of the 2022 telecom operator merger. This merger stimulated demand for telecommunications infrastructure, presenting Protelindo with new expansion opportunities.

The Board of Directors adeptly responded to the business condition with appropriate operational and financial strategies, facilitating expansion while upholding financial stability and delivering growth in a competitive landscape. In light of this, we appreciated that the Board of Directors continued the issuance of shelf bonds, since first exercised in 2022, in March and June 2023 with amount of bonds offered at Rp2.9 trillion and Rp1.09 trillion, respectively. This strategic step ensured that Protelindo had enough funds to grow.

Other strategies included selective tower construction, strategic tower acquisitions, tenant optimization, and consistent delivery of quality services. Revenue diversification efforts extended beyond tower services to encompass adjacent businesses, exemplified by the expansion into fibre to the home (FTTH) services within the non-tower segment.

These strategies yielded tangible results, evidenced by the Company's ownership and operation of 30,558 telecommunication towers, servicing 54,284 tenants, and maintaining 97,994 km of fiber optic cable networks as of December 31, 2023. Tower lease, the primary business segment, generated gross profit of Rp6.17 trillion, constituting 75.09% of total revenue in 2023, a 7.46% year-on-year increase compared to the previous year's Rp6.66 trillion.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Selanjutnya, segmen jasa lainnya mencatat laba kotor sebesar Rp2,05 triliun pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan 40,42% secara tahunan. Total aset tumbuh sebesar 4,26% menjadi Rp68,39 triliun, terutama didorong oleh peningkatan aset lancar dan tidak lancar. Ekuitas juga mengalami peningkatan sebesar 14,38%, sehingga mencapai Rp16,51 triliun pada tahun 2023. Pendapatan meningkat menjadi Rp11,74 triliun pada tahun 2023, menandai pertumbuhan sebesar 6,39%, dengan laba kotor pada Rp8,21 triliun melampaui angka tahun sebelumnya sebesar Rp8,12 triliun.

Dewan Komisaris memandang, pencapaian ini telah memposisikan Protelindo secara strategis untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA

Permintaan akan layanan dan infrastruktur di sektor informasi dan komunikasi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan konektivitas di seluruh penjuru negeri.

Dalam jangka pendek, perkiraan pertumbuhan Indonesia 2024 secara umum tetap positif, dengan proyeksi pada tingkat sekitar 5,2%. Pertumbuhan ini ditopang oleh belanja pemerintah terkait pemilihan umum, serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Selain itu, prospek bisnis yang menguntungkan bagi Perusahaan berasal dari konsentrasi penetrasi internet yang berkelanjutan di Jawa. Antisipasi penyesuaian suku bunga BI7DRR pada paruh kedua tahun ini diharapkan dapat memberikan peluang ekspansi yang meningkat bagi pelaku industri.

Menimbang latar belakang ini, Dewan Komisaris memiliki pandangan yang sejalan dengan Direksi bahwa Protelindo siap untuk mewujudkan potensi bisnis masa depan, baik di sektor informasi dan telekomunikasi maupun di sektor-sektor lain. Diversifikasi layanan berkelanjutan Perseroan melalui anak perusahaannya menggarisbawahi Protelindo untuk muncul sebagai pelopor industri. Khususnya, rencana untuk menjajaki infrastruktur energi bersih dan sumber energi terbarukan yang menunjukkan keselarasan rencana usaha dan potensi arah permintaan pasar.

Furthermore, other services segment recorded gross profit of Rp2,05 trillion in 2023, reflecting 40,42% year-on-year growth. Total assets surged 4,26% to Rp68,39 trillion, primarily driven by increases in current and non-current assets. Equity also witnessed a 14,38% increase, reaching Rp16,51 trillion in 2023. Revenue increased to Rp11,74 trillion in 2023, marking a 6,39% year-on-year growth, with gross income at Rp8,21 trillion, surpassing the previous year's figure of Rp8,12 trillion.

The Board of Commissioners deems these achievements position Protelindo strategically for sustained growth.

BUSINESS PROSPECTS

The demand for services and infrastructure within Indonesia's information and communications sector is poised to sustain growth, aligning with the Government of Indonesia's commitment to nationwide connectivity.

In the short term, Indonesia's 2024 growth forecast remains generally positive, projected at approximately 5.2%. This growth is underpinned by government expenditure associated with elections, as well as robust household consumption. Moreover, favourable business prospects for the Company stem from the ongoing concentration of internet penetration in Java. Anticipated adjustments to the BI7DRR interest rate in the latter half of the year are expected to provide increased expansion opportunities for industry participants.

Against this backdrop, the Board of Commissioners shares the Board of Directors' perspective that Protelindo is poised for extensive future business prospects in information and telecommunications sector and beyond. The Company's ongoing service diversification through its subsidiaries underscores its potential to emerge as an industry frontrunner. Notably, plans to venture into clean energy infrastructure and renewable energy sources exemplify strategic alignment with anticipated market demands.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Moving forward, the Board of Commissioners remains committed to facilitating the effective execution of all business strategies devised by the Board of Directors, ensuring optimal values are generated for shareholders and stakeholders.

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners appreciates that the Company consistently refers to best GCG practices. The Company is aware of the important role of good corporate governance (GCG) implementation on the Company's business continuity. GCG provides a corridor for an ethical management of a business, where financial aims are realized without abandoning corporate responsibilities towards communities and the environment.

The Company's adoption of GCG is founded on unwavering integrity, ensuring that principles of sound governance permeate every aspect of the organization and guide all business endeavours toward consistent and sustainable operations. To actualize this commitment to good governance, the Company abides by the fundamental principles outlined in the 2021 Indonesia Corporate Governance General Guidelines (PUG-KI), which have been recently revised by the Governance Policy National Committee (KNKG). These principles encompass Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability, serving as cornerstones for the Company's governance framework.

As part of the Company's governance system, the Board of Commissioners is committed to fulfil its role to the best of its ability. In 2023, the Board of Commissioners met 8 (eight) times and attended 8 (eight) joint meetings with the Board of Directors to discuss strategic business issues. These meetings were part of the Board of Commissioners' exercise of its advisory and supervisory role, offering inputs in the best interest of the Company.

Ke depan, Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dari semua strategi bisnis yang dirancang oleh Direksi serta memastikan terciptanya nilai yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PANDANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris mengapresiasi konsistensi Perseroan untuk mengacu kepada praktik-praktik GCG terbaik. Perseroan menyadari pentingnya peran penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terhadap kelangsungan usaha Perseroan. GCG menyediakan koridor untuk pengelolaan bisnis yang etis, di mana tujuan keuangan diwujudkan tanpa meninggalkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penerapan GCG di Perseroan berangkat dari integritas kuat yang memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang sehat terintegrasi dengan setiap aspek organisasi dan menjadi panduan bagi semua upaya bisnis menuju operasi yang konsisten dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan komitmen terhadap tata kelola yang baik ini, Perseroan mematuhi prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUG-KI) 2021, yang baru-baru ini direvisi oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG). Prinsip-prinsip ini mencakup Perilaku Etis, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, yang berfungsi sebagai landasan bagi kerangka kerja tata kelola Perseroan.

Sebagai bagian dari sistem tata kelola Perseroan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memenuhi perannya sebaik mungkin. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan 8 (delapan) kali rapat dan menghadiri 8 (delapan) rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas isu-isu bisnis strategis. Rapat-rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan peran penasihat dan pengawasan Dewan Komisaris, memberikan masukan untuk kepentingan terbaik Perseroan.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 5 Mei 2023, tidak ada perubahan pada susunan Dewan Komisaris.

APRESIASI

Pencapaian Perseroan selama ini diraih berkat dukungan yang berkesinambungan dari semua pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan Direksi atas komitmen terhadap pelaksanaan perannya. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada karyawan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Selain itu, tak kalah penting, kami sangat menghargai pelanggan yang telah memercayai Protelindo untuk memenuhi kebutuhan terhadap digital infrastruktur yang andal dan terpercaya.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on May 5, 2023, there were no changes to the composition of the Board of Commissioners.

APPRECIATION

The Company's achievements over the years have been made possible by the unwavering support of all stakeholders. We extend our gratitude to the shareholders and Board of Directors for their steadfast commitment to their roles. Our heartfelt thanks go out to the diligent employees whose dedication has been instrumental. Last but not least, we sincerely appreciate our customers for placing their trust in Protelindo to fulfill their requirements for dependable and trusted digital infrastructure.

Jakarta, April 2024
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Ario Wibisono
Komisaris Utama
President Commissioner

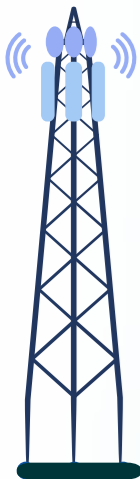


Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pada tahun 2023, Protelindo tetap berfokus untuk menumbuhkan jaringan operasinya. Fokus yang kuat, disertai layanan prima dan pengambilan keputusan secara strategis, menghasilkan kinerja solid sebagaimana tercermin dari pencapaian pertumbuhan aset dan laba bruto.

In 2023, Protelindo maintained the focus of growing its operational network. This, combined with excellent services and strategic decision making, resulted in a solid performance as evidenced from growth of asset and gross profit.



Para Pemegang Saham yang terhormat,

Berlandaskan visi untuk menjadi penyedia digital infrastruktur terkemuka dan paling inovatif di Indonesia, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo" atau "Perseroan") memberikan hasil yang sangat baik pada tahun 2023. Kami bersyukur atas keberhasilan ini, sehingga Perseroan dapat terus memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham sepanjang tahun, serta mewujudkan kontribusinya terhadap akses informasi dan komunikasi digital yang merata di seluruh Indonesia.

TINJAUAN MAKROEKONOMI

Perkembangan ekonomi global pada tahun 2023 diwarnai oleh peningkatan harga pangan dan minyak serta tingkat inflasi yang tinggi. Namun demikian, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, ekonomi Indonesia tetap solid dan tumbuh pada Tingkat 5,05% yoy. Rupiah tetap stabil berkat keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 5,75% pada Januari 2023 dan menjadi 6,00% pada Oktober 2023 sampai dengan akhir tahun.

Di tingkat industri, informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan yang kuat, menyumbang 4,23% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 dan tumbuh 7,59%

Dear Esteemed Shareholders,

Grounded in the vision to become the prominent and most innovative digital infrastructure provider in Indonesia, PT Professional Telecommunication Indonesia ("Protelindo" or "the Company") delivered excellent results in 2023. We are grateful for this success, which enabled the Company to continue providing value to all stakeholders and shareholders throughout the year, as well as realising our contribution to equal access to digital information and communication across Indonesia.

MACROECONOMIC REVIEW

Increased food and oil prices as well as high inflation rates characterized global economic developments in 2023. Nevertheless, driven by strong domestic consumption, Indonesia's economy remained strong at 5.05% yoy. Indonesia's currency rate was stable thanks to Bank Indonesia's decisions to raise benchmark interest rate (BI7DRR) to 5.75% in January 2023 and to 6.00% in October 2023 until the end of the year.

At industry level, information and communication was among the sector with robust growth, accounting for 4.23% to the nation's GDP in 2023 and grew by 7.59% yoy. The sector's strength

Ferdinandus Aming Santoso

Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi Board of Directors Report

secara tahunan. Kekuatan sektor ini berasal dari adopsi dan kecepatan pengembangan teknologi. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan infrastruktur komunikasi yang dapat diandalkan, tren data menunjukkan bahwa industri ini secara teratur melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

KENDALA YANG DIHADAPI

Perseroan mengawasi dampak ekonomi terhadap bisnisnya, terutama liabilitas dengan bunga mengambang yang dapat terpengaruh kenaikan suku bunga. Pasar sektor telekomunikasi juga bergerak dinamis di tahun 2023, dengan adanya dua operator yang bergabung menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchinson. Bagi Protelindo, penggabungan ini memberikan peluang baru dalam hal pembangunan menara dan potensi pendapatan kolokasi baru.

TUJUAN STRATEGI

Penyewaan menara dan layanan VSAT dan *wireline* merupakan dua segmen bisnis Perseroan dan anak perusahaannya. Sebagai pengambil keputusan utama Perseroan, manajemen memonitor hasil operasi setiap unit bisnis secara independen untuk menginformasikan pilihan-pilihan terkait alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian laba bersih segmen tersebut.

Pada tahun 2023, dengan tujuan menjadi perusahaan penyedia infrastruktur dan telekomunikasi multi-layanan yang terkemuka, Perseroan mempertahankan fokusnya untuk mengembangkan operasi melalui penerapan berbagai strategi, mulai dari perluasan portofolio menara hingga menajaki bidang layanan baru.

Perseroan memastikan bahwa seluruh strategi bisnis dilaksanakan dengan tepat, sehingga menghasilkan pemanfaatan aset dan perolehan pendapatan yang optimal. Sejalan dengan pendekatan *asset-light* banyak diterapkan oleh operator telekomunikasi, Perseroan telah menawarkan penyewaan kolokasi. Pembangunan menara baru dilakukan dengan pendekatan *build-to-suit*, sementara akuisisi menara dilakukan dengan memperhatikan sejumlah faktor kunci, termasuk permintaan saat ini dan masa depan, kapasitas, dan tingkat pengembalian modal.

stems from technology adoption and development speed. As demand for dependable communication infrastructure increases, data trends show that this industry has regularly outpaced growth of the national economy.

CHALLENGES

The Company was mindful of economic impacts to its business, especially liabilities with variable interest rates due to interest rate increases. The telecom market was also dynamic in 2023, with two operators merged as PT Indosat Ooredoo Hutchinson. For Protelindo, the merger presented new opportunities in terms of new tower construction and colocation revenue.

STRATEGY OBJECTIVES

Tower rental and VSAT and wireline services comprise the two business segments of the Company and its subsidiaries. As the Company's primary decision-maker, the management monitors operating outcomes of each business unit independently to inform choices regarding resource allocation and performance evaluation based on the segments' bottom-line achievements.

In 2023, to become the leading multi-service infrastructure and telecoms provider, the Company maintained its focus on growing its operations by employing strategies, ranging from tower portfolio expansion to exploring new service areas.

The Company ensured that its strategies were efficient and optimal in terms of asset utilization and revenue generation. In line with asset-light approach preferred by telecom operators, the Company has been offering colocation lease. New tower constructions were carried out using build-to-suit approach, while tower acquisition was mindful of key factors, including current and future demand, capacity, and return on capital.

Perseroan juga selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik untuk melengkapi infrastruktur berkualitas yang disediakan Protelindo kepada pelanggan.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi berperan menetapkan strategi Perseroan dengan mengukur peluang dan tantangan. Pertimbangan mengenai kondisi industri dan strategi pengendalian biaya menjadi salah satu pertimbangan penting Direksi mengawasi pelaksanaan strategi dengan melakukan penilaian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi hambatan atau peluang, dan melakukan langkah koreksi yang diperlukan.

TINJAUAN KINERJA

Pada 2023, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 30.558 menara telekomunikasi dan melayani 54.284 *tenant* di Indonesia. Perseroan juga memiliki jaringan kabel serat optik sepanjang 97.994 kilometer, yang telah menjangkau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sewa menara sebagai segmen usaha utama Perseroan mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp6,17 triliun atau setara dengan 75,09% dari total laba kotor Perseroan di tahun 2023. Laba kotor segmen ini naik 7,46% yoy dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6,66 triliun. Berdasarkan profil pelanggan, Indosat memberikan kontribusi pendapatan tertinggi mencapai Rp4,48 triliun, disusul XL Axiata sebesar Rp3,62 triliun dan Telkomsel sebesar Rp1,69 triliun. Kontribusi ketiga operator telekomunikasi tersebut masing-masing sebesar 38%; 31%; dan 12% pada tahun 2023.

Sementara itu, laba kotor dari jasa lainnya tercatat sebesar Rp2,05 triliun pada tahun 2023, tumbuh sebesar 40,42% yoy. Kontribusi laba kotor segmen ini terhadap total pendapatan Perseroan adalah 24,01% pada tahun 2023 dibandingkan dengan 17,9% pada tahun 2022.

Dari sisi aset, Perseroan membukukan pertumbuhan 4,26% yoy menjadi Rp68,39 triliun pada tahun 2023. Dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya sebesar Rp65,60 triliun, peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan aset lancar dan aset

Laporan Direksi Board of Directors Report

The Company has always strived to deliver the best services to complement the quality infrastructure that Protelindo provides to customers.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Directors formulates corporate strategies by measuring opportunities and challenges. Industry landscape and cost control are key considerations. The Board of Directors stays on top of strategy execution by carrying out quarterly assessment against objectives, identify problems or opportunities, and made necessary corrections.

PERFORMANCE REVIEW

In 2023, the Company owned and operated 30,588 telecommunication towers and served 54,284 tenants in Indonesia. The Company also had 97,994 kilometers of fibre optic cable networks, which reached Sumatera, Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi.

Tower lease as the Company's primary business segment was able to generate gross profit of Rp6.17 trillion or equivalent to 75.09% of the Company's gross income in 2023. The gross income of this segment was up 7.46% yoy compared to the previous year which reached Rp6.66 trillion. By customer profile, Indosat contributed the highest revenue reaching Rp4.48 trillion, followed by XL Axiata of Rp3.62 trillion and Telkomsel of Rp1.69 trillion. The contribution of the three telecommunication operators is 38%; 31%; and 12%, respectively in 2023.

Meanwhile, gross profit from other services segment stood at Rp2.05 trillion in 2023 or grew by 40.42% yoy. The gross profit contribution of this segment to the Company's total revenue was 24.01% in 2023 compared to 17.9% in 2022.

In terms of assets, the Company posted 4.26% yoy growth to Rp68.39 trillion in 2023. Compared to the previous year's total assets of Rp65.60 trillion, this increase was mainly driven by the increase in current assets and non-current assets by 21.34% yoy and

Laporan Direksi Board of Directors Report

tidak lancar masing-masing sebesar 21,34% yoy dan 3,26% yoy menjadi Rp4,40 triliun dan Rp63,99 triliun. Sementara itu, ekuitas Perseroan menunjukkan peningkatan sebesar 14,38% yoy dari Rp14,43 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp16,51 triliun pada tahun 2023.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp11,74 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,39% yoy. Secara keseluruhan, pendapatan yang tumbuh lebih tinggi dari beban pokok pendapatan menghasilkan laba kotor sebesar Rp8,21 triliun pada tahun 2023. Capaian ini tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp8,12 triliun.

Pada tahun 2023, Protelindo melaksanakan dua kali penerbitan obligasi berkelanjutan, masing-masing pada bulan Maret dan Juni. Emisi pada bulan Maret mencapai nilai total Rp2,90 triliun dan emisi pada bulan Juni memiliki nilai sebesar Rp1,09 triliun. Lebih jauh, Protelindo dan anak usaha Iforte mendirikan perusahaan baru pada Juni 2023, yaitu PT Iforte Energi Nusantara (IEN) (sebelumnya PT Helios Energi Nusantara). IEN diharapkan menjadi pemain di sejumlah segmen strategis, termasuk konstruksi khusus dan penyediaan listrik, gas, uap dan pendingin udara.

REALISASI TARGET

Protelindo telah memenuhi target tahun 2023. Pendapatan Perseroan yang sebesar Rp11,7 triliun melampaui target 2023. Perseroan juga mencatatkan kinerja EBITDA sebesar Rp10,0 triliun, yang melampaui target 2023.

TINJAUAN OPERASI

Pada tahun 2023, demografi tenaga kerja Perseroan didominasi oleh tenaga kerja muda dan terampil, dengan mayoritas berusia antara 31 dan 40 tahun serta bergelar sarjana. Untuk memastikan karyawan selalu memiliki keterampilan terkini, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai kursus, lokakarya, dan seminar baik untuk level staf maupun pemimpin.

Kegiatan Perseroan juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang baik. Pada tahun 2023, Perseroan mengintegrasikan server, storage, dan jaringan, memodernisasi server untuk meningkatkan efisiensi energi; meningkatkan keamanan data dan enkripsi; dan memperluas inisiatif otomatisasi dan

digitalisasi. Hasilnya, Protelindo memiliki efisiensi dan akurasi operasional yang lebih tinggi, terbukti dari penurunan penggunaan kertas dan peningkatan rasio jumlah menara yang dipantau per karyawan, dari 20:1 menjadi 30:1. Perseroan juga mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis.

The Company's revenue reached Rp11.74 trillion in 2023 or up 6.39% yoy. Overall, revenue growth outpaced expenses and resulted in a gross profit of Rp8.21 trillion in 2023, or higher than the previous year of Rp8.12 trillion.

In 2023, Protelindo exercised two shelf bonds issuance, respectively in March and June. March issuance amounted to Rp2.90 trillion and June issuance amounted to Rp1.09 trillion. Moreover, Protelindo and subsidiary Iforte established a new company in June 2023, PT Iforte Energi Nusantara (IEN) (formerly PT Helios Energi Nusantara). IEN is envisioned to be a player in several strategic segments, including specialized construction projects and supply of power, gas, steam and air conditioning.

TARGET REALISATION

Protelindo met its 2023 targets. Our revenue of Rp11.7 trillion exceeded 2023 target. The Company also delivered EBITDA performance at Rp10.0 trillion, which exceeded 2023 target.

OPERATING REVIEW

In 2023, the Company retains a predominantly youthful, skilled workforce with most employees are between the ages of 31 and 40 and with undergraduate degrees. To ensure that employees' skills are consistently relevant, the Company has organized various staff and leader-level training courses, workshops, and seminars.

The Company's activities have also been supported by good information technology infrastructure. In 2023, the Company integrated its servers, storage, and networks; modernized servers to enhance energy efficiency; enhanced data security and encryption; and expanded digitalization initiatives.

Laporan Direksi Board of Directors Report

As the result, Protelindo has been enjoying higher operational efficiency and accuracy, as evident from reduced paper consumption and improved ratio of towers monitored per employee from 20:1 to 30:1. The Company also developed various applications to support business transactions.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Standar tata kelola perusahaan (GCG) yang kuat merupakan komponen penting lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan. Standar GCG terus ditingkatkan melalui penilaian GCG tahunan, dengan menggunakan survei internal dan pihak ketiga berdasarkan ASEAN CG Scorecard.

Pada 5 Mei 2023, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk membahas kinerja usaha untuk tahun buku 2022 dan sebagai bagian dari penerapan GCG. Dalam RUPST, semua peserta memiliki hak suara dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam rapat. Dari hasil RUPST 2023, tidak terdapat perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan.

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Perseroan berkomitmen menanamkan pemahaman tentang dengan mengedukasi seluruh karyawan tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip terkait yang penting bagi operasi Protelindo. Perseroan juga memiliki Kerangka Kerja Keberlanjutan yang berfungsi sebagai pedoman, untuk mencapai operasional bisnis yang berkelanjutan. Rencana tindak lanjut yang komprehensif juga dirancang dan disesuaikan untuk menyelaraskan dengan beragam fungsi dan unit dalam organisasi, memastikan bahwa setiap departemen berkontribusi terhadap realisasi tujuan keberlanjutan yang menyeluruh.

Untuk memantau kemajuan kegiatan keberlanjutan, Perseroan melakukan *monitoring* dan evaluasi yang meliputi audit internal, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan analisis dampak.

Terdapat sejumlah pencapaian keberlanjutan yang perlu disoroti dalam laporan ini. Untuk karyawan, Perseroan bertujuan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sesuai dengan

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The Company's strong corporate governance (GCG) standards are another important component in its operations. GCG standards are continuously improved through the annual GCG assessment, using self- and third-party surveys based on the ASEAN CG Scorecard.

The Company called an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 5, 2023 to discuss business performance for the fiscal year 2022 as part of the GCG implementation. In an AGMS, all participants have equal voting rights and opportunities to fully engage in the meeting. Based on the 2023 AGMS, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Directors.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

The Company is committed to instill sustainability knowledge by educating all employees on Environmental, Social, and Governance (ESG) factors that are crucial for Protelindo's operations. The Company also has Sustainability Framework that serves as a guideline towards achieving sustainability across its operations. A comprehensive follow-up plan was also devised and tailored to align with the diverse functions and units within the organization, ensuring that each department contributed towards the realization of the overarching sustainability goals.

To understand the progress of sustainability activities, the Company monitors and evaluates its programs through internal audits consulting with stakeholders, and carrying out impact analysis.

There were several sustainability achievements to highlight in this report. For employees, the Company aimed to provide a safe and comfortable working environment in line with applicable laws and

Laporan Direksi Board of Directors Report

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga aktif melayani masyarakat, misalnya dengan melakukan perbaikan jalan, penyediaan penerangan jalan, perbaikan saluran air, dan berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah serta pusat olahraga masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan, Perseroan telah mengubah generator berbahan bakar solar menjadi baterai *lithium*, dan bermitra dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3).

PANDANGAN KE DEPAN

Perseroan yakin bahwa sektor telekomunikasi akan terus tumbuh kuat dengan prospek yang positif pada tahun 2024, seiring dengan terus meningkatnya permintaan akan akses komunikasi. Sektor ini juga berkembang dinamis, dan Perseroan bertekad memanfaatkan peluang yang ada terus bertumbuh. Protelindo juga melihat potensi ekspansi di layanan bernilai tambah dan di bidang-bidang seperti *managed services* dan energi terbarukan.

Prospek positif ini ditopang oleh perekonomian Indonesia yang kuat. Pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,2% dan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan meningkat, sehingga memacu pertumbuhan industri termasuk sektor telekomunikasi. Protelindo berkomitmen untuk terus memperkuat layanannya dan tumbuh sebagai pemain terkemuka di industri.

regulations. The Company also actively engaged in servicing the community, such as by carrying out road repair, providing street lighting, repairing water channels, and contributing to the construction of worship houses as well as community sports centres.

To improve environmental quality, the Company has converted several of its diesel generators to lithium batteries, and partnered with a third-party licensed to process hazardous and toxic wastes (B3).

OUTLOOK

The Company believes that the telco sector will continue to grow robust and prospective in 2024, as demand for communications access continue to increase. The sector's landscape will be dynamic, and the Company intends to capitalize opportunities to continue growing its business. Protelindo also sees expansion potentials in value-added services and in areas such as managed services and renewables.

This positive outlook is underscored by Indonesia's strong economy. Growth is projected at 5.2% and household consumption is expected to increase, which will spur industry growth including the telecom sector. Protelindo will continue to strengthen its services and grow as a leading player in its sector.

Laporan Direksi Board of Directors Report

APRESIASI

Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris yang tak ternilai, serta dukungan dari seluruh pemegang saham, sangat dihargai oleh Perseroan. Perseroan sangat menghargai komitmen dan kerja keras setiap karyawan. Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan dan pelanggan lainnya atas dukungannya yang berkesinambungan, sehingga Protelindo mampu menjadi pemasok digital infrastruktur yang paling andal di Indonesia.

APPRECIATION

The Board of Commissioners' invaluable oversight and direction, as well as the support of all shareholders, are greatly appreciated by the Company. The Company truly values each employee's commitment and hard work. The Company also expresses gratitude to all other stakeholders and customers for their ongoing support to Protelindo, which has enabled us to grow as Indonesia's most reliable digital infrastructure provider.

Jakarta, April 2024
Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Ario Wibisono
Komisaris Utama
President Commissioner

Kenny Harjo
Komisaris
Commissioner

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen
Independent Commissioner

STATEMENTS OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE 2023 ANNUAL REPORT

We the undersigned hereby declare that all material information contained in this Annual Report of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") year 2023 has been completely presented and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's annual report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2024

Direksi Board of Directors

Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama
President Director

Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Stephen Duffus Weiss
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur
Director

Indra Gunawan
Direktur
Director

Anita Anwar
Direktur
Director

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Sampai dengan 31 Desember 2023, secara konsolidasi, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 30.558 lokasi menara telekomunikasi dengan 54.284 penyewa di Indonesia, terutama di area Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, serta mengoperasikan 97.994 km jaringan kabel fiber optik.

As of December 31, 2023, in consolidated, Protelindo owned and operated approximately 30,558 telecommunication tower sites in Indonesia, with approximately 54,284 tenants predominantly in Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi, and operated 97,994 km of fiber optic cable networks.

03



IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan Company Name

PT PROFESSIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Informasi Perubahan Nama Change of Name

Tidak Ada
None

Tanggal Pendirian Establishment Date

2003



Bidang Usaha Type of Business

- Konstruksi sentral telekomunikasi
- Aktivitas Perusahaan Holding
- Central Telecommunication Construction
- Holding Company Activities



Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan kedudukan dan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0080656.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621 tanggal 2 Desember 2020.

The Company is established based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095. The Company's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of establishment have been amended several times. The latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 198 dated November 30, 2020, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of the Company's domicile and adjustment of the Company's business activities. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights under Letter of Approval on Amendment to Articles of Association No. AHU-0080656.AH.01.01.TAHUN 2020 dated December 2, 2020 and was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0414621 dated December 2, 2020.

Identitas Perusahaan Corporate Identity



Alamat Perusahaan Company Address

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Tanjung Karang Nomor 11,
Kudus, Indonesia
Telp : +62 291 431905
Fax : +62 291 431718

Kantor Cabang | Branch Office
Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp : +62 21 23585500
Fax : +62 21 23586446



Kontak Alamat Contact Address

Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Telp : +62 21 431905
Fax : +62 21 23586446
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary:
corpsec@ptsmn.co.id
Hubungan Investor | Investor Relations:
investor.relations@ptsmn.co.id

Para pemangku kepentingan Perseroan dapat memberikan masukan atau pertanyaan melalui detail alamat sebagaimana disebutkan di samping.

The Company's stakeholders can provide input or questions through the address details as stated herein.



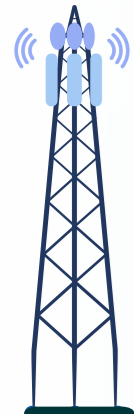
Alamat Situs Web Website

www.protelindo.net
www.ptsmn.co.id



JEJAK LANGKAH

MILESTONES



2003 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2018 2019

Januari | January

Protelindo didirikan di Bandung, Jawa Barat. Protelindo was established in Bandung, West Java.

Maret | March

SMN mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan simbol "TOWR". The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange under the symbol "TOWR".

Agustus | August

SMN mengakuisisi 99,999% saham yang dikeluarkan oleh Protelindo. SMN acquired 99.999% of the outstanding shares of Protelindo.

Juni | June

Para pemegang saham SMN menyetujui perubahan nilai nominal saham (stock split) 1:10 untuk saham beredar Perseroan, dari Rp500 per saham menjadi Rp50 per saham. SMN's shareholders approved a 1:10 stock split for the outstanding shares of the Company, from Rp500 per share to Rp50 per share.

Juli | July

Protelindo mengakuisisi 100% saham PT iForte Solusi Infotek ("iForte") dan secara tidak langsung memperoleh anak perusahaan dari iForte yaitu PT iForte Global Internet.

Protelindo acquired 100% ownership interest in PT iForte Solusi Infotek ("iForte") and indirectly acquired iForte's subsidiary, PT iForte Global Internet.

Maret | March

Protelindo mencatatkan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. Protelindo listed Protelindo Bonds I Year 2014 on the Indonesia Stock Exchange with a par value of Rp1 trillion with a fixed interest of 10.5% per annum maturing February 28, 2017.

November | November

Protelindo Finance menerbitkan 3,25% Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$180.000.000 yang jatuh tempo pada tahun 2024. Protelindo Finance issued US\$180,000,000 in principal amount of 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds due in 2024.

30 Juni dan 1 Juli | 30 June and 1 July

Menyelesaikan penjualan seluruh saham Protelindo Luxembourg dalam Protelindo Netherlands kepada Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") berdasarkan Share Purchase Agreement tertanggal 27 Mei 2016. Completed the sale of all Protelindo Luxembourg shares in Protelindo Netherlands to Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") as agreed in the Share Purchase Agreement, dated May 27, 2016.

Agustus | August

Protelindo telah menggantikan Protelindo Finance sebagai penerbit 3,25% dari Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar AS\$180.000.000 yang akan jatuh tempo pada 2024. Protelindo has replaced Protelindo Finance as the issuer of the US\$180,000,000 in principal amount of 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds due in 2024.

November | November

Protelindo mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp800 miliar dan dikeluarkan dengan 3 seri. Protelindo listed Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 on the Indonesia Stock Exchange with a nominal value of IDR800 billion and were issued with 3 series.

Mei | May

Protelindo melakukan akuisisi atas 100% saham PT Komet Infra Nusantara, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Telekom Infranasantara dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia. Protelindo acquires 100% shares of PT Komet Infra Nusantara ("KIN"), which formerly owned by PT Telekom Infranasantara and PT Menara Telekomunikasi Indonesia.

Agustus | August

Protelindo melakukan akuisisi atas 100% saham PT Komet Infra Nusantara, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Telekom Infranasantara dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia. Protelindo acquires 100% shares of PT Komet Infra Nusantara ("KIN"), which formerly owned by PT Telekom Infranasantara and PT Menara Telekomunikasi Indonesia.

Januari | January

- KIN dan iForte menandatangani akta pembelian saham sehubungan dengan pengalihan atas 924.999 saham Quattro dari KIN ke iForte. Saham yang dialihkan tersebut mewakili 99,9999% modal ditempatkan dan disetor dalam Quattro. KIN and iForte signed a share purchase deed in connection with the transfer of 924,999 Quattro shares from KIN to iForte. The shares transferred represent 99.9999% of Quattro's issued and paid-up capital.
- Protelindo meningkatkan kepemilikan sahamnya di iForte dengan mengambil seluruh saham baru yang diterbitkan oleh iForte yaitu sejumlah 28.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 28 miliar. Protelindo increased its share ownership in iForte by subscribing to 28,000 newly issued shares by iForte with total nominal value of Rp28 billion.

Juni | June

Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp50 miliar kepada SMN. Protelindo distributed interim cash dividends of Rp50 billion to SMN.

Agustus | August

- Protelindo meningkatkan kepemilikan sahamnya di iForte dengan mengambil seluruh saham baru yang diterbitkan oleh iForte yaitu sejumlah 145.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 145 miliar. Protelindo increased its stake in iForte by subscribing to 145,000 new issued iForte shares with a total nominal value of Rp145 billion.
- Protelindo dan SMN mendirikan Perusahaan baru dengan nama PT Protelindo Menara Permata (PMP). Maksud dan tujuan PMP ialah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi. Protelindo memiliki 99,6% saham atas PMP dan SMN memiliki 0,4% saham atas PMP. Protelindo and SMN established a new company under the name PT Protelindo Menara Permata (PMP). PMP's purpose and objective is to engage in Central Telecommunication Construction. Protelindo holds 99.6% of PMP's shares and the Company holds 0.4% of PMP's shares.

November

Protelindo meningkatkan kepemilikan sahamnya di iForte dengan mengambil seluruh saham baru yang diterbitkan oleh iForte yaitu sejumlah 145.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 145 miliar. Protelindo increased its share ownership in iForte by subscribing 145,000 newly issued shares by iForte with a total par value of Rp145 billion.

Desember | December

Protelindo melakukan akuisisi atas 51% saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Istana Kohinoor. Protelindo acquired 51% shares of PT Istana Kohinoor and became its controlling shareholder.

Jejak Langkah Milestones

2021

2022

Desember | December

- Protelindo melakukan penawaran tender wajib sehubungan dengan pengambilalihan SUPR yang dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 67.965.022 saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham atau sekitar 5,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh SUPR dengan harga penawaran tender wajib sebesar Rp15.640,51 per saham. Protelindo conducted a mandatory tender offer in connection with the SUPR takeover of shares owned by entitled shareholders with a maximum amount of 67,965,022 shares with a nominal value of Rp100 per share or approximately 5.97% of SUPR's issued and paid-up capital with a mandatory tender offer price of Rp15,640.51 per share.
- Protelindo menyelesaikan emisi Obligasi sebanyak Rp 3,349 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) kedua. Emisi ini merupakan bagian yang proses program PUB yang dimulai sejak Agustus 2020. Obligasi dengan tanggal distribusi 17 Desember 2021 tersebut diemisikan dengan tenor 1, 3 dan 5 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 3,6%, 5,3% dan 6,1% per tahun. Protelindo concluded issuance of local bonds of Rp3.349 trillion as part of its shelf registered bonds that started in August 2020. The bonds were distributed on December 17 under 1, 3- and 5-year tenors with annual fixed rate coupon of 3.6%, 5.3% and 6.1%, respectively.

Januari | January

KIN dan iForte menandatangani akta pembelian saham tentang pengalihan 80.142.500 saham PT Platinum Teknologi dari STP dan SIP. KIN and iForte signed a share purchase deed on the transfer of 80,142,500 shares of PT Platinum Teknologi from STP and SIP.

Juli | July

Protelindo menyelesaikan emisi obligasi sebanyak Rp1 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) III Tahap I Tahun 2022 ("Obligasi 2022"). Obligasi 2022 didistribusikan pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan tenor 370 hari dan 3 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 4,50% dan 6,00% per tahun. Protelindo concluded issuance of local bonds of Rp1 trillion from Shelf-Registration Public Offering III Phase I Year 2022 ("Bonds 2022"). Bonds 2022 were distributed on August 9, 2022 under 370 days and 3-year tenor with annual fixed rate coupon of 4.50% and 6.00% respectively.

Oktober | October

BIT mengumumkan penyelesaian transaksi pembelian aset fiber optik ("Aset FO") milik PT Alita Praya Mitra dengan nilai transaksi sebesar Rp 800 miliar. BIT announced the completion of the purchase of fiber optic assets ("FO Assets") owned by PT Alita Praya Mitra with total transaction of Rp800 billion.

Desember | December

- Protelindo dan iForte menandatangani perjanjian dengan Subang Smartpolitan, anak perusahaan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) untuk membangun Menara dan jaringan serat optik di kota terpadu "Subang Metropolitan". Protelindo and iForte signed agreements with Subang Smartpolitan, a subsidiary of PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), to build a tower and fiber optic network in integrated township of "Subang Smartpolitan".
- iForte menandatangani Perjanjian dengan PT Abadi Tambah Mulia Internasional ("ATMI") pada tanggal 21 Desember 2022 untuk pengambilan saham baru sebesar 23.72% dengan nilai transaksi sebesar Rp 249 miliar. Pada saat yang sama iForte juga menandatangani Perjanjian Usaha Patungan dengan para pemegang saham ATMI lainnya, yaitu Seven Bank Ltd, Sociofuture Ltd dan PT Alto Network untuk pengelolaan ATMI. iForte signed an Agreement with PT Abadi Tambah Mulia Internasional ("ATMI") on December 21, 2022 for the acquisition of 23.72% new shares with a transaction value of Rp249 billion. At the same time iForte also signed a Joint Venture Agreement with other ATMI shareholders, Seven Bank Ltd, Sociofuture Ltd and PT Alto Network for the management of ATMI.

2023

Maret | March

Pada tanggal 21 Maret 2023, Protelindo menyelesaikan emisi obligasi sebanyak sekitar Rp2,9 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) III Tahap II Tahun 2023 ("Obligasi I 2023"). Obligasi I 2023 didistribusikan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan tenor 370 hari dan 3 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 6,35% dan 6,60% per tahun.

On March 21, 2023, Protelindo concluded issuance of local bonds of approximately Rp2.9 trillion from Continuous Public Offering III Phase II Year 2023 ("Bonds I 2023"). Bonds I 2023 were distributed on March 21, 2023 under 370 days and 3 year tenor with annual fixed rate coupon of 6.35% and 6.60% respectively.

Mei | May

Pada tanggal 23 Mei 2023, iForte melakukan akuisisi atas 60% saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Varnion Technology Semesta (VTS).

On May 23, 2023, iForte completed the acquisition of 60% shares and become controlling shareholder in PT Varnion Technology Semesta (VTS).

Juni | June

- Pada tanggal 7 Juni 2023, iForte dan Protelindo mendirikan Perusahaan baru dengan nama PT Helios Energi Nusantara (HEN). Maksud dan tujuan HEN ialah berusaha dalam bidang Konstruksi Khusus; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. iForte memiliki 99,89% saham atas HEN dan Protelindo memiliki 0,11% saham atas HEN.

On June 7, 2023, iForte and Protelindo established a new company under the name of Helios Energi Nusantara (HEN). The purpose and objective of HEN is to conduct business in the field of Specialized Construction; Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air; Wholesale Trade, Not Cars and Motorbikes; Rental and Leasing Activities Without Option Rights. iForte holds 99.89% of HEN shares and Protelindo holds 0.11% of HEN shares.

- Pada tanggal 8 Juni 2023, Protelindo menyelesaikan emisi obligasi sebanyak sekitar Rp1,1 triliun dari PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) III Tahap III Tahun 2023 ("Obligasi II 2023"). Obligasi II 2023 didistribusikan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tenor 370 hari dan 3 tahun dengan kupon bunga tetap masing-masing sebesar 6,15% dan 6,50% per tahun.

On June 8, 2023, Protelindo concluded issuance of local bonds of approximately Rp1.1 trillion from Continuous Public Offering III Phase III Year 2023 ("Bonds II 2023"). Bonds II 2023 were distributed on June 8, 2023 under 370 days and 3 year tenor with annual fixed rate coupon of 6.15% and 6.50% respectively.

Juli | July

Pada tanggal 28 Juli 2023, iForte melakukan akuisisi atas 98,212% saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Global Telekomunikasi Prima (GTP).

On July 28, 2023, iForte completed the acquisition of 98.212% shares and become controlling shareholder in PT Global Telekomunikasi Prima (GTP).

Agustus | August

Pada tanggal 2 Agustus 2023, GTP melakukan akuisisi atas 30% saham atas PT Bach Multi Global (BMG).

On August 2, 2023, GTP completed the acquisition of 30% shares in PT Bach Multi Global (BMG).

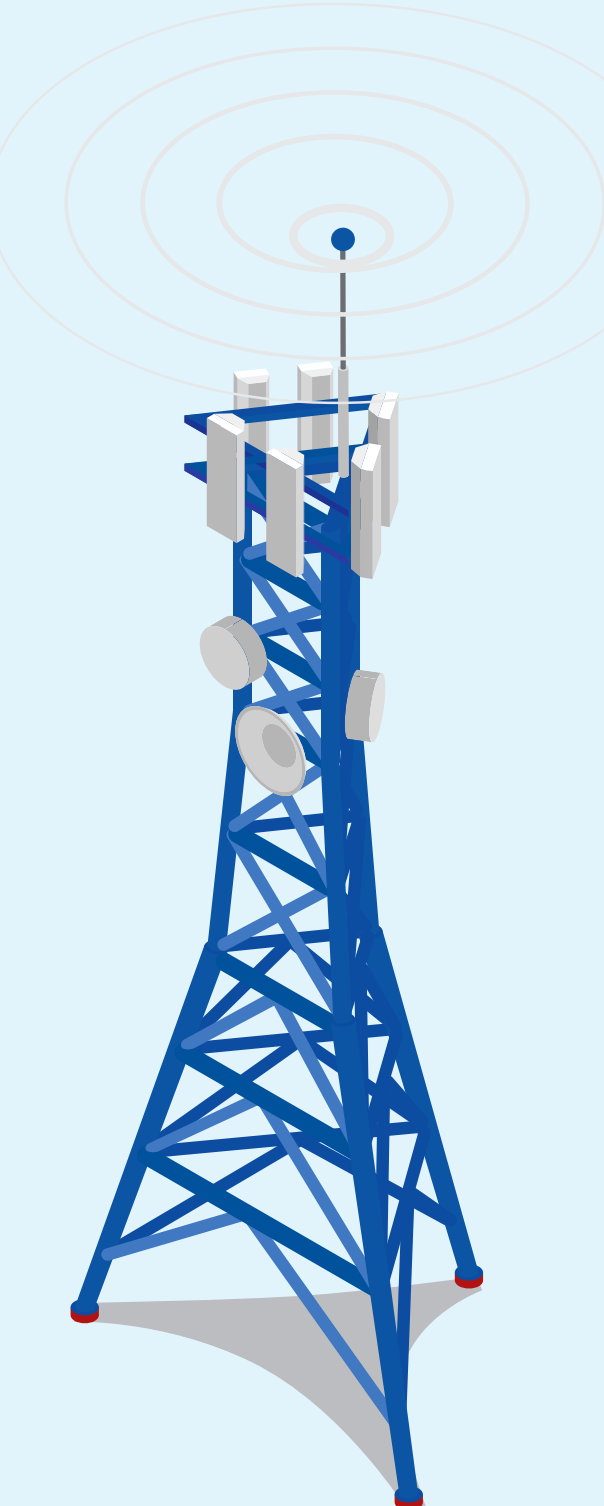
September

Pada tanggal 26 September 2023, iForte mengakuisisi saham milik PT iForte Payment Infrastructure seri A sebesar 13,59%, Seri B 1,29%, dan seri C 47,49%.

On September 26, 2023, iForte completed the acquisition of 13.59% Series A, 1.29% Series B, and 47.49% Series C shares in PT iForte Payment Infrastructure.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

COMPANY AT A GLANCE



Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan menara terkemuka di Indonesia. Perluasan portofolio menara perusahaan mendorong Perseroan untuk mencapai tonggak yang signifikan di dalam industri, mengingat Perseroan telah menjadi perusahaan menara independen pertama di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan portofolio lebih dari

30.558

situs menara

dengan lebih dari
54.284 penyewa.

The Company is committed to becoming Indonesia's leading tower company. The expansion of the Company's tower portfolio propelled the Company to another industry milestone as it became the first independent tower entity in Indonesia to own and operate a portfolio of over 30,558 tower sites with more than 54,284 tenants.

Riwayat Singkat Perusahaan

Company at A Glance

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo atau Perseroan) didirikan pada tahun 2003 di Bandung, Jawa Barat. Protelindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 8 November 2003 yang dibuat di hadapan Hildayanti S.H., Notaris di Bandung dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003.

Protelindo merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. Kegiatan usaha utama Protelindo adalah penyewaan ruang untuk lokasi menara yang dapat digunakan bersama kepada seluruh operator nirkabel besar di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara dimana para pelanggan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, serta ruang lahan untuk setiap lokasinya untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Portofolio menara Perseroan yang baru merupakan yang terbesar di Indonesia dan terluas secara geografis.

Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan menara terkemuka di Indonesia. Perluasan portofolio menara perusahaan mendorong Perseroan untuk mencapai tonggak yang signifikan di dalam industri, mengingat Perseroan telah menjadi perusahaan menara independen pertama di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan portofolio lebih dari 30.558 situs menara dengan lebih dari 54.284 penyewa.

Portofolio menara Perseroan yang tersebar secara geografis memberikan cakupan diseluruh kepulauan Indonesia, sehingga memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia menara yang diutamakan mampu memenuhi kebutuhan nasional, regional, lokal dan perusahaan telekomunikasi nirkabel yang sedang berkembang.

Protelindo beroperasi secara independen dari operator komunikasi nirkabel dan memiliki basis pelanggan yang beragam. Pelanggan utama kami meliputi operator telekomunikasi utama di Indonesia

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo or the Company) was established in Bandung, West Java in 2003. Protelindo was established based on Deed of Establishment Number 2 dated 8 November 2003, drawn up before Hildayanti S.H., Notary in Bandung with approval from Ministry of Justice and Human Rights Number C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated 3 January 2003

Protelindo is Indonesia's largest independent tower owner and operator for wireless communications businesses. The core business of Protelindo is leasing space on its multi-tenant tower sites to major wireless carriers in Indonesia under long-term lease agreements. The leased area includes vertical space on the tower where customers can put both radio frequency and microwave antennas, as well as ground space at each site for shelters and cabinets for electronic equipment and power supply storage. The tower portfolio of the Company is the largest in Indonesia among independent tower operators with the broadest geographic footprint.

The Company is committed to becoming Indonesia's leading tower company. The expansion of the Company's tower portfolio propelled the Company to another industry milestone as it became the first independent tower entity in Indonesia to own and operate a portfolio of over 30,558 tower sites with more than 54,284 tenants.

The Company's geographically diverse tower portfolio provides coverage across the entire Indonesia archipelago, solidifying the Company's position as the preferred tower provider capable of meeting the needs of national, regional, local, and emerging wireless communication company operators.

Protelindo operates independently from the wireless communication operators and has a diversified customer base. Our key customers include the major telecommunications operators

Riwayat Singkat Perusahaan Company at A Glance

seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Indosat Tbk (Indosat), dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I).

Sebagai hasil dari akuisisi iForte di tahun 2016, sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan memiliki sekitar 1.633 menara makro dan *micro-cell* dan 22 hotel BTS yang beroperasi dengan sekitar 164.941 kilometer jaringan fiber optic dan sekitar 416 *Points-of Presence* (PoP) di kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya. Perseroan telah memasang jaringan fiber optic sepanjang Koridor Busway di Jakarta dengan menawarkan pelayanan 3G WiFi-offload di daerah dengan lalu lintas yang padat ini. Selain itu, Perseroan memberikan pelayanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT") di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2022, iForte menambah pelayanan *Fiber To The Home* dengan membangun sekitar 218.565 jaringan internet ke rumah (*Home Pass*) dengan sekitar 14.978 penyewa (*Home Connect*).

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan akuisisi atas 100% saham KIN dari PT Telekom Infransantara dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia. Sebagai hasil dari akuisisi KIN, kami memiliki lebih 1.234 menara *macro-cell*, 182 menara *micro-cell*, 18 menara *in building coverage* dan 21 hotel BTS yang beroperasi dengan lebih dari 277 kilometer jaringan fiber optic dan lebih dari 250 PoP di 7 kota yaitu Medan, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Palembang, Batam dan Ambon.

Pada akhir tahun 2019, Perseroan melakukan akuisisi saham dan menjadi pemegang saham pengendali atas PT Istana Kohinoor (Kohinoor). Kohinoor telah mendapatkan hak untuk menggunakan lahan *non-fuel retail* (NFR Bisnis) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Kohinoor memiliki 100% saham di PT Protelindo Menara Permata (PMP), yang mana, akan diberikan hak atas NFR Bisnis di SPBU. Baik Kohinoor dan PMP adalah perusahaan yang terkonsolidasi dengan Grup.

Pada Oktober tahun 2021, Protelindo telah menyelesaikan akuisisi kepemilikan atas 94.03% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). Proses akuisisi dimulai sejak Protelindo terpilih sebagai

in Indonesia such as PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Indosat Tbk (Indosat), and PT Hutchison 3 Indonesia (H3I).

As a result of the acquisition of iForte in 2016, as of December 31, 2022, the Company have approximately 1,633 macro and micro-cell towers and 22 BTS hotels operating with approximately 164,941 kilometers of fiber optic network and approximately 416 *Points-of Presence* (PoP) in metropolitan cities such as Jakarta and Surabaya. We have installed a fiber optic network along the Busway Corridor in Jakarta by offering 3G WiFi-offload services in these heavily trafficked areas. The Company also provides *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT") services throughout Indonesia. During 2022, iForte added *Fiber to The Home* services by building around 218,565 home internet networks (*Home Pass*) with around 14,978 tenants (*Home Connect*).

In 2018, the Company acquired 100% of KIN's shares from PT Telekom Infransantara and PT Menara Telekomunikasi Indonesia. As a result, the Company has over 1,234 macro-cell towers, 182 micro-cell towers, 18 towers in building coverage and 21 BTS hotels operating with more than 277 kilometers of fiber optic network and more than 250 PoP in 7 cities such as Medan, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Palembang, Batam and Ambon.

At the end of 2019, the Company acquired shares and became the controlling shareholder of PT Istana Kohinoor (Kohinoor). Kohinoor has secured the right to use *non-fuel retail land* (NFR Business) at Public Fuel Stations (SPBU). As part of the agreement, Kohinoor owns a 100% stake in PT Protelindo Menara Permata (PMP), which, in turn, will be granted the right to NFR Business at gas stations. Both Kohinoor and PMP are consolidated companies with the Group.

In October 2021, Protelindo has completed the acquisition of 94.03% shares of PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). Protelindo being named the preferred bidder after approximately a 4 (four)

Riwayat Singkat Perusahaan Company at A Glance

pemenang tender/lelang (*preferred bidder*) setelah proses tender/lelang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan menandatangani *Sale and Purchase Agreement* pada tanggal 4 September 2021. Transaksi akuisisi dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Selanjutnya, sebagai bagian dari transaksi akuisisi dan sebagai pengendali baru STP, Protelindo telah menyelesaikan penawaran tender wajib ("MTO") atas sisa saham-saham STP. MTO dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 5,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sebagai hasil dari MTO, Protelindo telah menyelesaikan pembelian atas 67.478.878 saham STP dan menjadi pemegang saham pengendali atas 99,96% saham STP.

STP merupakan perusahaan tower independen terbesar ke-3 di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2022, STP telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 6.903 lokasi menara telekomunikasi dengan sekitar 12.842 penyewa di Indonesia. Dalam tujuh tahun terakhir, transaksi akuisisi ini adalah transaksi akuisisi Protelindo yang ke-6 dan merupakan transaksi dengan nilai terbesar.

Sampai dengan 31 Desember 2023, secara konsolidasi, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 30.558 lokasi menara telekomunikasi dengan 54.284 penyewa di Indonesia, terutama di area Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, serta mengoperasikan 97.994 km jaringan kabel fiber optik.

Perubahan Nama

Protelindo tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri pada Juni 2003 hingga saat ini.

month tender process and has entered into a *Sale and Purchase Agreement* on September 4, 2021. The acquisition is carried out in compliance with the provisions of the applicable laws including the stipulations of the Financial Services Authority ("OJK").

Furthermore, as part of the acquisition and as the new controller of STP, Protelindo has completed a mandatory tender offer ("MTO") for the remaining shares of STP. MTO is carried out on shares owned by entitled shareholders with a maximum amount of around 5.97% of the issued and fully paid-up capital. As a result, Protelindo has completed the purchase of 67,478,878 STP shares and became the controlling shareholder of 99.96% of STP's shares.

STP is the 3rd largest independent tower company in Indonesia. As of December 31, 2022, STP has owned and operated around 6,903 telecommunication tower sites with around 12,842 tenants in Indonesia. This acquisition is Protelindo's 6th acquisition and is the transaction with the largest value in the last seven years.

As of December 31, 2023, in consolidated, the Company owned and operated approximately 30,558 telecommunication tower sites in Indonesia, with approximately 54,284 tenants predominantly in Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi, and operated 97,994 km of fiber optic cable networks.

Change of the Company Name

Since its first inception in June 2003, Protelindo has not exercised any change of the company name.

VISI, MISI & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION & CORPORATE VALUES

Visi

Menjadi penyedia Multi layanan telekomunikasi dan infrastruktur terkemuka dan inovatif.

Vision

To be Indonesia's premier and most innovative telecommunications multi-service and infrastructure provider.

Misi

Berkolaborasi dengan pelanggan kami untuk memberikan nilai tambah layanan yang unggul.

Mission

Collaborate with our customers to provide excellent value-added services.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan menilai bahwa Visi, Misi, dan Nilai Inti Perusahaan masih sangat sejalan dengan budaya dan semangat dari Grup.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company agree and support that the Company's existing Vision, Missions, and Core Values remain suitable with the culture and spirit of the Group.

NILAI - NILAI INTI CORE VALUES



1. Know Your Customer



Able to identify and verify the identity, the needs and the character of the customer

2. Innovation



Translating an idea or invention into a good or service that creates value in order to further satisfy the needs and expectations of the customers

3. Professionalism



Ability to conduct, aims, or having qualities that characterize or mark a profession that is showed by strict adherence to courtesy, honesty and responsibility when dealing with individuals or other companies in the business environment

4. Integrity



Honest, trustworthy, and exemplary that reflect the characteristics of the company's internal strength

5. Team Work



Establish and maintain collaboration within and between teams in an effort to achieve organizational objectives

KEGIATAN USAHA

LINE OF BUSINESS

Bidang usaha utama Protelindo sesuai dengan akta anggaran dasar Nomor 198 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konstruksi sentral telekomunikasi.

Kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi Protelindo termasuk pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi dan menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

Fokus operasi Protelindo dan anak perusahaan utamanya yaitu iForte dan STP adalah menyediakan infrastruktur bagi klien Perseroan untuk mengoperasikan layanan telekomunikasi nirkabel. Dalam melakukan hal tersebut, Perseroan memiliki ketentuan yang didasarkan pada kontrak sewa jangka panjang yang umumnya berlaku untuk jangka waktu 10 tahun.

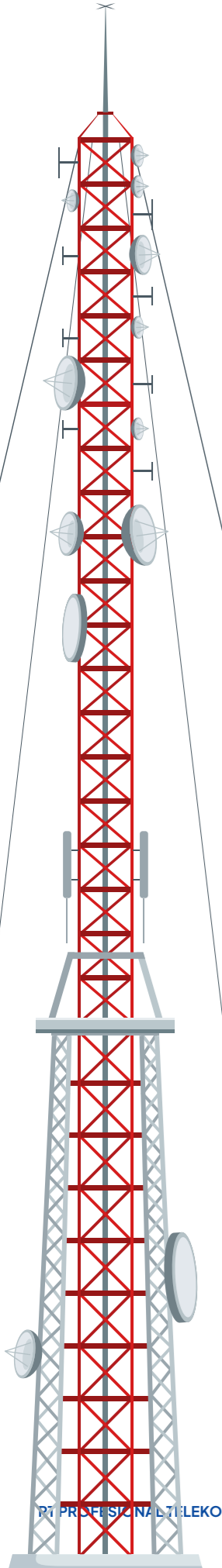
Saat ini, sebagian besar pendapatan usaha Perseroan berasal dari penyewaan menara termasuk kontrak-kontrak *build-to-suit*, akuisisi menara, mengakomodir kolokasi pada menara yang telah dibangun dan menyediakan jaringan fiber optik termasuk jaringan antar menara-menara dan Perseroan juga bekerja untuk mengakomodir kolokasi atau pembagian/*sharing* jaringan fiber optik yang ada untuk pengembalian investasi fiber yang lebih tinggi. Segmen *Connectivity* Perseroan juga menyediakan layanan konektivitas untuk klien-klien berbagai konfigurasi sambungan dengan *wireless* atau *wired* yang disesuaikan dengan kebutuhan.

In accordance with the deed of articles of association No. 198 dated November 30, 2020 drawn up before Christina Dwi Utami, S.H., M.K.n., Notary in Jakarta, Protelindo's main business is to engage in the holding companies activities and central telecommunications construction.

Protelindo's central telecommunication construction business including to construct, provide, purchase and operate telecommunication infrastructure and to lease towers for specific interest as infrastructure to install telecommunication equipment.

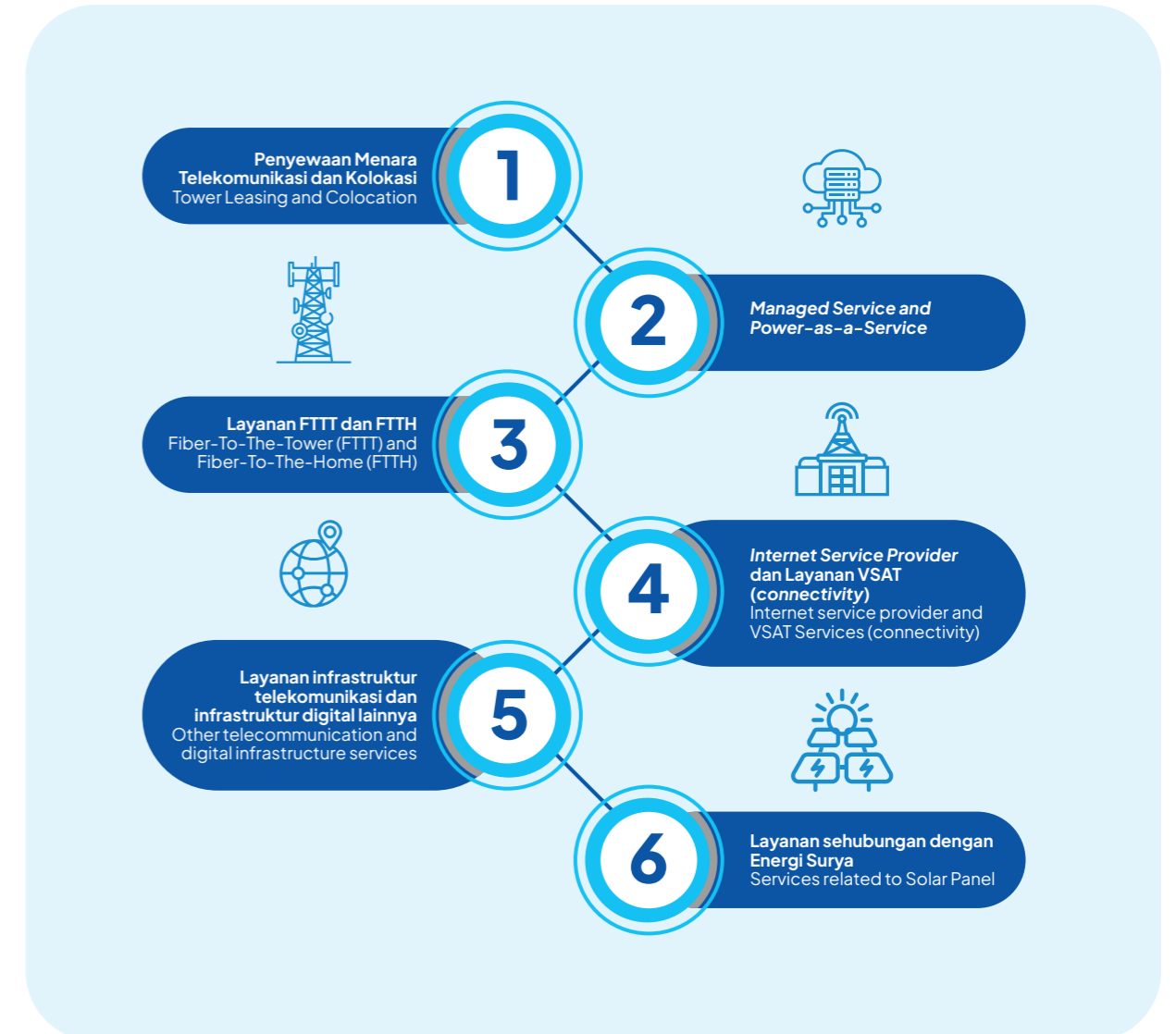
The operational focus of Protelindo and its main subsidiaries iForte and STP is to provide infrastructure for the Company's clients to operate wireless telecommunication services. In doing so, the Company has provisions based on long-term lease contracts that are generally valid for a period of 10 years.

Currently, the majority of the Company's business growth comes from expanding the tower base through build-to-suit contracts, tower acquisitions, accommodating colocations on existing towers, and providing fibre optics connections, including those between towers. The Company is also now working on accommodating colocations or sharing on existing fibre optics network for higher returns on our fibre investment. Our Connectivity section also offers multi-mode connectivity services, such as diverse wireless and cable connections, to a wide range of consumers.



LAYANAN KAMI

OUR SERVICES



WILAYAH OPERASIONAL

OPERATIONAL AREAS

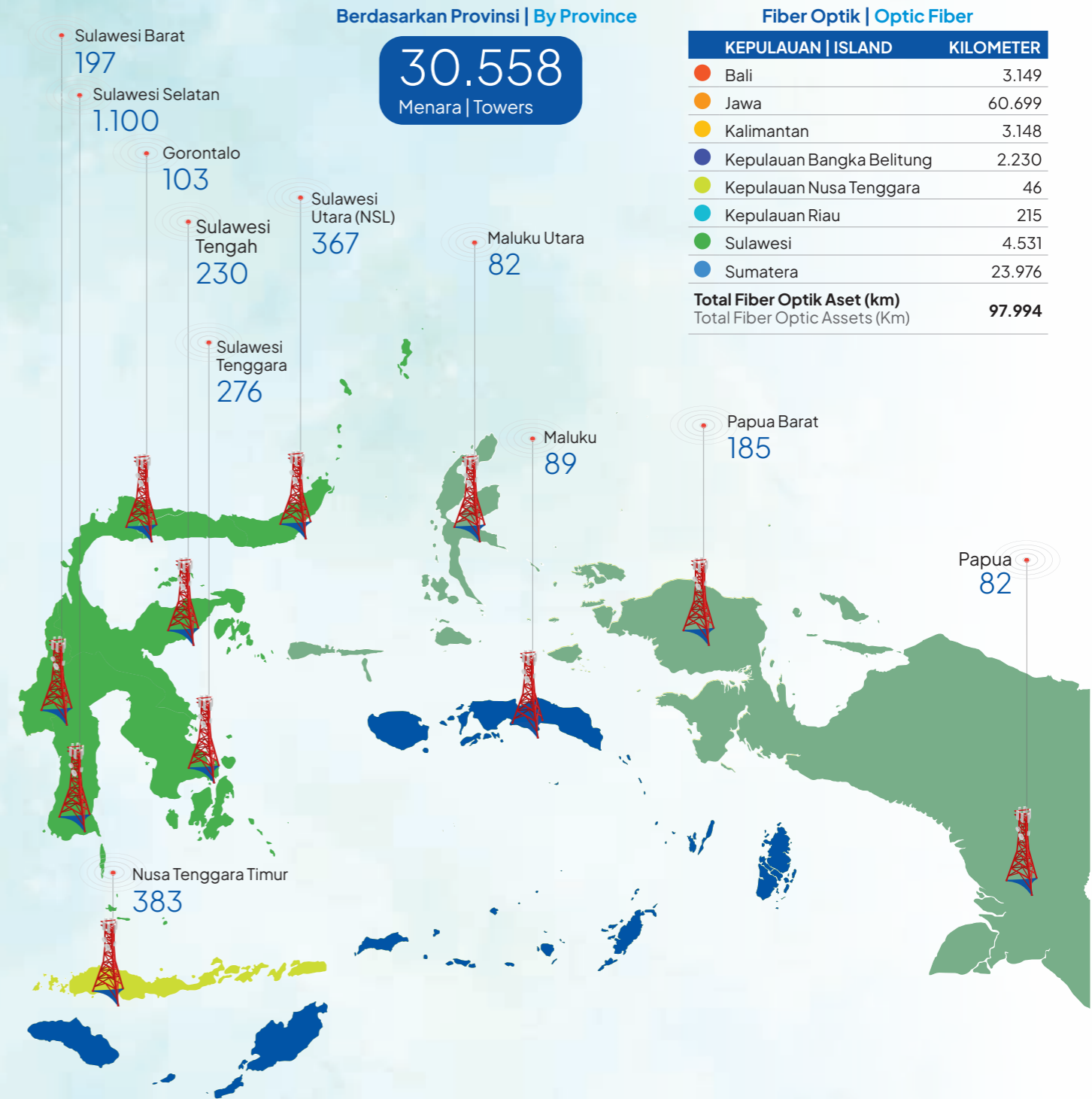
Secara geografis, wilayah operasional Grup ditandai dengan portofolio menara dan fiber optic yang dimiliki. Grup memiliki ribuan unit menara dan ribuan kilometer jaringan kabel fiber optic yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, menjangkau pulau-pulau dari ujung Barat hingga ujung Timur wilayah negara, termasuk pulau-pulau terluar dan terpencil.



Wilayah Operasional

Operational Areas

Geographically, the Group's operation is signified by the portfolio of towers and fiber optic. The Group owns thousands of towers and thousands of kilometers of fiber optic cable network spread across Indonesia, reaching many islands from the westernmost of the country, all the way to the easternmost, including the outermost and remote islands.

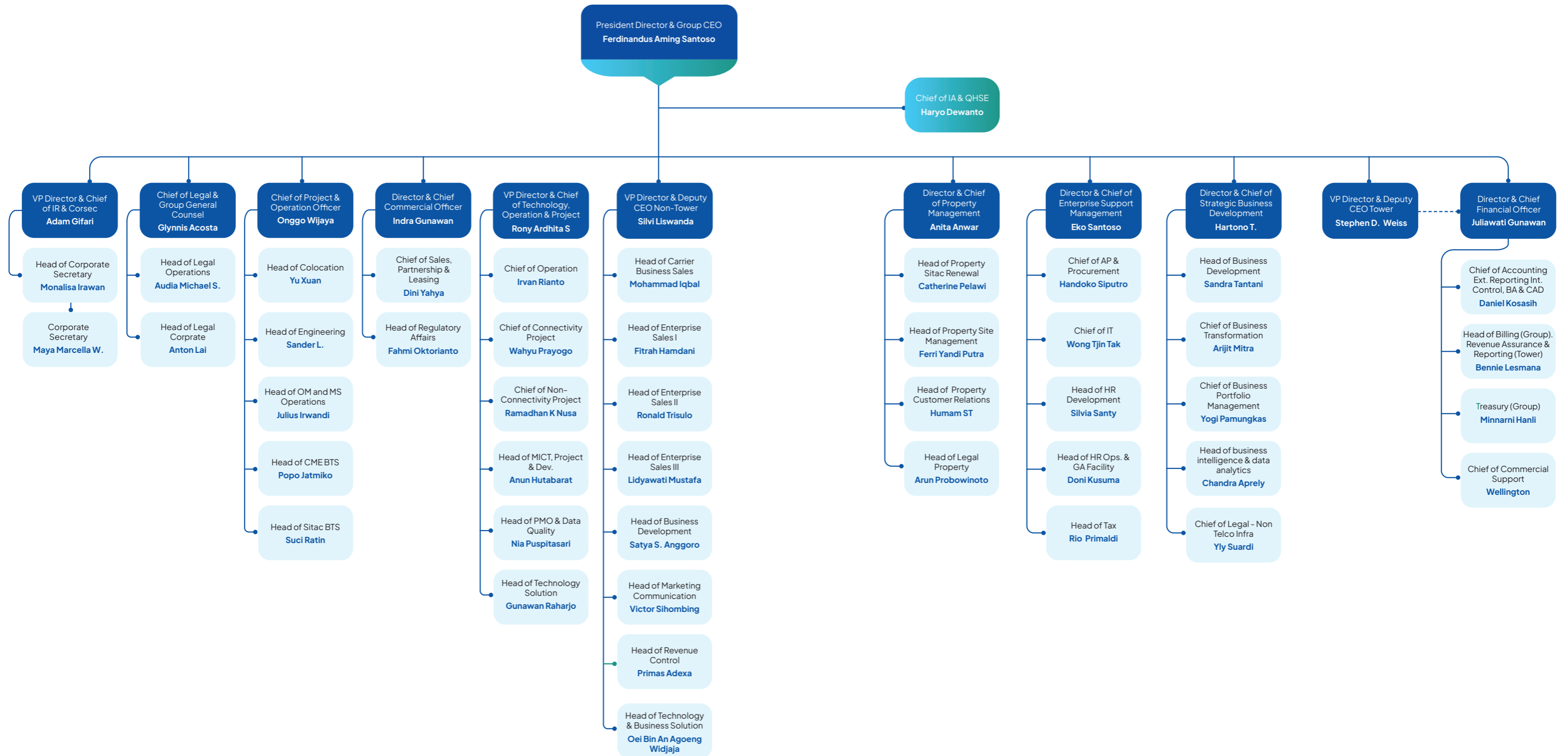




STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

Struktur Organisasi
Organization Structure



Keterangan | Note :

- Komite dibawah komisaris ada di halaman 259-277.
Committees of the commissioner are on page 259-277.
- Tidak ada komite dibawah direksi.
There are no committees under the board of directors

KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Pada tahun 2023, Perseroan dan entitas anak tergabung dalam sejumlah asosiasi, sebagai berikut:

In 2023, the Company and its subsidiaries are incorporated in the following associations:

Protelindo:

Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi
Telecommunication Tower Infrastructure Developers Association

Solusi Tunas Pratama (STP):

Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi
Telecommunication Tower Infrastructure Developers Association

Iforte:

1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Indonesia Internet Service Providers Association
2. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
Telecommunication Network Operators Association

Bit Teknologi Nusantara (BIT):

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia
Indonesia Internet Service Providers Association

Rekajasa Akses (REJA):

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia
Indonesia Internet Service Providers Association

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILES

Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Board of Commissioners Composition

No changes on the Board of Commissioners' composition as of December 31, 2023.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles



Ario Wibisono
Komisaris Utama
 President Commissioner

Umur | Age
 61 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
 Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Magister dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen 1986. Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung 1985 	<ul style="list-style-type: none"> Earned a Master Degree from the PPM School of Management 1986. Earned a Civil Engineering Degree from Bandung Institute of Technology 1985
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2014 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	Appointed as President Commissioner of the Company in 2014 and reappointed as President Commissioner of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2011–saat ini)	Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2011–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Protelindo (2009–2014) Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2006–2007) Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2006) Direktur Peregrine Sewu Securities (1996–1999) Asisten Direktur Peregrine Fixed Income Limited – Hongkong (1996–1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Commissioner of Protelindo (2009–2014) President Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2006–2007) Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2006) Director of Peregrine Sewu Securities (1996–1999) Assistant Director of Peregrine Fixed Income Limited – Hong Kong (1996–1999)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles



Kenny Harjo
Komisaris
 Commissioner

Umur | Age
 66 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
 Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari University of Southern California di Amerika Serikat 1980. Memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat 1984. 	<ul style="list-style-type: none"> Earned a degree in Accountancy from the University of Southern California, USA 1980. Earned the designation as a Certified Public Accountant from the State of Colorado and the State of Montana, USA 1984.
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2014 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	Appointed as Commissioner of the Company in 2014 and reappointed as Commissioner of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Ecogreen Oleochemichals (2004–saat ini) Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–saat ini) 	<ul style="list-style-type: none"> Commissioner of PT Ecogreen Oleochemichals (2004–present) Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Protelindo (2009–2014) Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2006–2007) Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2006) Direktur Peregrine Sewu Securities (1996–1999) Asisten Direktur Peregrine Fixed Income Limited – Hongkong (1996–1999) 	<ul style="list-style-type: none"> Commissioner of Protelindo (2009–2014) President Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2006–2007) Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2006) Director of Peregrine Sewu Securities (1996–1999) Assistant Director of Peregrine Fixed Income Limited – Hong Kong (1996–1999)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profiles



Kusmayanto Kadiman

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur | Age
69 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (1977) Gelar Doktor Filsafat (PhD) dari Australian National University (1998) 	<ul style="list-style-type: none"> Earned a Physics Engineering Degree from Bandung Institute of Technology (1977) Doctor of Philosophy (PhD) from Australian National University (1988)
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	<p>Beliau telah ditunjuk untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 dan pengangkatan terakhir beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 31 Mei 2021, untuk masa jabatan 3 tahun, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024.</p>	<p>He was appointed as Independent Commissioner since 2017 and his latest appointment as the Company's Independent Commissioner referred to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on May 31, 2021, for a period of 3 years until the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024.</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Komisaris Utama PT Adaro Power (2010–saat ini) Komisaris Utama PT BFI Finance Tbk (2011–saat ini) Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–saat ini) Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–saat ini) Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk (2021–saat ini) 	<ul style="list-style-type: none"> Vice President Commissioner of PT Adaro Power (2010–present) President Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2011–present) Independent Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–present) Independent Commissioner of PT Solusi Tunas Pratama (2021–present) Independent Commissioner of PT Global Digital Niaga Tbk (2021–present)
Pernyataan Independensi Declaration of Independence	<p>Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p>Independent Commissioner of the Company has no financial, management, stock ownership, or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.</p>

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profiles

Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Dosen Institut Teknologi Bandung (1977–2008) Direktur PT Alas Buana Raya (1992–1995) Direktur Pusat Penelitian Teknologi di Institut Teknologi Bandung (1996–1999) Sekretaris Rektor di Institut Teknologi Bandung (2001–2004) Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia (2004–2009) Wakil Komisaris Utama PT Adaro Power (2010–saat ini) Komisaris Utama PT BFI Finance Tbk (2011–saat ini) Komisaris Independen PT Martina Berto Tbk (2012–2014) Komisaris PT Tamaris Hydro Lestari (2012–2020) Komisaris PT Iforte Solusi Infotek (2016–2017) Komisaris Utama PT Setiabudi Investment Management (2016–2024) Komisaris Independen Perseroan (2017–saat ini) Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–saat ini) International Advisory Board Komatsu Ltd (2019–2023) Komisaris Utama (komisaris Independen) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–saat ini) 	<ul style="list-style-type: none"> Lecturer of Institut Teknologi Bandung (1977–2008) Director of PT Alas Buana Raya (1992–1995) Director of Technology Research Center at Bandung Institute of Technology (1996–1999) Rector Secretary at Bandung Institute of Technology (2001–2004) The Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia (2004–2009) Vice President Commissioner of PT Adaro Power (2010–present) President Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2011–present) Independent Commissioner of PT Martina Berto Tbk (2012–2014) Commissioner of PT Tamaris Hydro Lestari (2012–2020) Commissioner of PT Iforte Solusi Infotek (2016–2017) President Commissioner of PT Setiabudi Investment Management (2016–2024) Independent Commissioner of the Company (2017–present) Independent Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–present) International Advisory Board of Komatsu Ltd (2019–2023) President Commissioner (Independent Commissioner) of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–present).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan.</p>	<p>All members of the Company's Board of Commissioners have no affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners or the Company's ultimate shareholder.</p>



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILES

Komposisi Direksi

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan.

Board of Directors Composition

No changes on the Board of Directors' composition as of December 31, 2023.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama
 President Director

Umur | Age
 58 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
 Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara Jakarta pada tahun 1988 dengan jurusan Akuntansi.	Earned an Accounting degree from the University of Tarumanagara, Jakarta in 1988.
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2015 dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	Appointed as President Director of the Company in 2015 and reappointed as President Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk Direktur Utama iForte 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk President Director of iForte
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Keuangan Ernst & Young Jakarta Business Advisor pada Arthur Andersen Global Corporate Finance Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Finance division of Ernst & Young Jakarta Business Advisor of Arthur Andersen Global Corporate Finance Jakarta
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
 Vice President Director

Umur | Age
 46 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
 Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1999 dengan jurusan Manajemen Keuangan.	Earned a Financial Management Degree from the University of Indonesia in 1999.
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2015 dan diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	Appointed as Vice President Director of the Company in 2015 and reappointed as Vice President Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk Hubungan Investor PT Sarana Menara Nusantara Hubungan Investor PT Profesional Telekomunikasi Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Vice President Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Investor Relations PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara (2009–2015) Direktur Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007–2015) Investment Banking PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2003–2007) Research Analyst PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2002) 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Sarana Menara Nusantara (2009–2015) President Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2007–2015) Investment Banking of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2003–2007) Research Analyst of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999–2002)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Stephen Duffus Weiss
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Umur | Age
69 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Amerika Serikat | United States

Domisili | Domicile
Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Bachelors of Science Degree in Economics dari Stanford University, (1977) Masters of Business Administration dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles, (1990) 	<ul style="list-style-type: none"> Earned Bachelors of Science in Economics from Stanford University, (1977) Masters of Business Administration from the Anderson School of Management at University of California, Los Angeles, (1990)
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2015 dan diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	Appointed as Vice President Director of the Company in 2015 and reappointed as Vice President Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Komisaris PT Indointernet Tbk (Maret 2024 - saat ini) 	<ul style="list-style-type: none"> Vice President Director of PT Sarana Menara Nusantara Commissioner of PT Indointernet Tbk (March 2024 - present)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014–2015) First Interstate Bank, Standard Chartered Bank (1990–1992) First Interstate Bank, ABN Amro Bank (1992–2006) PT Indosat di Indonesia (2006–2011) Divisi TMT and Renewable Energy Sector untuk The Royal Bank of Scotland di Asia (2008–2010) Tele2 di Swedia untuk bidang korporasi (2007) Foreign Service Officer di US Department of State untuk Negara Turki dan Mesir (1979–1986) 	<ul style="list-style-type: none"> Independent Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014–2015) First Interstate Bank of Standard Chartered Bank (1990–1992) First Interstate Bank of ABN Amro Bank (1992–2006) PT Indosat in Indonesia (2006–2011) Head of TMT and Renewable Energy Sector Division in The Royal Bank of Scotland in Asia (2008–2010) Tele2 in Swedia for corporate sector (2007) Foreign Service Officer in US Department of State for Turkey and Egypt (1979–1986)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur
Director

Umur | Age
52 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta (1994) Gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1996) 	<ul style="list-style-type: none"> Earned a Degree from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta (1994) Earned Master Degree in Management from Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1996)
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2015 dan diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	He was appointed as Director of the Company in 2015 and reappointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Direktur PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2015–saat ini)	Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2015–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Pajak PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015) General Manager Keuangan & Akuntansi PT Grand Indonesia (2002–2014) General Manager Keuangan & Akuntansi Pricewaterhouse Coopers (1996–2002) 	<ul style="list-style-type: none"> Head of Tax Department of PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015) Finance & Accounting General Manager of PT Grand Indonesia (2002–2014) Finance & Accounting General Manager of Pricewaterhouse Coopers (1996–2002)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Indra Gunawan

Direktur
Director

Umur | Age
49 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (1997) Gelar Magister di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (2005) Meraih Gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Earned and Electrical Engineering degree from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS), Surabaya (1997) Earned Master Degree in Economics from the University of Indonesia (2005) Earned Doctoral Degree in Business and Management from the University of Padjadjaran, Bandung (2013)
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2013 dan diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	He was appointed as Director of the Company in 2013 and reappointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Direktur PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013–saat ini) Dosen pada Program Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013–present) Lecturer in a Management Magister Program of Universitas Kristen Indonesia
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2013–2018) Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012–2013) Vice President Inter-Carrier and External Relations PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008–2012) General Manager Operations PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2003–2008) Project Controller, Group Leader, Product Management, (1997–2003) 	<ul style="list-style-type: none"> Independent Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2013–2018) Director of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012–2013) Vice President of Inter-Carrier and External Relations PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008–2012) General Manager of Operations PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2003–2008) Project Controller, Group Leader of Product Management, (1997–2003)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

Profil Direksi Board of Directors Profiles



Anita Anwar

Direktur
Director

Umur | Age
44 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Bachelor of Science (Honors) di bidang Business Management Marketing dari University of Bradford, Inggris (2002)	Earned Bachelor of Science (Honors) in Business Management Marketing from University of Bradford, United Kingdom (2002)
Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2021 dan diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2021 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.	She was appointed as Director of the Company in 2021 and reappointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual GMS dated May 31, 2021, for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Direktur PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–saat ini)	Director of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Chief of Property Management PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012) Project Director PT Nokia Siemens Network Indonesia (2009–2012) Head of Business Operations PT Nokia Siemens Network Indonesia (2008–2009) Property Manager PT Nokia Siemens Network Indonesia (2006–2008) Property/Listing Manager HSR International Realtors Pte Ltd di Singapura (2004–2006) Marketing Co-Ordinator Wing Tai Holdings Limited, Singapura (2002–2003) 	<ul style="list-style-type: none"> Chief of Property Management of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2012) Project Director of PT Nokia Siemens Network Indonesia (2009–2012) Head of Business Operations of PT Nokia Siemens Network Indonesia (2008–2009) Property Manager of Nokia Siemens Network Indonesia (2006–2008) Property/Listing Manager at HSR International Realtors Pte Ltd in Singapore (2004–2006) Marketing Co-Ordinator at Wing Tai Holdings Limited, Singapore (2002–2003)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu meliputi nama pihak yang terafiliasi.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners including the names of affiliated parties.

DEMOGRAFI KARYAWAN

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Perseroan dan entitas anaknya memiliki jumlah total 2.208 karyawan, yang terdiri dari 1.549 karyawan tetap dan 659 karyawan kontrak. Demografi karyawan hingga 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries manage a total of 2,208 employees, consisting of 1,549 permanent employees and 659 contract employees. The employee demographics as of December 31, 2023, are as follows:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Number of Employees by Education

Pendidikan Education	2021	2022	2023
Perguruan Tinggi/Universitas College/University	1.316	1.810	1.964
SLTA Sederajat High School Equivalent	177	225	239
SMP Sederajat Junior High School Equivalent	0	5	5
Jumlah Total	1.493	2.040	2.208

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Number of Employees by Age

Usia Age	2021	2022	2023
<20 tahun years	0	0	0
20–30 tahun years	354	618	607
31–40 tahun years	699	949	950
41–50 tahun years	384	421	580
>50 tahun years	56	52	71
Jumlah Total	1.493	2.040	2.208

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan Number of Employees by Level

Jabatan Position	2021	2022	2023
Chief & VP	20	28	32
General Manager	49	58	66
Senior Manager & Manager	245	314	322
Non Manager	1.179	1.640	1.788
Jumlah Total	1.501	2.049	2.208

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Number of Employees by Gender

Jenis Kelamin Gender	2021	2022	2023
Laki-laki Male	994	1.355	1.458
Perempuan Female	507	693	750
Jumlah Total	1.501	2.048	2.208

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2021	2022	2023
Permanen Permanent	269	27	13
Kontrak Contract	1.224	2013	2.195
Jumlah Total	1.493	2.040	2.208

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham per 31 Desember 2023

Shareholder holding 5% or more of the outstanding shares as of December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	(%)
PT Sapta Adhikari Investama	27.764.246.165	54,3571
Publik Public	2.550.831.300	42,2599
Saham Treasuri Treasury shares	1.215.583.400	2,3830

Pada tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 54,3571% dari total saham Perseroan yang beredar dimiliki oleh PT Sapta Adhikari Investama (SAI). SAI dimiliki secara penuh oleh beberapa anggota keluarga Hartono. Adapun sisa kepemilikan saham yaitu sebesar 42,2599% dimiliki oleh masyarakat dan sebanyak 2,3830% merupakan *treasury shares* yang dipegang oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Pembelian Kembali Saham (*buyback*) sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Agustus 2018, 5 Mei 2020 dan 21 Desember 2021.

Di tahun 2015 dan 2018, Grup mengakuisisi 100% saham di masing-masing iForte dan KIN. Kemudian, pada tahun 2019, Grup melakukan pengambilalihan saham sebanyak 51% dan juga menjadi pengendali di Kohinoor. Selanjutnya, Pada Oktober 2021, Grup melakukan akuisisi 94,03% saham STP dan melakukan penawaran tender wajib sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan hasil dari penawaran tender wajib, Grup menjadi pemegang saham pengendali STP dengan kepemilikan saham sebesar 99,96%. Akuisisi yang dilakukan oleh Grup memiliki tujuan untuk lebih memperkuat posisi pasar sebagai pemilik dan operator menara telekomunikasi independen yang terbesar di Indonesia.

As of December 31, 2023, 54.3571% of the Company's outstanding shares were owned by PT Sapta Adhikari Investama (SAI). SAI is wholly owned by several members of the Hartono family. The remaining 42.2599% of the Company's outstanding shares are owned by the public and 2.3830% treasury shares are held by the Company with regard to the implementation of Shares Buyback Programs as approved by the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 10, 2018, May 5, 2020 and December 21, 2021.

In 2015 and 2018, the Group acquired 100% shares in each iForte and KIN. Further, in 2019, the Group also acquiring 51% shares of Kohinoor and become the controlling shareholder of Kohinoor. Further, in October 2021, the Group completed the acquisition of 94.03 of STP shares and conducted a mandatory tender offer until the end of 2021. Based on the result from the mandatory tender offer, the Group become the controlling shareholders of STP with 99.96% share ownership. The Acquisition is conducted to strengthen our market position as the largest independent owner and operator of telecommunication towers in Indonesia.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

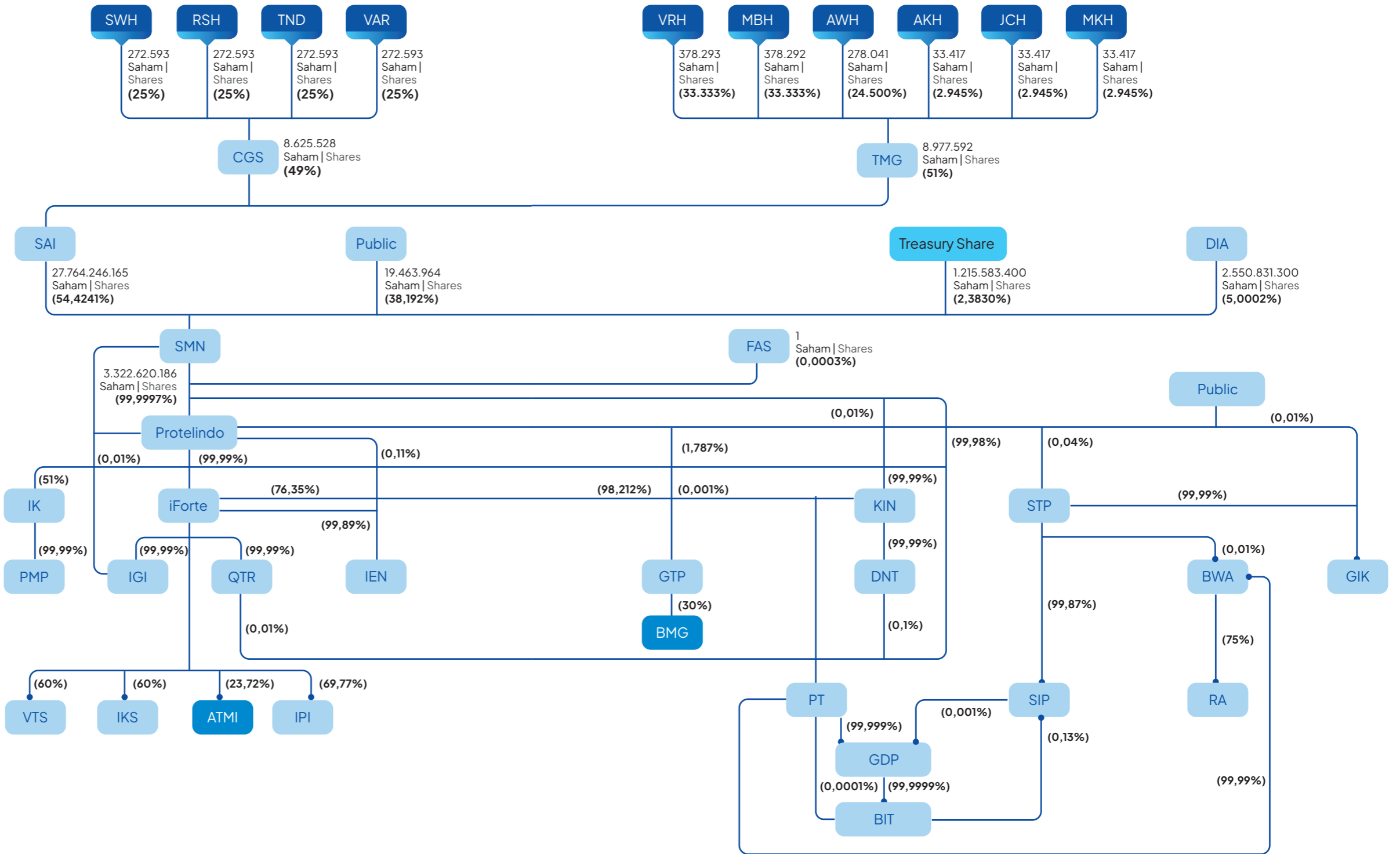
CORPORATE GROUP STRUCTURE

SINGKATAN | ABBREVIATIONS:

- SWH : Stefanus Wijaya Hartono
- RSH : Roberto Setiabudi Hartono
- TND : Tessa Natalia Damayanti Hartono
- VAR : Vanessa Ratnasari Hartono
- VRH : Victor Rahmat Hartono
- MBH : Martin Basuki Hartono
- AWH : Armand Wahyudi Hartono
- AKH : Alicia Katrina Hartono
- JCH : Jacqueline Chiara Hartono
- MKH : Marco Krisna Hartono
- CGS : PT Caturguwiratna Sumapala
- TMG : PT Tricipta Mandhala Gumilang
- SMN : PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
- FAS : Ferdinandus Aming Santoso
- Protelindo : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
- SAI : PT Sapta Adhikari Investama
- DIA : PT Dwimuria Investasi Andalan
- iForte : PT iForte Solusi Infotek
- IGI : PT iForte Global Internet
- KIN : PT Komet Infra Nusantara
- DNT : PT Darmanusa Tritunggal
- QTR : PT Quattro International
- GTP : PT Global Telekomunikasi Prima
- IK : PT Istana Kohinoor
- PMP : PT Protelindo Menara Permata
- STP : PT Solusi Tunas Pratama Tbk
- SIP : PT Sarana Inti Persada
- PT : PT Platinum Teknologi
- BWA : PT Broadband Wahana Asia
- GDP : PT Gema Dwimitra Persada
- BIT : PT BIT Teknologi Nusantara
- RA : PT Rejajasa Akses
- GIK : PT Global Indonesia Komunikatama
- IEN : PT Iforte Energi Nusantara
- VTS : PT Varnion Technology Semesta
- IPI : PT iForte Payment Infrastructure
- IKS : PT Integra Kreasitama Solusindo

Entitas Asosiasi | Associated entities:

- ATMI : PT Abadi Tambah Mulia Internasional
- BMG : PT Bach Multi Global



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

CORPORATE GROUP STRUCTURE

INFORMASI ENTITAS ANAK

INFORMATION ON SUBSIDIARIES

PEMILIKAN LANGSUNG | DIRECT OWNERSHIP

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK ("IFORTE")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Jasa Sistem Komunikasi Data System Communication Data Services Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Wired Telecommunications Activities Penyediaan Layanan Internet Internet Service Provider Jasa Interkoneksi Internet (NAP) Internet Interconnection Services (NAP) Aktivitas Telekomunikasi Satelit Satellite Telecommunications Activities
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Protelindo - 99,99% SMN - 0,01%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 2001 Start of commercial operations on 2001
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	13.173.512
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Didirikan pada tahun 2002, di saat dunia digital belum berkembang pesat, iForte sudah menjalankan bisnis VSAT, ISP dan IT <i>outsourcing</i>. Saat itu, iForte telah mengantongi izin jaringan tetap tertutup dan izin sebagai penyelenggara jasa internet. Pada tahun 2015, iForte diakuisisi oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau dikenal dengan PT Protelindo, entitas anak PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. PT Protelindo adalah penyedia menara independen terbesar di Indonesia dengan lebih dari 30.000 menara dan hampir 55.000 penyewa. Hingga akhir tahun 2022, iForte telah berhasil membangun dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik sepanjang lebih dari 155.000 km yang menghubungkan sekitar 20.000 tower di Indonesia dengan jaringan kabel serat optik, dan sudah memiliki lebih dari 6.000 VSAT sites dan melayani lebih dari 3.000 pelanggan korporasi. iForte selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan pelayanan profesional untuk memperkuat fokus iForte dalam bisnis Telekomunikasi Indonesia dan memantapkan visi iForte sebagai penyedia layanan jaringan Data <i>Communication & Connectivity</i> berbasis kabel optik, <i>wireless</i>, dan VSAT.</p> <p>Founded in 2002, when the digital world was not yet rapidly developing, iForte was already running VSAT, ISP, and IT <i>outsourcing</i> businesses. We already have both a closed fixed network and an internet service provider license at the time. In 2015, iForte was acquired by PT Profesional Telekomunikasi Indonesia or known as PT. Protelindo, a subsidiary of PT. Sarana Menara Nusantara, Tbk. PT. Protelindo is the largest independent tower provider in Indonesia, with more than 30,000 towers and nearly 55,000 tenants. By the end of 2022, iForte has succeeded in building and operating 155,000 km of fiber optic cables which connected more than 20,000 towers in Indonesia with fiber optic cable networks and already has more than 6,000 VSAT sites and serves more than 3,000 corporate customers. iForte always prioritizes customer satisfaction and professional services to strengthen iForte's focus in Indonesia's telecommunications business and strengthen iForte's vision as a provider of data communication & connectivity network services based on optical cable, wireless, and VSAT.</p>

Informasi Entitas Anak

Information on Subsidiaries

Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Menara BCA, 43rd Floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Peter Djatmiko, Presiden Komisaris President Commissioner Mohamad Iwan, Komisaris Commissioner Nur Hermawan Thendean, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Ferdinandus Aming Santoso, CEO & Presiden Direktur CEO & President Director Silvi Liswanda, Wakil Presiden Direktur Marketing & Sales Vice President Director of Marketing & Sales Rony Ardhitia, Wakil Presiden Direktur Technology and Operation Vice President Director of Technology and Operation Hartono, Direktur Keuangan Director of Finance Handoko Siputro, Direktur & Chief of Procurement and AP Director & Chief of Procurement and AP</p>

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK ("STP")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Sentral Telekomunikasi Telecommunication Central Construction Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunications Equipment Trade
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Protelindo - 99,96% Masyarakat/ Public - 0,04%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 27 September 2006 Start of commercial operations on September 27, 2006
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	9.972.852
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>STP didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Awalnya bisnis inti STP fokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antenna dan perangkat pendukung lain untuk operator telekomunikasi, yang dikenal dengan Base Transceiver Station (BTS) dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun. Saat ini, STP memiliki aset menara telekomunikasi di 34 provinsi di Indonesia di mana 85% aset menara telekomunikasi STP terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Pada bulan Oktober 2021, STP resmi diakuisisi oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang merupakan anak usaha dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Diharapkan melalui akuisisi ini STP memiliki landasan yang semakin kuat untuk menjadi entitas yang dapat diandalkan bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Per 31 Desember 2021, STP tercatat memiliki 6.949 menara dengan 12.846 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1.85x.</p>



Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

	<p>STP was founded in 2006, and is now one of the leading independent tower companies in Indonesia. STP's core business initially focused on leasing out spaces for antennas and supporting equipment at its multi-tenant tower sites for Indonesian mobile telecommunication operators for base transceiver station (BTS) under long-term lease agreement with average contractual term of 10 years. STP operates telecommunications tower assets in 34 provinces in Indonesia, where 85% of STP's telecommunications tower sites are in Java and Sumatra, two islands with the highest population density in Indonesia. In October 2021, STP is officially acquired by PT Professional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) which is a subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk. As such, we believe that STP will have a stronger foundation to become a reliable entity for its customers and stakeholders. As of 31 December 2021, STP owned and operated 6.949 tower with 12.846 tenancies, for a tenancy ratio of 1.85x.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Menara BCA, 49th Floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Kusmayanto Kadiman, Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent Harry M. Zen, Komisaris Independen Independent Commissioner Eko Santoso Hadiprodjo, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Juliawati Gunawan Halim, Direktur Utama President Director Hartono Tanuwidjaja, Direktur Director Wong Tjin Tak, Direktur Director Wellington, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT KOMET INFRA NUSANTARA ("KIN")	
Jenis Usaha Nature of Business	Konstruksi Sentral Komunikasi Central Telecommunication Construction
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Protelindo - 99,9999% SMN - 0,0001%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 25 Februari 2009 Start of commercial operations on February 25, 2009
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	1.241.793
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Pada tanggal 30 Mei 2018, Protelindo telah mengakuisisi seluruh saham dan kepemilikan modal di KIN, sehingga perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Protelindo.</p> <p>KIN adalah suatu Perseroan terbatas didirikan dengan nama PT Tara Cell Intraabuana berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 25 Februari 2009 dari Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-13077.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 5 April 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 15 April 2009, Tambahan No. 68873.</p> <p>Anggaran Dasar KIN sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 165, tanggal 19 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan permodalan KIN. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0076630.AH.01.02.TAHUN2022 tanggal 23 Oktober 2022.</p> <p>On May 30, 2018, Protelindo acquired all of the shares and capital interests in KIN, making it a wholly-owned subsidiary of Protelindo.</p> <p>KIN is a limited liability Company established under name PT Tara Cell Intraabuana based on Notarial Deed No. 4 dated February 25, 2009 of Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-13077. AH.01.01. Tahun 2009 dated April 5, 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated April 15, 2009, Supplement No. 68873.</p> <p>KIN's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 165 dated 19 August 2022, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of the capital structure of KIN. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0076630.AH.01.02.TAHUN 2022 dated October 23, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Jl. PHH. Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C - 06, Kel. Pasirlayang, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung 40192</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Komisaris President Commissioner Indra Gunawan, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Eko Santoso Hadiprodjo, Presiden Direktur President Director Dini Adriani, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT GLOBAL TELEKOMUNIKASI PRIMA (“GTP”)	
Jenis Usaha Nature of Business	Reparasi Peralatan Komunikasi Reparation of the Telecommunication Equipment
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte - 98,212% Protelindo - 1,787% KIN - 0,001%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 7 April 2009 Start of commercial operations on April 7, 2009
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	266.669
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas KIN, Protelindo memiliki saham dan hak suara seluruhnya sebesar 100% di GTP.</p> <p>GTP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Suroyo Mulyo SH Notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.</p> <p>Anggaran Dasar GTP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, mengenai perubahan struktur permodalan GTP. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043474.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023.</p> <p>After acquiring KIN, Protelindo has a total capital and voting interest of 100% in GTP.</p> <p>GTP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated April 7, 2009 drawn up in the presence of Suroyo Mulyo SH Notary in Tangerang. GTP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 28, 2009.</p> <p>GTP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 3, dated July 26, 2023, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang, regarding the changes of GTP's capital structure. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. 0043474.AH.01.02.Tahun 2023 dated July 28, 2023</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Komisaris President Commissioner Indra Gunawan, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Eko Santoso Hadiprodjo, Presiden Direktur President Director Dini Adriani, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT ISTANA KOHINOOR (“KOHINOOR”)	
Jenis Usaha Nature of Business	Konstruksi Sentral Komunikasi Central Telecommunication Construction
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Protelindo - 51%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 23 Juni 2011 Start of commercial operations on June 23, 2011
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	46.603
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Pada tanggal 19 Desember 2019, Protelindo menyelesaikan pengambilalihan Kohinoor melalui penerbitan saham baru, sehingga perusahaan tersebut menjadi entitas anak dari Protelindo.</p> <p>Kohinoor adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat di hadapan Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notaris di Denpasar. Akta Pendirian Kohinoor disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.</p> <p>Anggaran Dasar Kohinoor sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 13 Maret 2024, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Kohinoor. Perubahan tersebut telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0110484 tanggal 20 Maret 2024.</p> <p>On December 19, 2019, Protelindo concluded the acquisition of Kohinoor through subscription of newly issued shares, making it a subsidiary of Protelindo.</p> <p>Kohinoor is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 13, dated March 7, 2011 drawn up in the presence of Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notary in Denpasar. Kohinoor's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter Number No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011 dated June 23, 2011.</p> <p>Kohinoor's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 04, dated March 13, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, regarding the amendment of Kohinoor's shareholding structure and management structure. This amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0110484 dated March 20, 2024.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Menara BCA, 49 th Floor Grand Indonesia Shopping Town Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Komisaris President Commissioner Malika Jiwaji, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Indra Gunawan, Presiden Direktur President Director Golda Elizabeth Anatassia, Direktur Director Dini Adriani, Direktur Director Suciratin, Direktur Director Aimana Ilman Aulia, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PEMILIKAN TIDAK LANGSUNG | INDIRECT OWNERSHIP

PT IFORTE GLOBAL INTERNET ("IGI")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunications Equipment Trade Penyediaan Layanan Internet Internet Service Provider
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte - 99,998% Protelindo - 0,002%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 1 Januari 2002 Start of commercial operations on January 1, 2002
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	174.381
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 99,998% di IGI.</p> <p>IGI adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian IGI disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000. Anggaran Dasar IGI sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 19 Juni 2023 dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan pengurus dan tugas dan wewenang direksi IGI.</p> <p>Protelindo has an indirect capital and voting interest of 99.998% in IGI.</p> <p>IGI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 276 dated November 21, 1997 drawn up in the presence of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. IGI's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Legislation through Letter No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 dated March 13, 2000. IGI's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 6 dated June 19, 2023, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the change of management structure and duties and responsibilities of BOD of IGI.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Menara BCA, 43rd Floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Rony Ardhitia Soetedjo, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Silvi Liswanda, Presiden Direktur President Director Fitrah Hamdani, Direktur Director Irvan Rianto, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT DARMANUSA TRITUNGAL ("DNT")	
Jenis Usaha Nature of Business	Konstruksi Sentral Komunikasi Central Telecommunication Construction
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	KIN - 99,99% Protelindo - 0,01%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 26 November 2007 Start of commercial operations on November 26, 2007
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	31.839
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas KIN, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung seluruhnya sebesar 100% di DNT.</p> <p>DNT adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notaris di Jakarta. Akta Pendirian DNT disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-06426.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.</p> <p>Anggaran Dasar DNT sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 25 Januari 2024, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, mengenai perubahan domisili DNT. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006639.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Januari 2024.</p> <p>After acquiring KIN, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in DNT.</p> <p>DNT is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 22 dated November 26, 2007 drawn up in the presence of Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notary in Jakarta. DNT's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-06426.AH.01.01.Tahun 2008 dated February 11, 2008.</p> <p>DNT's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 04 dated January 25, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang, regarding the amendment of DNT's domicile. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0006639.AH.01.02.TAHUN 2024 dated January 30, 2024.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Menara BCA, 49 th Floor Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Komisaris President Commissioner Indra Gunawan, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Eko Santoso Hadiprodjo, Presiden Direktur President Director Dini Adriani, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT QUATTRO INTERNATIONAL (“QTR”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Sentral Komunikasi Central Telecommunication Construction Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunications Equipment Trade
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte – 99,99% Protelindo – 0,01%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 27 April 2009 Start of commercial operations on April 27, 2009
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	323.939
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas KIN, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di QTR.</p> <p>QTR adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 27 April 2009, dibuat dihadapan Muhammad Ridha, SH Notaris di Tangerang. Akta Pendirian QTR disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara 3010–2010 tanggal 20 Mei 2009, Tambahan No. 25, tanggal 26 Maret 2010.</p> <p>Anggaran Dasar QTR sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01, tanggal 13 Februari 2024, dibuat dihadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang, mengenai perubahan susunan pengurus QTR. Perubahan tersebut telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.09–0071164 tanggal 20 Februari 2024.</p> <p>After acquiring KIN, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in QTR.</p> <p>QTR is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 18 dated April 27, 2009 drawn up in the presence of Muhammad Ridha, SH Notary in Tangerang. QTR’s Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 20, 2009 and was published in State Gazette No. 3010–2010 dated May 20, 2009, Supplement No. 25, dated March 26, 2010.</p> <p>QTR’s Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 01, dated February 13, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, regarding changes of management structure of QTR. This amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09–0071164 dated February 20, 2024.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. PHH. Mustopa, Komplek Surapati Commercial Residence (Surapati Core) Blok C No. 06, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Hartono Tanuwidjaja, Presiden Komisaris President Commissioner Onggo Wijaya, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Handoko Siputro, Presiden Direktur President Director Ronald Trisulo, Direktur Director Wahyu Prayogo, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT VARNION TECHNOLOGY SEMESTA (“VTS”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer Wholesale Computer and Computer Equipment Trade Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya Retail Computer and Computer Equipment Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel Cable-Free Telecommunication Activities Penyedia Layanan Internet Internet Service Provider
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte – 60%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 21 Februari 2007 Start of commercial operations on February 21, 2007
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	15.802
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>VTS adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 02, tanggal 6 November 2006, dibuat dihadapan Refizal, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Pusat. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan W7–01697 HT.01.01–TH.2007 tanggal 21 Februari 2007.</p> <p>Anggaran Dasar VTS sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 169, tanggal 23 Mei 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan susunan pengurus dan susunan permodalan VTS. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03–0067936 tanggal 25 Mei 2023.</p> <p>VTS is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 02 dated November 6, 2006 drawn up in the presence of Refizal, S.H., M.Hum., Notary in Central Jakarta. VTS’ Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. W7–01697 HT.01.01–TH.2007 dated February 21, 2007.</p> <p>VTS’ Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 169, dated May 23, 2023, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding change in management and capital structure of VTS. This amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights through Notification Acceptance Letter No. AHU-AH.01.03–0067936 dated May 25, 2023.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Gedung Cyber Lt. 3, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Hartono Tanuwidjaja, Presiden Komisaris President Commissioner Silvi Liswanda, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Alexander Budiman, Presiden Direktur President Director Daniel Sugeng Kosasih, Direktur Director Wahyu Prayogo, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT IFORTE ENERGI NUSANTARA ("IEN") *	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Listrik Electrical Installation Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya Other Electrical Power Support Activities Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Wholesale Trade of Machines, Equipment and Other Industrial Equipment Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Activities of Rental and Leasing Without Option Rights of Industrial Machines and Equipment Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Activities of Rental and Leasing Without Option Rights of Processing Industry Machines and Equipment Pembangkitan Tenaga Listrik Electrical Power Generation Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Operation of Electrical Power Supply Installation Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Operation of Electrical Power Utilization Installation
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte - 99,89% Protelindo - 0,11%
Status Operasi Operational Status	-
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	24.469
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>IEN adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 04, tanggal 17 Mei 2023, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan AHU-0040867.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 7 Juni 2019.</p> <p>Anggaran Dasar IEN sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 02, tanggal 13 Februari 2024, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan nama menjadi PT Iforte Energi Nusantara. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009924.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Februari 2024.</p> <p>IEN is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 04 dated May 17, 2023 drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency. IEN's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0040867.AH.01.01.TAHUN 2023 dated June 7, 2023.</p> <p>IEN's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decisions Resolution No. 02, dated February 13, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, regarding the change of PT Iforte Energi Nusantara name. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0009924.AH.01.02 year 2023 dated February 15, 2024.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang 11, RT 004, RW 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59347

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

Pengurus Perusahaan Management of the Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners: Hartono Tanuwidjaja, Komisaris Commissioner Najeela Shihab, Komisaris Commissioner Silvi Liswanda, Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors: Mohamad Iwan, Presiden Direktur President Director Sandra Tantani, Wakil Presiden Direktur Vice President Director Kodratul Safti, Direktur Director Mustafa Al Ayoubi, Direktur Director
---	---

*(sebelumnya/formerly PT HELIOS ENERGI NUSANTARA)

PT PROTELINDO MENARA PERMATA ("PMP")	
Jenis Usaha Nature of Business	Konstruksi Sentral Telekomunikasi Telecommunication Tower Construction
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Kohinoor - 99,98% Protelindo - 0,02%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 22 Agustus 2019 Start of commercial operations on August 22, 2019
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	6.050
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>PT Protelindo Menara Permata didirikan pada tanggal 22 Agustus 2019, oleh Protelindo dan SMN. Pada tanggal 14 Oktober 2020, dilakukan peningkatan modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor dalam PMP melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil oleh Kohinoor. Sehingga, PMP menjadi entitas anak dari Kohinoor.</p> <p>PMP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.</p> <p>Anggaran Dasar PMP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 13 Maret 2024, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan susunan pengurus PMP. Perubahan tersebut telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0110499 tanggal 20 Maret 2024.</p> <p>PT Protelindo Menara Permata was established on August 22, 2019, by Protelindo and SMN. On October 14, 2020, PMP's authorized capital, as well as issued and paid-up capital were increased through issuance of new shares which were entirely subscribed by Kohinoor. Therefore, PMP became a subsidiary of Kohinoor.</p> <p>PMP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 132 dated August 19, 2019 drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta. PMP's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019 dated August 22, 2019.</p> <p>PMP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 05, dated 13 Maret, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, regarding the amendment of PMP's management structure. This amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0110499 dated March 20, 2024.</p>

Informasi Entitas Anak

Information on Subsidiaries

Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Menara BCA, 49 th Floor Grand Indonesia Shopping Town Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Pengurus Perusahaan Management of the Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners: Ferdinandus Aming Santoso, Presiden Komisaris President Commissioner Fakhrudin, Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors: Indra Gunawan, Presiden Direktur President Director Golda Elizabeth Anatassia, Direktur Director Dini Adriani, Direktur Director Suci Ratin, Direktur Director Tan, Rudy Antonio, Direktur Director

PT PLATINUM TEKNOLOGI (“PLATINUM”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Activities Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunications Equipment Trade Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte – 76,35% KIN – 23,65%
Status Operasi Operational Status	Tidak beroperasi Not operating
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	801.457
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di Platinum.</p> <p>Platinum adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 13 September 2011 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan AHU-45538.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011.</p> <p>Anggaran Dasar Platinum sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29, tanggal 6 September 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai Perubahan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) anggaran dasar dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0288167 tanggal 6 September 2022.</p>

Informasi Entitas Anak

Information on Subsidiaries

	<p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in Platinum.</p> <p>Platinum is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 3 dated September 13, 2011 drawn up in the presence of Rini Yulianti S.H., Notary in East Jakarta. Platinum's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter AHU-45538.AH.01.01. Tahun 2011 dated September 19, 2011.</p> <p>Platinum's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 29 dated September 6, 2022, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in west Jakarta, regarding the amendment to Article 11 paragraph (3) and Article 14 paragraph (3) of the articles of association and reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.03-0288167 dated September 6, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia
Pengurus Perusahaan Management of the Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners: Juliawati Gunawan Halim, Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors: Handoko Siputro, Direktur Director

PT GEMA DWIMITRA PERSADA (“GEMA”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Activities Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunications Equipment Trade Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	PLATINUM – 99,99% SIP – 0,01%
Status Operasi Operational Status	Tidak beroperasi Not operating
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	793.853

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di GEMA.</p> <p>Gema adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 5 Agustus 2005 dibuat di hadapan Yana Valentina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-69517.AH.01.01.Tahun 2008 pada tanggal 25 September 2008.</p> <p>Anggaran Dasar Gema sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31, tanggal 19 Januari 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan KBLI 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004536.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Januari 2022.</p> <p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in GEMA.</p> <p>Gema is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 51 dated August 5, 2005 drawn up in the presence of Yana Valentina, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. Gema's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-69517.AH.01.01.Tahun 2008 dated September 25, 2008.</p> <p>Gema's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 31 dated January 19, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the adjustment of Article 3 of Article of Association with the KBLI 2020. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0004536.AH.01.02.TAHUN 2022 dated January 19, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Juliawati Gunawan Halim, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Hartono Tanuwidjaja, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT BIT TEKNOLOGI NUSANTARA ("BIT")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Penyedia Layanan Internet Internet Service Provider Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Jasa Sistem Komunikasi Data Data Communication System Services Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Telecommunication Resale Services Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Jasa Interkoneksi Internet (NAP) Internet Interconnection Services (NAP)
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	GEMA - 99,9999% PLATINUM - 0,0001%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 22 Maret 2005 Start of commercial operations on March 22, 2005
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	2.889.554
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di BIT.</p> <p>BIT adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 9 Agustus 2004 dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-07617HT.01.01.TH.2005 tanggal 22 Maret 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2005 Tambahan No. 5012.</p> <p>Anggaran Dasar BIT sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5, tanggal 19 Juni 2023, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan susunan pengurus dan tugas dan wewenang direksi BIT. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0084770 tanggal 26 Juni 2023.</p> <p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in BIT.</p> <p>BIT's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 5 dated June 19, 2023, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, regarding the change of management structure and duties and responsibilities of BOD of BIT. This amendment of the Articles of Association was accepted by the Minister of Law and Human Rights under Letter No. AHU-AH.01.03-0084770 dated June 26, 2023.</p> <p>In accordance with Article 3 of BIT's Articles of Association, the scope of its activities involves Major Telecommunication Equipment Trade, Internet Service Provider, Telecommunication With Cable Activities, Data Communication System Services, Telecommunication Resale Services, Holding Company Activities, Trading Of A Great Variety Of Goods, Owned Or Rental Real Estate, Central Telecommunication Construction, Telecommunication Installation, Other Management Consultation Activities and Internet Interconnection Services (NAP).</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Juliawati Gunawan Halim, Presiden Komisaris President Commissioner Rony Ardhitia Soetedjo, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Hartono Tanuwidjaja, Presiden Direktur President Director Mohammad Iqbal, Direktur Director Ramadhan Kurnia Nusa, Direktur Director</p>

PT SARANA INTI PERSADA (“SIP”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	STP – 99,87% BIT – 0,13%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 6 Januari 2005 Start of commercial operations on January 6, 2005
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	116.182
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di SIP.</p> <p>SIP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Oktober 2004 dibuat di hadapan Leontine Anggasurya S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2005 Tambahan No. 9851.</p> <p>Anggaran Dasar SIP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35, tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili SIP. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021679.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

	<p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in SIP.</p> <p>SIP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 16 dated October 12, 2004 drawn up in the presence of Leontine Anggasurya S.H., Notary in Bandung. SIP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C 00383.HT.01.01.TH.2005 dated January 6, 2005 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 16, 2005, Supplement No. 9851.</p> <p>SIP's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 35 dated March 25, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of SIP. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021679.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 25, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Juliawati Gunawan Halim</p> <p>Direksi Board of Directors: Wong Tjin Tak</p>

PT BROADBAND WAHANA ASIA (“BWA”)	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	PLATINUM – 99,99% STP – 0,01%
Status Operasi Operational Status	Tidak beroperasi Not operating
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	8.924

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di BWA.</p> <p>BWA adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Maret 2011 dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-18084.AH.01.01 Tahun 2011 pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>Anggaran Dasar BWA sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.6, tanggal 25 Oktober 2022, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai Perubahan susunan Direksi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09.0070176 tanggal 27 Oktober 2022.</p> <p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in BWA.</p> <p>BWA is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 24 dated March 14, 2011 drawn up in the presence of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. BWA's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-18084.AH.01.01 Tahun 2011 dated April 11, 2011.</p> <p>BWA's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 6 dated October 25, 2022, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, regarding changes in the composition of the board of directors. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.09.0070176 dated October 27, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Sandra Tantani</p> <p>Direksi Board of Directors: Juliawati Gunawan Halim</p>

PT REKAJASA AKSES ("REJA")

Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities Jasa Sistem Komunikasi Data Data Communication System Services Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel Cable-Free Telecommunications Activities Penyedia Layanan Internet Internet Service Provider
--	---

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	BWA – 75%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 24 Juni 2003 Start of commercial operations on June 24, 2003
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	7.471
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 75% di REJA.</p> <p>REJA adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 7 Agustus 2000 dibuat di hadapan Peggy Natanael, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-14414 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juni 2006 Tambahan No. 7567</p> <p>Anggaran Dasar REJA sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7, tanggal 25 Oktober 2022, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai Perubahan susunan Direksi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09.0070197 tanggal 27 Oktober 2022.</p> <p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 75% in REJA.</p> <p>REJA is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated August 7, 2000 drawn up in the presence of Peggy Natanael S.H., Notary in Bandung. REJA's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-14414 HT.01.01.TH.2003 dated June 24, 2003 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 56 dated June 14, 2006 Supplement No. 7567</p> <p>REJA's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 7 dated October 25, 2022, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, regarding changes in the composition of the board of directors. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.09.0070197 dated October 27, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	<p>Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347</p> <p>Kantor Cabang Branch Office: Perkantoran Permata Senayan Blok C01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia</p>
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Popo Jatmiko, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Sandra Tantani, Presiden Direktur President Director Catherine Sembiring Pelawi, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT GLOBAL INDONESIA KOMUNIKATAMA ("GIK")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Major Telecommunication Equipment Trade Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	STP – 99,99% Protelindo – 0,01%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 25 Februari 2010 Start of commercial operations on February 25, 2010
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	89.100
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>Pada Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di GIK.</p> <p>GIK adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 21 Januari 2010 dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 25 Februari 2010.</p> <p>Anggaran Dasar GIK sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 182, tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan domisili GIK. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021704.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.</p> <p>After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in GIK.</p> <p>GIK is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 39 dated Januari 21, 2010 drawn up in the presence of Netty Maria Machdar, S.H., Notary in Jakarta. GIK's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 dated February 25, 2010.</p> <p>GIK's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 182 dated March 25, 2022 drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the change of domicile of GIK. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021704.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 25, 2022.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Popo Djatmiko, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Sandra Tantani, Presiden Direktur President Director Catherine Sembiring Pelawi, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT IFORTE PAYMENT INFRASTRUCTURE ("IPI")	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas Hosting dan yang berhubungan Hosting and Related Activities Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Other Computer Programming Activities Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Payment Service Providers
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte – 69,77%
Status Operasi Operational Status	2005
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	103.819
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>IPI adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 23 Maret 2015, dibuat di hadapan Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan AHU- 0013384.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 24 Maret 2015. Anggaran Dasar IPI sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 213, tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan nama IPI. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0058156.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 September 2023.</p> <p>IPI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 11 dated March 23, 2015 drawn up in the presence of Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency. IPI's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0013384.AH.01.01.TAHUN 2015 dated March 24, 2015. IPI's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 213, dated September 22, 2023, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of IPI's capital structure. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0058156.AH.01.02.TAHUN 2023 dated September 26, 2023.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Jalan Warung Buncit Raya 8a Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12740.
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Armand Widjaja, Presiden Komisaris President Commissioner Andrey Soebekti, Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Valerino Wijaya, Presiden Direktur President Director Suardi, Direktur Director</p>

Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries

PT INTEGRA KREASITAMA SOLUSINDO ("IKS")*	
Jenis Usaha Nature of Business	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas Penunjang Kelistrikan Electrical Support Activities Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Other Computer Programming Activities Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Cable Telecommunication Activities; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel Wireless Telecommunications Activities Distribusi Tenaga Listrik Electric Power Distribution; Instalasi Elektronika Electronics Installation; Instalasi Listrik Electrical installation; Instalasi Telekomunikasi Telecommunications Installation; Instalasi Navigasi Laut dan Sungai Sea and River Navigation Installations; Instalasi Navigasi Udara Air Navigation Installation; Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api Railway Signal and Telecommunications Installations; Internet Service Provider Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Communication System Services; Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP) Telephone Internet Services for Public Use (ITKP); Jasa Multimedia Lainnya Other Multimedia Services; Konstruksi Bangunan Elektrikal Electrical Building Construction Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Residential Building Construction; Konstruksi Gedung Perkantoran Office Building Construction; Konstruksi Gedung Perbelanjaan Shopping Building Construction; Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya Construction of Electrical and Other Telecommunications Networks; Konstruksi Sentral Telekomunikasi Telecommunication Central Construction; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya Wholesale Trade in Office and Industrial Machines, Spare Parts and The equipment; Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Wholesale Trade in Telecommunication Equipment; Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Wholesale Electronic Spare Parts Trade; Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Wholesale Trade in Household Equipment and Supplies; Transmisi Tenaga Listrik Electric Power Transmission.
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	iForte – 60%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 2016 Start of commercial operations on 2016
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	85.033**
Profil Perusahaan Profile of the Company	<p>IKS adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 12 Februari 2016, dibuat dihadapan Robbyson Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok. Akta Pendirian IKS disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008722.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 Februari 2016.</p> <p>Anggaran Dasar IKS sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 63, tanggal 12 Maret 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus IKS. Perubahan tersebut telah mendapat penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0101114 tanggal 13 Maret 2024.</p> <p>IKS is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated February 12, 2016 drawn up in the presence of Robbyson Halim, S.H., M.Kn., Notary in Depok. IKS's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter AHU-0008722.AH.01.01.TAHUN 2016 dated February 16, 2016.</p> <p>IKS's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 63, dated March 12, 2024, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, regarding changes of shareholding structure and management structure of IKS. This amendment has been accepted by the Minister of Law and Human Rights through Letter AHU-AH.01.09-0101114 dated March 13, 2024.</p>
Alamat Perusahaan Address of the Company	Jl. Panglima Polim Raya No. 127/C-5, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12160
Pengurus Perusahaan Management of the Company	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners: Muhammad Fitno, Presiden Komisaris President Commissioner Yogi Pamungkas S.T., Komisaris Commissioner</p> <p>Direksi Board of Directors: Edi Suryo Broto, President Director Director Franciscus Herry Kustono, Director Director Eko Abdurrahman Saleh, Director Director</p>

*) PT Integra Kreasitama Solusindo ("IKS") diakuisisi pada tanggal 13 Maret 2024
PT Integra Kreasitama Solusindo ("IKS") was acquired on March 13, 2024

***) angka per 31 Desember 2023, unaudited
figures as of December 31, 2023, unaudited

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM SHARES ISSUANCE CHRONOLOGY

Perseroan merupakan perusahaan terbatas yang tidak berstatus perusahaan publik, dan tidak melakukan penerbitan saham, sehingga tidak terdapat pelaporan mengenai kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan.

As the Company is a limited liability company with no public company status and does not issue shares, there is no reporting on the chronology of stock listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing to the end of the fiscal year, as well as the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

OTHER BONDS LISTING CHRONOLOGY

Secara historis, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat utang berupa obligasi yang disajikan pada tabel berikut ini:

Historically, the Company has issued debt securities in the form of bonds that are presented in the following table:

Nama Obligasi Name of the Bond	Penerbit Issuer	Jumlah Pokok Principal Amount (Rp Miliar / Rp Billion)	Tanggal Emisi Date of Issue	Jatuh Tempo Maturity	Kupon Coupon (Per Tahun / Per Annum)	Peringkat Rating
Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024 Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024	Protelindo Finance B.V.	SGD180.000.000	27 November 2024 November 27, 2024	27 November 2024 November 27, 2024	3,25%*	Standard and Poor's Ratings Services rating: AA
Obligasi Protelindo I Tahun 2014 Protelindo Bonds I Year 2014	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.000	28 Februari 2014 February 28, 2014	28 Februari 2017 February 28, 2017	10,50%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 seri A Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	661	23 November 2016 November 23, 2016	23 November 2019 November 23, 2019	7,90%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AA+ (idn)
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 seri B Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	36	23 November 2016 November 23, 2016	23 November 2021 November 23, 2021	8,25%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AA+ (idn)



Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Bonds Listing Chronology

Nama Obligasi Name of the Bond	Penerbit Issuer	Jumlah Pokok Principal Amount (Rp Miliar / Rp Billion)	Tanggal Emisi Date of Issue	Jatuh Tempo Maturity	Kupon Coupon (Per Tahun / Per Annum)	Peringkat Rating
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 seri C Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 series C	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	103	23 November 2016 November 23, 2016	23 November 2023 November 23, 2023	8,75%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AA+ (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 seri A Sustainable Bonds II Protelindo Phase I Year 2020 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	84	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	7,00%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 seri B Sustainable Bonds II Protelindo Phase I Year 2020 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	67	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2025 September 3, 2025	7,70%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri A Sustainable Bonds II Protelindo Phase II Year 2021 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.011,75	17 Desember 2021 December 17, 2021	27 Desember 2021 December 27, 2021	3,60%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B Sustainable Bonds II Protelindo Phase II Year 2021 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.593,25	17 Desember 2021 December 17, 2021	17 Desember 2024 December 17, 2024	5,30%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri C Sustainable Bonds II Protelindo Phase II Year 2021 series C	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	744	17 Desember 2021 December 17, 2021	17 Desember 2026 December 17, 2026	6,10%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 seri A Sustainable Bonds III Protelindo Phase I Year 2022 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	931	9 Agustus 2022 August 9, 2022	19 Agustus 2023 August 19, 2023	4,50%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 seri B Sustainable Bonds III Protelindo Phase I Year 2022 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	69	9 Agustus 2022 August 9, 2022	9 Agustus 2025 August 9, 2025	6,00%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 seri A Sustainable Bonds III Protelindo Phase II Year 2023 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	2.761,15	21 Maret 2023 March 21, 2023	31 Maret 2024 March 31, 2024	6,35%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 seri B Sustainable Bonds III Protelindo Phase II Year 2023 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	143,35	21 Maret 2023 March 21, 2023	21 Maret 2026 March 21, 2026	6,60%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Bonds Listing Chronology

Nama Obligasi Name of the Bond	Penerbit Issuer	Jumlah Pokok Principal Amount (Rp Miliar / Rp Billion)	Tanggal Emisi Date of Issue	Jatuh Tempo Maturity	Kupon Coupon (Per Tahun / Per Annum)	Peringkat Rating
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023 seri A Sustainable Bonds III Protelindo Phase III Year 2023 series A	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	797,50	8 Juni 2023 June 8, 2023	18 Juni 2024 June 18, 2024	6,15%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023 seri B Sustainable Bonds III Protelindo Phase III Year 2023 series B	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	296,00	8 Juni 2023 June 8, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026	6,50%	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn)

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTANT & PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SERVICES

Akuntan Publik Independent Auditor



Purwantono, Sungkoro & Surja
Indonesia Stock Exchange Building, Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tel: 021-5289 5000 Fax: 021-5289 4100

Akuntan Publik | Public Accountant: Widya Arijanti

Jasa yang diberikan | Services rendered:
Audit laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Audit of the consolidated financial statements as of December 31, 2023, and for the year ended on that date.

Periode penugasan | Assignment period:
Dari 10 Oktober 2023 sampai dengan April 2024
From October 10, 2023 to April 2024

Biaya jasa | Fees:
Rp3,0 Miliar | Billion

Jasa lain selain audit | other services:
Tidak ada jasa lain selain jasa audit
No other services rendered

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK

INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTANT & PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SERVICES

WALI AMANAT TRUSTEE



PT Bank Permata, Tbk.
Permata Bank Tower III, 14th Fl
Jl. M.H. Thamrin Blok B1/1
Sektor VII-CBD, Pondok Aren
Tangerang 15224

NOTARIS NOTARY



Christina Dwi Utami, SH.,MHum, Mkn
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 3
Jakarta 11140, Indonesia
Tel : (62-21) 6345668
Fax : (62-21) 6345666

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANT



Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia, 7th Floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel : (62-21) 5747181
Fax : (62-21) 5747180

PERINGKAT RATINGS

Lembaga Peringkat Rating Agency	Uraian Description
Fitch Ratings Singapore Pte. Ltd. 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 03898	Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDR) dari operator menara independen terbesar di Indonesia, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di 'BBB'. Outlook untuk peringkat adalah Stabil. Tanggal afirmasi: September 2023 Fitch Ratings has affirmed the Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating of Indonesia's largest independent tower operator, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), at 'BBB'. The Outlook on the ratings is Stable. Affirmation date: September 2023
Fitch Rating Indonesia DBS Bank Tower, 24 th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan 12940	Pada saat yang bersamaan, Fitch Ratings Indonesia juga telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang dan peringkat Nasional Senior Tanpa Jaminan di 'AAA(idn)'. Outlook untuk peringkat adalah Stabil. Simultaneously, Fitch Ratings Indonesia affirmed the National Long-Term Rating and national senior unsecured rating at 'AAA(idn)'. The Outlook on the ratings is Stable.
Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-08 Singapore Land Tower Singapore 048623	Moody's maintain Protelindo di Baa3, outlook stabil. Moody's maintained Protelindo di Baa3, the outlook is stable.
Standard & Poor's Singapore Pte. Ltd. 12 Marina Boulevard #23- 01, Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982	S&P mengafirmasi Peringkat Kredit Jangka Panjang Protelindo BBB-, outlook tetap stabil. Tanggal afirmasi: Maret 2023 S&P affirmed Protelindo's long term Corporate Credit Rating at BBB; outlook remains stable. Affirmation date: March 2023
MSCI	Peningkatan ESG rating MSCI di tahun 2023 dari semula BB menjadi BBB Improvement of ESG rating MSCI in 2023 from BB to BBB
Sustainalytics	Peningkatan ESG rating Sustainalytics di tahun 2023 dari ESG Risk Rating semula 26,7 menjadi 26,3 Improvement of ESG rating Sustainalytics in 2023 from ESG Risk Rating of previously 26.7 to 26.3



PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

AWARDS & CERTIFICATIONS

TOWER

- Emiten Non Bank** pada Bisnis Indonesia Awards 2023 untuk Sektor Telekomunikasi
- TrenAsia ESG Awards 2023** kategori Communication & Business Provider dengan predikat "Action"
- TrenAsia ESG Awards 2023** Best CEO of Social
- Investortrust ESG Disclosure Transparency Awards 2023** dengan predikat Management BB
- Peningkatan ESG rating MSCI** di tahun 2023 dari semula BB menjadi BBB
- Peningkatan ESG rating Sustainalytics** di tahun 2023 dari ESG Risk Rating semula 26.7 menjadi 26.3
- Indonesia Best Public Company 2023** from Warta Ekonomi
- SWA 100 Indonesia's Best Public Companies - Best Wealth Creator 2023** from SWA Media Group

- The Quicker - BTS Quicker Awards 2023** from Smartfren
- Fastest CME START - RFIB (RT) 2023** from Smartfren
- Best SITAC LOI - CME Start 2023** from Smartfren
- Fastest Foundation Done - RFIB 2023** from Smartfren
- Fastest LOI - RFIB 2023** from Smartfren
- Best Quality CME & Clean Trouble Ticket-Post RFI 2023** from Smartfren
- Fastest Validation OK- RFIB 2023** from Smartfren
- Protelindo Group Corporate Legal Division** has included in the GC Powerlist Southeast Asia Teams 2023

NON TOWER

- HPE Aruba Networking** - FY23 Top Seath Small Business Reseller Award, SEATH itu South East Asia Taiwan Hongkong
- Aruba Partner Award 2023** - FY23 Instant On Partner Of The Year
- Smartfren Annual NOPI Award 2023**
- Marketing Excellence Award**
- Atmosphere Asia Pacific Japan 2023**
- Network Partner of The Year** Fibre Lease Provider from Indosat Marvelous Partner Awards
- The Best of FLP Partner H1- 2023** from Smartfren



SERTIFIKASI SMN DAN ANAK PERUSAHAAN

CERTIFICATIONS OF SMN AND ITS SUBSIDIARIES

Original registration date (certification date): 2023-03-06
Latest revision date: 06 Maret | March 2023
Information Security Management System (ISO 27001)
BSI Group Indonesia

Original registration date (certification date): 2018-03-08
Latest revision date: 08 Maret | March 2024
Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

Original registration date (certification date): 2012-07-11
Latest revision date: 25 Maret | March 2025
Quality Management System (ISO 9001)
BSI Group Indonesia

Original registration date (certification date): 2022-02-23
Latest revision date: 23 Februari | February 2025
Environmental Management System (ISO 14001)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

Original registration date (certification date): 2021-03-25
Latest revision date: 25 Maret | March 2025
Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001)
BSI Group Indonesia

Original registration date (certification date): 2018-03-08
Latest revision date: 08 Maret | March 2024
Information Security Management System (ISO 27001)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

Original registration date (certification date): 2012-08-01
Latest revision date: 25 Maret | March 2025
Environmental Management System (ISO 14001)
BSI Group Indonesia

Original registration date (certification date): 2023-03-21
Latest revision date: 21 Maret | March 2026
Service Management Systems (ISO 20000-1)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

Original registration date (certification date): 2018-03-08
Latest revision date: 08 Maret | March 2024
Quality Management System (ISO 9001)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

Original registration date (certification date): 2023-03-24
Latest revision date: 26 Maret | March 2026
Anti-Bribery Management Systems (ISO 37001)
PT Internasional Sertifikasi Indonesia

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Ekspansi bisnis Perseroan yang berhasil meningkatkan kinerja profitabilitas di tahun 2023 mampu meningkatkan ekuitas Perseroan menjadi Rp16,51 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14,38% yoy.

The Company's business expansion, which succeeded in increasing its profitability performance in 2023, was able to increase the Company's equity to Rp16.51 trillion with a growth of 14.38% yoy.

04



TINJAUAN PEREKONOMIAN

ECONOMIC OVERVIEW



Tinjauan Perekonomian Dunia

Dunia menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan perlambatan ekonomi Tiongkok terutama dipengaruhi oleh konsumsi yang melemah dan sektor konstruksi yang mengalami penurunan kinerja setelah dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dunia. Sebaliknya, pada tahun 2023, ekonomi AS mampu tumbuh lebih kuat terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik.

Global Economic Review

The world is confronted with the challenge of slowing economic growth marked by China's economic downturn, mainly influenced by weak consumption and the construction sector which has experienced performance decline after in recent years becoming the main driver of global economic growth. In contrast, the US economy is able to grow stronger in 2023, driven primarily by household consumption and a domestically-oriented service sector.

Tinjauan Perekonomian Economic Overview

Perkembangan ekonomi dunia tahun 2023 juga dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang meningkat dan berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Merespon kenaikan inflasi ini, Bank Sentral AS telah menaikkan Federal Funds Rate (FFR) menjadi 5,50% per Oktober 2023 dari posisi akhir tahun 2022 sebesar 4,50%. Kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Akibatnya, Dolar AS menguat secara signifikan seiring dengan pembalikan arus modal dari negara *Emerging Market Economies* (EMEs) ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid.

Sejalan dengan faktor ketidakpastian ekonomi dan keuangan global tersebut yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik berpengaruh kepada perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat di tahun 2023. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan PDB dunia tahun 2023 menjadi 3,1% di tahun 2023, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,50%.

Tinjauan Perekonomian Indonesia

Seiring dengan perkembangan di perekonomian global, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 25bps menjadi 5,75% di bulan Januari 2023 dan selanjutnya diikuti kenaikan 25bps lainnya menjadi 6,00% di bulan Oktober 2023. Kenaikan BI7DRR ini dalam rangka memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali yang mencapai 2,56% yoy per Oktober 2023 atau masih dalam sasaran 3,0±1% pada 2023.

Di tengah tekanan fluktuasi Rupiah dan kenaikan inflasi, ekonomi Indonesia masih membukukan pertumbuhan sebesar 5,05% yoy hingga kuartal III tahun 2023 dibandingkan sebesar 5,41% yoy periode yang sama tahun sebelumnya. Pengeluaran

Global economic developments in 2023 are also influenced by increasing geopolitical tensions, which have an impact on rising energy and food prices, resulting in high global inflation. In response to increase in inflation, the US Central Bank has raised the Federal Funds Rate (FFR) to 5.50% as of October 2023 from 4.50% at the end of 2022. The interest rate hike is expected to remain higher for a longer period of time. As a result, the US Dollar significantly strengthened in line with the reversal of capital flows from Emerging Market Economies (EMEs) to developed countries and to more liquid assets.

In line with global economic and financial uncertainty, accompanied by escalating geopolitical tensions, global economic growth is expected to weaken in 2023. The International Monetary Fund (IMF) forecasts world GDP growth in 2023 to be 3.1% in 2023, lower than the previous year of 3.50%.

Indonesian Economic Review

In line with developments in the global economy, Bank Indonesia (BI) raised its benchmark interest rate (BI7DRR) by 25bps to 5.75% in January 2023 followed by another 25bps increase to 6.00% in October 2023. The BI7DRR hike is aimed at strengthening rupiah exchange rate stabilization policy from the impact of increasing global uncertainty as well as pre-emptive and forward-looking measures to mitigate the impact on imported inflation, allowing inflation to remain under control at 2.56% yoy as of October 2023 or within the target corridor of 3.0±1% in 2023.

Amidst pressures from Rupiah fluctuations and rising inflation, Indonesia's economy still posted growth of 5.05% yoy until the third quarter of 2023 compared to 5.41% yoy in the same period the previous year. Household consumption expenditure



Tinjauan Perekonomian Economic Overview

konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia sebesar 52,73% dengan pertumbuhan sebesar 4,82% yoy pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif terjaga dengan baik didukung oleh pengelolaan inflasi dengan baik oleh Pemerintah.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh beberapa sektor usaha yang berhasil tumbuh *double digit* meski mengalami perlambatan pertumbuhan seperti transportasi dan pergudangan (13,96% yoy) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (10,01% yoy). Sektor lain pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan (4,64% yoy); serta informasi dan komunikasi (7,59% yoy). Di sisi lain, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami perlambatan sebesar 4,91% yoy di tahun 2023 dari 6,61% yoy di tahun sebelumnya.

still contributed the largest to Indonesia's GDP at 52.73% with growth of 4.82% yoy in the period. This indicates that people's purchasing power remains relatively well maintained, supported by good inflation management by the Government.

On business sector, Indonesia's economic growth is supported by several business sectors that remain able to grow double digits despite experiencing slowing growth, such as transportation and warehousing (13.96% yoy) and accommodation and food service activities (10.01% yoy). Other sectors contributing to Indonesia's economic growth include the manufacturing industry (4.64% yoy) and information and communication (7.59% yoy). On the other hand, the electricity and gas supply sector decreased to 4.91% yoy in 2023 from 6.61% yoy in the previous year.

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY REVIEW

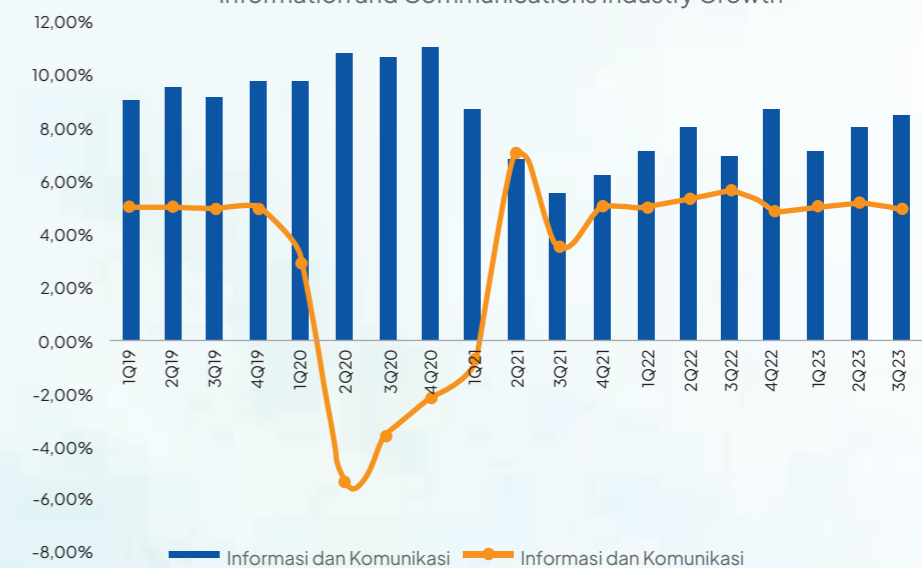
Industri informasi dan komunikasi adalah industri yang mampu membukukan pertumbuhan secara konsisten di zona positif. Bahkan, kecuali untuk periode kuartal II 2021 yang tumbuh 6,90% yoy atau sedikit dibawah pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 7,08%, pertumbuhan industri informasi dan telekomunikasi selalu melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan pertumbuhan permintaan di industri telekomunikasi Indonesia seiring dengan pergeseran budaya komunikasi telepon di Indonesia dalam satu dekade terakhir, dari penggunaan teknologi telekomunikasi telepon kabel menjadi teknologi komunikasi tanpa kabel.

Industri informasi dan komunikasi berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,59% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,05% yoy. Pertumbuhan tertinggi industri ini dalam lima tahun terakhir justru terjadi ketika pandemi karena adanya pembatasan aktivitas sosial sehingga mendorong peningkatan aktivitas berbasis digital. Adapun kontribusi industri ini terhadap PDB Indonesia mencapai 4,23% di tahun 2023.

The information and communication industry is one that is capable of continually recording positive growth. In actuality, with the exception of the second quarter of 2021, when the industry increased 6.90% yoy, or slightly below Indonesia's GDP growth of 7.08%, the growth of information and telecommunications industry has always outpaced Indonesia's economic growth. This reflects the rise of demand in the Indonesian telecommunications industry, which corresponds to the country's shift in telephone communication culture over the last decade, from the usage of cable telecommunications technology to wireless communication technology.

The information and communication industry successfully recorded a growth of 7.59% yoy, higher than Indonesia's GDP growth of 5.05% yoy. The highest growth of this industry in the last five years occurred during the pandemic, due to restrictions on social activities, which encouraged an increase in digital-based activities. The contribution of this industry to Indonesia's GDP reached 4.23% in 2023.

Pertumbuhan Industri Informasi dan Komunikasi
Information and Communications Industry Growth



Tinjauan Industri Telekomunikasi Telecommunications Industry Review

Peningkatan kepemilikan telepon seluler di Indonesia menunjukkan tren kenaikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler di tahun 2022. Dibandingkan kepemilikan telepon seluler sebesar 39,11% di tahun 2011, selama dua belas tahun penduduk yang memiliki telepon seluler bertambah 28,77%. Selain itu, menurut BPS, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Penggunaan internet dalam rumah tangga mencapai 86,54% di tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan sebesar 73,75% di tahun 2019.

Peningkatan penggunaan internet seiring dengan perkembangan digitalisasi yang pesat sejak pandemi. Dengan demikian, keberadaan industri pendukung penyedia infrastruktur telekomunikasi yakni pengelola menara telekomunikasi sangat dibutuhkan. Pasar menara telekomunikasi Indonesia telah mengalami konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggan dari perusahaan pengelola menara telekomunikasi meliputi operator telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, H3I, Indosat, XL Axiata dan Smartfen selain juga kepada pemerintah.

Indonesia is experiencing an upward trend in mobile phone ownership. The Central Statistics Agency (BPS) data stated that 67.88% of Indonesia's population has owned a mobile phone in 2022. Compared to mobile phone ownership of 39.11% in 2011, over the past twelve years the population owning mobile phones increased by 28.77%. BPS also stated that the use of Information and Communication Technology in Indonesia shows rapid development. Internet usage in households reached 86.54% in 2022, higher than 73.75% in 2019.

The increase in internet use is in line with the rapid development of digitalization since the pandemic. Hence, the existence of supporting industries for telecommunications infrastructure providers, namely telecommunications tower managers, is needed. Indonesia's telecommunication tower market has been consolidating in recent years. Customers of telecommunication tower management companies include telecommunications operators in Indonesia, namely Telkomsel, H3I, Indosat, XL Axiata and Smartfen as well as the government.

STRATEGI USAHA BUSINESS STRATEGY

Protelindo menjalankan beberapa strategi yang mempertimbangkan target keuangan, skala operasional serta model bisnis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan berusaha untuk mempertahankan modal bisnis dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dengan menargetkan imbal hasil keuangan yang baik di atas biaya keuangan (*Cost of Fund*). Oleh karena itu, Perseroan harus memiliki akses ke pendanaan yang baik disertai kemampuan operasional yang efisien dibantu oleh skala usaha yang mencapai *economies of scale*. Dukungan grup turut memberi dukungan bagi kami untuk melakukan pembangunan aset-aset infrastruktur dengan organik ataupun akuisisi sehingga memperkuat fokus bisnis serta reorganisasi untuk menciptakan sinergi.

Kesuksesan Perseroan saat ini adalah hasil dari memahami kebutuhan industri dan kebutuhan pelanggan. Menara Perseroan berada pada posisi yang baik dan memiliki kapasitas untuk menangkap penyewa kolokasi dalam jumlah besar. Jaringan kabel serat optik kami yang luas juga penting untuk menangkap tren kolokasi yang terus berlanjut serta pelanggan baik perbankan maupun di kategori UKM (Usaha Kecil Menengah).

Aset utama Protelindo yaitu menara diperkirakan akan tetap penting bagi penerapan teknologi dan kebutuhan jaringan yang lebih tinggi dan kompleks di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud memperkuat posisinya di industri dan memperluas jaringan menara dan kabel serat optik melalui konstruksi dan akuisisi.

Memaksimalkan Sewa Kolokasi Pada Menara Perseroan

Protelindo juga akan memaksimalkan implementasi strategi sewa kolokasi, atau menyewakan ruang yang tersedia di menara yang ada ke beberapa penyewa. Biaya pengoperasian menara sebagian besar tetap, dan Perseroan hanya akan mengeluarkan biaya yang relatif rendah untuk menambahkan penyewa. Strategi "*asset-light*" yang dituju oleh operator telekomunikasi mendukung penambahan

Protelindo employs various strategies that consider financial targets, operational scale, and business models to achieve its set goals. The Company aims to maintain business capital in providing telecommunications infrastructure by targeting good financial returns above the *Cost of Fund*. As such, the Company must have access to good financing coupled with efficient operational capabilities, aided by a business scale that achieves *economies of scale*. Support from the group also backs the Company in developing infrastructure assets organically or through acquisitions, hence strengthening business focus and reorganization to create synergy.

The Company's current success is the result of understanding the needs of the industry and customers. Protelindo's towers are well-positioned and have the capacity to attract a large number of colocation tenants. Our extensive fibre optic cable network is also crucial for capturing the ongoing colocation trend as well as customers in both banking and the SME (Small and Medium Enterprises) category.

Protelindo's main assets, its towers, are expected to remain vital for the deployment of technology and the higher and more complex network needs in the future. In addition, the Company intends to strengthen its position in the industry and expand its tower and fibre optic cable network through construction and acquisitions.

Maximize Collocation Leasing on Our Existing Towers

Protelindo will also maximize the implementation of colocation lease strategies, or renting out available space in existing towers to multiple tenants. The operating costs of the towers are largely fixed, and the Company will only incur relatively low costs to add tenants. The "*asset-light*" strategy pursued by telecommunications operators supports the addition of colocations. Hence, renting out

Strategi Usaha Business Strategy

kolokasi. Dengan demikian, penyewaan ruang yang tersedia untuk operator telekomunikasi tambahan akan secara signifikan memperbaiki margin operasi dan imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Perseroan secara aktif memasarkan kolokasi ke para operator telekomunikasi dan terus mengedukasi pasar mengenai manfaat yang ditawarkan kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

Pertumbuhan Melalui Pembangunan

Secara historis, para operator telekomunikasi telah memilih untuk melakukan strategi "asset-light" dalam melaksanakan bisnis mereka. Sejak 31 Maret 2007, kami telah membangun 10.595 menara dengan pengaturan sesuai kebutuhan (atau disebut *Build-to-Suit*). Perseroan percaya bahwa faktor pertumbuhannya sampai saat ini timbul dari pembangunan menara *build-to-suit* yang dapat diandalkan.

Perseroan telah mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria minimum *return*. Dengan pengaturan ini, Perseroan biasanya setuju untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun dan memiliki jaringan lokasi menara yang dibangun di lokasi yang dipilih oleh operator telekomunikasi sesuai dengan spesifikasi desain jaringannya.

Operator telekomunikasi kemudian menjadi *anchor tenant* di menara ini berdasarkan perjanjian sewa situs jangka panjang. Perseroan akan terus memasarkan menara tersebut ke operator lain untuk mendapatkan pendapatan kolokasi atau meningkatkan utilisasi aset. Mayoritas dari pembangunan aset infrastruktur baru Perseroan dilakukan dengan mendapatkan hak sewa lokasi dengan *anchor tenant* terlebih dahulu.

Pertumbuhan Melalui Akuisisi

Perseroan mencapai posisi terdepan di Indonesia terutama melalui akuisisi menara. Protelindo bermaksud mempertahankan posisi pasarnya dengan memanfaatkan akuisisi sebagai strategi utama. Perseroan akan terus mengeksplorasi akuisisi strategis yang memenuhi kriteria pengembalian minimum atau akuisisi yang membantu Perseroan berkembang ke area baru dalam layanan yang terkait dengan digital infrastruktur.

available space to additional telecommunications operators will significantly improve operating margins and the return on invested capital. The Company actively markets colocation to telecommunications operators and continues to educate the market about the benefits colocation offers to telecommunications operators.

Growth Through Development

Historically, telecommunications operators have opted for an "asset-light" strategy in conducting their business. Since March 31, 2007, we have built 10,595 towers with arrangements tailored to needs (or known as *Build-to-Suit*). The Company believes that its growth factor to date stems from the construction of reliable *build-to-suit* towers.

The Company has developed its business by focusing on projects that meet minimum return criteria. With this arrangement, the Company typically agrees to collaborate with telecommunications operators to build and own a network of tower locations constructed at sites chosen by the telecommunications operators according to the specifications of their network design.

The telecommunications operators then become the anchor tenants in these towers based on long-term site lease agreements. The Company will continue to market these towers to other operators to generate colocation revenue or increase asset utilization. The majority of the Company's new infrastructure asset developments are done by securing lease rights to locations with an anchor tenant first.

Growth Through Acquisition

The Company has achieved a leading position in Indonesia primarily through tower acquisitions. Protelindo intends to maintain its market position by leveraging acquisitions as a primary strategy. The Company will continue to explore strategic acquisitions that meet minimum return criteria or acquisitions that help the Company expand into new areas within digital infrastructure-related services.

Strategi Usaha Business Strategy

Perseroan mengevaluasi peluang akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, termasuk pengembalian modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih/*overlap* dengan portofolio menara yang ada, lokasi menara, utilisasi kapasitas yang ada, kepadatan penduduk lokal dan potensi pertumbuhan. Perseroan juga mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan hal baru pembangunan menara. Perseroan akan terus mencari cara melaksanakan peluang akuisisi menara dengan opsi paling efisien, termasuk mengoptimalkan struktur permodalan.

Fokus Terhadap Kualitas Layanan

Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang ditargetkan untuk meningkatkan *tenancy ratio* di menaranya, yang sebagian besar dibangun untuk dua atau lebih penyewa.

Perseroan percaya bahwa kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi dan secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kami berusaha untuk diakui sebagai Perseroan yang membuat komitmen komersial yang masuk akal bagi pelanggannya dan kemudian memberikan komitmen ini dengan tepat waktu. Perseroan percaya bahwa kemampuannya untuk membantu operator telekomunikasi dengan cepat memasuki wilayah operasional baru dan memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan mereka akan membantu meningkatkan *tenancy ratio*.

Oleh karena itu, kami menargetkan operator telekomunikasi yang memperluas atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka yang ada dan juga meluncurkan teknologi baru dan berkembang secara geografis. Protelindo percaya bahwa pihaknya telah membangun basis menara yang cukup besar untuk mempertahankan pertumbuhan yang ditargetkan di masa yang akan datang terutama melalui kolokasi.

Kenali Pelanggan Anda

Kami percaya bahwa dengan memperdalam pemahaman atas pelanggan kami (*know your customer*), kami telah memahami pentingnya diversifikasi dan kekuatan finansial untuk mendukung kebutuhan pelanggan kami.

The Company evaluates acquisition opportunities using several criteria, including the return on invested capital, potential colocation demand, the degree of overlap with the existing tower portfolio, tower locations, existing capacity utilization, local population density, and growth potential. The Company also considers relevant laws and regulations related to new tower development. The Company will continue to seek ways to execute tower acquisition opportunities most efficiently, including optimizing the capital structure.

Focus on Service Quality

The Company employs targeted sales and marketing techniques to enhance the *tenancy ratio* in its towers, which are primarily constructed for two or more tenants.

The Company believes that the key to the success of this strategy lies in its ability to maintain long-term relationships with telecommunications operators and consistently meet the needs of its customers. We strive to be recognized as a company that makes commercially sensible commitments to its customers and then delivers on these commitments in a timely manner. The Company believes that its ability to assist telecommunications operators in quickly entering new operational territories and expanding their network coverage and capacity will help to improve the *tenancy ratio*.

As such, we target telecommunications operators who are expanding or upgrading their existing network infrastructure and also launching new technologies and growing geographically. Protelindo believes that it has built a sufficiently large tower base to sustain the targeted growth in the future, primarily through colocation.

Know Your Customer

We believe that by deepening our understanding of our customers (*know your customer*), we have recognized the importance of diversification and financial strength to support our customers' needs. The combination of Protelindo's and iForte's market

Strategi Usaha Business Strategy

Penggabungan pengetahuan pasar dan kemampuan pemasaran Protelindo dan iForte terbukti dengan menghubungkan situs menara dengan kabel serat optik untuk mencapai transmisi yang lebih optimal untuk implementasi 4G-LTE. Implementasi strategis disertai jangkauan layanan kami yang luas memungkinkan kami untuk memperdalam pemahaman atas kebutuhan pelanggan kami dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka yang dinamis.

Kebijakan Keuangan Dengan Fokus Pada Sustainability

Perseroan terus memberikan penekanan yang kuat pada penerapan kebijakan keuangan dan sosial yang ditujukan untuk keberlanjutan jangka menengah sampai jangka panjang. Ini termasuk pengelolaan utang pada tingkat yang wajar dan menerapkan investasi modal yang disiplin. Kami berencana untuk terus mengelola leverage seiring dengan peningkatan jumlah menara dan pengelolaan seluruh aset Perseroan. Protelindo akan berusaha untuk beroperasi dengan efisien, mengelola modal kerjanya dan meningkatkan margin dan profitabilitasnya. Kami juga akan menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan.

knowledge and marketing capabilities is evidenced by connecting tower sites with fibre optic cables to achieve more optimal transmission for 4G-LTE implementation. This strategic implementation, with our extensive service reach, allows us to deepen our understanding of our customers' needs and meet their dynamic business requirements.

Financial Policy Focused on Sustainability

The Company continues to place strong emphasis on the implementation of financial and social policies aimed at sustainability in the medium to long term. This includes managing debt at a reasonable level and applying disciplined capital investments. We plan to continue managing leverage as the number of towers increases and managing all of the Company's assets. Protelindo will strive to operate efficiently, manage its working capital, and improve its margins and profitability. We will also be a responsible part of the community and conduct sustainable operational activities.

ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT



Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang ditetapkan oleh Perseroan adalah pengumpulan data dari setiap jaringan operator telekomunikasi terkait dengan rencana perluasan bisnisnya. Selanjutnya, dengan menggunakan perangkat lunak kami dapat ditentukan menara telekomunikasi kami yang ada berlokasi di area yang sesuai jaringan rencana perluasan dan kemudian menyediakan operator tersebut dengan informasi yang relevan.

Masing-masing operator telekomunikasi dikembangkan strategi pemasaran yang spesifik melalui pertemuan secara teratur dengan tim desain jaringan masing-masing operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ketersediaan aset-aset infrastruktur telekomunikasi kami.

Marketing Strategy

The Company's marketing strategy is to collect data from each telecom operator's network regarding its business expansion plans. Moreover, our software allows us to determine whether our existing telecommunications towers are located in areas that are suitable for planned network expansion and then provide these operators with the relevant information.

Each telecommunications operator developed a specific marketing strategy through regular meetings with each carrier's network design team to understand their needs and market the availability of our telecommunications infrastructure assets.

Aspek Pemasaran Marketing Aspect

Selain itu, kami menyajikan batas waktu untuk pelaksanaan kolokasi dan/atau penyambungan sambungan fiber optic kepada para operator telekomunikasi dan berusaha untuk memenuhi batas waktu tersebut dan mengungguli para pesaing kami.

Dukungan grup usaha juga diberikan melalui pemasaran kolokasi yang tersedia pada menara kami untuk pelanggan potensial yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa ini di setiap menaranya dan mendapatkan pendapatan tambahan termasuk dari kemungkinan penawaran jasa-jasa lain. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan rencana kami mengembangkan layanan jasa infrastruktur telekomunikasi lainnya.

Pangsa Pasar

Perseroan bersaing dengan penyedia menara telekomunikasi independen besar di Indonesia dan penyedia menara telekomunikasi independen lainnya dengan skala lebih kecil, di samping operator telekomunikasi dan anak perusahaannya yang memiliki dan mengoperasikan menara telekomunikasinya sendiri. Sebagian operator telekomunikasi menyewakan ruang yang tersedia di menara telekomunikasinya kepada operator telekomunikasi lainnya. Persaingan di industri menara telekomunikasi terutama didorong oleh ketersediaan site menara telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan kapasitas, cakupan, dan ekspansi jaringan operator telekomunikasi.

In addition, we provide deadlines to telecommunications operators for the implementation of colocation and/or fiber connectivity and strive to meet these deadlines and outperform our competitors.

Our business group support is also provided through marketing of colocations available on our towers to existing potential customers with the aim of maximizing the number of customers using these services in each tower and earning additional revenue including from the possibility of offering other services. This strategy can be implemented with our plan to develop other telecommunication infrastructure services.

Market Share

The Company competes with large independent telecommunication tower providers in Indonesia and other smaller scale independent telecommunication tower providers, apart from to telecommunication operators and subsidiaries that own and operate their own telecommunication towers. Some telecommunications operators lease the available space in their telecommunication towers to other telecommunications operators. Competition in the telecommunication tower industry is mainly driven by the availability of telecommunication tower sites to meet the needs of capacity, coverage, and network expansion of telecommunications operators.

PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT



Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT di tahun 2024 diperkirakan oleh Pemerintah tumbuh menguat. Aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui konsumsi terkait penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Pemerintah menyatakan stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong industri informasi dan komunikasi di tahun 2024. Secara kumulatif, Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sebesar 5,2% di tahun mendatang.

Selanjutnya, peluang kenaikan permintaan infrastruktur telekomunikasi secara tidak langsung juga didorong oleh kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia yang diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi perbelanjaan dalam rangka memenuhi konsumsi rumah tangga termasuk di dalamnya kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan demikian, keberadaan kelas menengah yang diperkirakan meningkat akan menopang pencapaian target pertumbuhan bisnis di tahun depan.

In light of the simultaneous national elections (Pemilu) and regional head elections (Pilkada), the government anticipates that household consumption and Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) performance will strengthen in 2024. The activities surrounding the elections are expected to have a significant impact on the national economy, particularly through election-related consumption. Furthermore, the government states that national political stability is expected to be maintained, fostering public and business optimism to continue economic activities and the positive trend of creating new jobs. Additionally, improvements in the public's welfare levels will also drive the information and communication industry in 2024. Cumulatively, the government targets an economic growth of 5.2% for the upcoming year.

Moreover, the potential increase in demand for telecommunications infrastructure is indirectly driven by the rising middle class in Indonesia, which is expected to boost transactional spending to meet household consumption, including information and communication needs. Hence, the anticipated growth of the middle class is expected to support the achievement of business growth targets in the coming year.

TINJAUAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA

OPERATIONAL SEGMENT REVIEW

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Perseroan dan entitas anaknya memiliki dua segmen yakni penyewaan menara dan jasa VSAT dan *wireline*. Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

Kinerja masing-masing segmen usaha dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian Description	31–Des–23			31–Des–22			31–Des–21		
	Sewa Menara Tower Lease	Jasa Lainnya Other Services	Total	Sewa Menara Tower Lease I	Jasa Lainnya Other Services	Total	Sewa Menara Tower Lease	Jasa Lainnya Other Services	Total
Laba bruto Gross income	6.167.557	2.045.787	8.213.344	6.665.005	1.456.893	8.121.898	5.496.518	799.322	6.295.840
Laba usaha Operating income	5.375.350	1.587.207	6.962.557	5.693.550	1.165.526	6.859.076	4.825.781	596.567	5.422.348
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income before corporate income tax expense	2.502.809	1.064.302	3.567.111	3.041.390	938.064	3.979.454	3.582.803	493.678	4.076.481
Laba tahun berjalan Income for the year	2.440.501	884.376	3.324.877	2.761.881	766.077	3.527.958	3.075.240	398.148	3.473.388
Total aset segmen Total segment assets	55.173.435	13.219.240	68.392.675	55.523.978	10.076.870	65.600.848	59.082.082	6.714.297	65.796.379

Segmen usaha dengan porsi total segmen mencapai 80,67% di tahun 2023 masih menjadi kontributor utama laba bruto Perseroan sebesar 75,09% atau mencapai Rp6,17 triliun. Pencapaian yang mampu tumbuh 1,13% yoy.

Segment is a subset of the Company and its subsidiaries that is involved in both providing products and services (business segment) and providing products and services in a specific economic environment (geographic segment), with risks and rewards that differ from other segments.

The Company and its subsidiaries have two segments: tower leasing and VSAT and wireline services. Management, as the operational decision-maker, monitors the results of business units separately for the purposes of resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured in accordance with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenue and expenses include transactions between operating segments and are recorded at market value.

The performance of each business segment over the last two years is as follows:

Tower Rental business segment with 80.67% total segment share remains the main contributor to the Company's gross profit of 75.09% or Rp6.17 trillion. This achievement that grew 1.13% yoy.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota jaringan global EY) telah menyelesaikan audit laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024. Proses audit dilakukan oleh auditor Widya Arijanti dengan Surat Izin Praktik Akuntan Publik No. AP. STTD.AP-119/PM.22/2018 AP.0702.

KAP menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, laporan keuangan auditan per 31 Desember 2023 tersebut menjadi acuan dalam penyusunan tinjauan keuangan yang disajikan berikut ini.

Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of EY Global Network) completed the audit of financial statements as of December 31, 2023 and signed by the Company's directors on March 28 2024. The audit was conducted by Auditor Widya Arijanti with Public Accountant Practice License No. AP. STTD.AP-119/PM.22/2018 AP.0702.

The KAP stated that the financial statements fairly present, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Furthermore, the audited financial statements as of December 31, 2023, serve as a reference in the preparation of the financial review presented below.



Tinjauan Keuangan Financial Review

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANSIAL POSITION

Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 4,26% year-on-year (yoy) menjadi Rp68,39 triliun di tahun 2023. Pertumbuhan aset ini terutama didukung oleh kenaikan jumlah aset tidak lancar sebesar 3,3% yoy dari Rp61,97 triliun di tahun 2022 menjadi Rp63,99 triliun di tahun 2023. Jumlah aset lancar juga tumbuh sebesar 21,34% yoy menjadi Rp4,40 triliun di tahun 2023.

Sejalan dengan kenaikan jumlah aset tersebut, liabilitas Perseroan mencapai Rp51,89 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,40% yoy. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 68,33% yoy menjadi Rp24,28 triliun. Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 24,87% yoy dari Rp36,75 triliun di tahun 2022 menjadi Rp27,61 triliun di tahun 2023.

Ekspansi bisnis Perseroan yang berhasil meningkatkan kinerja profitabilitas di tahun 2023 mampu meningkatkan ekuitas Perseroan menjadi Rp16,51 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14,38% yoy.

The Company achieved asset growth of 4.26% year-on-year (yoy) to Rp68.39 trillion in 2023. This asset growth was primarily supported by an increase in non-current assets of 3.3% yoy from Rp61.97 trillion in 2022 to Rp63.99 trillion in 2023. Current assets also grew by 21.34% yoy to Rp4.40 trillion in 2023.

In line with the increase in total assets, the Company's liabilities reached Rp51.89 trillion with a growth of 1.40% yoy. This increase was mainly influenced by a 68.33% yoy increase in current liabilities to Rp24.28 trillion. The Company's non-current liabilities decreased by 24.87% yoy from Rp36.75 trillion in 2022 to Rp27.61 trillion in 2023.

The Company's business expansion, which succeeded in increasing its profitability performance in 2023, was able to increase the Company's equity to Rp16.51 trillion with a growth of 14.38% yoy.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Jumlah aset lancar	Total current assets	4.401.285	3.627.311	7.366.648	773.974	21,34
Jumlah aset tidak lancar	Total non-current assets	63.991.390	61.973.537	58.429.731	2.017.853	3,26
Jumlah aset	Total assets	68.392.675	65.600.848	65.796.379	2.791.827	4,26
Jumlah liabilitas jangka pendek	Total current liabilities	24.278.225	14.423.179	21.856.935	9.855.046	68,33
Jumlah liabilitas jangka panjang	Total non-current liabilities	27.608.329	36.746.718	31.886.390	(9.138.389)	(24,87)
Jumlah liabilitas	Total liabilities	51.886.554	51.169.897	53.743.325	716.657	1,40
Jumlah ekuitas	Total equity	16.506.121	14.430.951	12.053.054	2.075.170	14,38
Jumlah liabilitas dan ekuitas	Total liabilities and equity	68.392.675	65.600.848	65.796.379	2.791.827	4,26

Tinjauan Keuangan Financial Review

Aset Lancar

Secara kumulatif, jumlah aset lancar Perseroan mencapai Rp4,40 triliun di tahun 2023. Kenaikan sebesar 21,34% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,63 triliun ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan signifikan atas piutang usaha di tahun 2023. Ekspansi usaha Perseroan di tengah peningkatan kinerja industri informasi dan telekomunikasi di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan piutang usaha sebesar 20,66% yoy menjadi Rp3,09 triliun.

Piutang usaha dari pihak ketiga (gross) yang mencapai Rp3,09 triliun terutama berasal dari operator telekomunikasi di Indonesia seperti Indosat, Telkomsel, XL Axiata, dan Smart Telecom. Adapun cadangan kerugian piutang yang dialokasikan di tahun buku 2023 mencapai Rp83,02 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga. Secara kumulatif, porsi piutang usaha terhadap jumlah aset lancar mencapai 70,12% di tahun 2023.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Kas dan setara kas	Cash and cash equivalent	404.942	285.187	4.716.985	119.755	41,99
Kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash in bank	122	16	1.981	106	662,50
Piutang usaha	Trade receivables	3.086.334	2.557.804	2.171.296	528.530	20,66
Piutang lain-lain	Other receivables	58.964	59.281	14.175	(317)	(0,53)
Beban dibayar di muka - jangka pendek	Prepaid expenses - current	229.043	236.287	193.035	(7.244)	(3,07)
Pajak dibayar di muka	Prepaid taxes	477.617	407.427	213.563	70.190	17,23
Uang muka	Advances	41.242	47.242	55.613	(6.000)	(12,70)
Piutang Derivatif - jangka pendek	Derivative receivables	52.881	-	-	52.881	100
Investasi instrumen keuangan - jangka pendek	Investment in financial instruments - current	35.568	34.067	-	1.501	4,41
Jumlah aset lancar	Total current assets	4.401.285	3.627.311	7.366.648	773.974	21,34

Tinjauan Keuangan Financial Review

Aset Tidak Lancar

Perseroan melaporkan jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 3,26% yoy dari Rp61,97 triliun di tahun 2022 menjadi Rp63,99 triliun di tahun 2023. Pertumbuhan jumlah aset tidak lancar ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan aset tetap yang tumbuh 8,70% yoy menjadi Rp40,39 triliun di tahun 2023. Komitmen Perseroan dalam merealisasikan belanja modal dalam rangka ekspansi bisnis diwujudkan dengan penambahan aset tetap senilai Rp4,80 triliun (sebelum penyusutan).

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Aset tetap	Fixed assets	40.385.074	37.152.092	32.951.48	3.232.982	8,70
Goodwill	Goodwill	15.508.533	15.421.546	15.475.044	86.987	0,56
Beban dibayar di muka - jangka panjang	Prepaid expenses - non current	183.620	290.838	385.979	(107.218)	(36,87)
Aset tak berwujud	Intangible assets	990.800	1.100.637	1.184.458	(109.837)	(9,98)
Aset hak-guna	Right-of-use assets	5.121.186	6.113.351	6.676.348	(992.165)	(16,23)
Investasi instrumen keuangan - jangka panjang	Investment in financial instruments - non current	-	506.502	531.308	(506.502)	(100)
Estimasi pengembalian pajak	Estimated claims for tax refund	276.169	306.587	303.304	(30.418)	(9,92)
Aset pajak tangguhan, neto	Deferred tax assets, net	6.645	4.527	12.715	2.118	46,79
Piutang derivatif	Derivatives receivable	157.051	286.484	-	(129.433)	(45,18)
Aset tidak lancar lainnya	Other assets	1.362.312	790.973	909.093	571.339	72,23
Jumlah aset tidak lancar	Total non-current assets	63.991.390	61.973.537	58.429.731	2.017.853	3,26

Dari jumlah tersebut, realisasi belanja modal berupa aset dalam penyelesaian adalah yang terbesar dan mencapai Rp4,22 triliun. Pada tahun sebelumnya, Perseroan melaporkan penambahan aset senilai Rp5,43 triliun. Dari jumlah tersebut, penambahan aset yang berasal dari aset dalam penyelesaian mencapai Rp3,91 triliun. Perseroan juga membukukan kenaikan goodwill sebesar 0,56% yoy menjadi Rp15,51 triliun di tahun 2023. Sementara itu, aset hak guna Perseroan berkurang 16,23% menjadi Rp5,12 triliun di tahun yang sama seiring dengan kenaikan amortisasi menjadi sebesar Rp1,17 triliun.

Non-Current Assets

The Company's total non-current assets rose by 3.26% yoy from Rp61.97 trillion in 2022 to Rp63.99 trillion in 2023. The growth in total non-current assets was mainly influenced by the growth in fixed assets, which up by 8.70% yoy to Rp40.39 trillion in 2023. The Company's commitment to realise capital expenditures for business expansion is implemented by adding fixed assets worth Rp4.80 trillion (before depreciation).

Of this amount, the realization of capital expenditures in the form of construction in progress was the largest, reaching Rp4.22 trillion. In the previous year, the Company recorded additional assets of Rp5.43 trillion, of which additional assets from construction in progress reached Rp3.91 trillion. The Company also recorded a 0.56% yoy increase in goodwill to Rp15.51 trillion in 2023. Meanwhile, the Company's right-of-use assets decreased by 16.23% to Rp5.12 trillion in the same year in line with the higher depreciation of Rp1.17 trillion.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan melaporkan jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 68,33% yoy menjadi Rp24,28 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan utang jangka pendek dan panjang yang jatuh tempo di tahun 2023. Utang bank dari pihak ketiga yang jatuh tempo mencapai Rp10,88 triliun di tahun 2023 atau lebih tinggi dibandingkan sebesar Rp6,78 triliun di tahun sebelumnya.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	Tower construction and other trade payables	1.206.431	839.297	521.678	367.134	43,74
Utang lain-lain	Other payables	138.158	23.154	1.064.872	115.004	496,69
Akrua	Accruals	1.461.393	1.539.192	1.094.697	(77.799)	(5,05)
Utang jangka pendek dan panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Short-term debts and current maturities of long-term debts	18.324.361	9.176.580	16.793.662	9.147.781	99,69
Utang pajak	Taxes payable	179.204	152.823	125.265	26.381	17,26
Pendapatan ditangguhkan	Unearned revenue	2.457.037	2.148.996	2.147.433	308.041	14,33
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	Short-term employee benefits liability, net	169.909	156.165	109.328	13.744	8,80
Utang Sewa	Lease Liabilities	265.310	386.972	353.254	(121.662)	(31,44)
Pinjaman pihak berelasi	Related parties loan	54.500	-	-	54.500	100,00
Utang derivatif - jangka pendek	Derivative payables - current	21.922	-	-	21.922	100
Jumlah liabilitas jangka pendek	Total current liabilities	24.278.225	14.423.179	22.210.189	9.855.046	68,33

Disamping utang bank, Perseroan juga melaporkan kenaikan utang obligasi yang jatuh tempo di tahun 2023 sebesar Rp7,25 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp1,11 triliun. Di samping itu, kenaikan utang jangka pendek Perseroan juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang ditangguhkan yang mencapai Rp2,46 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14,33% yoy.

Akun ini merupakan pendapatan diterima di muka dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan. Dari

Current Liabilities

The Company's total current liabilities rose by 68.33% yoy to Rp24.28 trillion in 2023. This increase was due to an increase in short-term and long-term debts maturing in 2023. Third-party bank loans that matured in 2023 reached Rp10.88 trillion in 2023 or higher compared to Rp6.78 trillion in the previous year.

In addition to bank loans, the Company also reported an increase in bond debt due in 2023 amounting to Rp7.25 trillion from the previous year's Rp1.11 trillion. Furthermore, the increase in the Company's short-term debt was also caused by an increase in unearned revenue of Rp2.46 trillion, with a growth of 14.33% yoy.

This account represents unearned revenue from customers in connection with lease agreements and is recognised as revenue upon delivery of services to customers. Of this amount, unearned revenue

Tinjauan Keuangan Financial Review

jumlah tersebut, pendapatan yang ditangguhkan dari XL Axiata mencapai Rp1,37 triliun di tahun 2023, tumbuh 24,43% yoy dari tahun sebelumnya senilai Rp1,10 triliun.

Liabilitas Jangka Panjang

Utang jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 24,87% yoy menjadi Rp27,61 triliun. Dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun sebelumnya senilai Rp36,75 triliun, penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang jangka panjang Perseroan menjadi Rp26,14 triliun di tahun 2023 dari Rp33,82 triliun di tahun sebelumnya. Utang jangka panjang yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh kenaikan porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 2023.

Dari jumlah utang jangka panjang tersebut, utang bank Perseroan masih memiliki porsi terbesar yang mencapai Rp24,83 triliun atau 89,92% dari jumlah utang jangka panjang di tahun 2023. Perseroan mampu mendiversifikasikan sumber pendanaannya melalui penerbitan obligasi selain mengandalkan pinjaman dari bank. Jumlah obligasi yang belum jatuh tempo mencapai Rp1,32 triliun di tahun 2023 atau lebih rendah dibandingkan Rp4,56 triliun di tahun sebelumnya.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth Nominal	%
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Long-term debts - net of current maturities	26.143.323	33.818.031	30.191.078	(7.674.708)	(22,69)
Provisi jangka panjang	Long-term provision	314.014	273.246	477.534	40.768	14,92
Liabilitas pajak tangguhan, neto	Deferred tax liabilities, net	841.962	944.030	977.527	102.068	10,81
Utang sewa	Lease liabilities	180.108	1.590.585	2.192.296	(1.410.477)	(88,68)
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	Long-term employee benefits liability, net	76.518	46.098	65.198	30.420	65,99
Pendapatan ditangguhkan	Unearned revenue	30.372	35.301	37.147	(4.929)	(13,96)
Utang derivatif	Derivatives payable	22.032	39.427	137.906	(17.395)	(44,12)
Jumlah liabilitas jangka panjang	Total non-current liabilities	27.608.329	36.746.718	34.078.686	(9.138.389)	(24,87)

from XL Axiata reached Rp1.37 trillion in 2023, grew 24.43% yoy from the previous year's Rp1.10 trillion.

Non-Current Liabilities

The Company's long-term debt decreased by 24.87% yoy to Rp27.61 trillion. Compared to the previous year's non-current liabilities of Rp36.75 trillion, this decrease was primarily due to the reduction in the Company's long-term debt to Rp26.14 trillion in 2023 from Rp33.82 trillion in the previous year. This lower long-term debt was influenced by an increase in the proportion of long-term debt maturing in 2023.

Of this long-term debt, the Company's bank loans still have the largest portion, reaching Rp24.83 trillion or 89.92% of the total long-term debt in 2023. The Company was able to diversify its funding sources through bond issuances in addition to relying on bank loans. The amount of bonds not yet due reached Rp1.32 trillion in 2023, lower compared to Rp4.56 trillion in the previous year.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Ekuitas

Ekuitas Perseroan berhasil tumbuh 14,38% yoy dari Rp14,43 triliun di tahun 2022 menjadi Rp16,51 triliun di tahun 2023. Kenaikan ekuitas ini didukung oleh peningkatan saldo yang mencapai Rp15,95 triliun di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 14,74% yoy. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya senilai Rp13,90 triliun, kenaikan saldo laba ini didorong oleh peningkatan profitabilitas Perseroan di tahun 2023 sejalan dengan ekspansi bisnis yang dilakukan di sepanjang tahun tersebut.

Equity

The Company's equity successfully grew by 14.38% yoy from Rp14.43 trillion in 2022 to Rp16.51 trillion in 2023. This increase in equity was supported by the increase in retained earnings of Rp15.95 trillion in 2023 with a growth of 14.74% yoy. Compared to the previous year's achievement of Rp13.90 trillion, the increase in retained earnings was driven by the Company's enhanced profitability in 2023, in line with the business expansion carried out throughout the year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth Nominal	%
Modal saham - modal dasar	Share capital - authorised capital	332.262	332.262	332.262	-	-
Tambahan modal disetor	Additional paid-in capital	(3.007)	-	23.912	(3.007)	(100)
Cadangan kompensasi berbasis saham	Share-based payment reserve	92.331	64.904	-	27.427	42,26
Penghasilan komprehensif lain	Other comprehensive income	77.686	99.587	13.655	(21.901)	(21,99)
Saldo laba	Retained earnings	15.951.569	13.902.424	11.652.198	2.049.145	14,74
Kepentingan non-pengendali	Non-controlling interest	55.280	31.774	31.027	23.506	73,98
Jumlah ekuitas	Total equity	16.506.121	14.430.951	12.053.054	2.075.170	14,38

Penjelasan lebih lengkap terkait kinerja profitabilitas Perusahaan dijelaskan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian berikut ini.

Please refer to the following Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for a more detailed explanation of the Company's profitability performance.

Tinjauan Keuangan Financial Review

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Ekspansi bisnis Perusahaan yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan kinerja profitabilitas yang lebih baik di tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pendapatan

Perseroan mampu membukukan pendapatan senilai Rp11,74 triliun di tahun 2023. Pendapatan yang berhasil tumbuh 6,39% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,04 triliun ini terutama didukung oleh kenaikan pendapatan fiber to the tower sebesar 49,1% menjadi Rp1,76 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini sejalan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan di tengah peningkatan kinerja industri informasi dan komunikasi, ketika PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,04% yoy.

The well-managed business expansion of the Company was able to produce better profitability performance in 2023. This can be seen from several indicators as follows:

Revenues

The Company was able to record a revenue of Rp11.74 trillion in 2023. This revenue, which grew by 6.39% yoy compared to the previous year's Rp11.04 trillion, was primarily supported by a 49.1% increase in fiber to the tower revenue to Rp1.76 trillion in 2023. This increase aligns with the Company's business expansion amid the performance improvement of the information and communication industry, at a time when Indonesia's GDP grew by 5.04% yoy.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth Nominal	%
Pendapatan	Revenues	11.740.345	11.035.650	8.635.346	704.695	6,39
Beban Pokok Pendapatan	Cost of Revenues	(2.842.515)	(2.305.982)	(2.339.506)	536.533	23,27
Laba Bruto	Gross Income	8.213.344	8.121.898	6.295.840	91.446	1,13
Beban penjualan dan pemasaran	Sales and marketing expenses	(238.108)	(168.763)	(119.744)	69.345	41,09
Beban umum dan administrasi	General and administrative expenses	(817.968)	(711.927)	(575.744)	106.041	14,89
Beban Usaha Lainnya, Neto	Other Operating Expense, Net	(194.711)	(382.132)	(178.004)	(187.421)	(49,05)
Laba Usaha	Operating income	6.962.557	6.859.076	5.422.348	103.481	1,51
Penghasilan Keuangan, Neto	Financial Income, Net	20.499	23.399	30.509	(2.900)	(12,39)
Biaya Keuangan, Neto	Finance Costs	(2.858.027)	(2.391.801)	(1.370.274)	466.226	19,49
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Profit Before Corporate Income Tax Expense	4.125.029	4.490.674	3.741.595	(365.645)	(8,14)
Beban Pajak Penghasilan	Corporate Income Tax Expense	(800.152)	(962.716)	(268.207)	(162.564)	(16,89)
Laba Tahun Berjalan	Income for the Year	3.324.877	3.527.958	3.473.388	(203.081)	(5,76)

Tinjauan Keuangan Financial Review

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth Nominal	%
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	Total Other Comprehensive Income (Loss)	(22.852)	86.769	(30.430)	(109.621)	(126,34)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for The Year	3.302.025	3.614.727	3.442.958	(312.702)	(8,65)
Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Income for The Year Attributable to Owners of the Parent Entity	3.274.332	3.473.448	3.452.888	(199.116)	(5,73)
Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali	Income for The Year Attributable to Non-Controlling interests	50.545	54.510	20.500	(3.965)	(7,27)
Total Penghasilan Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity	3.252.431	3.559.380	3.422.458	(306.949)	(8,62)
Total Penghasilan Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali	Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling interests	49.594	55.347	20.500	(5.753)	(10,39)
Laba Per Saham Dasar dan Dilusian	Basic and Diluted Earnings Per Share	985	1.045	1.039	(60)	(5,73)

Jika dilihat dari profil pelanggan, Indosat memberikan kontribusi pendapatan terbesar yang mencapai Rp4,48 triliun diikuti oleh XL Axiata sebesar Rp3,62 triliun dan Telkomsel senilai Rp1,46 triliun. Adapun kontribusi dari ketiga operator telekomunikasi tersebut masing-masing sebesar 38,13%; 30,83%; dan 12,46%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan yang berasal dari depresiasi dan amortisasi mencapai Rp2,84 triliun di tahun 2023 atau tumbuh 23,27% yoy dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp2,31 triliun. Porsi depresiasi dan amortisasi terhadap total beban pokok pendapatan mencapai 80,59% di tahun 2023 dan 79,14% di tahun 2022. Dari total beban depresiasi dan amortisasi ini, depresiasi aset tetap tumbuh 42,64% yoy dari Rp974,12 miliar menjadi Rp1.389,52 miliar di tahun 2023.

Laba Bruto

Pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan beban pokok pendapatan menghasilkan laba bruto yang mencapai Rp8,21 triliun di tahun 2023. Pencapaian ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp8,12 triliun.

From the customer profile, Indosat contributed the largest revenue amounting to Rp4.48 trillion, followed by XL Axiata with Rp3.62 trillion, and Telkomsel with Rp1.46 trillion. The contributions from these three telecommunications operators were 38.13%, 30.83%, and 12.46%, respectively.

Cost of Revenue

The cost of revenue originating from depreciation and amortisation reached Rp2.84 trillion in 2023, grew by 23.27% yoy compared to the previous year's Rp2.31 trillion. The portion of depreciation and amortisation against the total cost of revenue reached 80.59% in 2023 and 79.14% in 2022. Of this total depreciation and amortisation expense, the depreciation of fixed assets grew by 42.64% yoy from Rp974.12 billion to Rp1.389.52 billion in 2023.

Gross Income

Higher revenue growth compared to the cost of revenue resulted in a gross income of Rp8.21 trillion in 2023, higher than the previous year's Rp8.12 trillion.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Beban Operasional

Seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan di tahun 2023, beban operasional yang berupa beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi meningkat masing-masing sebesar 41,09% yoy dan 14,89% yoy menjadi Rp238,11 miliar dan Rp817,97 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan dari kedua komponen tersebut sebesar 33,45% yoy dan 9,48% yoy menjadi Rp108,02 miliar dan Rp628,34 miliar. Sementara itu, beban usaha lainnya mengalami penurunan sebesar 49,05% yoy menjadi Rp194,71 miliar.

Laba Usaha

Meski beban operasional meningkat, Perseroan mampu membukukan laba usaha yang mencapai Rp6,96 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,86 triliun, pencapaian ini tumbuh 1,51% yoy.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Setelah memperhitungkan penghasilan dan biaya keuangan neto di tahun 2023 senilai Rp2,84 triliun, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mencapai Rp4,13 triliun. Capaian ini lebih rendah 8,14% yoy dibandingkan sebesar Rp4,49 triliun di tahun 2022.

Laba Tahun Berjalan

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan senilai Rp242,2 miliar, laba tahun Perseroan mencapai Rp3,32 triliun. Capaian ini lebih rendah 5,76% yoy dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp3,53 triliun.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perolehan penghasilan komprehensif lain yang secara kumulatif mencapai Rp22,85 miliar di tahun 2023 menurunkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan menjadi Rp3,30 triliun dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp3,61 triliun.

Laba Per Saham Dasar dan Dilusian

Sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang dibukukan di tahun 2023, laba per saham dasar dan dilusian mampu dipertahankan di level Rp985 persaham.

Operating Expenses

In line with the Company's business expansion in 2023, operating expenses, which include sales and marketing expenses as well as general and administrative expenses, increased by 41.09% yoy and 14.89% yoy to Rp238.11 billion and Rp817.97 billion, respectively. This increase was mainly driven by a 33.45% yoy and 9.48% yoy increase in employee salary and welfare expenses for both components to Rp108.02 billion and Rp628.34 billion. Meanwhile, other operating expenses decreased by 49.05% yoy to Rp194.71 billion.

Operating income

Despite the increase in operating expenses, the Company was able to record an operating income of Rp6.96 trillion. Compared to the previous year's Rp6.86 trillion, or grew by 1.51% yoy.

Profit Before Income Tax

After accounting for net finance income and expenses in 2023 amounting to Rp2.84 trillion, the Company's profit before income tax reached Rp4.13 trillion. This achievement is 8.14% yoy lower compared to Rp4.49 trillion in 2022.

Income for the Year

After deducting income tax expenses of Rp242.2 billion, the Company's net income for the year reached Rp3.32 trillion. This achievement is 5.76% yoy lower compared to the previous year's Rp3.53 trillion.

Total Comprehensive Income for the Year

The acquisition of other comprehensive income, which cumulatively reached Rp22.85 billion in 2023 reduced the total comprehensive income for the year to Rp3.30 trillion compared to the previous year's Rp3.61 trillion.

Basic and Diluted Earnings Per Share

In line with the Company's increased revenue in 2023, basic and diluted earnings per share were maintained at the level of Rp985 per share.

Tinjauan Keuangan Financial Review

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Secara kumulatif, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp8,94 triliun di tahun 2023 dibandingkan sebesar Rp8,10 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar 28,93% yoy menjadi Rp1,59 triliun dan peningkatan pembayaran kas kepada karyawan sebesar 13,41% yoy menjadi Rp925,00 miliar di tahun 2023. Namun demikian, penerimaan kas dari pelanggan meningkat 11,80% yoy dari Rp11,62 triliun menjadi Rp12,99 triliun di tahun 2023.

Cash Flows from Operating Activities

Cumulatively, net cash flows provided by operating activities stood at Rp8.94 trillion in 2023, compared to Rp8.10 trillion in the previous year. This was mainly influenced by an increase in cash paid to suppliers by 28.93% yoy to Rp1.59 trillion and an increase in cash paid to employees by 13.41% yoy to Rp925.00 billion in 2023. However, cash received from customers increased by 11.80% yoy from Rp11.62 trillion to Rp12.99 trillion in 2023.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	Net cash flows provided by operating activities	8.938.955	8.101.977	6.251.435	836.978	10.33
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	Net cash flows used in investing activities	(4.546.860)	(5.887.863)	(18.617.085)	(1.341.003)	(22.78)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	Net cash flows used in financing activities	(4.270.907)	(6.730.774)	15.686.530	(2.459.867)	(36.55)
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan bank	Net increase/(decrease) in cash on hand and in banks	121.188	(4.516.660)	3.320.880	4.637.848	102.68
Kas dan bank pada awal tahun	Cash on hand and in banks at beginning of year	285.187	4.716.985	1.397.819	(4.431.798)	(93.95)
Kas dan bank pada akhir tahun	Cash on hand and in banks at end of year	404.942	285.187	4.716.985	119.755	41.99

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 22,78% yoy menjadi Rp4,55 triliun di tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembayaran untuk akuisisi bisnis menjadi hanya Rp42,70 miliar di tahun 2023 dari Rp1,14 triliun di tahun sebelumnya.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flows used in investing activities decreased by 22.78% yoy to Rp4.55 trillion in 2023. This was mainly influenced by the reduction of payments for the acquisition of businesses to only Rp42.70 billion in 2023, decrease from Rp1.14 trillion in the previous year.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perseroan membukukan penurunan signifikan atas arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menjadi Rp4,27 triliun di tahun 2023 dari Rp6,73 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini terutama

Cash Flows from Financing Activities

The Company's net cash flows used in financing activities decreased significantly from Rp6.73 trillion in the previous year to Rp4.27 trillion in 2023. This was mainly due to the reduced payments of bank

Tinjauan Keuangan Financial Review

disebabkan oleh berkurangnya pembayaran utang bank dari Rp39,93 triliun di tahun 2022 menjadi Rp43,65 triliun di tahun 2023. Selain itu, penerimaan dari utang bank meningkat menjadi Rp42,25 triliun di tahun 2023 dibandingkan senilai Rp38,05 triliun di tahun sebelumnya.

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun

Didukung oleh kenaikan neto kas dan setara kas menjadi Rp121,19 miliar di tahun 2023 serta kas dan setara kas awal tahun senilai Rp285,19 miliar, Perseroan berhasil membukukan kas dan setara kas akhir tahun senilai Rp404,94 miliar, naik 41,99% yoy dari Rp285,19 miliar di tahun sebelumnya.

loans from Rp39.93 trillion in 2022 to Rp43.65 trillion in 2023. Furthermore, proceeds from bank loans increased to Rp42.25 trillion in 2023 from Rp38.05 trillion in the previous year.

Cash and Cash Equivalent at End of Year

Based on a net increase in cash and cash equivalent to Rp121.19 trillion in 2023 and cash and cash equivalent at the beginning of year of Rp285.19 billion, cash and cash equivalent at the end of year reached Rp404.94 billion, an increase of 41.99% yoy from Rp285.19 billion in the previous year.

RASIO KEUANGAN UTAMA KEY FINANCIAL RATIOS

Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

The Company's financial performance in 2023 as compared to the previous year is measured by the following financial ratios:

Uraian	Description	2023	2022	2021
Marjin EBITDA	EBITDA Margin	85,2%	86,5%	86,4%
Marjin Laba Usaha	Operating Income Margin	59,3%	62,2%	62,8%
Marjin Laba Tahun Berjalan	Income for the Year Margin	28,3%	32,0%	40,2%
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas	Return on Equity	20,1%	24,4%	28,8%
Rasio Laba terhadap Total Aset	Return on Assets	4,9%	5,4%	5,3%
Rasio Lancar (X)	Current Ratio (X)	0,2	0,3	0,3
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X)	Net Debt to Equity Ratio (X)	2,7	2,9	3,3
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X)	Net Debt to Asset Ratio (X)	0,6	0,6	0,6
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X)	Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)	4,3	4,1	4,4

Tinjauan Keuangan Financial Review

LIKUIDITAS LIQUIDITY

Rasio lancar dipergunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek Perseroan. Rasio lancar Perseroan sebesar 0,2x di tahun 2023 dibandingkan 0,3x di tahun sebelumnya. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kegiatan usaha Perseroan sebagai penyedia digital infrastruktur berupa menara telekomunikasi yang sangat membutuhkan belanja modal yang *high capital intensive*. Dalam hal ini, dibutuhkan utang untuk pembangunan menara dan usaha lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga likuiditas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga diperkuat dengan kinerja profitabilitas Perseroan yang solid didukung oleh kinerja industri informasi dan komunikasi yang berhasil tumbuh di atas pertumbuhan PDB Indonesia.

The current ratio is used to measure the Company's ability to pay off its current liabilities. The Company's current ratio was 0.2x in 2023 compared to 0.3x in the previous year. This achievement was influenced by the Company's business activities as a provider of digital infrastructure in the form of telecommunication towers, which require high capital-intensive expenditures. In this case, debt is needed for the construction of towers and other ventures.

As such, the Company is committed to prioritising the prudential principle in maintaining both short-term and long-term liquidity. This is also reinforced by the Company's solid profitability performance, supported by the performance of the information and communication industry that has successfully grown above the growth of Indonesia's GDP.

SOLVABILITAS SOLVENCY

Kemampuan membayar seluruh kewajiban Perseroan diukur dengan rasio keuangan, yaitu rasio utang Neto terhadap Ekuitas, Rasio Utang Neto terhadap Aset, dan Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA. Ketiga rasio tersebut mencapai 2,7%; 0,6%; dan 4,3% di tahun 2023 yang menunjukkan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya.

Secara konsolidasi, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang terdiversifikasi dengan sangat baik. Selain memiliki fleksibilitas untuk memperoleh pinjaman bank dari berbagai bank terkemuka baik domestik maupun asing, entitas anak juga menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah maupun asing.

The Company's ability to pay all its liabilities is measured with financial ratios, namely the Net Debt to Equity Ratio, Net Debt to Assets Ratio, and Net Debt to LQA EBITDA Ratio. These ratios reached 2.7%, 0.6%, and 4.3% in 2023, respectively, indicating an adequate capacity to meet its obligations.

On a consolidated basis, the Company has very well-diversified funding sources. In addition to having the flexibility to obtain bank loans from various leading domestic and foreign banks, the subsidiaries also issue bonds in both Rupiah and foreign currencies.

Tinjauan Keuangan Financial Review

KOLEKTABILITAS PIUTANG RECEIVABLES COLLECTABILITY

Perseroan berkomitmen melakukan pengelolaan piutang usaha. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 sampai dengan 60 hari. Namun demikian, Perseroan mengalokasikan beban cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Melalui kebijakan ini, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga.

Rasio yang digunakan untuk mengukur kolektibilitas piutang Perseroan adalah periode penagihan (hari). Perseroan mampu membukukan 87,7 hari penagihan piutang di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya 78,2 hari.

The Company is committed to managing its trade receivables. Trade receivables are monitored on a regular basis. Trade receivables are unsecured, non-interest bearing and normally settled on terms between 30 to 60 days. However, the Company maintains an allowance for expected credit loss.

Through this policy, management believes that the allowance for expected credit loss is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables to third parties.

The ratio used to measure the collectability of the Company's receivables is the collection period (days). The Company was able to collect receivables for 87.7 days in 2023 compared to 78.2 days in the prior year.

Uraian	Description	2023	2022	2021
Periode Penagihan (hari)	Collection Period (day)	87,7	78,2	72,1

Umur piutang usaha Perusahaan dan upaya dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The following table shows the age of the Company's trade receivables and its efforts to manage trade receivables.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021	Perubahan Growth	
					Nominal	%
Belum lewat jatuh tempo	Not past due	3.023.840	2.449.804	2.099.732	574.036	23,43
Lewat jatuh tempo:	Past due:					
1 - 30 hari	1 - 30 days	49.334	70.406	43.037	(21.072)	(29,93)
31 - 60 hari	31 - 60 days	24.802	11.410	19.716	13.392	117,37
61 - 90 hari	61 - 90 days	9.441	13.203	12.849	(3.762)	(28,49)
Lebih dari 90 hari	Over 90 days	61.937	52.638	94.514	9.299	17,67
Sub Jumlah	Subtotal	3.169.354	2.597.461	2.269.848	571.893	22,02
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	Allowance for expected financial loss	(83.020)	(39.657)	(98.552)	43.363	109,35
Jumlah piutang usaha - bersih	Total receivables - net	3.086.334	2.557.804	2.171.296	528.530	20,66

Tinjauan Keuangan Financial Review

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Kebijakan Manajemen Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Struktur Permodalan

Struktur modal Perseroan terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas. Utang berbasis bunga berasal dari total utang bank dan utang obligasi sebagai berikut:

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023		2022		2021	
		Nominal	Porsi/Portion (%)	Nominal	Porsi/Portion (%)	Nominal	Porsi/Portion (%)
Total Utang Bank dan Utang Obligasi	Total Bank Loans and Bonds Payable	44.467,7	72,9	42.994,6	74,9	44.439,2	78,7
Jangka Pendek	Current	18.324,4	41,2	9.176,6	21,3	16.440,4	37,0
Jangka Panjang	Non-Current	26.143,3	58,8	33.818,0	78,7	27.998,	63,0
Ekuitas	Equity	16.506,1	27,1	14.431,0	25,1	12.053,1	21,3
Total Modal yang Diinvestasikan	Total Invested Capital	60.973,8	100	57.425,6	100,0	56.492,3	100,0

Secara kumulatif struktur modal Perseroan masih didominasi oleh utang bank dan utang obligasi dengan porsi 72,9% dibandingkan ekuitas sebesar 27,1% di tahun 2023. Di tahun sebelumnya, porsi kedua komponen modal itu adalah 74,9% dan 25,1%.

Capital Structure Management Policy

The primary goal of the Company and its subsidiaries' capital management is to ensure they maintain a healthy capital ratio to support the business and maximise returns for shareholders.

The Company and its subsidiaries manage the capital structure and make adjustments based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust dividend payments to shareholders or issue new shares.

Capital Structure

The Company's capital structure consists of interest-bearing debt and equity. Interest-bearing debt consists of total bank loans and bonds payable as follows:

Cumulatively, the Company's capital structure remains dominated by total bank loans and bonds payable with 72.9% compared to 27.1% equity in 2023. In the previous year, the proportions of the two capital components were 74.9% and 25.1%, respectively.

Tinjauan Keuangan Financial Review

IKATAN MATERIAL UNTUK BELANJA MODAL MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

As of December 31, 2023, the Company has no material capital expenditure commitments. Therefore, the Company does not provide information regarding the purpose of the agreement, the source of funds expected to be used to satisfy the obligation, the currency in which it is denominated, and the steps the issuer or public company intends to take to hedge the risks of the related foreign currency position.

REALISASI BELANJA MODAL ACTUAL CAPITAL EXPENDITURES

Perseroan membukukan belanja modal senilai Rp4,5 triliun di sepanjang tahun 2023 yang bertujuan untuk mendukung ekspansi bisnis dalam penyewaan menara telekomunikasi. Informasi lebih lengkap terkait belanja modal yang direalisasikan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company recorded capital expenditures of Rp4.5 trillion in 2023, aimed at supporting business expansion in telecommunication tower lease. More detailed information related to the capital expenditures realised in 2023 is as follows:

Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	Description	2023	2022	2021
Aset kepemilikan langsung:	Direct ownership of assets:			
Tanah	Land	-	450	-
Menara	Tower	89.059	176.872	168.437
Gedung	Building	3.860	11.819	125
Peralatan kantor	Office equipment	12.843	12.909	34.411
Kendaraan bermotor	Motor vehicles	11.744	30.030	8.373
Peralatan proyek	Field equipment	465.145	1.286.313	266.721
Aset dalam penyelesaian	Construction in progress	4.216.696	3.914.702	711
Perabotan kantor	Furniture and Fixtures	523	37	2.038.029
Sub-Jumlah	Sub-Total	4.799.870	5.433.132	2.516.807
Aset Tak Berwujud	Intangible Assets			
Hubungan pelanggan	Customer relationships	-	42.340	-
Sub-Jumlah	Sub-Total	-	42.340	-
Aset hak guna:	Right-of-use assets:			
Tanah	Land	1.141.393	653.805	869.644
Kantor	Office	6.519	9.901	127.204
Fiberisasi	Fiberization	1.433	16.928	318
Transponder	Transponder	2.546	-	-
Data Center	Data Center	56.609	-	-
Sub-Jumlah	Sub-Total	1.208.500	680.634	997.166
Total	Total	6.008.370	6.156.106	3.513.973

Tinjauan Keuangan Financial Review

INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN SUBSEQUENT EVENTS

Laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 melaporkan terdapat informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Rincian informasi mengenai Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dapat mengacu pada Catatan 47 di lampiran Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company's audited financial report for the period ending December 31, 2023 posted that there were no material information or facts that have occurred after the date of the auditor's report. Detailed information on Subsequent Events can be referred to Note 47 in the enclosed Financial Statements in this Annual Report.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN DIVIDENDS AND DIVIDEND POLICY

Kebijakan Dividen

Perseroan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham senantiasa mempertimbangkan beragam faktor di antaranya kondisi keuangan, profitabilitas dan biaya operasional serta rencana investasi Perseroan, dengan tunduk pada keputusan RUPS Tahunan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividend Policy

In distributing dividends to shareholders, the Company takes into account various factors, including the Company's financial condition, profitability and operating expenses as well as the Company's investment plans, subject to the resolutions of the Company's Annual GMS and the provisions of applicable laws and regulations.

Melalui persetujuan Dewan Komisaris, Direksi dapat memutuskan untuk membagi dividen interim tunai sebagai bagian dari total dividen final yang akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan keadaan keuangan Perseroan.

With the approval of the Board of Commissioners, the Board of Directors may decide to pay interim cash dividends as part of the total final dividend to be submitted for approval at the next Annual General Meeting of Shareholders. This policy has been adopted taking into account the financial situation of the Company.

Dividen Tahun Buku 2022

Berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 5 Mei 2023, Perseroan membagikan Rp1,20 triliun dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan kata lain, pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar sekitar Rp24,1, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp6,- per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Desember 2022 sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp18,1 per saham.

Dividend for Financial Year 2022

Based on the resolution of the GMS dated May 5, 2023, the Company distributed Rp1.20 trillion out of the net profit of the Company for the fiscal year 2022 as a cash dividend to the shareholders of the Company. Similarly, the cash dividend distribution for Financial Year (FY) 2022 is approximately Rp24.1, provided that the cash dividend is considered for the interim dividend for FY 2022 of Rp6.0 per share paid by the Company on December 6, 2022, so that the remaining dividend per share for FY 2022 paid by the Company is Rp18.1 per share.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Pembagian dividen tunai tersebut diumumkan di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan pembayaran dividen tunai dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 yakni dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 30 hari sejak keputusan RUPS tahun tersebut diatas.

Berikut informasi pembayaran dividen selama 6 (enam) tahun terakhir:

The distribution of the cash dividend was announced on the Indonesia Stock Exchange and the Company's website on May 8, 2023, while the cash dividend payment was made on May 31, 2023, which is carried out in less than 30 days since the decision of that year's General Meeting of Shareholders.

The following are dividend payouts during the last 6 (six) years:

Tahun Buku Fiscal Year	Pembagian Dividen	Dividend Payout
2017	Desember Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp92,13 per saham untuk SMN, TMG dan CGS.	December Protelindo distributed interim cash dividends of Rp92.13 per share to SMN, TMG and CGS.
2019	April Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp25 miliar kepada SMN.	April Protelindo distributed interim cash dividends of Rp25 billion to SMN.
	Juni Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp50 miliar kepada SMN.	June Protelindo distributed interim cash dividends of Rp50 billion to SMN.
	Oktober Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp50 miliar kepada SMN.	October Protelindo distributed interim cash dividends of Rp50 billion to SMN.
	Desember Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp303 miliar kepada SMN.	December Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp303 billion to SMN.
2020	Februari Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp230 miliar kepada SMN.	February Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp230 billion to SMN.
	Mei Protelindo membagikan sisa dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar Rp897 miliar kepada pemegang saham Protelindo yaitu SMN dan FAS. Dividen interim tunai tahun buku 2019 sebesar Rp708 miliar.	May The remaining cash dividend for the fiscal year 2019 of Rp897 billion was distributed to Protelindo's shareholders, namely SMN and FAS. Interim cash dividend of fiscal year 2019 was Rp708 billion.
	Agustus Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp110 miliar kepada SMN.	August Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp110 billion to SMN.
	September Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp20 miliar kepada SMN.	September Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp20 billion to SMN.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Tahun Buku Fiscal Year	Pembagian Dividen	Dividend Payout
2021	November • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp88 miliar kepada SMN. • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp20 miliar kepada SMN.	November • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp88 billion to SMN. • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp20 billion to SMN.
	Desember • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp300 miliar kepada SMN. • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp25 miliar kepada SMN. • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp30 miliar kepada SMN.	December • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp300 billion to SMN. • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp25 billion to SMN. • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp30 billion to SMN.
2021	Januari Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp60 miliar kepada SMN.	January Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp60 billion to SMN.
	April • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp30 miliar kepada SMN. • Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp100 miliar kepada SMN.	April • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp30 billion to SMN. • Protelindo distributed an interim cash dividend of Rp100 billion to SMN.
	Mei Protelindo membagikan sisa dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp1.050 triliun kepada pemegang saham Protelindo yaitu SMN dan FAS. Dividen interim tunai tahun buku 2020 sebesar Rp783 miliar.	May Protelindo distributed the Rp1,050 trillion remaining cash dividends for fiscal year 2020 to Protelindo's shareholders, SMN and FAS. Interim cash dividend for fiscal year 2020 was Rp783 billion.
	Desember Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah sekitar Rp350 miliar kepada SMN.	December Protelindo distributed an interim cash dividend of around Rp350 billion to SMN.
2022	Desember Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah sekitar Rp321 miliar kepada SMN.	December Protelindo distributed an interim cash dividend of around Rp321 billion to SMN.
2023	Mei Pada tanggal 5 Mei 2023, Protelindo membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar sekitar Rp902 milyar kepada pemegang saham Protelindo. Dividen interim tunai tahun buku 2022 telah dibayarkan oleh Protelindo pada Desember 2022.	May On May 5, 2023, Protelindo distributed the cash dividend for financial year of 2022 in the amount of approximately Rp902 billion to their shareholders. Interim cash dividend for financial year 2020 in the amount of approximately Rp300 billion has been distributed by SMN in December 2021.
	Desember Pada tanggal 5 Desember 2023, Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah sekitar Rp321 miliar kepada SMN.	December On December 5, 2023, Protelindo distributed an interim cash dividend in the amount of approximately Rp321 billion to SMN.

Tinjauan Keuangan Financial Review

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM REALIZATION OF THE USE OF THE PROCEEDS OF THE PUBLIC OFFERING

Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham dan obligasi serta tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana pada tahun buku 2023. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum di tahun tersebut.

The Company did not conduct a public offering of shares and bonds and did not have an obligation to submit a report on the realisation of fund usage for the fiscal year 2023. As such, the Company did not disclose the realisation of the use of proceeds from the public offering in that year.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

The Company has not entered into any material transactions involving a conflict of interest for the period ended December 31, 2023.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Adapun sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

The Company enters into transactions with related parties. The nature of the transactions and relationships with related parties are as follows:

Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Relasi Nature of Relationship	Bentuk Transaksi Nature of Transactions
PT Bank Central Asia Tbk	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank Central Asia Tbk	Kas di bank, piutang usaha, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan Cash in banks, trade receivable, loan, revenues, finance income and costs
PT BCA Syariah	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Family relationship with ultimate shareholders of PT BCA Syariah	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT Asuransi Umum BCA	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Umum BCA	Pendapatan Revenue
PT Grand Indonesia	Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham Affiliated party based on shareholding composition	Piutang usaha, pendapatan, pembayaran sewa kantor Trade receivable, revenue, payment of office lease

Tinjauan Keuangan Financial Review

Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Relasi Nature of Relationship	Bentuk Transaksi Nature of Transactions
PT Djarum	Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham Affiliated party based on shareholding composition	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan Receivable, unearned revenue, revenue
PT Global Tiket Network	Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham Affiliated party based on shareholding composition	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT Global Distribusi Pusaka	Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham Affiliated party based on shareholding composition	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT Asuransi Jiwa BCA	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa BCA Family relationship with Ultimate shareholders of PT Asuransi Jiwa BCA	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT Hartono Plantation Indonesia	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Hartono Plantation Indonesia Family relationship with ultimate shareholders of PT Hartono Plantation Indonesia	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara Cooperation in the provision of tower infrastructure
Amir Hamzah	Direktur dari PT Istana Kohinoor PT Istana Kohinoor's Director	Aset tidak lancar lainnya Other non-current asset
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Angkasa Komunikasi Global Utama Family relationship with ultimate shareholders of PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Pendapatan Revenue
PT Fajar Surya Swadaya	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Fajar Surya Swadaya Family relationship with ultimate shareholders of PT Fajar Surya Swadaya	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT BCA Multi Finance	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT BCA Multi Finance Family relationship with ultimate shareholders of PT BCA Multi Finance	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT BCA Finance	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT BCA Finance Family relationship with ultimate shareholders of PT BCA Finance	Piutang usaha, pendapatan Trade receivable, revenue
PT Saptadaya Bumitama Persada	Perusahaan dibawah pemegang saham yang sama dengan komisaris Iforte Entity under direct ownership of Iforte's Commissioner	Piutang lain-lain Other receivable
PT Bank BCA Digital	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank BCA Digital Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank BCA Digital	Piutang usaha Account receivable
PT BCA Sekuritas	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT BCA Sekuritas Family relationship with ultimate shareholders of PT BCA Sekuritas	Piutang usaha Account receivable

Tinjauan Keuangan Financial Review

Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Relasi Nature of Relationship	Bentuk Transaksi Nature of Transactions
PT Abadi Tambah Mulia International	Perusahaan di bawah kepemilikan langsung iForte Entity under direct ownership of iForte	Piutang usaha Account receivable
PT Bach Multi Global	Perusahaan di bawah kepemilikan langsung GTP Entity under direct ownership of GTP	Utang usaha Account payable
PT Bach Multi Infrastruktur	Perusahaan di bawah kepemilikan langsung GTP Entity under direct ownership of GTP	Utang usaha Account payable
PT Alto Network	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Alto Network Family relationship with ultimate shareholders of PT Alto Network	Piutang usaha dan utang usaha Account receivable and account payable
PT Global Digital Niaga Tbk	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Global Digital Niaga Tbk Family relationship with ultimate shareholders of PT Global Digital Niaga Tbk	Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan ditangguhkan Trade receivable, trade payable and unearned income
PT Hartono Istana Teknologi	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Hartono Istana Teknologi Family relationship with ultimate shareholders of PT Hartono Istana Teknologi	Piutang usaha dan utang usaha Account receivable and account payable
PT Global Media Visual	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Global Media Visual Family relationship with ultimate shareholders of PT Global Media Visual	Utang usaha Trade Payable
PT Akar Inti Solusi	Hubungan afiliasi dengan iForte Affiliated party with iForte	Pendapatan ditangguhkan Unearned Income
PT Djelas Tandatangani Bersama	Hubungan afiliasi dengan iForte Affiliated party with iForte	Pendapatan ditangguhkan Unearned Income
Alexander Budiman	Direktur dari PT Istana Kohinoor PT Istana Kohinoor's Director	Pendapatan ditangguhkan Unearned Income
PT Sentral Investama Andalan	Hubungan afiliasi dengan IPI Affiliated party with IPI	Pinjaman pihak berelasi Related parties loan
PT Leni Jaya Tobacco	Hubungan afiliasi dengan IPI Affiliated party with IPI	Pinjaman pihak berelasi Related parties loan
MC Payment Limited	Hubungan afiliasi dengan IPI Affiliated party with IPI	Utang lain-lain Other payable
The Tje Min	Hubungan afiliasi dengan IPI Affiliated party with IPI	Pinjaman pihak berelasi Related parties loan

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan No. 39 atas laporan keuangan konsolidasian auditan per 31 Desember 2023.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in note No. 39 of the audited consolidated financial statements as of December 31, 2023.

Tinjauan Keuangan Financial Review

TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI TRANSACTION RELATED TO INVESTMENTS, EXPANSION, DIVESTMENTS, MERGERS, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Perseroan melaporkan tidak terdapat informasi terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi di sepanjang tahun 2023.

The Company reported that there was no information regarding investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions and restructurings throughout 2023.

TARGET & REALISASI TAHUN 2023 SERTA PROYEKSI 2024 2023 TARGETS AND ACHIEVEMENTS AND 2024 PROJECTION

Berpedoman kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, Perseroan telah menetapkan target tahun 2023. Adapun realisasi RKAP tahun 2023 beserta proyeksi tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

The Company has set goals for 2023 guided by the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). The implementation of the 2023 RKAP as well as the projections for 2024 are explained in the following table:

Indikator Keuangan Financial Indicators	Target 2023 / 2023 Targets (RpTriliun / RpTrillion)	Realisasi 2023 / 2023 Actual (RpTriliun / RpTrillion)	Proyeksi 2024 / 2024 Projection (RpTriliun / RpTrillion)
Pendapatan Revenue	11,5	11,7	12,3
EBITDA EBITDA	9,8	10,0	10,2

Tinjauan Keuangan Financial Review

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AFFECTING THE COMPANY

Tidak terdapat perubahan peraturan pemerintah dan otoritas pasar modal yang berpengaruh signifikan terhadap bisnis Perseroan pada tahun 2023.

There were no changes in government regulations and capital market authorities that significantly affected the Company's business in 2023.

PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES TO THE ACCOUNTING STANDARDS

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan seluruh standar yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini tidak memiliki dampak material pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya:

Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

Changes in Accounting Policies

The Company and its subsidiaries adopted all revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that do not have any material impact to the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries:

Amendment of PSAK 1, "Presentation of financial statement" regarding disclosure of accounting policies.

These amendments provide guidance to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments had an impact on the Company's and its subsidiaries' disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Company's and its subsidiaries' financial statements.

Tinjauan Keuangan Financial Review



Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amendment of PSAK No. 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use.

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi.

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.

Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

Amendment of PSAK No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors” regarding the definition of accounting estimates.

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 46 “Income Taxes” –Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan – Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua.

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tanggahan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak memiliki penghasilan dari yurisdiksi luar negeri.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes – International Tax Reform – Pillar Two Model Rules.

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries's consolidated financial statements as the Company and its subsidiaries do not have income from foreign jurisdictions.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES



Protelindo menyadari bahwa sumber daya manusia yang andal, loyal, dan berkompeten merupakan salah satu komponen penting yang dapat membantu Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk mengembangkan talenta yang berkualitas dan adaptif.

Protelindo menyadari bahwa sumber daya manusia yang andal, loyal, dan berkompeten merupakan salah satu komponen penting yang dapat membantu Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk mengembangkan talenta yang berkualitas dan adaptif.

STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY

Dalam rangka mewujudkan strategi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, mandiri, berdaya saing dan profesional, Protelindo mempersiapkan SDM yang mampu melihat peluang dan mengeksekusi sehingga menghasilkan *return* yang maksimal bagi Perseroan. SDM di masa mendatang harus memiliki kriteria yang sesuai dengan visi dan misi serta budaya perusahaan. SDM diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mendukung perkembangan digitalisasi sehingga dapat melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya dengan komitmen untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap berdasarkan budaya perusahaan, nilai-nilai etika, dan aturan.

To achieve a superior, independent, competitive, and professional Human Resource (HR) management strategy, the SMN Group develops human resources capable of identifying and executing opportunities, resulting in maximum returns for the Company. Future HR must meet requirements that are consistent with the vision and mission, as well as the corporate culture. HR is expected to have the necessary competencies and support digitalisation developments to ensure they can carry out and master their tasks and responsibilities with a commitment to achieving optimal results while remaining true to business culture, ethical values, and rules.

Sumber Daya Manusia

Human Resources



Perseroan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan SDM berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan persamaan kesempatan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan, SMN melarang adanya diskriminasi dan pelecehan dalam bentuk apapun berdasarkan ras, warna kulit, agama, keyakinan politik, kebangsaan, asal-usul sosial, kondisi fisik, status perkawinan, kehamilan dan/atau jenis kelamin.

Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi sebagaimana disebutkan di atas, termasuk dalam pemberian remunerasi karyawan dan *benefit* lainnya.

The Company implements HR management policies based on the principles of equality and equal opportunity. In accordance with Company Regulations, SMN prohibits discrimination and harassment in any form based on race, skin colour, religion, political beliefs, nationality, social origin, physical condition, marital status, pregnancy, and/or gender.

The Company also commits to providing equal opportunities for everyone without the discrimination mentioned above, including in the provision of employee remuneration and other benefits.

Sumber Daya Manusia Human Resources

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SDM HR MANAGEMENT POLICIES AND IMPLEMENTATION

REKRUTMEN

Dalam mendukung keberhasilan Grup mencapai kinerja yang positif, diperlukan dukungan Sumber Daya yang kompeten untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis perusahaan hingga tercapai visi misi perusahaan. Dalam rangka mendapatkan talenta terbaik sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya, maka Grup SMN melaksanakan rekrutmen secara selektif, transparan dan adil dengan mengedepankan prinsip kesetaraan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan tanpa adanya diskriminasi.

Perseroan merekrut karyawan baru secara selektif guna mencari calon karyawan yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada divisi yang tepat di Perseroan.

Adapun kategori karyawan yang direkrut Perseroan didasarkan kepada 3 (tiga) kategori utama berikut:

- Perekrutan karyawan baru yang termasuk dalam kategori profesional (kompeten) di bidang tertentu;
- Perekrutan karyawan baru yang termasuk dalam kategori *fresh graduate*;
- Peningkatan kompetensi karyawan internal Perseroan agar dapat memenuhi persyaratan tingkatan posisi yang lebih tinggi.

Sumber rekrutmen yang digunakan oleh Grup untuk mendapatkan talenta terbaik didapat melalui sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu individu yang sudah bekerja di Perseroan baik berstatus pekerja tetap maupun berstatus sebagai tenaga alih daya maupun tenaga magang. Sedangkan sumber eksternal yaitu tenaga kerja dari luar yang tidak atau belum bekerja di Perseroan yang didapat dengan merekrut karyawan yang berprestasi khusus yang akan menunjang corporate image Perseroan.

Perseroan terus melakukan proses perekrutan melalui daring (*online*) menggunakan jaringan profesional berbasis web dan aplikasi seperti LinkedIn. Proses perekrutan secara tatap muka (*offline*) tetap dilakukan bila diperlukan. Perseroan menilai proses rekrutmen secara *online* dapat menjadi cara yang paling efektif dan efisien.

RECRUITMENT

To support the Group's success in achieving positive performance, it is imperative to have skilled Human Resources who can effectively execute various strategic business policies ensuring the Company's vision and purpose are realised. To obtain the best talent as an effort to improve the quality of resources, the SMN Group's recruitment is done in a selective, transparent, and fair manner, prioritising the principle of equality based on the Company's required qualifications, without any form of discrimination.

The Company selectively recruits new employees to acquire candidates with potential and achievement to be placed in the right division within the Company.

The categories of employee's recruitment by the Company are based on the following three (3) main categories:

- Recruitment of new employees included in the professional category (competent) in a certain field;
- Recruitment of new employees included in the fresh graduate category;
- Enhancing the competencies of internal Company employees to meet the requirements of higher position levels.

The Group utilises a combination of internal and external sources to acquire the best talent for recruitment purposes. Internal sources refer to individuals who are currently employed by the Company, either as permanent employees or as outsourced or intern personnel. Meanwhile, external sources refer to individuals who are not already employed by the Company but are recruited based on their great achievements to enhance the Company's corporate image.

The Company continues to carry out the recruitment process online using web-based professional networks and applications such as LinkedIn. The face-to-face (*offline*) recruitment process is still conducted when necessary. The Company considers the online recruitment process to be the most effective and efficient way.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Secara garis besar, seleksi calon karyawan Perseroan dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

- **Pendaftaran Peserta**
Calon karyawan dapat melihat lowongan kerja dan mendaftarkan diri melalui mitra kerja Perseroan di www.jobstreet.com.
- **Pengecekan Kompetensi**
Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap wawancara oleh personil unit kerja SDM dan unit kerja terkait termasuk *user/hiring manager* sendiri. Perseroan melakukan pengecekan kompetensi dengan menggunakan Assessment Tools, bekerja sama dengan konsultan, khusus untuk posisi level manajer ke atas.
- **Pengecekan Latar Belakang**
Proses selanjutnya adalah Pengecekan Latar Belakang atau *Background Reference Check* bagi calon karyawan profesional (bukan *fresh graduate*) yang dianggap sangat potensial menduduki posisi yang ada. Pada tahap ini, Perseroan ingin mengetahui lebih banyak mengenai perilaku dan kinerja calon karyawan di tempat kerja terdahulu.
- **Pemeriksaan Kesehatan**
Tahap Pemeriksaan Kesehatan, yang dilakukan dengan pihak ketiga, merupakan tahap akhir dalam proses perekrutan calon karyawan. Selama masa pandemi Covid-19, tahapan pemeriksaan kesehatan semakin diperketat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan terhadap Covid-19 sesuai dengan standar kesehatan World Health Organization (WHO). Saat vaksinasi mulai berjalan di tahun 2021, Perseroan menetapkan syarat tambahan sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (dua kali dosis) untuk para pelamar.

Pada saat pertama kali bergabung sebagai bagian dari keluarga besar Perseroan, maka tim unit kerja SDM akan memberikan induksi atau pengenalan kepada para karyawan baru mengenai Visi dan Misi, Nilai-nilai utama Perseroan, kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan beberapa hal yang terkait dengan proses bisnis Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan telah merekrut 273 karyawan. Dari jumlah tersebut, 29 karyawan merupakan karyawan tetap (permanen) dan seluruhnya dinyatakan lolos dari masa percobaan.

Broadly, the selection of Company employee candidates is carried out in several stages, including:

- **Registration of Participants**
Candidates can view job vacancies and register through the Company's job partner at www.jobstreet.com.
- **Competency Check**
This process is carried out through several stages of interviews by HR unit personnel and related work units including the user/hiring manager themselves. The Company performs competency checks using Assessment Tools, in collaboration with consultants, especially for positions at the manager level and above.
- **Background Check**
The next process is the Background Reference Check for professional employee candidates (not fresh graduates) who are considered highly potential for the positions available. At this stage, the Company aims to learn more about the behaviour and performance of prospective employees in their previous workplaces.
- **Health Examination**
The Health Examination stage, conducted with a third party, is the final stage in the recruitment process for prospective employees. During the Covid-19 pandemic, the health examination stage was tightened by conducting additional health checks for Covid-19 according to World Health Organization (WHO) health standards. When vaccination began in 2021, the Company set an additional requirement that applicants must have completed the full vaccination (two doses).

When first joining as part of the Company's extensive family, the HR unit team will provide induction or introduction to new employees about the Vision and Mission, the Company's core values, applicable policies, and other matters related to the Company's business processes.

In 2023, the Company recruited 273 employees. Of this number, 29 employees are permanent employees and all were declared to have passed the probationary period.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Tabel Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Masuk Recruited Employees		Karyawan Masuk Recruited Employees		Karyawan Masuk Recruited Employees		Karyawan Masuk Recruited Employees		Karyawan Masuk Recruited Employees		Karyawan Masuk Recruited Employees	
	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Karyawan Berdasarkan Usia Employees by Age												
<20 tahun <20 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30 tahun 20-30 years	11	8	67	64	6	12	99	85	11	11	68	63
31-40 tahun 31-40 years	4	4	68	24	33	11	69	25	24	7	40	19
41-50 tahun 41-50 years	1	2	13	4	27	2	17	1	14	0	15	1
>50 tahun >50 years	0	1	1	1	3	0	0	2	0	0	1	0
Jumlah Total	16	15	149	93	69	25	185	113	49	18	124	83
Tingkat Perekrutan Karyawan (%) Employee Recruitment Rate (%)	5,9%	5,5%	54,6%	34,1%	17,6%	6,4%	47,2%	28,8%	17,9%	6,6%	45,3%	30,2%
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional Employees by Operational Area												
Kantor Pusat - Kudus Head Office - Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang - Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices - Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	16	15	149	93	69	25	185	113	49	18	124	83
Jumlah Total	16	15	149	93	69	25	185	113	49	18	124	83
Tingkat Perekrutan Karyawan (%) Employee Recruitment Rate (%)	5,9%	5,5%	54,6%	34,1%	17,6%	6,4%	47,2%	28,8%	17,9%	6,6%	45,3%	30,2%

Sumber Daya Manusia Human Resources

Sementara untuk data karyawan yang mengundurkan diri, termasuk *turn over rate* karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Meanwhile, data on employees who resigned, including employee turnover rates is described below:

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Keluar Resigned Employees		Karyawan Keluar Resigned Employees		Karyawan Keluar Resigned Employees		Karyawan Keluar Resigned Employees		Karyawan Keluar Resigned Employees		Karyawan Keluar Resigned Employees	
	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Karyawan Berdasarkan Usia Employees by Age												
<20 tahun <20 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30 tahun 20-30 years	5	11	7	9	4	9	18	15	6	7	18	17
31-40 tahun 31-40 years	13	13	14	5	26	9	13	8	11	5	18	4
41-50 tahun 41-50 years	7	5	3	0	10	3	8	0	6	1	8	0
>50 tahun >50 years	8	1	3	2	11	2	2	0	5	2	2	0
Jumlah Total	33	30	27	16	51	23	41	23	28	15	46	21
Tingkat Karyawan Keluar (%) Employee Resignation Rate (%)	31,1%	28,3%	25,5%	15,1%	36,9%	16,7%	29,7%	16,7%	25,5%	13,6%	41,8%	19,1%
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional Employees by Operational Area												
Kantor Pusat - Kudus Head Office - Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang - Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Office - Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	33	30	27	16	51	23	41	23	28	15	46	21
Jumlah Total	33	30	27	16	51	23	41	23	28	15	46	21
Tingkat Karyawan Keluar (%) Employee Resignation Rate (%)	31,1%	28,3%	25,5%	15,1%	36,9%	16,7%	29,7%	16,7%	25,5%	13,6%	41,8%	19,1%

Sumber Daya Manusia Human Resources

Turnover Karyawan Employee Turnover

Uraian Description	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Jumlah Karyawan Masuk Total New Recruited Employees	165	108	273	254	138	392	173	101	274
Karyawan Keluar Resigned Employees									
Atas Permintaan Sendiri Own Request	17	25	42	51	30	81	30	19	49
Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Misconduct	13	5	18	8	0	8	3	1	4
Pensiun Pension	2	1	3	4	0	4	2	0	2
Habis Kontrak Contract Expiration	26	15	41	28	15	43	34	16	50
Lain-lain Others	2	0	2	1	1	2	5	0	5
Jumlah Total	60	46	106	92	46	138	74	36	110
Tingkat Turn Over Karyawan (%) Employee Turnover Rate (%)	1,6	4,9	2,7	2,5	1,5	4,0	2,0	1,3	3,2

Dari tabel di atas, jumlah karyawan yang baru direkrut pada tahun 2023 adalah sebanyak 273 orang yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 165 orang. Sedangkan jumlah karyawan keluar adalah 106 orang yang didominasi oleh alasan atas permintaan sendiri. Dengan demikian, tingkat turnover karyawan di tahun 2023 rata-rata sebesar 2,7%, lebih rendah 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,0%.

Keanekaragaman Karyawan

Protelindo berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman. Berikut adalah tabel keberagaman yang dapat disajikan:

From the above table, the number of newly recruited employees in 2023 was 273, with males dominating at 165 personnel. Meanwhile, the number of employees who left was 106, primarily due to own request. Hence, the employee turnover rate in 2023 averaged 2.7%, which is 1.3% lower than the previous year's rate of 4.0%.

Employee Diversity

Protelindo strives to create an inclusive work environment that supports diversity. Below is the diversity information:

Sumber Daya Manusia Human Resources

Proporsi Proportional	2023	2022	2021
A. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Board of Commissioners and Board of Directors			
Berdasarkan Usia By Age			
<20 tahun <20 years	0	0	0
20-30 tahun 20-30 years	0	0	0
31-40 tahun 31-40 years	0	0	1
41-50 tahun 41-50 years	3	3	4
>50 tahun >50 years	6	6	5
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	8	8	8
Perempuan Female	1	1	1
B. Karyawan Employees			
Berdasarkan Usia By Age			
<20 tahun <20 years	0	0	0
20-30 tahun 20-30 years	607	618	354
31-40 tahun 31-40 years	950	949	699
41-50 tahun 41-50 years	580	421	384
>50 tahun >50 years	71	52	56
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	1.458	1.348	987
Perempuan Female	750	692	506

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam meningkatkan kompetensi SDM Grup, Divisi HR telah mengatur dalam Prosedur Standar Operasi Pendidikan dan Pelatihan. Divisi HR juga telah membuat Silabus Pembelajaran berdasar pada *Training Need Analysis* yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun berjalan.

Saat ini, Perseroan memiliki inovasi dalam pengembangan kompetensi karyawan melalui penggunaan aplikasi LMS (*MyLearning*) untuk dapat mendukung peningkatan *skill* dan pengetahuan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta dapat mencakup lebih banyak karyawan. Melalui LMS, banyak otomatisasi yang dapat dilakukan untuk mendukung operasional *learning and development* yang lebih efektif dan efisien. Topik-topik pelatihan yang menjadi fokus LMS meliputi *basic managerial skill* dan *time management*.

COMPETENCY DEVELOPMENT

To enhance the Group's HR competencies, the HR Division has set up a Standard Operating Procedure for Education and Training. The HR Division has also created a Learning Syllabus based on the Training Needs Analysis, which will be carried out over the course of the current year.

Currently, the Company has innovations in employee competency development through the use of the Learning Management System (LMS) application (*MyLearning*) to support the improvement of skills and knowledge that can be done anywhere and anytime, and can involve more employees. Through LMS, many automations can be performed to support more effective and efficient learning and development operations. The training topics focused on by the LMS include basic managerial skills and time management. The

Sumber Daya Manusia Human Resources

Perseroan juga mengadakan pelatihan lainnya yang relevan baik yang dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan serta meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Pada tahun 2023, Grup telah melakukan sebanyak 122 pelatihan formal/kursus yang berbeda dengan total 1.611 peserta.

Company also conducts other relevant trainings, both independently and in collaboration with third parties, to support operational activities and enhance its HR competencies.

In 2023, the Group conducted as many as 122 different formal trainings/courses with a total of 1,611 participants.

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Non Manager

Competency Development for Non-Manager level, 2023

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Teamwork of Collaboration	27	Teamwork	Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam berkolaborasi dalam tim. To improve knowledge and ability to collaborate in teams.
Creative & Innovative Thinking	25	Innovative	Untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara berpikir kreatif dan inovatif. To increase knowledge of creative and innovative ways of thinking.
Simple Path to Productivity	23	Professionalism	Untuk meningkatkan kemampuan untuk menjadi produktif dan mengatasi tantangan yang ada. To improve the ability to be productive and overcome existing challenges.
Communication Inside Out	23	Interpersonal/ Communication Skill	Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. To improve interpersonal communication skills.
Managing Tasks, Priorities, & Deadlines	29	Planning	Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengelola tugas, prioritas dan tenggat waktu. To increase knowledge in managing tasks, priorities and deadlines.
Ahli K3 Listrik Electrical OHS Expert	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang K3 Listrik. To improve technical capabilities about Electricity OHS.
Bootcamp Data Analyst with Python & SQL	5	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang Python & SQL. To improve technical skills about Python & SQL.
CCNP-SP	5	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang CCNP-SP. To improve technical capabilities about CCNP-SP.
Certified Associate Anti-Fraud (CAAF)	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang Certified Associate Anti-Fraud (CAAF). To improve technical knowledge of Certified Associate Anti-Fraud (CAAF).

Sumber Daya Manusia Human Resources

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
ECSE Design	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang ESCE Design. To improve technical skills about ESCE Design.
Effective Project Management	17	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang project management. To improve technical skills about project management.
ERM Fundamentals with ERMAP & Certifications	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang dasar-dasar ERM dengan ERMAP & sertifikasi. To improve technical proficiency on ERM basics with ERMAP & certification.
Impactful Report Writing (Batch 1&2)	50	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang penulisan laporan. To improve knowledge and technical ability about report writing.
Ms. Excel (Batch 1&2)	133	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang Ms. Excel. To improve technical skills about Ms. Excel.
Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)	30	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan terkait Mikrotik. To increase knowledge related to Mikrotik.
VSAT IF for Officer & Senior Technician	17	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang Very Small Aperture Terminal. To improve technical knowledge of Very Small Aperture Terminal.
Technical Fast Track Fortinet Security with ASABA INNOTECH	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang fast track fortinet security dengan ASABA INNOTECH. To improve technical capabilities about fast track fortinet security with ASABA INNOTECH.
Zenic One Training	32	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan zenic one. To improve the ability of zenic one.
Data Center Management	1	Functional	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang pengelolaan data. To improve technical knowledge of data management.
Procurement Audit & Fraud Prevention	2	Functional	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang procurement audit & pencegahan penipuan. To improve technical knowledge of procurement, auditing & fraud prevention.
Operator Genset Kelas I	1	Functional	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang genset. To improve the technical capabilities of the generator.
Present with Impact Escalating Your Presentation Skill	27	Functional	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang keterampilan presentasi. To improve technical proficiency on presentation skills.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Manager
Competency Development for Manager level, 2023

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
<i>Antipiracy for Customer Centricity</i>	25	<i>Know Your Customer</i>	Untuk meningkatkan kemampuan tentang anti pembajakan untuk kepuasan pelanggan To improve the ability about anti-piracy for customer satisfaction
<i>Creative & Innovative Thinking</i>	46	<i>Innovative</i>	Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif batch 1 To improve creative and innovative thinking skills batch 1
<i>Improving Efficiency & Effectiveness</i>	49	<i>Professionalism</i>	Untuk meningkatkan kemampuan efisiensi dan efektifitas batch 2 To improve the efficiency and effectiveness capability of batch 2
<i>Collaborative Excellence Elevating Self To Thrive In Teamwork</i>	53	<i>Team Work</i>	Untuk meningkatkan kemampuan kolaboratif dan mengevaluasi diri untuk bekerjasama dalam tim To improve collaborative skills and self-evaluation to work in teams
<i>Basic Managerial Skill</i>	55	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang kemampuan manajerial To improve technical skills about managerial skills
<i>Decision Drivers: Fuelling Success Through Problem Solving</i>	28	<i>Problem Solving & Decision Making</i>	Untuk meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah untuk mendorong kesuksesan To improve the ability to solve problems to drive success
<i>Problem Solving Through Design Thinking</i>	43	<i>Problem Solving & Decision Making</i>	Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui design thinking batch 2 To improve problem-solving skills through design thinking batch 2
<i>Planning, Executing & Evaluation</i>	25	<i>Planning</i>	Untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, pelaksanaan, & evaluasi To improve the ability to plan, execute, & evaluate
<i>Winning Spirit</i>	28	<i>Stress Management & Pressure Tolerance</i>	Untuk meningkatkan pengetahuan tentang semangat kemenangan To increase knowledge of the spirit of victory
<i>Agile Auditing</i>	2	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang audit yang efektif To improve technical capabilities on effective auditing
<i>Building Sustainable Quality</i>	2	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang membangun kualitas secara berkelanjutan To improve technical capabilities about building continuous quality
<i>Effective Project Management</i>	17	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang manajemen proyek yang efektif To improve technical capabilities on effective project management

Sumber Daya Manusia Human Resources

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
<i>CCNP-SP</i>	8	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang CCNP-SP To improve technical capabilities about CCNP-SP
<i>Professional Development Program (PDP): Pragmatic Approaches in Assessing Risks for Real Sector Companies</i>	1	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang pendekatan pragmatis dalam penilaian risiko pada perusahaan besar To improve technical capabilities on pragmatic approaches in risk assessment in large companies
<i>Procurement Audit & Fraud Prevention</i>	2	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang procurement audit & pencegahan penipuan To improve technical capabilities on procurement, auditing & fraud prevention
<i>Webinar: Trends & Challenges Internal Audit in 2023-2025</i>	2	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan pengetahuan tentang tren & tantangan internal audit di tahun 2023-2025 To increase knowledge of internal audit trends & challenges in 2023-2025
<i>Professional General Affair Management</i>	10	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang manajemen general affair To improve technical skills on general affairs management
<i>Calculating Your Carbon Footprint</i>	1	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang menghitung jejak karbon To improve technical capabilities on calculating carbon footprint
<i>CFE Preparation Course</i>	1	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang persiapan CFE To improve technical capabilities on CFE preparation
<i>Data Privacy and Protection Symposium 2023</i>	1	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang privasi data dan proteksi symposium To improve technical capabilities on data privacy and symposium protection
<i>Greenhouse Gas (GHG)</i>	4	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang greenhouse gas To improve the technical capabilities of greenhouse gas
<i>Mencapai Transformasi Usaha Berkelanjutan dengan Integrasi Environmental Social Governance dan Perdagangan Karbon</i>	1	<i>Functional/Technical</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang transformasi usaha berkelanjutan dengan integrasi <i>environmental social governance</i> dan perdagangan karbon To improve technical capabilities on sustainable business transformation with environmental integration of social governance and carbon trading

Sumber Daya Manusia Human Resources

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level General Manager

Competency Development for General Manager level, 2023

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Effective Communication Training: Becoming A Charming Communicator Within Organization	28	Interpersonal/ Communication Skill	Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif untuk menjadi komunikator yang menarik dalam organisasi To enhance effective communication skills to become an attractive communicator in the organization
Advanced Leadership	76	Leadership	Untuk meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang maju To enhance the ability to become an advanced leader
Leader as Coach	39	Leadership & People Development	Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai pelatih batch 1 To improve leadership ability as a batch 1 trainer
PDCA Mastery : The Continuous Improvement Workshop	31	Planning	Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan PDCA dan peningkatan berkelanjutan To improve PDCA mastery ability and continuous improvement
Strategic Decision Making	29	Decision Making	Untuk meningkatkan kemampuan strategi pengambilan keputusan To improve the ability of decision-making strategies
Symex 2023: Symposium Project Management	8	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang symex 2023: symposium manajemen proyek To improve technical capabilities about symex 2023: project management symposium
Workshop PSAK for Executive	2	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang PSAK untuk executive To improve technical skills about PSAK for executives
Legal Due Diligence sebagai Manajemen Risiko Bisnis yang Efektif Legal Due Diligence as Effective Business Risk Management	4	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang manajemen risiko bisnis yang efektif To improve technical capabilities on effective business risk management
English Course - Cakap	3	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang Bahasa Inggris To improve technical skills about English
Greenhouse Gas (GHG)	4	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang greenhouse gas To improve the technical capabilities of greenhouse gas

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Chief/VP

Competency Development for Chief/VP level, 2023

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Advanced Leadership	76	Leadership	Untuk meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang maju To enhance the ability to become an advanced leader
Leader as Coach	39	Leadership & People Development	Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai pelatih batch 1 To improve leadership ability as a batch 1 trainer

Sumber Daya Manusia Human Resources

Nama Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Green House Gas (GHG) Calculation, Mitigation, Audit and Reporting Training	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang Perhitungan, Mitigasi, Audit dan Pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) To improve technical capabilities on Greenhouse Gas (GHG) Calculation, Mitigation, Audit and Reporting
Certification in Audit Committee Practices (CACP)	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang CACP To improve technical capabilities about CACP
Indonesia & SE Asia: 9th Annual International Arbitration & Corporate Crime Summit	3	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang KTT Arbitrase Internasional & Kejahatan Korporasi Internasional Tahunan ke-9 To enhance technical proficiency on the 9th Annual International Arbitration & International Corporate Crime Summit
Symex 2023: Symposium Project Management	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang symex 2023: symposium manajemen proyek To improve technical capabilities about symex 2023: project management symposium

Pada tahun 2023, Protelindo telah menyelenggarakan pelatihan kepada 1.611 peserta dari 2.210 total karyawan. Pelatihan dilakukan secara e-Learning sebanyak 8% dan sisanya dilakukan secara *offline*, baik diselenggarakan oleh *inhouse* maupun pihak ketiga. Secara komposisi, 6% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang *core competency*, 22% adalah penunjang *managerial/behavioral competency*, dan 72% adalah penunjang *technical/functional competency*. Kegiatan pengembangan kompetensi mencatatkan 22 orang karyawan telah mengikuti program sertifikasi dan 1.589 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi non sertifikasi. Berdasarkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi ini sebanyak 146 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *public/external training* dan 1.465 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *internal training*.

Pelatihan untuk Purnabakti

Untuk karyawan yang memasuki purnabakti, Protelindo memiliki serangkaian program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif dan terpadu untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalani masa purnabakti agar lebih sejahtera dan produktif. Protelindo juga membantu karyawan dalam mengelola perubahan psikologis yang sering terjadi menjelang pensiun, menjalani hidup sehat

In 2023, Protelindo has organised training for 1,611 participants out of a total of 2,210 employees. Training was conducted via e-Learning for 8% of the sessions, and the rest were conducted offline, either in-house or by third parties. In terms of composition, 6% of the organized education programs supported core competency, 22% supported managerial/behavioural competency, and 72% supported technical/functional competency. The competency development activities recorded those 22 employees participated in certification programs and 1,589 individuals took part in non-certification competency enhancement programs. Based on the type of competency development activities, 146 individuals participated in public/external training, and 1,465 individuals participated in internal training.

Retirement Training

For employees entering retirement, Protelindo has a comprehensive and integrated series of training and education programs to equip employees with the necessary skills and knowledge for a more prosperous and productive retirement. Protelindo also assists employees in managing the psychological changes that often occur as retirement approaches, living healthily in various aspects, as well as training and entrepreneurial

Sumber Daya Manusia Human Resources

di berbagai aspek, serta pelatihan dan strategi berwirausaha. Berikut adalah beberapa program pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan Perseroan untuk karyawan yang akan memasuki masa pensiun/purnabakti:

Judul Pelatihan	Training Subject
Pengantar Memasuki Masa Pensiun	Introduction to Entering Retirement
Mindset Mental Switching	Mindset Mental Switching
Mengelola Keharmonisan Rumah Tangga	Managing Household Harmony
Strategi Menjaga Kesehatan Jasmani dan Rohani	Strategies for Maintaining Physical and Spiritual Health
Strategi memulai Wirausaha dan melakukan Marketing dan Branding	Strategy for starting Entrepreneurship and doing Marketing and Branding
Strategi Pengelolaan Keuangan	Financial Management Strategy
Strategi Pembuatan Business Plan	Business Plan Making Strategy
Kunjungan Tempat Usaha	Business Site Visit
Workshop Personal Business Coaching & Mentoring	Personal Business Coaching & Mentoring Workshop

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan program-program purnabakti karyawan agar karyawan yang memasuki masa purnabakti sudah dipenuhi dengan pembekalan yang cukup untuk menjalani kegiatan yang produktif dan bermakna.

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk karyawan dengan mengikutsertakan 1.611 peserta. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan pada tahun 2023 dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp3,823 juta meningkat 27% dari biaya yang dikeluarkan pada 2022 yang sebesar Rp3.012 juta. Peningkatan realisasi biaya pelatihan tersebut karena meningkatnya jumlah pelatihan yang dilakukan Perseroan dan juga merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan pengembangan kompetensi karyawan.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi

Competency Development Costs

Keterangan Description	2023	2022
Total Biaya (Rp Juta) Total Costs (Rp Million)	3.823,00	3.011,61

strategies. The following are some of the educational and training programs that the Company has implemented for employees who are about to enter retirement/retirement:

The Company is committed to continuously improving and developing retirement programs for employees to ensure for those entering retirement are equipped with sufficient preparation to engage in productive and meaningful activities.

In 2023, the Company organised competency development for employees by involving 1,611 participants. The cost incurred by the Company in 2023 for competency development was Rp3.823 million, a 27% increase from the cost incurred in 2022, which was Rp3.012 million. The increase in training cost realisation is due to the increased number of trainings conducted by the Company and also represents one of the Company's commitments to enhancing employee competency development.

Sumber Daya Manusia Human Resources



PENGEMBANGAN KARIR CAREER DEVELOPMENT

Protelindo memiliki program pengembangan karir karyawan yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Program pengembangan karir karyawan dilakukan secara berjenjang atau program promosi bagi pegawai dari pejabat tingkat pertama sampai dengan pejabat eksekutif yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang kosong. Dasar dalam Pengembangan Karir terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan.

Protelindo has an employee career development program aimed at preparing, developing, and retaining employees to ensure they can perform at their best, both today and in the future. The employee career development program is carried out in stages or through a promotion program for employees from the first-level officials to executive officials, implemented to fill vacant positions. The foundation of Career Development consists of two aspects: competencies measured through the assessment process and employee performance. Competency measurement is conducted periodically to update the latest skills of each employee at all levels of positions.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Pengembangan karir berlaku untuk semua karyawan, baik secara vertikal maupun horizontal, tanpa terkecuali. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk meniti karir berdasarkan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk setiap level jabatan. Penilaian sistematis untuk mengidentifikasi talenta berkualitas dalam jajaran karyawan Perusahaan tetap dilakukan dalam 3 (tiga) hal utama yang meliputi:

1. Penilaian administratif dari sisi penilaian kinerja, pendidikan, dan usia;
2. Penilaian potensi kinerja melalui serangkaian evaluasi kompetensi berdasarkan kepada standar yang berlaku dalam industri Perseroan; dan
3. Penilaian manajemen untuk mendapatkan *assessment* dari pihak pengambil keputusan strategis di lingkungan Perseroan.

Setiap karyawan yang memenuhi kriteria penilaian di atas akan ditempatkan dalam berbagai kategori berdasarkan nilai potensi dan kompetensi mereka masing-masing. Unit kerja SDM akan melakukan proses kategorisasi dan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan dengan kebutuhan unit kerja terhadap posisi tertentu.

Pengembangan karir karyawan dilakukan sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggung jawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan. Pada tahun 2023, terdapat 129 orang Pegawai yang telah menjalankan program pengembangan karir.

Perseroan juga secara berkala mengevaluasi kinerja karyawan setiap tahunnya untuk mengukur kinerja selama tahun berjalan. Penilaian kinerja karyawan Perseroan dilakukan oleh masing-masing atasan dan difasilitasi oleh unit kerja SDM. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip utama yaitu:

1. Setiap Karyawan Memiliki Target
Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan Perseroan.

Career development applies to all employees, both vertically and horizontally, without exception. Every employee has the same opportunity to pursue a career based on competence in accordance with the requirements specified for each job level. Systematic assessment to identify high-quality talents among the Company's employees is still conducted in 3 (three) main aspects, including:

1. Administrative assessment from the side of performance appraisal, education, and age;
2. Potential performance assessment through a series of competency evaluations based on the standards applicable in the Company's industry; and
3. Management assessment to obtain assessments from strategic decision-makers within the Company.

Every employee who meets the above assessment criteria will be placed in various categories based on their potential and competence values. The HR work unit will carry out the categorization process and consider the suitability of the job profile with the needs of the work unit for specific positions.

Employee career development is carried out according to the projection of needs for a vacancy with the establishment of formations that have been issued by the unit responsible for Organizational Structure and Network. In 2023, a total of 129 employees had undertaken career development programs.

The Company also regularly evaluates employee performance annually to measure performance during the year. The Company's employee performance appraisal is conducted by each supervisor and facilitated by the HR department. The employee performance assessment adheres to three main principles:

1. Every Employee Has Targets
Each employee has tasks and responsibilities according to targets set based on the Company's objectives.

Sumber Daya Manusia Human Resources

2. Target Karyawan Harus Terukur
Karyawan dituntut untuk mencapai target sesuai dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan hasil diskusi dengan atasan dan telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja, yang kemudian dirumuskan dalam suatu format terukur.
3. Evaluasi Kinerja Karyawan Berkala
Peninjauan dan penilaian atas pencapaian target senantiasa dilakukan secara formal setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Namun demikian, peninjauan pencapaian target juga dilakukan secara informal oleh masing-masing atasan melalui dialog/diskusi yang berkesinambungan agar karyawan dapat selalu menjadi yang terdepan sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis.

Unit kerja SDM bertindak sebagai fasilitator yang memastikan proses penilaian kinerja SDM Perseroan berjalan dengan baik mulai dari proses komunikasi, persiapan administrasi, dan koordinasi terkait dengan *reward and punishment* yang diberikan sebagai implikasinya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pengembangan karyawan, termasuk pelatihan karyawan, promosi jabatan dan bahkan pembinaan karyawan. Perseroan telah menerapkan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai penilaian yang objektif.

Pada tahun 2023, Manajemen telah melakukan penilaian terhadap 1.504 karyawan, dibandingkan penilaian tahun 2022 sebanyak 1.536 karyawan. Sebagai tindak lanjut penilaian tersebut, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 terjadi promosi jabatan sebanyak 129 orang.

2. Employee Targets Must be Measurable
Employees are required to achieve targets within a specified timeframe, based on discussions with supervisors and approved by the Head of the respective department, formulated in a measurable format.
3. Periodic Employee Performance Evaluations
Reviews and assessments of target achievement are conducted formally at least once a year. However, informal reviews of target achievement are also conducted by supervisors through continuous dialogue/discussion to ensure that employees can always stay ahead according to the dynamics of the business environment.

The HR work unit acts as a facilitator that ensures the Company's HR performance assessment process runs well, starting from the communication process, administrative preparation, and coordination related to the rewards and punishments given as its implications. The results of performance assessments are used as the basis for employee development, including employee training, job promotions, and even employee coaching. The Company has implemented a performance appraisal system using Key Performance Indicators (KPIs) as an objective assessment.

In 2023, the Management has conducted performance assessments for 1,504 employees, compared to 1,536 employees in 2022. As a follow-up to these assessments, as of December 31, 2023, there were 129 job promotions.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Berikut di bawah ini adalah tabel penilaian karyawan: Below are the details of employee assessments:

Level Pegawai Employee Level	2023						2022						2021					
	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development			Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development			Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development		
	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion
Manager	162	44	206	37	N/A	N/A	153	37	190	15	N/A	N/A	136	39	175	20	N/A	N/A
Asisten Manager	156	48	204	19	N/A	N/A	170	41	211	19	N/A	N/A	159	60	219	26	N/A	N/A
Supervisor	256	87	343	34	N/A	N/A	309	85	394	25	N/A	N/A	263	83	346	39	N/A	N/A
Staff	447	299	746	39	N/A	N/A	449	275	724	15	N/A	N/A	347	257	604	27	N/A	N/A
Non-Staff	5	0	5	0	N/A	N/A	17	0	17	0	N/A	N/A	1	0	1	0	N/A	N/A

REMUNERASI REMUNERATION

Protelindo menjalankan sistem remunerasi berbasis kinerja yang cukup efektif menjaga tingkat hubungan antara karyawan dan Perseroan agar tetap profesional. Sistem remunerasi berbasis kinerja membuat penerapan kompensasi dan benefit didasarkan pada pencapaian kinerja individu dan kinerja Perseroan. Dengan sistem ini, Perseroan dapat mempertahankan status Perseroan sebagai organisasi dengan performa tinggi atau *high performance organization*.

Untuk membuka peluang menarik talenta- talenta terbaik dan meningkatkan daya saing dipasar tenaga kerja, Protelindo berupaya untuk menjaga sistem remunerasi *match to market*. Kesesuaian remunerasi ini senantiasa dipantau dan dipertahankan dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan keluarga karyawan untuk mempertahankan tingkat retensi karyawan secara optimal dan juga kondisi Perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Protelindo implements a performance-based remuneration system that is quite effective in maintaining a professional relationship level between employees and the Company. The performance-based remuneration system bases the application of compensation and benefits on the achievement of individual performance and the Company's performance. With this system, the Company can maintain its status as a high-performance organization.

To open opportunities for attracting the best talents and increase competitiveness in the labour market, Protelindo strives to maintain a remuneration system that matches the market. The appropriateness of this remuneration is continuously monitored and maintained, considering the development of employees' family needs to optimally retain employee levels and also the Company's condition to ensure business sustainability.

Sistem remunerasi karyawan diterapkan secara kompetitif sesuai dengan tingkat upah minimum yang berlaku di area operasional, sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guna memastikan lebih lanjut tidak adanya diskriminasi, terutama diskriminasi terhadap gender, Perseroan memberlakukan *gender pay gap nol* persen antara remunerasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Artinya, Perseroan menerapkan kondisi dimana karyawan laki-laki dan perempuan menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama atau memiliki nilai yang sama (*equal pay for equal work*) agar tercapainya kesetaraan upah berdasarkan gender. Perseroan juga senantiasa melakukan audit gaji secara berkala dan *benchmarking* untuk memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan masih dapat bersaing dengan pelaku usaha sejenis di Indonesia, termasuk juga memastikan nilai kesetaraan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan.

The employee remuneration system is implemented competitively inline with the prevailing minimum wage rates in the operational areas, as regulated by relevant laws and regulations. To further ensure no discrimination within the Company, particularly gender discrimination, the Company applies a zero percent gender pay gap between male and female employees' remuneration. This means that the Company implements conditions where male and female employees receive equal pay for equal work or work of equal value to achieve wage equality based on gender. The Company also regularly conducts salary audits and benchmarking to ensure that the wages provided to employees remain competitive with similar industry players in Indonesia, including ensuring wage equality between male and female employees.

Sumber Daya Manusia Human Resources

KESEJAHTERAAN PEGAWAI EMPLOYEE WELFARE

Perseroan menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan kehamilan, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya.

Kebijakan terkait kesejahteraan karyawan mencakup dua program utama yaitu mengenai kesehatan dan pensiun. Perseroan menjalankan dua program tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh karyawannya termasuk, namun tidak terbatas pada, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan melahirkan, tunjangan gigi, pemeriksaan kesehatan tahunan, serta program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Perseroan tidak membedakan secara esensial terkait kesejahteraan, khususnya tunjangan yang diterima oleh karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu. Perbedaan jenis fasilitas yang diterima oleh karyawan tetap dengan tidak tetap, adalah sebagai berikut:

The Company provides competitive package of benefits and welfare to all its employees. The benefits package includes health benefits, maternity benefits, retirement benefits, and other allowances.

The policy related to employee welfare encompasses two main programs: health and retirement. The Company manages these programs in accordance with relevant laws and regulations for all its employees, including, but not limited to, holiday allowances, health benefits, maternity benefits, dental benefits, annual health examinations, and programs organized by the Social Security Administration of BPJS Healthcare and BPJS Employment.

The Company does not essentially discriminate regarding welfare, particularly the benefits received by permanent or part-time employees. The difference in the types of facilities received by permanent and non-permanent employees is as follows:

Jenis Remunerasi/Fasilitas Remuneration Type/Facility	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees
Gaji Pokok Basic Salary	✓	✓
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Kesehatan Health Benefits	✓	✓
Tunjangan Kehamilan Maternity Benefits	✓	✓
Tunjangan Pensiun Pension Benefits	✓	✓
Tunjangan lainnya Other Benefits	✓	✓
Fasilitas Facilities		
Seragam Uniform	✓	✓
Asuransi Ketenagakerjaan Employment Insurance	✓	✓
Asuransi Jiwa Life insurance	✓	✓
Cuti Leave		
Cuti Tahunan Annual Leave	✓	✓
Cuti Melahirkan Maternity Leave	✓	✓
Lain-lain Others		
Opsi Kepemilikan Saham Stock Ownership Options	✓	✓

Sumber Daya Manusia Human Resources

Pelayanan Kesehatan

Perseroan memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani karyawan melalui berbagai fasilitas dan tunjangan kesehatan, salah satunya adalah melalui BPJS Kesehatan, sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa penggantian biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS sesuai tingkat jabatan karyawan, dengan sistem plafon manfaat, seperti rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi, pembuatan kacamata, dan perawatan kelahiran.

Program Pensiun

Perseroan mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada tahun 2023, terdapat 2 pegawai yang telah menjalankan program pensiun. Program pensiun yang diberikan antara lain: Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek. Karena bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/Personal Grade.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Dalam rangka menyempurnakan implementasi strategi maupun kebijakan serta sebagai sarana karyawan menyampaikan aspirasinya, Perseroan melakukan pengukuran survei keterikatan karyawan terhadap Perseroan melalui *employee survey*. Survei keterikatan karyawan bermanfaat untuk kedua belah pihak, dari karyawan maupun Perseroan. Berikut manfaat yang diberikan:

Bagi Karyawan

1. Sebagai wadah aspirasi karyawan terhadap Perseroan: Karyawan dapat memberikan kritik kepada Perseroan melalui pengisian *Employee Survey*. Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi *input* bagi Perseroan dalam membuat kebijakan.

Healthcare Services

The Company pays attention to the physical and mental health of its employees through various health facilities and benefits, one of which is through BPJS Healthcare, in line with government regulations. The Company also provides health facilities in the form of reimbursement for health expenses not covered by BPJS according to the employee's job level, with a ceiling benefit system, such as hospitalization, outpatient care, dental care, glasses production, and childbirth care.

Pension Program

The Company enrolls all its employees in a pension program, as stipulated by the Law. In 2023, there were 2 employees who undertook the pension program. The pension programs provided by the SMN Group include: Pension Guarantee from the Social Security Administrator (BP) Jamsostek is mandatory, so all employees must be registered in all BP Jamsostek programs starting from Old Age Guarantee (JHT), Death Guarantee (JKM), Work Accident Guarantee (JKK), and Pension Guarantee (JP). The contribution for the Pension Guarantee (JP) program is calculated at 3%, which consists of 2% company charge and 1% employee charge from the Basic Salary/Personal Grade.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

To refine the implementation of strategies and policies and as a means for employees to convey their aspirations, the Company conducts a survey on employee engagement with the Company through employee engagement. The employee engagement survey is beneficial for both parties, the employees and the Company. Here are the benefits provided:

For Employees

1. As a venue for employees' aspirations towards the Company: Employees can provide criticism to the Company through the Employee Survey. This information will then serve as input for the Company in making policies.

Sumber Daya Manusia Human Resources

- Menciptakan semangat baru bagi karyawan untuk berangkat ke kantor: Karyawan akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta Perseroan.
- Menciptakan hubungan kuat dengan setiap karyawan: Hubungan ini juga akan membuat karyawan untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerja sama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
- Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh karyawan dalam kehidupannya: Pendekatan ini dapat membuat karyawan menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di Perseroan.

Bagi Perseroan

- Perseroan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi karyawan sehingga tingkat keterikatan antara karyawan dan Perseroan semakin meningkat.
- Perseroan akan memiliki karyawan dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan Perseroan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Karyawan akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh Perseroan.
- Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari karyawan kepada Perseroan. Jumlah absen karena karyawan yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas sepanjang tahun.

- Creating a new spirit for employees to go to the office: Employees will always think positively in carrying out their work and offer ideas for the development of the team and the Company.
- Creating a strong relationship with each employee: This relationship will also drive employees to focus on the achievements they aim for, build solid team cooperation, and not forget to express thanks and appreciation for achievements across divisions.
- Eliminating tedious and negative thoughts from every problem faced by employees in their lives: This approach can reinvigorate employees when carrying out their work in the Company.

For the Company

- The Company will better understand the need for enhancing employee competencies, thus increasing the level of engagement between employees and the Company.
- The Company will have employees with positive attitudes and behaviours. With positive behaviour, it will naturally lead to better Company growth than in previous years.
- Employees will become loyal to the Company because of the presence of *Employee Engagement* at their workplace. They will also proudly talk about and even recommend to people they meet to use the products or services owned by the Company.
- Employee Engagement* creates a greater commitment from employees to the Company. The number of absences due to illness decreases, mitigates the rate of accidents in the work process, and increases productivity throughout the year.

Sumber Daya Manusia Human Resources

BUDAYA KERJA

Perseroan memiliki budaya kerja yang diharapkan mampu menginspirasi karyawan untuk senantiasa memberikan yang terbaik saat bekerja. Selain mengacu kepada target dan tanggung jawab, setiap karyawan juga dihimbau untuk senantiasa menaati dan mengikuti budaya kerja Perseroan yang berbasis kinerja, kreativitas, dan inovasi secara berkesinambungan.

Perseroan terus mengingatkan karyawan akan budaya kerja dan pada tahun 2023, sosialisasi budaya kerja dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui email ke seluruh karyawan, serta program orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru.

SARANA DAN UNIT PENUNJANG LAYANAN SDM

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Divisi HR telah meluncurkan produk Digital yaitu Portal HR. Portal HR merupakan media informasi digital berbasis website yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, *polling* dan gerbang menuju aplikasi-aplikasi terkait lainnya.

Perseroan juga memberikan kemudahan pengurusan administrasi bagi karyawan melalui aplikasi seperti aplikasi informasi kebijakan SDM, informasi karyawan, aplikasi cuti, dan lain sebagainya. Perseroan juga memiliki unit kerja umum yang mengelola mobilitas karyawan, gedung beserta fasilitasnya.

Selain itu, Perseroan juga mendukung karyawan untuk dapat bekerja dengan maksimal melalui berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana kerja sesuai dengan jabatan dan tugas yang diembannya. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup fasilitas internet, intranet, dan aplikasi lainnya yang memudahkan kegiatan karyawan.

WORK CULTURE

The Company has a work culture that is expected to inspire employees to always deliver their best while working. Besides adhering to targets and responsibilities, every employee is also mandated to always obey and follow the Company's work culture, which is based on performance, creativity, and continuous innovation.

The company continually reminds employees of the work culture, and in 2023, the socialisation of work culture was carried out through a series of activities, namely the dissemination of information via email to all employees, as well as orientation or training programs for new employees.

HR FACILITIES AND SERVICE SUPPORT UNITS

As time progresses, advancements in information technology have made it easier for people to carry out activities, view news, and search for various pieces of information circulating online. The HR Division has launched a digital product, namely the HR Portal. The HR Portal is a web-based digital information medium that is useful for ensuring communication and providing services to employees, including accommodating information, news, training schedules, activity information, polls, and serving as a gateway to other related applications.

The Company also provides ease of administrative management for employees through applications such as HR policy information apps, employee information, leave application apps, and so forth. The Company also has a general work unit that manages employee mobility, buildings, and their facilities.

In addition, the Company also supports employees to be able to work optimally through various facilities, means, and work infrastructure according to the position and tasks they carry. These facilities include internet facilities, intranet, and other applications that facilitate employee activities.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Bagi para karyawan yang mendapatkan jadwal *Work From Home*, Perseroan memberikan akses layanan *Virtual Private Network (VPN)* dan penerapan sistem approval dokumen secara *online* melalui aplikasi agar karyawan dapat bekerja secara maksimal di rumah.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit ini sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, sebagai wadah komunikasi dengan karyawan, termasuk terkait dengan pemenuhan hak-hak karyawan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja serta sebagai upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, Perseroan juga membuka saluran komunikasi yang dapat diakses karyawan untuk mengelola hubungan yang baik, seperti melalui *channel* sistem internal HRD Perseroan.

Perseroan juga menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR PENGELOLA SDM

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. SMN Group senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya.

Pengelolaan SDM di berada di bawah Divisi HR yang dipimpin oleh *Head of Director & Chief of Business Support*. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi *HR Operation & GA Facility* dan *HR Development*. Sub Divisi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.

For employees who are scheduled to *Work From Home*, the Company provides access to *Virtual Private Network (VPN)* services and online document approval systems through applications to ensure that employees can work optimally at home.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company has established a Bipartite Cooperation Institution as a forum for communication and consultation regarding matters related to industrial relations. The Bipartite Cooperation Institution consists of employers and trade unions/labor unions that are already registered with the responsible agency in the field of employment or employee/labor elements. The formation of the Bipartite Cooperation Institution is a form of the Company's commitment to providing labor protection, as a communication vessel with employees, including related to fulfilling employees' rights based on Company Regulations and Work Agreements, and as an effort to create harmonious industrial relations that are mutually beneficial for all parties. In addition, the Company also opens communication channels that can be accessed by employees to manage good relations, such as through the Company's internal HRD system channel.

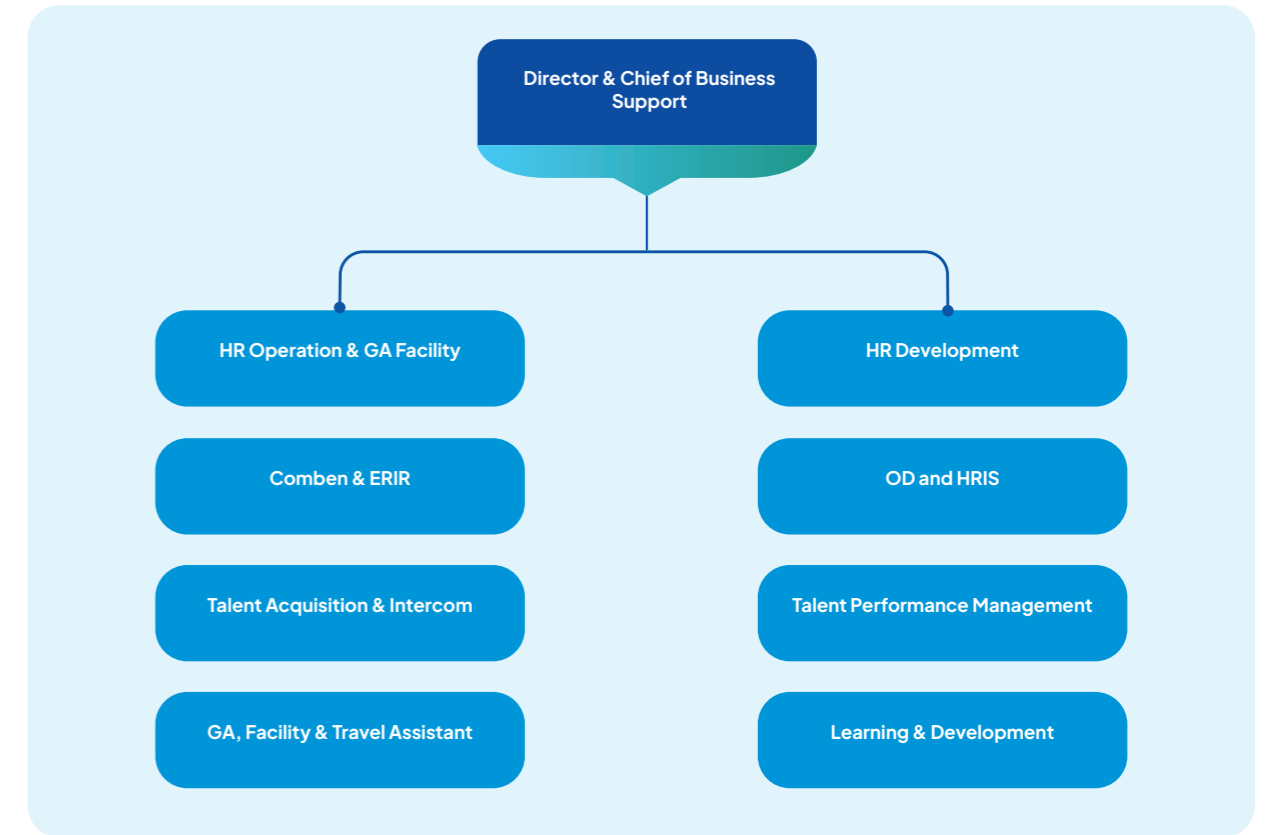
The company also guarantees the freedom of association for employees in line with relevant laws and regulations.

HR MANAGEMENT STRUCTURE

A reliable, loyal, and competent HR structure is the Company's primary capital in achieving its vision, mission, and business success. The SMN Group always prioritizes the development of both individual and team, and the development of *Corporate Culture* to build the Company's culture as a business strategy to maintain its best performance.

HR management in the Company falls under the HR Division, which is led by the *Head of Director & Chief of Business Support*. This division consists of the Sub Division of *HR Operation & GA Facility* and *HR Development*. These Sub Divisions are expected to deliver employees who are competent and hold high company cultural values.

Sumber Daya Manusia Human Resources



RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2024

Rencana Bisnis Divisi HR untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Compensation & Benefits alignment*
2. *Succession Planning Program*
3. *Campus Hiring*

2024 HR DEVELOPMENT PLAN

The following are HR Division Business Plan for 2024:

1. *Compensation & Benefits alignment*
2. *Succession Planning Program*
3. *Campus Hiring*



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH

Meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan prioritas bagi Protelindo sebagai industri yang memiliki risiko kerja tinggi. Penerapan aspek K3 dalam proses bisnis Perseroan dikoordinasikan oleh tim QHSE/Quality, Health, Safety and Environment dan dijalankan oleh seluruh unit perusahaan terkait. Sejak 2012, Protelindo telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS) 18001 yang sejak tahun 2001 hingga saat ini menjadi ISO 45001, sebagai bagian dari sertifikasi: ISO 9001, ISO 14001, dan PAS 99. Protelindo juga telah memiliki kebijakan QHSE yang terintegrasi dalam Kebijakan IMS dan telah ditandatangani oleh Direksi.

Protelindo juga telah memiliki kebijakan QHSE yang terintegrasi dalam Kebijakan IMS dan telah ditandatangani oleh Direksi. Adapun isi dari Kebijakan IMS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan secara berkelanjutan peran Perseroan sebagai mitra yang andal dalam industri telekomunikasi.
2. Meningkatkan secara berkelanjutan tingkat pemahaman aspek kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan keamanan informasi serta profesionalisme semua karyawan di tempat kerja.
3. Mematuhi peraturan yang relevan dan persyaratan untuk kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan keamanan informasi.
4. Bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk memberikan pemahaman kepada karyawan serta memberikan pengaruh kepada pemasok dan subkontraktor dalam praktik aspek kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan keamanan informasi.
5. Membangun, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan proses Sistem Manajemen Terintegrasi Perseroan.
6. Bekerja untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko Kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan melibatkan konsultasi dan partisipasi semua pekerja, komitmen

Improving Occupational Health and Safety (OHS) culture is a priority for Protelindo as an industry with high occupational risks. The implementation of OHS aspects in the Company's business processes is coordinated by the QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) team and carried out by all relevant company units. Since 2012, Protelindo has implemented the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) 18001, which has been in place since 2001 and is currently ISO 45001, as part of the certification: ISO 9001, ISO 14001, and PAS 99. Protelindo also has an integrated QHSE policy in the IMS Policy and has been signed by the Board of Directors.

Protelindo also has an integrated QHSE policy within the IMS Policy, which has been signed by the Board of Directors. The contents of the IMS Policy are as follows:

1. Continuously improve the Company's role as a reliable partner in the telecommunications industry.
2. Continuously enhance the level of understanding of aspects of quality, health, safety at work, environment, information security, and professionalism of all employees in the workplace.
3. Comply with relevant regulations and requirements for quality, health, safety at work, environment, and information security.
4. Work with all stakeholders, including educating employees and influencing suppliers and subcontractors in practicing aspects of quality, health, safety at work, environment, and information security.
5. Build, maintain, and continuously improve the Company's Integrated Management System processes.
6. Work to provide safe and healthy working conditions, eliminate hazards and reduce Occupational Health and Safety risks, prevent work accidents and occupational diseases, involving consultation and participation of all workers, commitment to preventing

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety and Occupational Health

- untuk mencegah pencemaran lingkungan, pemrosesan aset dan fasilitas informasi melalui kebijakan yang efektif serta mendukung kinerja manajemen aset dalam jangka panjang.
- 7. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran terhadap budaya dan komunitas.

Kebijakan QHSE ini sebagai bentuk komitmen Protelindo terhadap aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan pada kegiatan usaha Perseroan yang juga berlaku untuk mitra vendor Perseroan.

Selaras dengan Kebijakan IMS, SMN Grup berupaya mengurangi risiko kerja dengan menerapkan hal berikut ini:

1. Identifikasi Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control/ HIRADC (Potensibahaya, Risiko dan Penentuan Pengendalian)

Perseroan mengadakan proses identifikasi HIRADC di setiap departemen, mencakup area kerja dan kantor, untuk mengidentifikasi risiko potensial serta menghitung probabilitas dan dampaknya, menghasilkan penilaian risiko yang terukur. Hasil HIRADC 2023 menunjukkan bahwa risiko masih berada pada level Trivial dan Acceptable (Rendah).

Berikut hasil identifikasi K3 yang telah dilakukan Perseroan di tahun 2023:

Jenis Aktivitas Activity Types	Lokasi Location	Potensi Bahaya Potential Hazards	Mitigasi Mitigation
Bekerja di Ketinggian Tower Working at Tower Height	Site	Terjatuh dari ketinggian Falling from a height	Penggunaan Alat Pelindung Diri, Sertifikat bekerja di ketinggian, Regulasi K3, Pelatihan K3, Permit Letter di Site Use of Personal Protective Equipment, Certificate of working at height, OHS Regulation, OHS Training, Permit Letter on Site
Bekerja di on the ground Working on the ground	Site	Tertimpa material, terpeleset Crushed material, slipped	Penggunaan Alat Pelindung Diri, Regulasi K3, Pelatihan K3, Permit Letter di Site Use of Personal Protective Equipment, OHS Regulations, OHS Training, Permit Letter on Site
Bekerja di office Working in office	Office	Terlalu lama duduk sehingga kejang pada otot dan sendi punggung Sitting for too long can lead to muscle and joint stiffness in the back	Penggunaan kursi ergonomi, peregangan otot Use of ergonomic chairs, stretching muscles
Penggunaan Genset Use of Genset	Site	Kebersihan Noises	Penggunaan Ear Muff, rambu K3, Pengukuran Kebisingan Use of Ear-Muffs, OHS Signs, Noise Measurement

- environmental pollution, processing assets and information facilities through effective policies, and supporting long-term asset management performance.
- 7. Perform work with an awareness of culture and communities.

This QHSE policy reflects Protelindo's commitment to health, safety, and environmental aspects in the company's business activities, which also applies to the Company's vendor partners.

In line with the IMS Policy, Protelindo strives to minimize work risks by implementing the following:

1. Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Controls (HIRADC)

The Company conducts HIRADC identification processes in every department, including work areas and offices, to identify potential risks and calculate their probability and impact, resulting in measurable risk assessments. The HIRADC results for 2023 indicate that risks are still at Trivial and Acceptable (Low) levels.

Below are the OHS identification results conducted by the Company in 2023.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety and Occupational Health

2. Identifikasi regulasi terkait dengan K3

Perseroan secara tahunan melakukan identifikasi dan review terhadap regulasi K3 yang relevan, guna memastikan pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

3. Pelatihan terkait K3

Untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran karyawan terhadap K3, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan K3. Di tahun 2023, pelatihan K3 yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Nama Pelatihan Name of Training	Materi Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Operator Genset Kelas 1 Class 1 Genset Operator	Operator Genset Kelas 1 Class 1 Genset Operator	Jakarta, Februari 2023 Jakarta, February 2023	PT Sarana Katiga Nusantara
Pemadam Kebakaran Level D Level D Firefighting	Pemadam Kebakaran Level D Level D Firefighting	Jakarta, Mei 2023 Jakarta, May 2023	PT Sarana Katiga Nusantara
Ahli K3 Listrik OHS Electrical Expert	K3 Listrik OHS Electrical	Jakarta, Februari 2023 Jakarta, February 2023	PT Upaya Riksa Patra
Ahli K3 P3K OHS P3K Member	K3 P3K OHS P3K	Jakarta, Juni 2022 Jakarta, June 2022	PT Sarana Katiga Nusantara
Ahli K3 Umum OHS General Expert	K3 Umum OHS General	Jakarta, Mei 2023 Jakarta, May 2023	PT Phitagoras Global Duta

4. Reminder dan Awareness K3 kepada vendor melalui email blast QHSE

Dalam rangka meminimalisir risiko dari mitra bisnis atau vendor, Perseroan melakukan inspeksi HSE acak di lapangan sebagai bagian dari upaya *monitoring* pelaksanaan standar K3 oleh vendor.

5. Inspeksi HSE secara Random di site

Terkait dengan risiko mitra bisnis atau mitra vendor, Protelindo melakukan inspeksi lapangan sebagai bentuk *monitoring* terhadap vendor di lapangan terkait implementasi K3. Di tahun 2023, telah dilakukan 107 *random inspection* untuk pekerjaan pembangunan *tower* maupun *maintenance tower*. Sebagai bagian dari proses ini, *Contractor Safety Management System* (CSMS) diterapkan pada tahap awal seleksi vendor. Calon vendor diwajibkan untuk mengirimkan dokumen CSMS yang sesuai dengan kriteria dan kuesioner CSMS Perseroan. Selanjutnya, tim QHSE Perseroan melakukan review dan evaluasi CSMS tersebut, dengan hasil yang kemudian disampaikan kepada manajemen vendor.

2. Identification of Regulations related to OHS

The Company annually identifies and reviews relevant OHS regulations, to ensure compliance and compliance with relevant standards.

3. OHS-related Training

To improve employees' ability and awareness of OHS, the Company also organizes OHS training. The following were OHS training conducted in 2023:

4. OHS Reminder and Awareness to Vendors through QHSE email blast

To minimize risks from business partners or vendors, the Company conducts random HSE inspections on site as part of efforts to monitor the implementation of OHS standards by vendors.

5. Random HSE Inspection on Sites

In regards to the risk from business partners or vendor partners, Protelindo conducts field inspections to monitoring OHS implementation by vendors at site. In 2023, a total of 107 random inspections for tower construction and maintenance work was carried out. As part of this process, a Contractor Safety Management System (CSMS) is implemented at the initial stage of vendor selection. Prospective vendors are required to submit CSMS documents that meet the Company's criteria and CSMS questionnaire. Subsequently, the Company's QHSE team reviews and evaluates the CSMS, with the results then communicated to the vendor management.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety and Occupational Health

Setiap orang yang bekerja di site milik Perseroan diwajibkan setiap saat untuk melengkapi dan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana tertera dalam Papan Petunjuk. Setiap kontraktor yang gagal untuk memenuhi arahan APD dan Papan Petunjuk dari Perseroan, akan dikenakan sanksi dan diberhentikan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan Perseroan. Setiap kontraktor, yang mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, wajib melaporkan kejadian tersebut kepada tim terkait dan menerapkan upaya terbaik untuk memitigasi potensi risiko dan meminta pihak yang tidak mematuhi untuk segera menghentikan aktivitas dan meninggalkan site.

6. Latihan Darurat di site

Perseroan mengadakan latihan darurat di lokasi kerja untuk menilai kesiapsiagaan dan respons darurat vendor, dengan fokus pada situasi seperti kebakaran dan kecelakaan kerja.

7. Melaksanakan audit ISO 45001 baik secara internal dan eksternal

Audit ISO 45001, yang bertujuan mengevaluasi sistem manajemen K3, dijalankan melalui metode audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh auditor internal ISO dari berbagai departemen, sementara audit eksternal dijalankan oleh badan sertifikasi ISO.

8. Pengukuran suhu, temperatur, udara, kebisingan dan pencahayaan.

Perseroan rutin mengukur suhu, kelembapan, kualitas udara, dan pencahayaan di kantor, serta kebisingan di lokasi kerja tertentu. Pengukuran ini dijalankan oleh vendor atau pihak ketiga setiap tahun, dan hasilnya menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Sistem Manajemen K3

Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan standar ISO 45001:2018, yang sejalan dengan Kebijakan IMS kami. Untuk menjamin efektivitasnya, Perseroan telah menetapkan kebijakan dan target spesifik sebagai pedoman dan tujuan yang harus dicapai. Kebijakan dan target ini diimplementasikan secara menyeluruh di semua wilayah operasi dan diberlakukan untuk seluruh

Everyone working on the Company's site is required at all times to complete and wear Personal Protective Equipment (PPE) as indicated on the Instruction Board. Any contractor failing to comply with the PPE directives and the Instruction Board from the Company will be subject to sanctions and terminated from all activities related to the Company. Every contractor, aware of non-compliance with Health and Safety regulations, is obliged to report the incident to the relevant team and implement the best efforts to mitigate potential risks and request the non-compliant party to immediately stop the activity and leave the site.

6. Emergency Training on Sites

The Company conducts emergency drills on job sites to assess vendor emergency preparedness and response, focusing on situations such as fires and workplace accidents.

7. Internal and External ISO 45001 Audits

ISO 45001 audits, which aim to evaluate the OHS management system, are carried out through internal and external audit methods. Internal audits are conducted by ISO internal auditors from various departments, while external audits are carried out by ISO certification agencies.

8. Measurement of Humidity, Temperature, Air, Noise and Lighting

The Company routinely measures temperature, humidity, air quality, and lighting in the office, as well as noise levels at specific work sites. These measurements are carried out by vendors or third parties annually, and the results demonstrate compliance with established standards.

OHS Management System

The Company has implemented an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) in accordance with ISO 45001:2018 standards, aligning with our IMS Policy. To ensure its effectiveness, the Company has established specific policies and targets as guidelines and objectives to be achieved. These policies and targets are comprehensively implemented across all operational areas and apply to all employees,

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety and Occupational Health

karyawan, termasuk di Anak Perusahaan dan Afiliasi/Asosiasi, dengan tujuan untuk menghindari dan meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit kerja.

SMK3 Perseroan mencakup semua area operasional dan aktivitas kerja. Sistem ini juga diterapkan pada mitra vendor, dimana pekerjanya aktif di area operasional Perseroan. Dalam penerapan SMK3, Perusahaan mengikuti prinsip-prinsip *Plan, Do, Check, dan Action* di setiap aktivitas kerja dan operasional.

Dalam rangka memverifikasi dan memastikan penerapan SMK3 yang sesuai standar, Perseroan melakukan audit SMK3 secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun, yang meliputi semua wilayah operasional. Audit ini termasuk penilaian ISO 45001, yang merupakan komponen kunci dari sistem manajemen K3. Audit tersebut dilakukan internal oleh auditor ISO dari berbagai departemen dan juga melibatkan pemeriksaan eksternal oleh pihak ketiga yang sudah bersertifikat.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua karyawan. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan, termasuk untuk situasi darurat. Fasilitas tersebut meliputi alat deteksi asap, berbagai jenis alat pemadam api, *hydrant*, kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), tempat ibadah, ruang parkir, serta keamanan yang beroperasi 24 jam.

Di tahun 2023, kami dengan bangga mencapai pencapaian *zero accident*. Namun, hingga saat ini kami masih dalam proses untuk memperoleh sertifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja terkait pencapaian tersebut.

Meningkatkan Budaya Kesadaran K3

Dalam rangka meningkatkan budaya kesadaran K3, Perseroan tiap tahunnya rutin mengirimkan pengingat dan informasi terkait K3 kepada mitra kerja dan karyawan melalui email *blast*. Informasi yang disampaikan secara umum mencakup berbagai topik penting, antara lain Kebijakan IMS, persyaratan untuk Sertifikasi Kerja di Ketinggian, kebutuhan dokumen HSE dalam binder di situs, kebijakan penghentian kerja oleh HSE, standar papan tanda HSE, ilustrasi situs HSE, serta panduan pemakaian alat pelindung diri (PPE).

including Subsidiaries and Affiliates/Associations, with the goal of preventing and minimizing the risk of accidents and occupational diseases.

The Company's OHSMS covers all operational areas and work activities. This system is also applied to vendor partners, whose workers are active in the Company's operational areas. In implementing the OHSMS, the Company follows the principles of Plan, Do, Check, and Action in every work and operational activity.

To verify and ensure the OHSMS implementation according to standards, the Company conducts regular OHSMS audits, at least once a year, covering all operational areas. These audits include an assessment of ISO 45001, which is a key component of the OHS management system. The audits are conducted internally by ISO auditors from various departments and also involve external examinations by certified third parties.

The Company is committed to providing a safe and comfortable working environment for all employees. As such, we provide various facilities that support safety and comfort, including for emergency situations. These facilities include smoke detectors, various types of fire extinguishers, hydrants, First Aid Kits, places of worship, parking areas, and 24-hour security operations.

We are proud to have achieved a zero-accident milestone in 2023. However, we are still in the process of obtaining official certification from the Ministry of Labor regarding this achievement.

Enhancing OHS Awareness Culture

To enhance awareness of OHS aspects, the Company regularly sends reminders and information related to OHS to its partners and employees via email blasts. The information generally covers various essential topics, including IMS Policy, requirements for Working at Heights Certification, the need for HSE documents in site binders, HSE work stoppage policies, HSE signboard standards, site HSE illustrations, and guidelines for using Personal Protective Equipment (PPE).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Safety and Occupational Health

Target K3

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja K3 dengan mempertahankan pencapaian *Zero Fatality Accident Case*.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi baik di lingkungan perkantoran maupun di *sites*.

DEPARTEMEN HSE

Dalam menjalankan kebijakan QHSE, Perseroan memiliki Departemen HSE untuk memastikan penerapan QHSE dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh unit bisnis terkait. Departemen HSE berada di bawah divisi internal audit dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi penerapan dan pemeliharaan IMS sesuai persyaratan ISO;
2. Memastikan laporan kinerja sistem manajemen IMS tersedia untuk Manajemen Perseroan sebagai bahan untuk ditinjau dan dasar perbaikan dan pengambilan keputusan sistem manajemen IMS;
3. Membentuk tim auditor internal Sistem Manajemen Terintegrasi;
4. Membimbing dan mengarahkan seluruh divisi yang relevan sehubungan dengan pencapaian dan peningkatan IMS sesuai dengan target dan tujuannya;
5. Meninjau semua dokumen yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Manajemen Perseroan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
6. Memastikan penerapan sistem manajemen IMS dijalankan dengan baik, dengan menyediakan rekomendasi dan mitigasi untuk setiap penyimpangan dalam sistem serta untuk menyediakan sistem program perbaikan berkelanjutan; dan
7. Memberikan saran penilaian risiko IMS dan pelaporannya.

OHS Target

The Company strives to improve OHS performance by maintaining the achievement of *Zero Fatality Accident Cases*.

Work Accident Rate

As a result of the Company's efforts throughout 2023, There were no work accidents that have occurred either in office environments or on *sites*.

HSE DEPARTMENT

In implementing the QHSE policy, the Company has an HSE Department to ensure that the QHSE implementation is carried out properly by all relevant business units. The HSE Department is under the internal audit division with the following scope of work:

1. Ensuring and supervising the IMS implementation and maintenance in line with ISO requirements;
2. Ensuring that IMS management system performance reports are available for Company Management as review material and basis for IMS management system improvement and decision-making;
3. Establishing an internal audit team for the Integrated Management System;
4. Guiding and directing all relevant divisions in relation to achieving and improving the IMS in accordance with its targets and objectives;
5. Reviewing all documents to be proposed for approval by Company Management and providing input for improvements;
6. Ensuring the IMS management system is carried out appropriately, by providing recommendations and mitigation for any deviations within the system and to provide a continuous improvement program system; and
7. Providing advice on IMS risk assessment and its reporting.

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY



Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan nilai tambah, Protelindo mengembangkan teknologi tepat untuk melakukan akselerasi bisnis dengan pendekatan dan kebijakan strategis di bidang Teknologi Informasi. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi Protelindo di tahun 2023 menekankan pada otomasi proses, menggunakan *robotic process automation* dan juga *artificial intelligence*.

Protelindo creates advanced technology and implements strategic approaches and policies in the area of Information Technology to enhance corporate value creation. In 2023, Protelindo focused on automating its Information Technology processes by utilising robotic process automation and artificial intelligence.



Teknologi Informasi Information Technology

Kebijakan

Perusahaan menyadari bahwa penerapan teknologi informasi (TI) yang optimal dapat membuat Perusahaan menjadi lebih produktif, kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan serta tantangan dari perkembangan bisnis, sehingga membawa Perusahaan pada percepatan pertumbuhan bisnis.

Sistem TI Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses operasional, meningkatkan daya saing, dan keunggulan kompetitif dengan mengutamakan inovasi yang berkelanjutan dan selalu memperhatikan kebutuhan bisnis Perusahaan di bidang operasional dan fungsional.

Protelindo sendiri telah memiliki serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi, diantaranya adalah Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi ("Kebijakan TI"). Kebijakan TI secara umum bertujuan untuk memastikan proses bisnis berjalan efisien sehingga Perusahaan dapat melayani pelanggannya dengan baik, termasuk untuk menyajikan kondisi bisnis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

Secara lebih rinci Kebijakan TI memuat antara lain hal-hal berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perusahaan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perusahaan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perusahaan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perusahaan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia perusahaan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.

Policy

The Company acknowledges that optimal implementation of information technology (IT) can enhance the Company's productivity, competitiveness, and ability to adapt to changes and challenges in the business developments, hence leading the Company towards accelerated business growth.

The Company's IT system is expected to enhance work efficiency through the automation of operational processes, hence enhancing competitiveness and gaining a competitive edge. This will be achieved by prioritising continuous innovation and consistently addressing the Company's business needs in operational and functional areas.

Protelindo has a series of policies related to information technology, one of which is the Information Technology Security Policy ("IT Policy"). The IT Policy generally aims to ensure efficient implementation of business processes to properly serve the Company's customers. This includes providing accurate business conditions as the basis for management decision-making.

The IT Policy details include, among others, the following:

1. The implementation of general IT security to protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cyber security threats.
2. Provision of regular communication to create awareness among IT users about the importance of IT security for the Company's business operations, and striving to enhance the role and contribution of users in protecting the Company from cyber security threats.
3. User responsibility to protect the Company's confidential data by working responsibly, including by following IT security guidelines, maintaining the security of the Company's confidential data, protecting the devices they use in their daily work, etc.
4. Procedures and management of data storage.

Teknologi Informasi Information Technology

5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol domain Perusahaan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perusahaan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk malware, virus, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada firewall, VPN, anti virus, teknologi web-filter, email security serta Security Operations Center ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perusahaan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut.

Strategi

Secara umum strategi TI di Perseroan berfokus pada hal-hal berikut:

1. Sentralisasi IT capabilities, dan mengembangkan kapabilitas yang dapat dipergunakan Bersama (shared).
2. Proses automation untuk akurasi dan mempercepat proses bisnis.
3. Continuous improvement pada IT security.
4. Penerapan teknologi baru yang relevan agar dukungan aplikasi tetap mumpuni dengan pertumbuhan bisnis.
5. Pengembangan personal IT yang juga mengerti konteks bisnis.

Strategi ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis Perusahaan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan strategi ini, pengelolaan TI di Perusahaan dilakukan melalui organisasi divisi TI yang terbentuk dari beberapa departemen,

5. Data classification and its explanation, including personal data, highly confidential data, and non-confidential data. Provisions on the storage of personal data and highly confidential data must be stored with the utmost secrecy, where access to such data will be granted based on need and maintained within the company's domain control system. Requests for new access or modifications can be made by submitting a request to the IT administrator through the approval of each division head.
6. Explanation on the ability to further secure the Company's infrastructure, business applications, data, and end-user devices from potential cyber security threats, including malware, viruses, and other threat actors. Applied measures include the deployment and investment in firewalls, VPNs, antivirus, web-filter technology, email security, and a Security Operations Center ("SOC") for cyber threat monitoring.
7. Provisions regarding business applications and the Company's IT Infrastructure that are equipped with password-protected access, and an audit trail of such access.

Strategy

In general, the Company's IT strategy focuses on the following:

1. Centralization of IT capabilities, and developing capabilities that can be shared.
2. Process automation for accuracy and speeding up business processes.
3. Continuous improvement in IT security.
4. Implementation of relevant new technology to ensure application support keeps up with business growth.
5. Development of IT personnel who also understand the business context.

This strategy is implemented to support the Company's business operations, making them more effective and efficient.

In executing this strategy, IT management at the Company is carried out through an IT division organization formed from several departments,

Teknologi Informasi Information Technology

seperti departemen TI Infrastruktur yang mengelola perangkat jaringan, server dan security, TI support & automation yang memberikan support dan resolusi masalah-masalah yang dihadapi users; serta TI applications yang mengembangkan dan mengelola aplikasi bisnis yang mendukung operasional business.

Inovasi

Inovasi dalam bidang TI merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode, atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja sistem informasi. Inovasi TI dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangan perangkat lunak baru, integrasi teknologi terkini, hingga penerapan konsep baru dalam manajemen data dan keamanan informasi.

Di tahun 2023, inovasi yang dikembangkan divisi TI dalam rangka akselerasi bisnis adalah sebagai berikut:

such as the IT Infrastructure department that manages network devices, servers, and security; IT support & automation that provides support and resolves issues faced by users; and IT applications that develop and manage business applications supporting business operations.

Innovation

Innovation in IT refers to the development and application of new ideas, methods, or technologies to improve efficiency, productivity, and the performance of information systems. IT innovation can come in various forms, from the development of new software, integration of the latest technology, to the implementation of new concepts in data management and information security.

In 2023, the innovations developed by the IT division for business acceleration are as follows:



Selama dua belas bulan terakhir, titik berat pengembangan aplikasi di Perusahaan ditujukan pada otomasi proses, menggunakan robotic process automation dan juga artificial intelligence,

Over the last twelve months, the focus of application development in the Company has been on process automation, using robotic process automation and artificial intelligence, ensuring that transactions



Teknologi Informasi Information Technology

sehingga transaksi dapat dijalankan dengan lebih cepat dan akurat. Disamping itu, aspek proses integrasi juga semakin dikembangkan Grup yang bertujuan untuk perbaikan efisiensi proses.

Integrasi sistem dan akurasi data ini juga dipergunakan untuk pembuatan operasional *dashboard* yang menjadi semacam portal untuk pengelolaan transaksi bisnis termasuk percepatan identifikasi permasalahan dan penanganan secara proaktif. Di sisi lain, inisiatif ini juga mampu mempermudah manajemen dalam melihat potret kondisi operasional pada waktu tertentu.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Saat ini, Perusahaan telah memiliki sistem dan perangkat perlindungan tambahan sebagai langkah proteksi keamanan Informasi di Perusahaan sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 270001 mengenai *Information Security Management System*.
2. Kebijakan Perlindungan Data (*IT Security Policy*)

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan *delivery* dan *value* kepada *stakeholder* Perusahaan. Dengan demikian Tata Kelola TI sangatlah penting dalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan dalam menyelaraskan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process* dan *Technology*.

Secara garis besar, tata kelola TI di Protelindo terbagi ke dalam 3 (tiga) proses, yaitu proses pengelolaan perangkat jaringan, server dan *security*, proses otomatis untuk memberikan *support* dan resolusi masalah-masalah yang dihadapi *users*, dan proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi bisnis untuk mendukung kegiatan operasional bisnis Perseroan.

Pada proses pengelolaan perangkat jaringan, server dan *security*, Perseroan telah memiliki kebijakan terkait dengan perlindungan data yang diatur dalam *IT Security policy* dimana Perseroan memberikan perlindungan atas data perusahaan, pribadi dan *supplier* termasuk jenis data penting, rahasia dan

can be conducted more swiftly and accurately. Moreover, the aspect of process integration is also being developed by the Group aimed at process efficiency improvement.

This system integration and data accuracy are also used for the creation of operational dashboards, which act as a portal for managing business transactions including the acceleration of problem identification and proactive handling. On the other hand, this initiative also facilitates the management to view the operational conditions at a given time.

Information Technology Infrastructure

Currently, the Company has additional systems and devices for information security protection in the Company as follows:

1. ISO 27001 certification regarding the *Information Security Management System*.
2. Data Protection Policy (*IT Security Policy*)

Information Technology Governance

Information Technology Governance is the process used to monitor and control the decision-making capabilities of information technology to ensure delivery and value to the Company's stakeholders. As such, IT Governance is crucial in supporting and achieving the Company's objectives by aligning organizational strategies and business goals. Good IT governance requires a balance between *People*, *Process*, and *Technology* aspects.

Broadly, IT governance at Protelindo is divided into three (3) processes: the management of network devices, servers, and security; automation processes to provide support and resolve issues faced by users; and the process of developing and managing business applications to support the Company's business operational activities.

In the process of managing network devices, servers, and security, the Company has a policy related to data protection regulated in the *IT Security policy* where the Company provides protection over company, personal, and supplier data including types of important, confidential, and sensitive data.

Teknologi Informasi Information Technology

sensitive. Perlindungan data ini dilakukan dengan pemberian akses data yang diatur sesuai kebutuhan bisnis dari masing-masing fungsi yang menjalankan bisnis serta mendapatkan persetujuan dari manajemen.

Selain itu, *IT Security Policy* juga menjelaskan langkah perlindungan yang sudah dijalankan terkait potensi *cyber security* dengan mengimplementasikan teknologi pendukungnya untuk melindungi dari ancaman *Cyber Crime*.

Keamanan Informasi

Sebagai komitmen dalam melindungi data, baik itu data Perusahaan maupun data pelanggan, Protelindo terus memperkuat keamanan siber dengan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memiliki ISO 27001: 2013.

This data protection is done by granting data access regulated according to the business needs of each function conducting the business and obtaining approval from management.

Additionally, the *IT Security Policy* also outlines protection steps already undertaken related to potential *cyber security* by implementing supporting technology to protect from *Cyber Crime* threats.

Information Security

As a commitment to protecting data, both Company and customer data, Protelindo continues to strengthen cyber security by making various efforts, including having ISO 27001: 2013.



Teknologi Informasi Information Technology

Dengan adanya ISO 27001:2013, Perseroan dapat melindungi segala informasi yang dimiliki oleh karyawan dan konsumen atau klien, baik itu digital, *hardcopy* atau *cloud*. Selain itu juga dapat mengantisipasi *cyber attack* dan mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif.

With ISO 27001:2013, the Company can protect all information owned by employees and consumers or clients, whether digital, *hardcopy*, or *cloud*. It also can anticipate *cyber-attacks* and manage information system security risks accurately and effectively.

PROSEDUR ESKALASI ATAS INSIDEN TI IT INCIDENT ESCALATION PROCEDURE

Departemen TI telah menetapkan prosedur atau mekanisme tata Kelola keamanan informasi dan proses eskalasi jika terjadi kejahatan siber. Adapun prosedur tersebut adalah:

The IT department has established procedures or mechanisms for information security governance and escalation processes in the event of cybercrime. These procedures include:



Head of IT akan memberikan update status kepada *Direktur Business Support* secara berkala jika diperlukan eskalasi atau tindakan lebih lanjut tergantung dari tingkat dan dampak dari insiden tersebut.

The *Head of IT* will provide status updates to the *Business Support Director* periodically if escalation or further action is required depending on the severity and impact of the incident.

Teknologi Informasi Information Technology

Implementasi Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2023

Perusahaan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap manajemen keamanan informasi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber yang andal dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Mengimplementasikan *software* antivirus pada semua perangkat laptop dan desktop *users*.
2. Mengaktifkan *firewall*, *webfilter*, dan *anti-spam*.
3. Menugaskan *team SOC (Security Operation Center)* untuk *me-monitoring* serta mengidentifikasi dan mitigasi jika ada risiko atau aktivitas yang mencurigakan pada jaringan perusahaan.

Information Security Management Implementation in 2023

The Company continuously makes improvements to information security management to enhance resilience and reliable cyber security through several efforts, such as:

1. Implementing antivirus software on all user laptops and desktops.
2. Activating firewalls, web filters, and anti-spam.
3. Assigning a *SOC (Security Operation Center)* team to monitor, identify, and mitigate any suspicious risks or activities on the Company's network.

Pengembangan SDM TI

Peningkatan kompetensi SDM TI sangat diperlukan untuk men-deliver rencana strategis TI. Perusahaan telah mendesain dan menjalankan rencana pengembangan kompetensi pegawai TI secara sistematis dan terstruktur melalui program berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan teknologi yang diimplementasikan pada Perusahaan.
2. Pengembangan kompetensi *managerial* melalui program pengembangan yang dikoordinasikan oleh Divisi HRD.
3. Pengembangan diri melalui "*Learning by Doing*", untuk mengembangkan pengetahuan karyawan akan dinamika dan proses bisnis Perusahaan.

IT Human Resources Development

Enhancing IT human resources competencies is crucial for delivering the IT strategic plan. The Company has designed and implemented a systematic and structured IT employee competence development plan through the following programs:

1. Developing technical competencies relevant to the technology implemented at the Company.
2. Developing managerial competencies through development programs coordinated by the HRD Division.
3. Self-development through "*Learning by Doing*" to enhance employee knowledge of the dynamics and business processes of the Company.

Teknologi Informasi Information Technology

Di tahun 2023, pegawai TI telah mengikuti serangkaian Pendidikan dan pelatihan berikut:

In 2023, IT employees have participated in the following series of Education and Training:

Tanggal Date	Nama Pelatihan Trainings	Jumlah Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizers
19 Februari 2023 February 19, 2023	Know Your Customer	1 orang person	Internal
7 Mei 2023 May 7, 2023	Effective Project Management	2 orang persons	External
22 Mei 2023 May 22, 2023	Asset Management: Requirements of ISO 55001:2014	1 orang person	External
23-24 Mei 2023 May 23-24, 2023	Fundamentals of Asset Management	1 orang person	External
13 Juni 2023 June 13, 2023	Strategic Decision-Making Training	1 orang person	External
Juni 2023 June 2023	Google Cloud Cost Optimization Technique	1 orang person	External
3 Juli 2023 July 3, 2023	Ms. Excel	3 orang persons	External
2-4 Agustus 2023 August 2-4, 2023	ISO Training	3 orang persons	External
9-10 Agustus 2023 August 9-10, 2023	Strategic Communication	2 orang persons	External
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Leader as a coach	2 orang persons	External
7 September 2023 September 7, 2023	Basic Training Microsoft 365 & Power Automate	1 orang person	External
12 September 2023 September 12, 2023	Collaboration of Excellence	2 orang persons	Internal
10 Oktober 2023 October 10, 2023	Decision Drivers: Fuelling Success Through Problem Solving	1 orang person	External
17 Oktober 2023 October 17, 2023	PDCA Mastery: The Continuous Improvement Workshop	1 orang person	External
1-2 November 2023 November 1-2, 2023	Data Privacy and Protection: Implementation and Its Challenges.	2 orang persons	External
27 November 2023 November 27, 2023	Fast Track Workshop Fortiproxy	3 orang persons	External
4 Desember 2023 December 4, 2023	Fast Track Workshop Fortigate	3 orang persons	External.
5 Desember 2023 December 5, 2023	Managing Tasks, Priorities, and Deadlines	1 orang person	Internal
9 Desember 2023 December 9, 2023	Present with Impact Escalating Your Presentation Skill	1 orang person	External

Teknologi Informasi Information Technology



Rencana TI Ke Depan

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, konsistensi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan sehingga tercipta sinergi yang efektif dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini akan mendukung pencapaian strategi TI yang telah ditetapkan, Berikut rencana kerja TI di tahun 2024:

1. Perbaiki sistem yang ada sehingga proses bisnis dan integrasi data semakin baik.
2. Modernisasi aplikasi untuk mendukung pengembangan volume dan kompleksitas bisnis Perusahaan, termasuk juga di mana relevan penggunaan teknologi terbaru seperti AI dan Automation untuk meningkatkan efisiensi proses di Perusahaan.
3. Mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis baru Perusahaan.

Future IT Plans

To achieve the desired outcomes, consistency in implementation is crucial to create an effective and targeted synergy. These steps will support the achievement of the established IT strategy. Here are the IT work plans for 2024:

1. Improvement of existing systems to ensure the enhancement of business processes and data integration.
2. Modernization of applications to support the development of the Company's business volume and complexity, including, where relevant, the use of the latest technologies such as AI and Automation to enhance process efficiency in the Company.
3. Supporting the expansion and development of the Company's new businesses.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG sangat berpengaruh terhadap kinerja dan performa perusahaan. Sebab itu, Perseroan melakukan asesmen atau penilaian penerapan GCG secara berkala.

The Company believes that GCG implementation greatly influential to the company's performance, as such the Company conducts periodic GCG assessments.

05



TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Protelindo dalam menerapkan GCG secara berkelanjutan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran bisnis jangka pendek dan jangka panjang, menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan memberikan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan.



Protelindo's commitment to adopting sustainable implementation of GCG seeks to support the fulfilment of short- and long-term business goals, to maintain the Company's business continuity while boosting shareholder trust, and to provide added value to all stakeholders.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*) adalah salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perseroan dan meyakini bahwa Perseroan telah dikelola dengan baik dan tepat serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan para pemegang saham.

Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, Protelindo mengadopsi standar global (*best practices*) serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi. Pada tahun 2023, Protelindo telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup tata Kelola Perusahaan, di antaranya penelaahan atas Pedoman Perilaku (*Code of Conducts*) serta penerapannya di dalam Grup Perseroan, peninjauan dan penyempurnaan atas Pedoman Anti Korupsi dan Anti Penyuapan (*Anti-Corruption and Anti Bribery*), peninjauan atas pelaksanaan CGG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) versi 2023, peninjauan atas pelaksanaan GCG yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan GRI *standard* dan lembaga *rating* ESG lainnya serta penggunaan teknologi informasi secara lebih luas (antara lain, situs web Perseroan, media sosial) sebagai media keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendorong penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dan sebagai bentuk dukungan Protelindo kepada regulator dalam menerapkan peraturan yang berkaitan dengan implementasi GCG. Pada tahun 2023, SMN sebagai perusahaan *holding* kembali meminta pihak ketiga *independent* untuk melakukan *assessment* atas penerapan ACGS dimana berdasarkan penilaian tersebut, SMN berhasil memperbaiki *rating* ACGS. SMN berkomitmen untuk terus meningkatkan rating tersebut secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Selain dari ACGS, SMN juga terus melakukan penelaahan atas *independent report* yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan implementasi GCG yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan GRI *standard* dan lembaga *rating* ESG lainnya. Hasil penilaian GCG SMN akan menjadi dasar untuk peninjauan ulang atas kebijakan-kebijakan internal dan implementasi praktik GCG bagi perusahaan-perusahaan dalam Grup.

COMMITMENT TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Good Corporate Governance (GCG) is one of the key indicators for shareholders to evaluate the Company's performance and ensure the Company has been managed properly and appropriately and is capable of protecting shareholders' interests

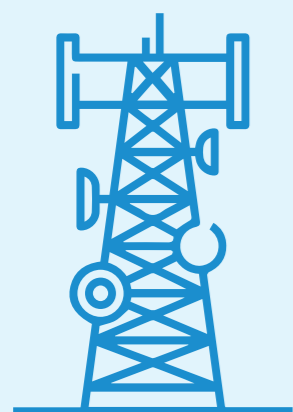
As part of its comprehensive implementation of GCG, Protelindo adopts global standards (*best practices*) and adheres to the requirements outlined in prevailing regulations. In 2023, Protelindo has made several improvements in the scope of Corporate Governance, including a review of the Code of Conduct and its implementation within the Corporate Group, revision and refinement of the Anti-Corruption and Anti-Bribery Guidelines, review of the implementation of GCG based on the 2023 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), review of the implementation of GCG closely related to sustainability principles in accordance with GRI standards and other ESG rating agencies, and the broader use of information technology (including, among others, the Company's website, social media) as a means of information disclosure to stakeholders.

To promote the adoption of good corporate governance practices and as a mean of Protelindo's support to regulators in establishing regulations pertaining to the implementation of GCG, SMN as the holding company re-engaged an independent third party to evaluate the implementation of the ACGS in 2023. Based on this assessment, SMN successfully improved its ACGS rating. SMN is committed to significantly improve this rating in the years to come. Apart from the ACGS, SMN also continues to review independent reports provided by third parties related to the implementation of GCG, which are closely related to sustainability principles in line with the GRI standard and other ESG rating agencies. The GCG assessment results for SMN will serve as a basis for revising internal policies and implementing GCG practices for companies within the Group.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

CAPAIAN PENERAPAN GCG PERUSAHAAN ACHIEVEMENTS OF THE COMPANY'S GCG PRACTICES

TOWER



- TrenAsia ESG Awards 2023 kategori Communication & Business Provider dengan predikat "Action"*
- TrenAsia ESG Awards 2023 Best CEO of Social*
- investortrust ESG Disclosure Transparency Awards 2023 dengan predikat Management BB*
- Peningkatan ESG rating MSCI di tahun 2023 dari semula BB menjadi BBB | MSCI rating ESG increase in 2023 from BB to BBB*
- Peningkatan ESG rating Sustainalytics di tahun 2023 dari ESG Risk Rating semula 26.7 menjadi 26.3 | ESG Sustainalytics rating increase in 2023 from ESG Risk Rerating 26.7 to 26.3*
- Protelindo Group Corporate Legal Division has included in the GC Powerlist Southeast Asia Teams 2023*

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG

DAN

PEDOMAN

REFERENCES OF GCG IMPLEMENTATION

Dalam mengimplementasikan GCG, Perseroan mendasarkan diri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan otoritas pasar modal dan *best practice*, serta pada peraturan internal Perseroan, yang beberapa di antaranya meliputi antara lain:

In implementing GCG, the Company refers to the prevailing laws and regulations including capital market authority regulations and best practices, as well as the Company's internal regulations, among other as follows:

No.	Peraturan Regulations
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning Capital Market as amended by UUP2SK
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain: Regulation of the Financial Services Authority (POJK) and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK), as follows:

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

No.	Peraturan Regulations
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. • POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. • POJK No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. • POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Working Implementation Guidelines for Audit Committee.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. • POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. • POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.
	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. • POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Companies.
	<ul style="list-style-type: none"> • SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. • SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for the Governance of Public Companies.
4.	Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014; Indonesia's Corporate Governance Roadmap submitted through OJK press release on February 4, 2014;
5.	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF); ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6.	Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); General Guidelines for GCG Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
7.	Anggaran Dasar Perseroan; The Company's Articles of Association;
8.	Peraturan Internal Perseroan (mencakup didalamnya Pedoman Perilaku (Code of Conducts), Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Charters</i>), Anti Corruption and Anti Bribery Policy, Whistleblowing Policy, Peraturan Perusahaan, Vendor Management Policy, serta kebijakan- kebijakan Perseroan lainnya terkait GCG). The Company's Internal Regulations (including the Code of Conducts, Board Charters, Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy, Whistleblowing Policy, Company Regulations, Vendor Management Policy, and other Company policies related to GCG).

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

PENERAPAN PRINSIP GCG

Penerapan GCG di Perseroan dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap lini organisasi dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas usaha sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The implementation of GCG in the Company is built based on strong integrity, hence the principles of good governance can be implemented in every line of the organization and carried out in every business activity to achieve consistent and sustainable operational activities. To manifest the implementation of good governance, the Company adheres to the basic principles of GCG in accordance with the INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE GENERAL GUIDELINES (PUG-KI) 2021 that have been updated by the Governance Policy National Committee (KNKG), namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation
Perilaku Beretika Ethical Conduct	<p>Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.</p> <p>In carrying out its activities, the company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.</p>
Akuntabilitas Accountability	<p>Korporasi dapat memperTanggung Jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.</p> <p>The company can account for its performance transparently and reasonably. As such, the company must be managed correctly, measurably and in accordance with company interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.</p>
Transparansi Transparency	<p>Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>To maintain objectivity in conducting business, the company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.</p>
Keberlanjutan Sustainability	<p>Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.</p> <p>The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibility towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve community lives in a way that is in line with business interests and the sustainable development agenda.</p>

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN GCG DI PROTELINDO

Implementasi GCG di Protelindo berawal dari kesadaran (*awareness*) Perseroan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting diterapkan guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan bagi Grup. Sebagai tindak lanjut dari *awareness* dan untuk mengukur kualitas penerapan GCG, maka Protelindo melaksanakan asesmen setiap tahunnya yang dilakukan baik secara *self-assesment* maupun melalui asesor independen. Dari asesmen tersebut, menghasilkan saran dan rekomendasi yang dipenuhi dalam upaya melakukan evaluasi dan memaksimalkan praktik terbaik GCG di lingkup Group (*improvement*).

Hasil *assessment* dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada manajemen Perseroan untuk selanjutnya ditindaklanjuti berupa peninjauan ulang, penyusunan maupun penyesuaian atas kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perseroan saat ini, termasuk kebijakan terkait dengan *issue-issue* keberlanjutan. Adapun kebijakan-kebijakan GCG yang dimiliki Perseroan hingga saat ini, antara lain adalah Pedoman Perilaku, Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Charters*), *Whistleblowing Policy*, *Anti-Corruption* and *Anti Bribery Policy*, Peraturan Perusahaan, *Internal Audit Policy*, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, *Nomination* and *Remuneration Policy*, *Vendor Management Policy*, serta kebijakan lainnya yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan di atas ditinjau ulang secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan praktik terbaik, kebutuhan dan perkembangan bisnis Grup Perseroan serta perubahan peraturan dan perundangan yang berlaku.

INTERNALISASI GCG

Guna memberikan pemahaman tentang penerapan GCG serta sejauh mana implementasi GCG di Protelindo telah dilaksanakan, Perseroan terus melaksanakan sosialisasi implementasi GCG pada karyawan, termasuk penerapan GCG terkait

GCG IMPLEMENTATION AND POLICY IN PROTELINDO

The adoption of GCG in Protelindo began with the Company's awareness that Good Corporate Governance practises must be applied in order to increase shareholder and stakeholder trust and realise a sustainable business for the Group As a follow-up to raising awareness and measuring the quality of GCG implementation, Protelindo conducts assessments on an annual basis, using both self-assessment and external assessors. The assessment shall provide suggestions and recommendations to evaluate and maximise GCG best practises within the Group (improvement).

The assessment results and recommendations are submitted to the Company's management for further follow-up in the form of review, preparation and adjustment of the Company's current policies, including policies related to sustainability issues. The Company's current GCG policies include the Code of Conduct (CoC), Board Charters, Whistleblowing Policy, Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy, Company Regulations, Internal Audit Policy, Risk Management Policy Guidelines, Nomination and Remuneration Policy, Vendor Management Policy, and other policies that consistently and sustainably support GCG implementation.

Those policies are updated frequently to reflect best practises, conditions and developments within the Company's business environment, as well as changes in prevailing laws and regulations.

GCG DISSEMINATIONS

The Company has disseminated GCG implementation to employees to create an awareness of GCG implementation and the extent to which GCG implementation in Protelindo has been deployed. GCG practices was socialised

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

dengan *issue-issue* keberlanjutan, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing serta mensyaratkan adanya *acknowledgement* oleh karyawan atas Peraturan Perusahaan dan kebijakan terkait GCG lainnya.

Penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi internal Perseroan, antara lain internal *announcement*, kegiatan ke karyawan (*employee engagement*) maupun komunikasi dan sosialisasi melalui portal internal Perseroan yang dapat dilihat dengan mudah dan dijangkau secara luas oleh pegawai Perseroan.

PENILAIAN PENERAPAN GCG PERSEROAN

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG sangat berpengaruh terhadap kinerja dan performa perusahaan. Sebab itu, Perseroan melakukan asesmen atau penilaian penerapan GCG secara berkala. Selain mendapatkan informasi konkret tentang penerapan di lapangan selama periode laporan yang dinilai, rekomendasi asesmen bisa menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi GCG yang dinilai masih perlu disempurnakan.

Di tahun 2023, SMN sebagai Perusahaan Holding melakukan penilaian penerapan GCG melalui 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Penilaian Penerapan GCG (termasuk yang terkait dengan parameter ESG) yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, antara lain berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard dan ESG parameter yang dikeluarkan oleh lembaga *rating* ESG
3. Penilaian Penerapan GCG (termasuk terkait dengan parameter ESG) yang dilakukan secara self-assessment oleh divisi Corporate Secretary, antara lain berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard, ESG parameter yang dikeluarkan oleh lembaga *rating* ESG, serta *feedback* yang diperoleh dari para pemangku kepentingan lainnya.

among employees in the Induction programme for new employees in 2023.

GCG values is also instilled through various internal communication channels of the Company, including internal announcements, employee engagement activities as well as communication and dissemination through the Company's internal portal which can be easily accessed and widely reached by Company employees.

GCG ASSESSMENT

The Company believes that GCG implementation greatly influential to the company's performance, as such the Company conducts periodic GCG assessments. In addition to obtaining concrete information on actual GCG implementation during the assessed reporting period, assessment recommendations can be used to improve areas of GCG deemed to need refining.

In 2023, SMN as the Holding Company has carried out GCG assessment through 2 (two) assessment models, as follows:

1. GCG Assessment Based on Financial Services Authority (OJK) Regulations
2. GCG Assessment (including those related to ESG parameters) conducted by independent third parties, among others based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters and ESG parameters issued by ESG rating agencies.
3. GCG Assessment (including related to ESG parameters) conducted by self-assessment by the Corporate Secretary division, among others based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters, ESG parameters issued by ESG rating agencies, and feedback obtained from other stakeholders.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara umum, Protelindo telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG.

GCG Assessment Based on Financial Services Authority (OJK) Regulations

In general, Protelindo has implemented all regulations issued by OJK, and will continue to strive to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. Particularly related to the Public Company Governance Regulation stipulated under OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, which is described in OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on Public Company Governance Guidelines. The guidelines contain 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 recommendations for the implementation of GCG aspects and principles.

Tabel Pemenuhan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Good Corporate Governance Compliance

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
A.	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
1.	Prinsip 1 / Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All Members of the Directors and Board of Commissioners are present at Annual GMS.	Terpenuhi Comply
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS Minutes is available on public company's Website by no less than 1 (one) year.	Terpenuhi Comply
2.	Prinsip 2 / Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau Investor. Public company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi Comply
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public company discloses its communication policy with shareholders or investors in Website.	Terpenuhi Comply

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
B	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
	Prinsip 3 / Principle 3 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of number of Board of Commissioners' members shall consider the conditions of Public Company.	Terpenuhi Comply
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Composition of Board of Commissioners' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
4	Prinsip 4 / Principle 4 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Commissioners	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self Assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in Annual Report of Public Company.	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of the member of the Board of Commissioners if such member is involved in financial crime.	Terpenuhi Comply
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that conduct the Nomination and Remuneration functions arrange succession policy in nomination process of members of Board of Directors.	Terpenuhi Comply
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' FUNCTIONS AND ROLES	
	Prinsip 5 / Principle 5 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of number of Board of Directors' members considers the condition of public company and the effectiveness of decision-making.	Terpenuhi Comply
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of Board of Directors who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/or knowledge.	Terpenuhi Comply

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
6	Prinsip 6 / Principle 6 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has self assessment policy to assess performance of Directors.	Terpenuhi Comply
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in Annual Report of public company.	Terpenuhi Comply
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Directors' members involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
D	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS	
7	Prinsip 7 / Principle 7 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public Company has a policy to prevent insider trading.	Terpenuhi Comply
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . Public company has anti corruption and anti fraud policy.	Terpenuhi Comply
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public company has a policy concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	Terpenuhi Comply
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Public company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.	Terpenuhi Comply
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> . Public company has a policy of Whistleblowing System.	Terpenuhi Comply
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. Public company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	Terpenuhi Comply
E	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	
8	Prinsip 8 / Principle 8 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Improving the Implementation of Information Disclosure	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company takes benefits from application of a broader information technology other than website as information disclosure media.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan dan pengendali. Annual Report of public company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5% (five percent), other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Penilaian GCG Berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard

SMN dan anak perusahaannya, termasuk Protelindo, berupaya untuk terus meningkatkan tata kelolanya melalui penilaian GCG dengan menggunakan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Melalui pengkajian yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tingkatan, SMN berupaya untuk memenuhi 5 aspek dalam tingkat 1 (satu) yang terdiri dari 5 (lima) prinsip dengan total 146 pertanyaan, yaitu:

1. Prinsip A - Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham terdiri dari 30 pertanyaan dengan bobot penilaian hingga 22%.
2. Prinsip C - Keberlanjutan dan Ketahanan terdiri dari 22 pertanyaan dengan bobot penilaian hingga 14%.
3. Prinsip D - Pengungkapan dan Transparansi terdiri dari 34 pertanyaan dengan bobot penilaian sebesar 25%.
4. Prinsip E - Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari 63 pertanyaan dengan bobot penilaian 39%.

Sedangkan pada tingkat 2 yaitu bonus dan penalti, di mana:

- Bonus terdiri dari 18 pertanyaan dengan total skor mencapai 30 poin
- Penalti terdiri dari 26 pertanyaan dengan total skor mencapai minus 69 poin.

Penilaian ACGS Tahun 2023

Pada tahun 2023, SMN sebagai Perusahaan Holding kembali meminta pihak ketiga independen untuk melakukan *assessment* atas penerapan ASEAN CG Scorecard dimana berdasarkan penilaian tersebut, SMN berhasil memperbaiki *rating* ASEAN CG Scorecard dan berkomitmen untuk terus meningkatkan *rating* tersebut secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

SMN and its subsidiaries, including Protelindo, strives to continuously improve its governance through GCG assessment using the parameters of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Through studies grouped into 2 (two) levels, SMN strives to fulfill 5 aspects in level 1 (one) consisting of 5 (five) principles with a total of 146 questions, as follows:

1. Principle A - Rights and Equitable Treatment of Shareholders consists of 30 questions with a valuation weight of up to 22%
2. Principle C - Sustainability and Resilience consists of 22 questions with an assessment weight of up to 14%
3. Principle D - Disclosure and Transparency consists of 34 questions with an assessment weight of 25%
4. Principle E - Responsibilities of the Board consists of 63 questions with an assessment weight of 39%.

While at level 2 are bonuses and penalties, where:

- The bonus consists of 18 questions with a total score of 30 points
- The penalty consists of 26 questions with a total score of minuses 69 points.

ACGS Assessment 2023

In 2023, SMN as the Holding Company re-engaged an independent third party to conduct an assessment for the implementation of the ASEAN CG Scorecard, whereby based on this assessment, SMN succeeded in improving the ASEAN CG Scorecard rating and is committed to continuing to significantly improve the rating in the years to come.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG DI PROTELINDO

Struktur dan Mekanisme

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang pasar modal terkait, implementasi GCG di lingkungan perusahaan dijalankan melalui 4 pilar Tata Kelola yang baik, yakni:

- Governance Commitment:** yang diadopsi dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Perseroan dalam bentuk antara lain Pedoman perusahaan dan kebijakan internal terkait GCG lainnya.
- Governance Structure:** berupa organ perusahaan utama, yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, serta organ pendukung lainnya, yakni komite-komite dan unit kerja di bawah Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan GCG serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perseroan.
- Governance Process:** hubungan dengan pemangku kepentingan serta perumus kebijakan dan pengambil Keputusan terkait.
- Governance Outcome:** berupa strategi dan penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

GCG STRUCTURE AND MECHANISM IN PROTELINDO

Structures and Mechanisms

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and related capital market regulations, the implementation of GCG within the Company is carried out through 4 pillars of Good Governance, namely:

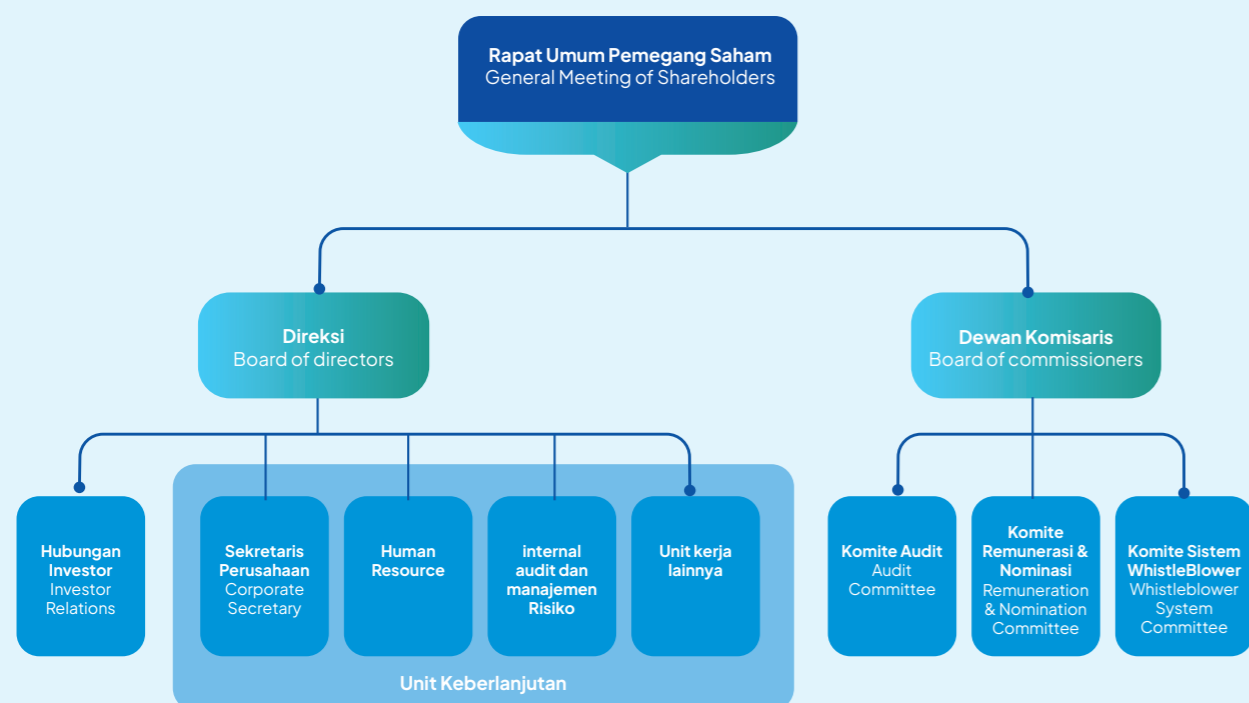
- Governance Commitment:** which is adopted and is an elaboration of the Company's vision and mission in the form of, among others, corporate guidelines and other GCG-related internal policies.
- Governance Structure:** the main corporate organ, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, as well as other supporting organs, namely committees and work units under the Board of Directors and Board of Commissioners. In line with the Articles of Association and relevant laws and regulations, each organ has a key role in implementing GCG and carrying out respective functions, duties, and responsibilities for the benefit of the Company.
- Governance Process:** relationships with stakeholders as well as policy makers and related decision makers.
- Governance Outcome:** the strategy and application of corporate governance principles.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Governance Commitment

Visi, Misi, Pedoman Perseroan, Kebijakan Internal GCG
Vision, Mission, Corporate Guidelines, GCG Internal Policies

Governance Structure



Governance Process

Hubungan dengan pemangku kepentingan, perumus kebijakan dan pengambil Keputusan terkait.
Relationships with stakeholders, policy makers and related decision makers.

Governance Outcome

Strategi dan penerapan prinsip-prinsip GCG
Strategy and GCG principles application

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka Panjang. RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun, dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Secara umum, RUPS Perseroan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Semua keputusan RUPS diusahakan untuk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Persyaratan kuorum dan pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku dalam hal RUPS mengambil keputusan untuk menyetujui hal-hal tertentu, seperti penggabungan dan/atau peleburan Perseroan. Ketentuan mengenai hal-hal terkait RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Perseroan mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is an organ of the Company endowed with authorities beyond those delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the Limited Liability Company Law and/or the Articles of Association of the Company. The GMS serves as a forum for shareholders to exercise their rights to voice opinions and obtain information pertaining to the Company, provided that such matters are pertinent to the meeting’s agenda, do not contradict the Company’s interests, and comply with the regulations and provisions outlined in the Articles of Association and laws and regulations.

The Company’s long-term business interests must direct the decisions made during the GMS. The GMS consists of an Annual GMS, which is conducted annually, and an Extraordinary GMS, which may be convened whenever necessary.

The Company’s GMS may generally be convened with an attendance of shareholders that represent more than half of the total shares issued by the Company. All GMS decisions are sought to be taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken based on the affirmative vote of more than 50% of all shares with voting rights present at the GMS.

Different and higher quorum and GMS voting requirements apply in the event that the GMS takes a decision to approve certain matters, such as merger and/or consolidation of the Company. Provisions regarding matters related to the GMS are regulated in the Company’s Articles of Association.

LEGAL REFERENCES

The legal basis for the implementation of the Company’s GMS refers to several regulations as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
4. Hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS serta hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS. Formulir surat kuasa tersedia pada situs web perusahaan;
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi terkait mata acara rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Articles of Association of the Company.

RIGHTS AND AUTHORITY OF SHAREHOLDERS IN GMS

Shareholders are legitimate owners of shares of the Company, which may be individuals or legal entities. The Board of Directors may be requested to call and convene an Extraordinary GMS by shareholders individually or collectively representing a minimum of 1/10 of the total shares of the Company or the Board of Commissioners, in line with the regulations set forth by the Financial Services Authority (OJK). The request must be submitted in writing to the Company's Board of Directors, stating the matters to be discussed along with the reasons and fulfilling other provisions as required in the Company's Articles of Association.

The shareholders are entitled to hold the following authority through the GMS:

1. Approve the changes to the Company's Articles of Association;
2. Appoint and dismiss members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners;
3. Approval of the Annual Report and Financial Statements;
4. Other matters in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Shareholders Rights in the GMS

The rights of shareholders in the GMS include:

1. The right to attend and vote at the GMS and the right to authorize other parties if shareholders are unable to attend the GMS. The proxy form is available on the Company's website;
2. The right to propose the agenda of the GMS and candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights;
3. At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information related to the agenda of the meeting in accordance with prevailing laws and regulations;

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

4. Hak untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS;
5. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga memiliki hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba perusahaan, termasuk pembagian dividen.

Hak Pemegang Saham Independen

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Perseroan melakukan transaksi afiliasi yang (i) mengandung benturan kepentingan, (ii) nilainya memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; (iii) dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan dan/atau (iv) berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan (yang dapat diakses pada situs web Perseroan), secara rinci diatur mengenai hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham. Berdasarkan susunan permodalan Perseroan, Perseroan hanya memiliki 1 kelas saham, dimana masing-masing pemegang saham memiliki hak dan kewenangan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. The right to ask questions in every discussion of the agenda and every decision on the GMS agenda;
5. Receive part of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and other profit distribution in accordance with prevailing laws and regulations.
6. Shareholders also have other rights, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, among others (i) appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, (ii) evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, (iii) suspend members of the Board of Directors, (iv) approve amendments to the Articles of Association, (v) approve the annual report, (vi) approve the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, and (vii) approve the proposed allocation of the use of company profits, including dividend distribution.

Rights of Independent Shareholders

In compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, the Company is required to obtain the approval of Independent Shareholders in the General Meeting of Shareholders in the event the Company undertakes affiliate transactions that (i) involve a conflict of interest, (ii) the value of which meets the threshold for material transaction values that require GMS' approval; (iii) may disrupt the Company's business continuity and/or (iv) based on the Financial Services Authority's consideration requires the approval of Independent Shareholders.

In the Company's Articles of Association (which can be accessed on the Company's website), details are set forth regarding the rights, authorities, and responsibilities of Shareholders. Based on the composition of the Company's capital, the Company only has 1 class of shares, where each shareholder has the same rights and authorities in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Hak-hak Pemegang Saham sesuai kriteria ACGS

Dalam rangka meningkatkan *assessment* ACGS secara signifikan, Perseroan menjabarkan hak pemegang saham sesuai kriteria ACGS, sebagai berikut:

- Perseroan membayar dividen (interim dan final/ tahunan) secara adil dan tepat waktu. Artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final.
- Dalam hal merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan hak pemegang saham, Direksi/Komisaris Perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi.
- Perseroan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham untuk terlibat dengan Perseroan di luar RUPS.
- Perseroan mempraktikkan pemungutan suara elektronik yang aman secara *real time* secara *absentia* pada RUPS.
- Perseroan merilis pemberitahuan RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan), seperti yang diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat.
- Perseroan memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham.
- Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip GCG.
- Perseroan mengungkapkan struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas.
- Perseroan memberlakukan larangan *insider trading* sebagai bentuk perlakuan yang adil terhadap pemegang saham.
- Perseroan melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan.
- Perseroan memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam amandemen konstitusi perusahaan, otorisasi saham

Shareholder Rights in accordance with ACGS criteria

In order to significantly improve the ACGS *assessment*, the Company describes the rights of shareholders in accordance with ACGS criteria, as follows:

- The Company pays dividends (interim and final/ annual) fairly and on time. That is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after (i) it is declared for the interim dividend and (ii) approved by the shareholders at the general meeting for the final dividend.
- In the event of a merger, acquisition and/or takeover that requires shareholder rights, the Company's Board of Directors/Commissioners appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price.
- The Company disclosed its practice to encourage shareholders to engage with the Company outside of the GMS.
- The Company practices secure electronic voting in real time in *absentia* at the GMS.
- The Company releases the notice of AGMS (with detailed agenda and explanatory circular), as announced to the Exchange, at least 28 days prior to the meeting date.
- The Company provides equal treatment for share buybacks to all shareholders.
- Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult each other on issues concerning the fundamental rights of their shareholders as defined in the GCG Principles.
- The Company discloses capital structures and arrangements that allow certain shareholders to gain a degree of control disproportionate to equity ownership.
- The Company imposed a ban on insider trading as a form of fair treatment for shareholders.
- The Company protects minority shareholders from abuse.
- The Company entitles shareholders to participate in amendments to the corporate constitution, authorization of additional shares,

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

tambahan, pengalihan semua atau secara substansial semua set, yang pada dasarnya menghasilkan penjualan perusahaan, dan definisi saham biasa merupakan satu suara untuk satu saham.

- Perseroan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia untuk pasar.
- Perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan direksi/komisaris untuk mengungkapkan kepentingannya dalam transaksi dan benturan kepentingan lainnya.
- Perseroan memberikan rincian kehadiran masing-masing direktur/komisaris dalam seluruh rapat direksi/komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun berjalan.
- Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diadakan pada tahun 2024 ("RUPST 2024"), Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk dapat memilih calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual. Agenda pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini telah dituangkan dalam masing-masing mata acara Rapat (beserta penjelasannya) yang telah disampaikan pada saat Pemanggilan RUPST 2024.
- Pada pelaksanaan RUPST 2024, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk dapat memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024. Agenda persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik beserta dengan profilnya telah dituangkan dalam mata acara rapat (beserta penjelasannya) yang telah disampaikan pada saat Pemanggilan RUPST 2024.

transfer of all or substantially all sets, which essentially results in the sale of the company, and the definition of common stock constitutes one vote for one share.

- The Company has policies and/or regulations that prohibit directors/commissioners and employees from benefiting from knowledge that is generally not available to the market.
- The Company has a policy that requires directors/commissioners to disclose their interests in transactions and other conflicts of interest.
- The Company provides details of the presence of each director/commissioner in all meetings of the board of directors/commissioners held throughout the year.
- At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, to be held in 2024 ("AGMS 2024"), the Company has provided the opportunity for shareholders to individually select candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners. The agenda for the appointment of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners has been included in each meeting item (with its explanation) that was presented at the time of the AGMS 2024 Invitation.
- At the AGMS 2024, the Company has given shareholders the opportunity to approve the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant who will review the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024. The agenda for approval of the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant along with their profiles has been included in the meeting items (along with its explanation) that was presented at the time of the AGMS 2024 Invitation.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

PENGUNGKAPAN PRAKTIK UNTUK MENDORONG KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS

Mengungkapkan praktik untuk mendorong keterlibatan pemegang saham di luar RUPS adalah aspek penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan dengan investor. Praktik-praktik ini bertujuan untuk mendorong dialog yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan antara Perseroan dan pemegang saham, memastikan bahwa Perseroan memiliki informasi yang baik dan terlibat aktif dalam Perseroan di luar formalitas RUPST atau RUPSLB. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik yang diadopsi Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- Update dan Komunikasi Rutin**
 - Buletin Investor: Buletin reguler untuk memberikan informasi ter-update kepada pemegang saham mengenai kinerja perusahaan, keputusan strategis, dan peristiwa penting terbaru.
 - Situs Web Hubungan Investor (IR): Bagian di situs web perusahaan yang didedikasikan untuk hubungan investor untuk memberikan beragam informasi, termasuk siaran pers, laporan keuangan, presentasi investor, dan kalender acara.
- Pelaporan yang Transparan**
Lebih dari persyaratan pelaporan minimum untuk memberikan penjelasan rinci tentang strategi, risiko, dan peluang perusahaan, yang meliputi laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, pengungkapan terperinci tentang dampak sosial dan lingkungan, dan pernyataan berwawasan ke depan.
- Penggunaan Teknologi**
Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kehadiran virtual di rapat, pemungutan suara *real-time*, dan partisipasi dalam diskusi. Hal ini telah membantu meningkatkan tingkat partisipasi, terutama di kalangan investor internasional atau nasional yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung.

DISCLOSURE OF PRACTICES TO ENCOURAGE SHAREHOLDER ENGAGEMENT BEYOND GENERAL MEETINGS

Disclosing practices to encourage shareholder engagement beyond general meetings is a vital aspect of enhancing corporate governance and building trust with investors. These practices aim to foster a transparent, inclusive, and continuous dialogue between the Company and its shareholders, ensuring that the latter are well-informed and actively involved in the Company's affairs beyond the formalities of AGMS or EGMS. Here are several strategies and practices that the Company adopts to achieve this goal:

- Regular Updates and Communications**
 - Investor Newsletters: Regular newsletters to provide shareholders with updates on company performance, strategic decisions, and upcoming events.
 - Dedicated Investor Relations (IR) Website Section: A section on the company's website dedicated to investor relations to provide various of information, including press releases, financial reports, investor presentations, and a calendar of events.
- Transparent Reporting**
Going beyond the minimum reporting requirements to provide detailed explanations of the Company's strategies, risks, and opportunities. This includes annual reports, financial statements, sustainability reports, detailed disclosures on social and environmental impact, and forward-looking statements.
- Use of Technology**
Leveraging technology to facilitate virtual attendance at meetings, real-time voting, and participation in discussions. This can help to increase participation rates, especially among international or retail investors who might not be able to attend in person.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

- Komunikasi antar Pemegang Saham
Perseroan tidak mengatur mengenai adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi satu dengan lainnya.

- Communication Among Shareholders
The Company does not regulate any restrictions for shareholders to communicate or consult with one another.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Protelindo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui resolusi yang beredar sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 5 Mei 2023.

IMPLEMENTATION OF GMS IN 2023

In 2023, Protelindo conducted the Annual General Meeting of Shareholders through a circular resolution in lieu of Annual General Meeting of Shareholders, on May 5, 2023.

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2023

Protelindo terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari seluruh keputusan RUPS Tahun 2023, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa secara berkelanjutan dan dilaporkan secara periodik kepada Pemegang Saham. Berikut penjelasan atas setiap mata acara RUPST Tahun 2023:

GMS RESOLUTIONS IN 2023

Protelindo continues to monitor the follow-up and realization status of all resolutions of the 2023 GMS, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS, on an ongoing basis and reported periodically to the Shareholders. The following is an explanation of each agenda of the 2023 AGM:

Mata Acara Pertama	First Agenda
Mata Acara <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022, yang antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022, rincian yang ditetapkan dalam butir (ii) di bawah; (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022; Memperoleh pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2022 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, sebagaimana diaudit oleh akuntan publik Purwanto, Sungkoro & Surja; dan Memperoleh pelepasan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari semua kewajiban yang timbul dari hal-hal yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2022 dan dimuat dalam Laporan Keuangan yang mengacu pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. 	Agenda <ol style="list-style-type: none"> Seek and obtain an approval from the Shareholders of the Annual Report of the Company for the year 2022, which among others, contains: (1) the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, details of which are set out in item (ii) below; (2) a report on the affairs and management of the Company for the financial year ended December 31, 2022; (3) the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022, and (4) the results that have been achieved during the financial year ended December 31, 2022; Seek and obtain ratification for the Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2022 and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2022, as contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year of December 31, 2022, as audited by the public accounting firm Purwanto, Sungkoro & Surja; Seek and obtain a full release and discharge (acquit et de charge) of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all liabilities arising from the matters that were reported in the 2022 Annual Report and were contained in the Financial Statements referring to the year ended December 31, 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Pertama	First Agenda
<p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Memutuskan, untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022, yang, antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022, sebagaimana diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja; (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022, dan sehubungan dengan itu, untuk meratifikasi semua hal yang terkandung dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020, termasuk laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022; Memutuskan, untuk mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2022 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, yang diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja; dan Memutuskan, untuk memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya dari setiap dan semua tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan manajemen urusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua Tindakan pengawasan atas urusan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2022. 	<p>Resolutions</p> <ol style="list-style-type: none"> Resolved, to approve the Company's Annual Report for the year 2022 which among others, contains: (1) the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, as audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro & Surja; (2) a report on the affairs and management of the Company for the financial year ended December 31, 2022; (3) the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022, and (4) the results that have been achieved during the financial year ended December 31, 2022, and in connection therewith, to ratify all matters contained in the Company's Annual Report for the year 2022, including the report on the supervisory function of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2022; Resolved, to ratify the Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2022 and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as of December 31, 2022, as contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year of December 31, 2022, as audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro & Surja; and Resolved, to grant full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2022.
<p>Realisasi</p> <p>Telah terealisasikan.</p>	<p>Realization</p> <p>Has been realized.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Kedua	Second Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>Keputusan</p> <p>Memutuskan, bahwa laba bersih Perseroan untuk tahun 2022, yang berjumlah sekitar Rp3.529.958.000.000, akan disesuaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah Rp1.234.185.142.247,20 akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemegang Saham; Bahwa sesuai dengan Keputusan Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Desember 2022, Perseroan telah membagikan dividen tunai interim kepada Pemegang Saham untuk tahun buku 2022 sebesar Rp321.793.638.897. Dengan demikian, sisa dividen tunai sebesar Rp912.391.503.350,20 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 akan disesuaikan dengan Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> SMN akan menerima dividen tunai sebesar Rp912.391.503.075,60; dan FAS akan menerima dividen tunai sebesar Rp274,60; Sejumlah Rp100.000.000,- akan digunakan sebagai dana cadangan, dengan sisa laba Perusahaan dialokasikan sebagai laba ditahan; 	<p>Agenda</p> <p>Seek and obtain an approval of the plan to use the net income of the Company for the financial year ended on December 31, 2022.</p> <p>Resolutions</p> <p>Resolved, that the Company's net profits for 2022, which amounted to around Rp3,529,958,000,000, will be appropriated as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> An amount of Rp1,234,185,142,247.20 will be distributed as cash dividends for the financial year ended December 31, 2022 to the Shareholders; Whereas, in accordance with the Resolutions in Lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated 6 December 2022, the Company has distributed interim cash dividends to the Shareholders for the financial year 2022 in the amount of Rp321,793,638,897. Whereas, as such, the remaining amount of the cash dividends Rp912,391,503,350.20 for the financial year ended December 31, 2022 will be appropriated to the Shareholders, with the following details: <ul style="list-style-type: none"> SMN will receive cash dividends in the amount of Rp912,391,503,075.60; and FAS will receive cash dividends in the amount of Rp274.60; An amount of Rp100,000,000 will be appropriated as reserve funds, with the remaining Company profits being allocated as retained earnings;
<p>Realisasi</p> <p>Telah terealisasikan.</p> <p>Perseroan telah membagikan sisa dividen tunai tahun 2022, yang berjumlah sebesar sekitar Rp1,234 triliun.</p> <p>Pembagian sisa dividen tunai tahun 2022 kepada pemegang saham telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023.</p>	<p>Realization</p> <p>Has been realized.</p> <p>The Company has distributed the remaining amount of cash dividend for the year ended 2022, which in total in the amount of IDR1.234 trillion.</p> <p>The remaining amount of cash dividend for the year ended 2022 was distributed by the Company to the shareholders on May 5, 2023.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Mata Acara

Memperoleh persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan untuk periode berakhir 31 Desember 2023, serta untuk melakukan *limited assurance* lainnya, *agreed upon procedures* dan/atau dokumen-dokumen finansial lainnya yang harus di revidi atau disetujui oleh akuntan yang ditunjuk dan atas pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan remunerasi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lain atas penunjukannya.

Keputusan

Memutuskan, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta melakukan penjaminan terbatas lainnya, menyepakati tata cara dan/atau dokumen keuangan lainnya yang perlu diperiksa atau ditandatangani oleh akuntan yang ditunjuk, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lain penunjukannya.

Realisasi

Telah terealisasi.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 September 2023, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda

Seek and obtain an approval for the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm that will audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 as well as to perform other limited assurance, agreed upon procedures and/or other financial documents required to be reviewed or signed off by the appointed accountants and granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.

Resolutions

Resolved, to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm and Public accountant that will audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2022 as well as to perform other limited assurance, agreed upon procedures and/or other financial documents required to be reviewed or signed off by the appointed accountants, and granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.

Realization

Has been realized.

Based on Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated September 10, 2023, the Company has appointed the Public Accountant Firm, Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the books and records of the Company for the financial year ended December 31, 2023.

Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Mata Acara

Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas jumlah remunerasi dan honorarium yang telah diberikan kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 sampai dengan tanggal Resolusi ini.

Keputusan

Memutuskan, untuk menyetujui dan mengesahkan jumlah remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 sampai dengan tanggal Resolusi ini.

Realisasi

Telah terealisasi.

Agenda

Seek and obtain an approval and ratification on the amount of remuneration and honorarium that has been given to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for year 2022 until the date of these Resolutions.

Resolutions

Resolved, to approve and ratify the amount of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for year 2022 until the date of these Resolutions.

Realization

Has been realized.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Mata Acara

Memperoleh persetujuan atas remunerasi dan tunjangan untuk anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Keputusan

Memutuskan, mendelegasikan wewenang penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, kepada PT Sapta Adhikari Investama, sebagai pemegang saham pengendali PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN"), dimana SMN adalah pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.

Sehubungan dengan Keputusan yang diambil dalam Ketentuan Penggunaan ini, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk memberikan usulan dan/atau masukan kepada SAI, secara langsung.

Realisasi

Telah terealisasi.

Jumlah remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 sampai dengan tanggal Resolusi telah disetujui dan disahkan. Perseroan melalui pengendalinya, yaitu PT Sapta Adhikari Investama telah menetapkan remunerasi dan tunjangan untuk anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Adapun penetapan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda

Seek and obtain an approval on the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2022.

Resolutions

Resolved, to delegate the authority to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2022, to PT Sapta Adhikari Investama, being the controlling shareholders of PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN"), which SMN is the majority and the controlling shareholder of the Company.

In connection with the Resolution as resolved herein, to authorize the Board of Commissioners and Company's Remuneration and Nomination Committee to provide proposal and/or inputs to SAI, directly.

Realization

Has been realized.

The amount of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for year 2022 has been approved and ratified. The Company, through its controller, PT Sapta Adhikari Investama has determined the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2022. Whereas such determination was based on recommendation from the Company's Board of Commissioners, which recommendation was also made in consideration with recommendation from the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Keenam	Sixth Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>Memperoleh persetujuan untuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.</p>	<p>Agenda</p> <p>Seek and obtain an approval for the granting of power and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2023.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Menyetujui, untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris), sepanjang kondisi keuangan Perseroan memungkinkan dan mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan dan membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa, memastikan kepatuhan terhadap Pasal 72 dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika dividen interim akan dibagikan atau dibayarkan, maka pembagiannya atau pembayarannya harus dilakukan kepada pemegang saham sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menentukan bentuk, jumlah dan cara pembayaran atas dividen interim tersebut.</p>	<p>Resolutions</p> <p>Resolved, to grant power and authority to the Company's Board of Directors (subject to the approval of the Board of Commissioners), to the extent the financial condition of the Company allows and subject to the prevailing laws and regulations, to determine and pay the interim dividends for the financial year ended 31 December 2023, provided that, to ensure compliance with Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the conduct of the 2024 Annual GMS, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Telah terealisasi.</p> <p>Pada tanggal 5 Desember 2023, Perseroan melakukan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berjalan 2022. Pembagian dividen interim ini dilakukan sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dilaksanakan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023.</p> <p>Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan serta, dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis ke depan Perseroan, jumlah dividen interim yang dibagikan kepada pemegang saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp312.794.249.600 (tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Rupiah).</p>	<p>Realization</p> <p>Has been realized.</p> <p>On December 5, 2023, the Company distributed an interim dividend to its Shareholders for the financial year 2022. The interim dividend distribution is conducted with regards to Article 72 paragraph (1) and (4) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Companies and Article 18 of the Company's articles of association. Interim dividend distribution is conducted based on the resolutions of the Board of Directors following the approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders dated December 5, 2023.</p> <p>Based on the calculation that has been carried out and, by taking into account, among others, the financial conditions and future business plan of the Company, the interim dividend that will be distributed will be in the full amount of IDR312,794,249,600 (three hundred and twelve billion seven hundred ninety four million two hundred forty nine thousand six hundred Rupiah).</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Pertama	First Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>(i). Memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021, yang antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021, rincian yang ditetapkan dalam butir (ii) di bawah; (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021;</p> <p>(ii). Memperoleh pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2021 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, sebagaimana diaudit oleh akuntan publik Purwanto, Sungkoro & Surja; dan</p> <p>(iii). Memperoleh pelepasan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari semua kewajiban yang timbul dari hal-hal yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2021 dan dimuat dalam Laporan Keuangan yang mengacu pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021;</p>	<p>GMS 2022</p> <p>Protelindo telah melaksanakan RUPST Tahun 2022 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:</p> <p>Protelindo has implemented the AGMS Year 2022 with the following agenda and results:</p> <p>Agenda</p> <p>(i). Obtain the approval from the Shareholders on the Company's Annual Report for the year of 2021, which, among other things, contains the: (1) Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2021, details of which are set out in item (ii) below; (2) a report on the affairs and management of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021; (3) a report on the Board of Commissioners' supervisory function for the fiscal year ended December 31, 2021; and (4) the results that have been achieved during the fiscal year ended December 31, 2021;</p> <p>(ii). Obtain the ratification on the Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2021 and Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the year ended December 31, 2021 as contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year referred to, as audited by the public accounting firm Purwanto, Sungkoro & Surja; and</p> <p>(iii). Seek a release and discharge of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from all liabilities arising from the matters that were reported in the 2021 Annual Report and were contained in the Financial Statements referring to the year ended December 31, 2021;</p>
<p>Keputusan</p> <p>(i). Memutuskan, untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021, yang, antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021, sebagaimana diaudit oleh kantor akuntan publik Purwanto, Sungkoro & Surja; (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021, dan sehubungan dengan itu, untuk meratifikasi semua hal yang terkandung dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020, termasuk laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021;</p> <p>(ii). Memutuskan, untuk mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2021 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, yang diaudit oleh kantor akuntan publik Purwanto, Sungkoro & Surja; dan</p>	<p>Resolutions</p> <p>(i). Resolved, to approve the Company's Annual Report for 2021, which, inter alia, contains: (1) The Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2021, as audited by public accounting firm Purwanto, Sungkoro & Surja; (2) reports on the Company's affairs and management for the fiscal year ended December 31, 2021; (3) a report on the supervisory function of the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2021; and (4) results achieved during the fiscal year ended December 31, 2021, and in connection therewith, to ratify all matters contained in the Company's Annual Report for 2020, including the report on the supervisory function of the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2021;</p> <p>(ii). Resolved, to ratify the Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2021 and the Consolidated Statement of Comprehensive Profit for the year ended December 31, 2021 as stated in the Consolidated Financial Statements for the financial year as referred to, audited by public accounting firm Purwanto, Sungkoro & Surja; and</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Pertama	First Agenda
<p>(iii). Memutuskan, untuk memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya dari setiap dan semua tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan manajemen urusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua Tindakan pengawasan atas urusan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2021, karena tindakan manajemen atau tindakan pengawasan tersebut dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2021 dan dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.</p>	<p>(iii). Resolved, to grant full release and discharge from any and all responsibilities to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for all management actions of the Company's affairs carried out by the Board of Directors and the Board of Commissioners for all supervisory actions on the Company's affairs for the fiscal year ended December 31, 2021, because such management actions or supervisory actions are reported in the 2021 Annual Report and contained in the Consolidated Financial Statements for year ended December 31, 2021.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Telah terealisasi.</p>	<p>Realization</p> <p>Has been realized.</p>

Mata Acara Kedua	Second Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>Memperoleh persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>Agenda</p> <p>Obtain approval of the plan of use the net income of the Company for the financial year ended December 31, 2021.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar sekitar Rp1,252 triliun akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham Perseroan. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Desember 2021, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar sekitar Rp350 miliar kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2021. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp901 miliar; Sebesar Rp100 juta, akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan 	<p>Resolutions</p> <p>To approve the use of net income of the Company for the financial year 2021 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> An amount of approximately Rp1.252 trillion will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2021 to the shareholders of the Company. In accordance with the Resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company dated December 6, 2021, the Company distributed cash interim dividends in the amount of approximately Rp350 billion to the shareholders for the financial year 2021. Accordingly, the remaining cash dividends which will be distributed by the Company will amount to approximately Rp901 billion; An amount of Rp100 million, will be allocated and recorded as a reserve fund.
<p>Realisasi</p> <p>Perseroan telah membagikan sisa dividen tunai tahun 2021, yang berjumlah sebesar sekitar Rp1,252 triliun.</p> <p>Pembagian sisa dividen tunai tahun 2021 kepada pemegang saham telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022.</p>	<p>Realization</p> <p>The Company has distributed the remaining amount of cash dividend for the year ended 2021, which in total is in the amount of Rp1.252 trillion.</p> <p>The remaining amount of cash dividend for the year ended 2021 was distributed by the Company to the shareholders on June 30, 2022.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Ketiga	Third Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>Memperoleh persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan untuk periode berakhir 31 Desember 2022, serta untuk melakukan <i>limited assurance</i> lainnya, <i>agreed upon procedures</i> dan/atau dokumen-dokumen finansial lainnya yang harus di reviu atau disetujui oleh akuntan yang ditunjuk dan atas pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan remunerasi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lain atas penunjukannya;</p>	<p>Agenda</p> <p>Obtain an approval for the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm that will audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2022 as well as to perform other limited assurance, agreed upon procedures and/or other financial documents required to be reviewed or signed off by the appointed accountants and granting of authority to the Board of Directors to determine the Independent Public Accountant's honorarium as well as other requirement of its appointment.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Memutuskan, untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan untuk periode berakhir 31 Desember 2022, serta untuk melakukan <i>limited assurance</i> lainnya, <i>agreed upon procedures</i> dan/atau dokumen-dokumen finansial lainnya yang harus di reviu atau disetujui oleh akuntan yang ditunjuk.</p>	<p>Resolutions</p> <p>Resolved, to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the period ended December 31, 2022, as well as to conduct other limited assurance, agreed upon procedures and/or other financial documents that must be reviewed or approved by the appointed accountant.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 16 September 2022, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Realization</p> <p>Based on Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated September 16, 2022, the Company has appointed the Public Accountant Firm, Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the books and records of the Company for the financial year ended December 31, 2022.</p>
<p>Mata Acara Keempat</p> <p>Mata Acara</p> <p>Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas jumlah remunerasi dan honorarium yang telah diberikan kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 sampai dengan tanggal Resolusi ini.</p>	<p>Fourth Agenda</p> <p>Agenda</p> <p>Obtain an approval and ratification on the amount of remuneration and honorarium that has been given to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for year 2021 until the date of this Resolutions.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Memutuskan, untuk menyetujui dan mengesahkan jumlah remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 sampai dengan tanggal Resolusi ini;</p>	<p>Resolutions</p> <p>Resolved, to approve and ratify the amount of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for year 2021 until the date of this Resolutions.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Telah terealisasi.</p>	<p>Realization</p> <p>Has been realized.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Kelima	Fifth Agenda
<p>Agenda</p> <p>Memperoleh persetujuan atas remunerasi dan tunjangan untuk anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;</p>	<p>Agenda</p> <p>Obtain an approval on the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2021.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Memutuskan, untuk mendelegasikan kewenangan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan untuk anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 kepada PT Sapta Adhikari Investama (SAI), sebagai pemegang saham pengendali PT Sarana Menara Nusantara Tbk (SMN) yang mana SMN adalah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali Perseroan;</p>	<p>Resolutions</p> <p>Resolved, to delegate the authority to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2021, to PT Sapta Adhikari Investama (SAI), being the controlling shareholders of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (SMN) which SMN is the majority and controlling shareholder of the Company.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Jumlah remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 sampai dengan tanggal Resolusi telah disetujui dan disahkan. Perseroan melalui pengendalinya, yaitu PT Sapta Adhikari Investama telah menetapkan remunerasi dan tunjangan untuk anggota Direksi dan remunerasi atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Adapun penetapan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>	<p>Realization</p> <p>The amount of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for year 2021 has been approved and ratified. The Company, through its controller, PT Sapta Adhikari Investama has determined the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2021. Whereas such determination was based on recommendation from the Company's Board of Commissioners, which recommendation was also made in consideration with recommendation from the Remuneration and Nomination Committee of the Company.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Mata Acara Keenam	Sixth Agenda
<p>Mata Acara</p> <p>Memperoleh persetujuan untuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membayar/membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.</p>	<p>Agenda</p> <p>Obtain an approval for the granting of power and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2022.</p>
<p>Keputusan</p> <p>Menyetujui, untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris), sepanjang kondisi keuangan Perseroan memungkinkan dan mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan dan membagikan/membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa, memastikan kepatuhan terhadap Pasal 72 dari Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika dividen interim akan dibagikan atau dibayarkan, maka pembagiannya atau pembayarannya harus dilakukan kepada pemegang saham sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menentukan bentuk, jumlah dan cara pembayaran atas dividen interim tersebut.</p>	<p>Resolutions</p> <p>Resolved, to grant power and authority to the Company's Board of Directors (subject to the approval of the Board of Commissioners), to the extent the financial condition of the Company allows and subject to the prevailing laws and regulations, to determine and pay the interim dividends for the financial year ended 31 December 2022, provided that, to ensure compliance with Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the conduct of the Annual GMS for the financial year 2022, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends.</p>
<p>Realisasi</p> <p>Pada tanggal 5 Desember 2022, Perseroan melakukan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berjalan 2022. Pembagian dividen interim ini dilakukan sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dilaksanakan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022.</p>	<p>Realization</p> <p>On December 5, 2022, the Company distributed an interim dividend to its Shareholders for the financial year 2022. The interim dividend distribution is conducted with regards to Article 72 paragraph (1) and (4) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Companies and Article 18 of the Company's articles of association. Interim dividend distribution is conducted based on the resolutions of the Board of Directors following the approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders dated December 5, 2022.</p>
<p>Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan serta, dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis ke depan Perseroan, jumlah dividen interim yang dibagikan kepada pemegang saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp321.793.638.897 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah).</p>	<p>Based on the calculation that has been carried out and, by taking into account, among others, the financial conditions and future business plan of the Company, the interim dividend that will be distributed will be in the full amount of IDR321,793,638,897 (three hundred twenty one billion seven hundred ninety three million six hundred thirty eight thousand eight hundred ninety seven Rupiah).</p>

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut terkait dengan pengelolaan Perseroan, termasuk penerapan GCG.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2023, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu Komisaris Utama, satu Komisaris dan satu Komisaris Independen, sehingga telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai ketentuan tersebut, dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris tahun 2023 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 5 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Ario Wibisono	Komisaris Utama President Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2011 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 31 Mei 2021 First Appointment: 2011 Last Appointment: Annual GMS May 31, 2021	2021 - 2024
Kenny Harjo	Komisaris Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Tahunan Mei 2021 First Appointment: Annual GMS May 2021	2021 - 2024
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2019 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 31 Mei 2021 First Appointment: 2019 Last Appointment: Annual GMS May 31, 2021	2021 - 2024

The Board of Commissioners is one of the Company's organs responsible for general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association and advising the Board of Directors. The supervision and recommendations are relevant to the Company's management, including the application of GCG.

LEGAL REFERENCES

1. Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Articles of Association of the Company.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE AND COMPOSITION

In 2023, the structure and composition of the Company's Board of Commissioners consisted of three members including one President Commissioner, one Commissioner and one Independent Commissioner, hence the Company has complied with POJK No. 33/POJK.04/2014 pertaining to the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies and Issuers. In line with the stipulations, the Board of Commissioners shall consist of a minimum of 30% Independent Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners for 2023 based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on May 5, 2023, is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan/ lembaga/ organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab 3 (tiga) mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Untuk rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan tunduk kepada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dituangkan lebih lanjut dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, tidak ada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat lebih dari 5 jabatan, baik sebagai Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris di perusahaan terbuka lainnya.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK No. 33/2014, pengangkatan Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

Pursuant to the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners in other companies/ institutions/organizations throughout 2023 is presented in chapter 3 (three) on the profile of each member of the Board of Commissioners.

For the concurrent positions of the Company's Board of Commissioners, the Company adheres to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which is further detailed in the Company's Board of Commissioners Charter. As such, the Board of Commissioners can only hold concurrent positions as:

- a. a member of the Board of Directors in no more than 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
- b. a member of the Board of Commissioners in no more than 2 (two) other Issuers or Public Companies.

As of the date of this annual report, no member of the Company's Board of Commissioners holds more than 5 positions, whether as a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Commissioners in other public companies.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT CRITERIA

The criteria for the Board of Commissioners appointment are as set forth under POJK 33/2014 as follows:

1. having good moral and integrity as well as legal capacity to take any legal action;

Dewan Komisaris Board of Commissioners

2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. perTanggung Jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan perTanggung Jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada Otoritas jasa keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Dewan Komisaris.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan dan/atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan. Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang

2. within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never been performed as former member of the Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - c. has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
 - d. has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
 - I. has never been convened an Annual General Meeting of Shareholders,
 - II. his/her accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
 - III. caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/ or financial reports to the Financial Service Authority;
3. has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
4. has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.

If necessary, the Company may use the services of an independent third party to engage in the process of selecting candidate members of the Board of Commissioners.

NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company and/or one (1) shareholder or more representing at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares with voting rights, may submit proposals for Board of Commissioners member candidates to the Company's Nomination and Remuneration Committee through the Corporate Secretary. If necessary, the Company may render the services of an independent third party to be

Dewan Komisaris Board of Commissioners

independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Dewan Komisaris yang telah disebutkan di atas. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria, akan diusulkan dalam untuk disetujui dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Protelindo telah memiliki Piagam/Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengawasi jalannya Perseroan. Piagam/Pedoman Kerja Dewan Komisaris Protelindo ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 dan masih berlaku hingga akhir tahun pelaporan per 31 Desember 2023.

Secara berkala, Piagam Dewan Komisaris dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Piagam Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

- Pendahuluan
- Tugas dan Wewenang
- Nilai-Nilai Pribadi
- Waktu Kerja
- Rapat
- Pelaporan dan Tanggung Jawab
- Larangan

involved in the selection process of Board of Commissioners member candidates.

Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee will review the candidate proposals in line with the appointment criteria of the Board of Commissioners mentioned above. After the review is completed, proposals for Board of Commissioners member candidates who meet the criteria will be proposed for approval and appointment at the Company's General Meeting of Shareholders.

BOARD OF COMMISSIONERS INDEPENDENCE

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently, among others, in the ways as stated in the Board of Commissioners Charter. The Board of Commissioners always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

Protelindo's Board of Commissioners already has a Board Manual which is a reference in carrying out its duties, responsibilities and authorities to supervise the Company's management. Protelindo Board of Commissioners' Charter was signed on August 31, 2015 and are remained valid until the end of the reporting year as of December 31, 2023.

Periodically, the Board of Commissioners Charter is evaluated and updated in accordance with the regulations and provisions applicable in Indonesia. This Charter is binding for each member of the Board of Commissioners enabling the Board of Commissioners to carry out their supervisory functions efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

The Board of Commissioners' Charter regulates the following:

- Introduction
- Duties and Authorities
- Personal Values
- Working Time
- Meeting
- Reporting and Responsibility
- Prohibitions

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Board Manual telah diunggah di situs web Perseroan.

Dalam Piagam Dewan Komisaris diatur juga bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari setiap benturan kepentingan yang nyata atau yang diketahui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perseroan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite-komite dalam supervisinya, bertindak dan bertanggung jawab secara kolektif, dengan tugas dan wewenang yang berlaku untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

Tugas Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, perTanggung Jawaban, serta kewajaran.

The Board Manual have been uploaded to the Company's website.

The Board of Commissioners Charter also stipulates that all members of the Board of Commissioners must avoid any actual or known conflict of interest in carrying out their duties and responsibilities.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners has the duty to oversee and providing advice to the Board of Directors in its company management, and reporting their duties, responsibilities, and authorities to the GMS. Assisted by committees in their supervision, the Board of Commissioners acts and is collectively responsible, with the necessary duties and authorities to perform their responsibilities. The Board of Commissioners' scope of work is based on the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, which include:

Board of Commissioners Duties

- Supervise and be responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.
- Provide approval for the Company's annual work plan no later than before the start of the upcoming financial year.
- Perform duties specifically assigned to the Board in accordance with the Articles of Association, applicable regulations and/or based on the decisions of the General Meeting of Shareholders.
- Perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Research and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
- Comply with the Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, responsibility, accountability, and fairness.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perseroan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi belanja modal besar, akuisisi dan divestasi.
- Mengkaji dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
- Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- Memilih, mengawasi dan memantau kinerja eksekutif kunci, dan, bila perlu, mengganti mereka dan mengawasi perencanaan suksesi.
- Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan utama dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
- Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan yang formal dan transparan.
- Memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi.
- Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat tersedia, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan.
- Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit eksternal independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat tersedia, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan.

- Ensure the implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all elements or levels of the organization, including:
 - a. Implementation of duties and responsibilities of the Board Commissioners and Board of Directors;
 - b. Implementation of duties of committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control functions, legal compliance, and conflicts of interest.

Responsibilities of the Board of Commissioners

- Review and guide corporate strategy, key action plans, annual budgets and business plans; setting performance goals; monitor the implementation and performance of the Company; and oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments.
- Review and assess risk management policies and procedures.
- Monitor the effectiveness of corporate governance practices and make changes as needed.
- Select, supervise and monitor the performance of key executives, and, when necessary, replace them and oversee succession planning.
- Align the remuneration of key executives and boards with the long-term interests of the Company and shareholders.
- Ensure a formal and transparent nomination and board election process.
- Monitor and manage potential conflicts of interest of management, board members and shareholders, including misuse of company assets and abuse in related-party transactions.
- Ensure the integrity of the Company's accounting and reporting systems for disclosure, including independent audits, and that appropriate control systems are in place, in accordance with relevant laws and standards.
- Oversee the disclosure and communication process.
- Ensure the integrity of the Company's accounting and reporting systems for disclosure, including independent external audits, and that appropriate control systems are in place, in accordance with relevant laws and standards.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan melaporkan kegiatan pengawasan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

PEMBAGIAN TUGAS DAN PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara anggota, namun demikian fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari Komite Penunjang Dewan Komisaris sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

Presiden Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk mengusulkan agenda rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk

To support the effective performance of such duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish as well as determine the composition of an audit committee as stipulated under applicable laws and regulations as well as the applicable regulations in the field of Capital Market, as well as obliged to evaluate the performance of such committees at the end of each fiscal year of the Company.

In connection with the duties of the Board of Commissioners as mentioned above, the Board of Commissioners shall oblige to:

- Supervise the implementation of the Company's annual work plan;
- Keep track of the progress of the Company's activities, and in the event the Company exhibits apparent signs of decline, immediately report to the General Meeting of Shareholders with proposals for remedial actions to be taken;
- Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any other issues considered important for the management of the Company;
- Perform other supervisory duties determined by the General Meeting of Shareholders; and
- Provide responses to the Board of Directors' periodic reports and at any time necessary regarding the Company's developments.

DIVISION OF DUTIES AND DELEGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners regulates the division of work among members, however, the focus of the supervisory area of each member of the Board of Commissioners refers to the division of roles as Chairman and Vice Chairman of the Supporting Committee of the Board of Commissioners according to their competence and experience.

The President Commissioner has duties and responsibilities, including the following:

1. Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Provide proposals to hold meetings of the Board of Commissioners, including proposing meeting agendas.
3. Make invitations and chair the Board of Commissioners meetings.
4. Submit a supervisory report to obtain approval

Dewan Komisaris Board of Commissioners

mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.

Beberapa anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai ketua dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee
Ario Wibisono	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member
Kenny Harjo	Komisaris Commissioner	-
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Chairman

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik di antaranya:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris Independen

Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

from the AGMS for the implementation of duties and supervision of the Board of Commissioners.

Several members of the Board of Commissioners concurrently serve as chairmen of committees under the Board of Commissioners, in accordance with their respective competencies and fields with the following details:

INDEPENDENT COMMISSIONERS

An independent commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Company. To qualify as an independent commissioner, a person must satisfy the following criteria, as outlined in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the issuer or public company:

- Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner.
- Does not own shares either directly or indirectly in the Company.
- Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.
- Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders of the Company.

Statement of Independence of Members of the Independent Board of Commissioners

The statement of independence of each Independent Commissioner is in line with that outlined in the provisions of Article 25 paragraph (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Pemenuhan Aspek Independensi Fulfillment of Independence Aspects
	Kusmayanto Kadiman
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	✓
Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.	
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.	✓
Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.	✓
Has no affiliation with the Company, other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders of the Company.	
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.	✓
Does not have financial relationships, management relationships, share ownership relationships, family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Company.	
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	✓
Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali setiap dua bulan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan panggilan rapat disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik terdaftar atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat.

Rapat dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat dilakukan melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika seorang anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Dewan Komisaris untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

The Board of Commissioners meets regularly, at least once every two months in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners meeting is attended by members of the Board of Commissioners and the meeting invitation shall be submitted in writing via registered electronic mail or letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners at least 7 (seven) days prior to the meeting, without counting the notification date and meeting date.

Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings with non-physical presence can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media facilities. If a member of the Board of Commissioners is unable to attend the Meeting, he may appoint another member of the Board of Commissioners to represent him in attending the Meeting based on a specific proxy granted for that purpose.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Berdasarkan ketentuan Piagam Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahanmataacaraRapatDewanKomisaris disampaikan bersama dengan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sekurangngnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.

Selama tahun 2023, Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris

According to the provisions of the Board of Commissioners' Charter, the Board of Commissioners' meeting is legal and entitled to make valid and binding decisions if more than 2/3 of the total number of Board of Commissioners members are present or legally represented in the Meeting.

Decisions of the Board of Commissioners' meeting must be made based on deliberation. If a consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by voting based on more than 2/3 of the total valid votes cast in the Meeting.

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, the agenda of the Board of Commissioners Meeting are provided with the invitation to the Board of Commissioners Meeting at least 7 (seven) days prior to the Meeting.

During 2023, the realization Meeting of the Board of Commissioner has been held eight (8) times attended by members of the Board of Commissioners.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) of Attendance
Ario Wibisono	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100
Kenny Harjo	Komisaris Commissioner	8	8	100
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	8	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda
30 Januari 2023 January 30, 2023	Pembahasan dan persetujuan atas Kinerja dan Pencapaian Perseroan Tahun Buku 2022 Discussion and approval on the Company's Performance and Achievements for Fiscal Year 2022
6 Februari 2023 February 6, 2023	Pembahasan Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Tahun Buku 2023 Discussion on the Company's Budget and Work Plan for Fiscal Year 2023
21 Maret 2023 March 21, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Fiscal Year 2022

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Tanggal Date	Agenda
28 April 2023 April 28, 2023	Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2022 Plan to execute the Company's Annual General Meeting of Shareholders and Distribution of Final Dividend for Fiscal Year 2022
26 Juni 2023 Juni 26, 2023	Diskusi tentang rencana akuisisi dan ekspansi bisnis baru untuk grup Discussion on the Proposed Acquisition and New Business Expansion for the Group
31 Juli 2023 July 31, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Kuartal II Tahun Buku 2023 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Q2 Fiscal Year 2023
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Kuartal III Tahun Buku 2023 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Q3 Fiscal Year 2023
4 Desember 2023 December 4, 2023	Rencana Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2023 Plan to execute the Distribution of Interim Dividend for Fiscal Year 2023

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris melaksanakan rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan agenda pembahasan di antaranya:

- Persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Penelaahan atas laporan tahunan dan laporan keuangan.
- Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan pelaksanaan kepatuhan (*compliance*).
- Rencana transaksi dan strategi perusahaan terkait lainnya, termasuk rencana pembiayaan dan transaksi yang dilakukan perusahaan lainnya.

Selama tahun 2023, realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo tahun 2023 telah diagendakan pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rekapitulasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023:

Board of Commissioners Joint Meetings with Directors

Joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors are held periodically in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners holds meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months, with the discussion agenda, among others:

- Approval of the Company's annual work plan.
- Review of the annual report and financial statements.
- Implementation of Good Corporate Governance including the conduct of the General Meeting of Shareholders and compliance execution.
- Plans for transactions and other related company strategies, including financing plans and transactions conducted by other companies.

During 2023, the realization of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors of Protelindo was eight (8) times. The 2023 Joint Meeting of Protelindo's Board of Commissioners and Directors was scheduled for the previous year. The following is a recapitulation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Joint Meeting of Board of Commissioner and Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) of Attendance
Ario Wibisono	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100
Kenny Harjo	Komisaris Commissioner	8	8	100
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	8	100
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris BOC Average Attendance				100
Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama President Director	8	8	100
Adam Gifari	Wakil Direktur Utama Vice President Director	8	8	100
Stephen Duffus Weiss	Wakil Direktur Utama Vice President Director	8	8	100
Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur Director	8	8	100
Indra Gunawan	Direktur Director	8	8	100
Anita Anwar	Direktur Director	8	8	100
Rata-rata Kehadiran Direksi BOD Average Attendance				100
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Average Attendance				100

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Protelindo telah memiliki ketentuan berkenaan dengan program pengenalan Perseroan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan gambaran tentang aktivitas bisnis, rencana Perseroan ke depan, dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan komisaris. Program pengenalan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dengan menyampaikan dokumen-dokumen penting seperti Anggaran Dasar, Piagam Dewan Komisaris, Kode Etik Perseroan, Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, dan lainnya.

Pada tahun 2023, tidak terdapat program pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru dikarenakan komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Protelindo has provisions regarding the Company's induction program for new members of the Board of Commissioners. The purpose of the activity is to provide an overview of business activities, the Company's future plans, and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners. The induction program is carried out by the Corporate Secretary by submitting important documents such as the Articles of Association, Board of Commissioners Charter, Company Code of Ethics, Annual Report, RKAP, RJPP, and others.

In 2023, there was no induction program on the Company to new members of the Board of Commissioners as the composition of the Board of Commissioners has not changed from the previous year.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris Protelindo harus senantiasa meningkatkan dan memutakhirkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan Perseroan. Pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, konferensi, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta study banding.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan mengikuti program pengembangan kompetensi berikut:

Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
Seminar Nasional Era Baru Industri Pembiayaan	6 Juni / June 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Dewan Komisaris telah melaksanakan dan melaporkan tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris. Selama 2023, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di antaranya:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta tugas komite-komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perusahaan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Members of the Board of Commissioners of Protelindo shall constantly improve and update their competencies in line with the development of the Company's needs. This competency development is carried out through training activities, workshops, seminars, conferences, or in the form of work visits and comparative studies.

Throughout 2023, the Company's Board of Commissioners was participated in the following competency development programs:

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2023

The Board of Commissioners has carried out and reported on supervisory duties and responsibilities as stated in the Board of Commissioners Charter. During 2023, the implementation of the duties of the Board of Commissioners includes:

- Supervised and be responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.
- Provided approval for the Company's annual work plan.
- Researched and review the annual report and financial statements prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
- Ensured the implementation of Good Corporate Governance, among others, assessing the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the duties of committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control functions, legal compliance, and conflicts of interest.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- Memberikan masukan atas rencana transaksi dan strategi perusahaan terkait lainnya, termasuk rencana pembiayaan dan transaksi yang dilakukan perusahaan lainnya.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Publik ("POJK No. 21"), dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 ("SE No. 32") Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan ("Kebijakan Penilaian"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016. Kebijakan Penilaian ini adalah pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegal Dewan Komisaris. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kegiatan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi;
 - Pelaksanaan fungsi pemberian persetujuan dan masukan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan; dan

- Provided input on transaction plans and other related company strategies, including financing plans and transactions carried out by other companies.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY

In implementing good corporate governance as required by the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance for Public Companies ("POJK No. 21"), which is further regulated in the Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 ("SE No. 32") on Guidelines for Corporate Governance for Public Companies, the Company has formulated a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Commissioners ("Assessment Policy"). The Assessment Policy has been reviewed and approved by the Company's Board of Commissioners on December 1, 2016. This Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Commissioners.

According to the Assessment Policy, the performance of the Board of Commissioners is assessed annually by each member of the Board of Commissioners using a self-assessment method on their individual and collegial performance. With this self-assessment, it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to continuously improving the performance of the Board of Commissioners.

The implementation of performance assessment by each member of the Company's Board of Commissioners is carried out with reference to aspects or assessment criteria, including the following:

- Implementation of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, which include, among others:
 - Execution of supervisory functions over the management activities of the Company carried out by the Board of Directors;
 - Execution of functions for giving approvals and input on the Company's annual work plans and budgets; and

Dewan Komisaris Board of Commissioners

3. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pelaksanaan pengawasan atas penerapan kepatuhan (*compliance*) dan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- c. Tingkat kehadiran Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama dengan Direksi
- d. Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan menjadi dasar bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk memberikan masukan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Dewan Komisaris dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris akan disampaikan melalui Laporan Dewan Komisaris (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Evaluasi terhadap kinerja Komite penunjang Dewan Komisaris dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif dengan periode setiap 1 (satu) tahun melalui *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya. Penilaian di antaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja

3. Execution of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.
- b. Oversight of the implementation of compliance and good corporate governance.
- c. Attendance level of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors.
- d. Oversight of the performance of committees under the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the self-assessment process will subsequently serve as a basis for the Company's Nomination and Remuneration Committee to provide input in determining compensation/incentive schemes for the Board of Commissioners and as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to determine the appointment or nomination of the respective Board of Commissioners members.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners will be conveyed through the Board of Commissioners Report (as part of the Annual Report) which will then become one of the agenda items discussed and approved in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance assessment of the Board of Commissioners' supporting Committee is conducted individually and collectively once a year by self-assessment utilising the evaluation technique stipulated by the Board of Commissioners' Decree. The results of the performance assessment of members of the Board of Commissioners' Supporting Committee serve as an assessment material for the extension of the service period of members of the Board of Commissioners' Supporting Committee for

Dewan Komisaris Board of Commissioners

sama dan berkomunikasi secara aktif sesama anggota Komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan rencana strategis Perusahaan, serta kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Sistem *Whistle Blower*.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, termasuk terkait rekomendasi pengangkatan, pergantian dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit internal dan eksternal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan.

Komite Sistem *Whistle Blower* memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyampaikan pelaporan rahasia mengenai pelanggaran oleh pihak internal perusahaan.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite dan menilai pelaksanaan tugas masing-masing komite telah dilaksanakan dengan baik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham telah memberikan wewenang kepada

the following year. Attendance at meetings, the ability to cooperate and communicate actively among Committee members, integrity, the ability to understand the Company's vision, mission, and strategic plan, as well as the quality of suggestions/recommendations given regarding the work program of each Supporting Committee of the Board of Commissioners, are all factors considered.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by three (3) Committees, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Whistle Blower System Committee.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the implementation of duties and supervisory functions on matters related to financial statements, including recommendations for appointment, replacement and implementation of duties and responsibilities of internal and external audit functions, as well as compliance with prevailing laws and regulations.

The Remuneration and Nomination Committee has an important role in evaluating remuneration policies and assessing the overall performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Whistle Blower System Committee has an important role in implementing the principles of good corporate governance and submitting confidential reports regarding violations by internal company parties.

In 2023, the Board of Commissioners has assessed the performance of each committee and considered that the implementation of the duties of each committee has been carried out properly according to the criteria set by the Board of Commissioners.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remuneration Determination Procedure for the Board of Commissioners

Based on the resolution of the GMS, the shareholders have authorized the controlling shareholder of the

Dewan Komisaris Board of Commissioners

pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ("Remunerasi") dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Company to determine the amount of salary or honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners ("Remuneration") by considering the proposal from the Board of Commissioners of the Company based on recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

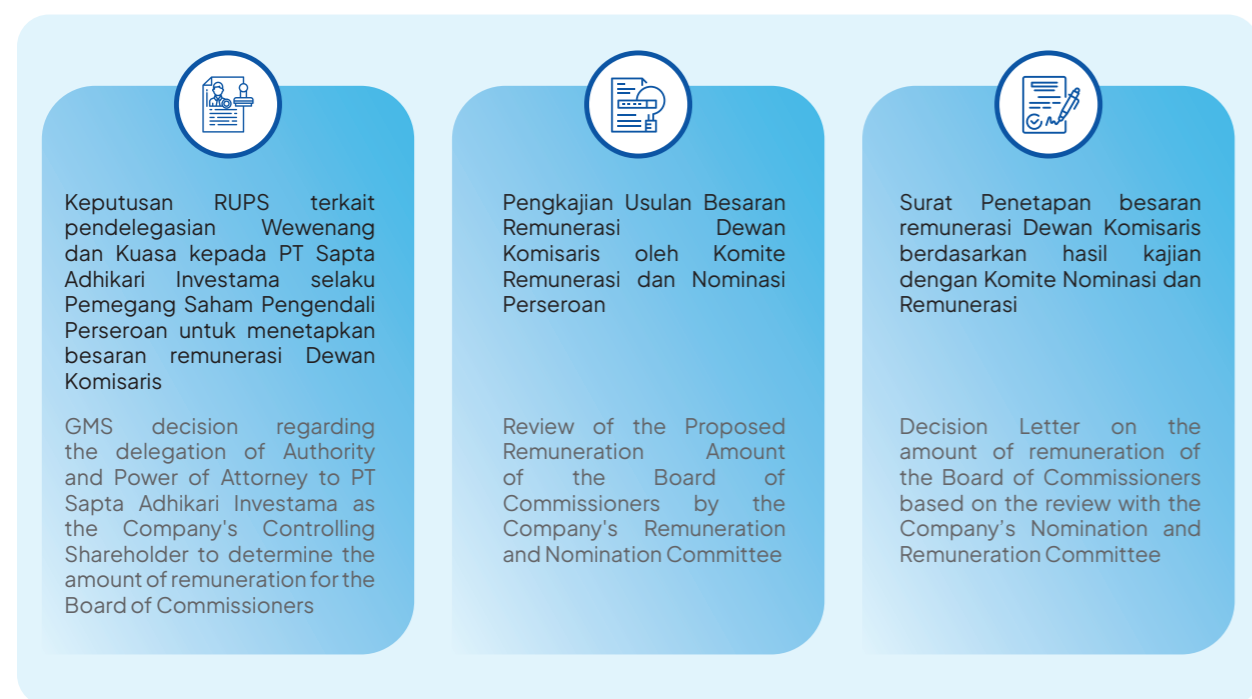
Several factors to consider in determining Remuneration are as follows:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Process of Determining the Remuneration of the Board of Commissioners



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar Rp18.154.998.709.*

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Commissioners for the financial year of 2023 is Rp18,154,998,709.*

The remuneration structure that indicates the Remuneration component for each Board of Commissioners during 2023 is as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Tunjangan* Allowance*	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
								Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Ario Wibisono	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Kenny Harjo	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Kusmayanto Kadiman	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan)
Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Commissioners, including their other positions in the other entities within the Company Group (as relevant)

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud penerapan GCG, Protelindo memiliki kebijakan pelaporan kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk apabila ada perubahan kepemilikan atas saham Perseroan. Pelaporan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris ini wajib diberitahukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham perseroan.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pelaporan terkait dengan kepemilikan saham ataupun perubahan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP POLICY

As a form of GCG implementation, Protelindo has a policy of reporting the Company's share ownership by the Board of Commissioners, where the Board of Commissioners is required to report its share ownership and/or family, either directly or indirectly, including if there is a change in ownership of the Company's shares. The reporting of share ownership by the Board of Commissioners must be notified to the Company no later than 3 (three) working days after the change in the company's share ownership.

In 2023, there were no reporting related to share ownership or changes in share ownership by members of the Board of Commissioners, either directly or indirectly.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan OJK No.33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”) mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 1 Desember 2016.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS INVOLVED IN FINANCIAL CRIME

Law No. 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company (the “Company Law”) and OJK Regulation No.33/ POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company (“POJK No. 33”) stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners is having never been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/ or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things provides recommendation to the public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Commissioners who may be involved in a financial crime. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Commissioners on December 1, 2016.

The resignation procedure for the members of the Board of Commissioners are as follows:

1. A member of the Board of Commissioners shall resign from their position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the

Dewan Komisaris Board of Commissioners

memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan perTanggung Jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.

4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memiliki keragaman keahlian, latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman industri yang merupakan faktor penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang diemban oleh Dewan Komisaris.

Informasi mengenai keberagaman Dewan Komisaris dapat dilihat pada Profil masing-masing Dewan Komisaris pada halaman 58 - 61 Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan apabila terdapat pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian pinjaman tersebut akan dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang wajar dan menggunakan prinsip *arm's length* serta memberlakukan suku bunga yang sesuai dengan yang berlaku di pasar pada saat pemberian pinjaman dilakukan.

Untuk memastikan penerapan prinsip *arm's length*, pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris juga wajib melibatkan analisa dan persetujuan Komite Audit Perseroan.

resignation of such Commissioner within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving his resignation letter; The members of the Board of Commissioners who resigned shall be held liable from the date of their appointment to their position until the date of resignation as approved by the GMS.

4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

The composition of the Company's current Board of Commissioners has a diversity of expertise, background, knowledge, and industry experience which are important factors to ensure the effectiveness of the implementation of the supervisory function of the Company's management carried out by the Board of Commissioners.

Information on the diversity of the Board of Commissioners is presented on the Profile of each Board of Commissioners, page 58 - 61 of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company ensures that if there are loans provided to members of the Company's Board of Commissioners, such loans will be made under an agreement that includes fair terms and conditions, uses the *arm's length* principle, and applies an interest rate in accordance with market rates at the time the loan is made.

To ensure the application of the *arm's length* principle, the provision of loans to members of the Board of Commissioners also must involve analysis and approval by the Company's Audit Committee.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi harus memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya demi kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga memastikan agar Protelindo melaksanakan tanggung jawab sosial serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Ketentuan penunjukan Direksi didasarkan pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, antara lain harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria dari sisi integritas, kompetensi, dan reputasi dengan memperhatikan visi, misi Perseroan.

Jumlah Direksi Perseroan di tahun 2023 tidak mengalami perubahan di mana komposisi Direksi berjumlah 6 (enam) anggota yang terdiri dari satu Direktur Utama, dua Wakil Direktur Utama dan tiga Direktur.

The Board of Directors is a corporate organ that collectively bears full responsibility in carrying out duties for the benefit of the Company in order to fulfil the Company's goals and objectives. Each member of the Board of Directors shall act in good faith and with full responsibility to carry out their obligations for the benefit of the Company while complying with all prevailing laws and regulations. The Board of Directors also ensures that Protelindo fulfils its social responsibility and considers the interests of diverse stakeholders in line with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

LEGAL REFERENCES

The terms of appointment of the Board of Directors referred to the following provisions:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Articles of Association of the Company.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE AND COMPOSITION

The composition and number of members of the Board of Directors are determined by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, among others, must meet the requirements and criteria as stipulated in the relevant laws and regulations, both requirements and criteria in terms of integrity, competence, and reputation by the GMS by taking into account the vision and mission.

The number of Directors of the Company in 2023 has not changed. Whereas the Board of Directors consisted of 6 (six) members, consisting of one President Director, two Vice President Directors, and three Directors.

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2015 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: 2015 Last Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024
Adam Gifari	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2015 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: 2015 Last Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024
Stephen Duffus Weiss	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2015 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: 2015 Last Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024
Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: 2015 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: 2015 Last Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024
Indra Gunawan	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024
Anita Anwar	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPST 31 Mei 2021 First Appointment: AGMS May 31, 2021	2021 - 2024

MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun namun mereka dapat segera diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi di perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab 3 (tiga) mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

Untuk rangkap jabatan Direksi Perseroan, Perseroan tunduk kepada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dituangkan lebih lanjut dalam Piagam Direksi Perseroan, yaitu Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

BOARD OF DIRECTORS TENURE

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of 5 (five) years, but they can be reappointed immediately without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITION

Information on the concurrent positions of members of the Board of Directors in other companies/ institutions/ organizations in 2023 is presented in chapter 3 (three) on the profile of each member of the Board of Directors.

For the concurrent positions of the Company's Board of Directors, the Company adheres to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which is further detailed in the Company's Board of Directors Charter. As such, the Board of Directors can only hold concurrent positions as:

- a. a member of the Board of Directors in no more than 1 (one) other Issuer or Public Company; and
- b. a member of the Board of Commissioners in no more than 3 (three) other Issuers or Public Companies.

Direksi Board of Directors

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, tidak ada Anggota Direksi Perseroan yang menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan, baik sebagai Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris di perusahaan terbuka lainnya.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Berikut kriteria pengangkatan Direksi berdasarkan POJK No. 33/2014:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. perTanggung Jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan perTanggung Jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan keuangan kepada Otoritas jasa keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Direksi.

As of the date of this annual report, no member of the Company's Board of Directors holds more than 2 (two) positions, whether as a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Commissioners in other public companies.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT CRITERIA

The following are the Board of Directors appointment criteria based on POJK No. 33/2014:

1. have good morals and integrity as well as capable of doing legal action;
2. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. has never been punished for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
 - d. has never been a member of the Board of Directors and/or any member of the Board of Commissioners during his tenure:
 - i. has never convened an annual GMS;
 - ii. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not granted responsibility as a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and
 - iii. has never caused a company obtaining permit, approval or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit the Annual Report and/or Financial Statement to the Financial Services Authority.
3. have a commitment to comply with laws and regulations; and
4. have knowledge and/or expertise in the field.

If necessary, the Company may use the services of an independent third party to engage in the process of selecting candidate members of the Board of Directors.

Direksi Board of Directors

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DIREKSI

Perseroan dan/atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan. Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Direksi.

Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Direksi yang telah disebutkan di atas. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Direksi yang memenuhi kriteria, akan diusulkan dalam untuk disetujui dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Direksi. Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri.

PIAGAM DIREKSI

Direksi telah memiliki piagam/pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) yang menjadi acuan dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Piagam Direksi ditetapkan bersamaan dengan Piagam Dewan Komisaris, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang ditandatangani pada 31 Agustus 2015 dan masih berlaku hingga saat ini.

Piagam Direksi mengatur hal-hal berikut:

- Pendahuluan
- Tugas dan Wewenang
- Nilai-Nilai Pribadi
- Waktu Kerja
- Rapat
- Pelaporan dan Tanggung Jawab
- Larangan

BOARD OF DIRECTORS NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE

The Company and/or one (1) shareholder or more representing at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares with voting rights, may submit proposals for Board of Directors member candidates to the Company's Nomination and Remuneration Committee through the Corporate Secretary. If necessary, the Company may render the services of an independent third party to be involved in the selection process of Board of Directors member candidates.

Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee will review the candidate proposals in line with the appointment criteria of the Board of Directors stated above. After the review is completed, proposals for Board of Directors member candidates who meet the criteria will be proposed to be approved and appointed at the Company's General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors acts independently, among others, in the ways as stated in the Board of Directors Charter. The Board of Directors always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Board of Directors has a charter/Board Manual which is a reference in carrying out its responsibilities and authorities to meet the interests of stakeholders. The Board of Directors Charter is established simultaneously with the Board of Commissioners Charter, in accordance with the Board of Directors Decree signed on August 31, 2015 and still valid today.

The Board of Directors Charter governs for the following:

- Introduction
- Duties and Authorities
- Personal Values
- Working Time
- Meeting
- Reporting and Responsibility
- Prohibitions

Direksi Board of Directors

Dalam Piagam Direksi diatur juga bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari setiap benturan kepentingan yang nyata atau yang diketahui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan secara kolegal. Tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Piagam Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.
4. Menyusun laporan tahunan untuk disetujui oleh RUPS
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan.

Wewenang Direksi, antara lain mewakili Perseroan di dalam dan di luar Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi secara rinci telah tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi yang telah diunggah pada situs web Perseroan.

Tanggung Jawab Individual dan Bersama Direksi

Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi baik secara individual maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan jika dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran atau lalai atas pekerjaannya selama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

The Board of Directors Charter also stipulates that all members of the Board of Directors must avoid any actual or known conflict of interest in carrying out their duties and responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors has the collective duty and responsibility in managing the Company. As stated in the Board of Directors Charter, the following are the Board of Directors' duties and responsibilities:

1. Leading, managing, and controlling the Company in conformity with its objectives, while constantly striving to increase its efficiency and effectiveness;
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets; and
3. Preparing an annual work plan containing the Company's annual budget and shall be submitted to the Board of Commissioners for approval prior to the beginning of the next fiscal year.
4. Prepare an annual report for approval by the GMS.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

The authority of the Board of Directors, among others, to represent the Company inside and outside the Company, binds the Company with other parties and carries out all actions both regarding management and ownership with certain limitations as outlined in the Company's Articles of Association.

The Board of Directors duties, responsibilities and authorities has been detailed as stated in the Company's Articles of Association and the Board of Directors Charter which have been uploaded on the Company's website.

Individual and Joint Responsibility of the Board of Directors

The Board of Directors must carry out its duties in good faith and full of responsibility. Each member of the Board of Directors, either individually or jointly, is responsible for losses of the Company if found guilty of violation or negligence of their work while carrying out their duties and functions in accordance with prevailing laws.

Direksi Board of Directors

Salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi sebagai individu yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemantauan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi. Adapun pembagian tugas Direksi Protelindo yaitu:

One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors as the individual responsible for the implementation and monitoring of the principles of Good Corporate Governance for the Company.

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

The scope of works and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined based on the name of the position of each Director as stipulated in the appointment of the Board of Directors by the GMS. Furthermore, the Board of Directors determines the segregation of duties and responsibilities of each Director of Protelindo, as the following details:

Nama & Jabatan Name & Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties	
Ferdinandus Aming Santoso Direktur Utama President Director	Secara bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama, bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan dan strategi pengembangan bisnis Perusahaan, serta mengkoordinasikan Direktur lainnya dalam melaksanakan rencana strategis Perseroan untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.	Jointly with the Vice President Director, responsible for the entire direction of the Company's business development policies and strategies, as well as coordinating other Directors in implementing the Company's strategic plan to increase revenue, profitability, growth, and implementation of good corporate governance.
Adam Gifari Wakil Direktur Utama Vice President Director	Bertanggung jawab atas Bidang Hubungan Investor dan Sekretaris Perusahaan	In charge of Investor Relations and Corporate Secretary
Stephen Duffus Weiss Wakil Direktur Utama Vice President Director	Bertanggung jawab atas Bidang Keuangan	In charge of Finance
Eko Santoso Hadiprodjo Direktur Director	Bertanggung jawab atas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan <i>Business Support</i>	Human Resources, Information Technology and Business Support
Indra Gunawan Direktur Director	Bertanggung jawab atas Bidang Perizinan dan Pengembangan Bisnis (<i>Tower Group Business</i>)	Business Permit and Development (Tower Group Business)
Anita Anwar Direktur Director	Bertanggung jawab atas Manajemen Properti	Property Management

Direksi Board of Directors

RAPAT DIREKSI

Direksi diwajibkan secara berkala menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun. Direksi juga dapat menyelenggarakan rapat setiap waktu tergantung dengan tingkat kebutuhan. Pemberitahuan rapat dikirim melalui surat elektronik terdaftar atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat

Rapat Direksi dapat diadakan secara kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat dilakukan melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika seorang anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Direksi untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Piagam Dewan Direksi, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 2/3 bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat Direksi disampaikan bersama dengan pemanggilan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.

Rapat Direksi tahun 2023 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Direksi tahun 2022.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors is required to hold meetings periodically at least once every month or 12 (twelve) times a year. The Board of Directors can also hold meetings at any time if needed. Notice of meeting shall be sent by registered electronic mail or letter delivered directly to each member of the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the meeting, without counting the notification date and meeting date.

Board of Directors meetings can be held either with in physical or non-physical attendance. Meetings with non-physical presence can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media facilities. If a member of the Board of Directors is unable to attend the Meeting, he may appoint another member of the Board of Directors to represent him in attending the Meeting pursuant to a specific proxy granted for that purpose.

According to the provisions of the Board of Directors' Charter, a Board of Directors' meeting is legal and entitled to make valid and binding decisions if more than 2/3 of the total number of Board of Directors members are present or legally represented in the meeting.

Decisions of the Board of Directors' meeting must be made based on deliberation. If a consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by voting based on more than 2/3 of the total valid votes cast in the meeting.

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, the materials for the agenda of the Board of Directors Meeting are provided along with the invitation to the Board of Directors Meeting at least 7 (seven) days prior to the Meeting.

The 2023 Board of Directors Meeting has been scheduled prior to the current year as outlined in the 2022 Board of Directors work program.

Direksi Board of Directors

Selama tahun 2023, Rapat internal Direksi telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh anggota Direksi, dengan agenda rapat membahas antara lain hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yakni antara lain mengenai rencana kerja Perseroan, ekspansi bisnis, laporan keuangan Perseroan, rencana *corporate actions*, pembagian dividen dan pelaksanaan RUPS Perseroan.

During 2023, internal meetings of the Board of Directors have been held twelve (12) times attended by members of the Board of Directors with the agenda of discussing the matters which are required approvals of Board of Directors and/or Board of Commissioners, i.e. business plan of the Company, business expansion, financial statements of the Company, proposed corporate actions, distribution of dividends and GMS of the Company.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama President Director	12	12	100
Adam Gifari	Wakil Direktur Utama Vice President Director	12	12	100
Stephen Duffus Weiss	Wakil Direktur Utama Vice President Director	12	12	100
Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur Director	12	12	100
Indra Gunawan	Direktur Director	12	12	100
Anita Anwar	Direktur Director	12	12	100

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKSI

Protelindo melaksanakan program pengenalan Perseroan bagi anggota Direksi baru untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perseroan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Selain pemaparan Perseroan, dalam program pengenalan Perseroan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang lainnya antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, dan sebagainya.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengangkatan Direksi baru sehingga tidak dilakukan program pengenalan perusahaan untuk Direksi.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR DIRECTORS

Protelindo conducts a Company induction program for new members of the Board of Directors to provide an overview of business activities, future plans of the Company, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Directors.

Apart from the Company's presentation, the Company's induction program also conveyed other supporting documents including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, Articles of Association, the Company's Long-Term Plan, and so forth.

There was no appointment of new Directors in 2023, hence no company introduction program was conducted.

Direksi Board of Directors

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Direksi mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan memutakhirkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan Perseroan. Pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, seminar, konferensi, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta *study banding*.

Pada tahun 2023, realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan yang dilakukan Direksi adalah sebagai berikut:

Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
IFC and IDX ESG Collaboration Launch Event and ESG Leadership Training	16 Maret 2023 March 16, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Coaching Clinics SDG 16 Business Framework: Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment: Sustainability Reporting and Impact Assessment for Human Rights	28 Maret 2023 March 28, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Coaching Clinics SDG 16 Business Framework: Integrating SDG 16 Business Framework into Business Strategy	4 April 2023 April 4, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Seminar "Green, Social and Sustainability Bonds (GSS Bonds)".	24 Mei 2023 May 24, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Seminar International Accounting Standard Board (IASB) Update: The Latest Developments in IFRS	29 Mei 2023 May 29, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Webinar "Etika dalam Bisnis, Ekonomi dan Lingkungannya" Webinar on "Ethics in Business, Economics and the Environment"	10 Juni 2023 June 10, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Workshop Sukuk "Potensi Pertumbuhan Perusahaan Melalui Penerbitan Sukuk" Sukuk Workshop "Company Growth Potential through Sukuk Issuance"	8 Agustus 2023 August 8, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Seminar "Mencapai Transformasi Usaha Berkelanjutan dengan Integrasi Environmental Social Governance dan Perdagangan Karbon Achieving Sustainable Business Transformation with the Integration of Environmental Social Governance and Carbon Trading Seminar	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Hukumonline
Sosialisasi Perdagangan Karbon kepada seluruh Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Socialization of Carbon Trading to all Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange	5 Oktober 2023 October 5, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
2023 World Anti-Corruption Conference	16 November 2023 November 16, 2023	International Strategy Institute
Keikutsertaan Perusahaan Terdaftar dalam Perdagangan Karbon oleh Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Participation of Companies Listed in Carbon Trading by the Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon)	20 November 2023 November 20, 2023	PT Bursa Efek Indonesia
Langkah Membumi Festival by BliBli and supported by iForte. We got an opportunity to share about Protelindo Group initiatives in environmental awareness	26 November 2023 November 26, 2023	BliBli

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Board of Directors receives continuous training and competency development in order to improve and update its competencies in line with the development of the Company's needs. This competency development is carried out through training activities, workshops, seminars, conferences, or through work visits and comparative studies.

The following are realization of the Training and Development Program carried out by the Board of Directors in 2023:

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Untuk menyiapkan pimpinan Perusahaan, khususnya anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) sebagai bagian dari manajemen kunci (*key management*) yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, maka persyaratan pencalonan Direksi (termasuk Direktur Utama), maka persyaratan pencalonan Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) yang akan dibahas dan dimintai persetujuan RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dalam hal ini SMN memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki peran dalam proses sebagaimana tersebut di atas.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2023

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2023 yang bersifat strategis antara lain:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.
4. Menyusun laporan tahunan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan.

Direksi Board of Directors

SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS (INCLUDING THE PRESIDENT DIRECTOR)

To prepare the Company's leaders, especially members of the Board of Directors (including the President Director) as part of key management who are professional, have integrity, dedication, and competence in carrying out the Company's operational activities, the requirements for the nomination of the Board of Directors (including the President Director), the requirements for the nomination of the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association, the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners.

As stated in POJK No. 33/POJK.04/2014, proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors (including the President Director) to be discussed and asked for GMS approval must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function. In this regard, SMN has a Remuneration and Nomination Committee that has a role in the process mentioned.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

The following are strategic implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors during 2023:

1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the objectives set by the articles of association and the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as for the benefit of the Company and strives to make efforts to improve the efficiency and effectiveness of the Company.
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
3. Develop an annual work plan containing the Company's annual budget.
4. Develop an annual report.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

Direksi Board of Directors

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris

Selain keputusan-keputusan Direksi yang dapat diambil berdasarkan wewenang Direksi sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris selama tahun 2023, antara lain:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank); dan
2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21 dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi Perseroan ("**Kebijakan Penilaian**"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016. Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilai kinerja setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing Direksi dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegial Direksi. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

Board of Directors Actions that Require Written Approval from the Board of Commissioners

Apart from the decisions of the Board of Directors that can be made based on the authority of the Board of Directors as stated above, actions of the Board of Directors that must obtain written approval from the Board of Commissioners during 2023, include:

1. Borrowing or lending money in the name of the Company (excluding withdrawing Company funds from a bank); and
2. Establishing a new venture or participating in another company, both domestically and internationally.

PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS (INCLUDING THE PRESIDENT DIRECTOR)

In implementing good corporate governance as required by POJK No. 21, which is further detailed in SE No. 32 on the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, the Company has developed a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Directors ("**Assessment Policy**"). The Assessment Policy was reviewed and approved by the Company's Board of Directors on December 1, 2016. This Assessment Policy serves as a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Directors.

According to the Assessment Policy, the performance evaluation of each member of the Board of Directors, including the President Director, is conducted annually by each Director using a *self-assessment* method on their individual and collegial performance. This *self-assessment* aims to help each Director contribute continuously towards improving the performance of the Board of Directors.

The implementation of performance assessment by each Director of the Company, including the President Director, will be based on various aspects or evaluation criteria, including the following:

Direksi Board of Directors

- a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan fungsi memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 3. Pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan aset Perseroan;
 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemenuhan dan pencapaian *Company Shared Key Performance Indicators* (KPI) atau target, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, yang telah disusun dan disepakati sebelumnya.
- c. Penerapan kepatuhan (*compliance*) dan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- d. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Direksi dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi akan disampaikan melalui Laporan Direksi (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

- a. Execution of functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, which includes:
 1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company's objectives;
 2. Enhancing the efficiency and effectiveness of the Company;
 3. Control, maintenance, and management of the Company's assets;
 4. Preparation of the Company's annual work plan and budget to be submitted to the Board of Commissioners; and
 5. Fulfillment of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.
- b. Fulfillment and achievement of *Company Shared Key Performance Indicators* (KPIs), or targets, according to the duties and functions of each member of the Board of Directors, which have been previously arranged and agreed upon.
- c. Implementation of compliance and good corporate governance.
- d. Attendance level of the Directors in the Board Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the *self-assessment* process will subsequently be presented to the President Director, who plays an integral part in determining compensation/incentive schemes for the Board of Directors and serves as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to decide on the appointment or nomination of the respective Directors, taking into account inputs from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors will be reported through the Directors' Report (as part of the Annual Report), which will then become one of the agenda items discussed and approved at the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Direksi Board of Directors

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Protelindo tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh satuan kerja yang dipimpin oleh Division Head/General Manager/Project Manager serta Organ Fungsional lainnya.

REMUNERASI BAGI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan, Protelindo telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi ("Remunerasi") dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Company does not have a Committee under the Board of Directors. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by work units led by Division Head/General Manager/Project Manager and other functional organs.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Remuneration Determination Procedure for Board of Directors

Based on the Annual GMS resolution, Protelindo has given power and authority to the controlling shareholder to determine the amount of salary or honorarium and allowances of the Board of Directors' members ("Remuneration") by considering the proposal from the Board of Commissioners of the Company based on recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

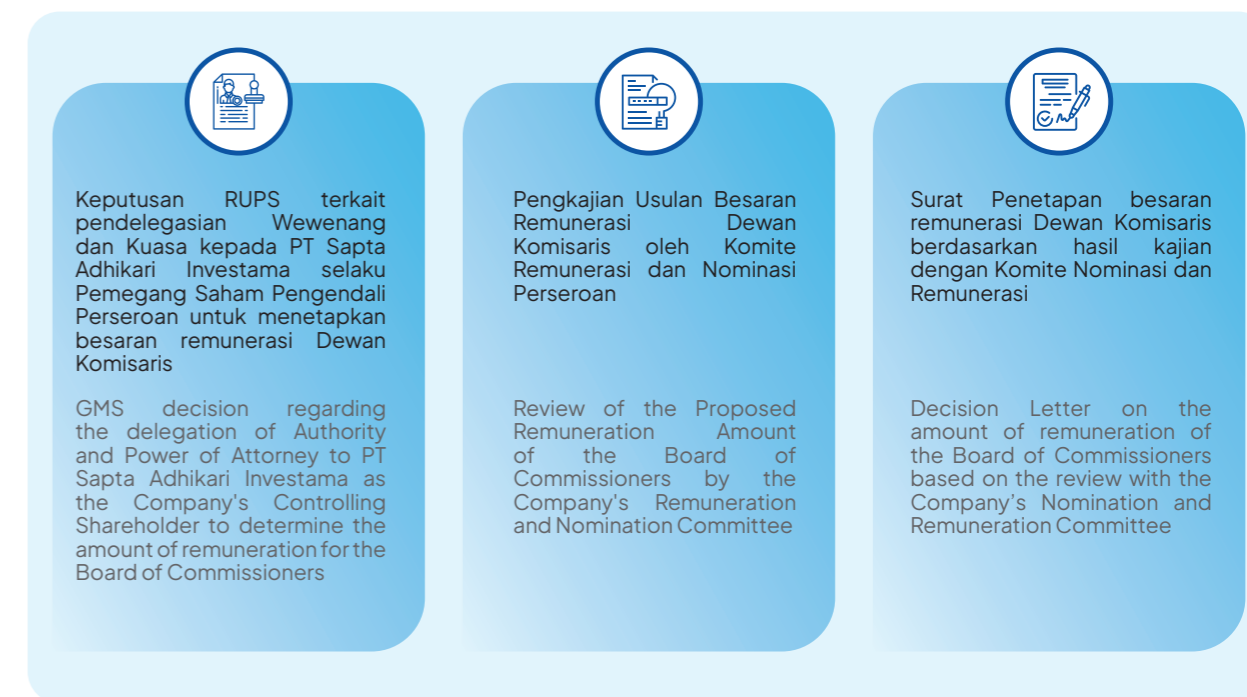
Some of the factors to consider in determining Remuneration are as follows:

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Direksi Board of Directors

Proses Penetapan Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Direksi

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar Rp137.682.778.170.*

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Direksi selama tahun buku 2023, adalah sebagai berikut:

Board of Directors Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Directors for the financial year of 2023 is Rp137,682,778,170.*

The remuneration structure that indicates the Remuneration component for each Board of Directors during 2023 is as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan* Allowance*	Tunjangan* Allowance*				Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
			Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah
Ferdinandus Aming Santoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Adam Gifari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Direksi Board of Directors

Nama Name	Gaji Salary	Transportasi Transportation	Tunjangan* Allowance*			Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*			
			Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Stephen Duffus Weiss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Eko Santoso Hadiprodjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Indra Gunawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Anita Anwar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Direksi, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan)
Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Directors, including their other position in the other entities within the Company Group (as relevant).

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Perseroan memiliki ketentuan yang mewajibkan seluruh Direksi untuk memberitahukan apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan wajib untuk diberitahu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pelaporan terkait dengan kepemilikan saham ataupun perubahan kepemilikan saham oleh anggota Direksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT dan POJK No. 33 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada

BOARD OF DIRECTORS SHAREHOLDING POLICY

The Company has provisions that require all Directors to notify if there is a change in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly. The Company is required to be notified no later than 3 (three) working days after the change of ownership of the Company's shares.

In 2023, there were no reporting related to share ownership or changes in shareholding by members of the Board of Directors, either directly or indirectly.

RESIGNATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS INVOLVED IN A FINANCIAL CRIME

The Company Law and POJK No. 33 stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Directors is having never been convicted for the commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things

Direksi Board of Directors

perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan pada 1 Desember 2016.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut; Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan perTanggung Jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS;
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

provide recommendation to a public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Directors who are involved in financial crimes. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared policy for the resignation for the members of the Board of Directors who are involved in the financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Directors on December 1, 2016.

The resignation procedure for the members of the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Directors shall resign from his position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such Director within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving the resignation letter; Members of the Board of Directors who resign still be held liable since the appointment of position until the date of the resignation and approved by the GMS;
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit the result to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

Direksi Board of Directors

KEBERAGAMAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Direksi antara lain ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman. Keragaman tersebut merupakan hal positif dan sangat diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dan efektivitas dalam pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dengan tidak membedakan gender.

Direksi Protelindo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS memiliki komposisi yang cukup beragam. Tidak hanya dari sisi usia, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan serta keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Informasi mengenai keberagaman Direksi dapat dilihat pada Profil masing-masing Direksi pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DIREKSI

Perseroan memastikan apabila terdapat pemberian pinjaman kepada anggota Direksi Perseroan, pemberian pinjaman tersebut akan dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang wajar dan menggunakan prinsip *arm's length* serta memberlakukan suku bunga yang sesuai dengan yang berlaku di pasar pada saat pemberian pinjaman dilakukan.

Untuk memastikan penerapan prinsip *arm's length*, pemberian pinjaman kepada anggota Direksi juga wajib melibatkan analisa dan persetujuan Komite Audit Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The educational background, competence, and experience of the Board of Directors, among others, demonstrate its diversity. The diversity is an asset, and it is necessary for the decision-making process and the effectiveness of the Company's management by the Board of Directors, regardless of gender.

Protelindo's Board of Directors appointed based on the GMS Resolution has a fairly diverse composition. Not only in terms of age, work experience, educational background and expertise needed in carrying out their duties and responsibilities.

Information about the diversity of the Board of Directors is presented on the Profile of each Board of Directors of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

LOAN POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company ensures that if loans are provided to members of the Company's Board of Directors, such loans will be made under an agreement that includes fair terms and conditions, adheres to the *arm's length* principle, and applies an interest rate in accordance with market rates at the time the loan is made.

To ensure the application of the *arm's length* principle, the provision of loans to members of the Board of Directors also must involve analysis and approval by the Company's Audit Committee.

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mempunyai 3 (tiga) Komite Penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Sistem *Whistle Blower*. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (*charter*). Adapun dasar hukum pembentukan organ penunjang Dewan Komisaris mengacu pada:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

To support the supervisory function, the Board of Commissioners established 3 (three) Supporting Committees, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Whistle Blower System Committee. Each Supporting Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners and the duties and responsibilities of each Committee are stated in each charter. The legal basis for the establishment of supporting organs of the Board of Commissioners refers to:

1. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance;
2. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee;
3. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
4. Company's Articles of Association.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris untuk menerapkan pengendalian internal dan audit serta memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat, memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan tingkat pencapaian kerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

DASAR HUKUM

Komite Audit Perseroan dibentuk masing-masing melalui Surat keputusan Dewan komisaris tanggal 1 Juni 2021 dan telah sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja komite Audit.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A
3. Anggaran Dasar Perseroan

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit Protelindo terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen (Ketua Komite), dan pihak dari luar Perusahaan Publik (anggota) yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The Audit Committee was established and is responsible to the Board of Commissioners to implement the internal control and audit as well as providing an independent opinion to matters that require attention of the Board of Commissioners in accordance with the principles of Good Corporate Governance and prevailing laws and regulation.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions, ensuring the company is managed with sound management, providing advice in the implementation of internal control and company audits, making written reports on every assignment given by the Board of Commissioners, and making reports on the implementation of Audit Committee activities and the level of achievement of its performance to be disclosed in the Company's Annual Report.

LEGAL BASIS

The Company's Audit Committee was established through the Decree of the Board of Commissioners dated June 1, 2021 and in reference to:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee Work.
2. Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A
3. Company's Articles of Association

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

The composition of Protelindo's Audit Committee consists of 3 (three) members that include Independent Commissioners (Chairman of the Committee), and external parties (members) who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Komite Audit Audit Committee

Berikut susunan Komite Audit Perseroan per tanggal 31 Desember 2023:

The following is the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris 1 Juni 2021 BOC Decree June 1, 2021	2021 - 2024
Herwan Ng	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 1 Juni 2021 BOC Decree June 1, 2021	2021 - 2024
Myrnie Zachraini Tamin	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 1 Juni 2021 BOC Decree June 1, 2021	2021 - 2024

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES

Kusmayanto Kadiman

Ketua Komite Audit | Chairman of Audit Committee

Profil Kusmayanto Kadiman sebagai Ketua Komite Audit sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kusmayanto Kadiman profile as Chairman of the Audit Committee as well as Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Komite Audit Audit Committee



Herwan Ng

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Umur | Age
51 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris 1 Juni 2021	BOC Decree June 1, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi, Universitas Tarumanagara (1995) Master of Business Administration, Edinburgh Business School of Heriot Watt University (2010) Diploma in Corporate Governance, Corporate Governance Institute (2023) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Economics, Tarumanagara University (1995) Master of Business Administration, Edinburgh Business School of Heriot Watt University (2010) Diploma in Corporate Governance, Corporate Governance Institute (2023)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Anggota Komite Audit di PT Vale Indonesia Tbk. Anggota Komite Audit PT Goodyear Indonesia Tbk. Anggota Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk. Anggota Komite Audit PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Anggota Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk. Anggota Komite Audit PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Anggota Komite Audit PT FKS Multi Agro Tbk. Anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). 	<ul style="list-style-type: none"> Independent Commissioner of PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Member of Audit Committee of PT Vale Indonesia Tbk. Member of Audit Committee of PT Goodyear Indonesia Tbk. Member of Audit Committee of PT Archi Indonesia Tbk. Member of Audit Committee of PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Member of Audit Committee of PT Samudera Indonesia Tbk. Member of Audit Committee of PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Member of Audit Committee of PT FKS Multi Agro Tbk. Member of the National Committee on Government Policy (KNKG).
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Beliau memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun dalam bidang keuangan, kepatuhan, perpajakan dan manajemen risiko. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola AWR Lloyd Indonesia dari 2019 sampai 2020, sebagai Direktur Keuangan di perusahaan pertambangan Rio Tinto Indonesia dari tahun 2005 sampai awal tahun 2019. Beliau juga berkarir selama 10 tahun di PwC Indonesia dan Belanda sejak tahun 1995 sampai tahun 2005, di mana beliau memimpin tim dalam berbagai penugasan termasuk audit laporan keuangan, tinjauan penerapan prosedur, reviu pengendalian internal, tinjauan atas Sarbanes-Oxley Section 404, melakukan uji tuntas finansial untuk merger dan akuisisi dan jasa keuangan lainnya.</p>	<p>He has more than 27 years of experience in finance, compliance, taxation and risk management. He served as Managing Director of Lloyd Indonesia's AWR from 2019 to 2020, as Finance Director of Rio Tinto Indonesia from 2005 to early 2019. He also spent 10 years at PwC Indonesia and the Netherlands from 1995 to 2005, where he led teams in various assignments including financial statement audits, procedure implementation reviews, internal control reviews, Sarbanes-Oxley Section 404 reviews, conducting financial due diligence for mergers and acquisitions and other financial services.</p>
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> CPA, Institut Akuntan Publik Indonesia (2004) CIA, The Institute of Internal Auditors (2006) PMP, Project Management Institute (2007) CTP, Association for Financial Professionals (2007) FCMA, ICMA ANZ (2007) CA, Ikatan Akuntan Indonesia (2013) FCPA, CPA Australia (2015) Certified Governance Risk Compliance Professional, OCEG (2021) ASEAN CPA (2021) Certified Governance Risk Compliance Auditor, OCEG (2021) Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS (2022) 	<ul style="list-style-type: none"> CPA, Indonesian Institute of Public Accountants (2004) CIA, The Institute of Internal Auditors (2006) PMP, Project Management Institute (2007) CTP, Association for Financial Professionals (2007) ICMMA, ICMA ANZ (2007) CA, Indonesian Institute of Accountants (2013) FCPA, CPA Australia (2015) Certified Governance Risk Compliance Professional, OCEG (2021) ASEAN CPA (2021) Certified Governance Risk Compliance Auditor, OCEG (2021) Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS (2022)

Komite Audit Audit Committee



Myrnie Zachraini Tamin

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Umur | Age
60 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris 1 Juni 2021	BOC Decree June 1, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (1987) Magister Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Accounting, University of Indonesia (1987) Master of Business Law, Padjadjaran University (2006)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk Anggota Komite Audit Universitas Indonesia Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) 	<ul style="list-style-type: none"> Independent Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Member of Audit Committee of PT Bumi Resources Tbk Member of Audit Committee of University of Indonesia Member of Audit Committee of Mitra Dhuafa Cooperative (KOMIDA) Member of the Certification Board of the Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Beliau berpengalaman di bidang akuntansi, audit, keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko. Beliau pernah menjadi anggota Komite Audit PT Indo Tambangraya Megah Tbk pada tahun 2008-2013. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja selama 20 tahun di PricewaterhouseCoopers sejak 1987 hingga 2007.</p>	<p>She has experienced in accounting, auditing, finance, taxation, and risk management. She was a member of the Audit Committee of PT Indo Tambangraya Megah Tbk in 2008-2013. She also has 20 years of experience working at PricewaterhouseCoopers from 1987 to 2007.</p>
Sertifikasi Certification	<p>Memiliki CPA Indonesia dan Certification in Audit Committee Practices (CACP).</p>	<p>Holds CPA Indonesia and Certification in Audit Committee Practices (CACP).</p>

Komite Audit Audit Committee

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Berdasarkan peraturan terkait implementasi GCG, ketua dan anggota Komite Audit wajib bersifat independen agar dapat memberikan saran dan masukan yang independen kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, setiap anggota Komite Audit setiap tahunnya memberikan pernyataan independensi.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

Based on regulations related to GCG implementation, the chairman and members of the Audit Committee must be independent in order to provide independent advice and input to the Board of Commissioners. As such, each member of the Audit Committee annually provides a statement of independence.

Pernyataan Independensi Independence Statement	Kusmayanto Kadiman	Herwan Ng	Myrnie Zachraini Tamin
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Protelindo dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; Not a person in the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to Protelindo within the last 6 (six) months;	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Protelindo dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen); Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise Protelindo's activities within the last 6 (six) months (except for Independent Commissioners);	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Protelindo; Does not have direct or indirect shares in Protelindo;	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Protelindo; The family has neither direct nor indirect shares in Protelindo;	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Protelindo; Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Protelindo;	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Protelindo; Does not have a business relationship either directly or indirectly related to Protelindo's business activities;	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; Does not serve as an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature and/or is a candidate or serves as the head/deputy head of local government;	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di Protelindo. Do not have other positions that can cause conflicts of interest related to positions in Protelindo.	√	√	√

Keterangan: √ = Ya | x = Tidak | Description: √ = Yes | x = No

Komite Audit Audit Committee

Semua anggota Komite Audit Protelindo telah memenuhi kriteria independensi di atas.

All members of Protelindo's Audit Committee have met the above independence criteria.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit Protelindo mengacu pada Pedoman Kerja Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 2016 serta telah dipublikasikan di situs Perusahaan.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

Protelindo's Audit Committee refers to the Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners and effective on April 1, 2016 and published on the Company's website.

Pedoman Kerja tersebut mencakup 5 (lima) bagian yang terdiri dari:

The Charter include 5 (five) parts consisting of:

- Bagian I Pendahuluan
Bagian Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Visi dan Misi, serta Maksud dan Tujuan.
- Bagian II Pembentukan dan Keanggotaan Komite Audit
Bagian ini memuat Pengertian, Struktur Komite Audit, Keanggotaan, Pembentukan dan Pengangkatan Anggota, Pembentukan Keanggotaan (Persyaratan Independensi dan Persyaratan Kompetensi), dan Masa Tugas Komite Audit.
- Bagian III Fungsi, Tugas, Kewenangan Dan Tanggung Jawab
Bagian ini berisi tentang Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab.
- Bagian IV Lingkup Pekerjaan
- Bagian V Kode Etik Dan Mekanisme Rapat
- Bagian VI Penutup

- Part I Introduction
The Introduction section consists of Background, Vision and Mission, and Purposes and Objectives.
- Part II Establishment and Membership of Audit Committee
This section contains the Definition, Audit Committee Structure, Membership, Formation and Appointment of Members, Membership Formation (Independence Requirements and Competency Requirements), and the Term of Service of the Audit Committee.
- Part III Functions, Duties, Authorities and Responsibilities
This section contains Functions, Duties, Authorities, and Responsibilities.
- Part IV Scope of Work
- Part V Code of Ethics and Meeting Mechanism
- Part VI Concluding

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan piagam Komite Audit, antara lain:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The following are duties and responsibilities of the Audit Committee based on the Audit Committee charter:

Tugas

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan, seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Duties

1. Review financial information issued by the Company, such as Financial Statements, projections, and other financial information.
2. Review the Company's compliance with Capital Market laws and regulations and other laws related to the Company's business activities.

Komite Audit Audit Committee

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pergantian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan public Perseroan.
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.
11. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan dalam transaksi dengan pihak berelasi.

Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Audit yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - b. Laporan Semester pelaksanaan tugas Komite Audit
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit

3. Provide independent opinion in the event of dissenting opinion between management and accountants for the services provided.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment or removal of Accountants based on independence, scope, assignment and fees.
5. Review the implementation of audits by internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
6. Review the independence and objectivity of the Company's public accountants.
7. Report to the Board of Commissioners in relation to various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors.
8. Review and report to the Board of Commissioners on complaints related to the Company, including but not limited to complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.
10. Conduct an examination of allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of the results of the Board of Directors meeting resolutions which can be carried out by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at the Company's expense.
11. Review and provide advice to the Board of Commissioners related to potential conflict of interest of the Company in the related party transaction.

Responsibilities

1. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Audit Committee is responsible for submitting to the Board of Commissioners the following reports:
 - a. Annual Report on the implementation of duties and activities of the Audit Committee which will be disclosed in the Annual Report.
 - b. Semester Report on the implementation of the duties of the Audit Committee
 - c. Report for each implementation of specific duties of the Audit Committee

Komite Audit Audit Committee

3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Kewenangan

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas atas informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan rapat Komite Audit diagendakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Piagam Komite Audit. Kehadiran dalam rapat komite audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota senior Komite Audit apabila Ketua berhalangan hadir. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Setiap hasil keputusan yang dihasilkan dalam rapat komite audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan risalah rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 Komite Audit telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat. Adapun kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit di tahun 2023 sebagai berikut:

3. The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

Authority

1. The Audit Committee has unrestricted access to information about the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties.
2. Communicate directly with employees including the Board of Directors and parties who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding their duties and responsibilities.
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may request the assistance of experts and/or consultants to assist the Audit Committee.
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE MEETING

Audit Committee meetings are scheduled at least once in 3 (three) months in accordance with the Audit Committee Charter. Attendance at audit committee meetings is at least attended by more than 1/2 (one half) of the total members and led by the Chairman of the Audit Committee or senior members of the Audit Committee if the Chairman is unable to attend. Meetings can be held physically and non-physically through teleconference, video conference or other electronic media facilities. If deemed necessary, the Audit Committee may invite management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

Every decision produced in the audit committee meeting must be stated in the minutes of meeting and signed by all members present and the minutes of the meeting are reported to the Board of Commissioners.

During 2023, the Audit Committee has held eight (8) meetings. The attendance of each member of the Audit Committee in the Audit Committee Meeting in 2023 is as follows:

Komite Audit Audit Committee

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Ketua Chairman	8	8	100
Herwan Ng	Anggota Member	8	8	100
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota Member	8	8	100

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan anggota Komite Audit diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi Komite Audit. Rincian realisasi program pengembangan kompetensi di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The implementation of the Education and Training program for Audit Committee members is held to improve the competence of the Audit Committee. Details of the realization of competency development programs in 2023 is described in the following table:

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
Herwan Ng	Culture and Conduct Risk Management	5 Januari January 5	OCEG
	Essential Connections for ESG Success	5 Januari January 5	OCEG
	Indonesia Economic Outlook 2023	2 Februari February 2	CPA Australia
	The Root of the Compliance vs Security Paradox	19 Februari February 19	OCEG
	Peran Auditor Dalam Identifikasi Dan Analisis Threat Cybersecurity	21 Februari February 21	Institut Akuntan Publik Indonesia
	Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan	3 Maret March 3	IRMAPA
	Capitalizing The Emerging Trends In Insurance Market	9 Maret March 9	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
	Corporate Performance	14 Maret March 14	CPA Australia
	Leadership: Thriving During The Disruptive Times	27 Juni June 27	CPA Australia
	Pre-IPO and Post IPO	10 Agustus August 10	BUMN Leadership & Management Institute

Komite Audit Audit Committee

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
	Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk Rating & Issuance of Debt Securities & Sukuk	10 Agustus August 10	BUMN Leadership & Management Institute
	2023 GRC Summit: Building Resilient Future Through GRC and ESG	25 Agustus August 25	IRMAPA
	The IIA Annual Conference "Staying Relevant"	30 Agustus August 30	The IIA - Indonesia
	AI & GRC: Risky Business to Business Advantage	9 September September 9	OCEG
	Putting the G in ESG - Making ESG Relevant to Modern Corporate Governance	9 September September 9	OCEG
	Ethics: Integrity Management for Internal Ethics Related	21 September September 21	The IIA - Indonesia
	Kode Etik Profesi Akuntan Publik: Sikap Profesional Serta Pengamanan Atas Ancaman Terhadap Independensi Akuntan Publik Public Accountant Professional Code of Ethics: Professional Attitude and Security Against Threats to Public Accountant Independence	21 September September 21	Institut Akuntan Publik Indonesia
	The Challenges in Attracting and Retaining Talent in Accounting	12 Oktober October 12	CPA Australia
	Update PSAK Terkini dalam Penyusunan Laporan Keuangan Latest PSAK Update in Financial Statement Preparation	13 Oktober October 13	Institut Akuntan Publik Indonesia
	Audit IT Untuk Menunjang Pekerjaan Akuntan Publik Dalam Audit Laporan Keuangan IT Audit to Support the Work of Public Accountants in Financial Statement Audit	3 November November 3	Institut Akuntan Publik Indonesia
Myrnie Zachraini Tamin	Risk Governance & Leadership Master Class	6 Desember December 6	ERMA-IFC-CRMS
	Creating Value In Challenging World	12 Desember December 12	Ikatan Akuntan Indonesia
	"Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik"	31 Januari January 31	APPI
	Financial Technology: Regulatory, Accounting and Tax Technical Updates 2023	19 September September 19	PwC Indonesia
	Global Internal Audit & Risk Survey 2023 Launch	5 Desember December 5	PwC Indonesia
Konferensi Nasional Profesi Manajemen Risiko ke IX	14-15 Desember December 14-15	LSPMR	

Komite Audit Audit Committee

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Komite Audit menyerahkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Komisaris Utama atas kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan usaha.

Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit di tahun 2023, diantaranya:

1. Pembahasan hasil audit laporan keuangan tahun 2022 dengan eksternal auditor
2. Pembahasan rencana kerja audit internal untuk tahun 2023
3. Pembahasan hasil kerja audit internal setiap kuartal
4. Pembahasan manajemen risiko dengan manajemen dan divisi audit internal
5. Pembahasan performa dan laporan keuangan setiap kuartal dengan manajemen
6. Pembahasan perencanaan audit laporan keuangan tahun 2023 dengan auditor eksternal
7. Evaluasi kinerja dan rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
8. Pembahasan strategi dan pengembangan usaha group perusahaan dengan manajemen

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

In carrying out its duties, the Audit Committee submits monthly, quarterly and annual reports to the President Commissioner for supervisory activities and providing advice on business management.

Realization of the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee in 2023 are as follows:

1. Discussion of the results of the 2022 financial report audit with the external auditor
2. Discussion of the internal audit work plan for 2023
3. Discussion of internal audit work results every quarter
4. Discussion of risk management with management and the internal audit division
5. Discussion of performance and financial reports every quarter with management
6. Discussion of planning for the 2023 financial report audit with external auditors
7. Performance evaluation and recommendations from Public Accountants and Public Accounting Firms
8. Discussion of company group strategy and business development with management

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

DASAR HUKUM

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan mengacu pada:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 24 April 2015; dan
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2019.

KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Protelindo terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen (Ketua), dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Berikut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris 2 Mei 2019 BOC Decree May 2, 2019	2019 - 2024
Ario Wibisono	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 2 Mei 2019 BOC Decree May 2, 2019	2019 - 2024
Doni Kusuma	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs SMN dan Protelindo Head of Human Resources and General Affairs Division of SMN and Protelindo	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 2 Mei 2019 BOC Decree May 2, 2019	2019 - 2024

The Remuneration and Nomination Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners with the aim of assisting the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions. Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported at the GMS.

LEGAL REFERENCES

The Remuneration and Nomination Committee is formed with reference to:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
2. Decree of the Board of Commissioners dated April 24, 2015; and
3. Decree of the Board of Commissioners dated May 2, 2019.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERSHIP

The structure of Protelindo's Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) members who are Independent Commissioners (Chairman), and other members who can be assigned from members of the Board of Commissioners, external parties, or parties who occupy managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.

The following is the composition of the Company's Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023:

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBER PROFILES

Kusmayanto Kadiman

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi | Chairman of Remuneration and Nomination Committee

Profil Kusmayanto Kadiman sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kusmayanto Kadiman's profile as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee as well as Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Ario Wibisono

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi | Member of Remuneration and Nomination Committee

Profil Ario Wibisono sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris Utama dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Ario Wibisono's profile as member of the Remuneration and Nomination Committee as well as President Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee



Doni Kusuma
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of Remuneration and Nomination Committee

Umur | Age
46 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2019	Board of Commissioners Decree dated May 2, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.	Earned Bachelor Degree in Human Resources Management in 2008 from Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs SMN dan Protelindo	Head of Human Resources and General Affairs of SMN and Protelindo
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, manfaat/ tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008–2009). Bapak Kusuma saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs Perseroan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan program kompensasi dan program tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, komunikasi karyawan, program retensi dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000–2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.	He has over 22 years' experience in compensation remuneration, benefit/ allowance, and industrial relationships. He joined Protelindo in 2008 as Human Resources Assistant (2008–2009). Mr. Kusuma's current position is the Head of Human Resources and General Affairs of the Company and Protelindo. He is responsible for the implementation of compensation and benefits programs, HR systems, Company Regulations, internal communication and retention program, and also includes corporate social responsibility programs. Prior to joining Protelindo, he worked with General Electric Finance Indonesia for six years (2000–2006). From 2006 to 2008, he worked in several local and multinational companies in Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sebagai langkah menjaga independensi, maka setiap anggota Komite wajib memberikan pernyataan independensi setiap tahunnya.

INDEPENDENCE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

As a measure to maintain independence, each member of the Committee must provide a statement of independence every year.

Pernyataan Independensi Independence Statement	Kusmayanto Kadiman	Ario Wibisono	Doni Kusuma
Bukan merupakan Direksi Protelindo Not a Board of Directors of Protelindo	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama dari Perseroan Not a person affiliated with the Company, a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or the ultimate shareholder of the Company	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Protelindo Does not have direct or indirect shares in Protelindo	✓	✓	✓
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Protelindo No family has any direct or indirect shares in Protelindo	✓	✓	✓
Mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi Have experience related to Nomination and/or Remuneration	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Protelindo Does not have a business relationship either directly or indirectly related to Protelindo's business activities	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah Does not serve as an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature and/or is a candidate or serves as the head/deputy head of local government	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di Protelindo Do not have other positions that can cause conflicts of interest related to positions in Protelindo	✓	✓	✓

Keterangan: ✓=Ya |x=Tidak | Description: ✓=Yes |x=No

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Protelindo berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 24 April 2015 serta telah dipublikasikan di situs Perseroan. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain berisi Pendahuluan, Tugas dan Tanggung Jawab, Komposisi dan Struktur Keanggotaan, Tata Cara dan Prosedur Kerja, Kebijakan Penyelenggaraan Rapat,

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The implementation of duties of Protelindo's Remuneration and Nomination Committee is guided by the Remuneration and Nomination Committee Charter signed by the Board of Commissioners on April 24, 2015 and published on the Company's website. The Remuneration and Nomination Committee Charter contains Introduction, Duties and Responsibilities, Composition and Membership Structure, Work Procedures and Procedures,

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

Sistem Pelaporan Kegiatan, Masa Jabatan, dan Penutup.

Meeting Implementation Policy, Activity Reporting System, Term of Office, and Closing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policy, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners which will be part of the Board of Commissioners' Report to be submitted and then determined at the General Meeting of Shareholders;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: (i) the composition of the positions of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (ii) policies and criteria needed in the nomination process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and (iii) performance assessment policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as assessment material;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders; and
- Carry out other duties, other than those mentioned above given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, ketentuan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan, yang dipimpin oleh Ketua Komite. Rapat hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite yang salah satunya merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani suatu persetujuan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Di tahun 2023, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Ketua Chairman	3	3	100
Ario Wibisono	Anggota Member	3	3	100
Doni Kusuma	Anggota Member	3	3	100

The Remuneration and Nomination Committee reports to the Board of Commissioners and must act independently in carrying out its duties.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

Based on the Remuneration and Nomination Committee Charter, the provisions for the Remuneration and Nomination Committee meetings are held periodically at least once in 4 (four) months, chaired by the Chairman of the Committee. A meeting can only be held if it is attended by a majority of the total committee members, one of whom is the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee. Meetings can be held physically and non-physically through teleconference, video conference or other electronic media facilities.

The Remuneration and Nomination Committee may also take valid decisions without holding a meeting, provided that all committee members have been notified in writing and all committee members give approval to the proposal submitted in writing by signing a circular agreement. Decisions taken in this way have the same force as decisions lawfully taken in meetings.

In 2023, the Remuneration and Nomination Committee meeting was held three (3) times. The attendance of each member of the Remuneration and Nomination Committee at the meeting is as follows:

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dilaporkan dalam rapat yang dilakukan secara berkala. Berikut realisasi pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2023:

1. Meninjau skema remunerasi yang ada untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan laporan yang dipersiapkan oleh konsultan tenaga kerja eksternal;
3. Merumuskan prinsip dasar dalam menentukan kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan:
 - Posisi dan persaingan dalam industri Perseroan;
 - Klasifikasi dan kompleksitas tugas yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - Biaya hidup saat ini termasuk indikator inflasi nasional.
4. Merumuskan prinsip dasar untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan:
 - Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kualifikasi personal dari para kandidat; dan
 - Persyaratan dari Perseroan.
5. Memberikan rencana pengembangan profesional untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The implementation of duties of the Remuneration and Nomination Committee is reported in meetings held periodically. The following is the realization of the implementation of duties of the Remuneration and Nomination Committee in 2023:

1. Reviewed the existing remuneration scheme of the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Provided recommendations to the Board of Commissioners with regards to policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering a report the external manpower consultant;
3. Formulated basic principles in setting remuneration policy by considering:
 - Positioning and competitiveness in the Company's industry;
 - Classification and complexity of work performed by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - Current cost of living including the national inflation indicators.
4. Formulated the basic principles for nominating members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering:
 - The Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations;
 - Personal qualifications of the candidates; and
 - Requirements of the Company.
5. Provided a professional development plan for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER

WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE

Komite Sistem *Whistle Blower* dibentuk untuk membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam menjalankan sistem *whistleblowing* di Perseroan.

DASAR HUKUM

Perseroan telah membentuk Komite Sistem *Whistle Blower* berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 14 Desember 2022. Komite Sistem *Whistle Blower* terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Direktorat Enterprise Support Management dan Departemen Internal Audit.

PIAGAM KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER

Komite Sistem *Whistle Blower* Perseroan telah memiliki Piagam Komite Sistem *Whistle Blower* yang antara lain berisi Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Sistem *Whistle Blower*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER

Komite Sistem *Whistle Blower* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima dan mendokumentasikan laporan yang masuk;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
3. Melakukan investigasi;
4. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
5. Memberikan perlindungan kepada Pelapor; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER

Berdasarkan Piagam Komite Sistem *Whistle Blower*, ketentuan rapat Komite Sistem *Whistle Blower* diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan, yang dipimpin oleh Ketua Komite. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik (*on-line*). Di tahun 2023, rapat Komite Sistem *Whistle Blower* diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

The Whistle Blower System Committee was formed to assist the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners in managing the whistleblowing system in the Company.

LEGAL REFERENCES

The Company has established a Whistle Blower System Committee based on the Decree of the Board of Commissioners on date dated December 14, 2022. Whistle Blower System Committee consist of 3 members from Enterprise Support Management Directorate dan Internal Audit Department.

WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE CHARTER

The Company's Whistle Blower System Committee has a Whistle Blower System Committee Charter which contains Duties, Responsibilities, and Authority of the whistle blower system committee.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE

The Whistle Blower System Committee has the following duties and responsibilities:

1. Receive and document incoming reports;
2. Identifying and classifying the type of violation;
3. Performing investigations;
4. Maintaining the confidentiality of whistleblower's identity;
5. Protecting the whistleblower; and
6. Prepare and submit reports to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE MEETING

Based on the Whistle Blower System Committee Charter, the provisions of the Whistle Blower System Committee meetings are held periodically at least 1 (one) in 3 (three) months, chaired by the Chairman of the Committee. Meetings can be held physically and non-physically (*on-line*). In 2023, the Whistle Blower System Committee meeting was held 4 (four) times.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memfasilitasi komunikasi antara Direksi, Dewan komisaris, para pemegang saham, otoritas pasar modal dan para pemangku kepentingan lainnya agar terjalin dengan lancar, efektif, transparan dan komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika, prinsip GCG, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Perseroan.

DASAR HUKUM

Dalam pemenuhan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-A serta Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan mengangkat Maya Marcella Widjaya sebagai Sekretaris Perusahaan yang secara hukum juga dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan Direksi tanggal 1 November 2017.

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Decree of the Board of Directors. The Corporate Secretary is responsible in facilitating communication between the Board of Directors, the Board of Commissioners, shareholders, capital market authorities and other stakeholders in order to be efficient, effective, transparent and comprehensive by taking into account the ethical standard, GCG principles and values held by the Company.

LEGAL REFERENCES

In compliance with Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A and OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, a public company is required to have a corporate secretary function that serves as a liaison between the company's organ with the external parties including government and non-government institutions, shareholders, as well as other capital market communities.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

The Company has appointed Maya Marcella Widjaya as Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors dated November 1, 2017

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Maya Marcella Widjaya
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Umur | Age
36 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	SK Direksi tanggal November 1, 2017	BOD Decree dated November 1, 2017
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Atma Jaya, Tahun 2010	Obtained Law Degree from Atma Jaya Catholic University, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Sebelum bergabung dengan Perseroan, Ibu Maya Marcella adalah konsultan hukum di Hiswara Bunjamin & Tandjung dengan pengalaman lebih dari enam tahun di bidang pasar modal, dimana kemudian beliau juga bekerja di Herbert Smith Freehills LLP (kantor hukum internasional yang merupakan asosiasi Hiswara Bunjamin & Tandjung) untuk secondment di kantor Singapura pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.</p> <p>Beliau memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, manfaat/tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008-2009). Bapak Kusuma saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs Perseroan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan program kompensasi dan program tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, komunikasi karyawan, program retensi dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000-2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.</p>	<p>Prior to joining the Company, Mrs. Maya Marcella worked as a lawyer at Hiswara Bunjamin & Tandjung with more than six years of experience in capital law practice, during which she also worked in Herbert Smith Freehills LLP (the international associated law firm of Hiswara Bunjamin & Tandjung) on a secondment at Singapore office in 2015 until 2016.</p> <p>She has over 22 years' experience in compensation remuneration, benefit/allowance, and industrial relationships. He joined Protelindo in 2008 as Human Resources Assistant (2008-2009). Mr. Kusuma's current position is the Head of Human Resources and General Affairs of the Company and Protelindo. He is responsible for the implementation of compensation and benefits programs, HR systems, Company Regulations, internal communication and retention program, and also includes corporate social responsibility programs. Prior to joining Protelindo, he worked with General Electric Finance Indonesia for six years (2000-2006). From 2006 to 2008, he worked in several local and multinational companies in Indonesia.</p>

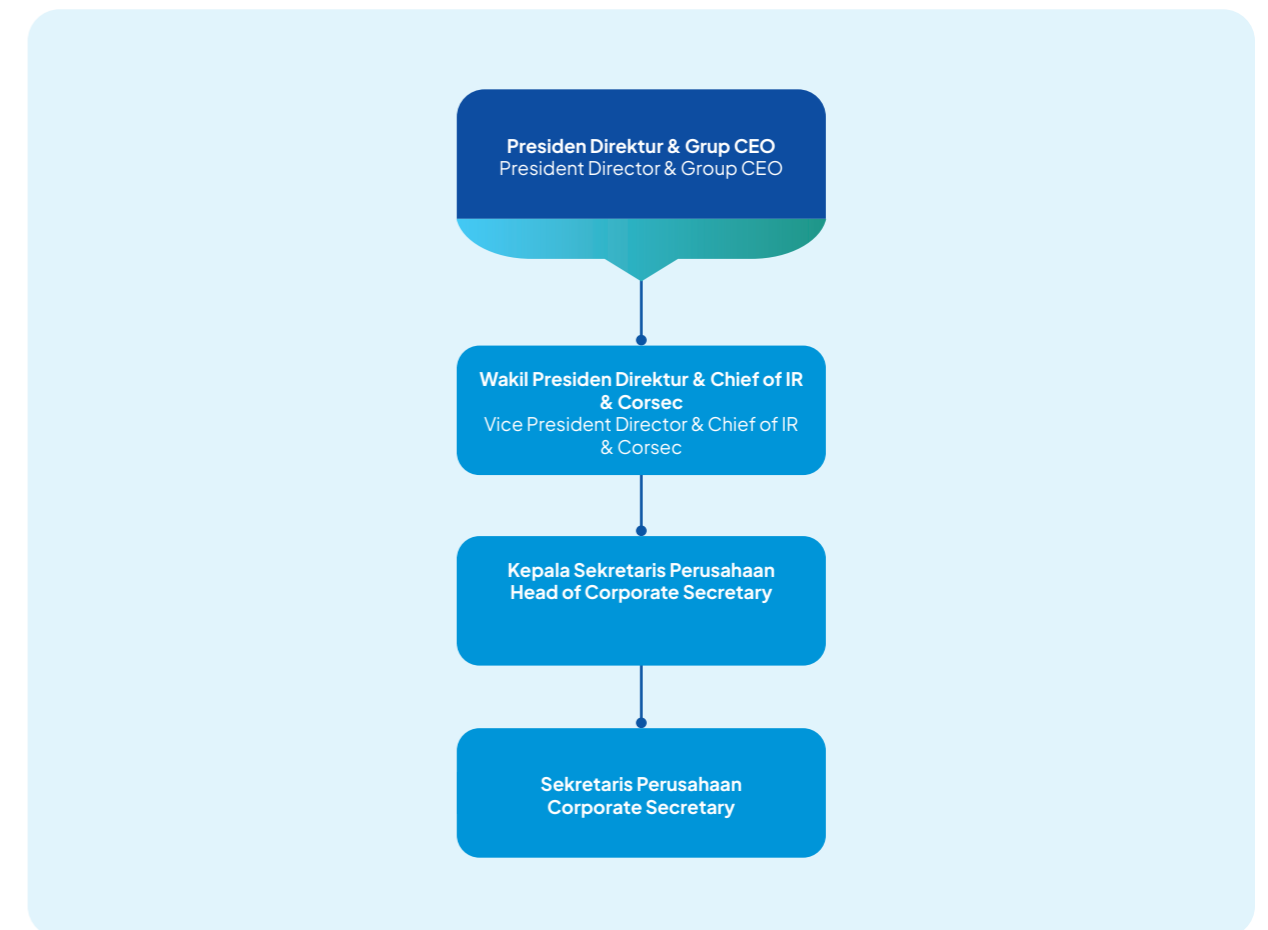
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN
SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL
STRUCTURE

Berdasarkan Susunan Organisasi Perusahaan, Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Utama, dengan struktur sebagai berikut:

Based on the Company's Organizational Structure, the Corporate Secretary Division is under the President Director with the following structure:



Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
6. Melakukan keterbukaan informasi ke publik atau pelaporan kepada OJK terkait kegiatan korporasi Perseroan;
7. Menyusun panduan dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perseroan;
8. Mengelola komunikasi dengan: OJK, Self-Regulatory Organization (BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Biro Administrasi Efek (BAE), BKPM, dan institusi lainnya yang terkait;
9. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan;
10. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat risalah rapat;
11. Membantu dalam proyek pembiayaan utang, transaksi akuisisi perusahaan dan menara, dan transaksi obligasi;
12. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
13. Mengelola situs web Perseroan guna mematuhi peraturan OJK yang baru.

CORPORATE SECRETARY DUTIES & RESPONSIBILITIES

The responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Follow the capital markets developments, especially the prevailing capital markets regulations;
2. Provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with the prevailing capital markets regulations;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in applying GCG principles;
4. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.
5. Organizing the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders;
6. Undertaken information disclosure pertaining to certain corporate activities of the Company
7. Organizing Corporate Social Responsibility guidelines and activities of the Company;
8. Maintaining communication with the OJK, Self-Regulatory Organization (IDX, the Indonesian Central Securities Deposit (also known as KSEI), Share Registrar (also known as BAE), Indonesia Investment Coordinating Board (also known as BKPM) and other related institutions;
9. Organizing and preparing the Annual Report and Sustainability Report of the Company;
10. Organizing all Board meetings and drafting the Minutes of Meetings;
11. Assisting in debt refinancing projects, company acquisitions, tower acquisition transactions and bond transactions;
12. Drafting and preparing relevant procedures and policies as stipulated in Corporate Governance Guidelines issued by OJK; and
13. Adjusting the Company's website to comply with the new OJK regulation.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023, sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The competency development programs participated by the Corporate Secretary during 2023 were as follows:

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
19 Januari 2023 January 19, 2023	Webinar <i>ESG Strategy and Rating</i> - Kerja Sama PT Bursa Efek Indonesia dengan PwC Indonesia ESG Strategy and Rating Webinar - Cooperation between PT Bursa Efek Indonesia and PwC Indonesia
26 Januari 2023 January 26, 2023	Indonesia Economic Outlook 2023: Opportunities and Challenges
21-23 Februari 2023 February 21-23, 2023	CG Officer Workshop Series Batch 9
22 Februari 2023 February 22, 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022 Socialization of the General Guidelines for Indonesian Corporate Government and the Implementation of the 2022 Annual Report Award
14 Maret 2023 March 14, 2023	Webinar <i>Regulatory</i> Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI Webinar on GMS Implementation Regulatory via eASY.KSEI
16 Maret 2023 March 16, 2023	IFC and IDX ESG Collaboration Launch Event and ESG Leadership Training
21 Maret 2023 March 21, 2023	Coaching Clinics SDG 16 Business Framework: Way forward for ESG: Streamlining and Impact Reporting
28 Maret 2023 March 28, 2023	Webinar dengan tema Mengenal ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Peran dan Lingkupnya dalam Tata Kelola Perusahaan Webinar on Getting to know the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Its Role and Scope in Corporate Governance
5 April 2023 April 5, 2023	Webinar dengan tema Pendalaman Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E: tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Webinar on the Deepening Indonesia Stock Exchange Regulations No. I-E: concerning Information Submission Obligations
30 Mei 2023 May 30, 2023	Webinar dengan tema <i>Effective Risk Management for Corporate Secretary</i> Webinar on Effective Risk Management for Corporate Secretary
8 Juni 2023, June 8, 2023	Webinar dengan tema Pendalaman POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Webinar on the Deepening POJK No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights
13 Juni 2023 June 13, 2023	Seminar " <i>The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia</i> " Seminar on "The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia"
27 Juni 2023 June 27, 2023	Strengthening the Board's Succession: A Framework for Board Performance & Evaluation
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Webinar dengan tema "Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan" Webinar on "Data Protection Resilience Strategy in Companies"

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Webinar <i>Compliance Refreshment</i> Emiten dan Perusahaan Publik
24 Agustus 2023 August 24, 2023	Webinar dengan tema "Pendalaman SEOJK No. 33/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Penawaran Umum" Webinar on "SEOJK Deepening No. 33/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Securities Offerings That Are Not Public Offerings"
6-7 September 2023 September 6-7, 2023	Greenhouse Gas Calculation, Mitigation, Audit and Reporting Training
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Webinar dengan tema " <i>Listed Companies Compliance Refreshment</i> " Webinar on "Listed Companies Compliance Refreshment"
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Webinar dengan tema " <i>The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience</i> " Webinar on "The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience"
18 Oktober 2023 October 18, 2023	ACMF-ISSB Technical Training on IFRS Sustainability Disclosure Standards
29-30 November 2023 November 29-30, 2023	Pelatihan " <i>Calculating Your Carbon Footprint</i> " "Calculating Your Carbon Footprint" Training
20 Desember 2023 December 20, 2023	Undangan Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 Invitation to Socialize ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 Criteria and Assessment

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY ACTIVITIES IN 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta penerapannya di dalam Grup Perseroan;
- Peninjauan dan penyempurnaan atas Pedoman Anti Korupsi dan Anti Penyuapan (*Anti-Corruption and Anti Bribery*);
- Peninjauan atas pelaksanaan CGG berdasarkan ASEAN CG Scorecard versi 2023;
- Peninjauan atas pelaksanaan GCG yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan GRI *standard* dan lembaga *rating* ESG lainnya serta penggunaan teknologi informasi secara lebih luas (antara lain, situs web Perseroan, media sosial) sebagai media keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.

During 2023, the Corporate Secretary has carried out its duties, including the following:

- Review the Code of Conduct and its application within the Group of Companies,
- Review and improvement of Anti-Corruption and Anti-Bribery Guidelines,
- Review the implementation of CGG based on ASEAN CG Scorecard version 2023,
- Review the GCG implementation that is closely related to sustainability principles in accordance with GRI standards and other ESG rating agencies, as well as the wider use of information technology (among others, the Company's website, social media) as a medium for information disclosure to stakeholders.

UNIT KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY UNIT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan untuk Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35/2014"), Perusahaan telah melakukan penunjukan Sekretaris Perusahaan yang secara umum memiliki peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam POJK 35/2014. Disamping itu, Sekretaris Perusahaan Protelindo juga memiliki peran untuk membantu Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan Grup.

Sekretaris Perusahaan dalam hal ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan diwajibkan untuk berkoordinasi dengan seluruh unit kerja yang relevan di Grup untuk memastikan implementasi strategi keberlanjutan Grup, termasuk melaporkan seluruh aktivitas dan kinerja Keberlanjutan Grup, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi visi, misi dan strategi Keberlanjutan Grup.

Dalam menjalankan fungsinya di atas, Sekretaris Perusahaan bekerja bersama-sama dengan unit kerja terkait di Perusahaan sebagai satu kesatuan fungsi Unit Keberlanjutan Grup yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

As stipulated in OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary for Issuers or Public Companies ("POJK 35/2014"), the Company has appointed a Corporate Secretary that has the roles and responsibilities as referred to in POJK 35/2014. Protelindo's Corporate Secretary also has a role to assist the Board of Directors in implementing sustainability principles in the Group.

The Corporate Secretary directly reports to the Board of Directors and is required to coordinate with all Group relevant units to ensure the implementation of sustainability strategy, including reporting on all Sustainability activities and performance, as well as socializing and internalizing the Group's Sustainability vision, mission and strategy.

The Corporate Secretary collaborates with relevant units within the Company in performing their functions as an integral part of the Group Sustainability Unit. The units are accountable to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Audit Internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan (asurans) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan dan memperbaiki kinerja operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata Kelola Perusahaan.

Perseroan memiliki Departemen Audit Internal ("DAI") yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan.

Internal Audit is an independent and objective assurance and consultation activity, with the aim of increasing the Company's value and improving the Company's operational performance, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and Corporate Governance processes.

The Company has an Internal Audit Department ("DAI") which functions to test and evaluate the implementation of internal control and risk management in accordance with the Company's policies.

LEGAL REFERENCES

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter, the Company has established the Internal Audit.



Departemen Audit Internal Internal Audit Department

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Haryo Dewanto
Kepala Departemen Audit Internal
Head of Internal Audit Department

Umur | Age
58 Tahun | Years Old

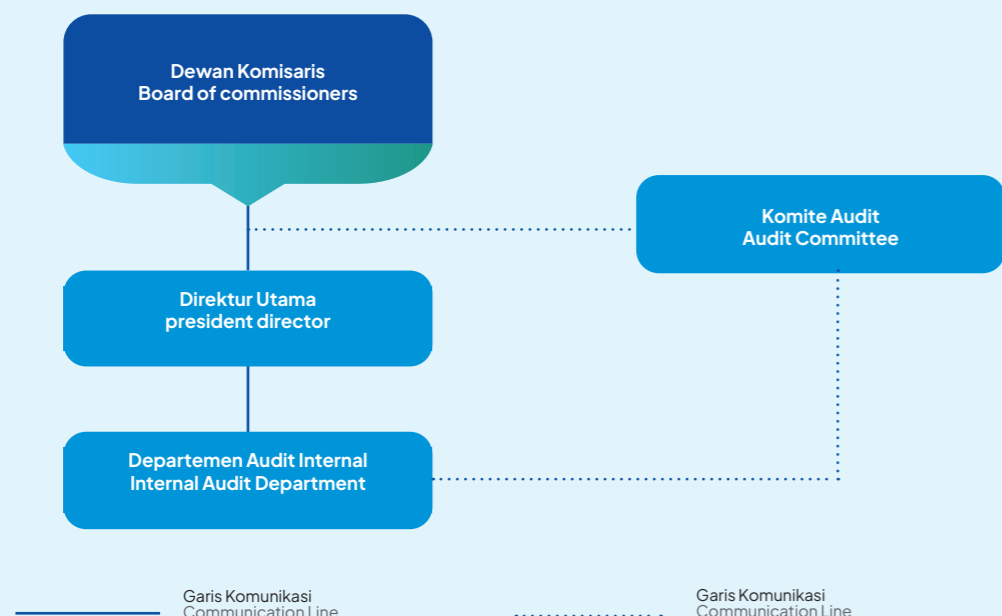
Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	Surat Pengangkatan Kepala dan Anggota Departemen Audit Internal Perusahaan tanggal 22 Agustus 2017.	Appointment Letter of Head and Member of Internal Audit Department of the Company dated August 22, 2017.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990.	Obtained Bachelor's degree from the Diponegoro University in 1990.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau adalah seorang akuntan terdaftar di Indonesia yang berpengalaman sebagai Finance Controller di Grup Ascott, yang bergerak di bidang manajemen properti yang berpusat di Singapura dari 1999-2005. Beliau bergabung dengan Perseroan di 2007 sebagai Corporate Controller dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Audit Internal. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun pada perusahaan multinasional di bagian perencanaan, akuntansi dan pengawasan.	He is a Registered Indonesian Accountant who also was a Finance Controller at the Ascott Group, a property management business based in Singapore from 1999-2005. He joined the Company in 2007 as Corporate Controller and was appointed in 2017 as Head of Internal Audit. He has over 20 years of experience working for large multinational companies in planning, accounting and controller positions.
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, manfaat/ tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008-2009). Bapak Kusuma saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs Perseroan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan program kompensasi dan program tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, komunikasi karyawan, program retensi dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000-2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.	He has over 22 years' experience in compensation remuneration, benefit/ allowance, and industrial relationships. He joined Protelindo in 2008 as Human Resources Assistant (2008-2009). Mr. Kusuma's current position is the Head of Human Resources and General Affairs of the Company and Protelindo. He is responsible for the implementation of compensation and benefits programs, HR systems, Company Regulations, internal communication and retention program, and also includes corporate social responsibility programs. Prior to joining Protelindo, he worked with General Electric Finance Indonesia for six years (2000-2006). From 2006 to 2008, he worked in several local and multinational companies in Indonesia.

Departemen Audit Internal Internal Audit Department

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

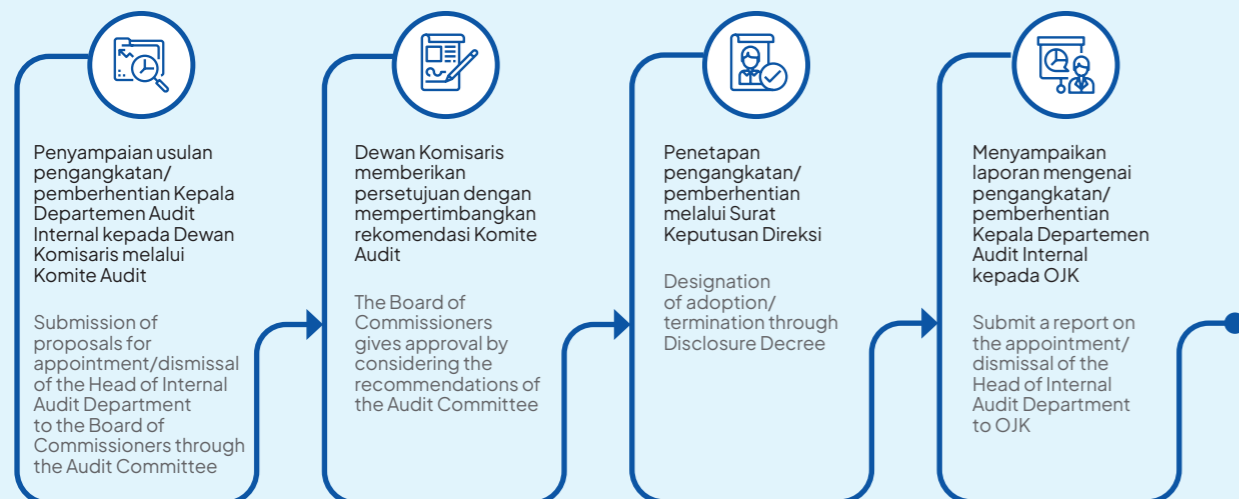
Berdasarkan Susunan Organisasi Perusahaan, Departemen Audit Internal Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan struktur sebagai berikut:



INTERNAL AUDIT DEPARTMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on the Company's Organizational Structure, the Company's Internal Audit Department reports directly to the President Director, with the following structure:

Alur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal Flow of Appointment/Dismissal of Head of Internal Audit Department



Departemen Audit Internal Internal Audit Department

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI PROFESI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah anggota DAI Perseroan ada sebanyak 12 orang yang terdiri dari seorang Ketua dan 11 anggota. Dari 12 anggota DAI yang telah memiliki sertifikat profesi adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi Profesi Professional Certification	Dikeluarkan oleh Issued by	Jumlah Personil Audit Internal yang Memiliki Sertifikasi Profesi Number of Internal Audit Personnel Obtaining Professional Certification
1.	Certification In Audit Committee Practices	Indonesian Institute of Audit Committee	1
2.	Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2
3.	Certified Internal Audit Professional (CIAP)	Badan Nasional Certification Profesi (BNSP)	1
4.	Certified Internal Control Professional (CICP)	Audit Indonesia	2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

As of the end of December 2023, DAI members composed of 12 personnel consisting of a chairman and 11 members. Of the 12 DAI members who already have professional certificates are as follows:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

- Formulate and implement yearly internal audit plan;
- Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policies;
- Conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
- Providing recommendations and objective information about the activities under review at all levels of management;
- Create and submit audit reports to the President Director and the Board of Commissioners;
- Monitor, analyse and report on the management's follow-up of audit recommendations;
- Working together with the Audit Committee
- Establish a program to evaluate the quality of internal audit activities;
- Conducting special audit(s) as needed.

Departemen Audit Internal Internal Audit Department

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Protelindo telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikaji berkala agar sesuai dengan praktik terkini. PAI Perseroan telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris pada tanggal 25 Mei 2021 serta telah dipublikasikan di situs Perusahaan. Piagam Audit Internal (PAI) antara lain mencakup Tujuan, Visi dan Misi, Struktur dan Posisi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewenangan, Kode Etik, Persyaratan anggota Departemen Audit Internal, serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kode etik auditor internal Perseroan mengacu pada Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

INTERNAL AUDIT CHARTER

SMN has an Internal Audit Charter that is reviewed regularly as to conform with current practices. The Charter has been signed by the President Director and Board of Commissioners on May 25, 2021 and has been published on the Company's website. The Internal Audit Charter (PAI) includes, among others, the Objectives, Vision and Mission, Structure and Position, Duties and Responsibilities, Authorities, Code of Ethics, Requirements for members of the Internal Audit Department, and the Prohibition of Duties and Positions.

INTERNAL AUDITOR CODE OF ETHICS

The Company's internal auditor code of ethics refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors which contains standards of conduct as guidelines for all Internal Auditors in carrying out internal audit practices.



Integritas Integrity

Menunjukkan kejujuran, obyektivitas, dan Kesungguhan dalam melaksanakan tugas, serta taat hukum dan etika Perseroan.

Demonstrate honesty, objectivity, and Sincerity in carrying out duties, as well as obeying the law and ethics of the Company.



Objektivitas Objectivity

Tidak melakukan kegiatan yang dapat berpotensi/ menimbulkan konflik dengan kepentingan Perseroan, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari *auditee* dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan audit, mengungkapkan semua fakta penting dan material serta tidak menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Not doing activities that can potentially/cause conflict with the Company's interests, not accepting anything in any form from the *auditee* and other parties related to audit work, disclosing all important and material facts and not covering up the existence of unlawful practices.



Kerahasiaan Concealment

Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh, selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian Perseroan.

Be careful and prudent in using the information obtained, always maintain the confidentiality of data and information related to the implementation of its duties and do not use information for personal or group benefits that can cause losses to the Company.



Kompetensi Competence

Melaksanakan setiap penugasan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kompetensi profesional yang dimiliki, senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitasnya secara berkelanjutan.

Carry out each assignment using their knowledge, expertise, experience, and professional competence, always improving their competence and effectiveness and quality on an ongoing basis.

Departemen Audit Internal Internal Audit Department

METODOLOGI AUDIT

Departemen Audit Internal menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan. Penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh, baik pada unit kerja di kantor pusat maupun unit bisnis.

RAPAT DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Selama tahun 2023 Departemen Audit Internal telah melakukan Rapat dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali, dan Rapat dengan Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2023, anggota Departemen Audit Internal mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut.

No	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator
1	Webinar Trends & Challenges Internal Audit in 2023-2025	2 Januari 2023 January 3, 2023	YPIA
2	Certified Fraud Examiners Exam Preparation Course	6 - 10 Februari 2023 February 6 - 10, 2023	Associations of Certified Fraud Examiner
3	Green House Gas Training & Workshop	15 - 16 Februari 2023 February 15 - 16, 2023	ESG Academy
4	Sertifikasi QIA Lanjutan (YPIA)	20 Maret 2023 - 3 April 2023 March 20, 2023 - April 3, 2023	YPIA
5	Finance & Accounting for Non-Finance & Accounting IA	15 - 16 Mei 2023 May 15 - 16, 2023	YPIA
6	Root Cause Analysis	22 - 23 Mei 2023 May 22 - 23, 2023	IIA Indonesia
7	Fraud Detection & Investigation for Internal Audit	29 - 30 Mei 2023 May 29 - 30, 2023	IIA Indonesia
8	Agile Auditing	21 - 22 Juni 2023 June 21 - 22, 2023	IIA Indonesia
9	Conference Audit Internal (Building Resilience in TUNA World)	5 - 6 Juli 2023 July 5 - 6, 2023	YPIA
10	Certified associate anti-fraud	9 - 15 Juli 2023 July 9 - 15, 2023	Awdit Indonesia

AUDIT METHODOLOGY

The Internal Audit Department applies a risk-based audit methodology that is carried out starting from the annual audit planning stage, audit implementation to reporting. Risk assessment is carried out thoroughly, both in work units at the head office and business units.

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT MEETING

During 2023, the Internal Audit Department has held four (4) meetings with the Board of Directors and four (4) meetings with the Audit Committee.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Throughout 2023, members of the Internal Audit Department have participated in various education and/or training programs for competency improvement, as described in the following table.

Departemen Audit Internal Internal Audit Department

No	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator
11	Communication Skills for Auditors: Interviewing and Negotiating	24 - 25 Juli 2023 July 24 - 25, 2023	IIA Indonesia
12	Certification Audit Committee Practices (CACP)	28 - 30 November 2023 November 28 - 30, 2023	Ikatan Komite Audit Indonesia
13	Financial Auditing for Internal Auditor	11 - 12 December 2023 December 11 - 12, 2023	IIA Indonesia

PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Departemen Audit Internal telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain audit pada seluruh bagian Operasional Perseroan, Audit kebijakan Anti Korupsi dan Standar Etika. Dalam pelaksanaan audit, Departemen Audit Internal juga melaksanakan kegiatan konsultasi terhadap para pemangku kepentingan.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT ACTIVITIES

The Internal Audit Department has carried out several activities including audits in all parts of Company's Operations, audit in Company's Anti-Corruption policy and Ethical Standards. In carrying out audits, the Internal Audit Department also carries out consultation activities with stakeholders.

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 5 Mei 2023, Perseroan telah memutuskan kriteria dan batasan dalam menunjuk jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu:

1. Mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
2. Terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Based on the Annual GMS held on May 5, 2023, the Company has stipulated the criteria and limitations in appointing the services of a Public Accountant Firm (KAP), as follows:

1. Have an international reputation (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accountant Firm);
2. Registered as an IKNB (Non-Bank Financial Industry) Auditor at the Financial Services Authority; and
3. Other terms and conditions deemed good by the Company's Board of Commissioners by taking into account the input and consideration from the Company's Audit Committee.

Akuntan Publik Public Accountant

Atas dasar tersebut, Perseroan memutuskan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja dengan Akuntan Publik (*Signing Partner*) yaitu Widya Arijanti untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

LINGKUP JASA YANG DIBERIKAN

Lingkup jasa yang diberikan KAP mencakup: melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pihak yang ditunjuk Perseroan sebagai Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak ada biaya jasa lain yang dibayarkan Perseroan selain untuk biaya audit atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Buku Fiscal Year	KAP Public Accounting Firm	No. Izin License No.	Akuntan Publik Public Accountant	No. Izin License No.	Biaya Audit Audit Fees
2023	Purwanto, Sungkoro & Surja	STTD.KAP-03/PM.22/2018	Widya Arijanti	STTD.AP-119/PM.22/2018 AP.0702	Rp3,0 miliar billion
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	STTD.KAP-03/PM.22/2018	Widya Arijanti	STTD.AP-119/PM.22/2018 AP.0702	Rp2,7 miliar billion
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	STTD.KAP-03/PM.22/2018	Hanny Widyastuti Sugianto	STTD.AP-618/PM.2/2018 AP.1563	Rp1,9 miliar billion
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja	STTD.KAP-03/PM.22/2018	Hanny Widyastuti Sugianto	STTD.AP-618/PM.2/2018 AP.1563	Rp1,3 miliar billion
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	STTD.KAP-03/PM.22/2018	Hanny Widyastuti Sugianto	STTD.AP-618/PM.2/2018 AP.1563	Rp1,2 miliar billion

On this basis, the Company has taken the decision to render the services of Public Accountant Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja with a Public Accountant (*Signing Partner*), Widya Arijanti to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries dated December 31, 2023 and for the year ended on that date.

SCOPE OF SERVICES

The scope of services provided by KAP includes Conduct an audit and issue an audit report on the Company's and its subsidiaries of 2023 financial statements, in accordance with the provisions of applicable laws and financial accounting standards

OTHER SERVICES PROVIDED BY ACCOUNTANTS OTHER THAN ANNUAL FINANCIAL STATEMENT AUDIT SERVICES

The party appointed by the Company as the Public Accounting Firm does not provide services other than the audit scope mentioned above, thereby no other service fees are paid by the Company besides the audit fees for the Financial Statements.

The following are KAP that audited the consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries in the last 5 (five) years:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta penerapan mekanisme *check and balance*.

Protelindo memiliki Sistem Pengendalian Internal yang dirancang dan dijalankan oleh tim manajemen dan ditinjau kembali oleh Komite Audit yang independen.

Dalam merancang Sistem Pengendalian Internal, Perseroan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, antara lain risiko keuangan, risiko operasional dan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, Perseroan menerapkan Pengendalian Internal berlandaskan pada konsep *three lines* model yang melibatkan semua tingkatan pada struktur organisasi yaitu organ pengurus, manajemen risiko, dan Divisi Internal Audit.

Untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan Pengendalian Internal telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perseroan, maka Sistem pengendalian internal Perseroan akan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pada tahun 2023, Audit Internal Perseroan telah melaksanakan 25 audit operasional/EMR/audit khusus yang dilakukan sesuai rencana audit tahunan, kebijakan internal dan regulasi terkait. Pada setiap pelaksanaan audit operasional tersebut juga dilakukan Evaluasi Pengendalian Internal.

Evaluasi Pengendalian Internal yang diadakan setiap tahun ini juga melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris, sistem pengendalian internal di

Internal control is a process designed and carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, and other members of management as well as all personnel of the Company aimed at providing adequate assurance of the achievement of effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with prevailing laws and regulations as well as the implementation of check and balance mechanisms.

Protelindo has an Internal Control System designed and performed by the management team and reviewed by an independent Audit Committee.

In designing the Internal Control System, the Company considers existing risks, including financial risks, operational risks and compliance risks with laws and regulations. On this basis, the Company implements Internal Control based on the concept of three lines model involving all levels in the organizational structure, namely management organs, risk management, and Internal Audit Division.

To provide confidence that the implementation of Internal Control is in accordance with the Company's goals and objectives, the Company's internal control system will be evaluated periodically by involving the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

In 2023, the Company's Internal Audit has carried out 25 operational audits/EMRs/special audits conducted in accordance with the annual audit plan, internal policies and related regulations. In each operational audit, an Internal Control Evaluation is also carried out.

The Internal Control Evaluation, which is held annually, also involves the Board of Directors and the Board of Commissioners. Based on the evaluation results of the Board of Directors and Board of

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya laporan auditor Independen wajar dan tanpa pengecualian oleh auditor eksternal. Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen, *shareholders* dan *stakeholders* bahwa tujuan dan kelangsungan usaha Perseroan dapat dicapai. Ke depan, diharapkan Sistem Pengendalian Internal Perseroan dapat ditingkatkan.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian visi dan misi Perseroan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik. Pernyataan pengendalian intern ini menggambarkan setiap kegiatan dan transaksi Perseroan dilaksanakan berdasarkan pengendalian internal yang memadai meliputi kegiatan operasional dijalankan secara efektif dan efisien, laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Commissioners, the internal control system in the Company is declared to have performed effectively. This is shown by the receipt of a fair and unqualified independent auditor's report by the external auditor. As such, the Company's Internal Control System has provided adequate confidence to management, *shareholders* and *stakeholders* that the Company's business objectives and continuity can be achieved. In the future, it is expected that the Company's Internal Control System can be improved.

STATEMENT OF ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners are committed to ensuring that Corporate Governance is carried out properly as the basis for achieving the Company's vision and mission. One of the implementations of Good Corporate Governance is to ensure that the internal control system has been implemented adequately. The Board of Directors is responsible for implementing a good internal control system to achieve the Company's objectives. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for conducting supervision in order to ensure the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that stipulate such internal control. Internal control systems are designed to properly manage and control risk. This internal control statement describes every activity and transaction of the Company carried out based on adequate internal control including operational activities enacted effectively and efficiently, correct, complete and timely financial statements and management reports, as well as compliance with prevailing laws and regulations.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Perseroan berkomitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis inti melalui pengelolaan risiko yang proaktif dan terintegrasi.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko. Kebijakan manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perseroan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

Melalui manajemen risiko, Perseroan berupaya dalam meminimalkan dampak negatif atas potensi risiko termasuk risiko yang dihadapi terkait aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan yang akan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dalam proses mengidentifikasi dan mengelola risiko iklim yang dapat mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrem, salah satunya adalah perubahan cuaca yang ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana alam, Perseroan memiliki *business continuity management* (BCM) yang digunakan sebagai panduan dalam penanganan bencana/gangguan. Melalui aktivitas pada BCM, Perseroan melakukan pemantauan secara rutin terkait aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak pada iklim.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menjalankan manajemen risiko dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan yang bertujuan untuk:

1. Menggabungkan pendekatan yang konsisten untuk manajemen risiko ke dalam budaya dan proses perencanaan strategis organisasi yang mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat operasional dan strategis.

Through proactive and integrated risk management, the Company is committed to managing all risks effectively and efficiently in order to maintain the long-term sustainability and growth of its core business.

The Company has a Risk Management Policy that governs risk supervision and management. The risk management policy is implemented to ensure that all levels of the Company's management address risk management issues in all business processes and decision making.

The Company's risk management will minimize the adverse effects of potential risks, encompassing economic, social, environmental, and governance aspects. Risk management is aimed at managing the inherent risks in the Company's operations to provide sustainable value addition.

In the process of identifying and addressing climate risks that may result in extreme weather changes, including natural disasters, the Company employs a business continuity management (BCM) framework as a guide for disaster and disruption management. Through BCM activities, the Company regularly monitors business operations that have an impact on the climate.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Company carries out risk management by referring to the Company's Risk Management Policy that has objectives to:

1. Incorporate a consistent approach to risk management into an organization's strategic planning culture and processes that support decision-making and resource allocation at operational and strategic levels.

Manajemen Risiko Risk Management

2. Menerapkan pendekatan yang konsisten terhadap manajemen risiko untuk mendukung tanggung jawab tata Kelola organisasi untuk inovasi dan pengambilan risiko yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan, program, dan tujuan. Dalam semua kasus, langkah-langkah yang tepat akan dilakukan untuk mengatasi dampak yang tidak menguntungkan dari risiko dan manfaat yang menguntungkan dari peluang.
3. Mengelola pendekatan yang transparan terhadap risiko melalui komunikasi dan pemantauan yang terbuka dan bermakna terhadap semua risiko utama yang menyeimbangkan biaya pengelolaan risiko dengan manfaat yang diantisipasi.

Adapun lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan mencakup semua rencana, aktivitas, proses bisnis, kebijakan, prosedur, individu dan property yang tergabung dalam SMN Grup, termasuk Protelindo.

Dalam mengelola risikonya, Perseroan menerapkan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melakukan proses manajemen risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko juga ditinjau secara berkala sesuai dengan antara lain perkembangan usaha Grup dan sebagai akibat dari perubahan hukum dan undang-undang.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di Protelindo tidak terlepas dari komitmen Direksi dan Dewan Komisaris. Bentuk komitmen ini telah diwujudkan, salah satunya dengan ditandatanganinya Kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi Protelindo, termasuk pembahasan manajemen risiko Perseroan yang dibahas baik dalam rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris maupun melalui rapat gabungan.

2. Apply a consistent approach to risk management to support organizational governance responsibilities for innovation and responsible risk-taking, policy development, programs, and objectives. In all cases, appropriate measures will be taken to address the unfavourable impact of the risks and the beneficial benefits of the opportunity.
3. Manage a transparent approach to risk through open and meaningful communication and monitoring of all key risks that balance the costs of managing risk with anticipated benefits.

The scope of the Company's Risk Management Policy covers all plans, activities, business processes, policies, procedures, individuals and properties incorporated in the SMN Group, including Protelindo.

In managing its risks, the Company applies ISO 31000:2018 as a reference in carrying out the risk management process.

The Policy is also reviewed regularly in accordance with, among others, the business development of the Group and as a result of legal or statutory changes.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ROLES ON RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

The Risk management in Protelindo cannot be separated from the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners. This form of commitment has been realized, one of them by the signing of the Risk Management Policy by the Board of Directors of Protelindo including discussions on risk management conducted in the Board of Directors or the Board of Commissioners meeting, or through joint meeting.

Manajemen Risiko Risk Management

Evaluasi atas pengelolaan risiko dilakukan secara periodik, mulai dari tingkat fungsi, satuan kerja, sampai level manajemen atas. Hal ini tercermin dalam agenda rutin rapat Direksi yang selalu menyertakan pengelolaan risiko dalam mata acara pembahasan.

Evaluation of risk management is carried out periodically, starting from the level of functions, work units, to the level of upper management. This is reflected in the routine agenda of Board of Directors meetings which always include risk management in the discussion agenda.

RISIKO UTAMA, MITIGASI DAN TINJAUAN RISIKO

Perseroan, melalui Departemen Manajemen Risiko, telah melakukan kajian serta analisa untuk mengidentifikasi risiko utama, mitigasi serta tinjauan atas risiko sebagaimana diuraikan di bawah ini:

KEY RISKS, MITIGATION AND RISK REVIEW

The Company, through Risk Management Department, has conducted review and analysis to identify key risks, mitigation as well as risk review as provided below:

RISIKO UTAMA MAIN RISKS	PENJELASAN DESCRIPTION	MITIGASI DAN TINJAUAN RISIKO MITIGATION AND RISK REVIEW
Kredit Pelanggan	Risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa infrastruktur.	Risiko kredit pelanggan dikelola sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit.
Customer Credit	This refers to the risk that a counterparty will fail to meet its financial obligations based on financial instruments or customer contracts, resulting in financial loss. The Company is exposed to credit risk from operational activities related to infrastructures leasing.	Customer credit risk is managed according to the Company's policies, procedures, and established controls related to credit risk management.
Regulasi dan perizinan	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, kesulitan mendapatkan ijin dan persetujuan, pencabutan, atau tidak diperpanjang ijin yang diperlukan untuk infrastruktur, penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa lokasi infrastruktur.	Perseroan memantau perkembangan lokasi infrastruktur yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi infrastruktur, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari infrastruktur kepada masyarakat sekitarnya.
Regulations and Licensing	This involves changes in government regulations and policies, difficulties in obtaining permits and approvals, revocation, or non-renewal of necessary permits for infrastructures, and rejection by local communities of certain infrastructures locations.	The Company monitors the development of infrastructures locations to be built, acquired, or already existing. The Company also maintains and nurtures relationships with regulators and local communities to ensure the continuity of land leases, infrastructures site development, and land acquisition. The Company actively engages with the community to educate them about the economic benefits of infrastructures to the surrounding area.

Manajemen Risiko Risk Management

RISIKO UTAMA MAIN RISKS	PENJELASAN DESCRIPTION	MITIGASI DAN TINJAUAN RISIKO MITIGATION AND RISK REVIEW
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Adanya risiko pekerja vendor mengalami kecelakaan kerja, baik selama proses pembangunan maupun maintenance infrastruktur dan non infrastruktur, seperti : 1. Jatuh dari ketinggian 2. Tersengat listrik 3. Tertimpa material 4. Tertabrak 5. Mengangkat beban berat, terkilir 6. Tersambar petir Dan risiko lainnya	Perseroan memiliki sistem dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dijalankan oleh vendor. Sistem dan aturannya meliputi persyaratan penggunaan APD, sertifikasi bekerja di ketinggian, serta persyaratan dokumen K3 seperti: Job Safety Analysis, QHSE briefing, Permit Letter, dll. Aturan tersebut diatas dan kebijakan K3 yang lain diinfokan/disosialisasikan kepada vendor melalui email blast QHSE setiap bulan. Selain itu, Perseroan juga melakukan monitoring terhadap implementasi yang dijalankan oleh vendor melalui random HSE inspection, ISO internal audit, ISO external audit, emergency site drill, dll.
Health and Safety	A risk of vendor workers experiencing work accidents, both during infrastructures and non- infrastructures construction and maintenance processes, such as: 1. Falling from heights 2. Electric shocks 3. Struck by materials 4. Crash accidents 5. Lifting heavy loads, spraining 6. Struck by lightning And other risks.	The Company has a system and rules for occupational health and safety that must be followed by vendors. The system and rules include requirements for using Personal Protective Equipment (PPE), certification for working at heights, and OHS document requirements such as Job Safety Analysis, QHSE briefing, Permit Letter, etc. The above rules and other OHS policies are communicated to vendors via monthly QHSE email blasts. The Company also monitors the implementation by vendors through random HSE inspections, internal ISO audits, external ISO audits, emergency site drills, etc.
Likuiditas	Risiko apabila Perseroan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.	Perseroan mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Selain itu Perseroan menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas. Perseroan juga menggunakan alat perencanaan likuiditas untuk memonitor risiko likuiditas.
Liquidity	This risk occurs when the Company encounters difficulties in meeting financial obligations when they become due.	The Company maintains adequate cash and cash equivalent balances to support business activities in a timely manner. The Company also maintains a balance between the continuity of accounts receivable collection and through the flexibility of using bank loans to manage liquidity risk. The Company also utilizes liquidity planning tools to monitor liquidity risk.



Manajemen Risiko Risk Management

RISIKO ESG

Selain risiko utama tersebut di atas, Perseroan juga dihadapkan pada Risiko Keberlanjutan atau Risiko ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang kemudian akan di reviu dan di mitigasi guna menjaga kesinambungan pertumbuhan Perseroan.

Risiko ESG bagi Perseroan sebagai penyedia digital infrastruktur telekomunikasi, mengacu pada potensi tantangan dan kerentanan yang terkait dengan operasional dan praktik bisnis Perseroan di ketiga aspek utama ESG. Mengevaluasi risiko ESG juga sangat penting bagi investor, pemangku kepentingan, dan Perseroan karena dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan dan reputasi jangka panjangnya. Berikut penjelasan pertimbangan risiko ESG yang diambil dan dimitigasi oleh Perseroan:

RISIKO ESG ESG RISKS	PENJELASAN DESCRIPTION	MITIGASI MITIGATION
Risiko Lingkungan	<p>a. Penggunaan energi: Perseroan mengandalkan listrik untuk infrastruktur listrik, termasuk infrastruktur dan pusat data. Penggunaan energi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon dan dampak lingkungan, terutama jika sumber energinya tidak hijau atau berkelanjutan.</p> <p>b. Pemilihan lokasi: Lokasi infrastruktur telekomunikasi dan dampaknya terhadap ekosistem lokal, habitat satwa liar, dan masyarakat merupakan masalah lingkungan. Pemilihan lokasi yang buruk dapat menyebabkan deforestasi, gangguan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati.</p> <p>c. Pengelolaan limbah: Pembuangan limbah elektronik dan bahan lain yang dihasilkan selama konstruksi infrastruktur, pemeliharaan, atau penonaktifan dapat menimbulkan risiko lingkungan jika tidak dikelola secara bertanggung jawab.</p>	<p>Mitigasi Risiko Lingkungan:</p> <p>a. Penggunaan energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berinvestasi dalam infrastruktur hemat energi: Meningkatkan infrastruktur yang ada dan menerapkan yang baru dengan teknologi dan peralatan hemat energi. Menggunakan sumber energi terbarukan: Melakukan transisi ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, untuk operasi infrastruktur dan pusat data. Menerapkan sistem manajemen energi: Menyebarkan sistem manajemen energi canggih untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di seluruh jaringan. <p>b. Pemilihan Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian lokasi secara menyeluruh: Memprioritaskan lokasi yang memiliki dampak lingkungan minimal dan mempertimbangkan keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, dan ekosistem lokal. Terlibat dalam konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi dengan masyarakat setempat, organisasi lingkungan, dan otoritas pengatur untuk memastikan pemilihan lokasi yang bertanggung jawab. Mempertimbangkan lokasi bersama: Kolaborasi infrastruktur dengan perusahaan telekomunikasi lain untuk mengurangi kebutuhan instalasi infrastruktur tambahan. <p>c. Pengelolaan Limbah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab: Memastikan bahwa limbah elektronik yang dihasilkan selama konstruksi, pemeliharaan, atau penonaktifan infrastruktur dikelola, didaur ulang, atau dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan. Mempromosikan ekonomi sirkular: Menelaah peluang untuk memperbarui dan menggunakan kembali peralatan dan bahan untuk mengurangi timbulan limbah.

ESG RISK

In addition to the aforementioned main risks, the Company is also faced with the Sustainability Risk or ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Risk which shall be reviewed and mitigated in order to maintain the sustainability of the Company's growth.

As a digital infrastructure provider, The Company's ESG risk pertain to potential challenges and vulnerabilities associated with its operational and business practices across the three main ESG aspects. Assessing ESG risks is vital for investors, stakeholders, and the Company, as they can have a significant impact on its long-term sustainability and reputation. Below is an explanation of the ESG risk considerations addressed and mitigated by the Company:

Manajemen Risiko Risk Management

RISIKO ESG ESG RISKS	PENJELASAN DESCRIPTION	MITIGASI MITIGATION
Environmental Risk	<p>a. Energy consumption: The Company relies on electricity to power infrastructure, including infrastructures and data centers. High energy consumption can lead to increased carbon emissions and environmental impact, especially if the energy source is not green or sustainable.</p> <p>b. Site selection: The location of telecom infrastructures and their impact on local ecosystems, wildlife habitats, and communities is an environmental concern. Poor site selection can lead to deforestation, disruption of ecosystems, and biodiversity loss.</p> <p>c. Waste management: The disposal of electronic waste and other materials generated during infrastructures construction, maintenance, or decommissioning can pose environmental risks if not managed responsibly.</p>	<p>Environmental Risk Mitigation:</p> <p>a. Energy Consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> Invest in energy-efficient infrastructure: Upgrade existing infrastructures and deploy new ones with energy-efficient technology and equipment. Use renewable energy sources: Transition to renewable energy sources, such as solar or wind power, for infrastructures operations and data centers. Implement energy management systems: Deploy advanced energy management systems to monitor and optimize energy usage across the network. <p>b. Site Selection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conduct thorough site assessments: Prioritize sites that have minimal environmental impact and consider biodiversity, wildlife habitats, and local ecosystems. Engage in stakeholder consultations: Consult with local communities, environmental organizations, and regulatory authorities to ensure responsible site selection. Consider co-location: Share infrastructures infrastructure with other telecom companies to reduce the need for additional infrastructures installations. <p>c. Waste Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implement responsible waste disposal practices: Ensure that electronic waste (e-waste) generated during infrastructures construction, maintenance, or decommissioning is properly managed, recycled, or disposed of in compliance with regulations. Promote a circular economy: Explore opportunities to refurbish and reuse equipment and materials to reduce waste generation.

Untuk mengelola risiko ESG secara efektif, Perseroan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan praktik ESG yang komprehensif.
- Menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas dan melaporkan kemajuan secara teratur.
- Terlibat dengan pemangku kepentingan, termasuk investor, komunitas lokal, dan regulator, untuk mengatasi masalah dan mengumpulkan umpan balik.
- Berinvestasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur hemat energi untuk mengurangi dampak lingkungan.
- Melakukan audit dan penilaian rutin terhadap kinerja ESG dan eksposur risiko mereka.

Mengelola risiko ESG tidak hanya membantu melindungi reputasi dan kelangsungan hidup jangka panjang Perseroan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang dapat menarik investor dan pelanggan yang bertanggung jawab secara sosial.

To manage ESG risk effectively, the Company carries out the following:

- Develop and implement comprehensive ESG policies and practices.
- Set clear sustainability goals and regularly report progress.
- Engage with stakeholders, including investors, local communities, and regulators, to address concerns and gather feedback.
- Invest in green technologies and energy-efficient infrastructure to reduce environmental impact.
- Conduct regular audits and assessments of their ESG performance and risk exposure.

Managing ESG risk not only helps protect the Company's reputation and long-term viability but also demonstrates a commitment to responsible business practices, which can attract socially responsible investors and customers.

Manajemen Risiko Risk Management

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEBERLANJUTAN

Selain melakukan analisis atas risiko utama Perseroan, Protelindo juga melakukan identifikasi dan analisis risiko terkait aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial mencakup dampak dan peluang terjadinya risiko tersebut. Profil risiko dirangkum dan dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis sekaligus mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan penerapan manajemen risiko, Departemen Manajemen Risiko senantiasa berupaya meningkatkan komitmen pimpinan Perseroan untuk memberi dukungan dan kontribusi penuh dalam pelaksanaan manajemen risiko, mengembangkan budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) ke seluruh proses Perseroan dengan menitikberatkan konsep risiko sebagai tanggung jawab setiap orang (*risk is your responsibility*) melalui sosialisasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO (RISK MATURITY LEVEL)

Risk Maturity Level mengacu pada sejauh mana Perseroan mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan mengintegrasikan praktik manajemen risiko ke dalam operasi dan budayanya. Berikut Tahapan *Risk Maturity Level* di Perseroan:

1. Inisial (Ad-hoc): Pada tahap ini, manajemen risiko bersifat informal dan reaktif. Proses belum secara standar, dan respons terhadap risiko biasanya bersifat ad-hoc dan tidak terkoordinasi.
2. Berkembang: Perseroan mulai menyadari pentingnya manajemen risiko. Beberapa proses dikembangkan, namun belum secara konsisten diterapkan di seluruh organisasi.
3. Didefinisikan: Proses manajemen risiko secara formal ditetapkan dan didokumentasikan. Ada pendekatan yang lebih sistematis untuk

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY PRACTICES

Besides conducting analysis on the Company's key risks, Protelindo also identified and analyzed risks related to environmental, economic, and social aspects including the impacts and opportunities for these risks. The risk profile was summarized and made to increase business growth while reducing environmental footprint and increasing social impact.

RISK CULTURE ENHANCEMENTS

To enhance effectiveness and achieve the objectives of implementing risk management, the Risk Management Department strives to increase the commitment of the Company's leadership to provide full support and contribution in the implementation of risk management, develop a risk awareness culture throughout the Company's processes by emphasizing the concept of risk as your responsibility through socialization and continuous learning.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM (RISK MATURITY LEVEL)

Risk Maturity Level refers to the degree to which the Company identifies, understands, manages, and integrates risk management practices into its operations and culture. The following are stages of Risk Maturity in the Company:

1. Initial (Ad-hoc): At this stage, risk management is informal and reactive. Processes are not standardized, and responses to risks are typically ad-hoc and uncoordinated.
2. Developing: The Company begin to recognize the importance of risk management. Some processes are developed, but they may not be consistently applied across the organization.
3. Defined: Risk management processes are formally established and documented. There is a more systematic approach to identifying and

Manajemen Risiko Risk Management

mengidentifikasi dan menilai risiko, tetapi integrasi ke dalam perencanaan strategis namun masih terbatas.

4. Dikelola: Manajemen risiko diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Perseroan secara proaktif mengelola risiko dan mengambil pendekatan yang lebih strategis terhadap manajemen risiko.
5. Dioptimalkan: Pada tingkat tertinggi ini, manajemen risiko tertanam dalam budaya Perseroan dan proses perencanaan strategis. Perseroan terus meningkatkan praktik manajemen risiko dan menggunakan informasi risiko untuk mendapatkan keuntungan strategis dan mendorong kinerja.

Efektivitas Risk Maturity Level di Perseroan

Perseroan telah memahami dan menilai Tingkat Kematangan Risiko Perseroan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memandu pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih canggih. Tingkat kematangan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Perseroan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan, membuatnya lebih tangguh dan mampu mencapai tujuannya.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit memberikan perhatian khusus terhadap jalannya sistem manajemen risiko sehingga mengevaluasi sistem tersebut secara berkala setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit menilai sistem manajemen risiko Perseroan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang ditetapkan. Direksi dan Dewan Komisaris berharap kinerja ini dapat terus dipertahankan sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terus tercapai.

assessing risks, but integration into strategic planning may still be limited.

4. Managed: Risk management is integrated into business processes and decision-making. The Company proactively manages risks and takes a more strategic approach to risk management.
5. Optimized: At this highest level, risk management is deeply embedded in the Company's culture and strategic planning processes. The Company continuously improves its risk management practices and uses risk information to gain strategic advantage and drive performance.

Effectiveness of Risk Maturity Level in the Company

The Company has understood and assessed the Company's Risk Maturity Level to identify areas for improvement and guide the development of more sophisticated risk management strategies. A higher maturity level indicates that the Company is better prepared to address uncertainties and challenges, making it more resilient and capable of achieving its objectives.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, pay close attention to the functioning of the risk management system and evaluate it on a yearly basis. Based on the evaluation results, the Board of Directors and/or the Board of Commissioners determined that the Company's risk management system performed satisfactorily. The Board of Directors and the Board of Commissioners hope that this performance may be sustained by which the Company's business continuity can be achieved.

Manajemen Risiko Risk Management

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO PROFILE OF HEAD OF RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

Johny Susanto

Kepala Departemen Manajemen Risiko
Head of Risk Management Department

Umur | Age
51 Tahun | Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukan Basis of Appointment	-	-
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S1 Accounting, Universitas Trisakti, 1991-1995 S2 Magister Management, IPMI Business School, 2012-2013 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Accounting, Trisakti University, 1991-1995 Master in Management, IPMI Business School, 2012-2013
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> Head of QHSE & Risk Management PT Protelindo (2013 - saat ini) Finance & Accounting Manager, PT Titan Petrokimia Nusantara (2010-2011) Finance & Administration Manager, PT Fresenius Medical Care Indonesia (2008-2009) Finance Head, PT Huntsman Indonesia (2006-2008) Country Credit Manager, PT Ciba Specialty Chemicals Indonesia (2005-2006) Finance & Accounting Manager, PT Indofood Sukses Makmur Tbk-Bogasari Flour Mills (2003-2005) Internal Control Manager, PT Central Cipta Murdaya (2001-2003) Senior Associates, PricewaterhouseCoopers (1997-2000) Senior Auditor, Arthur Andersen (1995-1997) 	<ul style="list-style-type: none"> Head of QHSE & Risk Management PT Protelindo (2013 - present) Finance & Accounting Manager, PT Titan Petrokimia Nusantara (2010-2011) Finance & Administration Manager, PT Fresenius Medical Care Indonesia (2008-2009) Finance Head, PT Huntsman Indonesia (2006-2008) Country Credit Manager, PT Ciba Specialty Chemicals Indonesia (2005-2006) Finance & Accounting Manager, PT Indofood Sukses Makmur Tbk-Bogasari Flour Mills (2003-2005) Internal Control Manager, PT Central Cipta Murdaya (2001-2003) Senior Associates, PricewaterhouseCoopers (1997-2000) Senior Auditor, Arthur Andersen (1995-1997)
Pengalaman Kerja Work Experience	Head of QHSE	Head of QHSE
Sertifikasi Certificate	Bulan September Tahun 2021. Penyelenggara ERMA (Enterprise Risk Management Academy)	September 2021. Organizer: ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Manajemen Risiko Risk Management

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan risiko, per 31 Desember 2023, Departemen Manajemen Risiko memiliki 1 personil yang memiliki sertifikasi terkait manajemen risiko, sebagai berikut:

No	Sertifikasi Certificate	Dikeluarkan oleh Issued by	Jumlah Personil Departemen Manajemen Risiko Number of Risk Management Department Personnel
1.	ERMAP	ERMA (Enterprise Risk Management Academy)	1 orang person
2.	ERMCP	ERMA (Enterprise Risk Management Academy)	1 orang person

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

- Pengembangan, koordinasi, dan sosialisasi Kerangka Manajemen Risiko, termasuk pelatihan dan sistem yang mampu mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan risiko baru atau yang muncul yang terdokumentasi.
- Meninjau proses Manajemen Risiko, memantau, dan melaporkan risiko strategis utama.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Dalam meningkatkan kualitas personil Departemen Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas manajemen risiko, di tahun 2023 personil manajemen risiko telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, antara lain:

No	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator
1.	ISO 31000 Series 1: ERM Fundamentals	04 - 06 Desember 2023	CRMS Indonesia

RISK MANAGEMENT HUMAN RESOURCES AND CERTIFICATION

In carrying out the risk management function, as of December 31, 2023, the Risk Management Department has one personnel who have certifications related to risk management, as follows:

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

- Development, coordination, and promulgation of the Risk Management framework, including training and systems that are capable of identifying, monitoring, and reporting documented, new or emerging risks
- Review of the Risk Management process, monitoring and reporting key strategic risks.

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In improving the quality of Risk Management Department personnel in accordance with the needs of the implementation of risk management duties, in 2023 risk management personnel have participated in various competency development programs, as follows:

PERMASALAHAN HUKUM LITIGATION



Selama tahun 2023, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum penting yang bersifat material bagi Perseroan yang melibatkan Perseroan, entitas-entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

During 2023, the Company did not encounter significant legal cases that are material to the Company involving the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan mengganggu secara signifikan terhadap kegiatan Perseroan, yang dikenakan oleh pihak regulator atau otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, entitas-entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

During 2023, there were no administrative sanctions of a material nature nor significantly disrupted the Company activities, imposed by regulators or authorities (Financial Services Authority, Bank Indonesia, Stock Exchange, and other authorities) to the Company, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.

AKSES INFORMASI DATA PERSEROAN INFORMATION ACCESS & CORPORATE DATA

Protelindo secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan kepada *stakeholder* agar mengetahui kondisi Perseroan secara jelas dan terbuka. Perseroan memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

Protelindo regularly updates information and provides information on the Company's activities and performance available to stakeholders ensuring they are able to perceive the Company's condition clearly and transparently. The Company has several facilities that serve as information dissemination channels, including the following:

1. RUPS; Media pengambilan keputusan tertinggi Perseroan
2. Website; Melalui situs www.Protelindo.net publikasi dalam website mengacu pada POJK No. 8/POJK.04/2015
3. Email; Email resmi Perseroan investor. relations@ptsmn.co.id
4. Media Internal; Sarana informasi internal Perseroan dalam bentuk portal dan *magazine*
5. Media Sosial;
Instagram: [@protelindo.indonesia](https://www.instagram.com/protelindo.indonesia)
LinkedIn: PT Protelindo
6. Investor Relation; Investor, analis dan pemegang saham dapat menghubungi Hubungan Investor secara langsung dengan mengirimkan surat elektronik ke:

1. GMS; The Company's highest decision-making media
2. Website; Through the site www.Protelindo.net publications on the website that refer to POJK No. 8/POJK.04/2015
3. Email; Official email of the Company investor. relations@ptsmn.co.id
4. Internal Media; The Company's internal information facilities in the form of portals and magazines
5. Social Media;
Instagram: [@protelindo.indonesia](https://www.instagram.com/protelindo.indonesia)
LinkedIn: PT Protelindo
6. Investor Relation; Investors, analysts and shareholders may contact Investor Relations directly by sending an email to:



Departemen Hubungan Investor Investor Relations Department

Menara BCA, Lantai 53rd
Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310

Tel : +62 21 2358 5500
Fax : +62 21 2358 6446
Email : investor.relations@ptsmn.co.id
Instagram : [@protelindo.indonesia](https://www.instagram.com/protelindo.indonesia)
LinkedIn : PT Protelindo
www.protelindo.co.id

KEBIJAKAN PRIVASI DATA DAN INFORMASI

DATA AND INFORMATION PRIVACY POLICY

Perseroan memiliki serangkaian kebijakan privasi data dan informasi yang dijalankan oleh Divisi Teknologi Informasi, yang telah diatur dalam Kebijakan TI sebagai berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perseroan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perseroan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perseroan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perusahaan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia perusahaan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol *domain* Perseroan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perseroan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, *virus*, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada *firewall*, *VPN*, anti *virus*, teknologi *web-filter*, *email security* serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perseroan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut.

The Company has a set of data privacy policies and information managed by the Information Technology Division, which are outlined in the IT Policy as follows:

1. General implementation of IT security to protect confidential Enterprise data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
2. Regular communications to create awareness for IT users on the importance of IT security to the Company's business operations, as well as to increase the role and contribution of users in protecting the Company from cybersecurity threats.
3. The responsibility of users to protect the Company's confidential data by carrying out work activities responsibly, among others by following IT security guidelines, maintaining and maintaining the security of the Company's confidential data, protecting the devices they use in their daily work, etc.
4. Data storage procedures and management.
5. Data classification and explanation, among others, regarding personal data, highly confidential data and non-confidential data. Provisions regarding the storage of personal data and highly confidential data that must be kept at the strictest confidentiality, whereby access to such data will be provided on an as-needed basis and maintained in the Company's domain controller system. New or modified access requirements can be made by submitting an application to the IT administrator through the approval of the respective division head.
6. Explanation of the ability to better secure Enterprise infrastructure, business applications and end-user data and devices from potential cybersecurity threats, including *malware*, *virus*, and other threats. This includes implementing and investing in *firewalls*, *VPNs*, anti-*virus*, *web-filter* technologies, security email and Security Operations Center ("SOC") for cyber threat monitoring.
7. Provisions regarding business application and Enterprise IT Infrastructure equipped with password-protected access, and an audit trail of such access.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Mitra kerja atau pemasok memainkan peran esensial dalam operasional Protelindo, khususnya sebagai penyedia barang dan layanan dalam keseluruhan rantai pasokan. Pilihan mitra kerja ini, meliputi penyedia bahan bangunan, kontraktor pembangunan, dan tim *maintenance*, dilakukan melalui proses pengadaan yang terstruktur untuk memenuhi kebutuhan di segmen usaha tower dan non tower.

Perseroan percaya bahwa pemilihan pemasok yang sistematis dan terencana penting untuk mencapai tujuan pengadaan, memastikan transparansi, profesionalisme, keandalan, dan ketelitian dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan kebijakan internal yang memberikan pedoman terkait Panduan Proses Operasional Pengadaan dan Manajemen Vendor. Panduan ini secara terperinci mengatur tentang proses pengadaan dan manajemen pemasok, yang mencakup metodologi pengadaan, petunjuk pelaksanaan, penghematan dalam pengadaan, serta manajemen kinerja pemasok dan kriteria penilaiannya.

Dalam langkah awal seleksi pemasok, Perseroan menetapkan serangkaian kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemasok. Kriteria ini mencakup:

1. Informasi lengkap tentang perusahaan pemasok, termasuk lingkup kerja dan area spesialisasinya.
2. Tinjauan menyeluruh atas kinerja keuangan pemasok, untuk menilai stabilitas dan kehandalan mereka dalam menyediakan barang atau jasa.
3. Evaluasi terhadap peralatan kerja yang dimiliki oleh pemasok, untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan Perseroan.
4. Penilaian atas pengalaman pemasok dalam proyek serupa, terutama bagi mereka yang akan ditugaskan pada proyek khusus, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang relevan.

Business partners or suppliers undertake an essential role in Protelindo's operations, particularly as providers of goods and services across the entire supply chain. The selection of these partners, which includes building material suppliers, construction contractors, and maintenance teams, is conducted through a structured procurement process to meet the needs in both the tower and non-tower business segments.

The Company considers that systematic and planned supplier selection is crucial for achieving sustainable procurement objectives, ensuring transparency, professionalism, reliability, and diligence in the procurement process. As such, the Company has established the Procurement Operational Process Guide and Vendor Management. This guide details the procurement and supplier management processes, including procurement methodology, implementation instructions, savings in procurement, as well as supplier performance management and evaluation criteria.

In the initial step of supplier selection, the Company establishes a series of specific criteria that must be met by each potential supplier. These criteria include:

1. Complete information about the supplier company, including its scope of work and areas of specialization.
2. A comprehensive review of the supplier's financial performance, to assess their stability and reliability in providing goods or services.
3. Evaluation of the work equipment owned by the supplier, to ensure that they have adequate resources to meet the Group's needs.
4. Assessment of the supplier's experience in similar projects, particularly for those who will be assigned to specific projects, to ensure that they have the relevant expertise.

Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

5. Analisis terhadap kemampuan dan kapasitas kerja pemasok, untuk menjamin bahwa mereka dapat memenuhi permintaan Perseroan secara tepat waktu dan efisien.
6. Penilaian terhadap kompetensi pemasok, termasuk keahlian dan kualitas layanan mereka.
7. Investigasi mengenai tenaga kerja dan tim yang dimiliki oleh pemasok, termasuk keahlian khusus yang mereka miliki, untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan dukungan yang berkualitas.

Setelah proses penunjukan pemasok selesai, Perseroan mewajibkan mereka untuk menandatangani surat pernyataan kepatuhan dan integritas. Surat ini merupakan komitmen pemasok untuk menjalankan operasional bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang mencakup:

1. Praktik tanggung jawab sosial dengan standar bisnis yang etis, termasuk kepatuhan terhadap peraturan anti korupsi, pencegahan pencucian uang, serta penolakan terhadap penyuaian dan gratifikasi.
2. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Penghormatan terhadap hak-hak pekerja, pencegahan diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja, serta pematuhan larangan penggunaan tenaga kerja anak.
5. Penerapan praktik kerja yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam upaya pengadaan, Perseroan mengedepankan penggunaan pemasok lokal sebagai prioritas utama, sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal. Ini tercermin dari data penggunaan pemasok pada tahun 2023, dimana 98,4% dari total 952 pemasok yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan adalah pemasok lokal. Upaya ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi secara tidak langsung bagi komunitas lokal.

5. Analysis of the supplier's capability and capacity to work, to ensure that they can meet the Group's demands in a timely and efficient manner.
6. Assessment of the supplier's general competencies, including their skills and quality of service.
7. Investigation into the supplier's workforce and team, including the specific skills they possess, to ensure that they can provide quality support.

Following the completion of the supplier selection process, the Company requires them to sign a statement of compliance and integrity. This letter is a commitment from the suppliers to conduct their business operations in accordance with sustainability principles, which include:

1. Practicing social responsibility with ethical business standards, including compliance with anti-corruption regulations, prevention of money laundering, as well as the rejection of bribery and gratification.
2. Effectively managing occupational health and safety.
3. Developing sustainable human resources.
4. Respecting workers' rights, preventing discrimination, labor exploitation, and adhering to the prohibition of child labor.
5. Implementing work practices that consider environmental impacts and climate change.

In procurement efforts, the Company prioritizes the use of local suppliers as a primary focus, as a form of support for the local economy. This is reflected in the supplier usage data for 2023, where 98.4% of the total 952 suppliers used for the Group's operational activities are local suppliers. This effort not only supports regional economic growth but also creates indirect economic value for local communities.

PEDOMAN PERILAKU CODE OF CONDUCT

Protelindo menyadari pentingnya pedoman perilaku sebagai bagian dari penerapan GCG yang dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Pedoman Perilaku Protelindo adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan mengendalikan kesesuaian tingkah laku personil Protelindo yang sejalan dengan budaya kerja Perseroan sehingga tercapai visi dan misi Perseroan.

Pedoman Perilaku di Protelindo diberlakukan bagi seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan juga entitas anak. Sebagai langkah untuk menegakkan kepatuhan, diwajibkan bagi setiap karyawan untuk menandatangani pakta integritas Protelindo secara tahunan. Melalui penandatanganan Pedoman ini, karyawan menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan praktik bisnis yang berintegritas dan mematuhi aturan-aturan yang diuraikan dalam Pedoman tersebut. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu di bawah pengawasan mereka memahami Pedoman Perilaku dan merasa bebas untuk melaporkan permasalahan apa pun tanpa rasa takut akan adanya tindakan balasan.

Protelindo menyediakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor atau karyawan untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya *Whistleblowing System*, pihak internal dan eksternal Perseroan wajib melaporkan bilamana mengetahui, melihat, atau menemukan adanya indikasi kecurangan, pelanggaran atau *fraud* yang dapat berpotensi merugikan Perseroan baik secara finansial maupun non-finansial.

Proses pemantauan kepatuhan kode etik Perseroan dilakukan oleh *Human Resources Departement* Perseroan secara berkala.

Protelindo recognizes the importance of code of conduct as part of GCG implementation that can increase value and sustainable long-term business growth.

Protelindo's Code of Conduct is a set of commitments consisting of business ethics and work ethics prepared to influence, form, regulate and control the suitability of Protelindo personnel's conduct in line with the Company's work culture so as to achieve the Company's vision and mission.

The Company's Code of Conduct is enforced for all members, including the Board of Directors. As a measure to enforce compliance, it is mandatory for every employee to sign Protelindo's integrity pledge annually. Through the signing of this Code, employees demonstrate their commitment to conducting business with integrity and complying with the rules outlined in the Code. Additionally, they are responsible for ensuring that individuals under their supervision understand the Code of Conduct and feel free to report any issues without fear of retaliation.

Protelindo provides a method that may be utilised to report witnesses or employees in order to relay information about potential violations in the Company. The Whistleblowing System requires the Company's internal and external parties to disclose any signs of fraud, infractions, or fraud that might adversely impact the Company both financially and non-financially.

The process of monitoring compliance with the Company's code of conduct is conducted periodically by the Company's Human Resources Department.

Pedoman Perilaku Code of Conduct

PAKTA INTEGRITAS

Sebagai bentuk komitmen, seluruh individu Perseroan tanpa terkecuali melakukan penandatanganan pakta integritas yang menyatakan seluruh individu Perseroan, termasuk unit bisnis dan Anak Perusahaan menyatakan tunduk dan patuh pada Pedoman Perilaku yang berlaku di Perseroan. Pakta Integritas setiap tahunnya diupdate dan diinformasikan kepada seluruh karyawan. Penandatanganan pakta integritas ini juga diwajibkan bagi setiap vendor Protelindo.

ISI PEDOMAN PERILAKU

a. Transaksi yang Wajar

Semua karyawan harus melakukan transaksi yang wajar dengan pelanggan, pemasok, kompetitor dan karyawan lain. Tidak seorangpun dapat mengambil keuntungan secara tidak wajar dari siapapun dengan cara manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi istimewa, penyajian yang keliru mengenai fakta material atau praktik transaksi yang tidak wajar lainnya.

b. Kerahasiaan

Rahasia bisnis dan informasi rahasia Perseroan atau mitranya secara kontraktual dan pelanggan harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Kewajiban ini terus berlangsung setelah hubungan kerja berakhir. Dalam hal informasi rahasia harus diungkapkan karena suatu keputusan pengadilan yang berwenang atau otoritas administratif, Departemen Legal dan Kepatuhan yang terkait akan membantu dalam menentukan pengungkapan apa yang diperlukan. Sehubungan dengan informasi non-publik, setiap karyawan atau anggota Direksi yang memiliki informasi non-publik tersebut atau informasi rahasia Perseroan, harus mengetahui aturan perdagangan oleh orang dalam. Berdasarkan aturan perdagangan oleh orang dalam, dengan memperhatikan persyaratan tertentu atau pengecualian yang ditetapkan dalam aturan perdagangan oleh orang dalam, setiap pihak yang memiliki informasi non-publik tersebut dilarang melakukan perdagangan atas efek Perseroan. Aturan perdagangan oleh orang dalam ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

INTEGRITY PACT

As a form of commitment, all individuals of the Company without exception signed an integrity pact stating that all individuals of the Company, including business units and subsidiaries declare that they are subject to and comply with the Code of Conduct applicable in the Company. The integrity pact is updated and communicated to all employees annually. This integrity pact signing is also mandatory for every Protelindo vendor.

CONTENTS OF THE CODE OF CONDUCT

a. Fair Transaction

All employees must conduct reasonable transactions with customers, suppliers, competitors and other employees. No one may take unreasonable advantage of anyone by manipulation, concealment, misuse of privileged information, misrepresentation of material facts or other improper transaction practices.

b. Confidentiality

The Company's or its partners' confidential business and proprietary information are contractually and customers shall be treated confidentially and shall not be disclosed to unauthorised parties. This obligation follows the termination of the employment relationship. If a competent judicial or administrative authority orders that sensitive information be released, the relevant Legal and Compliance Department will assist in determining what disclosure is required. With respect to non-public information, any employee or member of the Board of Directors who has such non-public information or confidential information of the Company must be aware of insider trading rules. Any party in knowledge of such non-public information is barred from dealing in the Company's securities under the rules of insider trading, subject to specific limitations or exceptions set forth in the rules of insider trading. These insiders' trading guidelines will be detailed further below.

Pedoman Perilaku Code of Conduct

c. Konflik Kepentingan, Hadiah dan Penyuapan dan Keuntungan Pribadi,

Manajemen dan karyawan harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau keuangan mereka bertentangan dengan kepentingan perseroan. Manajemen harus menghindari penempatan bawahan dalam situasi yang demikian. Dalam hal ini, manajemen harus mendorong prinsip pengungkapan secara sukarela untuk mendeteksi potensi situasi yang demikian sebelum hal itu terjadi.

Manajemen dan karyawan dilarang untuk (a) mengambil kesempatan untuk diri mereka pribadi yang termasuk dalam lingkup kegiatan Perseroan, (b) menggunakan properti, informasi atau jabatan dalam Perseroan untuk keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan dan (c) bersaing dengan Perseroan. Manajemen dan karyawan mempunyai kewajiban terhadap Perseroan untuk mendahulukan kepentingan Perseroan yang sah dengan kemampuan mereka yang terbaik.

Perseroan melarang setiap insan Perseroan termasuk manajemen dan setiap karyawan Perseroan untuk menawarkan atau memberi suap, serta pembayaran lain tidak sah, baik secara hukum, moral, maupun etika kepada orang, badan, dan/atau entitas lain, dan Perseroan melarang setiap insan Perseroan termasuk manajemen dan setiap karyawan melakukan aktivitas pekerjaan dengan cara melanggar norma hukum, moral dan etika yang berlaku secara universal.

Perseroan tidak akan bertoleransi dengan segala bentuk pelanggaran tersebut di atas termasuk setiap tindakan koruptif baik yang berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Seluruh insan Perseroan termasuk Manajemen dan karyawan (termasuk anggota keluarganya) dilarang untuk menerima, menawarkan dan/atau memberi hadiah, uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan, fasilitas, sponsor atau kegiatan khusus lainnya dengan nilai yang signifikan pada kegiatan yang bersifat pribadi atau sosial (misalnya,

c. Conflict of Interest, Gifts and Bribery and Personal Gain

Management and employees must prevent circumstances in which their personal, family, group, or financial interests clash with the company's interests. Management should avoid putting subordinates in such situations. Management should foster the principle of voluntary disclosure to identify such potential issues before they occur.

Management and employees are prohibited from (a) taking opportunities for themselves that fall within the scope of the Company's activities, (b) using property, information or positions in the Company for personal, family or group benefits and (c) competing with the Company. Management and employees have an obligation to the Company to prioritize the legitimate interests of the Company to the best of their ability.

The Company prohibits every person of the Company including management and every employee of the Company from offering or giving bribes, as well as other unauthorized payments, both legally, morally, and ethically to other persons, entities, and/or entities, and the Company prohibits every personnel of the Company including management and every employee from carrying out work activities in violation of universally applicable legal, moral and ethical norms.

The Company will not tolerate all forms of violations mentioned above including any corruptive acts in the form of bribery, embezzlement, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement, and gratuities.

All personnel of the Company including Management and employees (including their family members) are prohibited from receiving, offering and/or giving gifts, money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel, facilities, sponsorships or other special activities with significant value in personal or social activities (for example,

Pedoman Perilaku Code of Conduct

Hari Raya Keagamaan) atau pada waktu lain, dari dan/atau kepada pihak pemerintahan atau penyelenggara negara, pemasok atau pihak lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan sehubungan dengan jabatan dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hadiah, penawaran perjalanan atau kegiatan khusus harus ditolak dengan sopan atau dikembalikan dengan hormat kepada pihak yang menawarkan. Penawaran tersebut juga harus disampaikan kepada Direktur, Vice President terkait, atau bagian Legal dan Kepatuhan.

Undangan untuk acara makan, kegiatan bisnis atau sosial, kegiatan olahraga atau hiburan dalam rangka memperkuat hubungan bisnis diperbolehkan untuk diterima sepanjang tidak mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan serta tidak melanggar undang-undang dan kebijakan Perseroan. Dalam hal apapun, penilaian dengan itikad baik harus diterapkan dan jika ada pertanyaan mengenai penerimaan hadiah, perjalanan atau kegiatan khusus (nilai hadiah tidak jelas, tujuan hadiah meragukan, dsb.), maka manajemen atau karyawan harus berkonsultasi dengan supervisor-nya atau bagian Legal dan Kepatuhan.

d. Aset Perseroan

Seluruh manajemen dan karyawan harus melindungi harta Perusahaan dan memastikan penggunaan harta secara efisien, sesuai dengan tujuan Perusahaan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pencurian, kecerobohan dan pemborosan mempunyai dampak negatif yang langsung terhadap profitabilitas Perusahaan. Seluruh harta Perusahaan hanya dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Dana atau harta Perusahaan tidak boleh digunakan untuk hadiah atau bantuan. Ini tidak menghalangi hadiah atau bantuan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut:

(a) hadiah atau bantuan diberikan untuk tujuan bisnis yang sah dan bukan untuk menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau untuk menghindari

Religious Holidays) or at other times, from and/or to the government or state administrators, suppliers or other parties doing business with the Company in connection with their position and/or contrary to their obligations or duties. Prizes, travel offers or special activities must be politely declined or respectfully returned to the offering party. The offer must also be communicated to the relevant Director, Vice President, or Legal and Compliance.

Invitations for meals, business or social activities, sports or entertainment activities in order to strengthen business relationships are allowed to be accepted as long as they do not affect or appear to influence decision making and do not violate laws and policies of the Company. In any case, a good faith assessment should be applied and if there are any questions regarding the receipt of the prize, travel or special activities (the value of the prize is unclear, the purpose of the prize is doubtful, etc.), then the management or employee should consult with his/her supervisor or Legal and Compliance department.

d. Company Assets

All management and employees must protect the Company's assets and ensure the use of assets efficiently, in accordance with the Company's objectives, and not violate laws and regulations. Theft, carelessness and waste have a direct negative impact on the Company's profitability. All assets of the Company may only be used for legitimate business purposes. The Company's funds or assets may not be used for gifts or favours. This does not preclude gifts or favours that meet all of the following requirements:

(a) gifts or favours are provided for legitimate business purposes and not to receive benefits not permitted by law or to avoid obligations imposed by law, (b) such gifts or favours

Pedoman Perilaku Code of Conduct

kewajiban yang dikenakan oleh undang-undang, (b) hadiah atau bantuan tersebut dalam jumlah yang wajar dan diberikan sesuai dengan norma kesusilaan dan kebiasaan setempat yang berlaku dan tidak dianggap sebagai jenis suap, gratifikasi atau melanggar undang-undang sebagaimana yang ditafsirkan dan diterapkan, (c) pengungkapan hadiah atau bantuan tersebut tidak akan memperlmalukan Perusahaan atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan dan (d) hadiah atau bantuan tersebut disetujui oleh manajer atau supervisor yang bertanggung jawab. Jika, dalam penilaian manajer atau supervisor yang bertanggung jawab, jumlahnya dianggap tidak kecil, maka manajer atau supervisor tersebut harus meminta pengarahannya dari atasannya. Dana atau harta Perusahaan tidak boleh digunakan untuk sumbangan kepada partai politik dan/atau individu/korporasi yang terafiliasi dengan partai politik.

e. Laporan mengenai Pelanggaran

Setiap karyawan yang saat ini berada dalam suatu situasi atau melihat suatu kegiatan atau mengetahui suatu kegiatan yang kelihatannya bertentangan dengan Pedoman Perilaku Perseroan harus segera memberitahukan fakta-fakta yang bersangkutan kepada Wakil Direktur Utama di areanya atau kepada Direktur. Laporan tersebut akan dipelajari secara rahasia dan Perseroan tidak akan bertoleransi dengan segala bentuk pembalasan terhadap pihak manapun untuk keluhan atau laporan yang dibuat dengan itikad baik.

Departemen Legal dan Kepatuhan atau Divisi Sumber Daya Manusia yang terkait akan menindaklanjuti laporan-laporan yang diterima. Dalam hal pelanggaran terhadap Pedoman ini, Divisi Sumber Daya Manusia akan mengambil langkah disipliner yang pantas, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan setiap tindakan hukum selanjutnya.

f. Konflik Kepentingan

Karyawan diharapkan untuk menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan keuangan yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan. manajemen

are in reasonable amounts and are given in accordance with applicable local norms of decency and custom and are not considered a type of bribery, gratuity or violation of the law as interpreted and applied, (c) disclosure of such gifts or favours will not embarrass the Company or cause harm to the Company and (d) such gifts or favours are approved by the responsible manager or supervisor. If, in the judgment of the responsible manager or supervisor, the amount is considered not small, then the manager or supervisor must ask for direction from his superiors. The Company's funds or assets may not be used for donations to political parties and/or individuals/corporations affiliated with political parties.

e. Fraud Reports

Any employee who is currently in a situation or sees an activity or becomes aware of an activity that appears to be contrary to the Company's Code of Conduct must immediately notify the relevant facts to the Vice President Director in his area or to the Director. Such reports will be treated confidentially and the Company will not tolerate any form of retaliation against any party for complaints or reports made in good faith.

The Legal and Compliance Department or the relevant Human Resources Division will follow up on the reports received. In the event of violation of this Code, the Human Resources Division will take appropriate disciplinary action, up to and including termination of employment and any subsequent legal action.

f. Conflict of Interest

Employees are expected to avoid personal activities and financial interests that may conflict with their responsibilities towards the Company. Management and employees shall

Pedoman Perilaku Code of Conduct

dan karyawan tidak boleh mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan mereka. Keputusan bisnis harus dibuat untuk kepentingan yang terbaik dari Perusahaan, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Oleh karena itu, sebagai kebijakan Perusahaan, seluruh manajemen dan karyawan harus menghindari setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan.

Suatu "konflik kepentingan" terjadi jika suatu kepentingan pribadi seseorang turut campur atau bertentangan dalam cara apapun (atau bahkan tampak turut campur atau bertentangan) dengan kepentingan Perseroan. Suatu situasi konflik kepentingan dapat timbul jika manajemen atau karyawan mengambil tindakan atau memiliki kepentingan (keuangan, pemberian hadiah atau fasilitas, hubungan dengan pejabat publik, mitra korporasi atau partai politik, nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai, rangkap jabatan atau lainnya) yang dapat membuat kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya secara obyektif dan efektif. Konflik kepentingan dapat juga timbul jika seorang anggota manajemen atau karyawan atau seorang anggota keluarganya atau golongannya menerima keuntungan pribadi yang tidak wajar sebagai akibat dari jabatannya dalam Perseroan, tanpa memperhatikan apakah keuntungan tersebut diterima dari Perseroan atau suatu pihak ketiga. Pinjaman kepada, atau jaminan kewajiban dari, anggota manajemen atau karyawan dan anggota keluarga mereka menjadi perhatian khusus.

g. Larangan Terhadap Perdagangan oleh Orang Dalam/ Transaksi oleh Orang Dalam

Setiap anggota manajemen atau karyawan yang memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, informasi material non-publik dari atau mengenai Perseroan ("Orang Dalam") dilarang untuk membeli, menjual atau memperdagangkan saham atau efek lainnya milik dari Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. "Informasi material non-publik" termasuk setiap informasi, positif atau negatif, yang belum tersedia atau diungkapkan kepada

not seek benefits for themselves or others through abuse of their position. Business decisions must be made in the best interests of the Company, not motivated by personal, family, or class interests or benefits. Therefore, as Company policy, all management and employees must avoid any real or perceived conflict of interest.

A "conflict of interest" occurs when a person's personal interests interfere or conflict in any way (or even appear to interfere or conflict) with the interests of the Company. A conflict-of-interest situation may arise if management or employees take action or have interests (financial, gift or facility giving, relations with public officials, corporate partners or political parties, nepotism in the employee recruitment process, concurrent positions or others) that can create difficulties in carrying out their work objectively and effectively. A conflict of interest may also arise if a member of management or an employee or a member of his or her family or group receives unreasonable personal benefits as a result of his or her position within the Company, regardless of whether such benefits are received from the Company or a third party. Loans to, or guarantees of liability from, members of management or employees and their family members are of particular concern.

g. Prohibition Against Insider Trading/ Insider Transactions

Any member of management or employee who has access to, or knows about, material non-public information from or about the Company ("Insider") is prohibited from buying, selling or trading shares or other securities belonging to the Company listed on the Indonesia Stock Exchange. "Material non-public information" includes any information, positive or negative, that is not yet publicly available or disclosed and that may be meaningful to investors, as part of

Pedoman Perilaku Code of Conduct

publik dan yang mungkin berarti bagi investor, sebagai bagian dari seluruh gabungan informasi, dalam menetapkan apakah akan membeli atau menjual saham atau efek lainnya milik SMN. Orang dalam juga dilarang memberikan "petunjuk" mengenai informasi material non-publik, yang secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga, sanak saudara atau teman, sehingga mereka dapat melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik Perseroan. Selanjutnya, jika, selama masa kerja dengan Perseroan, seorang anggota manajemen atau karyawan mendapatkan informasi material non-publik mengenai perusahaan lain, misalnya salah satu dari pelanggan atau pemasok atau afiliasi kami, atau seorang anggota manajemen atau karyawan mengetahui bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan suatu transaksi besar dengan perusahaan lain (misalnya suatu akuisisi), Direktur atau Karyawan tersebut dilarang melakukan perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal Indonesia"), definisi "Orang Dalam" terdiri dari setiap Karyawan, Komisaris, Direktur dan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Publik dan pihak ketiga lainnya, yang karena hubungan usaha mereka memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik, atau pihak manapun yang dalam enam bulan terakhir adalah salah satu dari para pihak yang disebut di atas. Para pihak tersebut dilarang melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik Perseroan selama memiliki Informasi Orang Dalam. "Informasi Orang Dalam" berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia berarti informasi material yang belum diungkapkan kepada publik, termasuk setiap fakta yang penting dan terkait mengenai kejadian, insiden atau data yang dapat berdampak pada harga efek pada suatu bursa atau yang dapat mempengaruhi keputusan investor, calon investor atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam informasi tersebut. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia

the entire combined information, in determining whether to buy or sell shares or other securities belonging to SMN. Insiders are also prohibited from providing "clues" regarding material non-public information, which directly or indirectly disclose such information to other parties, including family members, relatives or friends, allowing them to trade SMN's shares or other securities. Furthermore, if, during the course of employment with the Company, a member of management or an employee obtains material non-public information about another company, for example one of our customers or suppliers or affiliates, or a member of management or an employee learns that the Company is planning to enter into a major transaction with another company (e.g., an acquisition), such Director or Employee is prohibited from trading in the securities of another company aforementioned.

Pursuant to Law No. 8 of 1995 on Capital Market ("Indonesian Capital Market Law"), the definition of "Insider" consists of any Employee, Commissioner, Director and Controlling Shareholder of a Public Company and other third parties, who due to their business relationship have access to, or know about, Insider Information about a Public Company, or any party that in the last six months has been one of the parties mentioned above. Such parties are prohibited from trading SMN's shares or other securities as long as they have Insider Information. "Insider Information" under the Indonesian Capital Market Law means material information that has not been disclosed to the public, including any material and related facts regarding events, incidents or data that may impact the price of securities on an exchange or that may influence the decisions of investors, potential investors or other parties who have an interest in such information. Indonesia's Capital Market Law prohibits Insiders from influencing or providing Insider Information to third parties that may lead to trading in related securities. Any violation of the prohibition on

Pedoman Perilaku Code of Conduct

melarang Orang Dalam untuk mempengaruhi atau memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak ketiga yang dapat mengarah kepada perdagangan efek terkait. Setiap pelanggaran terhadap larangan perdagangan oleh orang dalam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dikenakan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia juga mengatur bahwa setiap manipulasi pasar lebih jauh akan terkena ketentuan denda pidana yang sama seperti untuk perdagangan oleh orang dalam. Manipulasi pasar tersebut termasuk penipuan dengan segala cara, memberikan pernyataan palsu mengenai fakta material atau kegagalan untuk mengungkapkan fakta material tersebut. Siapapun yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam tindakan penipuan, perdagangan palsu, manipulasi bursa efek atau memberikan informasi yang menyesatkan, baik karena sengaja atau lalai, akan dikenakan denda pidana yang sama seperti denda untuk perdagangan oleh orang dalam yang disebut diatas.

h. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses dimana mereka yang terlibat dalam kegiatan pidana menyembunyikan sumber dan menyamarkan sifat dana tidak sah dengan membuat dana tersebut tampak sah. Umumnya proses ini melibatkan tiga tahap:

- 1. Penempatan**
Menempatkan dana tidak sah ke dalam sistem keuangan dengan mengubah dana tersebut ke dalam beberapa instrumen keuangan lainnya.
- 2. Pelapisan**
Memisahkan dana tidak sah dari sumbernya dengan melibatkan dana tersebut ke dalam serangkaian transaksi yang sah.
- 3. Integrasi**
Melibatkan dana tidak sah dalam serangkaian transaksi yang dimaksudkan untuk membuat dana tersebut nampak telah diperoleh dari sumber yang sah.

insider trading under the Indonesian Capital Market Law is subject to a maximum fine of Rp15,000,000,000 (fifteen billion Rupiah) and a maximum imprisonment of 10 (ten) years.

Indonesia's Capital Market Law also stipulates that any further market manipulation will be subject to the same criminal fine provisions as for insider trading. Such market manipulation includes fraud by all means, giving false statements regarding material facts or failure to disclose such material facts. Anyone who provides help or assistance in fraudulent acts, fraudulent trading, manipulation of the stock exchange or providing misleading information, whether intentionally or negligently, will be subject to criminal fines similar to those for insider trading mentioned above.

h. Prevention to Money Laundering Criminal Act

Money laundering is the process by which those involved in criminal activities conceal the source and disguise the nature of unauthorized funds by making them appear legitimate. Generally, this process involves three stages:

- 1. Placement**
Placing unauthorized funds into the financial system by converting those funds into some other financial instrument.
- 2. Coating**
Separating unauthorized funds from their source by involving them into a series of legitimate transactions.
- 3. Integration**
Involving unauthorized funds in a series of transactions intended to make them appear to have been obtained from legitimate sources.

Pedoman Perilaku Code of Conduct

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") mengatur bahwa hal-hal berikut ini adalah kegiatan pencucian uang:

1. Menempatkan, menghabiskan, membelanjakan, membayar, memberikan, menyetorkan, membawa ke luar negeri, mengubah, menukar atau tindakan lain atas hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menutupi sumber tindak pidana.
2. Menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul, sumber, lokasi, tujuan, pengalihan atau kepemilikan yang sebenarnya dari hasil tindak pidana yang diakibatkan dari atau seharusnya diketahui sebagai hasil dari tindak pidana.
3. Menerima atau mengendalikan penempatan, pengalihan, hibah, sumbangan, penyimpanan, pertukaran, atau menggunakan dana dari tindak pidana yang dihasilkan atau yang seharusnya diketahui sebagai hasil dari tindak pidana.

UU TPPU berlaku untuk semua individu dan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan tidak mengenal batas keuangan tertentu.

Sebelum terlibat dalam setiap transaksi baru atau mengadakan hubungan apapun dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan, setiap anggota manajemen dan karyawan yang relevan harus:

1. Memverifikasi identitas pihak ketiga tersebut dan setiap rekanan lainnya.
2. Memiliki pemahaman umum mengenai kegiatan usaha pihak ketiga tersebut dan mampu untuk mengidentifikasi setiap kemungkinan risiko tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan hubungan usaha tersebut.

Keadaan-keadaan berikut ini mungkin dapat menjadi indikasi bahwa pihak ketiga tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap pelanggaran UU TPPU. Jika salah satu dari keadaan-keadaan ini ada, setiap anggota Manajemen dan Karyawan yang relevan harus menyampaikan kepada *Vice President* di areanya dan/atau kepada Direktur untuk menentukan apakah informasi tambahan harus dikumpulkan terkait dengan pihak ketiga tersebut. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

1. Menolak untuk memberikan rujukan atau pengalaman pekerjaan serupa atau tidak dengan segera memberikan informasi terkait dengan pekerjaan;

Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering ("TPPU Law") stipulates that the following are money laundering activities:

1. Placing, using, spending, paying, giving, depositing, bringing abroad, altering, exchanging or other acts on the proceeds of a criminal offence with the intent of hiding or concealing the source of the criminal offence.
2. Conceal or obscure the true origin, source, location, destination, transfer or possession of the proceeds of a criminal offence resulting from or supposed to be known as the result of a criminal act.
3. Receive or control the placement, transfer, grant, donation, storage, exchange, or use of funds from a criminal offence generated or otherwise known to be the result of a criminal offence.

The TPPU Law applies to all individuals and business entities established under Indonesian law and does not recognize any specific financial limits.

Prior to engaging in any new transaction or entering into any relationship with a third party on behalf of the Company, each member of management and relevant employees shall:

1. Verify the identity of such third parties and any other associates.
2. Have a general understanding of the business activities of such third parties and be able to identify any possible risks of money laundering related to such business relationships.

The following circumstances may indicate that such third parties have a high risk of violating the TPPU Law. If any of these circumstances exist, each member of Management and relevant Employees should communicate to the Vice President in his area and/or to the Director to determine whether additional information should be collected in relation to such third party. These circumstances are:

1. Refuse to provide references or similar work experience or do not immediately provide job-related information;

Pedoman Perilaku Code of Conduct

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak memiliki catatan kepemilikan akhir yang jelas; 3. Melakukan transaksi secara tunai; 4. Mempunyai sumber dana kegiatan usaha yang tidak jelas; 5. Dijalankan atau berisikan orang-orang <i>politically exposed persons</i>; 6. Secara umum diketahui bahwa pihak ketiga diduga telah terlibat dalam kegiatan melawan hukum. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Do not have a clear final ownership record; 3. Make transactions in cash; 4. Have an unclear source of funds for business activities; 5. Run or contain politically exposed persons; 6. It is generally known that third parties are alleged to have engaged in unlawful activities. |
|---|---|

SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU

Agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh individu Protelindo, Perseroan melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh pegawai. Sosialisasi atas Pedoman Perilaku ini dilakukan melalui akses intranet dan salinan tertulis untuk karyawan.

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT

To provide understanding to all Protelindo individuals, the Company disseminates the Code of Conduct to all employees. Dissemination of this Code of Conduct is carried out through intranet access and written copies for employees.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR

COMPANY POLICY ON CREDITOR'S RIGHTS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No.21, Perseroan telah menyusun Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur ("Kebijakan"). Perseroan berharap bahwa Kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan pemenuhan atas hak-hak kreditur.

Perseroan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, antara lain:

1. Mematuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk mempertahankan izin-izin yang diperlukan Perseroan dan entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti persetujuan dari para pemegang saham;
3. Memperhatikan hak-hak kreditur dalam perjanjian pinjaman yang telah ada; dan
4. Memastikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi yang sehat dengan memelihara Rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA yang Berjalan dan *Debt Services Coverage Ratio*.

Kami berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para kreditur, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

Following the requirement of Good Corporate Governance ("GCG") as stipulated in POJK No.21, the "Company") has prepared the Policy of the Company On Fulfillment the Creditor's Rights (the "Policy"). The Company is expecting that the Policy will act as guidance for the Company and its subsidiaries on obtaining a loan from a third party and to protect the creditor's rights.

The Company shall consider the following factors before obtaining a loan facility from a third party, among others:

1. Complying with applicable laws and regulations as well as maintaining necessary licenses which are required by the Company and its subsidiaries to conduct their business activities;
2. Complying with the provisions on the Articles of Association, such as to obtain approval from the shareholders when required;
3. Respecting the rights of the creditors on loans; and
4. Ensuring the financial conditions is in a healthy condition by maintaining the Ratio on Net Debt to Running EBITDA and the Debt Services Coverage Ratio.

This Policy is intended to maintain trust from our creditors, investors and stakeholders and to address their rights.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY

Protelindo berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan, jujur, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam organisasi Perseroan, penting untuk memberikan pedoman umum mengenai kebijakan anti-penyuapan dan anti korupsi sebagai dasar bagi Protelindo dalam menjalankan bisnis dan hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan serta memastikan Perseroan mencapai bisnis yang lebih berkelanjutan.

Tujuan dari kebijakan anti-penyuapan dan anti-korupsi Protelindo ("Kebijakan") adalah untuk menguraikan komitmen dan prosedur organisasi dalam mendeteksi, menanggapi, dan mencegah insiden atau tindakan penyuapan, korupsi, atau tindakan kriminal terkait lainnya yang berlaku untuk semua operasi dan proses bisnis Perseroan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh anggota Perseroan, termasuk komisaris, direksi, dan seluruh karyawan ("Pihak Terkait"). Pihak Terkait harus memastikan bahwa Kebijakan ini diterapkan dan dilaksanakan oleh pelanggan, vendor, konsultan, penasihat, dan mitra bisnis terkait lainnya yang bekerjasama ("Mitra Bisnis"), termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa ketentuan yang relevan dari Kebijakan ini termasuk dalam kontrak pihak ketiga, seperti hak untuk melakukan audit dan inspeksi terhadap Mitra Bisnisnya serta klausul tentang penghentian, jika Mitra Bisnis gagal mematuhi Kebijakan ini, hukum dan peraturan yang relevan.

Manajemen Perseroan, melalui Departemen Manajemen Risiko, melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap bisnis Perseroan yang meliputi identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap Kebijakan ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi Perseroan. Direksi dapat merumuskan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk merumuskan serta mengambil mitigasi yang diperlukan berdasarkan laporan tersebut.

Protelindo is committed to conducting business transparently, honestly and with integrity in compliance with applicable laws and regulation. As part of the implementation of Good Corporate Governance principles within the organization of the Company, it is important to provide a general guideline on anti-bribery and anti-corruption policy as a basis for Protelindo in conducting its business and relationship with all stakeholders as well as to ensure the Company achieves a more sustainable business.

The purpose of Protelindo's anti-bribery and anti-corruption policy ("Policy") is to outline the organization's commitment and procedures on detecting, responding and preventing incidents or acts of bribery, corruption or other related criminal actions applicable to all of the Company's operations and business processes.

This Policy applies to all member of the Company, including commissioners, directors, and all employees ("Relevant Parties"). The Relevant Parties shall ensure that this Policy is applied and exercised by their customers, vendors, consultants, advisers and other relevant business partners whom they deal with ("Business Partners"), including but not limited to ensure that the relevant provisions of this Policy are included in third-party contracts, e.g. the right to conduct audits and inspections on its Business Partners as well as a clause on termination, if the Business Partners fail to comply with this Policy, relevant laws and regulations.

Management of the Company, through the Risk Management Department, conducts risk identification and assessment of the Company's business which include the risk identification and assessment associated with the compliance with this Policy and provide regular report to the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may formulate and take necessary actions to formulate as well as take necessary mitigations based on such report.

Kebijakan Antikorupsi Anti-Corruption Policy



Perseroan akan memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak tindakan yang tampaknya bertentangan dengan Kebijakan ini atau karena mereka melaporkan kekhawatiran yang berkaitan dengan tindakan potensial pelanggaran atau pelanggaran Kebijakan ini. Perlakuan merugikan mengacu pada pemecatan, tindakan disiplin, perlakuan atau perlakuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan kekhawatiran yang diajukan individu.

Sebagai bagian dari program pemantauan, Perseroan akan secara teratur membangun dan melakukan, dan Pihak Terkait harus (dan Mitra Bisnis terkait untuk) menghadiri, program pengetahuan yang relevan dan/atau pelatihan sehubungan dengan Kebijakan ini.

The Company will ensure that no one suffers any detrimental treatment as a result of refusing to acts which appear to be contrary to this Policy or because they reported a concern relating to potential act(s) of violation or breach of this Policy. Detrimental treatment refers to dismissal, disciplinary action, treats or unfavourable treatment in relation to the concern the individual raised.

As part of the monitoring program, the Company will regularly establish and conduct, and the Relevant Parties shall (and shall cause the relevant Business Partners to) attend, the relevant awareness programs and/or training in regards to this Policy.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARES OPTION PROGRAMS

Dalam rangka peningkatan kinerja karyawan Perseroan dan entitas anaknya yang merupakan salah satu faktor pendukung dari pencapaian terus menerus Perseroan dan entitas anaknya sampai dengan saat ini, Perseroan dan entitas anaknya memberikan insentif kepada karyawan melalui MESOP.

MESOP yang dijalankan Perseroan dan entitas anaknya dilakukan melalui pemanfaatan saham treasury milik Perseroan hasil dari pelaksanaan program pembelian kembali saham (*Buy Back*) yang dijalankan Perseroan, yaitu sebanyak 310.000.000 lembar saham treasury milik Perseroan atau sama dengan sekitar 26% dari keseluruhan jumlah 1.190.457.400 Saham Treasury yang dimiliki Perseroan per tanggal 30 April 2021, telah dialokasikan untuk pelaksanaan MESOP tersebut.

Pembentukan MESOP dengan mengalokasikan jumlah lembar saham treasury tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMN pada tanggal 31 Mei 2021.

Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebagai peraturan pelaksana MESOP, peserta MESOP adalah karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen) dan entitas anaknya yaitu Perusahaan, Protelindo, Iforte dan entitas anak perusahaan lainnya yang memiliki masa kerja 2 tahun atau lebih per tanggal 31 Mei 2021 ("Peserta Program"). Peserta Program ini akan dialokasikan opsi saham yang nantinya akan dapat dilaksanakan untuk dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaan.

Opsi yang telah diberikan tersebut memiliki masa tunggu untuk kemudian dapat dilakukan pelaksanaan konversi opsi saham menjadi saham Perseroan. Pelaksanaan konversi opsi saham menjadi saham akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap,

In the framework of improving the performance of the Company and its subsidiaries' employees as one of the supporting factors of the Company and its subsidiaries continuous achievement to date, the Company and its subsidiaries provide incentive to their employees through the MESOP.

The MESOP implemented by the Company and its subsidiaries is carried out through benefactors of treasury shares owned by the Company resulting from the implementation of the buy-back program implemented by the Company, in the amount of 310,000,000 shares owned by the Company or as much as 26% of the total 1,190,457,400 Treasury Shares owned by the Company as of the April 30, 2021, has been allocated for the implementation of the MESOP.

The formation of the MESOP by allocating the number of treasury shares has been approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on the May 31, 2021.

In accordance to what has been stipulated as the implementing regulation of the MESOP, the participants of the MESOP are the employees, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company (except Independent Commissioner) and its subsidiaries, namely the Company, Protelindo, Iforte and other subsidiaries who has employment period of 2 years or more as of the May 31, 2021 ("Program Participants"). The Program Participants will be allocated share options which can later be exercised to be converted into shares in the Company by paying the exercise price.

The options that have been granted have a waiting period after which the conversions of the share options into shares in the Company can be carried out. The implementation of the conversion of shares options into shares will be done in two (2) steps,

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Shares Option Programs

yaitu tahap I yang dimulai tanggal 1 Juni 2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25% dari seluruh jumlah opsi saham, dan kemudian tahap II yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2024, untuk keseluruhan sisa Opsi yang dimiliki. Pelaksanaan opsi tersebut dapat dilakukan oleh peserta MESOP sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Adapun harga pelaksanaan opsi Program MESOP adalah sebesar Rp1.000 per saham (angka penuh).

Manajemen Perseroan berhak untuk mengkaji syarat, ketentuan dan pelaksanaan MESOP secara berkala sesuai dengan jumlah saham yang dialokasikan yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Melalui MESOP ini, Perseroan berharap dapat menarik, mempertahankan, memberikan motivasi serta memberikan insentif kepada para anggota manajemen dan karyawan Perseroan maupun Anak Perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai (*value*) Perseroan serta sekaligus menyelaraskan kepentingan manajemen dan karyawan dengan Perseroan, dan karenanya akan dapat meningkatkan kinerja serta performa Perseroan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan nilai terhadap kepemilikan saham Perseroan.

Beban kompensasi ditentukan berdasarkan nilai wajar yang dihitung oleh Steven & Mourits, aktuaris independen, dengan menggunakan metode penentuan harga opsi "*Black-Scholes-Merton*" dalam laporan penilaiannya tanggal 14 Februari 2022 untuk tanggal 30 September 2023 (informasi asumsi tersedia di Laporan Keuangan *audited* Catatan 23).

Pembayaran berbasis saham yang diakui pada tanggal 30 September 2023 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp89.635 dan 24.731.

namely step I which will begin on the 1st of June 2023 with the maximum amount of 25% of total amount of share options, and thereafter step II which will begin on the 1st of June 2024, for all remaining Options owned. Implementation of said options could be done by the participants of the MESOP up until the May 31, 2025. As for the exercise price of the MESOP Program Options are in the amount of Rp1,000 per share (full amount).

The management of the Company has the right to review the terms, conditions and implementation of the MESOP periodically in accordance with the number of shares allocated approved by the Company's shareholders.

Through the MESOP, the Company hopes to attract, retain, motivate and provides incentive to the member of the management and employees of the Company and its Subsidiaries in the framework of increasing the value of the Company and at the same time aligning the interests of the management and employees with the Company, and therefore will increase the performance of the Company in a sustainable manner, which in the end is expected to increase the value of the share of ownership of the Company.

The compensation cost is determined based on the fair value calculated by Steven & Mourits, an independent actuary, using the "*Black-Scholes-Merton*" option pricing model in its valuation report dated February 14, 2022 for September 30, 2023 (the assumptions are presented in the audited Financial Statements Note 23).

The share-based payment recognized as of September 30, 2023 and for the nine months period then ended amounted to Rp89,635 and 24,731.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System ("WBS") merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Tindakan pelanggaran tersebut, antara lain:

- Penipuan/kecurangan/penggelapan;
- Pelanggaran hukum dan peraturan; dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perseroan.

A whistleblowing system ("WBS") is a mechanism that can be used to report witnesses and disseminate information regarding signs of wrongdoing within a company. These are some of the violations:

- Fraud/cheating/embezzlement;
- Violation of laws and regulations; and Violation of Company Regulations, agreements work, Code of Ethics, and other written policies of the Company.

TATA CARA PENYAMPAIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

Para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pelaporannya melalui
Stakeholders can submit the report via:



email : whistle.blower@protelindo.co.id



SMS/WhatsApp: 08174922964

Komite WBS juga dapat menggunakan berbagai sumber dalam menerima dan menindaklanjuti laporan.
WBS Committee can use various sources in receiving and following up on reports.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas pemangku kepentingan, Perseroan juga menyediakan fitur pelaporan secara anonim yang tersedia di website Perseroan:

To maintain the confidentiality of stakeholder identities, the Company also provides a feature for anonymous reporting available on the Company's website:



<https://www.protelindo.net/contact-us/whistleblowing-system/form>.

Selain itu, Komite WBS juga dapat menggunakan berbagai sumber dalam menerima dan menindaklanjuti laporan.

Additionally, the Whistleblowing System Committee may use various sources in receiving and following up on reports.

Whistleblowing System Whistleblowing System

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLE BLOWER

Komite WBS akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan melindunginya dari pembalasan. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan.

PENANGANAN PENGADUAN

Setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Komite WBS akan mengevaluasi seluruh laporan yang masuk mencakup aspek administratif, operasional, dan yudisial. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan valid atau tidaknya laporan tersebut. Apabila laporan yang diberikan di luar ruang lingkup dari *Whistleblowing System*, maka Komite WBS akan meneruskan kepada pihak atau unit terkait agar ditindaklanjuti.

Perseroan membentuk Komite WBS yang bertugas untuk mengelola WBS. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite WBS, antara lain:

- Menerima dan mendokumentasikan laporan yang masuk;
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
- Melakukan investigasi;
- Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- Memberikan perlindungan kepada Pelapor; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Selama tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) laporan yang diterima melalui sistem *Whistle Blower System*. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PROTECTION OF WHISTLE BLOWERS

The WBS Committee will keep confidential the identity of the whistleblowers and provide protection from retaliation. Parties participating in reporting violations are entitled to legal protection from the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM HANDLING

Any information submitted by the whistle blowers will be treated as confidential information. The WBS Committee will evaluate all incoming reports covering administrative, operational, and judicial aspects. If the initial information is deemed sufficient, further examination will be carried out to conclude whether or not the report is valid. If the report provided is outside the scope of the Whistleblowing System, the WBS Committee will forward it to the relevant party or unit for follow-up.

The Company established WBS Committee whose task is to manage WBS. The following are duties and responsibilities of the WBS Committee:

- Receive and document incoming reports;
- Identifying and classifying the type of violation;
- Performing investigations;
- Maintaining the confidentiality of whistleblower's identity;
- Protecting the whistleblower; and
- Prepare and submit reports to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

RESULT OF THE REPORT HANDLING AND FOLLOW UP

In 2023, a total of 20 (twenty) reports received through the WBS. All such reports have been processed and followed up in accordance with applicable regulations.

DAFTAR INDEKS SEOJK 16/2021

SEOJK INDEX LIST 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Umum General		
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. The annual report should be presented in good and correct Indonesian, and it was recommended to present it also in English.		
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report should be printed in good quality and uses an easy-to-read type and size.		
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report clearly stated the company's identity.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: The company name and year of the annual report should be displayed on: 1. Sampul muka; 1. Face cover; 2. Samping; 2. Side; 3. Sampul belakang; dan 3. Back cover; and 4. Setiap halaman. 4. Every page.	
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report should be available on the company website.		
Kilas Kinerja Performance Highlights		6
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. The summary of important financial data contained financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company had been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: Information in the annual reports includes the following: 1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales; 2. Laba bruto; 2. Gross profit; 3. Laba (rugi); 3. Profit (loss); 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 4. Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	8

Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	5. Total laba (rugi) komprehensif; 5. Total comprehensive profit (loss);	
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali; 6. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	
	7. Laba (rugi) per saham; 7. Earnings (loss) per share;	
	8. Jumlah aset; 8. Total assets;	
	9. Jumlah liabilitas; 9. Total liabilities;	
	10. Jumlah ekuitas; 10. Total equity;	
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 11. Ratio of profit (loss) to total assets;	
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 12. Ratio of profit (loss) to equity;	
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 13. Ratio of profit (loss) to income/sales;	
	14. Rasio lancar; 14. Current ratio;	
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 15. Ratio of liabilities to equity;	
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; 16. Ratio of liabilities to total assets;	
	17. Rasio KPMM; 17. CAR ratio;	
	18. Rasio Return on Asset (ROA); 18. Ratio of Return on Assets (ROA);	
	19. Rasio Return on Equity (ROE); 19. Ratio of Return on Equity (ROE);	
	20. Aset produktif 20. Productive Assets;	
	21. Rasio Non-performing Loans (NPL); 21. Ratio of Non-performing Loans (NPL);	
	22. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); 22. Ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO);	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	23. Cost to Income Ratio (CIR); 23. Cost to Income Ratio (CIR);	
	24. Rasio Net Interest Margin (NIM); 24. Net Interest Margin Ratio (NIM);	
	25. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 25. Percentage of violations and exceeding the Maximum Lending Limit (BMPK);	
	26. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM); 26. Statutory Reserves Ratio (GWM);	
	27. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan 27. Ratio of Net Open Position (GDP); and	
	28. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya. 28. Information and other financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	
Informasi Saham Stock Price Information	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: 1. Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing: a. Jumlah saham yang beredar; a. Number of outstanding shares; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; b. Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan c. The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. d. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	10

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: 2. In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; a. The date of implementation of the corporate action; b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; b. The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; c. Number of outstanding shares before and after the corporate action; d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan d. Number of conversion effects executed (if any); and e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; e. Share prices before and after corporate actions;	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan 3. In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained; and	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.</p> <p>4. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting).</p>	
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	<p>Informasi memuat: Information contained:</p> <p>1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;</p> <p>2. Tingkat bunga/imbalan; 2. Interest rate/yield;</p> <p>3. Tanggal jatuh tempo; dan 3. Due date; and</p> <p>4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. 4. Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. Note: if the company did not have bonds/sukuk/ convertible bonds, it had to be disclosed.</p>	
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Reports of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	<p>Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The report of the Board of Commissioners should at least contain a brief description about:</p> <p>1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 1. Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;</p> <p>2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 2. Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and</p>	20

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.</p> <p>4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.</p>	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	<p>Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:</p> <p>1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 1. Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:</p> <p>a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; a. Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies;</p> <p>b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;</p> <p>c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; c. The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;</p> <p>d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and</p> <p>e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; e. Constraints faced by Issuers or Public Companies;</p> <p>f. Struktur organisasi; f. Organizational structure;</p> <p>g. Aktivitas utama; g. Main activity;</p> <p>h. Teknologi informasi; h. Information Technology;</p> <p>i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; i. Types of products and services offered, including lending to micro, small and medium business debtors;</p>	28

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; j. Interest rates for raising and providing funds	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar; k. Economic development and target market;	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; l. Network and business partners at home and/or abroad;	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; m. Number, type and location of offices;	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; n. Ownership of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the Bank's business group;	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; o. Important changes that occurred in the Bank and the Bank's business group in the relevant year;	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan p. Important things that are expected to happen in the future; and	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. q. Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2. Description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 4. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: It described: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 1. The signature is poured on a separate sheet; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 2. A statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors stating their names and positions; and 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. 4. A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that there is a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors who does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned.	
Profil Perusahaan Company Profile		
Nama dan alamat lengkap perusahaan Company name and full address	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including: 1. Alamat; 1. Address; 2. Nomor telepon; 2. Telephone number; 3. Alamat surat elektronik; dan 3. Electronic mail address; and 4. Alamat situs web; 4. Website address;	40

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Brief history of the Issuer or Public Company	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Note: if the company had never changed its name, it should be disclosed.	46
Bidang usaha Business fields	Uraian mengenai antara lain: It described: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 1. The company's business activities according to the latest articles of association; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 2. Business activities carried out; and 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. 3. Products and/or services produced.	52
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: It included: 1. Visi perusahaan; 1. Company vision; 2. Misi perusahaan; 2. Company mission; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 3. Information that the vision and mission had been reviewed and approved by the Board of Directors/ Board of Commissioners for the financial year; and 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan. 4. A statement regarding the corporate culture of the Company.	50
Wilayah Operasional Operational Area	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area was the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	54

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Struktur Organisasi Organizational structure	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	
Keanggotaan Asosiasi Association Member	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	58
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least contained: 1. Nama dan jabatan; 1. Name and position; 2. Foto terbaru; 2. Recent photos; 3. Usia; 3. Age; 4. Kewarganegaraan; 4. Citizenship; 5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; 5. Educational history and/or certification; 6. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 6. Position history, including information on: a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; a. Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners; b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; b. The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	60-63

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p> <p>c. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed;</p>	
	<p>d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>d. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</p>	
	<p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;</p> <p>7. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties;</p>	
	<p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;</p> <p>In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter;</p>	
	<p>8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan</p> <p>8. Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and</p>	
	<p>9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat</p> <p>9. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed;</p>	
Profil Direksi Board of Directors Profile	<p>Profil Direksi, paling sedikit memuat:</p> <p>Profile of the Board of Directors, at least contained:</p> <p>1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;</p> <p>1. Name and position in accordance with the duties and responsibilities;</p> <p>2. Foto terbaru;</p> <p>2. Recent photos;</p> <p>3. Usia;</p> <p>3. Age;</p>	66-71

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>4. Kewarganegaraan;</p> <p>4. Citizenship;</p>	
	<p>5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;</p> <p>5. Educational history and/or certification;</p>	
	<p>6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>6. Position history, including information on:</p> <p>a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</p> <p>a. The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;</p> <p>b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan</p> <p>b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and</p>	
	<p>c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>c. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</p>	
	<p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan</p> <p>7. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties.</p> <p>In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and</p>	
	<p>8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p> <p>8. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed;</p>	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan. Number of employees and data on employee competency development.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information could be presented in tabular form.	72
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding: 1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; 1. Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; 2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed; 3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	73

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; 4. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: 4. Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification: a. Kepemilikan institusi lokal; a. Ownership of local institutions; b. Kepemilikan institusi asing; b. Ownership of foreign institutions; c. Kepemilikan individu lokal; dan c. Local individual ownership; and d. Kepemilikan individu asing; d. Foreign individual ownership; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information could be presented in tabular form.	
Pemegang saham utama dan pengendali Major and controlling shareholders	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	74
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiaries and/or associated entities	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank Information related to the Bank Business Group		
Struktur grup perusahaan Company group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	74
Kronologi pencatatan saham Share listing chronology	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	99
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of the financial year.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information that had not matured in the financial year at least included the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	99
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies included: 1. Nama dan alamat; 1. Name and address; 2. Periode penugasan; 2. Assignment period; 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; 3. Information on audit and/or non-audit services provided; 4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan 4. Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and	101

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. 5. In the event that AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.	
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of supporting institutions and/or professions	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards received in the last financial year and/or certifications that are still valid in the last financial year both on a national and international scale	Informasi memuat antara lain: It contained information in the following: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 1. Name of award and/or certification; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Year of award and/or certification; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 3. The awarding and/or certification body; and 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 4. Validity period (for certification).	
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of the subsidiary and/or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: It contained information including: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 1. Name and address of the subsidiary; and 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. 2. Name and address of branch/representative office. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. Note: if the company did not have a subsidiary, branch office, and representative office, it should be disclosed.	102
Informasi pada Website Perusahaan Information on Company Website	Meliputi paling kurang: It included at least: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 1. Shareholder information up to the individual ultimate owner; 2. Isi Kode Etik; 2. Fill in the Code of Ethics;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;</p> <p>3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date of the summary of the minutes of the GMS being announced;</p> <p>4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);</p> <p>4. Separate annual financial statements (last 5 years);</p> <p>5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan</p> <p>5. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors; and</p> <p>6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.</p> <p>6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.</p>	
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Management Discussion and Analysis on Company Performance		
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment	<p>Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:</p> <p>Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:</p> <p>1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.</p> <p>1. Explanation of each business segment.</p> <p>2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:</p> <p>2. Performance per business segment, including:</p> <p>a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;</p> <p>a. Production, which includes the process, capacity, and development;</p> <p>b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;</p> <p>b. Increase/decrease in production capacity;</p> <p>c. Penjualan/pendapatan usaha; dan</p> <p>c. Sales/operating income; and</p> <p>d. Profitabilitas</p> <p>d. Profitability</p>	120

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance	<p>Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <p>Financial performance analysis which included a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of an increase/decrease in an account (in the form of narratives and tables), including regarding:</p> <p>1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;</p> <p>1. Current assets, non-current assets, and total assets;</p> <p>2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;</p> <p>2. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;</p> <p>3. Ekuitas;</p> <p>3. Equity;</p> <p>4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan;</p> <p>4. Sales/operating income, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period;</p> <p>5. Arus kas;</p> <p>5. Cash flow;</p> <p>6. Suku bunga dasar kredit;</p> <p>6. Basic loan interest rate;</p> <p>7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.</p> <p>7. Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios.</p>	121
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan Discussion and analysis of abilities to pay debts and the collectability level of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry	<p>Penjelasan tentang:</p> <p>Explanation of:</p> <p>1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan</p> <p>1. Ability to pay debts, both short term and long term and</p> <p>2. Tingkat kolektibilitas piutang.</p> <p>2. The level of collectability of receivables.</p>	134
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and management of capital structure policy	<p>Penjelasan atas:</p> <p>The explanation consisted of:</p> <p>1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan</p> <p>1. Details of the capital structure consisting of interest-based debt/sukuk and equity; and</p>	135

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 2. Management policies on capital structure (capital structure policies); and 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen 3. Basis for selecting management policy	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 1. The name of the party making the bond; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. The purpose of the bond; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. The expected source of funds to fulfill these commitments; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Currency to be denominated; and 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. 5. Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Note: if the company did not have a commitment related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.	136
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained: 1. Jenis investasi barang modal; 1. Types of investment in capital goods; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 2. The purpose of investment in capital goods; and 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. 3. The investment value of capital goods issued in the last financial year. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Note: if there was no realization of capital goods investment, it should be disclosed.	136

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding: 1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales; 2. Laba (rugi); 2. Profit (loss); 3. Struktur modal (capital structure); 3. Capital structure; 4. Pemasaran; 4. Marketing; 5. Pengembangan SDM; 5. HR Development; 6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 6. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, about: 1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales; 2. Laba (rugi); 2. Profit (loss); 3. Struktur modal (capital structure); 3. Capital structure (capital structure); 4. Kebijakan dividen; 4. Dividend Policy; 5. Pemasaran; 5. Marketing; 6. Pengembangan SDM; 6. HR Development; 7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 7. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	143

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts occurring after the date of the accountant's report	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.</p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.</p> <p>Note: if there was no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.</p>	143
Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description of the company's business prospects	<p>Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p>The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.</p>	113
Uraian tentang aspek pemasaran Description of the marketing aspect	<p>Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p> <p>The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.</p>	117
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) financial years	<p>Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:</p> <p>Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least:</p> <hr/> <p>1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;</p> <p>1. Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income;</p> <hr/> <p>2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;</p> <p>2. Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;</p> <hr/> <p>3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas);</p> <p>3. Total dividends per share (cash and/or non-cash);</p> <hr/> <p>4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.</p> <p>4. The amount of dividends per year paid.</p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p> <p>Note: if there was no dividend distribution, the reasons should be disclosed.</p>	137

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company was still required to submit a report on the realization of the use of funds)	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>It contained a description of:</p> <hr/> <p>1. Total perolehan dana;</p> <p>1. Total proceeds;</p> <hr/> <p>2. Rencana penggunaan dana;</p> <p>2. Plan for the use of funds;</p> <hr/> <p>3. Rincian penggunaan dana;</p> <p>3. Details of the use of funds;</p> <hr/> <p>4. Saldo dana; dan</p> <p>4. Fund balance; and</p> <hr/> <p>5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).</p> <p>5. The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).</p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p> <p>Note: if the company did not have information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.</p>	140
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi Information on material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>It contained a description of:</p> <hr/> <p>1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;</p> <p>1. Transaction date, value, and object;</p> <hr/> <p>2. Nama pihak yang melakukan transaksi;</p> <p>2. Name of the party conducting the transaction;</p> <hr/> <p>3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);</p> <p>3. The nature of the affiliation relationship (if any);</p> <hr/> <p>4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;</p> <p>4. Explanation of the fairness of the transaction;</p> <hr/> <p>5. Pemenuhan ketentuan terkait;</p> <p>5. Fulfillment of related provisions;</p> <hr/> <p>6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:</p> <p>6. In the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number 1) to number 5), the Issuer or Public Company also disclosed information:</p>	140

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>a. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>); dan</p> <p>a. Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle; and</p> <p>b. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>);</p> <p>b. The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arm's length principle;</p>	
	<p>7. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</p> <p>7. For affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added.</p>	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>8. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</p> <p>8. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;</p> <p>9. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p>9. In the event that there was no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.</p>	
<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>The description included:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Note: if there were no changes to the laws and regulations in the last financial year, the matters should be disclosed.</p>	144
<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>A description of the changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>The description included:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan akuntansi; Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Note: If there was no change in accounting policy in the last financial year, it should be disclosed.</p>	144

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi kelangsungan usaha Business continuity information	<p>Pengungkapan informasi mengenai: Disclosure of information regarding:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 1. Potential Matters having a significant effect on the company's business continuity in the last financial year; Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 2. Management's assessment of the items in number 1; and Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. 3. Assumptions used by management in conducting the assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Note: if there were no matters that had the potential to significantly affect the continuity of the company's business in the last financial year, the company should disclose the assumptions that underlied management believe that there are no matters that had the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year.</p>	296
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance		
RUPS GMS	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included:</p> <ol style="list-style-type: none"> keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan a. resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b. resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them; 	205

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.</p>	
Direksi Directors	<p>1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 1 Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors</p> <p>Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.</p> <p>2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; 2. A statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors;</p> <p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; 3. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.</p> <p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; 4. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors:</p> <p>a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan a. Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and</p>	242

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); b. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);</p> <p>5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 5. The Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:</p> <p>a. prosedur penilaian kinerja; dan a. performance appraisal procedures; and</p> <p>b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan b. the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and</p> <p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.</p>	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 1. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</p> <p>2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; 2. A statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners;</p> <p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. 3. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS.</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.</p>	222

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>4. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; 4. training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners;</p> <p>a. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan a. policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and</p> <p>b. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); b. training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);</p> <p>5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 5. Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:</p> <p>a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; a. performance appraisal implementation procedures;</p> <p>b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan b. the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and</p> <p>c. pihak yang melakukan penilaian; dan c. the party conducting the assessment; and</p> <p>6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: 6. The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:</p> <p>a. prosedur penilaian kinerja; dan a. performance appraisal procedures; and</p> <p>b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; b. the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;</p>	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Independent Commissioner (minimum 30% of the total Board of Commissioners)	Meliputi antara lain: It included: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 1. Criteria for determining the Independent Commissioner; and 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 2. Statement on the independence of each Independent Commissioner.	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained: 1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 1. The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and 2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: 2. Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including: a. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; a. procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners; b. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan b. the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and c. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	237,254
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks		
Komite audit Audit committee	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership; 2. Usia; 2. Age;	260

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on: a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; 6. Period and term of office of audit committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite audit; 7. Statement of independence of the audit committee;	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 8. Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	
	9. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan 9. Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and	
	10. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; 10. Implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Committee or function of nomination and remuneration Issuers or Public Companies	Paling sedikit memuat: At least it contained: 1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership; 2. Usia; 2. Age;	271

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 6. The period and term of office of the committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite; 7. Committee independence statement;	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 8. Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 9. Description of duties and responsibilities;	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); 10. A statement of having a guideline or charter (charter);	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; 11. Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan 12. Brief description of the implementation of activities in the financial year; and	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan 1. Reasons for not forming the committee; and	
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; 2. The party carrying out the nomination and remuneration function;	
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that supported the functions and duties of the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained:	278
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership;	
	2. Usia; 2. Age;	
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 6. The period and term of office of the committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite; 7. Committee independence statement;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan 8. Training and/or competency improvement followed in the financial year (if any); and</p> <p>9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 9. Description of duties and responsibilities;</p> <p>10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; 10. A statement that the committee has had guidelines or charters;</p> <p>11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan 11. Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and</p> <p>12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 12. Brief description of the committee's activities for the financial year;</p>	
Sekretaris perusahaan Company secretary	<p>1. Nama; 1. Name;</p> <p>2. Domisili; 2. Domicile;</p> <p>3. Riwayat jabatan, meliputi: 3. Position history, including:</p> <p>a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan a. Legal basis for appointment as company secretary; and</p> <p>b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</p> <p>c. Riwayat pendidikan; c. Educational history;</p> <p>d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan d. Training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and</p> <p>e. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; e. A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;</p>	279

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	<p>1. Nama kepala unit audit internal; 1. Name of the head of the internal audit unit;</p> <p>2. Riwayat jabatan, meliputi: 2. Position history, including:</p> <p>a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan a. Legal basis for appointment as head of internal audit unit; and</p> <p>b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</p> <p>3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); 3. Qualification or certification as an internal audit profession (if any);</p> <p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; 4. Training and/or competency improvement that was followed in the financial year;</p> <p>5. Struktur dan kedudukan unit audit internal; 5. The structure and position of the internal audit unit;</p> <p>6. Uraian tugas dan tanggung jawab; 6. Description of duties and responsibilities;</p> <p>7. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan 7. A statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and</p> <p>8. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau komite audit; 8. A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/or audit committee;</p>	286
Akuntan Publik Public Accountant	<p>1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 1. Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years;</p> <p>2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Name and year of the Public Accounting Firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;</p>	292

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan</p> <p>3. The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and</p> <hr/> <p>4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.</p> <p>4. Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants other than auditing services for annual financial statements in the last financial year.</p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Note: if there was no other service, it should be disclosed.</p>	
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik, A description of the internal control system implemented by the issuer or public company,	<p>1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;</p> <p>1. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;</p> <hr/> <p>2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an</p> <p>2. Review of the effectiveness of the internal control system; and</p> <hr/> <p>3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;</p> <p>3. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;</p>	294
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik The risk management system implemented by the Issuer or Public Company	<p>1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>1. General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;</p> <hr/> <p>2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya;</p> <p>2. Types of risks and how to manage them;</p> <hr/> <p>3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan</p> <p>3. Overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and</p> <hr/> <p>4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;</p> <p>4. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;</p>	296

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada), Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any),	<p>1. Pokok perkara/gugatan;</p> <p>1. Principal case/lawsuit;</p> <hr/> <p>2. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan</p> <p>2. Status of settlement of cases/claims; and</p> <hr/> <p>3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik;</p> <p>3. The effect on the condition of the issuer or public company;</p>	306
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada) Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		306
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Access to company information and data: A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, meetings with analysts, and so on.		307
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company	<p>1. Pokok-pokok kode etik;</p> <p>1. The points of the code of ethics;</p> <hr/> <p>2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;</p> <p>2. Disclosure that the code of ethics applied to all levels of the organization;</p> <hr/> <p>3. Penyebarluasan kode etik;</p> <p>3. Dissemination of the code of ethics;</p> <hr/> <p>4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan</p> <p>4. Sanctions for each type of violation stipulated in the code of ethics (normative); and</p> <hr/> <p>5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.</p> <p>5. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.</p> <hr/> <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Note: if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed</p>	311

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/msop</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee Stock ownership program/esop</i>);</p> <p>Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>)</p> <p>A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP);</p> <p>In the case of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP).</p>	<p>Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: Information disclosed should at least contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah saham dan/atau opsi; 1. Number of shares and/or options; Jangka waktu pelaksanaan; 2. Implementation period; Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 3. Requirements for eligible employees and/or management; and Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. 4. Execution price or determination of exercise price. 	324
<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi</p> <p>Brief description of Information disclosure policy</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan 1. Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; 2. Implementation of the policy; 	308
<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company</p>	<ol style="list-style-type: none"> Cara penyampaian laporan pelanggaran; 1. How to submit a violation report; Perlindungan bagi pelapor; 2. Protection for whistleblowers; Penanganan pengaduan; 3. Handling of complaints; Pihak yang mengelola pengaduan; dan 4. The party managing the complaint; and Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 5. The results of the handling of complaints, at least: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan a. Number of complaints received and processed in the financial year; and Tindak lanjut pengaduan; b. Follow-up on complaints; 	326

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
<p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy</p>	<p>Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p>In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.</p> <ol style="list-style-type: none"> Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan 1. Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies; <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.</p> <p>In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.</p>	322
<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p> <p>Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Description of the Company's written policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</p> <p>Note: if there was no such policy, the reasons and considerations should be disclosed.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau 1. Statement of recommendations that had been implemented; and/or Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). 2. Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2023 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Implementation Assessment for the financial year 2023 which included at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Memuat uraian mengenai: It contained a description of: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 1. Criteria used in the assessment 2. Pihak yang melakukan penilaian 2. The party conducting the assessment 3. Skor penilaian masing-masing kriteria 3. The assessment score of each criterion 4. Rekomendasi hasil penilaian 4. Recommended assessment results 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. 5. Reasons for not yet/not implemented recommendations.	
Informasi Keuangan Financial Information		392
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.	Laporan Keuangan Financial Statement
Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on financial statements		
Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor in Opinion	Deskripsi memuat tentang: The description contained about: 1. Nama dan tanda tangan; 1. Name and signature; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 2. Date of the Audit Report; and 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. 3. KAP license number and Public Accountant license number.	Laporan Keuangan Financial Statement I-IX
Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: It completely contained the elements of the financial statements: 1. Laporan posisi keuangan; 1. Statement of financial position; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 2. Statement of profit or loss and other comprehensive income;	Laporan Keuangan Financial Statement 1-151

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	3. Laporan perubahan ekuitas; 3. Statement of changes in equity; 4. Laporan arus kas; 4. Cash flow statement; 5. Catatan atas laporan keuangan; 5. Notes to financial statements; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 6. Comparative information about the previous period; and 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). 7. Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	
Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability level comparison	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	6-9, 121-133
Laporan Arus Kas Cash flow statement	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: It should meet the following conditions: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 1. Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 2. Using the direct method to report cash flows from operating activities; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 3. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	Laporan Keuangan Financial Statement 7-8
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Overview	Meliputi sekurang-kurangnya: It included at least: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 1. Statement of compliance with SAK;	Laporan Keuangan Financial Statement 18-56

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;</p> <p>2. Basis of measurement and preparation of financial statements;</p> <hr/> <p>3. Pajak penghasilan;</p> <p>3. Income tax;</p> <hr/> <p>4. Imbalan kerja; dan</p> <p>4. Work benefits; and</p> <hr/> <p>5. Instrumen Keuangan.</p> <p>5. Financial Instruments.</p>	
Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:</p> <hr/> <p>1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;</p> <p>1. Name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party;</p> <hr/> <p>2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan</p> <p>2. Transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses; and</p> <hr/> <p>3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</p> <p>3. Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.</p>	Laporan Keuangan Financial Statement 128-133
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosures related to taxation	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:</p> <hr/> <p>1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;</p> <p>1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden;</p> <hr/> <p>2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;</p> <p>2. Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;</p> <hr/> <p>3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;</p> <p>3. A statement that the reconciled Taxable Profit (LKP) was used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return;</p>	Laporan Keuangan Financial Statement 95-104

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan</p> <p>4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount was not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of position. finance; and</p> <hr/> <p>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.</p> <p>5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.</p>	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosures relating to fixed assets	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:</p> <hr/> <p>1. Metode penyusutan yang digunakan;</p> <p>1. The depreciation method used;</p> <hr/> <p>2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya;</p> <p>2. A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model;</p> <hr/> <p>3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan</p> <p>3. The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model); and</p> <hr/> <p>4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.</p> <p>4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.</p>	Laporan Keuangan Financial Statement 30-31
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosures relating to operating segments	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:</p> <hr/> <p>1. Informasi umum yang mencakup faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;</p> <p>1. General information covering the factors used to identify the reported segments;</p> <hr/> <p>2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;</p> <p>2. Information on the reported segment's profit or loss, assets and liabilities;</p>	Laporan Keuangan Financial Statement 133-135

Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan</p> <p>3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment elements to the related amounts within the entity; and</p>	
	<p>4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.</p> <p>4. Disclosure at the entity level, which included information about products and/or services, geographic areas and key customers.</p>	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures relating to Financial Instruments	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:</p> <p>1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 1. Details of financial instruments owned based on their classification;</p> <p>2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments;</p> <p>3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 3. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;</p> <p>4. Kebijakan manajemen risiko; dan 4. Risk management policy; and</p> <p>5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 5. Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively.</p>	Laporan Keuangan Financial Statement
Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:</p> <p>1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 1. The date on which the financial statements were authorized for issue; and</p> <p>2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 2. The party responsible for authorizing the financial statements.</p>	Laporan Keuangan Financial Statement

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

CONFORMITY OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION TO THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.	Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
A.1	Hak Pemegang Saham Dasar Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final / tahunan) secara adil dan tepat waktu; Artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	137
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	196,199-201
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan item agenda, untuk menyetujui Remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk direktur / komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	206-209
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan Calon Direksi/Komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	206-209
A.2.3	Apakah perusahaan mengizinkan pemegang saham untuk memilih direktur / komisaris Secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	206-209
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	205
A.2.5	Apakah risalah RUPST terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	267
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk menyetujui, tidak setuju, dan abstain suara untuk semua resolusi / setiap item agenda untuk RUPS terbaru? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	211-221
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	199

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri RUPS terbaru? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	206
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara secara in absentia? Does the company allow voting in absentia?	208
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	208
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (scrutineers / inspektur) untuk menghitung dan / atau memvalidasi suara pada RUPS? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	205
A.2.12	Apakah perusahaan menyediakan untuk umum pada hari kerja berikutnya hasil suara yang diambil selama RUPST / RUPSLB terakhir untuk semua keputusan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	210
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua RUPS dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	210
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPST/sirkuler dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	211-216
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menempatkan item-item pada agenda rapat umum dan/atau untuk meminta rapat umum tunduk pada persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	211-216
A.3	Pasar untuk kontrol perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	N/A
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	210
A.5	Saham dan hak suara Shares and voting rights	-

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.5.1	Di mana perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa efek/ situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A
A.6	Panggilan RUPST Notice of AGM	
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi diajukan pada rapat umum tahunan terbaru Hanya berurusan dengan satu item, yaitu, tidak ada bundling beberapa item ke dalam resolusi yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	211-216
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan tentang RUPS/surat edaran terbaru sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran memiliki rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details	Website
A.6.3	Adalah profil direksi / komisaris (minimal usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di daftar lainnya perusahaan) dalam mencari pemilihan / pemilihan ulang termasuk? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	RUPST 2023 AGMS 2023
A.6.4	Apakah auditor yang mencari penunjukan/penunjukan kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	292-293
A.6.5	Apakah dokumen proxy tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Website
A.7	Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
A.7.1	Apakah direksi / komisaris wajib melaporkan transaksi mereka di perusahaan saham dalam 3 hari kerja? Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	239, 256
A.8	Transaksi pihak terkait oleh direktur dan eksekutif kunci. Related party transactions by directors and key executives.	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite direksi/komisaris independen untuk meninjau RPT material untuk menentukan apakah mereka demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	230-233, 248-249
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	225-226, 245-246
A.8.3	Apakah perusahaan juga memiliki kebijakan pinjaman kepada direksi dan komisaris? Melarang praktik ini atau memastikan bahwa mereka dilakukan dengan basis arms' length dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	241, 258

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan Protecting minority shareholders from abusive actions	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mereka adil dan berada pada <i>arms' length</i> ? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at <i>arms' length</i> ?	230–233– 248–249
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, adalah Keputusan yang dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	140–142, Laporan Keuangan Financial Statement 128–133
C	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
C.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, dan mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision	
	Informasi penting terkait Keberlanjutan harus ditentukan Material Sustainability-related information should be specified	
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang material bagi Strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah? Does the company identify climate change as an issue?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan yang diakui secara internasional atau standar untuk keberlanjutan (yaitu GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
	Jika sebuah perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus menetapkan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara teratur dalam bentuk yang mudah diakses If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	N/A
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	N/A
C.1.6	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan / Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
C.2	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang hal-hal keberlanjutan Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan berkumpul Umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.3	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan material saat memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait iklim The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks	
	Dewan harus menilai apakah struktur modal perusahaan kompatibel dengan tujuan strategisnya dan selera risiko yang terkait untuk memastikannya tahan terhadap skenario yang berbeda Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa Struktur modal dan utang perusahaan kompatibel dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	N/A
C.4	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial. The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk menangani kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
C.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	322
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	321
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya pada Lingkungan / Ekonomi dan masalah-masalah sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.5	Di mana kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
C.5.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang pelatihan dan program pengembangan untuk karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan hadiah / kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini. Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	326
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan / orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal / tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	326
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
D.1	Struktur kepemilikan yang transparan Transparent ownership structure	73
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, memegang 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	74
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	74
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) direksi (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	N/A
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	74
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, entitas anak, asosiasi, usaha patungan dan perusahaan tujuan khusus/kendaraan (SPE)/(SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/(SPVs)?	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:	40
D.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	8, 121-147
D.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	10
D.2.3	Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	137
D.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	60-71
D.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya dari perusahaan terbuka) dari direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/ commissioners	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	193-204
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika ada ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	
D.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Remuneration of Members of the Board and Key Executives	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk Direksi/Komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	237-239, 254-255
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau lainnya yang diungkapkan kepada publik; dokumen] rincian remunerasi masing-masing direktur/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	239, 255
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan / praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan gaji lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO-nya? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	237-239, 254-255
D.3.4	Apakah perusahaan secara terbuka mengungkapkan [yaitu laporan tahunan atau dokumen publik lainnya] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	237-239, 254-255
D.4	Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	140-142, Laporan Keuangan Financial Statement 128-133
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk masing-masing RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	140-142, Laporan Keuangan Financial Statement 128-133
D.5	Direksi dan komisaris berurusan dengan saham perusahaan Directors and commissioners dealings in shares of the company	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	216-218, 312
D.6	Auditor eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	
	Jika firma audit yang sama terlibat untuk layanan audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	239
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	239

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
D.7	Media komunikasi Medium of communications	
	Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?	
D.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Website
D.7.2	Situs web perusahaan Company website	307
D.7.3	Pengarahan analis Analyst's briefing	309-310
D.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings /press conferences	
D.8	Pengarsipan / rilis laporan tahunan / keuangan tepat waktu Timely filing /release of annual/financial reports	
D.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan / laporan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari dari akhir tahun keuangan? Is the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Website
D.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Website
D.8.3	Apakah representasi yang benar dan adil / adil dari keuangan tahunan Pernyataan/laporan yang ditegaskan oleh Direksi/Komisaris dan/atau pejabat Perseroan yang relevan? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Website
D.9	Situs web perusahaan Company website	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:	
D.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulan terakhir) Financial statements/reports (latest quarterly)	Website
D.9.2	Materi yang diberikan dalam briefing kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Website
D.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Website
D.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Website
D.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Website
D.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Website
D.10	Hubungan investor Investor relations	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat / kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	41, 307

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Board Duties and Responsibilities	
	Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	225,245
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	226-227, 246-247
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	226-227, 246-247
	Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	50-51
E.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	226-227, 246-247
E.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	226-227, 246-247
E.2	Struktur Dewan Board structure	
	Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	311
E.2.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode etik? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	311
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	311
	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
E.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari direksi/komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	N/A

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun ¹ untuk direktur/komisaris independennya? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	N/A
E.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur / komisaris independen / non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	60-71, 223, 243
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan terbuka di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	60-71, 223, 243
	Komite Nominasi Nomination Committee	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	271-277
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	271-277
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	271-277
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola / piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	271-277
E.2.12	Apakah dalam rapat kehadiran Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	271-277
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	271-277
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	N/A
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/ commissioner?	271-277
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola / piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	271-277
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	271-277

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
	Komite Audit Audit Committee	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	260-270
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	N/A
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	260-270
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	260-270
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur / komisaris independen komite Memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	260-270
E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	260-270
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi atas penunjukan, dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	260-270
E.3	Proses Dewan Board Processes	
	Rapat Dewan dan Kehadiran Board meetings and attendance	
E.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	230-233, 248-249
E.3.2	Apakah direksi/komisaris mengadakan rapat minimal enam kali sepanjang tahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	230-233, 248-249
E.3.3	Apakah masing-masing direksi/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	230-233, 248-249
E.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	230-233, 248-249
E.3.5	Apakah direktur / komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya sekali sepanjang tahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	N/A
	Akses ke Informasi Access to information	
E.3.6	Apakah surat-surat dewan untuk rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	230-233, 248-249
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	279-284

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan terus mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	279-284
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Board Appointments and Re-Election	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	223-225, 244-245
E.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	223-225, 244-245
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terbuka di negara-negara yang undang-undangnya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun? 2 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years ² each? 2 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	223-225, 244-245
	Masalah Remunerasi Remuneration Matters	
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	237-238
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan kinerja berbasis Remunerasi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penyediaan claw back dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	N/A
	Audit Internal Internal Audit	
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	294-295
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	294-295
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	294-295
	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka kerja itu? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	294-295

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG mengungkapkan bahwa direksi/komisaris telah melakukan penelaahan terhadap kontrol material perusahaan (termasuk kontrol operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	294-295
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	294-295
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG memuat pernyataan dari direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem pengelolaan risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	294-295
E.4	Anggota Dewan People on the Board	
	Ketua Dewan Board Chairman	
E.4.1	Apakah orang yang berbeda mengambil peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	28-35,66
E.4.2	Apakah ketua dewan merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	N/A
E.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Perseroan saat ini memenuhi ketentuan ACGS ini. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada anggota Direktur yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur The Company currently complies with these ACGS regulations. In the last two years, no member of the Board of Directors has ever served as President Director.
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	247
	Direktur Independen Utama Lead Independent Director	
E.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditentukan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	N/A
	Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	N/A
E.5	Kinerja Dewan Board Performance	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
	Pengembangan Direksi Directors Development	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direksi/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	234
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	234
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses tentang bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	250
E.5.4	Apakah direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	N/A
	Penilaian Dewan Board Appraisal	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	N/A
	Penilaian Direktur Director Appraisal	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	N/A
	Penilaian Komite Committee Appraisal	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	254
	Bonus Bonus	
(B)A.	Hak Pemegang Saham Rights of shareholders	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mengizinkan penggunaan pemungutan suara elektronik yang Aman dan real time secara in absentia pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	208

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(B)B.	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham Equitable treatment of shareholders	
(B) B.1	Panggilan RUPST Notice of AGM	
(B)B.1.1	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan), seperti yang diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Website
(B)C.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana mengelola risiko dan peluang terkait iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/ Sustainability Reporting-nya terjamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG pemangku kepentingan? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola hal- hal keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara direktur eksekutif dan remunerasi manajemen senior dan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.7	Apakah Whistle Blowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	N/A
(B)D.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency	
(B)D.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
(B)D.1.1	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	N/A
(B)E.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(B) E.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Board Competencies and Diversity	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	N/A
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keragaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	N/A
(B) E.2	Struktur Dewan Board Structure	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/ commissioners?	N/A
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	N/A
(B) E.3	Pengangkatan Dewan dan Seleksi Ulang Board Appointments and Re-Election	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibentuk oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi / komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	223-224, 244
(B) E.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	N/A
(B) E.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewannya mengidentifikasi risiko utama sehubungan dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	308
(B) E.6	Kinerja Dewan Board Performance	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	N/A
	Penalti Penalty	
(P)A.	Hak Pemegang Saham Rights of shareholders	
(P)A.1	Hak Pemegang Saham Dasar Basic shareholder rights	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai menawarkan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	N/A

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	
(P)A.2.1	Apakah ada bukti hambatan yang mencegah pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lain? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Perseroan tidak mengatur mengenai adanya pembatasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi satu dengan lainnya The Company does not regulate any restrictions on shareholders communicating or consulting with each other.
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukan item agenda tambahan dan tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Pada RUPST tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat mata acara tambahan dan tidak terdapat mata acara yang tidak diumumkan. At the Annual GMS for the years 2022 and 2023, there were no additional agenda items and no unannounced agenda items.
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPST terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPST Perseroan tahun 2022 dan 2023 yang tertulis dalam Bab V bagian Rapat Umum Pemegang Saham All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were present at the Company's AGMS for the years 2022 and 2023, as documented in Chapter V, section on the General Meeting of Shareholders.
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
	Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham? Shareholders agreement?	Perseroan tidak memiliki perjanjian pemegang saham. The Company does not have a shareholders' agreement.

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)A.4.2	Pembatasan pemungutan Suara? Voting cap?	Perseroan tidak mengatur batas pemungutan suara. The Company does not regulate voting limits.
(P)A.4.3	Hak Pilih berganda? Multiple voting rights?	Perseroan tidak mengatur hak suara ganda. The Company does not regulate dual voting rights.
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	N/A
(P)B	Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Equitable treatment of shareholders	
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited	
(P)B.1.1	Apakah ada keyakinan perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	N/A
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan Protecting minority shareholders from abusive action	
(P)B.2.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	N/A
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan dengan <i>arm's length</i>) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	
(P)C	Peran Pemangku Kepentingan Role of stakeholders	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)C.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepaillitan/komersial/persaingan atau lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	N/A
(P)C.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)C.2.1	Apakah perusahaan menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang diperlukan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	N/A
(P)C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	N/A
(P)D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and transparency	
(P)D.1	Sanksi dari regulator atas laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports	
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Laporan Keuangan Financial Report I-IX
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat merugikan" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	N/A
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	N/A
(P)D.1.4	Apakah perusahaan pada tahun lalu merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	
(P)E	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap aturan daftar, regulasi, dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	
(P)E.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan belum mematuhi aturan pencatatan dan peraturan selain dari aturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	N/A
(P)E.1.2	Apakah ada contoh di mana direktur/komisaris non-eksekutif telah mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	N/A

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)E.2	Struktur Dewan Board structure	
(P)E.2.1	Apakah Perseroan memiliki direktur/komisaris independen yang masing-masing menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	N/A
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	N/A
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris yang menjabat secara keseluruhan di lebih dari lima dewan perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	N/A
(P)E.3	Audit Eksternal External Audit	
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	N/A
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board structure and composition	
(P)E.4.1	Apakah ketua telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	N/A
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, pembagian kinerja atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	N/A

note:

SR: Sustainability Report / Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2023

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL
STATEMENT



06

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2023
and for the year then ended
with independent auditor's report*

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9-151	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :		We, the undersigned below:	
1. Nama	Ferdinandus Aming Santoso	Name	
Alamat kantor	Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia	Office address	
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Karet Belakang No. 55, RT.002/RW.007, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID	
Nomor telepon Jabatan	021 - 2358 5500 Direktur Utama/President Director	Telephone number Title	
2. Nama	Stephen Duffus Weiss	Name	
Alamat kantor	Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia	Office address	
Alamat domisili atau sesuai KTP atau kartu identitas lain	Jl. Galuh I No. 28, RT 002/RW 002, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID or other Identity Card	
Nomor telepon Jabatan	021 - 2358 5500 Wakil Direktur Utama/ Vice President Director	Telephone number Title	

menyatakan bahwa: declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya; | 1. We are responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan dan entitas anaknya. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement is made truthfully.

28 Maret / March 28, 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama/President Director



Stephen Duffus Weiss
Wakil Direktur Utama/Vice President Director



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-2/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-2/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Uji penurunan nilai goodwill

Penjelasan atas hal audit utama:

Sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 2t dan 9 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, goodwill atas akuisisi beberapa entitas anak diuji penurunan nilainya setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Uji penurunan nilai goodwill ini adalah hal audit utama bagi audit kami karena saldo goodwill sebesar Rp15,5 triliun adalah material bagi laporan keuangan konsolidasian dan estimasi jumlah terpulihkan unit penghasil kas ("UPK") yang kedalamnya goodwill tersebut dialokasikan memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan manajemen, seperti seleksi entitas pembanding, estimasi proyeksi arus kas masa depan yang menggunakan asumsi operasional utama seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, proyeksi pendapatan dan biaya operasional, serta penentuan asumsi makroekonomi utama seperti tingkat pertumbuhan jangka panjang setelah periode cakupan proyeksi, dan tingkat diskonto. Manajemen melakukan uji penurunan nilai goodwill dengan membandingkan nilai terpulihkan UPK tersebut dengan nilai tercatatnya.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Key audit matters (continued)

Impairment test of goodwill

Description of the key audit matter:

As described in Notes 2t and 9 to the accompanying consolidated financial statements, goodwill arising from acquisitions of several subsidiaries is to be tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Such impairment test of goodwill is a key audit matter to us because goodwill balance of Rp15.5 trillion is material to the consolidated financial statements and estimation of the recoverable amount of the cash generating unit ("CGU") into which the goodwill was allocated required significant management judgment and estimation, such as selecting comparable entities, estimating future cash flow projection using key operational assumptions such as revenue growth rate, forecast revenues and operating costs, and setting key macroeconomic assumptions, such as long-term growth rate after the forecast period, and discount rate. Management performed the impairment test of goodwill by comparing the recoverable amount of the CGU with its carrying amount.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Uji penurunan nilai *goodwill* (lanjutan)

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan pengendalian utama atas proses uji penurunan nilai *goodwill*. Kami mengevaluasi kelayakan asumsi utama yang digunakan dalam estimasi jumlah terpulihkan masing-masing UPK, yaitu asumsi utama tersebut di atas, dengan membandingkan similaritas entitas pembanding dengan bisnis dari UPK, membandingkan asumsi operasional utama ke sumber data yang dapat diakses publik dan data dan catatan keuangan Grup, dan asumsi makroekonomi utama tersebut di atas, termasuk metodologi dan model keuangan yang digunakan, dengan dibantu oleh pakar auditor kami dengan membandingkannya ke sumber data yang dapat diakses publik serta menguji akurasi matematis model keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam estimasi tersebut. Kami juga mengevaluasi konsistensi antara pos-pos yang tercakup dalam nilai tercatat dari UPK dengan nilai terpulihkannya dan juga kesesuaian uji penurunan nilai yang dibuat oleh manajemen dengan standar akuntansi terkait serta juga pengungkapan terkait atas *goodwill* pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Key audit matters (continued)

Impairment test of goodwill (continued)

Audit response:

We evaluated and assessed the design of the key controls over the goodwill impairment assessment process. We evaluated the reasonableness of the key assumptions used in estimating the recoverable amounts of each CGU, namely the above-mentioned key assumptions, by comparing the similarity of business of the comparable entities to that of the CGU, by comparing key operational assumptions to publicly available data sources and the Group financial data and records, and the above-mentioned key macroeconomic assumptions, including the methodologies and financial models used, with assistance from our auditor's expert by comparing them with data sources accessible to public as well as evaluated mathematical accuracy of the financial model used by the management. We also evaluated the consistency between the items included in the CGU's carrying amount and its recoverable amount and also the impairment test made by the management and the related disclosures regarding goodwill in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report 2023 (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan
mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

*Report No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on
Auditing established by the IICPA, we exercise
professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
(continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00450/2.1032/AU.1/10/0702-
2/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Widya Arijanti

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0702/Public Accountant Registration No. AP.0702

28 Maret 2024/March 28, 2024



**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	404.942	2d,2e,2k,2q,4 37,39	285.187	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	122	2e,2q,5	16	Restricted cash in bank
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	3.074.300	2k,2q,6,39	2.555.574	Third parties
Pihak berelasi	12.034	2d,2q,6,37	2.230	Related parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	58.757	2q	56.620	Third parties
Pihak berelasi	207	2d,2q,37	2.661	Related parties
Persediaan	14.572	2g	-	Inventories
Beban dibayar dimuka				Prepaid expenses - current
- jangka pendek	229.043	2l,2v,7	236.287	Prepaid taxes
Pajak dibayar dimuka	477.617	2m,21a	407.427	Advances
Uang muka	41.242	2q	47.242	Investment in financial instruments - current
Investasi instrumen keuangan		2k,2q		Derivative receivables - current
- jangka pendek	35.568	12,39	34.067	
Piutang derivatif - jangka pendek	52.881	35,39	-	
TOTAL ASET LANCAR	4.401.285		3.627.311	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	40.385.074	2h,2i,8	37.152.092	Fixed assets
Goodwill	15.508.533	2c,2i,2t,9	15.421.546	Goodwill
Beban dibayar dimuka				Prepaid expenses - non-current
- jangka panjang	183.620	2v,7	290.838	Intangible assets
Aset takberwujud	990.800	2c,2i,2u,10	1.100.637	Right-of-use assets
Aset hak-guna	5.121.186	2f,11	6.113.351	Investment in financial instruments - non-current
Investasi instrumen keuangan				Investment's
- jangka panjang	-	2k,2q,12,39	506.502	Derivative receivables - non-current
Investasi	494.088	2r,13	-	Deferred tax assets, net
Piutang derivatif - jangka panjang	157.051	35,39	286.484	
Aset pajak tangguhan, neto	6.645	2m,21e,21f	4.527	Other non-current assets
		2d,2m,2q		
Aset tidak lancar lainnya	1.144.393	14,37,39,46	1.097.560	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	63.991.390		61.973.537	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	68.392.675		65.600.848	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya Pihak ketiga	1.100.227	2k,2q,15,39 2d,2k,2q	839.297	Tower construction and other trade payables Third parties
Pihak berelasi	106.204	15,37,39	-	Related parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	103.534	2k,2q,39	23.154	Third parties
Pihak berelasi	34.624	2d,2q,37,39	-	Related parties
Akrual	1.461.393	2k,2q,16,39	1.539.192	Accruals
Utang bagian jangka pendek atas:				Current maturities of:
Utang sewa	265.310	2k,2q,17,39	386.972	Lease liabilities
Utang bank				Bank loans
Pihak ketiga	10.875.657	2k,2q,18,39	6.776.683	Third parties
Pihak berelasi	196.500	2d,2q,18,37	1.285.965	Related party
Utang obligasi	7.252.204	2k,2q,19,39	1.113.932	Bonds payable
Utang pajak	179.204	2m,21b	152.823	Taxes payable
Pendapatan ditangguhkan	2.457.037	2d,2l,23,37	2.148.996	Unearned revenue
Pinjaman pihak berelasi	54.500	37	-	Related parties loan
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	169.909	2j 2k,2o,2q	156.165	Short-term employee benefits liability, net
Utang derivatif - jangka pendek	21.922	35,39	-	Derivative payables - current
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.278.225		14.423.179	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Utang sewa	180.108	2k,2q,17,39	1.590.585	Lease liabilities
Utang bank				Bank loans
Pihak ketiga	18.455.327	2k,2q,18,39	22.309.314	Third parties
Pihak berelasi	6.370.483	2d,2q,18,37	6.952.269	Related party
Utang obligasi	1.317.513	2k,2q,19,39	4.556.448	Bonds payable
Provisi jangka panjang	314.014	2s,20	273.246	Long-term provision
Liabilitas pajak tangguhan, neto	841.962	2m,21e,21f	944.030	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	76.518	2j,22	46.098	Long-term employee benefits liability, net
Pendapatan ditangguhkan	30.372	2d,2l,23,37 2k,2o,2q	35.301	Unearned revenue
Utang derivatif - jangka panjang	22.032	35,39	39.427	Derivative payables - non-current
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	27.608.329		36.746.718	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	51.886.554		51.169.897	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2023 (Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to the owners of the parent entity</i>
Modal saham				<i>Share capital</i>
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham				<i>Par value - Rp100 (full amount) per share</i>
Modal dasar				<i>Authorized</i>
- 10.000.000.000 saham				<i>- 10,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.322.620.187 saham	332.262	25	332.262	<i>Issued and fully paid</i>
Tambahan modal disetor	89.324		64.904	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya	1.000	27	900	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	15.950.569		13.901.524	<i>Unappropriated</i>
Penghasilan komprehensif lain	77.686	26	99.587	<i>Other comprehensive income</i>
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	16.450.841		14.399.177	<i>Total equity attributable to the owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	55.280	24	31.774	<i>Non-controlling interests</i>
TOTAL EKUITAS	16.506.121		14.430.951	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	68.392.675		65.600.848	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,			PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2023 (Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan	11.740.345	2d,2l 28,37	11.035.650	Revenues
Depresiasi dan amortisasi	(2.842.515)	2d,2h,2l,8 10,11,29,37	(2.305.982)	<i>Depreciation and amortization</i>
Beban pokok pendapatan lainnya	(684.486)	2l,30	(607.770)	<i>Other cost of revenues</i>
Beban pokok pendapatan	(3.527.001)		(2.913.752)	Cost of revenues
Laba bruto	8.213.344		8.121.898	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran	(238.108)	2l,31	(168.763)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(817.968)	2d,2l,32,37	(711.927)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban usaha lainnya, neto	(194.711)	2d,2l,34,37	(382.132)	<i>Other operating expenses, net</i>
Laba usaha	6.962.557		6.859.076	Operating profit
Penghasilan keuangan, bruto	25.624		29.249	<i>Finance income, gross</i>
Pajak final atas penghasilan keuangan	(5.125)	2m,21d	(5.850)	<i>Final tax on finance income</i>
Penghasilan keuangan, neto	20.499	2d,37	23.399	<i>Finance income, net</i>
Biaya keuangan, neto	(2.858.027)	2d,33,37	(2.391.801)	<i>Finance cost, net</i>
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	4.125.029		4.490.674	Profit before final tax and corporate income tax expense
Beban pajak final	(557.918)	2m,21b	(511.220)	<i>Final tax expense</i>
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.567.111		3.979.454	Profit before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(242.234)	2m,21c,21d	(451.496)	<i>Corporate income tax expense</i>
Laba tahun berjalan	3.324.877		3.527.958	Profit for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	Catatan/ Notes	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			Other comprehensive income (loss)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial, setelah pajak	6.086		Actuarial gain (loss), net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that may be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(31.157)		Net gain (loss) on cash flow hedge
Keuntungan (kerugian) dari investasi	2.219		Gain (loss) on investment
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	(22.852)		Total other comprehensive income (loss)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.302.025		Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	3.274.332	42	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	50.545	24	Non-controlling interests
	3.324.877		3.527.958
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	3.252.431		Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	49.594	24	Non-controlling interests
	3.302.025		3.614.727
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	985	2p,42	Earnings per share (full amount)
			1.045

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity									
	Pembelian (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)					Pembelian (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)				
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Share capital and fully paid share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Cadangan umum/ Appropriated for general reserve	Saldo laba/ Retained earnings	Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai/ Net gain (loss) on cash flow hedge	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gains (losses)	Keuntungan (kerugian) dari investasi/ Gain (loss) on investment	Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity
Saldo 31 Desember 2021	332.262	23.912	800	11.651.398	(14.601)	12.896	15.360	12.022.027	31.027	12.053.054
Tambahan setoran modal	-	40.962	-	-	-	-	-	40.962	-	40.962
Laba tahun berjalan	-	-	-	3.473.448	-	-	-	3.473.448	54.510	3.527.958
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	-	(1.223.222)	110.044	(6.547)	(17.565)	85.932	837	86.769
Dividen tunai	-	-	-	(100)	-	-	-	(1.223.222)	-	(1.223.222)
Pembentukan cadangan wajib	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(54.600)	(54.600)
Saldo 31 Desember 2022	332.262	64.904	900	13.901.524	95.443	6.349	(2.205)	14.399.177	31.774	14.430.951
Tambahan setoran modal	-	24.420	-	-	-	-	-	24.420	3.007	27.427
Laba tahun berjalan	-	-	-	3.274.332	-	-	-	3.274.332	50.545	3.324.877
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	-	(1.225.167)	(30.658)	6.538	2.219	(21.901)	(951)	(22.852)
Dividen tunai	-	-	-	(100)	-	-	-	(1.225.167)	-	(1.225.167)
Pembentukan cadangan wajib	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.500)	(28.500)
Kepentingan nonpengendali dari akuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-	(595)	(595)
Saldo 31 Desember 2023	332.262	89.324	1.000	15.950.569	64.785	12.887	14	16.450.841	58.280	16.509.121

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,			
2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	12.987.836	11.616.966	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.588.820)	(1.232.358)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(924.995)	(815.622)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	10.474.021	9.568.986	Cash flows from operations
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(1.695.885)	(1.566.804)	Income taxes and other taxes paid
Pengembalian pajak	131.222	51.446	Tax refund
Penghasilan bunga yang diterima	16.326	22.914	Interest received
Pencairan (penempatan) dari bank yang dibatasi penggunaannya	(107)	1.965	Released (placement) of restricted cash in banks
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	13.378	23.470	Collection of other receivables from a related party
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	8.938.955	8.101.977	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pengembalian investasi jangka panjang	493.632	-	Repayment on long-term investment
Hasil pelepasan aset tetap	9.092	4.306	Proceeds from disposal of fixed assets
Pembayaran untuk pembelian aset tetap dan uang muka untuk supplier	(4.563.727)	(4.681.060)	Payments for acquisition of fixed assets and advance for suppliers
Penempatan pada investasi ventura bersama	(249.031)	-	Placement on investment in joint venture
Penempatan pada investasi asosiasi	(194.125)	-	Placement on investment in associate
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurangi kas dan bank yang diperoleh	(42.701)	(1.139.222)	Payments for business acquisition net off cash on hand and in banks acquired
Penempatan pada convertible loan notes	-	(31.887)	Placement on convertible loan parties
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	(40.000)	Other receivables – third party
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.546.860)	(5.887.863)	Net cash flows used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,			
2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang bank	42.250.068	18,40	38.047.314
Pembayaran utang bank	(43.649.866)	18,40	(39.926.945)
Pembayaran bunga utang	(2.283.563)		(1.873.184)
Pembayaran biaya pinjaman	(50.816)		(68.673)
Pembayaran dividen			
Pemilik entitas induk	(1.225.187)	27	(1.223.222)
Kepentingan nonpengendali	(28.500)	24,27	(54.600)
Penerimaan dari penerbitan obligasi	4.000.000		1.000.000
Pembayaran utang obligasi	(1.215.049)		(1.011.750)
Pembayaran bunga obligasi	(356.860)		(292.152)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(11.682)		(1.997)
Pembayaran utang sewa	(1.674.830)	17,40	(1.301.789)
Pembayaran premi call spread	(14.899)		(23.776)
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	(9.723)		-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.270.907)		(6.730.774)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS			
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(1.433)		84.862
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	285.187		4.716.985
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	404.942	4	285.187
Informasi mengenai transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 43.			Information on non-cash transactions is presented in Note 43.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the year then ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan kedudukan dan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0080656.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621 tanggal 2 Desember 2020.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usahanya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*. Perseroan memulai kegiatannya pada tanggal 4 Juni 2003.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Entitas induk dari Perseroan adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

1. GENERAL**a. Establishment and General Information**

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095. The Company's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of establishment have been amended several times. The latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 198 dated November 30, 2020, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of the the Company's domicile and adjustment of the Company's business activities. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights under Letter of Approval on Amendment to Articles of Association No. AHU-0080656.AH.01.01. TAHUN 2020 dated December 2, 2020 and was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0414621 dated December 2, 2020.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involves in central telecommunication construction and holding company activities. The Company started its commercial operations on June 4, 2003.

The Company's head office is located at Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 53rd and 55th floors, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's parent company is PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Ario Wibisono	President Commissioner
Komisaris	Kenny Harjo	Commissioner
Komisaris Independen	Kusmayanto Kadiman	Independent Commissioner
Direktur Utama	Ferdinandus Aming Santoso	President Director
Wakil Direktur Utama	Adam Gifari	Vice President Director
Wakil Direktur Utama	Stephen Duffus Weiss	Vice President Director
Direktur	Indra Gunawan	Director
Direktur	Eko Santoso Hadiprodjo	Director
Direktur	Anita Anwar	Director

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2014. Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua	Kusmayanto Kadiman	Chairman
Anggota	Myrnje Zachraini Tamin	Member
Anggota	Herwan Ng	Member

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017, Dewan Komisaris memutuskan pengangkatan Haryo Dewanto sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 1.745 karyawan tetap dan 753 karyawan kontrak (31 Desember 2022: 1.477 karyawan tetap dan 563 karyawan kontrak) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)**b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022 was as follows:

	Ario Wibisono	President Commissioner
	Kenny Harjo	Commissioner
	Kusmayanto Kadiman	Independent Commissioner
	Ferdinandus Aming Santoso	President Director
	Adam Gifari	Vice President Director
	Stephen Duffus Weiss	Vice President Director
	Indra Gunawan	Director
	Eko Santoso Hadiprodjo	Director
	Anita Anwar	Director

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022 was based on Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 70 dated July 14, 2021, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

The Company's Audit Committee was established on February 28, 2014. The compositions of the Audit Committee as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	Kusmayanto Kadiman	Chairman
	Myrnje Zachraini Tamin	Member
	Herwan Ng	Member

Based on the Board of Commissioners' Resolution dated August 22, 2017, the Board of Commissioners approved the appointment of Haryo Dewanto as the Head of Internal Audit Department.

As of December 31, 2023, the Company and its subsidiaries employed 1,745 permanent employees and 753 contract employees (December 31, 2022: 1,477 permanent employees and 563 contract employees) (unaudited).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas anak dan asosiasi/ Subsidiaries and associates	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") - 99,99% dimiliki oleh Perseroan/ 99,99% owned by the Company	Kudus	- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade - Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction - Instalasi telekomunikasi/ Telecommunication installation - Jasa sistem komunikasi data/ System communication data services - Aktivitas telekomunikasi dengan kabel/ Wired telecommunications activities - Penyediaan layanan internet/ Internet Service Provider - Jasa interkoneksi internet (NAP)/ Internet interconnection services (NAP) - Aktivitas telekomunikasi satelit/ Satellite telecommunications activities	99,99%	99,99%	2001	13.173.512	9.989.429
PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") - 99,96% dimiliki oleh Perseroan/ 99,96% owned by the Company	Kudus	- Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction - Aktivitas telekomunikasi dengan kabel/ Telecommunication with cable activities - Aktivitas perusahaan holding/ Holding company activities - Real estat yang dimiliki sendiri atau disewal/ Owned or rental real estate - Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade	99,96%	99,96%	27 September/ September 27, 2006	9.972.852	9.687.126
PT Komet Infra Nusantara ("KIN") - 99,99% dimiliki oleh Perseroan/ 99,99% owned by the Company	Kudus	- Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	99,99%	99,99%	25 Februari/ February 25, 2009	1.241.793	1.362.704
PT Istana Kohinoor ("Kohinoor") - 51,00% dimiliki oleh Perseroan/ 51,00% owned by the Company	Bandung	- Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	51,00%	51,00%	23 Juni/ June 23, 2011	46.603	42.257
Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership							
PT Iforte Global Internet ("IGI") - 99,998% dimiliki oleh Iforte/ 99,998% owned by Iforte - 0,002% dimiliki oleh Perseroan/ 0,002% owned by the Company	Kudus	- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ Major telecommunications equipment trade - Penyediaan layanan internet/ Internet Service Provider	100,00%	100,00%	1 Januari/ January 1, 2002	174.381	212.549
PT Rekayasa Akses ("REJA") - 75,00% dimiliki oleh BWA/ 75,00% owned by BWA	Kudus	- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunications Equipment Trade - Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewal/ Owned Or Rental Real Estate - Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities - Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading Of A Great Variety Of Goods - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities - Jasa Sistem Komunikasi Data/ Data Communication System Services - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel/ Cable-Free Telecommunication Activities - Penyedia Layanan Internet/ Internet Service Provider	75,00%	75,00%	24 Juni/ June 24, 2003	7.471	8.466

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Entitas anak dan asosiasi/ Subsidiaries and associates	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership (lanjutan/ continued)							
PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI") - 69,77% dimiliki oleh Iforte/ 69,77% owned by Iforte	Jakarta	- Aktivitas Hosting/ Hosting and Related Activities - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya/ Other Computer Programming Activities - Penyedia Jasa Pembayaran/ Payment Service Providers	69,77%	-	2005	103.819	-
PT Sarana Inti Persada ("SIP") - 99,87% dimiliki oleh STP/ 99,87% owned by STP - 0,13% dimiliki oleh BIT/ 0,13% owned by BIT	Kudus	- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunications Equipment Trade - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ Telecommunication With Cable Activities - Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewal/ Owned or Rental Real Estate - Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities - Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading of a Great Variety of Goods	99,96%	99,96%	6 Januari/ January 6, 2005	116.182	118.935
PT Bit Teknologi Nusantara ("BIT") - 99,9999% dimiliki oleh Gema/ 99,9999% owned by PT Gema - 0,0001% dimiliki oleh Platinum/ 0,0001% owned by Platinum	Kudus	- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Major Telecommunication Equipment Trade - Penyedia Layanan Internet/ Internet Service Provider - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel/ Telecommunication with Cable Activities - Jasa Sistem Komunikasi Data/ Data Communication System Services - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi/ Telecommunication Resale Services - Aktivitas Perusahaan Holding/ Holding Company Activities - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ Trading of a Great Variety of Goods - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewal/ Owned or Rental Real Estate - Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction - Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ Other Management Consultation Activities - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)/ Internet Interconnection Services (NAP)	100,00%	100,00%	22 Maret/ March 22, 2005	2.889.554	2.615.650
PT Varnion Technology Semesta ("VTS") - 60,00% dimiliki oleh Iforte/ 60,00% owned by Iforte	Jakarta	- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer/ Wholesale Computer and Computer Equipment Trade - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya/ Retail Computer and Computer Equipment - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel/ Telecommunication with Cable Activities - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel/ Cable-Free Telecommunication Activities - Penyedia Layanan Internet/ Internet Service Provider	60,00%	-	21 Februari/ February 21, 2007	15.802	-
PT Darmanusa Tritunggal ("DNT") - 99,99% dimiliki oleh KIN/ 99,99% owned by KIN - 0,01% dimiliki oleh Perseroan/ 0,01% owned by the Company	Bandung	- Konstruksi sentral telekomunikasi/ Central telecommunication construction	100,00%	100,00%	26 November/ November 26, 2007	31.839	44.035
PT Global Telekomunikasi Prima ("GTP") - 98,212% dimiliki oleh Iforte/ 98,212% owned by Iforte - 1,787% dimiliki oleh Perseroan/ 1,787% owned by the Company - 0,001% dimiliki oleh KIN/ 0,001% owned by KIN	Kudus	- Reparasi peralatan komunikasi/ Reparation of the telecommunication equipment	100,00%	100,00%	7 April/ April 7, 2009	266.669	2.352

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Entitas anak dan asosiasi/ Subsidiaries and associates	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership (lanjutan/ continued)							
PT Quattro International ("QTR")	Bandung	- Konstruksi sentral komunikasi/ <i>Central telecommunication construction</i> - Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ <i>Major telecommunications equipment trade</i>	100,00%	100,00%	27 April/ <i>April 27, 2009</i>	323.939	338.040
- 99,99% dimiliki oleh Iforte/ <i>99.99% owned by Iforte</i> - 0,01% dimiliki oleh Perseroan/ <i>0.01% owned by the Company</i>							
PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK")	Kudus	- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ <i>Major Trading Telecommunication Equipment</i> - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ <i>Other Management Consultation Activities</i>	99,96%	99,96%	25 Februari/ <i>February 25, 2010</i>	89.100	84.765
- 99,99% dimiliki oleh STP/ <i>99.99% owned by STP</i> - 0,01% dimiliki oleh Perseroan/ <i>0.01% owned by the Company</i>							
Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	- Jasa Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Services</i>	70,00%	70,00%	1 Januari/ <i>January 1, 2019</i>	321.202	501.514
- 70,00% dimiliki oleh Iforte dan IGI/ <i>70.00% owned by Iforte and IGI</i>							
PT Protelindo Permata ("PMP")	Bandung	- Konstruksi sentral komunikasi/ <i>Central telecommunication construction</i>	51,01%	51,01%	22 Agustus/ <i>August 22, 2019</i>	6.050	7.329
- 99,98% dimiliki oleh Kohinoor/ <i>99.98% owned by Kohinoor</i> - 0,02% dimiliki oleh Perseroan/ <i>0.02% owned by the Company</i>							
PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") ^(*)	Kudus	- Instalasi Listrik/ <i>Electrical Installation</i> - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya/ <i>Other Electrical Power Support Activities</i> - Perdagangan besar mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya/ <i>Wholesale Trade of Machines, Equipment and Other Industrial Equipment</i> - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hal Opsi Mesin dan Peralatan Industri/ <i>Activities of Rental and Leasing Without Option Rights of Industrial Machines and Equipment</i> - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan/ <i>Activities of Rental and Leasing Without Option Rights of Processing Industry Machines and Equipment</i> - Pembangkitan Tenaga Listrik/ <i>Electrical Power Generation</i> - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik/ <i>Operation of Electrical Power Supply Installation</i> - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik/ <i>Operation of Electrical Power Utilization Installation</i>	100,00%	-	-	24.469	-
- 99,89% dimiliki oleh Iforte/ <i>99.89% owned by Iforte</i> - 0,11% dimiliki oleh Perseroan/ <i>0.11% owned by the Company</i>							
PT Broadband Wahana Asia ("BWA")	Jakarta	- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ <i>Major Telecommunications Equipment Trade</i> - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel/ <i>Telecommunication with Cable Activities</i> - Aktivitas Perusahaan Holding/ <i>Holding Company Activities</i> - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewai/ <i>Owned or Rental Real Estate</i> - Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ <i>Central Telecommunication Construction</i> - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ <i>Other Management Consultation Activities</i> - Instalasi Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Installation</i> - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ <i>Trading of a Great Variety of Goods</i>	100,00%	100,00%	Tidak beroperasi/ <i>Not operating</i>	8.924	8.924
- 99,99% dimiliki oleh Platinum/ <i>99.99% owned by Platinum</i> - 0,01% dimiliki oleh STP/ <i>0.01% owned by STP</i>							

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Entitas anak dan asosiasi/ Subsidiaries and associates	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pemilikan tidak langsung/ Indirect ownership (lanjutan/ continued)							
PT Gema Dwimitra Persada ("Gema")	Jakarta	- Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ <i>Central Telecommunication Construction</i> - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel/ <i>Telecommunication with Cable Activities</i> - Aktivitas Perusahaan Holding/ <i>Holding Company Activities</i> - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewai/ <i>Owned or Rental Real Estate</i> - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ <i>Major Telecommunication Equipment Trade</i> - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ <i>Other Management Consultation Activities</i> - Instalasi Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Installation</i> - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ <i>Trading of a Great Variety of Goods</i>	100,00%	100,00%	Tidak beroperasi/ <i>Not operating</i>	793.853	793.853
- 99,99% dimiliki oleh Platinum/ <i>99.99% owned by Platinum</i> - 0,01% dimiliki oleh SIP/ <i>0.01% owned by SIP</i>							
PT Platinum Teknologi ("Platinum")	Jakarta	- Konstruksi Sentral telekomunikasi/ <i>Central Telecommunication Construction</i> - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel/ <i>Telecommunication With Cable Activities</i> - Aktivitas Perusahaan Holding/ <i>Holding Company Activities</i> - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewai/ <i>Owned or Rental Real Estate</i> - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ <i>Major Telecommunications Equipment Trade</i> - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ <i>Other Management Consultation Activities</i> - Instalasi Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Installation</i> - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang/ <i>Trading of a Great Variety of Goods</i>	100,00%	100,00%	Tidak beroperasi/ <i>Not operating</i>	801.457	801.457
- 76,35% dimiliki oleh Iforte/ <i>76.35% owned by Iforte</i> - 23,65% dimiliki oleh KIN/ <i>23.65% owned by KIN</i>							

(*) PT Helios Energi Nusantara ("HEN") melakukan perubahan nama menjadi PT Iforte Energi Nusantara ("IEN")/ *PT Helios Energi Nusantara ("HEN") changed its name to PT Iforte Energi Nusantara ("IEN").*

Akuisisi GIK

Pada tanggal 11 Februari 2022, Perseroan dan entitas anaknya mengakuisisi 100% saham GIK, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan peralatan telekomunikasi dan konsultasi manajemen lainnya. Atas akuisisi ini, STP memperoleh pengendalian atas GIK.

Akibat akuisisi tersebut, Grup diharapkan dapat meningkatkan cakupan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Grup kepada pelanggan.

Acquisition of GIK

On February 11, 2022, the Company and subsidiaries acquired 100% of the share capital of GIK, a trading telecommunication equipment and management consultation activities. From the acquisition, STP obtained control of GIK.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase the range of products and services offered by the Group to customers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Akuisisi GIK (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas GIK yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ Fair value recognized on acquisition
Aset	
Aset lancar	4.665
Aset tidak lancar	24.686
Aset tetap	86.563
Total aset	115.914
Liabilitas	36.353
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	79.561
Goodwill yang timbul dari akuisisi	797
Hubungan pelanggan (Catatan 10)	10.390
Biaya imbalan yang dialihkan	90.748
Dikurangi kas dan bank	(2.458)
Dikurangi utang lain-lain	(5.020)
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurang kas dan bank yang diperoleh	83.270

Akuisisi VTS

Pada tanggal 23 Mei 2023, Grup mengakuisisi 60% saham VTS, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan aktivitas telekomunikasi. Atas akuisisi ini, lforte memperoleh pengendalian atas VTS.

Akibat akuisisi tersebut, Grup diharapkan dapat meningkatkan cakupan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Grup kepada pelanggan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of GIK (continued)

The fair value of the identifiable assets and liabilities of GIK as follows:

	Assets
	Current assets
	Non-current assets
	Fixed assets
Total assets	Total assets
Liabilities	Liabilities
Net identifiable assets at fair value	Net identifiable assets at fair value
Goodwill arising from acquisition	Goodwill arising from acquisition
Customer relationships (Note 10)	Customer relationships (Note 10)
Purchase price consideration transferred	Purchase price consideration transferred
Less cash on hand and in banks	Less cash on hand and in banks
Less other payables	Less other payables
Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired	Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired

Acquisition of VTS

On May 23, 2023, the Group acquired 60% of the share capital of VTS, a trading and telecommunication activities. From the acquisition, lforte obtained control of VTS.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase the range of products and services offered by the Group to customers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Akuisisi VTS (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas VTS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut (Laporan penilai independen belum selesai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan):

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ Fair value recognized on acquisition
Aset	
Aset lancar	8.392
Aset tidak lancar	304
Aset tetap	3.990
Total aset	12.686
Total liabilitas	(12.683)
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	3
Nilai wajar kepentingan non-pengendali	(11.763)
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 9)	43.865
Nama dagang (Catatan 10)	29.405
Pertimbangan harga pembelian	61.510
Dikurangi kas dan bank	(4.129)
Dikurangi utang lain-lain	(18.630)
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurang kas dan bank yang diperoleh	38.751

Akuisisi IPI

Pada tanggal 27 Juli 2023, Grup mengakuisisi 47,59% saham PT MCP Indo Utama ("MCP"). Kemudian, pada tanggal 26 September 2023, Grup menambah kepemilikan menjadi 62,47%, dan pada tanggal 28 Desember 2023 Grup menambah kepemilikan menjadi 69,77% pada saham MCP, dan mengganti nama menjadi PT lforte Payment Infrastructure ("IPI"), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang aktivitas hosting, pemrograman dan penyedia jasa pembayaran. Atas akuisisi ini, lforte memperoleh pengendalian atas IPI.

Akibat akuisisi tersebut, Grup diharapkan dapat meningkatkan cakupan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Grup kepada pelanggan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of VTS (continued)

The fair value of the identifiable assets and liabilities of VTS is as follows (Independent Valuer report has not been completed at the date of issuance of these consolidated financial statements):

	Assets
	Current assets
	Non-current assets
	Fixed assets
Total assets	Total assets
Total liabilities	Total liabilities
Total identifiable net assets at fair value	Total identifiable net assets at fair value
Fair value of non-controlling interests	Fair value of non-controlling interests
Goodwill arising from acquisition (Note 9)	Goodwill arising from acquisition (Note 9)
Trademark (Note 10)	Trademark (Note 10)
Purchase consideration	Purchase consideration
Less cash on hand and in banks	Less cash on hand and in banks
Less other payables	Less other payables
Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired	Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired

Acquisition of IPI

On July 27, 2023 the Group acquired 47,59% of the share capital of PT MCP Indo Utama ("MCP"). On September 26, 2023, the Group increases its ownership to 62.47%, and on December 28, 2023, the Group increases its ownership to 69.77% of the share capital of MCP, and changed the name to PT lforte Payment Infrastructure ("IPI"), a hosting, programing activities and payment service providers. From the acquisition, lforte obtained control of IPI.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase the range of products and services offered by the Group to customers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Akuisisi IPI (lanjutan)

Nilai wajar provisional aset dan liabilitas provisional IPI yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut (Laporan penilai independen belum selesai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan):

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ Fair value recognized on acquisition
Aset	
Aset lancar	92.950
Aset tidak lancar	2.747
Aset tetap	1.339
Total aset	97.036
Total liabilitas	(129.962)
Jumlah liabilitas neto teridentifikasi pada nilai wajar	(32.926)
Nilai wajar kepentingan non-pengendali Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 9)	12.357 73.122
Pertimbangan harga pembelian	52.553
Dikurangi kas dan bank	(48.602)
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurang kas dan bank yang diperoleh	3.951

d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of IPI (continued)

The provisional fair value of the identifiable assets and liabilities of IPI is as follows (Independent Valuer report has not been completed at the date of issuance of these consolidated financial statements):

	Assets
	Current assets
	Non-current assets
	Fixed assets
Total aset	Total assets
Total liabilitas	Total liabilities
Total liabilitas neto teridentifikasi pada nilai wajar	Total identifiable net liabilities at fair value
Nilai wajar kepentingan non-pengendali Goodwill arising from acquisition (Note 9)	Fair value of non-controlling interests Goodwill arising from acquisition (Note 9)
Pertimbangan harga pembelian	Purchase consideration
Dikurangi kas dan bank	Less cash on hand and in banks
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurang kas dan bank yang diperoleh	Payments for business acquisition, net off cash on hand and banks acquired

d. Completion of the consolidated financial statements

The management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 28, 2024.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kebijakan akuntansi yang diterapkan konsisten, kecuali dinyatakan lain, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perseroan dan entitas anaknya telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Perseroan dan entitas anaknya akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada setiap entitas anak Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Perseroan dan entitas anaknya beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

The accounting policies were applied consistently, unless otherwise stated, in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2023 and 2022 and for the years ended.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statements of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The Company and its subsidiaries have prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

Items included in the consolidated financial statements of each of the Company's subsidiaries are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company and its subsidiaries operate (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pertama kali seluruh standar yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini tidak memiliki dampak material pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap - tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

Changes in accounting policies

The Company and its subsidiaries adopted all revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that do not have any material impact to the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - regarding disclosure of accounting policies.

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendment had an impact on the Company's and its subsidiaries' disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Company's and its subsidiaries' financial statements.

Amendment of PSAK No. 16: Fixed Assets - regarding proceeds before intended use.

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of Company's and its subsidiaries as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan - tentang definisi estimasi akuntansi.

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

Changes in accounting policies (continued)

Amendment of PSAK No. 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors - regarding the definition of accounting estimates.

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua**

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak memiliki penghasilan dari yurisdiksi luar negeri.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

Changes in accounting policies (continued)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules**

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and include:

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries's consolidated financial statements as the Company and its subsidiaries do not have income from foreign jurisdictions.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan investee jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain dari investee;
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan.

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),*
- *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;*
- *Rights arising from other contractual arrangements; and*
- *The Company's voting rights and potential voting rights.*

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary.

Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statement from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan dan entitas anaknya akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan dan entitas anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, jika Perseroan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

c. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company and its subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case the Company loss control over a subsidiary, the Company and its subsidiaries:

- *derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognize the carrying amount of any NCI;*
- *derecognize the cumulative translation differences recorded in equity, if any;*
- *recognize the fair value of the consideration received;*
- *recognize the fair value of any investment retained;*
- *recognize any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.*

c. Business combination

Business combination is recorded by using the acquisition method. Cost from acquisition is measured at the sum value of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date, and the amount of each NCI on acquired parties. For each business combination, the acquirer measures the NCI on the acquired entity either at fair value or the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity. Costs incurred in respect of acquisition are charged directly and included in administrative expenses.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan entitas anaknya yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Business combination (continued)

When the Company and its subsidiaries acquire a business, they assess the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Contingent consideration transferred by the acquirer is recognized at fair value on the acquisition date.

Change in fair value of contingent consideration after the acquisition date, which is classified as an asset or liability, will be recognized in profit or loss or other comprehensive income in accordance with PSAK 71, "Financial Instruments". If classified as equity, contingent consideration is not measured again until the next settlement accounted in equity.

At the date of acquisition, goodwill is initially measured at cost which represents the excess of the sum value of the consideration transferred and the amount of any difference in the number of NCI on the acquired identifiable assets and liabilities acquired. If the consideration is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired from a business combination, since the date of the acquisition is allocated to each Cash Generating Unit ("CGU") of the Company and its subsidiaries which is expected to benefit from the synergy of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

If goodwill has been allocated to CGU and specific operation on CGU is disposed, the goodwill associated with disposed operations are included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. The goodwill disposal is measured based on the relative value of discontinued operations and the portion of the CGU retained.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint venture of the same third party.*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

f. Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perseroan dan entitas anaknya sebagai penyewa

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

i) Aset hak-guna

Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Tanah	2-25
Kantor	5
Satelit	5
Fiber	30

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

f. Leases

The Company and its subsidiaries assess at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company and its subsidiaries as lessee

The Company and its subsidiaries apply a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company and its subsidiaries recognize lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) *Right-of-use assets*

The Company and its subsidiaries recognize right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Land
Office
Satellite
Fiber

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai
penyewa (lanjutan)

i) Aset hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perseroan dan entitas anaknya pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa juga mencakup harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti akan dieksekusi oleh Perseroan dan entitas anaknya, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perseroan dan entitas anaknya mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessee
(continued)

i) Right-of-use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Company and its subsidiaries at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

The right-of-use assets are also assessed for impairment.

ii) Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company and its subsidiaries recognize lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its subsidiaries exercising the option to terminate.

Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai
penyewa (lanjutan)

ii) Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessee
(continued)

ii) Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use their incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company and its subsidiaries apply the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai
pesewa

Sewa di mana Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessor

Leases in which the Company and its subsidiaries do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

g. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company and its subsidiaries provide allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap

Perseroan dan entitas anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap.

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk penghentian suatu aset setelah digunakan termasuk dalam biaya perolehan aset yang bersangkutan jika kriteria pengakuan untuk provisi terpenuhi. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Perseroan dan entitas anaknya dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Menara-menara	40	Towers
Bangunan	20	Building
Mesin	8	Machinery
Peralatan kantor	3-4	Office equipment
Kendaraan bermotor	4-8	Motor vehicles
Peralatan proyek	4-25	Field equipment
Perabotan kantor	3-5	Furniture and fixtures

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

h. Fixed assets

The Company and its subsidiaries have chosen the cost model for fixed assets.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company and its subsidiaries would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

Land is stated at cost and is not depreciated.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perseroan dan entitas anaknya manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anaknya membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

h. Fixed assets (continued)

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets are considered to modify the depreciation period and are treated as changes in accounting estimates.

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is completed and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell and value in use.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and its subsidiaries and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

i. Impairment of non-financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each end of reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries make a formal estimate of the asset's recoverable amount.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**i. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

j. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan dan entitas anaknya mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit".

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**i. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses from continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

j. Employee benefits liability

The Company and its subsidiaries have long-term employee benefits liability in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The liability is estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain ("PKL") pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan dan entitas anaknya mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*.

Pada tahun 2022, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

j. Employee benefits liability (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income ("OCI") in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date the entity recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company and its subsidiaries recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19.

In 2022, the Company and its subsidiaries have adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Perseroan dan entitas anaknya dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode kini.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Foreign currency transactions and balances

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is also the Company's functional currency. Each subsidiary determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company and its subsidiaries at their respective functional currency rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/ December 31, 2022 (angka penuh)/ (full amount)
Rupiah/1 USD	15.416	15.731
Rupiah/1 SGD	11.712	11.659
Rupiah/1 GBP	19.760	18.926

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perseroan dan entitas anaknya dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Perseroan dan entitas anaknya secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Perseroan dan entitas anaknya sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi potongan penjualan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga.

Untuk potongan harga, pengembalian dan penyesuaian harga, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metode yang paling mungkin dalam memperkirakan jumlah tersebut. Manajemen mempertimbangkan pengalaman historisnya untuk mengembangkan estimasi.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perseroan dan entitas anaknya mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**k. Foreign currency transactions and
balances (continued)**

The exchange rates used as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/ December 31, 2022 (angka penuh)/ (full amount)	
Rupiah/USD 1	15.416	15.731	Rupiah/USD 1
Rupiah/SGD 1	11.712	11.659	Rupiah/SGD 1
Rupiah/GBP 1	19.760	18.926	Rupiah/GBP 1

l. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company and its subsidiaries expect to be entitled in exchange for those goods or services. The Company and its subsidiaries have generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Company and its subsidiaries received in exchange for transferring promised goods or services to the customers, net of the sales reduction and adjusted for expected returns and price adjustments.

For sales reduction, returns and price adjustment, the Company and its subsidiaries use most likely method in estimating the amount. Management considers its historical experience to develop an estimate.

If a customer pays consideration before the Company and its subsidiaries transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company and its subsidiaries perform under the contract.

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**l. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

m. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**l. Revenue and expense recognition
(continued)**

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

Interest income or expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

m. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Company and its subsidiaries have decided to present all of the final tax arising from sales of land, land rent revenue and engineering and construction services as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/ kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perseroan dan entitas anaknya menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the period computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/ overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company and its subsidiaries presented interest/penalty, if any, as part of other operating expenses.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal goodwill (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba atau rugi fiskal.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if they are for different legal entity, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except when the deferred tax asset and liability arises from the initial recognition of goodwill (for deferred tax liability) or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu, yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai**

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti *swap* atas perubahan kurs, *swap* atas tingkat suku bunga, *call spread* dan kontrak *forward*, untuk melindungi nilai masing-masing risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai kewajiban keuangan jika nilai wajarnya negatif.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai:

- Lindung nilai nilai wajar saat lindung nilai terhadap eksposur terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai arus kas saat melakukan lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang diakui dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai dari investasi neto dalam operasi asing

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Operating segments

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment, which is subjected to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intercompany balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

**o. Derivative financial instruments and hedge
accounting**

The Company and its subsidiaries use derivative financial instruments, such as cross currency swap, interest rate swap, call spread and forward contract to hedge the foreign currency risks and interest rate risks. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as:

- *Fair value hedges when hedging the exposure to changes in the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment*
- *Cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment*
- *Hedges of a net investment in a foreign operation*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Pada permulaan hubungan lindung nilai, Perseroan dan entitas anaknya secara resmi menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang ingin diterapkan akuntansi lindung nilai serta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melaksanakan lindung nilai.

Dokumentasi tersebut mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai dan bagaimana Perseroan dan entitas anaknya akan menilai apakah hubungan lindung nilai tersebut memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomi' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai sama dengan yang dihasilkan dari jumlah item lindung nilai yang Perseroan dan entitas anaknya benar-benar lindung nilai dan jumlah instrumen lindung nilai yang benar-benar digunakan Perseroan dan entitas anaknya untuk lindung nilai atas jumlah item lindung nilai tersebut.

Lindung nilai yang memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai diperhitungkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Lindung nilai atas nilai wajar

Perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban lain-lain. Perubahan nilai wajar item lindung nilai yang terkait dengan risiko lindung nilai dicatat sebagai bagian dari nilai tercatat item lindung nilai dan juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban lain-lain.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**o. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

At the inception of a hedge relationship, the Company and its subsidiaries formally designate and document the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Company and its subsidiaries will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*
- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Company and its subsidiaries actually hedge and the quantity of the hedging instrument that the Company and its subsidiaries actually use to hedge that quantity of hedged item.*

Hedges that meet all the qualifying criteria for hedge accounting are accounted for, as described below:

Fair value hedges

The change in the fair value of a hedging instrument is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other expense. The change in the fair value of the hedged item attributable to the risk hedged is recorded as part of the carrying value of the hedged item and is also recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other expense.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Untuk lindung nilai atas nilai wajar yang terkait dengan item yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, setiap penyesuaian terhadap nilai tercatat diamortisasi melalui laporan laba rugi selama sisa jangka waktu lindung nilai dengan menggunakan metode SBE. Amortisasi SBE dapat dimulai segera setelah penyesuaian dilakukan dan selambat-lambatnya pada saat item lindung nilai tidak lagi disesuaikan untuk perubahan nilai wajarnya yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi nilai.

Jika item lindung nilai dihentikan pengakuannya, nilai wajar yang belum diamortisasi segera diakui dalam laba rugi.

Ketika komitmen perusahaan yang tidak diakui ditetapkan sebagai item lindung nilai, perubahan kumulatif selanjutnya dalam nilai wajar komitmen perusahaan yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi nilainya diakui sebagai aset atau liabilitas seiring dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi.

Lindung nilai arus kas

Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui di OCI sebagai cadangan lindung nilai arus kas, sedangkan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Cadangan lindung nilai arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah dari keuntungan atau kerugian kumulatif instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar item lindung nilai.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan kontrak mata uang sebagai lindung nilai atas eksposurnya terhadap risiko mata uang asing dalam prakiraan transaksi dan komitmen pasti. Bagian yang tidak efektif sehubungan dengan kontrak mata uang asing diakui sebagai beban lain-lain dan bagian yang tidak efektif yang diakui pada laba rugi.

Perseroan dan entitas anaknya hanya menetapkan elemen spot kontrak *forward* sebagai instrumen lindung nilai. Unsur *forward* diakui di OCI dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah di bawah keuntungan/kerugian cadangan lindung nilai.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**o. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

For fair value hedges relating to items carried at amortized cost, any adjustment to carrying value is amortised through profit or loss over the remaining term of the hedge using the EIR method. The EIR amortization may begin as soon as an adjustment exists and no later than when the hedged item ceases to be adjusted for changes in its fair value attributable to the risk being hedged.

If the hedged item is derecognized, the unamortized fair value is recognized immediately in profit or loss.

When an unrecognized firm commitment is designated as a hedged item, the subsequent cumulative change in the fair value of the firm commitment attributable to the hedged risk is recognized as an asset or liability with a corresponding gain or loss recognized in profit or loss.

Cash flow hedges

The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in OCI in the cash flow hedge reserve, while any ineffective portion is recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

The Company and its subsidiaries use currency contracts as hedges of its exposure to foreign currency risk in forecast transactions and firm commitments. The ineffective portion relating to foreign currency contracts is recognized as other expense and the ineffective portion is recognized in profit or loss.

The Company and its subsidiaries designate only the spot element of forward contracts as a hedging instrument. The forward element is recognized in OCI and accumulated in a separate component of equity under gain/loss on cash flow hedge.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Jumlah yang terakumulasi di OCI diperhitungkan, tergantung pada sifat transaksi lindung nilai yang mendasarinya. Jika transaksi lindung nilai kemudian menghasilkan pengakuan item non-keuangan, jumlah yang diakumulasi dalam ekuitas dikeluarkan dari komponen ekuitas yang terpisah dan dimasukkan ke dalam biaya awal atau jumlah tercatat lainnya dari aset atau liabilitas yang dilindungi nilainya. Ini bukan penyesuaian reklasifikasi dan tidak akan diakui di OCI untuk periode tersebut. Hal ini juga berlaku di mana prakiraan transaksi lindung nilai dari aset non-keuangan atau kewajiban non-keuangan selanjutnya menjadi komitmen pasti yang diterapkan akuntansi lindung nilai wajar.

Untuk lindung nilai arus kas lainnya, jumlah yang terakumulasi di OCI direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode atau periode yang sama di mana arus kas lindung nilai memengaruhi laba rugi.

Jika akuntansi lindung nilai arus kas dihentikan, jumlah yang telah diakumulasi di OCI harus tetap dalam akumulasi OCI jika arus kas masa depan yang dilindungi nilainya masih diharapkan terjadi. Jika tidak, jumlah tersebut akan segera direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Setelah penghentian, setelah arus kas lindung nilai terjadi, setiap jumlah yang tersisa dalam akumulasi OCI harus diperhitungkan tergantung pada sifat transaksi yang mendasari seperti dijelaskan di atas.

p. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Perseroan dan entitas anaknya tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

q. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**o. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Cash flow hedges (continued)

The amounts accumulated in OCI are accounted for, depending on the nature of the underlying hedged transaction. If the hedged transaction subsequently results in the recognition of a non-financial item, the amount accumulated in equity is removed from the separate component of equity and included in the initial cost or other carrying amount of the hedged asset or liability. This is not a reclassification adjustment and will not be recognized in OCI for the period. This also applies where the hedged forecast transaction of a non-financial asset or non-financial liability subsequently becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied.

For any other cash flow hedges, the amount accumulated in OCI is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged cash flows affect profit or loss.

If cash flow hedge accounting is discontinued, the amount that has been accumulated in OCI must remain in accumulated OCI if the hedged future cash flows are still expected to occur. Otherwise, the amount will be immediately reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. After discontinuation, once the hedged cash flow occurs, any amount remaining in accumulated OCI must be accounted for depending on the nature of the underlying transaction as described above.

p. Earnings per share

Earnings per share is computed by dividing income for the period attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of outstanding shares during the period.

The Company and its subsidiaries have no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023 and 2022.

q. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perseroan dan entitas anaknya untuk mengelolanya. Perseroan dan entitas anaknya pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perseroan dan entitas anaknya untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perseroan dan entitas anaknya mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (OCI), and fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company and its subsidiaries' business model for managing them. The Company and its subsidiaries initially measure a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company and its subsidiaries' business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commit to purchase or sell the asset.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau rusak.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments)
- Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)
- Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)
- Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries measure assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, *convertible loan notes*, aset tidak lancar lainnya - uang jaminan.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen utang)

Perseroan dan entitas anaknya mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui dalam OCI didaur ulang ke laba rugi.

Instrumen utang Perseroan dan entitas anaknya pada nilai wajar melalui OCI mencakup investasi dalam obligasi perusahaan kuotasi yang disajikan dalam investasi instrumen keuangan.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

The Company and its subsidiaries' financial assets at amortized cost include cash and cash equivalents, restricted cash in bank, trade receivables, other receivables, advance, convertible loan notes, other non-current assets - deposits.

Financial assets at fair value through OCI (debt instruments)

The Company and its subsidiaries measure debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Company and its subsidiaries' debt instruments at fair value through OCI include investments in quoted corporate bonds presented under investment in financial instruments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kategori ini mencakup investasi pada *structured deposit* pada tahun 2022 yang disajikan pada investasi instrumen keuangan.

Derivatif yang melekat dalam kontrak hibrida yang mengandung aset keuangan utama tidak dicatat secara terpisah. Aset keuangan utama bersama dengan derivatif melekat harus diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

This category includes investment in structured deposit in 2022 presented under investment in financial instrument.

A derivative embedded within a hybrid contract containing a financial asset host is not accounted for separately. The financial asset host together with the embedded derivative is required to be classified in its entirety as a financial asset at fair value through profit or loss.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau
- Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through'; dan salah satu (a) Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Perseroan dan entitas anaknya telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Perseroan dan entitas anaknya terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perseroan dan entitas anaknya juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Perseroan dan entitas anaknya.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company and its subsidiaries' consolidated statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Company and its subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company and its subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, the Company and its subsidiaries evaluate if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company and its subsidiaries also recognize an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company and its subsidiaries have retained.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Penurunan nilai aset keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Perseroan dan entitas anaknya, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup).

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and its subsidiaries could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries recognize an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company and its subsidiaries expect to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk piutang dagang, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Perseroan dan entitas anaknya telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang dengan nilai wajar melalui OCI, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual telah jatuh tempo lebih dari 30 hari.

Instrumen utang Perseroan dan entitas anaknya pada nilai wajar melalui OCI hanya terdiri dari obligasi yang memiliki kuotasi harga yang dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak permulaan, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For trade receivables, the Company and its subsidiaries apply a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Company and its subsidiaries do not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Company and its subsidiaries have established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at fair value through OCI, the Company and its subsidiaries apply the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company and its subsidiaries evaluate whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company and its subsidiaries reassess the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Company and its subsidiaries consider that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Company and its subsidiaries' debt instruments at fair value through OCI comprise of quoted corporate bonds that are considered to be low credit risk investments. It is the Company and its subsidiaries' policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Perseroan dan entitas anaknya juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perseroan dan entitas anaknya tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anaknya. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk utang dan pinjaman dan utang usaha, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya meliputi utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, akrual, utang bank, utang obligasi, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, pinjaman pihak berelasi, utang derivatif dan utang sewa.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Company and its subsidiaries consider a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company and its subsidiaries may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company and its subsidiaries are unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company and its subsidiaries. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include tower construction and other trade payables, other payables, accruals, bank loans, bonds payable, short-term employee benefits liability, related party loan, derivatives payable and lease liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka terjadi untuk tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dimasukkan oleh Perseroan dan entitas anaknya yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada tanggal awal pengakuan, dan hanya jika kriteria dalam PSAK 71 terpenuhi. Perseroan dan entitas anaknya tidak menetapkan liabilitas keuangan apa pun yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company and its subsidiaries that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company and its subsidiaries have not designated any financial liability at fair value through profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Utang dan pinjaman

Ini adalah kategori yang paling relevan dengan Perseroan dan entitas anaknya. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak hukum yang dapat diberlakukan saat ini untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the Company and its subsidiaries. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

iv. Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

r. Investasi pada asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Perseroan dan entitas anaknya memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

r. Investment in associate and joint venture

An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Investasi pada asosiasi dan ventura
bersama (lanjutan)**

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Perseroan dan entitas anaknya pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Perseroan dan entitas anaknya atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Perseroan dan entitas anaknya atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Perseroan dan entitas anaknya. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Perseroan dan entitas anaknya mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perseroan dan entitas anaknya dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Perseroan dan entitas anaknya atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Investment in associate and joint venture
(continued)**

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Company and its subsidiaries investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Company and its subsidiaries share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Company and its subsidiaries share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Company and its subsidiaries OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Company and its subsidiaries recognize its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and its subsidiaries and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Company and its subsidiaries share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Investasi pada asosiasi dan ventura
bersama (lanjutan)**

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perseroan dan entitas anaknya.

Setelah penerapan metode ekuitas, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perseroan dan entitas anaknya dalam entitas asosiasi. Perseroan dan entitas anaknya menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perseroan dan entitas anaknya menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Perseroan dan entitas anaknya mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

s. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Investment in associate and joint venture
(continued)**

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period as the Company and its subsidiaries.

After application of the equity method, the Company and its subsidiaries determine whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Company and its subsidiaries investment in its associate. The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Company and its subsidiaries calculate the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognize the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Company and its subsidiaries measure and recognize any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

s. Provision

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul.

u. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 10 sampai 30 tahun.

v. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perseroan dan entitas anaknya menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiaries at the date of acquisition. *Goodwill* is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

u. Intangible assets

Intangible assets consisting of customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 10 to 30 years.

v. Current and non-current classification

The Company and its subsidiaries present assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggukkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memerlukan waktu dalam jumlah besar untuk siap digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset terkait. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya pendanaan lainnya yang dibebankan kepada Perseroan dan entitas anaknya sehubungan dengan peminjaman dana.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Current and non-current classification
(continued)**

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

w. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests expense and other financing charges that the Company and its subsidiaries incur in connection with the borrowing of funds.

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil
Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 21h.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

Penentuan Aset Kualifikasian

Perseroan dan entitas anaknya menentukan aset tertentu sebagai aset kualifikasian dengan menilai apakah mereka memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 26. Oleh karena itu, aset tetap yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa siap digunakan, dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 21.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account is recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanation regarding this account is provided in Note 21h.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2q.

Determination of Qualifying Assets

The Company and its subsidiaries determine certain assets as qualifying assets by judging if they meet the definition set forth in PSAK 26. Accordingly, fixed assets which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use are accounted for in accordance with the accounting policies.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi dan asumsi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Sewa

Sebagai pesewa, Perseroan dan entitas anaknya menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan.

Sebagai penyewa, Perseroan dan entitas anaknya melakukan kontrak sewa tanah dengan fitur opsi perpanjangan. Pada setiap akhir tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah cukup pasti dalam mengeksekusi opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Berdasarkan analisis pembaruan sewa tanah di masa lalu, Perseroan dan entitas anaknya menetapkan bahwa opsi tersebut tidak cukup pasti untuk dieksekusi. Perubahan penilaian tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sejak tanggal 1 Oktober 2023. Akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, aset hak guna - neto dan liabilitas sewa masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp976.161 and Rp1.073.773.

Dampak dari perubahan estimasi jangka waktu sewa kontrak sewa tanah dan beban bunga untuk periode berjalan dan periode berikutnya adalah sebagai berikut:

	Penurunan dalam amortisasi (tidak diaudit)/Decrease in amortization (unaudited)	Penurunan dalam beban bunga (tidak diaudit)/Decrease in interest expenses (unaudited)	
2023 (Oktober-Desember)	(38.714)	(19.174)	2023 (October-December)
2024-2028	(256.084)	(220.015)	2024-2028
2029-selesai	(444.342)	(19.750)	2029-end

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company and its subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Leases

As lessor, the Company and its subsidiaries lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for specific terms. The Company and its subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out.

As a lessee, the Company and its subsidiaries entered into ground lease contracts with renewal option features. At the end of each reporting date, the Company and its subsidiaries assessed, whether it is reasonably certain to exercise the option to extend the term of the leases. Based on an analysis of historical renewal of ground leases, the Company and its subsidiaries determined that it is not reasonably certain to exercise the option. The change in assessment is accounted for as a change in accounting estimate commencing from October 1, 2023. As a result of the change in accounting estimate, the net right-of-use assets and lease liabilities decreased by Rp976,161 and Rp1,073,773, respectively.

The impact of changes in the estimated lease term of the ground leases contracts and interest expenses for the current and subsequent periods is as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Imbalan Kerja

Penentuan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2j. Sementara Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya telah diungkapkan dalam Catatan 22.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan dan entitas anaknya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 41.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Employee Benefits

The determination of the Company and its subsidiaries' cost of pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumption are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2j. While the Company and its subsidiaries believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experiences or significant changes in the Company and its subsidiaries' assumption may materially affect their estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries' estimated employee benefits liability are disclosed in Note 22.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 3 to 40 years. These are common life expectations applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Financial Instruments

The Company and its subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Company and its subsidiaries utilized a different valuation methodology. Any changes in a fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Company and its subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 41.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Perseroan dan entitas anaknya yang diamati secara historis. Perseroan dan entitas anaknya akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada periode berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perseroan dan entitas anaknya dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21e.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of trade receivables

The Company and its subsidiaries use a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Company and its subsidiaries' historical observed default rates. The Company and its subsidiaries will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next period which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company and its subsidiaries' historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit. Further details are disclosed in Note 21e.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan entitas anaknya menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK 22, "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company and its subsidiaries have resulted in goodwill. Under PSAK 22, "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 20.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Perseroan dan entitas anaknya tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perseroan dan entitas anaknya untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perseroan dan entitas anaknya, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi (seperti untuk entitas-anak yang tidak mengadakan transaksi pembiayaan) atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Perseroan dan entitas anaknya mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi spesifik entitas tertentu.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATION AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Company and its subsidiaries cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the Company and its subsidiaries use their incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company and its subsidiaries would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Company and its subsidiaries 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease (for example, the subsidiaries that do not enter into financing transactions). The Company and its subsidiaries estimate the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kas	7.939	9.020
Rekening giro		
Bank - pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank UOB Indonesia	89.776	44
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.673	51.335
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.795	19.273
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.172	12
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.519	4.509
PT Bank Sinarmas Tbk	5.159	515
PT Bank Permata Tbk	4.375	124.204
Lain-lain (dibawah Rp1.000)	3.125	1.857
Sub-total	227.594	201.749
Dolar AS		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.198	70
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.229	12.599
Lain-lain (dibawah Rp1.000)	662	638
Sub-total	30.089	13.307
Dolar Singapura		
DBS Bank Ltd, Singapura	7.343	7.314
Sub-total bank - pihak ketiga	265.026	222.370
Bank - pihak berelasi (Catatan 37)		
PT Bank Central Asia Tbk		
Rupiah	111.899	53.532
Dolar AS	18	265
PT Bank BCA Syariah		
Rupiah	160	-
Sub-total bank - pihak berelasi	112.077	53.797
Total rekening giro	377.103	276.167
Deposito jangka pendek		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank BTPN Tbk	19.900	-
Total deposito jangka pendek	19.900	-
Total	404.942	285.187

Pada tahun 2023, tingkat bunga rata-rata untuk rekening giro berkisar antara 0,00% sampai dengan 5,50% per tahun untuk rekening Rupiah (2022: berkisar antara 0,00% sampai dengan 1,25%), berkisar antara 0,00% sampai dengan 3,25% per tahun untuk rekening Dolar AS (2022: berkisar antara 0,00% sampai dengan 0,15%) dan 0,00% per tahun untuk rekening Dolar Singapura (2022: 0,05%).

Pada tahun 2023, tingkat bunga rata-rata untuk deposito jangka pendek berkisar 6,00% per tahun.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Cash on hand		
Current accounts		
<i>Cash in banks - third parties</i>		
<i>Rupiah</i>		
<i>PT Bank UOB Indonesia</i>		
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>		
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>		
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>		
<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>		
<i>PT Bank Sinarmas Tbk</i>		
<i>PT Bank Permata Tbk</i>		
<i>Others (below Rp1,000)</i>		
Sub-total		
<i>US Dollar</i>		
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>		
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>		
<i>Others (below Rp1,000)</i>		
Sub-total		
<i>Singapore Dollar</i>		
<i>DBS Bank Ltd, Singapore</i>		
Sub-total cash in banks - third parties		
<i>Cash in banks - related parties (Note 37)</i>		
<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>		
<i>Rupiah</i>		
<i>US Dollar</i>		
<i>PT Bank BCA Syariah</i>		
<i>Rupiah</i>		
Sub-total cash in banks - related parties		
Total current accounts		
Short-term deposit		
<i>Third parties</i>		
<i>Rupiah</i>		
<i>PT Bank BTPN Tbk</i>		
Total short-term deposit		
Total		

In 2023, average interest rates for current bank accounts ranged from 0.00% to 5.50% per annum for Rupiah (2022: ranging from 0.00% to 1.25%), 0.00% to 3.25% per annum for US Dollar (2022: ranging from 0.00% to 0.15%) and 0.00% per annum for Singapore Dollar (2022: 0.05%).

In 2023, average interest rates for short-term deposit ranged at 6.00% per annum.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Desember/ December 31, 2023
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	122

Akun ini merupakan garansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait transaksi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan PT Perkebunan Nusantara IV.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	3.114.691	2.591.588	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	42.629	3.643	<i>US Dollar</i>
Sub-total	3.157.320	2.595.231	<i>Sub-total</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(83.020)	(39.657)	<i>Less: Allowance for expected credit loss</i>
Pihak ketiga Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 37)	3.074.300 12.034	2.555.574 2.230	<i>Third parties Related parties - Rupiah (Note 37)</i>
Neto	3.086.334	2.557.804	<i>Net</i>

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT XL Axiata Tbk	1.691.703	1.426.781	<i>PT XL Axiata Tbk</i>
PT Indosat Tbk	746.358	498.989	<i>PT Indosat Tbk</i>
PT Telekomunikasi Selular	341.844	388.843	<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
PT Smart Telecom	131.283	45.993	<i>PT Smart Telecom</i>
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	61.657	11.682	<i>Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi</i>
Lain-lain (dibawah Rp50.000)	184.475	222.943	<i>Others (below Rp50,000)</i>
Sub-total	3.157.320	2.595.231	<i>Sub-total</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(83.020)	(39.657)	<i>Less: Allowance for expected credit loss</i>
Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 37)	3.074.300 12.034	2.555.574 2.230	<i>Third parties Related parties (Note 37)</i>
Neto	3.086.334	2.557.804	<i>Net</i>

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Belum jatuh tempo	3.023.840	2.449.804	Current
Lewat jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	49.334	70.406	1 - 30 days
31 - 60 hari	24.802	11.410	31 - 60 days
61 - 90 hari	9.441	13.203	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	61.937	52.638	Over 90 days
Sub-total	3.169.354	2.597.461	Sub-total
Dikurangi: Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(83.020)	(39.657)	Less: Allowance for expected credit loss
Neto	3.086.334	2.557.804	Net

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 sampai 60 hari.

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian yang sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	39.657	98.552	Beginning balance
Penghapusan piutang usaha	(72)	(1.598)	Receivables write-off
Beban cadangan kerugian kredit ekspektasian, neto (Catatan 34)	43.435	4.787	Allowance for expected credit loss, net (Note 34)
Reklasifikasi ke aset tidak lancar (Catatan 14)	-	(62.084)	Reclassified to non- current asset (Note 14)
Saldo akhir	83.020	39.657	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Lihat Catatan 40 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Perseroan dan entitas anak mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging of trade receivables is as follows:

Trade receivables are unsecured, non - interest bearing and normally settled on terms between 30 to 60 days.

Movements in the allowance for expected credit loss are as follows:

Management believes that the allowance for expected credit loss is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

See Note 40 on credit risk of trade receivables to understand how the Company and its subsidiaries manages and measures credit quality of trade receivables.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Jangka pendek			Current
International Private Leased Circuit (IPLC)	62.605	62.605	International Private Leased Circuit (IPLC)
Transponder	18.741	18.740	Transponder
Asuransi	9.986	8.740	Insurance
Biaya jaminan	9.483	9.509	Guarantee fee
Sewa kantor	3.247	2.689	Office rental
Internet bandwidth	1.800	-	Internet bandwidth
Lain-lain	123.181	134.004	Others
Total	229.043	236.287	Total
Jangka panjang			Non - Current
Transponder	165.541	184.282	Transponder
IPLC	13.879	76.485	IPLC
Internet bandwidth	4.200	6.000	Internet bandwidth
Lain-lain	-	24.071	Others
Total	183.620	290.838	Total

8. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2023	Akuisisi entitas anak (Catatan 1c)/ Acquisition of a subsidiary (Note 1c)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2023	
Harga perolehan							Acquisition cost
Tanah	16.156	-	-	-	(1.203)	14.953	Land
Menara	38.114.986	-	89.059	(415.710)	1.765.558	39.553.893	Tower
Gedung	196.417	-	3.860	-	31.729	232.006	Building
Mesin	10.222	-	-	-	-	10.222	Machinery
Peralatan kantor	415.619	16.323	12.843	(16.107)	35.226	463.904	Office equipment
Kendaraan bermotor	59.259	2.933	11.744	(6.820)	171	67.287	Motor vehicle
Peralatan proyek	7.797.105	5.860	465.145	(56.615)	1.992.029	10.203.524	Field equipment
							Furniture and fixtures
Perabotan kantor	86.513	-	523	-	4.556	91.592	
Sub-total	46.696.277	25.116	583.174	(495.252)	3.828.066	50.637.381	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	995.011	-	4.216.696	(2.718)	(3.828.066)	1.380.923	Construction in progress
Total	47.691.288	25.116	4.799.870	(497.970)	-	52.018.304	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Menara	8.785.601	-	834.739	(257.825)	-	9.362.515	Tower
Gedung	19.050	-	11.965	-	-	31.015	Building
Mesin	8.475	-	831	-	-	9.306	Machinery
Peralatan kantor	278.183	14.112	62.895	(15.916)	-	339.274	Office equipment
Kendaraan bermotor	23.210	1.477	12.360	(6.820)	-	30.227	Motor vehicle
Peralatan proyek	1.360.640	4.198	456.722	(34.709)	-	1.786.851	Field equipment
							Furniture and fixtures
Perabotan kantor	64.037	-	10.005	-	-	74.042	
Total	10.539.196	19.787	1.389.517	(315.270)	-	11.633.230	Total
Nilai buku neto	37.152.092					40.385.074	Net book value

8. FIXED ASSETS

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

	1 Januari/ January 1, 2022	Akuisisi entitas anak (Catatan 1c)/ Acquisition of a subsidiary (Note 1c)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 31, 2022	
Harga perolehan								Acquisition cost
Tanah	15.706	-	450	-	-	-	16.156	Land
Menara	36.835.347	167.342	176.872	(181.757)	1.313.147	(195.965)	38.114.986	Tower
Gedung	70.785	-	11.819	(6.721)	120.534	-	196.417	Building
Mesin	10.244	-	-	(22)	-	-	10.222	Machinery
Peralatan kantor	348.222	464	12.909	(6.819)	60.843	-	415.619	Office equipment
Kendaraan bermotor	33.044	-	30.030	(3.815)	-	-	59.259	Motor vehicle
Peralatan proyek	4.042.849	91.357	1.286.313	(30.365)	2.406.951	-	7.797.105	Field equipment
								Furniture and fixtures
Perabotan kantor	82.861	-	37	-	3.615	-	86.513	
Sub-total	41.439.058	259.163	1.518.430	(229.499)	3.905.090	(195.965)	46.696.277	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	994.554	-	3.914.702	(9.155)	(3.905.090)	-	995.011	Construction in progress
Total	42.433.612	259.163	5.433.132	(238.654)	-	(195.965)	47.691.288	Total
Akumulasi depresiasi								Accumulated depreciation
Menara	8.160.651	80.951	651.843	(62.196)	-	(45.648)	8.785.601	Tower
Gedung	15.985	-	5.208	(2.143)	-	-	19.050	Building
Mesin	7.276	-	1.219	(20)	-	-	8.475	Machinery
Peralatan kantor	224.072	292	56.650	(5.813)	2.982	-	278.183	Office equipment
Kendaraan bermotor	19.254	-	7.205	(3.249)	-	-	23.210	Motor vehicle
Peralatan proyek	999.944	91.357	288.549	(16.228)	(2.982)	-	1.360.640	Field equipment
								Furniture and fixtures
Perabotan kantor	54.948	-	9.089	-	-	-	64.037	
Total	9.482.130	172.600	1.019.763	(89.649)	-	(45.648)	10.539.196	Total
Nilai buku neto	32.951.482						37.152.092	Net book value

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh aset tetap (kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT Sunday Insurance Indoensia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana Tbk dan PT Chubb General Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp18.457.486 (2022: Rp18.214.653). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Penyusutan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.389.517 (2022: Rp974.115) (Catatan 29).

Nilai buku dari pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai perolehan	497.970	238.654	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(315.270)	(89.649)	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	182.700	149.005	Net book value
Harga penjualan aset tetap	9.092	4.306	Selling price of fixed assets
Rugi pelepasan aset tetap (Catatan 34)	173.608	144.699	Loss on disposal of fixed assets (Note 34)

As of December 31, 2023, all of fixed assets (except for land and construction in progress) are insured with PT Sunday Insurance Indoensia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana Tbk and PT Chubb General Insurance Indonesia against fire, theft and other possible risks for Rp18,457,486 (2022: Rp18,214,653). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Depreciation expense charged for the year ended December 31, 2023 amounted to Rp1,389,517 (2022: Rp974,115) (Note 29).

The net book value of fixed asset that disposed are as follows:

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

Rincian aset dalam penyelesaian beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress with the percentages of completion of the contract value which are located in Java, Sumatera and other islands in Indonesia are as follows:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
31 Desember 2023				December 31, 2023
Menara-menara	25%-75%	378.707	Apr-Jun 2024/ Apr-Jun 2024	Towers
Peralatan proyek	10%-75%	989.678	Apr-Jun 2024/ Apr-Jun 2024	Field Equipment
Peralatan kantor	25%-75%	12.538	Apr-Jun 2024/ Apr-Jun 2024	Office Equipment
Total		1.380.923		Total
31 Desember 2022				December 31, 2022
Menara-menara	25%-75%	320.035	Jan-Mar 2023/ Jan-Mar 2023	Towers
Peralatan proyek	10%-75%	672.479	Feb-Jun 2023/ Feb-Jun 2023	Field Equipment
Peralatan kantor	25%-75%	2.497	Feb-Mar 2023/ Feb-Mar 2023	Office Equipment
Total		995.011		Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

As of December 31, 2023 and 2022, management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

Nilai dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp99.835 (31 Desember 2022: Rp72.652).

The amount of borrowing costs capitalized for the year ended December 31, 2023 amounted to Rp99,835 (December 31, 2022: Rp72,652).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. GOODWILL

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, goodwill yang dihasilkan dari transaksi akuisisi berasal dari selisih antara harga beli dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2023	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penurunan nilai/ Impairment	31 Desember/ December 31, 2023	
STP	15.061.267	-	-	-	-	15.061.267	STP
KIN	207.467	-	-	-	-	207.467	KIN
Iforte	152.812	-	-	-	-	152.812	Iforte
VTS	-	43.865	-	-	(10.000)	33.865	VTS
IPI	-	73.122	-	-	(20.000)	53.122	IPI
Total	15.421.546	116.987	-	-	(30.000)	15.508.533	Total

	1 Januari/ January 1, 2022	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 31, 2022	
STP	15.114.765	797	-	-	(54.295)	15.061.267	STP
KIN	207.467	-	-	-	-	207.467	KIN
Iforte	152.812	-	-	-	-	152.812	Iforte
Total	15.475.044	797	-	-	(54.295)	15.421.546	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai yang digunakan dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen menggunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 9,56% - 12,46% (2022: 8,25% - 11,92%).

Pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai goodwill pada UPK STP, KIN dan Iforte. UPK VTS dan IPI mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp20.000 karena jumlah terpulihkan dari masing-masing UPK tersebut lebih rendah dari nilai tercatatnya. Kerugian penurunan nilai telah dibebankan pada beban usaha lain sebesar Rp30.000 (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai goodwill.

9. GOODWILL

As of December 31, 2023 and 2022, goodwill resulted from acquisition, which was derived from the difference between the purchase price considerations and the fair value of identifiable net assets details are as follows:

As at December 31, 2023, the Company and its subsidiaries performed their annual impairment tests on the cash generating unit based on fair value less cost to sell and value in use using discounted cash flow projections. The impairment tests use cash flows projections which have been approved by management using annual discount rate of 9.56% - 12.46% (2022: 8.25% - 11.92%).

As of December 31, 2023, management believes that there is no impairment of goodwill in CGU for STP, KIN and Iforte. CGU VTS and IPI were impaired by Rp10,000 and Rp20,000, respectively, since the recoverable amount of each CGU was lower than their carrying values of the respective CGU. The impairment loss has been charged to other operating expense totaling Rp30,000 (Note 34).

As of December 31, 2022, management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TAKBERWUJUD

	1 Januari/ January 1, 2023	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2023	
Harga perolehan						Acquisition cost
Hubungan pelanggan	1.932.707	-	-	-	1.932.707	Customer relationships
Merek dagang	-	29.405	-	-	29.405	Trademark
	1.932.707	29.405	-	-	1.962.112	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Hubungan pelanggan	(832.070)	-	(137.059)	-	(969.129)	Customer relationships
Merek dagang	-	-	(2.183)	-	(2.183)	Trademark
	(832.070)	-	(139.242)	-	(971.312)	
Neto	1.100.637				990.800	Net

	1 Januari/ January 1, 2022	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2022	
Harga perolehan						Acquisition cost
Hubungan pelanggan	1.879.977	10.390	42.340	-	1.932.707	Customer relationships
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Hubungan pelanggan	(695.519)	-	(136.551)	-	(832.070)	Customer relationships
Neto	1.184.458				1.100.637	Net

Pada tahun 2023, merek dagang berasal dari transaksi akuisisi VTS sebesar Rp29.405.

Pada tahun 2022, hubungan pelanggan berasal dari transaksi akuisisi GIK sebesar Rp10.390 dan akuisisi serat optik sebesar Rp42.340.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, alokasi jumlah amortisasi ke laba rugi sebesar Rp139.242 (31 Desember 2022: Rp136.551) (Catatan 29).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

In 2023, trademark resulted from acquisition of VTS of Rp29,405.

In 2022, customer relationship resulted from acquisition of GIK of Rp10,390 and acquisition of fiber optics of Rp42,340.

For the year ended December 31, 2023, the allocation of amortization to profit or loss amounted to Rp139,242 (December 31, 2022: Rp136,551) (Note 29).

As at December 31, 2023 and 2022, management believes that there was no indications of impairment in the value of intangible assets.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET HAK-GUNA

Akun ini merupakan aset hak-guna atas tanah, kantor dan satelit. Aset hak-guna ini diamortisasi secara garis lurus selama masa sewa.

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Perubahan estimasi akuntansi (Catatan 3) dan reklasifikasi/ Changes in accounting estimates (Note 3) and reclassification	31 Desember/ December 31, 2023	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	7.783.074	1.141.393	(132.987)	(782.454)	8.009.026	Land
Kantor	187.687	6.519	(20.690)	-	173.516	Office
Fiberisasi	203.157	1.433	(1.878)	-	202.712	Fiberization
Satelit	1.033.103	-	-	-	1.033.103	Satellite
Transponder	-	2.546	-	-	2.546	Transponder
Data center	-	56.609	-	-	56.609	Data center
Total	9.207.021	1.208.500	(155.555)	(782.454)	9.477.512	Total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Tanah	2.295.727	880.264	(97.132)	193.707	3.272.566	Land
Kantor	86.636	29.933	(18.702)	1.364	99.231	Office
Fiberisasi	47.169	20.872	(116)	-	67.925	Fiberization
Satelit	664.138	221.379	-	-	885.517	Satellite
Transponder	-	1.864	-	-	1.864	Transponder
Data center	-	29.223	-	-	29.223	Data center
Total	3.093.670	1.183.535	(115.950)	195.071	4.356.326	Total
Nilai buku neto	6.113.351				5.121.186	Net book value
	1 Januari/ January 1, 2022	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of a subsidiary	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2022	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	7.287.566	32.069	653.805	(190.366)	7.783.074	Land
Kantor	198.090	-	9.901	(20.304)	187.687	Office
Fiberisasi	201.015	-	16.928	(14.786)	203.157	Fiberization
Satelit	1.033.103	-	-	-	1.033.103	Satellite
Total	8.719.774	32.069	680.634	(225.456)	9.207.021	Total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Tanah	1.516.247	10.334	811.215	(42.069)	2.295.727	Land
Kantor	55.966	-	35.079	(4.409)	86.636	Office
Fiberisasi	28.456	-	18.713	-	47.169	Fiberization
Satelit	442.757	-	221.381	-	664.138	Satellite
Total	2.043.426	10.334	1.086.388	(46.478)	3.093.670	Total
Nilai buku neto	6.676.348				6.113.351	Net book value

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

This account represents right-of-use assets for land, office and satellite. These right-of-use assets are amortized on a straight-line basis over the rental periods.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

12. INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN

12. INVESTMENT IN FINANCIAL INSTRUMENTS

	Mata uang/ Currencies	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022		
		Saldo/ Balance		Saldo/ Balance		
		Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Jangka pendek						Current
Convertible loan notes	Pound Sterling	1.800.000	35.568	1.800.000	34.067	Convertible loan notes
Jangka panjang						Non-current
Structured deposit	Dolar AS/ US Dollar	-	-	17.453.211	274.556	Structured deposit
Investasi obligasi	Dolar AS/ US Dollar	-	-	14.744.456	231.946	Investment in bonds
Total					506.502	Total

Convertible loan notes adalah nota pinjaman konversi tanpa jaminan kepada Stratospheric Platforms (UK) Limited, pihak ketiga, yang merupakan penyedia jaringan komunikasi melalui lapisan stratosfer. Convertible loan notes dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai pokok pinjaman konversi sebesar GBP£1.800.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5% dan kemudian diamandemen menjadi jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024.

Investasi obligasi adalah obligasi korporasi kuotasi, dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Obligasi akan jatuh tempo pada tahun 2024-2025 dan memiliki tingkat suku bunga berkisar dari 3,75%-5,95%. Nilai wajar dari obligasi korporasi ditentukan oleh harga pasar. Investasi obligasi tersebut telah dicairkan pada tahun 2023.

Structured deposit merupakan investasi jangka panjang yang ditempatkan di JPMorgan Chase Bank, N.A dengan nilai pokok sebesar USD15.000.000. Nilai tersebut merupakan perlindungan nilai pokok dan dengan selisih di atas nilai wajar yang diakui sebagai pengembalian investasi, yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Structured deposit diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar dari structured deposit ini ditentukan oleh penilaian counterparty. Structured deposit tersebut telah dicairkan pada tahun 2023.

Convertible loan notes are unsecured convertible loan notes issued by Stratospheric Platforms (UK) Limited, a third party, which is a provider of communication networks through the stratosphere. Convertible loan notes are carried at amortized cost. The principal of convertible loan notes amount is GBP£1,800,000 with a fixed interest rate of 7.5% and subsequently amended to mature on June 30, 2024.

Investment in bonds are quoted corporate bonds, which are carried at fair value through other comprehensive income. These corporate bonds will mature in 2024-2025 and have interest rates ranging from 3.75%-5.95%. The fair values of these corporate bonds are determined by reference to market price. The investment in bonds has been liquidated in 2023.

Structured deposit is a long-term investment which placed in JPMorgan Chase Bank, N.A with nominal principal amount of USD15,000,000. This amount is capital protected and with the excess above the fair value considered as payout bonus, which will mature in 2024. This structured deposit is classified as financial asset carried at fair value through profit or loss. The fair value of this structured deposit is determined by reference to counterparty valuation. The investment in the structure deposit has been liquidated in 2023.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

13. INVESTASI

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Investasi pada entitas asosiasi	204.655	-	<i>Investment in associates</i>
Investasi pada ventura bersama	289.433	-	<i>Investment in joint ventures</i>
Total	494.088	-	Total

a. Investasi pada asosiasi**a. Investment in associates**

Asosiasi/ Associates	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset/ Total assets	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Dimiliki melalui GTP/ Held through GTP							
PT Bach Multi Global ("BMG") - 30,00% dimiliki oleh GTP/ 30.00% owned by GTP	Jakarta	- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik/ Operation of Electric Power Supply Installation - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya/ Large Trading of Machines, Equipment and Other Equipment - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi/ Large Trading of Telecommunications Equipment - Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi/ Large Trading of Metal Goods For Construction Materials - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal/ Electrical Civil Building Construction - Konstruksi Sentral Telekomunikasi/ Central Telecommunication Construction - Instalasi Listrik/ Electrical Installation - Instalasi Telekomunikasi/ Telecommunication Installation - Portal Web dan/ atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial/ Web Portal and/ or Digital Platform with Commercial Purposes	30,00%	-	2006	867.690	-

Ringkasan informasi keuangan BMG
yang dicatat dengan metode ekuitas
adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of BMG
which is accounted using the equity method is
as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset lancar	767.256	-	<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	100.434	-	<i>Non-current assets</i>
Total aset	867.690	-	Total assets
Liabilitas jangka pendek	478.087	-	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	17.780	-	<i>Non-current liabilities</i>
Total liabilitas	495.867	-	Total liabilities
Aset neto	371.823	-	Net assets
Persentase kepemilikan efektif	30%	-	<i>Percentage of effective ownership</i>
Bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi	111.455	-	<i>The Group's share of the net assets of the associate</i>
Goodwill	85.488	-	<i>Goodwill</i>
Penyesuaian nilai wajar	7.712	-	<i>Fair value adjustment</i>
Nilai tercatat	204.655	-	Carrying value
Pendapatan tahun berjalan	486.854	-	<i>Revenue for the year</i>
Laba tahun berjalan	1.109	-	<i>Profit for the year</i>
Bagian atas laba	333	-	<i>Share of profit</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

13. INVESTASI (lanjutan)**13. INVESTMENTS (continued)****a. Investasi pada asosiasi (lanjutan)****a. Investment in associates (continued)**

Rincian penyertaan saham Iforte di BMG
adalah sebagai berikut:

The details of Iforte investment in shares of
BMG are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai perolehan investasi	204.342	-	<i>Cost of investment</i>
Akumulasi bagian atas laba	333	-	<i>Accumulated share of profit</i>
Akumulasi bagian atas penghasilan komprehensif lain	(20)	-	<i>Accumulated share of other comprehensive income</i>
Nilai tercatat investasi	204.655	-	Carrying value of investment

b. Investasi pada ventura bersama**b. Investment in joint ventures**

Ventura Bersama/ Joint ventures	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Total aset/ Total assets	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022

Dimiliki melalui Iforte/ Held through Iforte

PT Abadi Tambah Mulia Internasional ("ATMI") - 23,72% dimiliki oleh Iforte/ 23.73% owned by Iforte	Jakarta	- Instalasi, Operasi dan Pemeliharaan Mesin Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/ Installation, Operation and Maintenance of Automatic Teller Machine (ATM) - Menyiapkan Komunikasi Data Ke Pusat Penyimpanan Data dan Pengisian Kembali Kas ATM/ Setting up Data Communication to the Data Storage Center and ATM Cash Replenishment	23,72%	-	2014	3.311.773	-
--	---------	---	--------	---	------	-----------	---

Rincian penyertaan saham Iforte di ATMI
adalah sebagai berikut:

The details of Iforte investment in shares of
ATMI are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai perolehan investasi	275.807	-	<i>Cost of investment</i>
Akumulasi bagian atas laba	13.626	-	<i>Accumulated share of profit</i>
Nilai tercatat investasi	289.433	-	<i>Carrying value of investment</i>

Ringkasan informasi keuangan:**Summary of financial information:**

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset lancar	2.855.476	-	<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	456.297	-	<i>Non-current assets</i>
Total aset	3.311.773	-	Total assets
Liabilitas jangka pendek	2.118.883	-	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	10.787	-	<i>Non-current liabilities</i>
Total liabilitas	2.129.670	-	Total liabilities
Aset neto	1.182.103	-	Net assets
Persentase kepemilikan efektif	23,72%	-	<i>Percentage of effective ownership</i>
Bagian Grup atas aset neto entitas ventura bersama	280.415	-	<i>The Group's share of the net assets of the joint venture</i>
Penyesuaian nilai wajar	9.018	-	<i>Fair value adjustment</i>
Nilai tercatat	289.433	-	Carrying value
Pendapatan tahun berjalan	733.277	-	<i>Revenue for the year</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	57.442	-	<i>Comprehensive income for the year</i>
Bagian atas laba komprehensif	13.626	-	<i>Share of comprehensive income</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Piutang usaha tidak lancar	824.542	824.542
Beban ditangguhkan, neto	551.311	617.137
Estimasi pengembalian pajak (Catatan 21h)	276.167	306.587
Uang muka supplier	237.696	109.038
Hak penggunaan kapasitas jaringan intercity dan kabel laut serat optik	42.748	42.748
Uang jaminan	23.232	20.270
Piutang lain-lain	20.000	20.000
- pihak berelasi (Catatan 39)	20.000	20.000
Lain-lain	35.987	24.528
Sub-total	2.011.683	1.964.850
Cadangan penurunan nilai	(867.290)	(867.290)
Total	1.144.393	1.097.560

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk. dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU BTEL") Sementara berdasarkan perkara PKPU BTEL No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk. dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan dan STP, dimana utang sewa PT Bakrie Telecom Tbk. kepada Perseroan dan STP akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall*, tunai bertahap dan/ atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi konversi wajib (*mandatory convertible bonds*).

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Internux dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU Internux") Sementara berdasarkan perkara PKPU Internux No.126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 14 November 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat antara PT Internux dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan, Iforte, KIN dan STP, dimana utang sewa PT Internux kepada Perseroan, Iforte, KIN dan STP akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall* dan tunai bertahap.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2022	
	824.542	<i>Non-current trade receivables</i>
	617.137	<i>Deferred charges, net</i>
	306.587	<i>Estimated claims for tax refund (Note 21h)</i>
	109.038	<i>Advances for suppliers</i>
	42.748	<i>Right to use intercity network capacity and fiber optic sea cable</i>
	20.270	<i>Deposits</i>
	20.000	<i>Other receivables</i>
	20.000	<i>- related party (Note 39)</i>
	24.528	<i>Others</i>
Sub-total	1.964.850	Sub-total
	(867.290)	<i>Provision for impairment</i>
Total	1.097.560	Total

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk. a Temporary Suspension of Payment (the "SOP BTEL") based on SOP BTEL case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk. and the respective creditors, including the Company and STP, which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk. to the Company and STP will be paid through *Cash Waterfall mechanism*, cash installments and/ or settled by mandatory convertible bonds.

On September 17, 2018, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Internux a Temporary Suspension of Payment (the "Internux SOP") based on Internux SOP case No.126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On November 14, 2018, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated October 30, 2018, made by PT Internux and the respective creditors, including the Company, Iforte, KIN and STP, which the lease debt of Internux to the Company, Iforte, KIN and STP will be paid through *Cash Waterfall mechanism* and cash installments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 25 Januari 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Net Satu Indonesia (d/h PT Sampoerna Telecom Indonesia) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU Net1") Sementara berdasarkan perkara PKPU Net1 No. 473/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 5 September 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 September 2022 yang dibuat antara PT Net Satu Indonesia dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan, Iforte, KIN dan STP, dimana utang sewa PT Net Satu Indonesia kepada Perseroan, Iforte, KIN dan STP akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall* dan tunai bertahap.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk, PT Internux, dan PT Net Satu Indonesia masing-masing sebesar Rp462.992, Rp347.008 dan Rp14.542, dimana telah dibentuk cadangan penuh atas penurunan nilai.

Hak penggunaan kapasitas jaringan intercity dan kabel laut serat optik

Pada bulan Juli 2018, PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"), entitas anak dari Iforte menandatangani Perjanjian Pembayaran Sebagian Piutang dari PT Internux. Sebagian piutang dan hutang dari PT Internux kepada BIT dibayar dengan mengalihkan seluruh Hak Penggunaan Kapasitas Jaringan Intercity dan Kabel Laut Serat Optik senilai Rp70.000. Manajemen telah membentuk cadangan penuh atas penurunan nilai tersebut pada tahun 2021.

Beban ditangguhkan merupakan insentif sewa dan pengaturan tagihan ditangguhkan yang diberikan kepada beberapa pelanggan. Insentif sewa akan diamortisasi sepanjang umur sewa sedangkan pengaturan tagihan ditangguhkan akan dikompensasi dengan selisih antara pendapatan sewa dengan faktur tagihan sesuai dengan pengaturan tagihan oleh pelanggan terkait.

Uang muka supplier merupakan pembayaran dimuka kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel.

Uang jaminan merupakan pembayaran untuk jaminan atas sewa kantor yang akan dikembalikan pada saat berakhirnya jangka waktu.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

On January 25, 2022, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Net Satu Indonesia (formerly PT Sampoerna Telecom Indonesia) a Temporary Suspension of Payment (the "Net1 SOP") based on Net1 SOP case No. 473/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On September 5, 2022, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated September 5, 2022, made by PT Net Satu Indonesia and the respective creditors, including the Company, Iforte, KIN and STP, which the lease debt of PT Net Satu Indonesia to the Company, Iforte, KIN and STP will be paid through *Cash Waterfall mechanism* and cash installments.

As of December 31, 2023 and 2022, non-current trade receivables related to receivable from PT Bakrie Telecom Tbk, PT Internux, and PT Net Satu Indonesia amounting to Rp462,992, Rp347,008 and Rp14,542 respectively, have been provided with full allowance for impairment.

Right to use intercity network capacity and fiber optic sea cable

In July 2018, PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"), a subsidiary of Iforte, signed a Partial Debt Settlement Agreement with PT Internux. Portion of the obligation from PT Internux to BIT is paid with transferred the Right to Use Intercity Network Capacity and Fiber Optic Sea Cables which amounted to Rp70,000. Management has been provided full allowance for impairment for such amount in 2021.

Deferred charges represent lease incentives and deferred billing arrangements provided to certain customers. The lease incentives will be amortized over the leased term while the deferred billing arrangements will be net-off with the difference between the rental income and invoice billings in accordance with the arrangements for respective customers.

Advances for suppliers represent payments in advance to contractors to construct towers and shelters.

Deposits represent payment for security deposits for office rental, which will be refunded at the end of the terms.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**15. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN
USAHA LAINNYA**

Rincian utang pembangunan menara dan usaha lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	1.080.449	838.183	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	19.746	1.114	<i>US Dollar</i>
Dolar Singapura	32	-	<i>Singapore Dollar</i>
Pihak ketiga	1.100.227	839.297	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 37)			<i>Related parties (Note 37)</i>
Rupiah	106.204	-	<i>Rupiah</i>
Jumlah	1.206.431	839.297	<i>Total</i>

16. AKRUAL

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya pembangunan menara, serat optik dan konektivitas	949.339	972.466	<i>Tower, fiber optic and connectivity construction costs</i>
Bunga dan biaya keuangan	174.802	191.625	<i>Interest and financing cost</i>
Pemeliharaan	62.478	54.029	<i>Maintenance</i>
Pemasaran	51.307	64.635	<i>Marketing</i>
Provisi penurunan pendapatan	38.675	82.726	<i>Provision for reduction in revenue</i>
Premi call spread	10.151	10.142	<i>Premi call spread</i>
Jasa profesional	9.661	68.331	<i>Professional fees</i>
Local link	6.570	6.168	<i>Local link</i>
Penalti	3.051	8.055	<i>Penalty</i>
Data Center	2.246	2.179	<i>Data Center</i>
Lain-lain	153.113	78.836	<i>Others</i>
Total	1.461.393	1.539.192	<i>Total</i>

17. UTANG SEWA

Berikut adalah nilai tercatat neto dari utang sewa dan mutasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	1.977.557	2.545.550	<i>Beginning balance</i>
Akuisisi entitas anak	-	12.777	<i>Acquisition of subsidiaries</i>
Penambahan	1.208.501	680.634	<i>Additions</i>
Beban penambahan bunga (Catatan 33)	91.905	131.077	<i>Accretion of interest expenses (Note 33)</i>
Penyesuaian kurs mata uang asing	(10.233)	46.858	<i>Adjustment for foreign exchange</i>
Pengurangan	(73.709)	(137.550)	<i>Deductions</i>
Perubahan estimasi akuntansi (Catatan 3)	(1.073.773)	-	<i>Changes in accounting estimates (Note 3)</i>
Pembayaran	(1.674.830)	(1.301.789)	<i>Payments</i>
Saldo akhir	445.418	1.977.557	<i>Ending balance</i>
Bagian jangka pendek	(265.310)	(386.972)	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	180.108	1.590.585	<i>Non-current portion</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG SEWA (lanjutan)

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sehubungan dengan sewa Perseroan dan entitas anaknya:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Depresiasi dan amortisasi (Catatan 11 dan 29)	1.183.535	1.086.388	<i>Depreciation and amortization (Notes 11 and 29)</i>
Beban penambahan bunga (Catatan 33)	91.905	131.077	<i>Accretion of interest expenses (Note 33)</i>
Jumlah	1.275.440	1.217.465	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2023, total estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp260.019 dalam 1 tahun, Rp197.023 dalam 5 tahun, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Rp17.950.

Pada tanggal 31 Desember 2022, total estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan sebesar Rp495.814 dalam 1 tahun, Rp1.412.479 dalam 5 tahun, dan untuk tahun-tahun selanjutnya Rp466.405.

17. LEASE LIABILITIES (continued)

The following are the amounts recognized in profit or loss and for the year ended December 31, 2023 and 2022 in relation to leases of the Company and its subsidiaries:

As of December 31, 2023, the total estimated future minimum lease payments are Rp260,019 within 1 year, Rp197,023 within 5 years, and Rp17,950 thereafter.

As of December 31, 2022, the total estimated future minimum lease payments are Rp495,814 within 1 year, Rp1,412,479 within 5 years, and Rp466,405 thereafter.

18. UTANG BANK

31 Desember 2023	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Current portion	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ Non-current portion	Total/ Total	December 31, 2023
Fasilitas pinjaman				<i>Loans facilities</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
PT Bank Negara Indonesia Tbk	552.000	5.000.000	5.552.000	<i>PT Bank Negara Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	2.600.000	4.100.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.237.319	2.763.021	4.000.340	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)				<i>PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)</i>
(USD100.000.000 & Rp2.246.200)	2.246.200	1.541.600	3.787.800	<i>(USD100,000,000 & Rp2,246,200)</i>
PT Bank HSBC Indonesia	849.384	1.600.000	2.449.384	<i>PT Bank HSBC Indonesia</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	1.000.000	800.000	1.800.000	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.500.000	1.500.000	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	-	1.500.000	1.500.000	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	1.300.000	-	1.300.000	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
Bank of China (Hong Kong) Limited	875.000	90.000	965.000	<i>Bank of China (Hong Kong) Limited</i>
JPMorgan Chase Bank N.A (USD40.000.000)	-	616.640	616.640	<i>JPMorgan Chase Bank N.A (USD40,000,000)</i>
Citibank N. A	616.466	-	616.466	<i>Citibank N. A</i>
MUFG Bank Ltd (USD34.800.000)	-	536.477	536.477	<i>MUFG Bank Ltd (USD34,800,000)</i>
PT Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	500.000	<i>PT Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank CTBC Indonesia	203.414	-	203.414	<i>PT Bank CTBC Indonesia</i>
	10.879.783	18.547.738	29.427.521	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(4.126)	(92.411)	(96.537)	<i>Less: Unamortized costs of loans</i>
Sub-total pihak ketiga	10.875.657	18.455.327	29.330.984	<i>Sub-total third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 37)	197.000	6.379.314	6.576.314	<i>Related party (Note 37)</i>
PT Bank Central Asia Tbk				<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(500)	(8.831)	(9.331)	<i>Less: Unamortized costs of loans</i>
Sub-total pihak berelasi	196.500	6.370.483	6.566.983	<i>Sub-total related party</i>
Neto	11.072.157	24.825.810	35.897.967	<i>Net</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

31 Desember 2022	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Current portion	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ Non-current portion	Total/ Total	December 31, 2022
Fasilitas pinjaman Pihak ketiga				Loans facilities Third parties
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	5.000.000	5.000.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	2.915.000	3.015.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	3.000.000	3.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTPN, Tbk. (Member of SMBC Group)				PT Bank BTPN, Tbk. (Member of SMBC Group)
(USD100.000.000 & Rp1.345.000)	930.000	1.988.100	2.918.100	(USD100.000.000 & Rp1.345.000)
PT Bank HSBC Indonesia	-	2.600.000	2.600.000	PT Bank HSBC Indonesia
MUFG Bank Ltd (USD34.800.000 & Rp1.871.000)	1.456.000	962.439	2.418.439	MUFG Bank Ltd (USD34.800.000 & Rp1.871.000)
PT Bank Danamon Tbk	525.000	1.500.000	2.025.000	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	100.000	1.915.000	2.015.000	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Permata Tbk	600.000	1.415.000	2.015.000	PT Bank Permata Tbk
Bank of China (Hong Kong) Limited	875.000	500.000	1.375.000	Bank of China (Hong Kong) Limited
JPMorgan Chase Bank N.A (USD40.000.000 & Rp378.747)	378.747	629.240	1.007.987	JPMorgan Chase Bank N.A (USD40.000.000 & Rp378.747)
PT Bank UOB Indonesia	1.000.000	-	1.000.000	PT Bank UOB Indonesia
PT Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	500.000	PT Maybank Indonesia Tbk
Citibank N.A	322.000	-	322.000	Citibank N.A
	6.786.747	22.424.779	29.211.526	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(10.064)	(115.465)	(125.529)	Less: Unamortized costs of loans
Sub-total pihak ketiga	6.776.683	22.309.314	29.085.997	Sub-total third parties
Pihak berelasi (Catatan 37)				Related party (Note 37)
PT Bank Central Asia Tbk	1.286.750	6.964.250	8.251.000	PT Bank Central Asia Tbk
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(785)	(11.981)	(12.766)	Less: Unamortized costs of loans
Sub-total pihak berelasi	1.285.965	6.952.269	8.238.234	Sub-total related party
Neto	8.062.648	29.261.583	37.324.231	Net

Biaya pinjaman merupakan biaya ditanggungkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.031 (31 Desember 2022: Rp57.023) (Catatan 33).

Costs of loans represent deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective period of the loans.

Amortization of costs of loans and commitment fees recognized for the year ended December 31, 2023 amounted to Rp55,031 (December 31, 2022: Rp57,023) (Note 33).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

18. BANK LOANS (continued)

18. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank BTPN Tbk	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ interest payment period	Jaminan/ Security
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Desember 2021/ December 8, 2021 (amandemen terakhir tanggal 4 September 2023/ last amendment dated September 4, 2023)	Rp2.246.200	Rp253.800	12 bulan/ month (Perseroan/ the Company), dan/ and 6 bulan/ months (Iforte, STP, BIT dan VTS). Sejak tanggal penarikan terakhir from the facility's last utilization 84 bulan/ month. Tidak boleh melebihi tanggal 29 Juni 2029/ but shall not exceed June 29, 2029	12 bulan/ month (Perseroan/ the Company) dan/ and 6 bulan/ months (Iforte, STP, BIT dan VTS)	Perseroan memberikan jaminan perusahaan dan tanggung renteng antar para pemegang/ the Company provides corporate guarantee and joint several & liability among the borrowers
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 Maret 2022/ March 30, 2022 (amandemen terakhir tanggal 6 April 2022/ last amendment dated April 6, 2022)	USD100.000.000	-	(fasilitas pinjaman revolving/ revolving loan facility)	6 bulan atau yang disepakati para pihak/ 6 months or other time period agreed by both parties	STP dan Iforte memberikan jaminan perusahaan/ STP and Iforte provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 Mei 2023/ May 30, 2023	-	Rp900.000	Rp900.000 (fasilitas pinjaman revolving/ revolving loan facility)	1 bulan/ month	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
MUFG Bank Ltd					
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 24 Februari 2022/ February 24, 2022 (amandemen terakhir tanggal 19 Januari 2023/ last amendment dated January 19, 2023)	JPY7.954.800.000 Saldo/ balance Rp-	N/A/ Expired	14 Februari 2025/ February 14, 2025	Triwulan/ Quarterly	Tidak ada/ None
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Februari 2017/ February 28, 2017 (amandemen terakhir tanggal 29 Desember 2023/ last amendment dated December 29, 2023)	-	Rp1.350.000	Rp1.350.000 (fasilitas pinjaman revolving/ revolving loan facility). Fasilitas dapat dicairkan dalam multi-currency/ The facility can be drawn in multi-currency	1 atau/ or 3 bulan/ months	Tanggung renteng/ Joint several & liability
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Juli 2021/ July 14, 2021 (amandemen terakhir tanggal 19 Januari 2023/ last amendment dated January 19, 2023)	USD34.800.000	-	USD34.800.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	1 atau/ or 3 bulan/ months	Tidak ada/ None

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia

- Fasilitas tanggal/ Facility dated 23 Oktober 2018/ October 23, 2018 (amandemen terakhir tanggal 14 September 2023/ last amendment dated September 14, 2023)
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 2 Juni 2022/ June 2, 2022

Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
Perseroan/ the Company, BIT, Iforte dan/ and STP	Rp850.000 (fasilitas pinjaman berputar/ revolving loan facility)	Rp849.384	Rp616	Jatuh tempo berdasarkan konfirmasi dari bank/ due for repayment based on confirmation from the bank	1, 3, 6 atau/ or 12 bulan/ months	Tidak ada/ None
Perseroan/ the Company	Tranche A: Rp1.300.000	Rp1.300.000 Saldo/ balance	-	Tranche A: 2 Juni 2025/ June 2, 2025	1, 2, atau/ or 3 bulan/ months	Tidak ada/ None
	Tranche B: Rp1.300.000	Rp1.300.000 Saldo/ balance	-	Tranche B: 2 Juni 2028/ June 2, 2028		

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- Fasilitas tanggal/ Facility dated 25 Mei 2022/ May 25, 2022
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Agustus 2023/ August 28, 2023

Perseroan/ the Company dan/ and STP	Rp3.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ committed long term facility)	Rp3.000.000 Saldo/ balance	-	25 Mei 2025/ May 25, 2025	1 atau/ or 3 bulan/ months	STP memberikan jaminan perusahaan/ STP provides corporate guarantee
Perseroan/ the Company dan/ and Iforte	Tranche A: Rp1.000.000 (Perseroan/ the Company)	Rp1.500.000	-	28 Agustus 2024/ August 28, 2024	Disepakati para pihak/ Time period agreed by both parties	STP memberikan jaminan perusahaan/ STP provides corporate guarantee
	Tranche B: Rp500.000 (Iforte)					

JPMorgan Chase Bank N.A

- Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 April 2018/ April 20, 2018 (amandemen terakhir tanggal 14 April 2023/ last amendment dated April 14, 2023)

Perseroan/ the Company, KIN, STP, dan/ and BIT	Tidak melebihi/ shall not exceed Rp700.000	-	Rp700.000	14 April 2024/ April 14, 2024	1 bulan/ month	Tanggung renteng/ Joint several & liability
	Maksimal/ up to Rp700.000 (pinjaman berputar/ revolving loan, cerukan/ overdraft) yang dibagi atas/ divided into:					
	-Perseroan/ the Company: Rp700.000					
	-Iforte: Rp500.000					
	-KIN: Rp50.000					
	-STP: Rp700.000					
	-BIT : Rp100.000					
	Maksimal/ up to Rp500.000 (bank garansi/ bank guarantee) yang dibagi atas/ divided into:					
	-Perseroan/ the Company: Rp500.000					
	-Iforte: Rp200.000					

83

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

**JPMorgan Chase Bank N.A (lanjutan/
continued)**

- Fasilitas tanggal/ Facility dated 29 Maret 2022/ March 29, 2022 (amandemen terakhir tanggal 22 Juni 2022/ last amendment dated June 22, 2022)
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 29 Maret 2022/ March 29, 2022 (amandemen terakhir tanggal 22 Juni 2022/ last amendment dated June 22, 2022)

Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
Perseroan/ the Company	USD20.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	USD20.000.000	-	31 Maret 2028/ March 31, 2028	1, 2 atau/ or 3 bulan/ months	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ Iforte and STP provides corporate guarantee
Perseroan/ the Company	USD20.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	USD20.000.000	-	31 Maret 2028/ March 31, 2028	1, 2, atau/ or 3 bulan/ months	Iforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ Iforte and STP provides corporate guarantee

PT Bank Central Asia Tbk

- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Desember 2016/ December 21, 2016 (amandemen terakhir tanggal 5 Oktober 2023/ last amendment dated October 5, 2023)

Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
Perseroan untuk semua fasilitas/ the Company for all types of facilities	Fasilitas/ Facility: Rp750.000 (pinjaman berputar/ revolving loan)	Rp750.000 Saldo/ balance	N/A/ Expired	A: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ due and fully repaid;		
Iforte: B, H, I, J dan/ and K	B: Rp1.500.000 (money market)	Rp197.000	Rp1.303.000	B: 16 September 2024/ September 16, 2024;		
	C: Rp2.000.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp2.000.000 Saldo/ balance	N/A/ Expired	C: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ due and fully repaid;		
KIN: B, H, I, J dan/ and K	D: Rp2.000.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp2.000.000	N/A/ Expired	D: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ due and fully repaid;		
STP: B, H, I, J dan/ and K	E: Rp1.000.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp1.000.000	N/A/ Expired	E: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ due and fully repaid;		
	F: Rp1.000.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp1.000.000	-	F: 27 Oktober 2026/ October 27, 2026;		
	G: Rp500.000 (time loan/ time loan)	Rp500.000 Saldo/ balance	N/A/ Expired	G: jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ due and fully repaid;		
	H: Rp1.000.000 (time loan/ time loan)	Rp1.000.000	-	H: 20 Desember 2026/ December 20, 2026;		
	I: Rp1.500.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp1.500.000 Saldo/ balance	-	I: 25 Agustus 2028/ August 25, 2028;		
	J: Rp1.000.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp1.000.000	-	J: 28 Desember 2028/ December 28, 2028 dan/ and		
	K: Rp3.400.000 (kredit investasi/ investment credit)	Rp1.355.686	Rp1.355.686	K: 60 bulan sejak tanggal berakhirnya periode ketersediaan atau diteruskannya seluruh fasilitas K/ 60 months after the end of the availability period of facility K		

84

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan/ continued)	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 25 Januari 2023/ January 25, 2023	VTS	Rp2.000 (Fasilitas pinjaman dengan cicilan/ installment loan facility)	Rp2.000 Saldo/ balance Rp-	N/A/ Expired	25 Januari 2026/ January 25, 2026	1 bulan/ month	Tanah dan bangunan/ Land and building
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 19 November 2014/ November 19, 2014 (amandemen terakhir tanggal 5 November 2022/ last amendment dated November 18, 2022)	Perseroan/ the Company	USD50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	USD50.000.000	18 November 2027/ November 18, 2027	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 Agustus 2019/ August 16, 2019 (amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2022/ last amendment dated December 5, 2022)	lforte	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp500.000 Saldo/ balance Rp-	N/A / Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 6 Mei 2020/ May 6, 2020	lforte	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp500.000 Saldo/ balance Rp-	N/A / Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Agustus 2020/ August 14, 2020 (amandemen terakhir tanggal 1 Desember 2022/ last amendment dated December 1, 2022)	Kohinoor dan/ and PMP	Rp30.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp30.000 Saldo/ balance Rp-	N/A / Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya/ Facility has expired and fully repaid	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 1 Desember 2022/ December 1, 2022	lforte dan/ and BIT	Maksimal/ up to Rp1.500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility), yang dibagi atas/ divided into: - lforte: Rp1.500.000 - BIT: Rp800.000	Rp1.500.000	-	60 bulan setelah tanggal penggunaan awal/ 60 months after initial	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 12 Desember 2023/ December 12, 2023	Perseroan/ the Company, lforte, STP dan/ and BIT	Maksimal/ up to Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility), yang dibagi atas/ divided into: - lforte, STP, BIT: Rp1.000.000 - Perseroan/ the Company: Rp725.000	-	Rp1.000.000	17 Desember 2024/ December 17, 2024	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee

85

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

Bank of China (Hong Kong) Limited	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 November 2019/ November 8, 2019	Perseroan/ the Company	A: Rp875.000 (Fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility) B: USD60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	Rp875.000 USD60.000.000 Saldo/ balance Rp-	-	A: 8 November 2024/ November 8, 2024 B: telah berakhir/ expired	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Januari 2022/ January 21, 2022	Perseroan/ the Company	Rp500.000 (Fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp500.000 Saldo/ balance Rp90.000	-	21 Januari 2026/ January 21, 2026	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Februari 2022/ February 28, 2022	Perseroan/ the Company	USD60.000.000 (Fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan facility)	-	USD60.000.000	Ketika terdapat permintaan pelunasan oleh Kreditur upon demand of repayment by the Lender	yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provides corporate guarantee
PT Bank Mizuho Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 Desember 2020/ December 30, 2020 (amandemen terakhir tanggal 14 April 2023/ last amendment dated April 14, 2023)	Perseroan/ the Company, lforte, KIN dan/ and STP	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi/ revolving loan facility which shall not exceed Rp1.000.000: - Maksimal/ up to Rp1.000.000 (Perseroan/ the Company, lforte, dan/ and STP) - Maksimal/ up to Rp50.000 (KIN)	Rp1.000.000	-	14 April 2024/ April 14, 2024	6 bulan/ months	Perseroan dan STP memberikan jaminan perusahaan/ the Company and STP provides corporate guarantee
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 29 Agustus 2021/ August 29, 2022 (amandemen terakhir tanggal 17 Maret 2023/ last amendment dated March 17, 2023)	Perseroan/ the Company	Rp1.500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ term loan facility)	Rp1.500.000 Saldo/ balance Rp800.000	-	29 Agustus 2027/ August 29, 2027	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Tidak ada/ None.
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 Mei 2023/ May 30, 2023	STP	Rp400.000	-	Rp400.000	30 Mei 2025/ Mei 30, 2025	12 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
PT Bank UOB Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 23 Februari 2021/ February 23, 2021 (amandemen terakhir tanggal 15 Agustus 2023/ last amendment dated August 15, 2023)	Perseroan/ the Company, lforte dan/ and KIN	Rp1.300.000 (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja/ Revolving working capital loan facility)	Rp1.300.000	-	23 Februari 2024/ February 23, 2024	1, 3 atau/ or 6 bulan/ months	Tanggung renteng/ Joint several & liability

86

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 11 Oktober 2022/ October 11, 2022 (amandemen terakhir tanggal Oktober 2023/ last amendment dated October 17, 2023)	Rp500.000 (fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan facility) termasuk/ including Rp100.000 (fasilitas pinjaman koran/ overdraft facility)	Rp500.000	-	10 Oktober 2024/ October 10, 2024	1 atau/ or 3 bulan/ months	Tanggung renteng/ Joint several & liability
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 28 Juni 2021/ June 28, 2021 (amandemen terakhir tanggal Oktober 2023/ last amendment date October 20, 2023)	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ revolving loan facility)	-	Rp1.000.000	12 September 2024/ September 12, 2024	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Tanggung renteng/ Joint several & liability
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated (amandemen terakhir tanggal 31 Januari 2023/ last amendment date January 31, 2023)	Rp500.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp500.000	-	21 Desember 2026/ December 21, 2026	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Tidak ada/ None
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated (amandemen terakhir tanggal 21 Maret 2022/ March 21, 2022)	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp1.000.000	-	21 Maret 2027/ March 21, 2027	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Tanggung renteng/ Joint several & liability
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 Agustus 2021/ August 20, 2021 (amandemen terakhir tanggal 8 Agustus 2023/ last amendment date August 8, 2023)	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp1.000.000	-	48 bulan sejak penarikan pertama/ 48 months after the first utilization	1 bulan/ month	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Desember 2021/ December 8, 2021 (amandemen terakhir tanggal 8 Agustus 2023/ last amendment date August 8, 2023)	Rp1.500.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp1.500.000	-	60 bulan sejak penarikan pertama/ 60 months after the first utilization	1, 3, atau/ or 6 bulan/ months	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provide corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 14 Februari 2023/ February 14, 2023 (amandemen terakhir tanggal 2 November 2023/ last amendment date November 2, 2023)	Rp800.000 (fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan facility) termasuk/ including Rp50.000 (fasilitas pinjaman koran/ overdraft facility)	Rp878.304	Rp121.696	14 Februari 2024/ February 14, 2024	Periode yang disepakati para pihak/ other time period agreed by both parties	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee

87

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (lanjutan/ continued)							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 29 Mei 2023/ May 29, 2023 (amandemen terakhir tanggal 2 November 2023/ last amendment date November 2, 2023)	Rp462.500 (fasilitas pinjaman jangka panjang/ long term loan facility) Rp405.804 Rp475.000 (fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan facility)	Rp462.500 Saldo/ Rp405.804 Rp416.232	- Rp58.788	5 Juni 2027/ June 5, 2027	1 bulan/ month	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee
PT Bank CIMB Niaga, Tbk., MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank BTPN, Tbk.							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 1 Desember 2021/ December 1, 2021	Rp5.250.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp5.250.000 Saldo/ balance Rp-	N/A/ Expired	1 Desember 2026/ December 1, 2026	1 atau/ or 3 bulan/ months	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provides corporate guarantee
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.							
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 16 September 2021/ September 16, 2021 (amandemen terakhir tanggal Agustus 2022/ last amendment dated August 9, 2022)	Rp3.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp3.000.000	-	60 bulan penandatanganan perubahan perjanjian kredit/ 60 months from the signing amendment of the credit agreement	1 bulan/ month	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provide the corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated (amandemen terakhir tanggal 9 Agustus 2022/ last amendment dated August 9, 2022)	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp1.000.000	-	9 Juni 2027/ June 9, 2027	1 bulan/ month	lforte dan STP memberikan jaminan perusahaan/ lforte and STP provide corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 13 Mei 2022/ May 13, 2022	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	Rp1.000.000	-	12 Mei 2027/ May 12, 2027	1 bulan/ month	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 13 Juni 2023/ June 13, 2023	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ term loan facility)	-	Rp1.000.000	60 bulan setelah 13 Juni 2023/ 60 months after June 13, 2023	1 bulan/ month	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee
-	Fasilitas tanggal/ Facility dated 13 Juni 2023/ June 13, 2023	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman bejangkal/ revolving loan facility)	Rp552.000	Rp448.000	24 bulan setelah 13 Juni 2023/ 24 months after June 13, 2023	1 bulan/ month	Persoan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee

88

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ Entity	Jumlah fasilitas/ Total facility	Fasilitas yang telah dicairkan/ Drawn facility	Fasilitas yang belum dicairkan/ Undrawn facility	Jangka waktu fasilitas/ Final maturity date	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Jaminan/ Security
Citibank, N.A							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 8 Agustus 2022/ August 8, 2022	Perseroan/ the Company, Iforte, STP, BIT, dan/ and KIN	Rp650.000 (fasilitas pinjaman revolving loan facility) Maksimal/ up to Rp200.000 untuk/ for KIN	Rp 616.486	Rp33.534	Jatuh tempo berdasarkan konfirmasi dari bank/ due for repayment based on confirmation from the bank	1, 3, atau/ or 6 bulan/ months	Perseroan memberikan jaminan perusahaan/ the Company provide corporate guarantee
PT Bank CTBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 20 November 2023/ November 20, 2023	Perseroan/ the Company dan/ and Iforte	Rp240.000 (fasilitas pinjaman revolving loan facility)	Rp203.414	Rp36.586	Jatuh tempo 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian fasilitas/ Due 12 months from the signing date of the facility agreement	1 bulan/ 1 month	Tanggung renteng/ Joint several & liability

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (lanjutan)

18. BANK LOANS (continued)

Seluruh pinjaman yang diperoleh untuk modal kerja, belanja modal, pengembangan bisnis dan tujuan umum untuk Perseroan dan entitas anaknya.

Purpose of the borrowings is for working capital, capital expenditure, business development and general purposes of the Company and its subsidiaries.

Pada tahun 2023, tingkat suku bunga berkisar antara 5,50% sampai dengan 6,90% per tahun atas pinjaman mata uang Rupiah (berkisar antara 5,00% sampai dengan 7,43% pada tahun 2022), berkisar antara 6,20% sampai dengan 6,35% per tahun atas pinjaman mata uang Dolar AS (berkisar antara 6,20% sampai dengan 6,35% pada tahun 2022).

In 2023, interest rates for borrowings ranged from 5.50% to 6.90% per annum for Rupiah (ranging from 5.00% to 7.43% in 2022), 6.20% to 6.35% per annum for US Dollar (ranging from 6.20% to 6.35% in 2022).

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin dan tolok ukur lain yang disepakati.

The loan facility bears annual interest rate of JIBOR plus margin and other benchmark agreed.

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio dan net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

The Company and its subsidiaries are required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA. As of December 31, 2023 and 2022, the Company and its subsidiaries were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

Fasilitas Lainnya

Other Facilities

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp100.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah dengan Addendum V tertanggal 5 Juni 2023. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA dan BIT. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk jaminan pembayaran, jaminan pembayaran atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/ atau Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA dan BIT.

The Company was granted a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. amount of Rp100,000 based on Bank Guarantee Facility Agreement dated December 6, 2017 and lastly amended by Addendum V dated June 5, 2023. The bank guarantee facility is a global line facility which can be used by Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA and BIT. The bank guarantee can be issued within maximum of 12 months up to June 5, 2024. The purposes of this facility are for bid bond, or performance bond or surety bond, of the Company and/ or Iforte, KIN, IGI, DNT, GTP, QTR, Konsorsium Iforte HTS, STP, SIP, REJA and BIT business activities.

Iforte memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp100.000 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tertanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank tertanggal 9 Agustus 2023. Fasilitas bank garansi tersebut dapat digunakan oleh Konsortium Iforte HTS, QTR, IGI dan BIT. Fasilitas bank garansi ini berlaku sampai dengan 8 Agustus 2024.

Iforte was granted a bank guarantee facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in the amount of Rp100,000 based on the Bank Guarantee Agreement dated August 9, 2022 as lastly amended by the Bank Guarantee Amendment Agreement dated August 9, 2023. The bank guarantee can be used by Konsortium Iforte HTS, QTR, IGI and BIT. The maturity of bank guarantee facility is up to August 8, 2024.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (lanjutan)

Fasilitas Lainnya (lanjutan)

Perseroan, BIT, Iforte dan STP memperoleh fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia berupa Trade Working Capital - Buyer Loan sebesar Rp850.000 berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi pada tanggal 14 September 2023.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Treasury Line sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Treasury Line tertanggal 28 Agustus 2023 dengan limit fasilitas sejumlah USD33.000.000 ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Perubahan Kesembilan tertanggal 14 April 2023. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/ jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 14 April 2024. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perseroan dan Iforte telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 20 Oktober 2023 ("Fasilitas TL Danamon"). Fasilitas TL Danamon ini berlaku sampai dengan 12 September 2024.

Pada tanggal 14 September 2023, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk untuk Transaksi Valuta Asing dengan Citibank, N.A., Jakarta Branch (Catatan 35e).

Pada tanggal 20 November 2023, Perseroan dan Iforte telah menandatangani Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing dengan PT Bank CTBC Indonesia (Catatan 35e).

18. BANK LOANS (continued)

Other Facilities (continued)

The Company, BIT, Iforte and STP were granted facility from PT Bank HSBC Indonesia in the form of Trade Working Capital - Buyer Loan in the amount of Rp850,000 based on the First Amendment to Corporate Facility Agreement dated September 14, 2023.

On March 11, 2020, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed the Treasury Line Agreement as lastly amended by the Addendum I of Treasury Line Agreement dated August 28, 2023 with facility limit amounting USD33,000,000 ("Facility TL Mandiri 2"). The purpose of this Facility TL Mandiri 2 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 2 is up to November 27, 2024.

The Company has granted a bank guarantee facility from JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch in the amount of Rp500,000 based on Facility Agreement dated April 20, 2018 and lastly amended by the Ninth Amendment Letter dated is April 14, 2023. The bank guarantee facility can be issued within maximum of 12 months up to April 14, 2024. The purposes of this facility are for surety bond, bid bond, or performance bond of the Company's business activities.

On August 8, 2023, the Company and Iforte has signed Foreign Exchange Transaction Agreement as lastly amended with Amendment of Foreign Exchange Transaction Agreement dated October 20, 2023 with PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon TL Facility"). This Danamon TL Facility is up to September 12, 2024.

On September 14, 2023, Company has signed Master Agreement for Foreign Exchange Transaction with Citibank, N.A., Jakarta Branch (Note 35e).

On November 20, 2023, the Company and Iforte have signed General Conditions on Foreign Exchange Contract with PT Bank CTBC Indonesia (Note 35e).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. UTANG OBLIGASI

19. BONDS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022			
	Saldo terutang/ Amount payable		Saldo terutang/ Amount payable			
	Mata uang/ Currencies	Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	Mata uang asal/ Original currency	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Bagian jangka pendek						Short-term portion
Obligasi 2023	Rupiah	3.558.650	3.558.650	-	-	2023 Bonds
Obligasi 2022	Rupiah	-	-	931.000	931.000	2022 Bonds
Obligasi 2021	Rupiah	1.593.250	1.593.250	-	-	2021 Bonds
Obligasi 2020	Rupiah	-	-	84.000	84.000	2020 Bonds
Obligasi 2016	Rupiah	-	-	103.000	103.000	2016 Bonds
CGIF	Dolar Singapura	180.000.000	2.108.095	-	-	CGIF
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(7.791)		(4.068)	Unamortized costs of bonds
Neto			7.252.204		1.113.932	Net
Bagian jangka panjang						Long-term portion
Obligasi 2023	Rupiah	441.350	441.350	-	-	2023 Bonds
Obligasi 2022	Rupiah	69.000	69.000	69.000	69.000	2022 Bonds
Obligasi 2021	Rupiah	744.000	744.000	2.337.250	2.337.250	2021 Bonds
Obligasi 2020	Rupiah	67.000	67.000	67.000	67.000	2020 Bonds
CGIF	Dolar Singapura	-	-	180.000.000	2.098.634	CGIF
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(3.837)		(15.436)	Unamortized costs of bonds
Neto			1.317.513		4.556.448	Net

Utang obligasi/ Bonds payable	Tanggal emisi/ Date of issue	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Pokok obligasi/ Bonds principal	Periode pembayaran bunga/ Interest payment method	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per year	Wali amanat/ Trustee	Perusahaan pemeringkat/ Rating company	Peringkat/ Rating
Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024/ The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024								
Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF")	27 November/ November 2014	27 November/ November 2024	SGD180.000.000	Tengah tahunan/ Semi annually	3,25%	DB Trustees (Hong Kong) Limited	Standard and Poor's Ratings	AA
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016/ Sustainable Bonds I of Protelindo Stage I Year 2016								
Obligasi 2016 Seri A/ Bonds 2016 Series A	23 November/ November 2016	27 November/ November 2019	Rp661.000	Kuartalan/ Quarterly	7,90%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2016 Seri B/ Bonds 2016 Series B	23 November/ November 2016	27 November/ November 2021	Rp36.000	Kuartalan/ Quarterly	8,25%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2016 Seri C/ Bonds 2016 Series C	23 November/ November 2016	27 November/ November 2023	Rp103.000	Kuartalan/ Quarterly	8,75%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020/ Sustainable Bonds II of Protelindo Stage I Year 2020								
Obligasi 2020 Seri A/ Bonds 2020 Series A	3 September/ September 2020	3 September/ September 2023	Rp84.000	Kuartalan/ Quarterly	7,00%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2020 Seri B/ Bonds 2020 Series B	3 September/ September 2020	3 September/ September 2025	Rp67.000	Kuartalan/ Quarterly	7,70%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021/ Sustainable Bonds II of Protelindo Stage II Year 2021								
Obligasi 2021 Seri A/ Bonds 2021 Series A	17 Desember/ December 2021	17 Desember/ December 2022	Rp1.011.750	Kuartalan/ Quarterly	3,60%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2021 Seri B/ Bonds 2021 Series B	17 Desember/ December 2021	17 Desember/ December 2024	Rp1.593.250	Kuartalan/ Quarterly	5,30%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2021 Seri C/ Bonds 2021 Series C	17 Desember/ December 2021	17 Desember/ December 2026	Rp744.000	Kuartalan/ Quarterly	6,10%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022/ Sustainable Bonds III of Protelindo Stage I Year 2022								
Obligasi 2022 Seri A/ Bonds 2022 Series A	9 Agustus/ August 2022	19 Agustus/ August 2023	Rp931.000	Kuartalan/ Quarterly	4,50%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2022 Seri B/ Bonds 2022 Series B	9 Agustus/ August 2022	9 Agustus/ August 2025	Rp69.000	Kuartalan/ Quarterly	6,00%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023/ Sustainable Bonds III of Protelindo Stage II Year 2023								
Obligasi 2023 (I) Seri A/ Bonds 2023 (I) Series A	24 Maret/ March 2023	31 Maret/ March 2024	Rp2.761.150	Kuartalan/ Quarterly	6,35%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2023 (I) Seri B/ Bonds 2023 (I) Series B	24 Maret/ March 2023	24 Maret/ March 2026	Rp145.350	Kuartalan/ Quarterly	6,60%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023/ Sustainable Bonds III of Protelindo Stage III Year 2023								
Obligasi 2023 (II) Seri A/ Bonds 2023 (II) Series A	8 Juni/ June 2023	18 Juni/ June 2024	Rp797.500	Kuartalan/ Quarterly	6,15%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA
Obligasi 2023 (II) Seri B/ Bonds 2023 (II) Series B	8 Juni/ June 2023	8 Juni/ June 2026	Rp296.000	Kuartalan/ Quarterly	6,50%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Indonesia Ratings	AAA

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

19. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi 2016 sampai dengan 2023 mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi 2020 dan 2022 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2020 dan 2022 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

Pada tanggal 21 November 2021, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri B.

Pada tanggal 23 November 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri C.

Pada tanggal 26 Desember 2022, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2021 Seri A.

Pada tanggal 21 Agustus 2023, Protelindo telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2022 Seri A.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. BONDS PAYABLE (continued)

The trustee agreement provides for bonds 2016 until 2023 for several covenants of the company, including, without limitation:

- A prohibition to provide loans to any party, including to the Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;*
- To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and*
- To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.*

As of 31 December 2023 and 2022, the Company complied with the aforementioned covenants.

The proceeds from the Offering of Sustainable Bonds after deducting the fees, have been entirely used for partial repayment of the Company's bank loan.

The Company may buy back the Bonds 2020 and 2022 in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

The Bonds 2020 and 2022 are not secured by any specific collateral.

On November 21, 2019, the Company has repaid all the outstanding amount for the series A Bonds 2016.

On November 21, 2021, the Company has repaid all the outstanding amount for the series B Bonds 2016.

On November 23, 2023, the Company has repaid all the outstanding amount for the series C Bonds 2016.

On December 26, 2022, Protelindo has repaid all the outstanding amount for the series A Bonds 2021.

On August 21, 2023, Protelindo has repaid all the outstanding amount for the series A Bonds 2022.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

19. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Pada tanggal 22 Juli 2016 diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 3,27%.

20. PROVISI JANGKA PANJANG

	1 Januari/ January 1, 2023	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expensed	Pertambahan bunga/ Accretion of interest	31 Desember/ December 31, 2023	
Estimasi biaya pembongkaran menara	273.246	22.574	(5.321)	23.515	314.014	<i>Estimated cost of dismantling of towers</i>

	1 Januari/ January 1, 2022	Akuisisi entitas anak (Catatan 1c) Acquisition of/ subsidiaries (Note 1c)	Provisi tambahan atau (pengurangan)/ Additional or (reduction) provision*	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expensed	Pertambahan bunga/ Accretion of interest	31 Desember/ December 31, 2022	
Estimasi biaya pembongkaran menara	477.534	2.316	(226.445)	(9.149)	28.990	273.246	<i>Estimated cost of dismantling of towers</i>

*termasuk dampak perubahan tingkat diskonto, setelah penyesuaian bunga, sebesar Rp243.313.

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari tingkat diskonto sebesar 8,04% (31 Desember 2022: 8,04%) dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan adalah 32,06 tahun (31 Desember 2022: 31,97 tahun).

Provisi jangka panjang akan di realisasi ketika pembongkaran menara.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. BONDS PAYABLE (continued)

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024

The Senior Bonds were listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") on November 28, 2014.

On July 22, 2016 approval was obtained from bondholders through the Consent Solicitation Memorandum to amend the provisions related to the transfer of the initial issuer of the Senior Bonds, from Protelindo Finance B.V. to the Company. In connection with the abovementioned agreements, the Company replaced Protelindo Finance B.V. position as an issuer of Senior Bonds to the bondholders.

The effective interest rate for the year ended December 31, 2023 and 2022 was 3.27%.

20. LONG-TERM PROVISION

Significant assumptions as of December 31, 2023 consist of discount rate of 8.04% (December 31, 2022: 8.04%) and remaining periods before dismantling are 32.06 years (December 31, 2022: 31.97 years).

Long-term provision will be realized when the related towers have been dismantled.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Aset lancar		
Pajak pertambahan nilai Entitas anak	477.617	407.427
Total	477.617	407.427

b. Utang pajak

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Perseroan		
Pajak pertambahan nilai	34.533	38.332
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	11.212	6.723
Pasal 21	516	2.495
Pasal 23/26	32	34
Pasal 29	31.398	1.913
Sub-total	77.691	49.497
Entitas anak		
Pajak pertambahan nilai	69.428	42.941
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	8.737	5.098
Pasal 21	11.198	4.894
Pasal 23/26	2.009	1.000
Pasal 29	10.141	49.393
Sub-total	101.513	103.326
Total	179.204	152.823

21. TAXATION

a. Prepaid taxes

Current assets
Value-added tax
The subsidiaries
Total

b. Taxes payable

The Company
Value-added tax
Income taxes
Article 4(2)
Article 21
Articles 23/26
Article 29
Sub-total
The subsidiaries
Value-added tax
Income taxes
Article 4(2)
Article 21
Articles 23/26
Article 29
Sub-total
Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan fiskal, beban pajak kini dan klaim/ utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.125.029	4.490.674
Laba entitas anak sebelum beban pajak final, pajak penghasilan dan eliminasi	(2.079.736)	(1.993.321)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan - Perseroan	2.045.293	2.497.353
Perbedaan temporer		
Depresiasi aset tetap	(125.090)	(157.725)
Amortisasi aset takberwujud	2.911	3.665
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	43.288	10.433
Penambahan cadangan kerugian Kredit ekspektasian piutang usaha	24.899	2.339
Beban sewa	349.586	409.687
Perbedaan tetap		
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak final	(10.726)	(18.235)
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	552.209	576.470
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(4.391.811)	(3.994.934)
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	2.259.583	1.776.702
Penghasilan fiskal	750.142	1.105.755
Beban pajak kini		
Perseroan	165.031	243.266
Entitas anak	180.374	175.873
Beban pajak kini konsolidasian	345.405	419.139
Dikurangi pembayaran pajak dimuka		
Perseroan		
Pasal 22	239	941
Pasal 23	33.161	44.360
Pasal 25	100.233	196.052
Entitas anak	172.288	151.513
Sub-total	305.921	392.866

21. TAXATION (continued)

b. Taxes payable (continued)

The reconciliations between profit before final tax and corporate income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, fiscal tax income, current tax expense and corporate income tax claim/ payable are as follows:

Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Subsidiaries income before final tax, corporate income tax expense and eliminations
Income before final tax and corporate income tax expense - the Company
Temporary differences
Fixed assets depreciation
Intangible assets amortization
Deductible amortization and depreciation
Addition of allowance for expected credit loss of trade receivables
Expenses related to leases
Permanent differences
Interest income already subjected to final tax
Non-deductible expenses, net
Revenue subject to final tax
Expenses related to revenue subject to final tax
Fiscal tax income
Current tax expense
The Company
The subsidiaries
Consolidated current tax expense
Less prepaid taxes
The Company
Article 22
Article 23
Article 25
The subsidiaries
Sub-total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Utang pajak penghasilan badan			Corporate income tax payable
Perseroan	31.398	1.913	The Company
Entitas anak	10.141	49.393	The subsidiaries
	41.539	51.306	
Estimasi klaim pajak			Estimated claims for tax refund
Entitas anak	(2.055)	(25.033)	The subsidiaries
	(2.055)	(25.033)	
Pajak penghasilan final			Final tax
Perseroan	439.181	399.493	The Company
Entitas anak	118.737	111.727	The subsidiaries
Total	557.918	511.220	Total

c. Analisa beban pajak penghasilan

c. Analysis of corporate income tax expense

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Perseroan			The Company
Beban pajak kini	165.031	243.266	Current tax expense
Manfaat pajak tangguhan	(45.199)	(32.223)	Deferred tax benefits
Sub-total	119.832	211.043	Sub-total
Entitas anak			The subsidiaries
Beban pajak kini	180.374	175.873	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(57.972)	64.580	Deferred tax expense (benefits)
Sub-total	122.402	240.453	Sub-total
Konsolidasian			Consolidated
Beban pajak kini	345.405	419.139	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(103.171)	32.357	Deferred tax expense (benefits)
Total	242.234	451.496	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

d. Reconciliation of corporate income tax expense

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan konsolidasian menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliations between income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the consolidated income before final tax and corporate income tax expense are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.125.029	4.490.674	Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dihitung dengan tarif 22% yang berlaku umum	907.506	987.948	Tax expense calculated at statutory rate of 22%
Efek pajak atas perbedaan temporer tanpa pajak tangguhan			Tax effects on temporary differences with no deferred tax
Beban sewa	83.561	101.959	Expenses related to leases
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	9.129	30.569	Deductible amortization and depreciation
Beban cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	9.556	1.053	Addition allowance for expected credit loss of trade receivables
Kompensasi rugi entitas anak	(115.676)	(83.104)	Utilization of subsidiary fiscal loss
Efek pajak atas perbedaan permanen			Tax effect on permanent differences
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(4.510)	(5.148)	Interest income already subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	197.514	351.341	Non-deductible expenses, net
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(1.162.524)	(1.124.685)	Revenue subject to final tax
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	532.017	565.998	Expenses related to revenue subject to final tax
Pembalikan pajak tangguhan	(214.339)	(374.435)	Reversal of deferred tax
Total beban pajak penghasilan konsolidasian	242.234	451.496	Total consolidated income tax expense

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2023 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2023 ke Kantor Pajak.

The amounts of the Company's taxable profit and current income tax expense for 2023, as stated in the foregoing, and the related tax payables will be reported by the Company in its 2023 annual income tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2022 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT PPh badan tahun 2022 ke Kantor Pajak.

The amounts of the Company's taxable profit and current income tax expense for 2022, as stated in the foregoing, and the related tax payables have been reported by the Company in its 2022 SPT as submitted to the Tax Office.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto**

Analisa saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Perseroan		
Aset pajak tangguhan		
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	1.744	2.196
Sub-total	1.744	2.196
Liabilitas pajak tangguhan		
Aset takberwujud	(8.438)	(16.854)
Aset tetap	(276.617)	(313.850)
Sub-total	(285.055)	(330.704)
Liabilitas pajak tangguhan, neto Perseroan	(283.311)	(328.508)
Entitas anak dengan posisi liabilitas pajak tangguhan, neto		
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	114.273	229.950
Provisi imbalan kerja	7.713	941
Provisi retur penjualan	6.739	12.258
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	6.267	963
Utang sewa	2.584	3.757
Par forward	(173)	(429)
Aset tetap	(696.054)	(862.962)
Liabilitas pajak tangguhan, neto Entitas anak	(558.651)	(615.522)
Total liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(841.962)	(944.030)
Entitas anak dengan posisi aset pajak tangguhan, neto		
Aset tetap	4.042	3.350
Akrua	1.682	-
Provisi retur penjualan	539	1.012
Provisi imbalan kerja	327	110
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	35	55
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	20	-
Aset pajak tangguhan, neto Entitas anak	6.645	4.527

21. TAXATION (continued)**e. Deferred tax assets and liabilities, net**

Analysis of the deferred tax assets and liabilities, net is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
The Company		
Deferred tax assets		
Allowance for expected credit loss of trade receivables	1.744	2.196
Sub-total	1.744	2.196
Deferred tax liabilities		
Intangible assets	(8.438)	(16.854)
Fixed assets	(276.617)	(313.850)
Sub-total	(285.055)	(330.704)
Deferred tax liabilities, net The Company	(283.311)	(328.508)
The subsidiaries with net deferred tax liability position		
Tax loss carried forward	114.273	229.950
Provision for employee benefits	7.713	941
Provision for sales return	6.739	12.258
Allowance for expected credit loss of trade receivables	6.267	963
Lease liabilities	2.584	3.757
Par forward	(173)	(429)
Fixed assets	(696.054)	(862.962)
Deferred tax liabilities, net The subsidiaries	(558.651)	(615.522)
Total consolidated deferred tax liabilities, net	(841.962)	(944.030)
The subsidiaries with net deferred tax assets position		
Fixed assets	4.042	3.350
Accruals	1.682	-
Provision for sales return	539	1.012
Provision for employee benefits	327	110
Allowance for expected credit loss of trade receivables	35	55
Allowance for impairment loss of inventories	20	-
Deferred tax assets, net The subsidiaries	6.645	4.527

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang.

f. Analisa perubahan aset (liabilitas) pajak tangguhan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Entitas anak		
Saldo awal aset pajak tangguhan	4.527	4.144
Akuisisi entitas anak	1.737	-
Beban pajak tangguhan	915	(3.086)
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(134)	9
Pembalikan pajak tangguhan	(400)	3.460
Saldo akhir - aset pajak tangguhan, neto	6.645	4.527
Perseroan		
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(328.508)	(415.026)
Pajak tangguhan terkait akuisisi	-	54.295
Beban pajak tangguhan	(18.820)	(98.288)
Pembalikan pajak tangguhan	64.017	130.511
Sub-total	(283.311)	(328.508)
Entitas anak		
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(597.782)	(562.501)
Pelepasan entitas anak	-	10.816
Beban pajak tangguhan	(61.015)	(280.180)
Pembalikan pajak tangguhan	143.395	234.083
Sub-total	(515.402)	(597.782)
Entitas anak		
Saldo awal aset (liabilitas) pajak tangguhan	(17.740)	8.571
Akuisisi entitas anak	-	(10.816)
Beban pajak tangguhan	(23.660)	(25.238)
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(588)	3.362
Pembalikan pajak tangguhan	(1.261)	6.381
Sub-total	(43.249)	(17.740)
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto - konsolidasian	(841.962)	(944.030)

21. TAXATION (continued)**e. Deferred tax assets and liabilities, net (continued)**

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. The Company and its subsidiaries' management believe that the deferred tax assets can be utilized in the future.

f. Analysis of changes in deferred tax assets (liabilities)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
The subsidiaries		
Deferred tax asset - beginning balance	4.527	4.144
Acquisition of subsidiaries	1.737	-
Deferred tax expense	915	(3.086)
Deferred tax effect on equity	(134)	9
Reversal of deferred tax	(400)	3.460
Deferred tax assets, net - ending balance	6.645	4.527
The Company		
Deferred tax liabilities - beginning balance	(328.508)	(415.026)
Deferred tax related to acquisition	-	54.295
Deferred tax expense	(18.820)	(98.288)
Reversal of deferred tax	64.017	130.511
Sub-total	(283.311)	(328.508)
The subsidiaries		
Deferred tax liabilities - beginning balance	(597.782)	(562.501)
Disposal of subsidiaries	-	10.816
Deferred tax expense	(61.015)	(280.180)
Reversal of deferred tax	143.395	234.083
Sub-total	(515.402)	(597.782)
The subsidiaries		
Deferred tax asset (liabilities) - beginning balance	(17.740)	8.571
Acquisition of subsidiaries	-	(10.816)
Deferred tax expense	(23.660)	(25.238)
Deferred tax effect on equity	(588)	3.362
Reversal of deferred tax	(1.261)	6.381
Sub-total	(43.249)	(17.740)
Consolidated deferred tax liabilities, net - ending balance	(841.962)	(944.030)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu; dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari semula 10% menjadi 11% yang akan berlaku mulai dari 1 April 2022, dan akan menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa. Perseroan dan entitas anaknya masih mengakui liabilitas pajak tangguhan terkait aset tetap di dalam laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

21. TAXATION (continued)

g. Others

On October 29, 2021, the Government issued a Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 about Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others reduction to the tax rates for corporate income taxpayers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% starting in fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria; and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No. 34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with that regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged by final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 (1), income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that income from tower lease is charged by non-final income tax until the end of lease period. The Company and its subsidiaries still recognize deferred tax liabilities in the consolidated financial statements as of December 31, 2023 and 2022.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat ketetapan pajak

Perseroan dan entitas anak memperoleh beberapa Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut:

Entitas/ Entity	Masa Pajak/ Fiscal period	Beban pajak terkait/ Related tax expense	Surat ketetapan hukum yang diterima/ Letter received	Tanggal surat Ketetapan Hukum/ Period letter	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	Status terakhir/ Latest status
a. Estimasi pengembalian pajak (Catatan 14) Estimated claims for tax refund (Note 14)							
Perseroan/ the Company	2016	PPh Badan/ CIT	Keputusan keberatan/ Objection decision	27 April/ Apr 2022	60.043	60.043	Banding/ Appeal
Perseroan/ the Company	2017	PPh Badan/ CIT, PPh 21/ Tax art 21, PPh 23/ Tax art 23, PPh 4(2)/ Tax art 4(2), PPh 26/ Tax art 26	Keputusan keberatan/ Objection decision	17 Des/ Dec 2021	75.417	75.417	Banding/ Appeal
STP	2015	PPh 26/ Tax art 26	Keputusan banding/ Appeal decision	23 Jun/ Jun 2023	63.662 19.776 313	57.749 -	Peninjauan kembali/ Judicial review PBK PPh Badan 2011/ Overbooking CIT 2011 -PBK PPh 21/ Overbooking Tax article 21
STP	2016	PPh 26/ Tax art 26	Keputusan banding/ Appeal decision	10 Nov/ Nov 2023	5.260	-	Peninjauan kembali/ Judicial review
STP	2016	PPN/ VAT	Keputusan keberatan/ Objection decision	20 Nov/ Nov 2019	-	46.007	Banding/ Appeal
STP	2021	PPh Badan/CIT	-	-	-	23.015	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 11 Sep 2023/ Tax refund received on Sep 11, 2023
STP	2022	PPh Badan/CIT	-	-	18.843	18.843	Pemeriksaan pajak/ Tax audit
STP	2023	PPh Badan	-	-	14.531	-	-
Anak Entitas anak lainnya/ Subsidiaries - others	Berbagai tahun dari 2014 - 2023/ Various years from 2014 - 2023	Berbagai kasus pajak/ Various tax cases	SKPKB, SKPLB, Keberatan, Banding/ SKPKB, SKPLB, objection, appeal	Berbagai tahun dari 2019 - 2023/ Various years from 2019 - 2023	18.322	25.513	Pemeriksaan pajak, keberatan, banding/ Tax audit, objections, appeals
					276.167	306.587	

Entitas/ Entity	Masa Pajak/ Fiscal period	Beban Pajak Terkait/ Related Tax Expense	Surat Ketetapan Hukum yang diterima/ Letter received	Tanggal surat Ketetapan Hukum/ Period letter	Jumlah yang disengketakan (termasuk sanksi)/ Disputed amount (including penalty)	Status terakhir/ Latest Status
b. Surat ketetapan pajak lainnya/ Other tax assessment						
STP	2016	PPh 26/ Tax art 26	Keputusan Banding/ Appeal	10 Nov/ Nov 2023	61.954	Peninjauan kembali oleh DJP/ Judicial review by DGT
STP	2016	PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	10 Nov/ Nov 2023	45.945	Peninjauan kembali oleh DJP/ Judicial review by DGT
STP	2017	PPh 26/ Tax art 26	Keputusan Banding/ Appeal	8 Des/ Dec 2023	9.951	Banding diterima dan dilakukan Peninjauan Kembali oleh DJP/ Appeal granted and Judicial review by DGT
Entitas anak lainnya/ Subsidiaries - others	Berbagai tahun dari 2014 - 2023/ Various years from 2014 - 2013	Berbagai kasus pajak/ Various taxes	Keputusan Keberatan dan Banding/ Objection and appeal	Berbagai tahun dari 2021 - 2023/ Various years from 2021 to 2023	3.361	Banding dan peninjauan kembali/ Appeal and judicial review

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

h. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

h. Tax assessments (continued)

Entitas/ Entity	Masa Pajak/ Fiscal period	Beban Pajak Terkait/ Related Tax Expense	Surat Ketetapan Hukum yang diterima/ Letter received	Tanggal surat Ketetapan Hukum/ Period letter	Jumlah pengembalian pajak/ Total Tax refund	Status/ Status
c. Surat Ketetapan Pajak yang sudah selesai/ Completed Tax Assessment Letters						
Perseroan/ the Company	2018	PPH Badan/ CIT, PPh 4(2)/ Tax art.4(2), PPN/ VAT	SKPKB/ Tax underpayment	5 Sep/ Sep 2022	16.175	Menerima dan membayar/ Accepted and paid
Iforte	2018	PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	13 Jun/ Jun 2023	276	Banding diterima dan pengembalian telah diterima pada tanggal 26 Jul dan 3 Ags 2023/ Appeal granted and tax refund received on Jul 26 and Aug 3, 2023
HTS	Apr 2020-Mar 2021/ Apr 2020-Mar 2021	PPN/ VAT	SKPLB/ Tax overpayment	2 Jun/ Jun 2022	24.361	Pengembalian telah diterima pada tanggal 22 Jun 2022/ Refund has received on Jun 22, 2022
HTS	Apr-Jul 2021/ Apr-Jul 2021, Okt 2021-Mar 2022/ Oct 2021-Mar 2022	PPN/ VAT	SKPLB/ Tax overpayment	26 Sep/ Sep 2023	18.229	Pengembalian telah diterima pada tanggal 17 Okt 2023/ Refund has received on Oct 17, 2023
BIT	2014	PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	18 Feb/ Feb 2022	1.740	Banding diterima dan pengembalian pajak telah diterima pada berbagai tanggal di tahun 2022 (Rp1.475) dan 5 Jan 2023 (Rp265)/ Appeal granted and tax refund received on various date in 2022 and Jan 5, 2023
BIT	2020	PPH Badan/ CIT, PPh 23/ Tax art.23, PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	28 Jun/ Jun 2022	2.299	Banding diterima dan pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 25 Jul 2022/ Appeal granted and tax refund received on Jul 25, 2022
BIT	2021	PPH Badan/ CIT, PPh 23/ Tax art. 23, PPh 26/ Tax art. 26, PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	19 Jun/ Jun 2023	3.546	Banding diterima dan pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 13 Juli 2023/ Appeal granted and tax refund received on July 13, 2023
REJA	2018	PPN/ VAT	Keputusan Kaberatan/ Objection	18 Okt/ Oct 2021	84	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 8 Apr 2022/ Tax refund received on Apr 8, 2022
REJA	2019	PPN/ VAT, PPh 23/ Tax art.23	Keputusan Kaberatan/ Objection	7 Okt/ Oct 2022	184	Pengembalian pajak telah diterima pada bulan Nov 2022/ Tax refund received on Nov, 2022
REJA	2020	PPH Badan/ CIT, PPN/ VAT	SKPLB/ Tax overpayment	24 Okt/ Oct 2022	274	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 17 Nov 2022/ Tax refund received on Nov 17, 2022
REJA	2021	PPH Badan/ CIT	SKPLB/ Tax overpayment	13 Apr/ Apr 2023	151	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 8 Juni 2023/ Tax refund received on June 8, 2023
KIN	2013	PPH Badan/ CIT	Keputusan Banding/ Appeal	15 Jun/ Jun 2022	4.412	Banding diterima dan pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 2 Feb 2023/ Appeal granted and tax refund received on Feb 2, 2023
KIN	2021	PPH Badan/ CIT, PPh 4(2)/ Tax art.4(2)	SKPLB/ Tax overpayment	24 Mei/ Mar 2023	2.211	Pengembalian pajak telah diterima 27 April 2023/ Tax refund received on April 27, 2023
STP	2015	PPH 26/ Tax art.26	Keputusan Banding/ Appeal	23 Jun/ Jun 2023	37.972	Pengembalian pajak diterima tanggal 25 Mei 2023 dan 13 Juni 2023/ Tax refund received on May 23, 2023 and June 13, 2023
STP	2016	PPN/ VAT	Keputusan Banding/ Appeal	28 Jul/ Jul 2023	40.635	Pengembalian pajak diterima tanggal 15 Sept 2023/ Tax refund received on Sep 15, 2023
STP	2018	Pajak Daerah/ Regional Tax	STPD		617	Pengembalian pajak diterima tanggal 27 Des 2022/ Tax refund received on Dec 27, 2022
STP	2020	PPH Badan/ CIT	SKPLB/ Tax overpayment	8 Agul/ Aug 2022	21.934	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 1 Sep 2022/ Tax refund received on Sep 1, 2022
STP	2021	PPH Badan/ CIT, PPh 23/ Tax art.23	SKPLB/ Tax overpayment	4 Agul/ Aug 2023	23.068	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 11 Sep 2023/ Tax refund received on Sep 11, 2023
SIP	2020	PPH Badan/ CIT, PPh 4(2)/ Tax art.4(2) PPN/ VAT	Keputusan Kaberatan/ Objection	5 Jul/ Jul 2023	315	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 1 Sept 2022 (Rp218) dan 22 Ags 2023 (Rp97)/ Tax refund received on Sept 1, 2022 (Rp218) and Aug 22, 2023 (Rp97)
SIP	2021	PPH Badan/ CIT, PPh 23/ Tax art.23, PPN/ VAT	SKPKB/ Tax underpayment	24 Jul/ Jul 2023	2.049	Menerima dan membayar tanggal 22 Ags 2023/ Accepted and paid on Aug 22, 2023
GIK	2021	PPH Badan/ CIT, PPh 26/ Tax art.26	SKPLB/ Tax overpayment	26 Okt/ Oct 2023	360	Pengembalian pajak telah diterima pada tanggal 8 Nov 2023/ Tax refund received on Nov 8, 2023

*Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")/ Tax Underpayment Assessment Letter
*Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB")/ Tax Overpayment Assessment Letter

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

i. Administrasi

i. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan dan entitas anaknya menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and its subsidiaries submit tax returns on the basis of self assessment. Consolidated tax returns are not permitted under the taxation laws in Indonesia. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, DGT may assess and amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Pada tanggal 15 Desember 2020, Iforte mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial.

On December 1, 2017, the Company entered into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial. On December 15, 2020, Iforte joined into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

The Company joined this program in order to fulfill the Government regulation related to Pension Program and to fulfill the Company's obligation arising from the Employment Termination based on prevailing laws and regulation within Indonesia and/or Company Regulation which applies in the Company based on Government Regulation No.35/2021.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Steven & Mourits, dalam laporannya pada tanggal 4 Maret 2024 dan 24 Februari 2023.

Long-term employee benefits liability recognized by the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022 are based on actuarial calculations prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, as per its reports dated March 4, 2024 and February 24, 2023.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The key assumptions used in determining the long-term employee benefits liability are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	6,53%-6,85%	7,3%-7,5%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	4%-8%	7%	Wages and salary increase
Usia pensiun	57 tahun/ years	57 tahun/ years	Retirement age
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Metode	Projected unit credit	Projected unit credit	Method

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the years ended December 31	
	2023	2022
Biaya jasa kini	30.365	25.899
Dampak penerapan SP DSAK IAI/ FRIC AD	-	(20.028)
Biaya jasa lalu	15	(2.434)
Biaya terminasi	491	5.478
Biaya bunga	13.229	11.253
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	(39)	873
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	29.799	12.501
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	(29.935)	(12.501)
Pendapatan bunga atas aset program	(9.208)	(8.853)
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	234	840
Total	34.951	13.028

Berikut merupakan rincian perubahan saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti dan aset program:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Saldo awal	181.776	176.367
Akuisisi entitas anak	4.539	-
Dampak penerapan SP DSAK IAI/IFRIC AD	-	(20.028)
Biaya jasa kini	30.365	25.899
Biaya jasa lalu	15	(2.434)
Biaya terminasi	-	5.478
Biaya bunga	13.229	11.253
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	(39)	873
Provisi atas kelebihan pembayaran di luar provisi yang dihitung	234	840
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	29.799	12.501
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	(29.935)	(12.501)
Pembayaran imbalan kerja	(150)	(3.662)
Pembayaran imbalan dari aset program	(7.745)	(5.913)
Pembayaran imbalan oleh Perseroan	(1.132)	(6.352)
Kelebihan pembayaran	(234)	(840)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(10.985)	295
Saldo akhir	209.737	181.776

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset program			Plan assets
Saldo awal	(135.678)	(111.169)	Beginning balance
luran Perseroan yang dibayarkan tahun berjalan	-	(28.000)	The Company contribution during the year
Selisih aktual imbalan hasil aset program	3.922	6.431	Difference on actual return on plan assets
Pembayaran imbalan dari aset program	7.745	5.913	Benefit payments from plan assets
Pendapatan bunga atas aset program	(9.208)	(8.853)	Interest income on plan assets
Saldo akhir	(133.219)	(135.678)	Ending balance
Liabilitas imbalan kerja neto	76.518	46.098	Net employee benefits liability

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset program pensiun merupakan portofolio pasar uang dengan nilai wajar sebesar Rp133.219.

As of December 31, 2023, the pension plan assets represent money market portfolio with fair value of Rp133,219.

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed annual discount rate would have the following effects as of December 31, 2023 and 2022:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas			Effect on present value of obligation
2023	(17.479)	19.942	2023
2022	(14.858)	18.292	2022

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed annual salary increment rate would have the following effects as of December 31, 2023:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas			Effect on present value of obligation
2023	17.777	(15.971)	2023
2022	15.258	(13.684)	2022

Perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The changes in the long-term employee benefits liability for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	46.098	65.198	Beginning balance
Akuisisi entitas anak	4.539	-	Acquisition of subsidiary
luran Perseroan yang dibayarkan tahun berjalan	-	(28.000)	Company contribution during the year
Penambahan tahun berjalan	34.951	13.028	Additions during the year
Kerugian aktuarial	(7.554)	6.725	Actuarial loss
Pembayaran imbalan kerja	(1.516)	(10.853)	Benefits paid
Saldo akhir	76.518	46.098	Ending balance

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Berikut merupakan rincian perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Liabilitas imbalan kerja		
Perseroan	8.231	8.156
Entitas anak	68.287	37.942
Total	76.518	46.098

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang: (tidak diaudit)

	2023	
Tahun 1	19.518	1st year
Tahun 2 - 5	51.458	2nd - 5th years
Tahun 6 - 10	135.280	6 - 10th years
Tahun 11 - 15	175.573	11 - 15th years
Tahun 16 - 20	168.967	16 - 20th years
Tahun 21 dan selanjutnya	163.252	21th years and beyond

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 13,69 tahun dan 13,74 tahun.

23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT XL Axiata Tbk.	1.366.542	1.098.245
PT Indosat Tbk.	601.831	575.937
PT Telekomunikasi Selular	476.573	462.954
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	29.051	32.423
PT Djarum	2.722	3.056
PT Smartfren Telecom, Tbk.	692	3.550
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3.000)	9.998	8.132
Total	2.487.409	2.184.297
Bagian jangka pendek	(2.457.037)	(2.148.996)
Bagian jangka panjang	30.372	35.301

**22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

The changes detail in the long-term employee benefits liability for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Liability for employee benefits		
The Company	8.231	8.156
The Subsidiaries	68.287	37.942
Total	76.518	46.098

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years: (unaudited)

The weighted average duration of present value of obligation as of December 31, 2023 and 2022 are 13.69 years and 13.74 years, respectively.

23. UNEARNED REVENUE

This account represents unearned revenue from customers related to lease agreement and recognized as revenue upon delivery of service to customers.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

Kepentingan nonpengendali Perseroan yang signifikan dari entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Iforte			Iforte
Saldo awal	7.423	5.198	Beginning balance
Akuisisi entitas anak	(595)	-	Acquisition of subsidiary
Penambahan Investasi	3.007	-	Additional Investment
Restrukturisasi atas entitas sepengendali	-	2.103	Restructuring of entities under common control
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(951)	837	Other comprehensive income (loss)
Dividen dari konsorsium	(28.500)	(54.600)	Dividends from consortium
Bagian laba neto	50.421	53.873	Share in net income
Saldo akhir	30.805	7.411	Ending balance
Kohinoor			Kohinoor
Saldo awal	18.352	18.110	Beginning balance
Bagian laba neto	231	242	Share in net income
Saldo akhir	18.583	18.352	Ending balance
STP			STP
Saldo awal	5.999	7.707	Beginning balance
Restrukturisasi atas entitas sepengendali	-	(2.103)	Restructuring of entities under common control
Bagian laba neto	476	395	Share in net income
Saldo akhir	6.475	5.999	Ending balance

25. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (angka penuh)/ Number of shares issued (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital	Shareholders
PT Sarana Menara Nusantara Tbk Ferdinandus Aming Santoso	3.322.620.186 1	99,9997% 0,0003%	332.261 1	PT Sarana Menara Nusantara Tbk Ferdinandus Aming Santoso
	3.322.620.187	100,0000%	332.262	

25. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and fully paid-up shares and the related par value as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas, keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja, dan keuntungan (kerugian) pada investasi obligasi.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Keuntungan neto dari lindung nilai arus kas	64.785	95.443
Pendapatan komprehensif lain dari Investasi	14	-
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	12.887	6.349
Kerugian investasi obligasi	-	(2.205)
Total	77.686	99.587

**27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA**

2023

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 5 Mei 2023, memutuskan penggunaan sisa dividen dari laba bersih tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp912.391.503.076 (angka penuh);
 - (ii) Ferdinandus Aming Santoso menerima dividen tunai sebesar Rp274,60 (angka penuh).
- b. Sebesar Rp100 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Dividen interim tunai untuk tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp312.794.249.600 (angka penuh) telah dibagikan oleh Perseroan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris dan para Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2023.

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account consists of net gain (loss) on cash flow hedge, and cumulative actuarial gains on employee benefits liability and gain (loss) on investment in bonds.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<i>Net gain on cash flow hedge</i>	64.785	95.443
<i>Other comprehensive income from Investment</i>	14	-
<i>Actuarial gain on employee benefits liability</i>	12.887	6.349
<i>Loss on investment in bonds</i>	-	(2.205)
Total	77.686	99.587

27. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

2023

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 5, 2023, it was resolved that remaining amount of dividend from 2022 net income will be appropriated as follows:

- a. *Cash dividend are distributed to the shareholders, with the following details:*
 - (i) *SMN received cash dividends in an amount of Rp912,391,503,076 (full amount);*
 - (ii) *Ferdinandus Aming Santoso received cash dividends in an amount of Rp274.60 (full amount).*
- b. *An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.*

Interim cash dividend for financial year 2023 in the amount of Rp312,794,249,600 (full amount) has been distributed by the Company based on the approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders on December 5, 2023.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

2022

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 27 Mei 2022, memutuskan penggunaan sisa dividen dari laba bersih tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp901.426.856.461 (angka penuh);
 - (ii) Ferdinandus Aming Santoso menerima dividen tunai sebesar Rp271,3 (angka penuh).
- b. Sebesar Rp100 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Dividen interim tunai untuk tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp321.793.638.897 (angka penuh) telah dibagikan oleh Perseroan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris dan Para Pemegang Saham pada tanggal 6 Desember 2022.

28. PENDAPATAN

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Pendapatan sewa	10.533.037	10.210.361
Jasa dan lainnya	1.042.286	684.661
Sub-total	11.575.323	10.895.022
Pihak berelasi		
Pendapatan sewa	1.010	1.957
Jasa dan lainnya	164.012	138.671
Sub-total	165.022	140.628
Total	11.740.345	11.035.650

28. REVENUES

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 27, 2022, it was resolved that remaining amount of dividend from 2021 net income will be appropriated as follows:

- a. *Cash dividend are distributed to the shareholders, with the following details:*
 - (iii) *SMN received cash dividends in an amount of Rp901,426,856,461 (full amount);*
 - (iv) *Ferdinandus Aming Santoso received cash dividends in an amount of Rp271.3 (full amount).*
- b. *An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.*

Interim cash dividend for financial year 2022 in the amount of Rp321,793,638,897 (full amount) has been distributed by the Company based on the approval from Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders on December 6, 2022.

*Third parties
Rental income
Services and others*

Sub-total

*Related parties
Rental income
Services and others*

Sub-total

Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian jasa dan lainnya:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		Segment
	2023	2022	
Segmen			
Wireline	809.528	634.488	Wireline
FTTH	172.210	13.256	FTTH
VSAT	109.415	134.144	VSAT
IPLC	57.207	41.444	IPLC
Managed service	55.746	-	Managed service
Payment gateway	2.168	-	Payment gateway
Disbursement	24	-	Disbursement
Total	1.206.298	823.332	Total

Wireline merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet broadband dan Virtual Private Network.

Fiber To The Home (FTTH) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan model Business to Business (B2B) untuk membangun dan mengelola infrastruktur fiber optik untuk perusahaan lain yang kemudian akan dipasarkan kepada pelanggan.

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi lainnya.

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,				Customers
	Pendapatan/ Revenues		Persentase dari total penjualan/ Percentage of total revenues		
	2023	2022	2023	2022	
Pelanggan					
PT Indosat Tbk	4.476.703	4.125.132	38%	37%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	3.619.910	3.257.776	31%	30%	PT XL Axiata Tbk
PT Telekomunikasi Selular	1.463.362	1.690.997	12%	15%	PT Telekomunikasi Selular
Total	9.559.975	9.073.905	81%	82%	Total

28. REVENUES (continued)

Details of services and others:

Wireline is a telecommunication service using fiber optic and wireless network to provide internet broadband and Virtual Private Network.

Fiber To The Home (FTTH) is a telecommunications service using Business to Business (B2B) model to build and manage fiber optic infrastructure for other companies which will then be marketed to customers.

Very Small Aperture Terminal (VSAT) is a telecommunication service using satellite technology to cover remote locations without other type of telecommunications network.

Details of customers which represent more than 10% of the consolidated revenues are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. DEPRESIASI DAN AMORTISASI

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Depresiasi aset tetap (Catatan 8)	1.389.517	974.115	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Amortisasi aset hak-guna (Catatan 11)	1.183.535	1.086.388	Amortization of right-of-use assets (Note 11)
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 10)	139.242	136.551	Amortization of intangible assets (Note 10)
Amortisasi IPLC	62.605	62.605	Amortization of IPLC
Amortisasi transponder	18.740	18.740	Amortization of transponder
Amortisasi asuransi	6.510	5.240	Amortization of insurance
Lain-lain	42.366	22.343	Others
Total	2.842.515	2.305.982	Total

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Perawatan lokasi	454.310	385.684	Site maintenance
Sewa internasional dan local link	69.180	52.443	International and local link rentals
Listrik	31.874	31.400	Electricity
Layanan pengelolaan	20.796	-	Managed service
Perjalanan dinas	13.941	24.885	Business trip
Sewa transponder	-	1.679	Transponder rentals
Lain-lain	94.385	111.679	Others
Total	684.486	607.770	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang total pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

Seluruh beban pokok pendapatan lainnya merupakan beban operasi langsung yang timbul dari aset tetap yang menghasilkan pendapatan rental.

31. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	108.019	80.940	Salaries and employee welfare
Jamuan dan representasi	93.872	61.708	Entertainment and representation
Perjalanan dan transportasi	36.173	18.789	Travel and transportation
Lain-lain	44	7.326	Others
Total	238.108	168.763	Total

29. DEPRECIATION AND AMORTIZATION

30. OTHER COST OF REVENUES

For the year ended December 31, 2023 and 2022, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

All other cost of revenues represent direct operating expenses arising from fixed assets that generated rental revenue.

31. SELLING AND MARKETING EXPENSES

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2023 and for the Year Then Ended (Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	628.342	573.943	Salaries and employee welfare
Perlengkapan kantor	61.175	46.014	Office supplies
Jasa profesional	49.181	48.523	Professional fees
Imbalan kerja (Catatan 22)	34.951	13.028	Employee benefits (Note 22)
Lain-lain	44.319	30.419	Others
Total	817.968	711.927	Total

33. BIAAYA KEUANGAN - NETO

33. FINANCE COSTS - NET

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Beban bunga bank	2.161.163	1.870.719	Bank interest expense
Beban bunga obligasi	467.070	307.813	Bond interest expense
Beban penambahan bunga atas utang sewa (Catatan 17)	91.905	131.077	Accretion of interest expense on lease liabilities (Note 17)
Beban premi call spread	59.483	43.486	Premi call spread expense
Amortisasi biaya pinjaman dan biaya komitmen (Catatan 18)	55.031	57.023	Amortization of cost of loans and commitment fee (Note 18)
Penambahan bunga atas provisi jangka panjang (Catatan 20)	23.515	28.990	Accretion of interest on long-term provision (Note 20)
Pendapatan keuangan lainnya, neto	(140)	(47.307)	Other finance income, net
Total	2.858.027	2.391.801	Total

34. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

34. OTHER OPERATING EXPENSES, NET

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Rugi pelepasan aset tetap (Catatan 8)	173.608	144.699	Loss on disposal of fixed assets (Note 8)
Beban cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang (Catatan 6)	43.435	4.787	Allowance for expected credit loss of trade receivables, (Note 6)
Penurunan nilai goodwill (Catatan 9)	30.000	-	Impairment of goodwill (Note 9)
Kerugian selisih kurs, neto	14.534	92.852	Foreign exchange loss, net
Kerugian atas pelepasan sewa tanah	5.439	3.970	Write-off ground leases
Kerugian (keuntungan) nilai wajar dari structured deposit (Catatan 12)	(9.760)	50.933	Loss on fair value of structured deposit (Note 12)
Keuntungan dari perubahan estimasi akuntansi - sewa tanah (Catatan 3)	(97.612)	-	Gain from changes in accounting estimates - ground leases (Note 3)
Lain-lain	35.067	84.891	Others
Neto	194.711	382.132	Net

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2023 and for the Year Then Ended (Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

34. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO (lanjutan)

34. OTHER OPERATING EXPENSES, NET (continued)

Rincian kerugian selisih kurs, neto:

Details of foreign exchange loss, net:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		
	2023	2022	
Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang berasal dari			Foreign exchange loss (gain) in relation to
Utang bank	(43.168)	310.341	Bank loans
Kas dan setara kas	(3.194)	(88.282)	Cash and cash equivalents
Lainnya	60.896	(129.207)	Others
Neto	14.534	92.852	Net

35. DERIVATIF

35. DERIVATIVES

a. Utang swap tingkat bunga

a. Interest rate swap payables

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan, Iforte dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing tertanggal 17 Oktober 2023 untuk transaksi jual atau beli valuta asing ("Fasilitas Valuta Asing Maybank"). Fasilitas Valuta Asing Maybank USD2.100.000 dengan nilai notional USD35.000.000 ini akan berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.

On February 19, 2021, the Company, Iforte and PT Bank Maybank Indonesia Tbk signed the Foreign Exchange Transaction Agreement as lastly amended by the Amendment to the Foreign Exchange Agreement dated October 17, 2023 to provide a sell and purchase foreign exchange transaction ("Maybank Foreign Exchange Agreement"). The Facility foreign exchange transaction amounted to USD2,100,000 with notional amount USD35,000,000 is valid until October 10, 2024.

Perseroan menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 14 Maret 2022 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura ("SMBC"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/ atau risiko suku bunga.

The Company entered into ISDA 2002 Master exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/ or interest rate risk. Agreement dated March 14, 2022 with Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore branch ("SMBC"), to hedge short term foreign.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar kontrak swap tingkat bunga dengan SMBC sebesar Rp90.295 (31 Desember 2022: Rp113.725).

As of December 31, 2023, the fair value of interest rate swap contracts with SMBC amounted to Rp90,295 (December 31, 2022: Rp113,725).

b. Swap valuta asing

b. Cross currency swap

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Perseroan menandatangani ISDA 2002 Master Agreement masing-masing dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura.

On August 3, 2016, the Company entered into ISDA 2002 Master Agreement respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. DERIVATIF (lanjutan)

b. Swap valuta asing (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan menandatangani perjanjian dengan MUFG Bank, Ltd., yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga utang bank dalam Dolar AS.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Kontrak-kontrak swap valuta asing	Mata uang/ Currency	Jumlah nosional/ Notional amount	Nilai wajar/ Fair value		Cross currency swap contracts
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
DBS Bank Ltd	SGD	144.000.000	(4.390)	(31.730)	DBS Bank Ltd
OCBC Bank	SGD	36.000.000	(1.479)	(7.697)	OCBC Bank
MUFG Bank Ltd	USD	34.800.000	32.273	40.684	MUFG Bank Ltd
Total			26.404	1.257	Total

35. DERIVATIVES (continued)

b. Cross currency swap (continued)

On July 15, 2021, the Company entered into an agreement respectively with MUFG Bank, Ltd., to hedge the principal and interest payments of bank loan in US Dollars.

Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

35. DERIVATIF (lanjutan)

c. Non-Deliverable Call Option dan Kontrak Swap Tingkat Bunga

Perseroan menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 tanggal 6 April 2021 dengan JPMorgan Chase Bank, National Association ("JPM"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai risiko valuta asing jangka pendek, lindung nilai umum untuk lindung nilai paparan terhadap risiko valuta asing dan/atau risiko suku bunga.

Pada tanggal 29 Maret 2022, Perseroan menandatangani Non-deliverable Call Option dengan JPMorgan dengan jumlah notional USD40.000.000. Berdasarkan Kontrak Opsi, harga strike adalah sebesar Rp15.000 (angka penuh) per USD. Fasilitas ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2028.

Perseroan menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore ("JPMorgan"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga kuartalan sehubungan dengan Pinjaman Fasilitas senilai USD40.000.000. Tingkat bunga swap tahunan 3,45% dari USD40.000.000 sebagai pertukaran untuk USD-SOFR +1,1%.

Total nilai wajar Non-deliverable Call Option dan kontrak swap tingkat bunga dengan JPM masing-masing sebesar Rp5.179 dan Rp29.303 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022 masing-masing: Rp6.391 dan Rp39.201).

Perseroan menandatangani kontrak Non-deliverable Call Option dengan SMBC sehubungan dengan Pinjaman Fasilitas senilai USD100.000.000.

Total nilai wajar Non-deliverable Call Option dengan SMBC sebesar (Rp22.032) pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp347).

35. DERIVATIVES (continued)

c. Non-Deliverable Call Option and Interest Rate Swap

The Company entered into ISDA 2002 Master Agreement dated April 6, 2021 with JPMorgan Chase Bank, National Association ("JPM"), to hedge short term foreign exchange risk, general hedging line to hedge its exposure against foreign exchange risk and/or interest rate risk.

On March 29, 2022, the Company entered into Non-deliverable Call Option with JPMorgan with notional amount USD 40,000,000. Based on the call option, the strike price is Rp15,000 (full amount) per USD. This facility effective from March 1, 2022 until March 31, 2028.

The Company entered into interest rate swap contracts with JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore ("JPMorgan"), to hedge quarterly payments of interest related to the Loan Facility amounted to USD40,000,000. Annual Interest rate swap 3.45% of USD40,000,000 in exchange for USD-SOFR +1.1%.

The total fair value of Non-deliverable Call Option and interest rate swap with JPM amounted to Rp5,179 and Rp29,303, respectively, as of December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp6,391 and Rp39,201, respectively).

The Company entered into Non-deliverable Call Option with SMBC, related to the Loan Facility amounted to USD100,000,000.

The total fair value of Non-deliverable Call Option with SMBC amounted to (Rp22,032), as of December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp347).

No.	Pihak lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective contract period	Tingkat bunga swap tahunan/ Annual Interest rate swap	Tanggal penerimaan pendapatan (beban) swap/ Swap income (expense) receipt date	Jumlah beban swap/ Amount of swap expense	
					31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
1	Oversea-Chinese Banking Corporation Bank	27 November 2014 - 2024/ November 27, 2014 - 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari USD27.671.022/ 3,25% from Singapore dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of USD27,671,022.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/ The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(2.182)	(2.426)
2	DBS Bank Ltd	27 November 2014 - 2024/ November 27, 2014 - 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari USD110.684.089,16/ 3,25% from Singapore dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of USD110,684,089,16.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024/ The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(8.727)	(9.704)
3	MUFG Bank Ltd	15 Juli 2021 - 14 Juli 2025/ July 15, 2021 - 14 July 2025	6,30% dari rupiah sebesar Rp504.948 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar SOFR + 0,8% dari USD34.800.000/ 6,30% from Indonesian Rupiah of Rp504,948 as an exchange with SOFR + 0.8% of US dollars of USD34,800,000.	Setiap tanggal 19 setiap bulan pada setiap tahun dihitung dari dan termasuk tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran/ The 19th day of every month for every year starting and including August 19, 2021 until the termination date.	(159)	(19.721)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. DERIVATIF (lanjutan)

d. Kontrak forward

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Treasury Line dengan limit notional sejumlah USD67.500.000 ("Fasilitas TL Mandiri 1"). Perjanjian TL Mandiri 1 ini dapat digunakan oleh Perseroan, Iforte dan/ atau Konsorsium Iforte HTS. Tujuan Perjanjian TL Mandiri 1 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 1 ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Konsorsium Iforte HTS menandatangani kontrak par forward dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran biaya sewa satelit.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak par forward dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Kontrak par forward	Jumlah nosional (USD)/ Notional amount (USD)	Nilai wajar/ Fair value		Par forward contract
		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.193.280	3.167	11.955	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pihak lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective contract period	Tingkat kurs yang disepakati/ Agreed exchange rate	Tanggal penerimaan pendapatan (beban) par forward/ Par forward income (expense) receipt date	Total beban par forward/ Amount of par forward expense	
				31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4 April 2020 - 4 Oktober 2024/ April 4, 2020 - October 4, 2024	55 rangkaian transaksi forward masing - masing sebesar USD1.221.696 untuk pertukaran Rp18.606 (kurs Rp15.230)/ 55 series of forward transaction each amounting to USD1,221,696 for Rp18,606 (exchange rate Rp15,230).	Setiap tanggal 4 setiap bulannya mulai dan termasuk 4 April 2020 sampai dengan 4 Oktober 2024/ The 4th day of each month starting and including April 4, 2020 until October 4, 2024.	(2.195)	(2.398)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. DERIVATIF (lanjutan)

e. Swap valuta asing

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (sekarang dikenal sebagai PT Bank BTPN Tbk) yang dapat digunakan untuk transaksi valuta asing, baik atas dasar on the spot, forward dan swap.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Iforte telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank BTPN Tbk yang dapat digunakan untuk transaksi valuta asing baik atas dasar on the spot, forward dan swap.

Nilai wajar swap dan kontrak forward dengan PT Bank BTPN sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: nihil).

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Treasury Line dengan limit notional sejumlah USD100.000.000 ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Nilai wajar kontrak forward dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp35.794 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp63.698).

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing dengan PT Bank Mizuho Indonesia yang dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai mata uang asing.

Nilai wajar kontrak forward dengan PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Rp12.528 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp1.326).

Nilai wajar kontrak forward dengan JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore ("JPMorgan") sebesar Nihil pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp9.158).

35. DERIVATIVES (continued)

e. Foreign exchange swap

On March 27, 2018, the Company signed Foreign Exchange Transaction Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (currently known as PT Bank BTPN Tbk) to provide foreign exchange transaction, either on the spot, forward and swap basis.

On May 28, 2021, Iforte signed Foreign Exchange Transaction Agreement with PT Bank BTPN Tbk to provide foreign exchange transaction, either on the spot, forward and swap.

The fair value of swap and forward contracts with PT Bank BTPN amounted to nil as of December 31, 2023 (December 31, 2022: nil).

On March 11, 2020, the Company and Bank Mandiri signed the Treasury Line Agreement with notional limit up to USD100,000,000 ("Facility TL Mandiri 2"). The purpose of this Facility TL Mandiri 2 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 2 is up to November 27, 2024.

The fair value of forward contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp35,794 as of December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp63,698).

On December 30, 2020, the Company signed the General Conditions on Foreign Exchange Contract with PT Bank Mizuho Indonesia to provide foreign currency hedging instrument.

The fair value of forward contracts with PT Bank Mizuho Indonesia amounted to Rp12,528 as of December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp1,326).

The fair value of forward contracts with JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore ("JPMorgan") amounted to nil as of December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp9,158).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

35. DERIVATIF (lanjutan)

e. Swap valuta asing (lanjutan)

Pada tanggal 20 November 2023, Perseroan, Iforte, dan PT Bank CTBC Indonesia telah menandatangani Perjanjian Valuta Asing ("Perjanjian FX CTBC"). Tujuan Perjanjian ini adalah mendukung persyaratan lindung nilai dan penarikan pinjaman sintesis dengan nilai notional USD13,195,000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 20 November 2024. Nilai wajar kontrak forward sebesar Rp739 pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 14 September 2023, Perseroan, dan Citibank,N.A., telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing. Tujuan Perjanjian ini adalah transaksi *forward*, *option*, dan *swap* dengan nilai notional sebesar USD17,285,000. Nilai wajar kontrak *forward* sebesar Rp3.742 pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada berbagai tanggal pada bulan November 2023 STP, Iforte dan PT Bank CIMB Niaga telah melakukan transaksi Swap valuta asing. Nilai wajar kontrak forward sebesar Rp7.595 dan Rp2.585 pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Januari 2023, STP telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing dengan PT Bank BTPN Tbk.

Pada tanggal 24 Februari 2023, BIT dan PT Bank BTPN Tbk telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. DERIVATIVES (continued)

e. Foreign exchange swap (continued)

On November 20, 2023, the Company, Iforte, and PT Bank CTBC Indonesia signed the FX Facility Agreement ("CTBC FX Agreement"). The purpose of CTBC FX Agreement is to support the companies' hedging requirement and also synthetic loan drawdown with the notional amount USD13,195,000. The final maturity on November 20, 2024. The fair value of forward contracts amounted to Rp739, as of December 31, 2023.

On September 14, 2023, the Company and Citibank.,N.A signed the Foreign Exchange Transaction Agreement. The purpose of Agreement is for foreign exchange transaction including forward, option, and swap transaction with the notional amount USD17,285,000. The fair value of forward contracts amounted to Rp3,742 as of December 31, 2023.

On various date in November 2023, STP, Iforte and PT Bank CIMB Niaga signed the Foreign Exchange Transaction. The fair value of forward contracts amounted to Rp7,595 and Rp2,585, as of December 31, 2023.

On January 31, 2023, STP signed the Foreign Exchange Transaction Agreement with PT Bank BTPN Tbk.

On February 24, 2023, BIT and PT Bank BTPN Tbk signed the Foreign Exchange Transaction Agreement.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perusahaan dan entitas anaknya menandatangani perjanjian sewa menyewa infrastruktur menara telekomunikasi dengan beberapa operator telekomunikasi pihak ketiga, diantaranya PT Telekomunikasi Selular, PT Smart Telecom, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT Smartfren Telecom Tbk, dengan jangka waktu sewa lokasi berkisar antara 10 sampai dengan 12 tahun.

Grup menandatangani perjanjian sewa menyewa akses fiber optik dengan beberapa operator telekomunikasi pihak ketiga, diantaranya PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Alita Praya Mitra dengan jangka waktu sewa lokasi berkisar antara 10 sampai dengan 12 tahun yang berakhir antara tahun 2019 sampai dengan 2028.

Grup menandatangani perjanjian jasa internet, *link IP transit*, Pengadaan CPE untuk jaringan internet, *local loop*, infrastruktur *wide area network*, penyedia jasa data center, jasa metro-e, dan jasa bandwidth layanan internet dengan beberapa operator telekomunikasi pihak ketiga, diantaranya PT Indosat Tbk, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BCA Multi Finance, PDAM Jaya, PT Bank Commonwealth, PT Bank Oke Indonesia Tbk, PT Transportasi Jakarta, PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Aliansi Teknologi Indonesia dan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

Grup menandatangani perjanjian sewa menyewa ruang kantor dengan PT Grand Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun yang berakhir sampai dengan tahun 2026.

Grup menandatangani perjanjian hak konsorsium *space segment capacity services* dari satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Telesat International Limited dengan jangka waktu sewa lokasi berkisar antara 5 sampai dengan 15 tahun yang berakhir antara tahun 2024 sampai dengan 2033.

Grup juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company and its subsidiaries have entered into telecommunication towers infrastructure with several telecommunication operators third parties, among others, PT Telekomunikasi Selular, PT Smart Telecom, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia and PT Smartfren Telecom Tbk, the lease period ranges between 10 to 12 years.

The Group has entered into fiber optic access with several telecommunication operators third parties, among others, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia and PT Alita Praya Mitra, the lease period ranges between 10 to 12 years and will end between 2019 to 2028.

The Group has entered into internet service provider, link IP transit, procurement of CPE for the police internet network, local loop, wide area network infrastructure, provider data center, metro-e and Internet service bandwidth with several telecommunication operators third parties, among others, PT Indosat Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BCA Multi Finance, PDAM Jaya, PT Bank Commonwealth, PT Bank Oke Indonesia, PT Transportasi Jakarta, PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Aliansi Teknologi Indonesia and Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

The Group has entered into office space rental with PT Grand Indonesia, the lease period is 5 years and will end in 2026.

The Group has entered into right of consortium to use space segment capacity services of satellite own and operated by Telesat International Limited, the lease period ranges between 5 to 15 years and will end between 2024 to 2033.

The Group also entered into various significant agreements, such as:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
a	Perjanjian Akses Fiber Optik/ Fiber Optic Access Agreement	6 Juli 2023/ July 6, 2023	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2031, the term of this Agreement is valid from 22 March 2021 until 21 March 2031	-	Perjanjian Akses Fiber Optik No. CTR013802 tanggal 6 Juli 2023/ Fiber Optic Access Agreement No. CTR013802 dated 6 July 2023
b	Perjanjian Sewa Induk untuk Kolokal/ Master Lease Agreement for Co-locations	17 Juni 2010/ June 17, 2010	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 17 Juni 2010 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa Berca yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Berca tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo. The term of the agreement is from June 17, 2010 until there is no valid site leases leased by Berca. The term for each site is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Berca informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term	-	Sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi/ Rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment
c	Perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi/ Telecommunication infrastructure lease agreement	7 November 2017/ November 7, 2017	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 7 November 2017 hingga tidak ada site lease/sewa lokasi yang disewa HPI yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak/ The term of the agreement is from November 7, 2017 until there is no valid site leases leased by HPI. The term for each site is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site, and may be extended based on mutual written agreements by both parties	25 Juli 2018/ July 25, 2018	Penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi/ Cooperation agreement regarding the provisions of tower infrastructure
d	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Akses Site untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi/ Cooperation Agreement for Utilization of Access Sites for Network and Telecommunication Services Operation	22 Juni 2021/ June 22, 2021	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 22 Juni 2021 dan akan berakhir 3 (tiga) tahun setelahnya. Jangka waktu Access Site akan mengikuti Jangka Waktu Perjanjian yang dimulai 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Permit Letter dikeluarkan oleh Protelindo dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak/ The term of the agreement is valid from June 22, 2021 and shall expire 3 (three) years thereafter. The term of Access Site will follow the term of the agreement which starts 30 (thirty) days from the Permit Letter date, is issued by Protelindo and may be extended based on mutual agreement of the Parties	-	Pemberian akses untuk penggelaran/ penyambungan/ penarikan kabel fiber optik di site/ Provides access for laying/connecting/pulling fiber optic cables on the site
e	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Menara dan Sewa Lahan/ Cooperation Agreement for Provision of Tower Infrastructure and Land Lease	17 Juni 2021/ June 17, 2022	Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 17 Juni 2022 dan akan berakhir pada tanggal dimana tidak terdapat BAPS atau Perjanjian Sewa Lahan yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan layanan menara untuk masing-masing infrastruktur menara adalah 20 tahun. Jangka waktu setiap Perjanjian Sewa Lahan adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya/ The term of the agreement is valid from June 17, 2022 and will end on the date when there is no BAPS or Land Lease Agreement that is still valid. The term of use of tower services for each tower infrastructure is 20 years. The term of each Land Lease Agreement is 10 years and will be automatically renewed for the next 10 years	-	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Menara dan Sewa Lahan No. 001/PPTI Busdev-PNS/VI/2022/ Cooperation Agreement for Provision of Tower Infrastructure and Land Lease No. 001/PPTI Busdev-PNS/VI/2022

121

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
f	Perjanjian Induk Kerja Sama dan Sewa Lahan/ Master Ground Lease and Cooperation Agreement	22 September 2021/ September 22, 2021	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal 22 September 2021 dan akan tetap berlaku hingga paling lambat: (i) 1 (satu) tahun setelah tanggal 22 September 2021 jika tidak ada PKSLS yang dilaksanakan, atau (ii) selama terdapat PKSLS yang berlaku, sampai dengan hari pertama PKSLS tersebut tidak berlaku lagi/ This agreement takes effect on 22 September 2021 and shall remain valid until the later of: (i) one (1) year commencing from 22 September 2021 if no GLCA is executed, or (ii) so long as there is a GLCA which is valid, until the first day on which GLCA ceases to be valid	-	Perjanjian Induk Kerja Sama dan Sewa Lahan No. 13/AGR/PPTI-LGL/BOD/VI/2022/ Master Ground Lease and Cooperation Agreement No. 13/AGR/PPTI-LGL/BOD/VI/2022
g	Berita Acara Kesepakatan/ Minutes of Agreement	14 Februari 2023/ February 14, 2023	BAK ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan BAK ini ("Tanggal Efektif") dan akan berlaku sampai yang mana yang terjadi lebih akhir dari: (i) 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif apabila tidak ada Perjanjian Kerjasama Sewa Lahan ("PKSL") yang ditandatangani; atau (ii) selama terdapat PKSLS yang berlaku, sampai dengan hari pertama PKSLS tersebut tidak berlaku lagi./ This BAK is effective from the date of signing of this BAK ("Effective Date") and will remain valid until the later of: (i) 1 (one) year from the Effective Date if no Ground Lease and Cooperation Agreement ("GLCA") is signed; or (ii) as long as there is a GLCA which is valid, until the first day on which such GLCA ceases to be valid	-	Berita Acara Kesepakatan tentang Kerjasama Penyediaan Menara Telekomunikasi di Kawasan Sedayu City Nomor 12/MMSL-PROTEL/VI/2023/ Minutes of Agreement regarding Cooperation of the Provision of Telecommunications Towers in the Sedayu City Area Number 12/MMSL-PROTEL/VI/2023
h	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Untuk Penggunaan dan pengalihan Tiang Telekomunikasi Mikro Selular (Microcell Pole) Land Utilization Cooperation Agreement for the Use and Processing of Microcell Pole	7 Desember 2022/ December 7, 2022	Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 3 Maret 2026./ This agreement is valid for 5 years from March 3, 2021 to March 3, 2026	-	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Untuk Penggunaan dan pengalihan Tiang Telekomunikasi Mikro Selular (Microcell Pole) no. 6 dihadapan notaris Inova Yahya, SH / Land Utilization Cooperation Agreement for the Use and Processing of Microcell Pole No. 6 before Notary Inova Yahya, SH.
i	Perjanjian Sewa Induk (MLA)/ Master Lease Agreement ("MLA")	16 Desember 2016/ December 16, 2016	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 16 Desember 2016 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang disewa MNC yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 15 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila MNC tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Protelindo/ The term of the agreement is from December 16, 2016 until there is no valid site leases leased by MNC. The term for each site is 15 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless MNC informs Protelindo in writing that it does not wish to extend the lease term	-	Sewa ruang pada site yang diperlukan untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan milik MNC/ Rental space for the installing, maintain and operating of MNC's equipment
j	Perjanjian Induk Infrastruktur in Building Coverage/ Master Agreement of Infrastructure in Building Coverage	13 April 2018/ April 13, 2018	5 tahun dihitung sejak 6 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2022/ 5 years as of the date July 6, 2017 until July 5, 2022	-	Perjanjian Induk Infrastruktur in Building Coverage di Mall Grand Indonesia No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018/ Master Agreement of Infrastructure in Building Coverage at Mall Grand Indonesia No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018

122

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement
k Iforte dan/ and Indosat	Infrastruktur Telekomunikasi (Microwave, BTS Hotel) Infrastructure (Microwave, BTS Hotel)	22 September 2017/ September 22, 2017	10 tahun sejak tanggal efektif Perjanjian yaitu tanggal 7 Oktober 2016, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from the effective date of Agreement, which is October 7, 2016, unless terminated earlier in accordance with the Agreement
l Iforte dan/ and Indosat	Perjanjian IRU mengenai pemberian hak eksklusif/ IRU Agreement, regarding the grant of exclusive	23 Februari 2018/ February 23, 2018	10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from January 1, 2019, unless terminated earlier in accordance with the Agreement
m Konsorsium Iforte dan/ and HTS dan/ and BAKTI	Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi/ Provision of Telecommunication Satellite Capacity	30 Januari 2019/ January 30, 2019	Jangka perjanjian kerjasama tersebut adalah selama 5 tahun sejak tanggal operasional/ The term of that agreement is for 5 years starting from the operational date
n IGI dan/ and BAKTI	Penyediaan Jasa Akses Internet/ Provision of Internet Access Services	31 Mei 2023/ May 31, 2023	Efektif sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023/ Effective from 31 May 2023 to 31 December 2023

123

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
k Iforte dan/ and Indosat	Infrastruktur Telekomunikasi (Microwave, BTS Hotel) Infrastructure (Microwave, BTS Hotel)	22 September 2017/ September 22, 2017	10 tahun sejak tanggal efektif Perjanjian yaitu tanggal 7 Oktober 2016, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from the effective date of Agreement, which is October 7, 2016, unless terminated earlier in accordance with the Agreement	-	Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical serta Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Procurement of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement
l Iforte dan/ and Indosat	Perjanjian IRU mengenai pemberian hak eksklusif/ IRU Agreement, regarding the grant of exclusive	23 Februari 2018/ February 23, 2018	10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ 10 years from January 1, 2019, unless terminated earlier in accordance with the Agreement	16 September 2019/ September 16, 2019	Sewa Menyewa Infrastruktur, Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi/ Lease of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement
m Konsorsium Iforte dan/ and HTS dan/ and BAKTI	Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi/ Provision of Telecommunication Satellite Capacity	30 Januari 2019/ January 30, 2019	Jangka perjanjian kerjasama tersebut adalah selama 5 tahun sejak tanggal operasional/ The term of that agreement is for 5 years starting from the operational date	-	Hak eksklusif untuk menggunakan kapasitas dari titik-titik jaringan fiber optik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Hutchison/ Exclusive right for using capacity resulting from the core(s) of fiber optic network owned and operated by Hutchison
n IGI dan/ and BAKTI	Penyediaan Jasa Akses Internet/ Provision of Internet Access Services	31 Mei 2023/ May 31, 2023	Efektif sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023/ Effective from 31 May 2023 to 31 December 2023	21 September 2023/ September 21, 2023	Perjanjian Kerjasama untuk Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi dengan BAKTI/ Cooperation Agreement for the Provision of Telecommunication Satellite Capacity with BAKTI

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
IGI dan/ and BAKTI (lanjutan/ continued)	Perjanjian Induk IRU/ Master IRU Agreement	3 Januari 2022/ January 3, 2022	3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022/ January 3, 2022 until December 31, 2022	29 Maret 2022/ March 29, 2022	Perjanjian Pekerjaan Jasa Linnya Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band 230 Lokasi No. 0376/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2022 / Agreement for the work of providing internet access services of VSAT C-Band 2021, 230 location No. 0376/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2022
o Iforte dan/ and PT Jejaring Mitra Persada	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta- Surabaya Secara Infeasible Right Of Use/ Agreement On The Provision Of Fiber Optic Core In Jakarta-Surabaya Telecommunication Network On Infeasible Right Of Use (IRU) Basis	1 Juli 2022/ July 1, 2022	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022/ This agreement is effective from July 1, 2022 until December 31, 2022	-	Perjanjian Pekerjaan Jasa Lainnya Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Band 109 Lokasi No. 0152/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2022; No. 004/IGI-BAKTI/MMWFO-AI-VSA7/17/2022/ other service agreement provision of Internet Access Services VSAT Cband 109 Location No. 0152/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2022; No. 004/IGI-BAKTI/MMWFO-AI-VSA7/17/2022
p BIT Indosat	Perjanjian Induk IRU/ Master IRU Agreement	28 Agustus 2023/ 28 August 2023	Efektif sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023/ Effective from 28 August 2023 to 31 December 2023	-	Perjanjian Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT C-Bank 10 Lokasi non-papua No. 2802/PKS/PPK.3/BAKTI.31.9/KOMINFO/08/2023; No. 005/IGI-BKTI/MMWFO-VSAT/11/2023 tanggal 28 Agustus 2023/ VSAT Cband Internet Access Service Provision Agreement for 10 Locations in Non-Papua No. 2802/PKS/PPK.3/BAKTI.31.9/KOMINFO/08/2023; No. 005/IGI-BKTI/MMWFO-VSAT/11/2023 dated 28 August 2023
q STP dan/ and PT Bumen	Akta Pengalihan / Transfer Deed	3 Desember 2021/ December 3, 2021	-	-	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Surabaya Secara Infeasible Right Of Use/ Agreement On The Provision Of Fiber Optic Core In Jakarta-Surabaya Telecommunication Network On Infeasible Right Of Use (IRU) Basis
r STP, PT Multi Inti Aliansi dan/ and PT Mekar Hiju Permai	Akta Jual Beli Saham/ Deed of Sale and Purchase of Shares	11 Februari 2022/ February 11, 2022	-	-	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core Dalam Jaringan Telekomunikasi/ Agreement on the Provision of Fiber Optic Cores in Telecommunication Networks

124

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
s	i) S/TP ii) SIP iii) KIN Iforte	Akta Jual Beli Saham Platinum/ Deed of Sale and Purchase of Platinum Shares	31 Desember 2021 dan 14 Januari 2022/ December 31, 2021 and January 14, 2022	-	i) Akta Jual Beli Saham ("AJB") No. 333 tanggal 31 Desember 2021: SUPR menjual 17.110.684 saham kepemilikan saham Platinum kepada Iforte dengan harga jual sebesar Rp 415.276. ii) AJB No. 334 tanggal 31 Desember 2021: SUPR menjual 18.953.440 saham Platinum kepada KIN dengan harga jual sebesar Rp 460.000. iii) AJB No. 335 tanggal 31 Desember 2021: SIP menjual 1 saham Platinum kepada Iforte dengan harga jual sebesar Rp 24.270 (angka penuh). iv) AJB No. 94 tanggal 14 Januari 2022: SUPR menjual 44.078.375 saham Platinum kepada Iforte dengan harga jual sebesar Rp 1.069.728. / i) The Deed of Sale and Purchase of Shares ("AJB") No. 333 dated December 31, 2021: SUPR sold 17,110,684 shares of Platinum to Iforte with selling price of Rp 415,276. ii) The AJB No. 334 dated December 31, 2021: SUPR agreed to sell 18,953,440 shares of Platinum to KIN with selling price of Rp 460,000. iii) The AJB No. 335 dated December 31, 2021: SIP agreed to sell 1 share of Platinum to Iforte with selling price of Rp 24,470 (full amount). The AJB No. 94 dated January 14, 2022: SUPR agreed to sell 44,078,375 shares of Platinum to Iforte at a selling price of Rp 1,069,728.
t	BIT dan/ and PT Alita Praya Mitra ("Alita")	Akta Jual Beli Aset/ Deed of sale and purchase of assets	30 September 2022/ September 30, 2022	-	Akta Jual Beli Aset ("AJB") No. 252 tanggal 30 September 2022: PT Alita Praya Mitra menjual Aset fiber optic kepada BIT dengan nilai transaksi sebesar Rp804.663/ Deed of Sale and Purchase of Assets ("AJB") No. 252 dated 30 September 2022: PT Alita Praya Mitra sold fiber optic assets to BIT with a transaction value of Rp804,663
u	Iforte dan/ and PT Suya Subang Smartpollian	Perjanjian Konsorsium/ Consortium Agreement	5 Desember 2022/ December 5, 2022	-	Perjanjian Konsorsium untuk membangun, mengembangkan dan mengoperasikan jaringan FO dan infrastruktur FO di Subang Smartpollian / Consortium Agreement to construct, develop and operate the FO network and the FO infrastructure in Subang Smartpollian
v	Iforte dan/ and PT Abadi Tamban Mitra International ("ATMI")	Perjanjian Saham/ Subscription Agreement	21 Desember 2022/ December 21, 2022	-	Perjanjian Pengambilan Saham/ Subscription Agreement

125

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Para pihak/ Parties	Jenis Perjanjian/ Type of Agreement	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Jangka waktu perjanjian/ Term of agreement	Amandemen terakhir/ Latest amendment	Keterangan/ Explanation
w	Iforte dan/ and Seven Bank, Ltd, PT. Ato Network, Sociodulture, Ltd	Amandemen keenam dan pernyataan kembali dari Perjanjian Joint Venture/ the sixth amendment and restatement of joint venture agreement	21 Desember 2022/ December 21, 2022	-	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2022 dan akan terus berlaku sepuluh (10) tahun sejak tanggal 21 Desember 2022. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap (10) sepuluh tahun, kecuali diminta lain dengan pembantuan tertulis dari salah satu pihak (1) (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya perjanjian/ This agreement shall be effective as of December 21, 2022 and shall continue to be in effect ten (10) years from December 21, 2022. This agreement shall be extended automatically every (10) ten years, unless requested otherwise by written notice from any of the parties one (1) year prior to the expiration date of agreement
x	Iforte dan/ and PT Rajawali Telekomunikasi Selular ("RTS")	Perjanjian Pinjaman/ Loan Agreement	30 Desember 2022/ December 30, 2022	27 Juni 2023/ June 27, 2023	Perjanjian Pinjaman/ Loan Agreement
y	GTP dan/ and XL	Term Sheet untuk Layanan Operasi Lapangan/ Term Sheet for Field Operation Services	19 April 2023/ April 19, 2023	27 Juni 2023/ June 27, 2023	Term Sheet untuk Layanan Operasi Lapangan No. 059/XL/IV/2023 /Term Sheet for Field Operation Services No. 059/XL/IV/2023
z	Iforte dan/ and Alexander Budiman	Akta Jual Beli/ Deed of Sale	23 Mei 2023/ May 23, 2023	-	Akta Jual Beli No. 180 tanggal 23 Mei 2023 antara Alexander Budiman dan PT Iforte Solusi Infotek, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn., Notaris di Jakarta Barat/ Deed of Sale and Purchase No. 180 dated 23 May 2023 between Alexander Budiman and PT Iforte Solusi Infotek, made before Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notary in West Jakarta
aa	Iforte dan/ and PT Smart Telecom ("Smart")	Perjanjian Sewa Peralatan/ Agreement to Lease Equipment	11 April 2023/ April 11, 2023	-	Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/ISI-SMART/IV/2023 antara PT Iforte Solusi Infotek dan PT Smart Telecom, tertanggal 11 April 2023/ Agreement to Lease Equipment No. 001/ISI-SMART/IV/2023 between PT Iforte Solusi Infotek and PT Smart Telecom dated 11 April 2023
ab	STP dan/ and PT Primacom Interbuana	Perjanjian Sewa Induk/ Master Lease Agreement	9 Oktober 2023/ October 9, 2023	-	Perjanjian Sewa Induk No STP: 07/AGR/STP-Primacom/BOD/X/2023, No Primacom: PH-LGL-PKS-2310-0001/ Master Lease Agreement No. STP: 07/AGR/STP-Primacom/BOD/X/2023, No Primacom: PH-LGL-PKS-2310-0001

126

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jumlah estimasi piutang sewa minimum dan pesanan terverifikasi termasuk pendapatan diterima di muka di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Estimasi piutang sewa minimum di masa depan		
Sampai dengan satu tahun	6.446.350	8.625.388
Lebih dari satu tahun		
sampai dengan lima tahun	35.291.264	30.473.195
Lebih dari lima tahun	26.879.469	20.963.308
Total estimasi piutang sewa minimum di masa depan	68.617.083	60.061.891
Pesanan terverifikasi dan pendapatan diterima di muka (tidak diaudit)	5.864.305	8.375.223
Total	74.481.388	68.437.114

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah telecommunication sites dan total sewa per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

	31 Desember/ December 31, 2023			31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/ Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa/ Number of total sites leases	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/ Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa/ Number of total sites leases
Perseroan dan entitas anaknya/ The Company and its subsidiaries	30.558	28.413	54.284	29.794	28.649	53.967

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta saldo dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Aset		
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Kas dan bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	111.899	53.532
PT Bank BCA Syariah	160	-
Dolar AS		
PT Bank Central Asia Tbk	18	265
Subtotal	112.077	53.797
Piutang usaha		
PT Alto Network	5.441	-
PT Bank Central Asia Tbk	4.540	352
PT Hartono Plantation Indonesia	1.254	1.255
PT Asuransi Jiwa BCA	280	-
PT Grand Indonesia	168	288
PT Djarum	112	-
PT Angkasa Komunikasi		
Global Utama	72	-
PT BCA Multi Finance	63	-
PT BCA Finance	41	22
PT Asuransi Umum BCA	27	-
PT Djelas Tandatangan Bersama	13	-
PT Global Digital Niaga Tbk	8	-
PT Bank BCA Syariah	6	228
PT Hartono Istana Teknologi	5	-
PT Sarana Kencana Mulya	4	-
PT Global Tiket Network	-	51
PT Global Distribusi Pusaka	-	34
Subtotal	12.034	2.230
Piutang lain-lain		
PT Saptadaya Bumitama Persada	186	1.303
Direksi entitas anak	16	-
Subtotal	202	1.303
Aset tidak lancar lainnya		
Direksi entitas anak	20.000	20.000
<u>Perusahaan induk</u>		
Piutang lain-lain		
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	5	1.358
Total	144.318	78.688
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset	0,21%	0,12%

37. RELATED PARTIES INFORMATION

The following table provides balances and the total amount of transactions that have been entered into related party for the years ended December 31, 2023 and 2022, as well as balances with related parties as of December 31, 2023 and 2022.

Balances with related parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Assets		
<u>Other related parties</u>		
Cash on hand and in banks		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	53.532	-
PT Bank BCA Syariah	-	-
US Dollar		
PT Bank Central Asia Tbk	265	-
Subtotal	53.797	-
Trade receivables		
PT Alto Network	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	352	-
PT Hartono Plantation Indonesia	1.255	-
PT Asuransi Jiwa BCA	-	-
PT Grand Indonesia	288	-
PT Djarum	-	-
PT Angkasa Komunikasi		
Global Utama	-	-
PT BCA Multi Finance	-	-
PT BCA Finance	22	-
PT Asuransi Umum BCA	-	-
PT Djelas Tandatangan Bersama	-	-
PT Global Digital Niaga Tbk	-	-
PT Bank BCA Syariah	228	-
PT Hartono Istana Teknologi	-	-
PT Sarana Kencana Mulya	-	-
PT Global Tiket Network	51	-
PT Global Distribusi Pusaka	34	-
Subtotal	2.230	-
Other receivables		
PT Saptadaya Bumitama Persada	1.303	-
The subsidiary's Director	-	-
Subtotal	1.303	-
Other non-current assets		
The subsidiary's Director	20.000	-
<u>Parent company</u>		
Other receivables		
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.358	-
Total	78.688	-
Percentage of total assets involving related parties to total assets	0,12%	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)
Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):			Balances with related parties are as follows (continued):
Liabilitas			Liabilities
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			Tower construction and other trade payables
PT Bach Multi Global	59.185	-	PT Bach Multi Global
PT Bach Multi Infrastruktur	42.916	-	PT Bach Multi Infrastruktur
PT Alto Network	3.082	-	PT Alto Network
PT Global Digital Niaga Tbk	898	-	PT Global Digital Niaga Tbk
PT Grand Indonesia	123	-	PT Grand Indonesia
Subtotal	106.204	-	Subtotal
Utang lain-lain			Other payables
Direksi entitas anak	18.630	-	The subsidiary's Director
PT Bach Multi Sukses Investama	10.217	-	PT Bach Multi Sukses Investama
MC Payment Limited	5.622	-	MC Payment Limited
PT BCA Finance	155	-	PT BCA Finance
Subtotal	34.624	-	Subtotal
Utang bank (Catatan 18)			Bank loan (Note 18)
PT Bank Central Asia Tbk	6.566.983	8.238.234	PT Bank Central Asia Tbk
Pendapatan ditangguhkan			Unearned revenue
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	29.051	32.423	PT Angkasa Komunikasi Global Utama
PT Djarum	2.684	3.056	PT Djarum
PT Asuransi Jiwa BCA	243	-	PT Asuransi Jiwa BCA
PT Asuransi Umum BCA	37	-	PT Asuransi Umum BCA
PT BCA Finance	11	-	PT BCA Finance
PT Djelas Tandatanganan Bersama	8	-	PT Djelas Tandatanganan Bersama
PT Akar Inti Solusi	5	-	PT Akar Inti Solusi
PT Global Digital Niaga Tbk	4	-	PT Global Digital Niaga Tbk
Subtotal	32.043	35.479	Subtotal
Pinjaman pihak berelasi			Related parties loan
PT Sentral Investama Andalan	52.500	-	PT Sentral Investama Andalan
The Tje Min	2.000	-	The Tje Min
Subtotal	54.500	-	Subtotal
Total	6.794.354	8.273.713	Total
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	13%	16%	Percentage of total liabilities involving related parties to total liabilities

Aset tidak lancar lainnya dari Direksi entitas anak merupakan piutang yang diberikan kepada Direksi entitas anak.

Other non-current assets from the subsidiary's Director represents loan given to a subsidiary's Director.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,		37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)
	2023	2022	
Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:			Transactions with related parties are as follows:
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Pendapatan	165.022	140.628	Revenues
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan	1%	1%	Percentage of revenue involving related parties to total revenues
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Amortisasi aset hak-guna	31.636	27.685	Amortization of right-of-use assets
Asuransi kesehatan	15.165	14.575	Medical insurance
Total	46.801	42.260	Total
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi	4%	5%	Percentage of operating expense involving related parties to total selling and marketing expenses and general and administrative expenses
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Penghasilan keuangan			Finance income
PT Bank Central Asia Tbk	1.587	3.202	PT Bank Central Asia Tbk
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	8%	14%	Percentage of finance income involving related party to total finance income
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>			<u>Other related parties</u>
Biaya keuangan			Finance costs
PT Bank Central Asia Tbk	447.983	400.513	PT Bank Central Asia Tbk
Persentase biaya keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	16%	17%	Percentage of finance cost involving related parties to total finance cost

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Sifat hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Transaksi/ Transactions
• Perusahaan induk/ <i>Parent company</i>	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Piutang lain-lain, surat berharga, biaya manajemen dan perijinan/ <i>Other receivables, marketable securities, management fees, license</i>
Pihak-pihak berelasi lainnya/ <i>Other related parties:</i>		
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas di bank, piutang usaha, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan/ <i>Cash in bank, trade receivable, loan, revenues, finance income and finance costs</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Global Digital Niaga Tbk	Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan ditangguhkan/ <i>Trade receivable, trade payable and unearned revenue</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Alto Network, PT Global Media Visual	Piutang usaha dan utang usaha/ <i>Account receivable and trade payable</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT BCA Finance	Piutang usaha, utang lain-lain, pendapatan ditangguhkan/ <i>Trade receivable, other payable, unearned revenue</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Asuransi Jiwa BCA, PT BCA Finance, PT Asuransi Umum BCA	Piutang usaha, pendapatan ditangguhkan/ <i>Trade receivable, unearned revenue</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Angkasa Komunikasi Global Utama, PT Fajar Surya Swadaya	Piutang usaha, pendapatan/ <i>Trade receivable, revenue</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Bank Digital BCA, PT BCA Sekuritas, PT Hartono Istana Teknologi, PT Sarana Kencana Mulya, PT BCA Multi Finance, PT BCA Syariah	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali/ <i>Family relationship with ultimate shareholders</i>	PT Hartono Plantation Indonesia	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara/ <i>Cooperation in the provision of tower infrastructure</i>
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/ <i>Affiliated party based on shareholding composition</i>	PT Djarum	Piutang usaha, pendapatan ditangguhkan, pendapatan/ <i>Trade receivable, unearned revenue, revenue</i>
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/ <i>Affiliated party based on shareholding composition</i>	PT Grand Indonesia	Piutang usaha, utang usaha, pembayaran sewa kantor/ <i>Trade receivable, trade payable, payment of office lease</i>
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/ <i>Affiliated party based on shareholding composition</i>	PT Global Tiket Network, PT Global Distribusi Pusaka	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

Sifat hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Transaksi/ Transactions
Pihak-pihak berelasi lainnya (lanjutan)/ <i>Other related parties (continued):</i>		
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/ <i>Affiliated party based on shareholding composition</i>	PT Global Distribusi Pusaka	Piutang usaha/ <i>Trade receivable</i>
• Hubungan afiliasi dengan iForte/ <i>Affiliated party with iForte</i>	PT Djelas Tandatangan Bersama	Piutang usaha, pendapatan ditangguhkan/ <i>Trade receivable, unearned Income</i>
• Hubungan afiliasi dengan iForte/ <i>Affiliated party with iForte</i>	PT Akar Inti Solusi	Pendapatan ditangguhkan/ <i>Unearned revenue</i>
• Hubungan afiliasi dengan GTP/ <i>Affiliated party with GTP</i>	PT Bach Multi Infrastruktur	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
• Hubungan afiliasi dengan IPI/ <i>Affiliated party with IPI</i>	PT Sentral Investama Andalan, The Tje Min	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Related parties loan</i>
• Hubungan afiliasi dengan IPI/ <i>Affiliated party with IPI</i>	MC Payment Limited	Utang lain-lain/ <i>Other payable</i>
• Hubungan afiliasi dengan IPI/ <i>Affiliated party with IPI</i>	PT Leni Jaya Tobacco	-
• Perusahaan dibawah pemegang saham yang sama dengan komisaris iForte/ <i>Entity under direct ownership of iForte's Commissioner</i>	PT Saptadaya Bumitama Persada	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>
• Perusahaan di bawah kepemilikan langsung iForte/ <i>Entity under direct ownership of iForte</i>	PT Abadi Tambah Mulia International	-
• Perusahaan di bawah kepemilikan langsung GTP/ <i>Entity under direct ownership of GTP</i>	PT Bach Multi Global	Utang usaha, utang lain-lain/ <i>Trade payable, other payable</i>
• Hubungan afiliasi dengan GTP/ <i>Affiliated party with GTP</i>	PT Bach Multi Sukses Investama	utang lain-lain/ <i>other payable</i>
• Direktur dari PT Istana Kohinoor/ <i>PT Istana Kohinoor's Director</i>	Amir Hamzah	Aset tidak lancar lainnya/ <i>Other non-current asset</i>
• Direktur dari PT Istana Kohinoor/ <i>PT Istana Kohinoor's Director</i>	Alexander Budiman	Piutang lain-lain, utang lain-lain/ <i>Other receivable, other payable</i>

Transaksi dengan pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan entitas anaknya. Total kompensasi personil manajemen kunci Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Imbalan kerja jangka pendek Dewan Komisaris	19.201	10.997
Direksi	194.176	116.316
Imbalan kerja jangka panjang Direksi	7.143	6.598
	220.520	133.911

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

38. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan entitas anaknya memiliki dua segmen sebagai berikut:

- Penyewaan menara
- Jasa lainnya

Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. RELATED PARTIES INFORMATION
(continued)**

Key management personnel of the Company are Board of Commissioners and Directors of the Company and its subsidiaries. The compensation of key management personnel of the Company and its subsidiaries are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Short-term employee benefits Board of Commissioners Directors	19.201	10.997
Long-term employee benefits Directors	194.176	116.316
	7.143	6.598
	220.520	133.911

The amounts disclosed in the table above are the amounts recognized as expenses during the reporting period related to compensation to the key management personnel.

There are no compensation of other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

38. OPERATING SEGMENTS

The Company and its subsidiaries have two segments as follows:

- Tower rental
- Other services

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

The management as the Company's chief operating decision maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Services	Jumlah/ Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan			
Pendapatan sewa	8.346.311	2.187.736	10.534.047
Jasa dan lainnya	55.746	1.150.552	1.206.298
Laba bruto	6.167.557	2.045.787	8.213.344
Beban penjualan dan pemasaran	(93.589)	(144.519)	(238.108)
Beban umum dan administrasi	(538.671)	(279.297)	(817.968)
Beban usaha lainnya, neto	(159.947)	(34.764)	(194.711)
Laba usaha	5.375.350	1.587.207	6.962.557
Penghasilan keuangan, neto	14.685	5.814	20.499
Biaya keuangan	(2.329.308)	(528.719)	(2.858.027)
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	3.060.727	1.064.302	4.125.029
Pajak final	(557.918)	-	(557.918)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.502.809	1.064.302	3.567.111
Beban pajak penghasilan	(62.308)	(179.926)	(242.234)
Laba tahun berjalan	2.440.501	884.376	3.324.877
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Total aset segmen	55.173.435	13.219.240	68.392.675
Total liabilitas segmen	(38.538.846)	(13.347.709)	(51.886.555)
INFORMASI LAINNYA			
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	7.083.987	1.854.968	8.938.955
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.407.851)	(3.139.009)	(4.546.860)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(6.459.956)	2.189.049	(4.270.907)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

For the year ended December 31, 2023

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Revenues	10.534.047
Rental income	1.206.298
Services and others	8.213.344
Gross profit	(238.108)
Selling and marketing expenses	(817.968)
General and administrative expenses	(194.711)
Other operating expenses, net	6.962.557
Operating profit	20.499
Finance income, net	(2.858.027)
Finance costs	4.125.029
Profit before final tax and corporate income tax expense	(557.918)
Final tax	
Profit before corporate income tax expense	3.567.111
Corporate income tax expense	(242.234)
Profit for the year	3.324.877

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION**

Total segment assets	68.392.675
Total segment liabilities	(51.886.555)

OTHER INFORMATION
Net cash flows provided by operating activities

Net cash flows used in investing activities	(4.546.860)
Net cash flows provided by (used in) financing activities	(4.270.907)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Services	Jumlah/ Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan			
Pendapatan sewa	8.605.930	1.606.388	10.212.318
Jasa dan lainnya	-	823.332	823.332
Laba bruto	6.665.005	1.456.893	8.121.898
Beban penjualan dan pemasaran	(80.564)	(88.199)	(168.763)
Beban umum dan administrasi	(529.889)	(182.038)	(711.927)
Beban usaha lainnya, neto	(361.002)	(21.130)	(382.132)
Laba usaha	5.693.550	1.165.526	6.859.076
Penghasilan keuangan, neto	21.518	1.881	23.399
Biaya keuangan	(2.162.458)	(229.343)	(2.391.801)
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	3.552.610	938.064	4.490.674
Pajak final	(511.220)	-	(511.220)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.041.390	938.064	3.979.454
Beban pajak penghasilan	(279.509)	(171.987)	(451.496)
Laba tahun berjalan	2.761.881	766.077	3.527.958
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Total aset segmen	55.523.978	10.076.870	65.600.848
Total liabilitas segmen	(41.466.218)	(9.703.679)	(51.169.897)
INFORMASI LAINNYA			
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.795.331	1.306.646	8.101.977
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.809.033)	(3.078.830)	(5.887.863)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(10.400.269)	3.669.495	(6.730.774)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022			
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset					Assets	
Kas	USD	20.000	308	20.000	315	Cash on hand
Rekening giro						Current accounts
Pihak ketiga	USD	1.951.803	30.089	845.780	13.307	Third parties
Pihak berelasi	SGD	627.017	7.343	627.307	7.314	Related parties
Piutang usaha - pihak ketiga	USD	1.195	18	16.874	265	Trade receivables - third parties
Uang muka	USD	2.765.266	42.629	231.604	3.643	Cash advance
Aset tidak lancar lainnya	USD	1.208	19	-	-	Other non-current assets
Investasi instrumen keuangan	USD	321.980	4.964	321.980	5.065	Investment in financial instrument
Piutang derivatif	GBP	1.800.000	35.568	1.800.000	34.067	Derivative receivable
	USD	-	-	32.197.668	506.502	
Piutang derivatif	USD	10.187.516	157.051	18.211.436	286.484	Derivative receivable
Total aset	USD	15.248.968	235.078	51.845.342	815.581	Total assets
	SGD	627.017	7.343	627.307	7.314	
	GBP	1.800.000	35.568	1.800.000	34.067	
Liabilitas						Liabilities
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	USD	1.280.874	19.746	70.839	1.114	Tower construction and other trade payables
Akrua	SGD	2.720	32	-	-	Accruals
Utang lain-lain	USD	356.855	5.501	1.658.880	26.096	Other payables
Utang bank - pihak ketiga	SGD	36.863	432	40.068	467	Bank loans - third parties
Utang obligasi	USD	753	12	753	12	Bonds payable
Utang derivatif	USD	276.280.000	4.259.133	174.800.000	2.749.779	Derivatives payable
Utang sewa	SGD	180.000.000	2.108.095	180.000.000	2.098.634	Lease liabilities
	SGD	501.764	5.868	3.365.552	39.427	
	USD	2.470.515	38.085	-	-	
	USD	11.026.105	169.978	25.578.818	402.380	
Total liabilitas	USD	291.415.102	4.492.455	202.109.290	3.179.381	Total liabilities
	SGD	180.541.347	2.114.427	183.405.620	2.138.528	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN**

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anak, terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang bank, utang obligasi dan utang swap valuta asing. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan entitas anak memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang timbul dari kegiatan usaha entitas anak.

Perseroan dan entitas anak terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perseroan dan entitas anak mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Perseroan dan entitas anak didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk entitas anak. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada manajemen senior Perseroan dan entitas anak bahwa aktivitas keuangan Perseroan dan entitas anak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga, utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga, utang bank, utang lain-lain dan akrual.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Entitas anak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES**

The Company and its subsidiaries financial liabilities are comprised of tower construction and other trade payables, short-term employee benefits liability, accruals, bank loans, bonds payable and cross currency swap payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the Company and its subsidiaries operations. The Company and its subsidiaries have cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables - third parties, and other non-current assets - deposits that arise directly from its subsidiaries operations.

The Company and its subsidiaries are exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries' senior management oversees the management of these risks. The Company and its subsidiaries' senior management is supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the subsidiary. The Financial Risk Committee provides assurance to the Company and its subsidiaries' senior management that the Company and its subsidiaries' financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Company's Directors review and agree on policies for managing each of these risks which are summarized below.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices comprise two type of risk: interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalents, trade receivables - third parties, tower construction and other trade payables - third parties, bank loans, other payables and accruals.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The subsidiaries' exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the subsidiaries' bank loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis and by entering into derivatives transactions.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ Increase/ decrease in basis point	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on profit before tax expense	
31 Desember 2023			December 31, 2023
Rupiah	+100	(317.447)	Rupiah
Rupiah	-100	317.447	Rupiah
Dolar AS	+100	(42.591)	US Dollar
Dolar AS	-100	42.591	US Dollar
31 Desember 2022			December 31, 2022
Rupiah	+100	(339.127)	Rupiah
Rupiah	-100	339.127	Rupiah
Dolar AS	+100	(35.498)	US Dollar
Dolar AS	-100	35.498	US Dollar

• **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan utang bank dan utang obligasi masing-masing dalam mata uang Dolar AS, dan Dolar Singapura. Perseroan dan entitas anak mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian sewa menara dengan jangka waktu 10 tahun dan 12 tahun dengan Hutchison dalam mata uang Dolar AS dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif. Manajemen Perseroan dan entitas anak berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan entitas anaknya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

• **Interest rate risk (continued)**

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated profit before corporate tax expenses is affected by the impact on floating rate loans as follows:

• **Foreign currency risk**

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company and its subsidiaries' US Dollar, and Singapore Dollar bank loans and bonds payable, respectively. The Company and its subsidiaries manage this risk by entering into 10-year and 12-year tower rental agreements with Hutchison which are denominated in US Dollars and entering derivatives transactions. The Company and its subsidiaries' management believe that this risk management strategy results in a positive benefit for the Company and its subsidiaries both in the short-term and long-term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko mata uang asing (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar AS, Dolar Singapura dan Pound Sterling dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian sebagai berikut:

	Perubahan tingkat Rp/ Change in Rp rate	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on profit before tax expense
31 Desember 2023		
Dolar AS	1%	(63.903)
Dolar AS	-1%	63.903
Dolar Singapura	1%	10
Dolar Singapura	-1%	(10)
Pound Sterling	1%	356
Pound Sterling	-1%	(356)
31 Desember 2022		
Dolar AS	1%	(45.403)
Dolar AS	-1%	45.403
Dolar Singapura	1%	(324)
Dolar Singapura	-1%	324

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan entitas anaknya terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perseroan dan entitas anaknya, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan entitas anaknya kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

• **Foreign currency risk (continued)**

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate againsts the US Dollar, and Singapore Dollar and Pound Sterling with all other variables held constant, with the effect to the consolidated profit before corporate income tax expense as follows:

	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on profit before tax expense
December 31, 2023	
US Dollar	(63.903)
US Dollar	63.903
Singapore Dollar	10
Singapore Dollar	(10)
Pound Sterling	356
Pound Sterling	(356)
December 31, 2022	
US Dollar	(45.403)
US Dollar	45.403
Singapore Dollar	(324)
Singapore Dollar	324

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Company and its subsidiaries' established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

The Company and its subsidiaries maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables as disclosed in Note 6.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit atas penempatan rekening giro dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta kas dan setara kas:

	31 Desember/ December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Past due but not impaired	Ada penurunan nilai/ Impaired	Sub Total/ Sub Total	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ Allowance for expected credit loss	Total/ Total	
Kas dan setara kas	404.942	-	-	404.942	-	404.942	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	122	-	-	122	-	122	Restricted cash in bank
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	3.011.808	62.492	83.020	3.157.320	(83.020)	3.074.300	Third parties
Pihak berelasi	12.034	-	-	12.034	-	12.034	Related parties
Total	3.428.906	62.492	83.020	3.574.418	(83.020)	3.491.398	Total

	31 Desember/ December 31, 2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Past due but not impaired	Ada penurunan nilai/ Impaired	Sub Total/ Sub Total	Cadangan kerugian ekspektasian/ Allowance for expected credit loss	Total/ Total	
Kas dan setara kas	285.187	-	-	285.187	-	285.187	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	16	-	-	16	-	16	Restricted cash in bank
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	2.447.574	108.000	39.657	2.595.231	(39.657)	2.555.574	Third parties
Pihak berelasi	2.230	-	-	2.230	-	2.230	Related parties
Total	2.735.007	108.000	39.657	2.882.664	(39.657)	2.843.007	Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan entitas anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Credit risk (continued)

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Company and its subsidiaries' policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired and cash and cash equivalents:

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company and its subsidiaries have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan entitas anaknya menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan entitas anaknya memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,5)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan dan entitas anaknya dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan entitas anaknya berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2023						December 31, 2023
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	1.206.431	-	-	-	1.206.431	Tower construction and other trade payables
Utang lain-lain	138.159	-	-	-	138.159	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	169.909	-	-	-	169.909	Short-term employee benefits liability
Akrual	1.461.393	-	-	-	1.461.393	Accruals
Utang bank	12.861.467	5.431.204	8.889.931	14.373.787	41.556.389	Bank loans
Utang obligasi	7.470.305	151.308	1.388.115	-	9.009.728	Bonds payable
Utang derivatif	21.922	22.032	-	-	43.954	Derivatives payable
Utang pihak berelasi	54.500	-	-	-	54.500	Related parties loan
Utang sewa	265.310	48.972	38.820	92.316	445.418	Lease liabilities
Total	23.649.396	5.653.516	10.316.866	14.466.103	54.085.881	Total
31 Desember 2022						December 31, 2022
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	839.297	-	-	-	839.297	Tower construction and other trade payables
Utang lain-lain	23.154	-	-	-	23.154	Other payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	156.165	-	-	-	156.165	Short-term employee benefits liability
Akrual	1.539.192	-	-	-	1.539.192	Accruals
Utang bank	10.333.547	5.009.975	8.289.204	21.506.143	45.138.869	Bank loans
Utang obligasi	1.156.552	3.988.006	160.607	923.919	6.229.084	Bonds payable
Utang derivatif	-	-	39.427	-	39.427	Derivatives payable
Utang sewa	386.972	498.731	265.857	825.997	1.977.557	Lease liabilities
Total	14.434.879	9.496.712	8.755.095	23.256.059	55.942.745	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah *net debt to running EBITDA* dengan nilai rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan *debt service coverage ratio* (DSCR) dengan nilai rasio yang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua persyaratan rasio tersebut. Tidak ada rasio yang disyaratkan terkait dengan struktur permodalan.

**Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan**

	2023							
	1 Januari/ January 1	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Arus Kas/ Cash Flow	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Beban tanggungan/ Deferred charges	Lain- lain*/ Others*	31 Desember/ December 31	
Utang bank, neto	37.324.231	-	(1.399.798)	(58.893)	32.427	-	35.897.967	Bank loans, net
Utang obligasi, neto	5.670.380	-	2.784.951	106.510	7.876	-	8.569.717	Bonds payable, net
Pinjaman pihak berelasi	-	54.500	-	-	-	-	54.500	Related parties loan
Utang sewa	1.977.557	-	(1.674.830)	(10.233)	-	152.924	445.418	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	44.972.168	54.500	(289.677)	37.384	40.303	152.924	44.967.602	Total liabilities from financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan (lanjutan)

2022							
	1 Januari/ January 1	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Arus Kas/ Cash Flow	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Beban tanggung/ Deferred charges	Lain- lain*/ Others*	31 Desember/ December 31
Utang bank, neto	38.967.654	-	(1.879.631)	250.429	(14.221)	-	37.324.231
Utang obligasi, neto	5.471.536	-	(11.750)	202.555	8.039	-	5.670.380
Utang sewa	2.545.550	12.777	(1.301.789)	46.858	-	674.161	1.977.557
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	46.984.740	12.777	(3.193.170)	499.842	(6.182)	674.161	44.972.168

*Lain-lain termasuk penambahan bunga atas utang sewa dan penambahan aset hak-guna yang dikreditkan melalui utang sewa.

41. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan entitas anaknya yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

31 Desember/ December 31, 2023		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	404.942	404.942
Kas yang dibatasi penggunaannya	122	122
Piutang usaha		
Pihak ketiga	3.074.300	3.074.300
Pihak berelasi	12.034	12.034
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	58.757	58.757
Pihak berelasi	207	207
Uang muka	41.242	41.242
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	23.232	23.232
Aset keuangan pada nilai wajar		
Investasi instrumen keuangan	35.568	35.568
Piutang derivatif	209.932	209.932
Liabilitas keuangan		
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya		
Pihak ketiga	1.100.227	1.100.227
Pihak berelasi	106.204	106.204
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	103.535	103.535
Pihak berelasi	34.624	34.624
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	169.909	169.909
Akrual	1.461.393	1.461.393
Utang sewa	445.418	445.418
Utang bank		
Pihak ketiga	29.330.984	29.427.520
Pihak berelasi	6.566.983	6.576.314
Utang obligasi	8.569.717	8.570.151
Pinjaman pihak berelasi	54.500	54.500
Liabilitas keuangan pada nilai wajar		
Utang derivatif	43.954	43.954

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2022
Nilai buku/
Carrying value Nilai wajar/
Fair value

	31 Desember/ December 31, 2022 Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	<i>Financial assets</i>
Aset keuangan			
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			<i>Financial assets at amortized cost</i>
Kas dan setara kas	285.187	285.187	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	16	16	<i>Restricted cash in bank</i>
Piutang usaha			<i>Trade receivables</i>
Pihak ketiga	2.555.574	2.555.574	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2.230	2.230	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain			<i>Other receivables</i>
Pihak ketiga	56.620	56.620	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2.661	2.661	<i>Related parties</i>
Uang muka	47.242	47.242	<i>Advances</i>
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	20.270	20.270	<i>Other non-current assets - deposits</i>
Aset keuangan pada nilai wajar			<i>Financial asset at fair value</i>
Investasi instrumen keuangan	540.569	540.569	<i>Investment in financial instruments</i>
Piutang derivatif	286.484	286.484	<i>Derivative receivables</i>
Liabilitas keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			<i>Financial liabilities at amortized cost</i>
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			<i>Tower construction and other trade payables</i>
Pihak ketiga	839.297	839.297	<i>Third parties</i>
Utang lain-lain - pihak ketiga	23.154	23.154	<i>Other payables - third parties</i>
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	156.165	156.165	<i>Short-term employee benefits liability</i>
Akrual	1.539.192	1.539.192	<i>Accruals</i>
Utang sewa	1.977.557	1.977.557	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank			<i>Bank loans</i>
Pihak ketiga	29.085.997	29.211.526	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	8.238.234	8.251.000	<i>Related party</i>
Utang obligasi	5.670.380	5.663.316	<i>Bonds payable</i>
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			<i>Financial liability at fair value</i>
Utang derivatif	39.427	39.427	<i>Derivatives payable</i>

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

The Company and its subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - uang jaminan, utang sewa, dan utang bank dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terkini.
- Nilai wajar dari utang derivatif dan investasi instrumen keuangan - *structured deposit* menggunakan nilai pasar.

42. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.274.332	3.473.448
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar	3.322.620.187	3.322.620.187
Laba per saham (angka penuh)	985	1.045

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments presented in the consolidated statements of financial position are carried at fair value or amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- *Cash and cash equivalents, restricted cash in bank, trade receivables, other receivables, advances, tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, and current portion of bank loans approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.*
- *The fair value of other non-current assets - deposits, lease liabilities, and bank loans are calculated using discounted cash flows at market interest rate.*
- *The fair value of bonds payable are estimated by using the last quoted market price.*
- *The fair value of derivatives payable and investment in financial instrument - structured deposit are based on marked-to-market value.*

42. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

<i>Income for the year attributable to the owners of parent entity</i>
<i>Weighted average number of shares outstanding</i>
<i>Earnings per share (full amount)</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,	
	2023	2022
Penambahan aset hak-guna yang dikreditkan ke utang sewa	1.208.501	657.896
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	22.574	16.868
Penambahan aset tetap yang dikreditkan ke uang muka supplier	326.188	254.810

44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan dan entitas anaknya pada saat standar tersebut berlaku efektif, dan dampak penerapan standar tersebut terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya masih diestimasi. Kecuali disebutkan lain, Perseroan dan entitas anaknya tidak mengharapkan adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya konsolidasian.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

43. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and its subsidiaries are as follows:

*Additions to right-of-use asset credited to lease liabilities
Capitalization of the estimated cost of dismantling of towers
Additions to fixed assets credited to advance for suppliers*

44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company and its subsidiaries when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Company and its subsidiaries are still being estimated. Unless otherwise indicated, the Company and its subsidiaries do not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on its consolidated financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2024

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

This amendment clarifies that only covenants with which entities must comply on or before the reporting date will affect a liability's classification as current or non-current.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 with early adoption permitted.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2024 (lanjutan)**

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang
dengan Kovenan (lanjutan)

Entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amandemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Perseroan dan entitas anaknya saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual
Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Perseroan dan entitas anaknya saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2024
(continued)**

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities
with Covenants (continued)

Entities apply retrospectively amendments to PSAK 1 (October 2020) regarding the classification of a liability as current or non-current for financial reporting starting on or after January 1, 2024 in accordance with PSAK 25. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) in a period that earlier after the issuance of the amendment to PSAK 1 (December 2022) regarding non-current liabilities with covenants, entities also apply the amendment to PSAK 1 (December 2022) in that period. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) for the previous period, the entity shall disclose this fact.

The Company and its subsidiaries are currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company and its subsidiaries' financial reporting.

Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale
and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2024. Earlier application is permitted. The Company and its subsidiaries are currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company and its subsidiaries' financial reporting.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2024 (lanjutan)**

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK
60: Instrumen Keuangan - Pengaturan Pembiayaan
Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2024
(continued)**

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

Amendment of PSAK 2: Statement of cash flows
and PSAK 60: Financial Instruments - Supplier
Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Company and its subsidiaries financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 23 Januari 2024, Perseroan, Iforte dan KIN sebagai debitur dan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur telah menandatangani Perjanjian Perubahan II atas Perjanjian Kredit No: 092/01/2024 sehubungan dengan perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.
- b. Pada tanggal 23 Januari 2024, Perseroan, Iforte dan KIN sebagai nasabah dan PT Bank UOB Indonesia sebagai bank telah menandatangani Perjanjian Perubahan I atas Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No: 114/01/2024 sehubungan dengan perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.
- c. Pada tanggal 25 Januari 2024, DNT melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 04 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan domisili DNT.
- d. Pada tanggal 25 Januari 2024, Kohinoor melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan domisili Kohinoor.
- e. Pada tanggal 25 Januari 2024, PMP melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 06 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan domisili PMP.
- f. Pada tanggal 2 Februari 2024, Konsorsium HTS menerima hasil pemeriksaan restitusi PPN yaitu SKPLB PPN masa pajak Agustus 2021 sebesar Rp3.581 dan STP PPN JLN masa pajak Agustus 2021 sebesar Rp16,5.
- g. Pada tanggal 13 Februari 2024, HEN melakukan perubahan nama menjadi PT Iforte Energi Nusantara ("IEN").
- h. Pada tanggal 13 Februari 2024, QTR melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 1 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi QTR.

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. On January 23, 2024, the Company, Iforte and KIN as the borrower and PT Bank UOB Indonesia as the lender signed Amendment Agreement II of the Credit Agreement No: 092/01/2024 in connection with the extension of the Maturity Date until August 28, 2026.
- b. On January 23, 2024, Company, Iforte and KIN as the customer and PT Bank UOB Indonesia as the bank signed Amendment Agreement I of the Foreign Exchange Facility Agreement No: 114/01/2024 in connection with the extension of the Time Period of Foreign Exchange Transaction Facilities until August 28, 2026.
- c. On January 25, 2024, DNT signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 04 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., in connection with the change of DNT's domicile.
- d. On January 25, 2024, Kohinoor signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 05 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., in connection with the change of Kohinoor's domicile.
- e. On January 25, 2024, PMP signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 06 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., in connection with the change of PMP's domicile.
- f. On February 2 2024, the Consortium HTS received the results of the VAT refund audit, namely SKPLB for VAT for the August 2021 tax period amounting to Rp3,581 and STP JLN VAT for the August 2021 tax period amounting to Rp16.5.
- g. On February 13, 2024, HEN changed its name to PT Iforte Energi Nusantara ("IEN").
- h. On February 13, 2024, QTR signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 1 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., regarding changes to the QTR's Board of Commissioners and Directors.

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- i. Pada tanggal 22 Februari 2024, STP sebagai peminjam, Perseroan sebagai penjamin dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pemberi pinjaman telah menandatangani Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 29 Mei 2023 sehubungan dengan perubahan beberapa syarat dan ketentuan dengan PT CIMB Niaga Tbk.
- j. Pada tanggal 27 Februari 2024, Iforte melakukan penyertaan saham ATMI sejumlah 3.965 saham yang berasal dari penerbitan saham ATMI. Persentase kepemilikan saham tidak berubah.
- k. Pada tanggal 29 Februari 2024, BIT menerima hasil pemeriksaan pajak tahun 2022 yaitu SKPLB PPh Badan tahun 2022 sebesar Rp1.554, SKPKB PPN masa pajak Januari, Maret, April, September dan Oktober 2022 sebesar Rp29, STP PPN masa pajak Januari, Maret, April, September dan Oktober 2022 sebesar Rp22.
- l. Pada tanggal 7 Maret 2024, Perseroan, Iforte dan STP telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Persyaratan Umum Kontrak Valuta Asing dengan PT Bank Mizuho Indonesia.
- m. Pada tanggal 8 Maret 2024, Perseroan dan Iforte sebagai peminjam dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan nilai fasilitas sebesar Rp2.400.000. Berlaku maksimal 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
- n. Pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Integra Kreasitama Solusindo ("IKS") Nomor 63, Iforte melakukan penyertaan modal milik IKS sebanyak 37.500 saham atau 60% dan berlaku efektif sejak diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0101114 tanggal 13 Maret 2024.
- o. Pada tanggal 13 Maret 2024, PMP melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 13 Februari 2024 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi PMP.
- p. Pada tanggal 13 Maret 2024, Kohinoor melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 4 tanggal 13 Februari 2024 di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan Pengurus dan perubahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Kohinoor.

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- i. On February 22, 2024, STP as the borrower, the Company as the guarantor and PT Bank CIMB Niaga Tbk as the lender, signed Amendment Agreement to the Credit Agreement Number 44 dated May 29, 2023 in relation with amendment to the terms and conditions with PT CIMB Niaga Tbk.
- j. On February 27, 2024, Iforte invested in ATMI shares totaling 3,965 shares originating from the issuance of ATMI's shares. Percentage ownership remain unchanged.
- k. On February 29 2024, BIT received the results of the 2022 tax audit, SKPLB CIT for 2022 amounting to Rp1,554, SKPKB for VAT for the January, March, April, September and October 2022 tax period amounting to Rp29, STP for VAT for the tax period January, March, April, September and October 2022 amounting to Rp22.
- l. On March 7, 2024, the Company, Iforte and STP signed Amendment and Restated General Conditions on Foreign Exchange Contract with PT Bank Mizuho Indonesia.
- m. On March 8, 2024, the Company and Iforte as the borrowers and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed the Credit Agreement in the amount of Rp2,400,000. Valid until maximum 3 years since the signing date of the agreement.
- n. On March 12, 2024, based on the Deed of Resolution of Shareholders of PT Integra Kreasitama Solusindo ("IKS") Number 63, Iforte invested 37,500 shares or 60% in IKS and effective since it was received by the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0101114 dated March 13, 2024.
- o. On March 13, 2024, PMP signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 5 dated February 13, 2024 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., in connection with changes to the PMP's Board of Commissioners and Directors.
- p. On March 13, 2024, Kohinoor signed the Deed of Shareholder Decision Statement Number 4 dated February 13, 2024 at Notary Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., in connection with changes in the Management and changes in Kohinoor's Shareholders, Board of Commissioners and Directors.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- q. Pada tanggal 26 Maret 2024, Perseroan, STP, Iforte, BIT dan IEN sebagai debitur dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai kreditur telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit No. 019/PK-1114/III/2024 dengan nilai total fasilitas sebesar maksimal Rp500.000 dengan masing-masing limit yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

46. AKUN-AKUN REKLASIFIKASI

Akun pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi oleh Perseroan dan entitas anaknya agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2023.

Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- q. On March 26, 2024, the Company, STP, Iforte, BIT and IEN as the borrowers with PT Bank QNB Indonesia Tbk as the lender signed the Credit Facility Agreement No. 019/PK-1114/III/2024 with the maximum total facility amount of Rp500.000 with the respective limits agreed by the creditor and debtors.

46. RECLASSIFICATION ACCOUNT

The accounts in the consolidated financial statements dated December 31, 2022 have been reclassified by the Company and its subsidiaries to conform with the account presentation in the 2023 consolidated financial statements.

The details of the reclassification are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022			
	Disajikan sebelumnya/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Reklasifikasi kembali/ As reclassified	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Estimasi pengembalian pajak	306.587	(306.587)	-	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	790.973	306.587	1.097.560	Other non-current assets

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Kantor Pusat | Head Office

Jl. Jend. A. Yani No. 19A

Kudus, Indonesia

Telp : +62 291 431691

Fax : +62 291 431718

Kantor Cabang | Branch Office

Menara BCA, 55th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 1

Jakarta 10310

Telp : +62 21 23585500

